RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru

TAHUN 2026



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini:
    a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan

b. pedoman rancangan penyusunan KUA dan rancangan PPAS.

(2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini:
a. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam Pembangunan Daerah;
b. menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegitan tahun 2026;
c. menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; dan
e. mewujudkan pencapaian sasaran Pembangunan Daerah.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Perangkat Daerah dalam perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD.

Pasal 4

(1) Dokumen RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi Daerah;
c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
d. sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
g. penutup.
(2) Dokumen RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah.
(2) Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c tidak memproyeksikan alokasi transfer alokasi dana khusus sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran antara RKPD tahun 2026 dengan APBD tahun 2026, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada perubahan RKPD tahun 2026.
(3) Sasaran dan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d disertai dengan pagu anggaran setiap kegiatan yang sifatnya indikatif.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 31 Juli 2025
BUPATI BARRU,

INA KARTIKA SARI

Diundangkan di Barru
pada tanggal 31 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 59

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERATURAN BUPATI

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xxxiii

DAFTAR GRAFIK xxxv

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-5

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-7

1.4 Maksud dan Tujuan I-11

1.5 Sistematika Dokumen RKPD..... I-12

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 Kondisi Umum Daerah II-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Barru II-1

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-13

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana II-27

2.1.1.4 Kondisi Demografi II-36

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-40

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-40

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial II-63

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-79

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib II-79

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-145

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan II-227

2.1.3.4 Fokus Penunjang Urusan Pemerintah II-236

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II-255

2.1.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur II-255

2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi II-259

2.1.4.3 Produktivitas Total Daerah II-266

2.2 Capaian Indikator Pembangunan Daerah..... II-263

2.2.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru II-267

2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pemerintah Kabupaten Barru II-267
2.2.3 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-269
2.2.4 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-295
2.2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistanable Devwlopment Goals (TPB/SDGs) II-298
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-305
2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2024 .... II-305
2.4 Permasalahan Pembangunan II-344
2.4.1 Permasalahan Umum Daerah..... II-344
2.5 Isu Strategis II-349
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah III-2
3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah III-3
3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Global III-5
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional III-22
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan III-28
3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Barru ... III-30
3.2 Kebijakan Keuangan Daerah III-31
3.2.2Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-31
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-37
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-87
3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan..... III-88
3.4 Pendanaan Pembangunan Lainnya III-90
3.5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) III-91
3.5.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) III-91
3.5.3 Penbiayaan Utang Daerah III-92
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-12

4.2.1 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 ..... IV-12
4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026 ..... IV-13
4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 ..... IV-14
4.2.1.3 Arah Kebijakan dan Prioritas PembangunanNasional Tahun 2026 .. IV-15
4.2.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ..... IV-16
4.2.2.1 Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ..... IV-16
4.2.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ..... IV-17
4.2.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ..... IV-20
4.2.3 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 .. IV-25
4.2.3.1 Tema Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 ..... IV-25
4.2.3.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 ..... IV-28
4.2.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 ..... IV-29
4.2.3.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 ..... IV-30
4.2.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) IV-45
4.3 Arah Kebijakan dan Strategi Sasaran Pembangunan..... IV-47
4.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan..... IV-48
4.3.2 Strategi Pembangunan Daerah IV-49
4.4 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten IV-51
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2026 ..... V-1
5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 V-16
BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH VI-1
6.1 Indikator Makro Pembangunan VI-1
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) VI-2
6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) VI-3
6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) VI-5
6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB)/ *Sustasinable Development Goals* (SDGs) VI-9
BAB VII.PENUTUP VII-1
7.1 Kaidah Pelaksanaan VII-1
7.2 Kesimpulan VII-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa Kabupaten Barru Tahun 2024	II-2
Tabel 2.2	Keadaan Wilayah Berdasarkan Ketinggian diatas Permukaan laut Kabupaten Barru Tahun 2024	II-3
Table 2.3	Keadaan Wilayah Berdasarkan Kemiringan Kabupaten Barru tahun 2024	II-4
Tabel 2.4	Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2024	II-7
Tabel 2.5	Jenis Tanah Kabupaten Barru Tahun 2024	II-9
Tabel 2.6	Sungai mengalir menurut Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Barru Tahun 2024	II-9
Tabel 2.7	Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Barru Tahun2024	II-10
Tabel 2.8	Status Daya Dukung Air di Kabupaten Barru Tahun 2024	II-12
Tabel 2.9	Jumlah Hari Hujan Dan Curah Hujan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024	II-12
Tabel 2.10	Jumlah Hari Hujan Dan Curah Hujan Menurut Bulan Kabupaten Barru Tahun 2024	II-13
Tabel 2.11	Luas Arahan Kawasan Budidaya Kabupaten Barru Tahun 2024	II-14
Tabel 2.12	Luas Kawasan Hutan Kabupaten Barru Tahun 2024 ..	II-15
Tabel 2.13	Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru Tahun 2022-2024	II-29
Tabel 2.14	Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Oleh Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru 2022-2024	II-29
Tabel 2.15	Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Kab. Barru Tahun 2024	II-30
Tabel 2.16	Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir di Kab. Barru Tahun 2024	II-31
Tabel 2.17	Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor Kabupaten Barru Tahun 2024	II-33

Tabel 2.18 Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2024 ..... II-34
Tabel 2.19 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024 ..... II-36
Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Barru (Jiwa) Tahun 2024 ..... II-37
Tabel 2.21 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-38
Tabel 2.22 Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga Kab. Barru Tahun 2020-2024 ..... II-38
Tabel 2.23 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-39
Tabel 2.24 Rasio Ketergantungan Kabupaten Barru Tahun 2019 – 2024 ..... II-40
Tabel 2.25 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Konstan (ADHK) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), Tahun 2020-2024 ..... II-41
Tabel 2.26 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), Tahun 2020-2024 ..... II-42
Tabel 2.27 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Barru (Persen), 2020-2024 ..... II-43
Tabel 2.28 Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan UsahaKabupaten Barru Tahun 2020-2024 .. II-44
Tabel 2.29 Perbandingan PDRB Atas Harga Konstan (ADHK) dan Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2029-2024 (Miliar Rupiah) II-45
Tabel 2.30 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 .... II-48
Tabel 2.31 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barru Barru Tahun 2020-2024 ..... II-49
Tabel 2.32 Perbandingan Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 -2024 ..... II-51
Tabel 2.33 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2020 – 2024 ..... II-53

Tabel 2.34 Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-53
Tabel 2.35 Penentuan nilai selang kelas hirarki untuk Analisis Skalogram II-56
Tabel 2.36 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kab.Barru Tahun 2020-2024 ..... II-59
Tabel 2.37 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab.Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2020-2024 .. II-61
Tabel 2.38 Persentase PAD terhadap Pendapatan di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-63
Tabel 2.39 Angka IPM dan Indikator Pendukungnya di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-66
Tabel 2.40 Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020-2024 ..... II-67
Tabel 2.41 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020-2024 ..... II-69
Tabel 2.42 Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020-2024 ..... II-70
Tabel 2.43 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2020-2024 (dalam Ribu/Orang/Tahun) II-70
Tabel 2.44 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-72
Tabel 2.45 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2020-2024 ..... II-73
Tabel 2.46 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2020-2024 ..... II-74
Tabel 2.47 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-76
Tabel 2.48 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Barru Tahun 2022-2024 ..... II-77
Tabel 2.49 Komponen Penilaian Hasil EvaluasiAtas Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2022-2024 ..... II-78
Tabel 2.50 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-79
Tabel 2.51 Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-79
Tabel 2.52 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-80
Tabel 2.53 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/ Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-81
Tabel 2.54 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-82
Tabel 2.55 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI & SMP/MTs Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-83
Tabel 2.56 Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-84
Tabel 2.57 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI dan SMP/MTs di Kab.Barru 2020-2024 ..... II-85
Tabel 2.58 Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024. II-86
Tabel 2.59 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-87
Tabel 2.60 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-88
Tabel 2.61 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidakbuta aksara) Kabupaten BarruTahun 2020-2024 II-90
Tabel 2.62 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-91
Tabel 2.63 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-92
Tabel 2.64 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kab.Barru Tahun 2020-2024 ..... II-93

Tabel 2.65 Angka Kematian Balita (AKBa)/1000 kelahiran hidup Kab.Barru Tahun 2020-2024 ..... II-94
Tabel 2.66 Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup Kab.Barru Tahun 2020-2024 ..... II-95
Tabel 2.67 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-96
Tabel 2.68 Rasio Posyandu Persatuan Balita Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-97
Tabel 2.69 Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000 jumlah penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-98
Tabel 2.70 Rasio rumah sakit/1.000 jumlah penduduk Tahun 2020-2024 ..... II-98
Tabel 2.71 Rasio Dokter Persatuan penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-99
Tabel 2.72 Rasio Tenaga Medis per 1.000 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-100
Tabel 2.73 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-101
Tabel 2.74 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Barru 2020-2024 ..... II-102
Tabel 2.75 Cakupan Desa Keluran UCI Kab. Barru Tahun 2020-2024 ..... II-103
Tabel 2.76 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-104
Tabel 2.77 Prevalensi Stunting Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 II-105
Tabel 2.78 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-106
Tabel 2.79 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-107
Tabel 2.80 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-108
Tabel 2.81 Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Tahun 2020-2024 ..... II-108
Tabel 2.82 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Barru Tahun 2020-2024II-109
Tabel 2.83 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 pddk)

Tahun 2020-2024 ..... II-110
Tabel 2.84 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-111
Tabel 2.85 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ... II-112
Tabel 2.86 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-113
Tabel 2.87 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2020-2024 ..... II-114
Tabel 2.88 Penderita diare yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-115
Tabel 2.89 Angka kejadian Malaria Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-115
Tabel 2.90 Tingkat kematian akibat malaria Tahun 2020-2024 ... II-116
Tabel 2.91 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ... II-117
Tabel 2.92 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Tahun 2020-2024 ..... II-118
Tabel 2.93 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-119
Tabel 2.94 Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-120
Tabel 2.95 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-121
Tabel 2.96 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-122
Tabel 2.97 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Tahun 2020-2024 ..... II-122
Tabel 2.98 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-123
Tabel 2.99 Cakupan Pemberian MP ASI Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-125
Tabel 2.100 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Tahun 2020-2024 ..... II-126
Tabel 2.101 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat

miskin Kab.Barru Tahun 2020-2024 ..... II-127
Tabel 2.102 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-128
Tabel 2.103 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Tahun 2020-2024 ..... II-129
Tabel 2.104 Kondisi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-130
Tabel 2.105 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-130
Tabel 2.106 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 II-131
Tabel 2.107 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pebuangan air (minimal 1,5 m) di Kabupaten Barru Tahun 2019 - 2024 ..... II-132
Tabel 2.108 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-133
Tabel 2.109 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-133
Tabel 2.110 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024 ..... II-134
Tabel 2.111 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-135
Tabel 2.112 Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-136
Tabel 2.113 Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-137
Tabel 2.114 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kab.Barru Tahun 2021-2024 ..... II-138
Tabel 2.115 Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024 ..... II-138
Tabel 2.116 Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-139
Tabel 2.117 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kab.Barru Tahun 2020-2024 ..... II-140
Tabel 2.118 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,

Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-141
Tabel 2.119 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-141
Tabel 2.120 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-142
Tabel 2.121 Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-143
Tabel 2.122 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-144
Tabel 2.123 Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-145
Tabel 2.124 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-146
Tabel 2.125 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-147
Tabel 2.126 Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-147
Tabel 2.127 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-148
Tabel 2.128 Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-149
Tabel 2.129 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-150
Tabel 2.130 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan kewirausahaan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-150
Tabel 2.131 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-151
Tabel 2.132 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-152
Tabel 2.133 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-153
Tabel 2.134 Rasio KDRT terhadap Total Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-154

Tabel 2.135 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-154
Tabel 2.136 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-155
Tabel 2.137 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-156
Tabel 2.138 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-157
Tabel 2.139 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-157
Tabel 2.140 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-158
Tabel 2.141 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-158
Tabel 2.142 Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan keamanan Pangan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-159
Tabel 2.143 Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-160
Tabel 2.144 Tersusunnya RPLH dan TerintegrasinyanRPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-161
Tabel 2.145 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-162
Tabel 2.146 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru

Tahun 2020-2024 ..... II-163
Tabel 2.147 Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-165
Tabel 2.148 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat PengawasLingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-165
Tabel 2.149 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan LidupKabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-166
Tabel 2.150 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-166
Tabel 2.151 Timbulan Sampah yang ditangani di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-167
Tabel 2.152 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-168
Tabel 2.153 Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-168
Tabel 2.154 Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-169
Tabel 2.155 Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-169
Tabel 2.156 Rasio Bayi dan Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-170
Tabel 2.157 Rasio Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru Tahun 2022-2024..... II-171
Tabel 2.158 Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-171
Tabel 2.159 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-172
Tabel 2.160 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-173
Tabel 2.161 Cakupan penerbitan akte kelahiran di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-174

Tabel 2.162 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-175
Tabel 2.163 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-175
Tabel 2.164 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-176
Tabel 2.165 Persentase LSM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-176
Tabel 2.166 Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-177
Tabel 2.167 Persentase PKK Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-178
Tabel 2.168 Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... . II-179
Tabel 2.169 Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-180
Tabel 2.170 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-181
Tabel 2.171 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-181
Tabel 2.172 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-182
Tabel 2.173 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-183
Tabel 2.174 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan di Kabupaten Barru Tahun 2021..... II-184
Tabel 2.175 Rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2020-2024.. II-184
Tabel 2.176 Rasio akseptor KB Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.. II-185
Tabel 2.177 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-186

Tabel 2.178 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Barru Tahun 2020-2024.. II-187
Tabel 2.179 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi II-188
(unmet need) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-189
Tabel 2.180 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-189
Tabel 2.181 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-190
Tabel 2.182 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-191
Tabel 2.183 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-192
Tabel 2.184 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-192
Tabel 2.185 Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-193
Tabel 2.186 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-194
Tabel 2.187 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat DaerahKabupaten Barru Tahun 2020-2024.. II-194
Tabel 2.188 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-196
Tabel 2.189 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-197
Tabel 2.190 Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat Kontrasepsi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-197
Tabel 2.191 Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah)Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-198
Tabel 2.192 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-199
Tabel 2.193 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-200

Tabel 2.194 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-201
Tabel 2.195 Jumlah Uji Kir Angkutan umum Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-202
Tabel 2.196 Rasio Ijin Trayek Kabupaten Barru Tahun 2020-2024... II-202
Tabel 2.197 Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis Kabupaten Barru Tahun 2019– 2024 ..... II-203
Tabel 2.198 Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-204
Tabel 2.199 Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-204
Tabel 2.200 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Tahun 2020-2024 ..... II-204
Tabel 2.201 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Pertahun di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-205
Tabel 2.202 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-206
Tabel 2.203 Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-207
Tabel 2.204 Persentase BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-208
Tabel 2.205 Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-208
Tabel 2.206 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-209
Tabel 2.207 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-210
Tabel 2.208 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-211
Tabel 2.209 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-211
Tabel 2.10 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-212
Tabel 2.211 Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-214
Tabel 2.212 Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-215
Tabel 2.213 Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Barru

Tahun 2020-2024 ..... II-215
Tabel 2.214 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-215
Tabel 2.215 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-216
Tabel 2.216 Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-217
Tabel 2.217 Buku ”Kabupaten Barru Dalam Angka” dan Buku ”PDRB Kabupaten Barru” Tahun 2020-2024..... II-218
Tabel 2.218 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-218
Tabel 2.219 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-219
Tabel 2.220 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-220
Tabel 2.221 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-221
Tabel 2.222 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-221
Tabel 2.223 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-222
Tabel 2.224 Koleksi Buku dan Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-223
Tabel 2.225 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-224
Tabel 2.226 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-224
Tabel 2.227 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-225
Tabel 2.228 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Barru Tahun 2020-2024..... II-226
Tabel 2.229 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-227
Tabel 2.230 Kunjungan Wisata Kabupaten Barru Tahun 2019–2024. II-227
Tabel 2.231 PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Barru

Tahun 2020-2024 ..... II-228
Tabel 2.232 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-229
Tabel 2.233 Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-230
Tabel 2.234 Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-231
Tabel 2.235 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2020-2024 ..... II-232
Tabel 2.236 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-232
Tabel 2.237 Produksi Perikanan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-233
Tabel 2.238 Konsumsi Ikan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-233
Tabel 2.239 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-234
Tabel 2.240 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-235
Tabel 2.241 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-236
Tabel 2.242 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-236
Tabel 2.243 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-237
Tabel 2.244 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-238
Tabel 2.245 Persentase SILPA Kabupaten Barru Tahun 2020-2024... II-239
Tabel 2.246 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-239
Tabel 2.247 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-240
Tabel 2.248 Perbandingan Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 .... II-241
Tabel 2.249 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-242
Tabel 2.250 Penetapan APBD Kabupaten Barru Tahun 2020-2024... II-243
Tabel 2.251 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-244
Tabel 2.252 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Barru Tahun 2020-2024... II-244
Tabel 2.253 Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-245
Tabel 2.254 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Jabatan Pemerintah, Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-247
Tabel 2.255 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-248
Tabel 2.256 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-248
Tabel 2.257 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-249
Tabel 2.258 Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang diterapkan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-250
Tabel 2.259 Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-251
Tabel 2.260 Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-252
Tabel 2.261 Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-253
Tabel 2.262 Jumlah Temuan BPK Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-254
Tabel 2.263 Tersedianya Rencana Kerja, terintegrasi program-program DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-254
Tabel 2.264 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten BarruTahun 2020-2024 ..... II-256
Tabel 2.265 Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur Kaupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-257
Tabel 2.266 Jenis dan Jumlah Bank Kabupaten Barru Tahun 2024 II-257
Tabel 2.267 Jumlah Hotel dan Restoran/Rumah Makan Kabupaten BarruTahun 2020-2024 ..... II-258
Tabel 2.268 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 .....II-259
Tabel 2.269 Lama Proses Perizinan Kabupaten Barru Tahun 2024... II-262
Tabel 2.270 Jumlah dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi DaerahKabupaten Barru Tahun 2024 ..... II-262
Tabel 2.271 Jumlah PERDA yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Barru Tahun 2024 ..... II-264
Tabel 2.272 Persentase Desa Berstatus Mandiri Terhadap Total Desa Kabupaten Barru 2024 ..... II-265
Tabel 2.273 Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-266
Tabel 2.274 Produktifitas Total Daerah Tahun 2020-2024..... II-266
Tabel 2.275 Capaian Indikator Makro Kabupaten Barru..... II-267
Tabel 2.276 Capaian Indikator Kinerja Utama 2024 Pemerintah Kabupaten Barru II-268
Tabel 2.277 Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-269
Tabel 2.279 Capain Indikator SPM Kabupaten Barru 2020-2024..... II-296
Tabel 2.280 Rekapitulasi Capaian SDGs/TPB Kabupaten Barru Tahun 2019 s/d 2024 Berdasarkan Tujuan II-299
Tabel 2.281 Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD II-307
Tabel 2.282 Konsistensi Kegiatan RKPD dalam APBD II-310
Tabel 2.283 Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dalam APBD II-312
Tabel 2.284 Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD Kabupaten BarruTahun 2024 ..... II-314
Tabel 2.285 Capaian Sub Kegiatan RKPD Tahun 2024 ..... II-317
Tabel 2.286 Capaian Target Outcome Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah Tahun 2024..... II-319
Tabel 2.287 Review Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2024 ..... II-322
Tabel 2.288 Inovasi Kabupaten Barru yang Masuk pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023-2024..... II-361
Tabel 3.1 Capaian, Target,dan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2026 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barru Tahun 2024-2026 ..... III-2
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan 2023-2024, APBD dan Proyeksi Pendapatan 2026-2027 Kabupaten Barru..... III-36
Tabel 3.3 Realisasi Belanja 2023-2024, APBD dan Proyeksi

	Pendapatan 2026-2027 Kabupaten Barru.....	III-77
Tabel 3.4	Proyeksi Alokasi Belanja terhadap Urusan Wajib Pelayanan Dasar dam SPM.....	III-79
Tabel 3.5	Proyeksi Alokasi Belanja terhadap Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dam SPM.....	III-79
Tabel 3.6	Pagu Perangkat Daerah.....	III-80
Tabel 3.7	Proyeksi Pagu Anggaran Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / SDGs Tahun 2026.....	III-81
Tabel 3.8	Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Barru Tahun 2023-2027	III-88
Tabel 3.9	Total Belanja Wajb Mengikat Tahun 2026.....	III-89
Tabel 3.10	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang Dapat digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.....	III-90
Tabel 3.11	Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah...	III-90
Tabel 4.1	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029.....	IV-2
Tabel 4.2	Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029	IV-3
Tabel 4.3	Visi, Misi, Tujuan SasaranPembangunanKabupaten Barru dan Target Kinerja Tahun 2026	IV-8
Tabel 4.4	Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026 dan RKPD Tahun 2026.....	IV-11
Tabel 4.5	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.....	IV-21
Tabel 4.6	Penjelasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026	IV-26
Tabel 4.7	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 dengan Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 202-2029.....	IV-27
Tabel 4.8	Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026.....	IV-28
Tabel 4.9	Prioritas Pembangunan Tujuan dan Sasaran Tahun 2026	IV-31
Tabel 4.10	Prioritas, Sasaran, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Kabupaten Barru	

	Tahun 2026.....	IV-33
Tabel 4.11	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu, Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Barru Tahun 2026.....	IV-44
Tabel 4.12	Prioritas Pembangunan yang mendukung atau terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)..	IV-46
Tabel 4.14	Perumusan Arah Kebijakan RKPD.....	IV-48
Tabel 4.15	Perumusan Strategi RKPD.....	IV-49
Tabel 4.16	Kesesuaian Sasaran Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 terhadap Target Provinsi Tahun 2026.....	IV-51
Tabel 4.17	Keselarasan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru Terhadap Sasaran Pembangunan Provinsi Asta dan Sulawesi Selatan Cita.....	IV-52
Tabel 4.18	Keselarasan Asta Cita, Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Kab.Barru.....	IV-54
Tabel 4.19	Dukungan Program Kabupaten terhadap Program Prioritas Provinsi.....	IV-57
Tabel 4.20	Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan Prioritas Nasiional.....	IV-62
Tabel 4.21	Keselarasan Dukungan Program, Sub Kegiatan Kabupaten Barru terhadap Kegiatan Prioritas Utama....	IV-204
Tabel 4.22	Keselarasan Highlight Intervensi Pembangunan Kewilayahan.....	IV-220
Tabel 5.1	Alokasi Anggaran *Mandatory Spending* Kabupaten Barru.....	V-1
Tabel 5.2	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan SPM.....	V-2
Tabel 5.3	Proyeksi Rencana Pendanaan Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027 Kabupaten Barru.....	V-16
Tabel 5.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	V-18
Tabel 5.5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Perangkat Daerah.....	V-30
Tabel 6.1	Capaian, Target, dan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2029 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barru Tahun 2024-2026	VI-1

Tabel 6.2 Capaian, Target, dan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2029 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru Tahun 2024-2026 ..... VI-2

Tabel 6.3 Realisasi Tahun 2024, Asumsi Capaian Tahun 2025, Target Tahun 2026, dan Kondisi Akhir Tahun 2030..... VI-3

Tabel 6.4 Capaian, Asumsi, dan Target Indikator SPM KabupatenBarru Tahun 2023-2025 .....VI-6

Tabel 6.5 Capaian dan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB) KabupatenBarru Tahun 2023-2025.. VI-10

Tabel 6.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kab. Barru Tahun 2025-2029..... VI-15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Penyusunan RKPD Tahun 2026	I-5
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen RKPD dengan Dokumen Lainnya	I-9
Gambar 1.3	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	I-11
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Barru Tahun 2024	II-1
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Barru Tahun 2024	II-4
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barru Tahun 2024	II-5
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Barru Tahun 2024	II-6
Gambar 2.5	Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Barru Tahun 2022.....	II-7
Gambar 2.6	Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air Kabupaten Barru Tahun 2024	II-11
Gambar 2.7	Peta Pengembangan Kawasan Strategis Kab. Barru Tahun 2024	II-20
Gambar 2.8	Dokumentasi Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Barru tahun 2024	II-30
Gambar 2.9	Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir Kabupaten Barru Tahun 2024	II-32
Gambar 2.10	Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor Kabupaten Barru Tahun 2024	II-34
Gambar 2.11	Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2024	II-35
Gambar 2.12	Peta Hasil Skalogram Kab.Barru Tahun 2024	II-57
Gambar 3.1	Tema RKP tahun 2026	III-26
Gambar 3.2	Arahan Kebijakan RKP Tahun 2026	III-27
Gambar 3.3	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun2026	III-28
Gambar 4.1	Sasaran Pembangunan Nasional dalam RKP	

Tahun 2026 ..... IV-14

Gambar 4.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026 ..... IV-15

Gambar 4.3 Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 Nasional dalam RKP Tahun 2026 ..... IV-16

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-46

Grafik 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru Dengan Wilayah Sekitar Tahun 2020-2024 ..... II-47

Grafik 2.3 Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2019 s.d Tahun 2021 (dlm Juta Rupiah) II-50

Grafik 2.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2020-2024 ..... II-52

Grafik 2.5 Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru Tahun 2020-2024 ..... II-53

Grafik 2.6 Hubungan Indeks Gini dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020-2024 ..... II-54

Grafik 2.7 Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-60

Grafik 2.8 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Capaian Nasional, Capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Capaian Kab, Barru Tahun 2020-2024 ..... II-61

Grafik 2.9 Perbandingan perubahan Persentase Penduduk Miskin dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020-2024 .... II-62

Grafik 2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru Tahun 2020-2024 ..... II-64

Grafik 2.11 Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-64

Grafik 2.12 Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020-2024 ..... II-65

Grafik 2.13 Perbandingan Umur Harapan Hidup Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-67

Grafik 2.14 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-68

Grafik 2.15 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-69

Grafik 2.16 Perbandingan Pengeluran Per Kapita Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020-2024 (dlm Ribu/Orang/Tahun) II-71

Grafik 2.18 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-72

Grafik 2.19 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020-2024 .... II-74

Grafik 2.20 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2019– 2024 ..... II-75

Grafik 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024..... III-10

Grafik 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026..... III-10

Grafik 3.3 Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan Wilayah sekitar Tahun 2020 s.d Tahun 2024 (dalam juta rupiah)..... III-12

Grafik 3.4 PDRB Perkapita Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026..... III-12

Grafik 3.5 Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2019 s.d Tahun 2024 (dlm Juta Rupiah).. III-14

Grafik 3.6 Inflasi Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan

Target Tahun 2026..…… III-14

Grafik 3.7 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020-2024 …… III-15

Grafik 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2025…… III-16

Grafik 3.9 Perbandingan Presentase Penduduk Miskin Capaian Nasional, Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Kab. Barru Tahun 2020-2024…… III-18

Grafik 3.10 Kemiskinan Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan, Cpaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun2026……. III-18

Grafik 3.11 Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab. Barru Tahun 2020-2024…… III-20

Grafik 3.12 Gini Ratio Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi-Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026…… III-20

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : 57 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARRU TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur, pertahanan dan keamanan serta politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang di hadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka harus mendukung pelaksanaan pembangunan untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 260 ayat 1, menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan

lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam. System perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pemberdayaan perempuan, anak dan disabilitas;
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024 serta target RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029, sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 akan fokus pada pencapaian target Visi Misi Kepala Daerah yang tertuang Dalam RPJMD dengan fokus pada pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter sesuai yang tertuang pada arah kebijakan Tahun 2026 pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025 - 2029. Selain itu, Sebagai gambaran awal untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Barru Tahun 2025 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,92%, Tingkat Kemiskinan 8,31%, Tingkat Pengangguran Terbuka 6,42%, Gini Rasio 0,340, Indeks Pembangunan Manusia 74,51 dan PDRB Perkapita (ADHB) 52,28 Juta/Rp. Selain memperhatikan capaian indicator ekonomi makro, Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD.

Dokumen ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

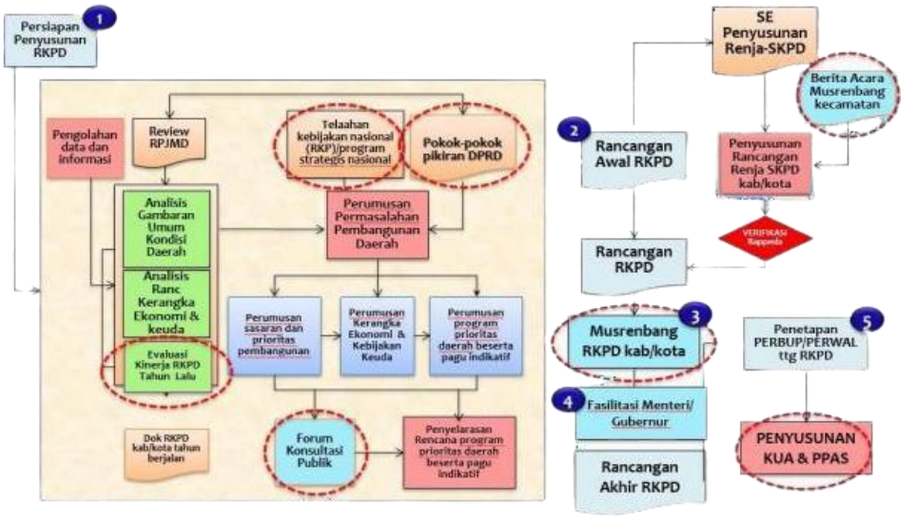
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan dokumen RKPD 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru tahun 2026 merupakan penjabaran tahun ke II (ke-dua) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2029.

Gambar 1.1

Alur Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2026



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

RKPD ini merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah Serta menjadi acuan di dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam rangka memenuhi indikator penilaian pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang sejalan dengan amanat Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, maka dokumen RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 disusun berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang lebih dirinci diuraikan pada pembahasan arah kebijakan pembangunan kab/kota.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana

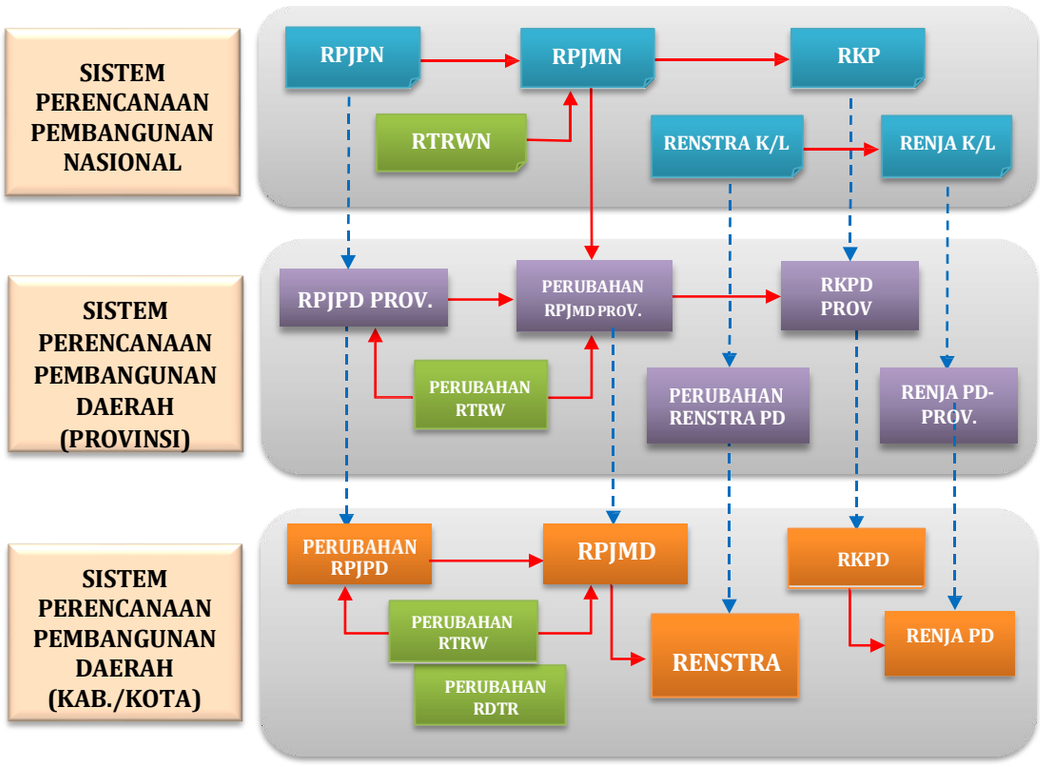
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Sedangkan berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

RKPD Kabupaten Barru tahun 2026 merupakan penjabaran teknis RPJMD Tahun 2025 - 2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 berpedoman pada RKP, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, serta RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar RKPD selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi, untuk itu perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Kabupaten Barru tahun 2025, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.2

Hubungan Antar Dokumen RKPD dengan Dokumen Lainnya



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2025 yang terkait dengan program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran pembangunan, selain itu juga menyangkut penyelarasan, sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

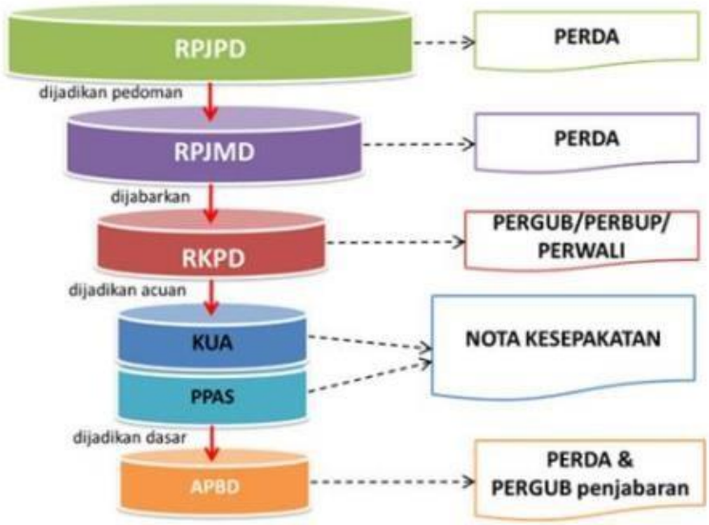
Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya. Sesuai dengan Pasal 105 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanahkan bahwa Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten, sebagai landasan penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas antara Bupati dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Adapun hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.3

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 adalah merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan prioritas dan program kerja dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Perlunya penajaman program prioritas daerah yang dimuat dalam RKPD.

Adapun tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator dan target kinerja prioritas/agenda/program pembangunan daerah yang ditetapkan sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026;
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
3. Memfaasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat /

swasta / institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tahun 2026;

1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026, disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran C.3 Penyajian Dokumen RKPD dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada sub bab latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, renstra perangkat daerah, renja perangkat daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada sub bab dasar hukum penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada sub bab hubungan nntar dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada sub bab maksud dan tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada sub bab sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan

perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

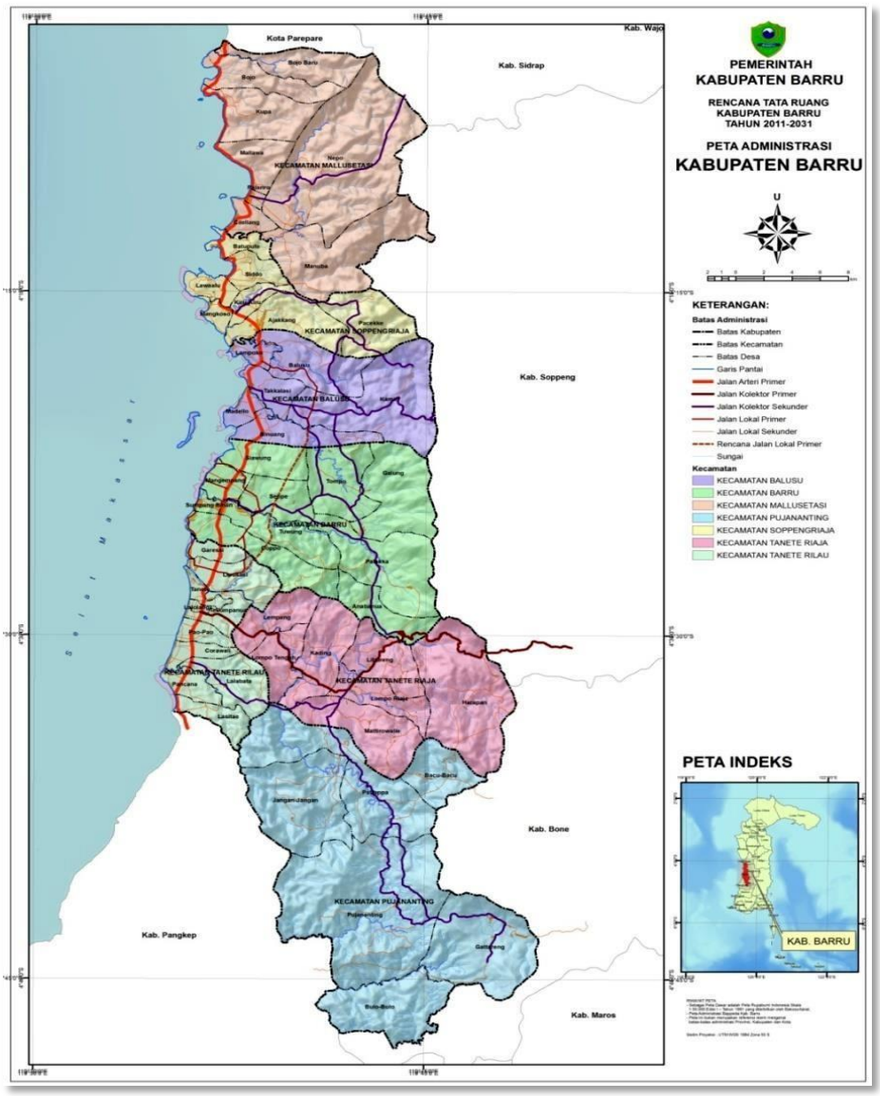
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Barru

Kabupaten Barru adalah salah satu dari 24 Kabupaten Kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru merupakan jalur perlintasan trans sulawesi yang terletak di pesisir pantai Barat Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 Km arah utara Kota Makassar dengan luas 1174,72 Km2.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Barru Tahun 2024



Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025

Batas wilayah administrasi adalah batas wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola pemerintah daerah didalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun batas- batas wilayah Kabupaten Barru sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar

Secara administratif Kabupaten Barru terbagi atas 7 (Tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa Kabupaten Barru Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (km²)	%
731101	Tanete Riaja	6	1	174,29	14,83
	Tanete Rilau	8	2	79,17	6,74
	B a r r u	5	5	199,32	16,97
731104	Soppeng Riaja	5	2	78,90	6,72
	Mallusetasi	5	3	216,58	18,44
	Pujananting	6	1	314,26	26,75
	Balusu	5	1	112,20	9,55
Total		40	15	1174,72	100

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kecamatan Pujananting adalah kecamatan yang terluas di Kabupaten Barru yakni seluas 314,26 km2 atau sebesar 26,75% dari total wilayah Kabupaten Barru, sementara Kecamatan Soppeng Riaja merupakan kecamatan yang tersempit di Kabupaten Barru yakni hanya seluas 78,90 km2 atau sebesar 6,72% dari total wilayah keseluruhan..

Secara astronomis, Kabupaten Barru terletak diantara koordinat 4°05’49” LS – 4°47’35” LS (Lintang Selatan) dan 119°35’00” – 119°49’16” BT (Bujur Timur). Kabupaten Barru mempunyai wilayah yang cukup bervariasi terdiri dari daerah pesisir/laut, dataran rendah dan dataran tinggi. Di bagian timur Kabupaten Barru terbentang

daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 100 sampai 1700 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian barat yang berhadapan dengan selat Makassar, bertopografi datar sampai landai dengan ketinggian 0 – 20 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, wilayah Kabupaten Barru memiliki kelerengan yang sangat bervariasi mulai datar, bergelombang hingga bergunung dengan persentase kemiringan antara 0% - >40%.

Topografi merupakan salah satu faktor pembatas pemanfaatan ruang untuk pembangunan. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis dan memiliki tingkat erosi yang tinggi yang dipengaruhi oleh kecepatan pengaliran air. Secara topografis, Kabupaten Barru mempunyai wilayah bervariasi yang terdiri atas wilayah laut, dataran rendah dan wilayah pegunungan dengan ketinggian wilayah antara 0–1.700 meter diatas permukaan laut (mdpl). Keadaan wilayahKabupatenBarru berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yang dibagi dalam 5 (lima) kriteria yaitu 0-25 m, 25-100 m, 100-500 m, 500-1.000 m dan ≥ 1000 m dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Keadaan Wilayah Berdasarkan Ketinggian diatas Permukaan Laut Kabupaten Barru Tahun 2024

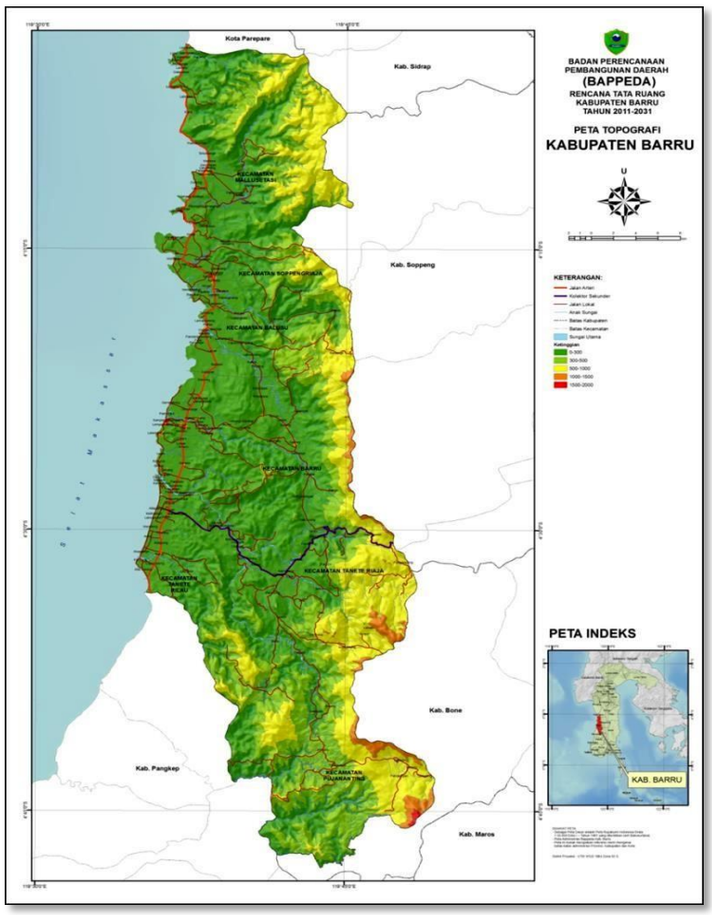
No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Ketinggian Tempat (Ha)					Total
		0-25 m	25-100 m	100-500 m	500-1000 m	≥1000 m	
1	Tanete Riaja	1.132	4.547	6.082	5.153	515	17.429
2	Tanete Rilau	3.830	2.113	1.974	-	-	7.917
3	Barru	3.454	5.113	9.363	1.806	196	19.932
4	Soppeng Riaja	3.137	1.171	2.771	811	-	7.890
5	Malusetasi	2.583	2.4	11.100	5.575	-	21.658
6	Pujananting	-	275	21.723	8.368	1.060	31.426
7	Balusu	3.411	1.428	5.003	1.307	71	11.220
Total		**17.547**	**17.047**	**58.016**	**23.020**	**1.842**	**117.472**

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase luas wilayah yang paling besar adalah wilayah dengan ketinggian antara 100-500 m yaitu sebesar 58.016 Ha sedangkan yang paling sedikit adalah wilayah dengan ketinggian ≥ 1.000 m yaitu sebesar 1.842 Ha Secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2

Peta Topografi Kabupaten Barru Tahun 2024



Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025

Selanjutnya keadaan wilayah Kabupaten Barru berdasarkan kemiringan meliputi 4 (empat) kriteria yaitu kemiringan 0-2%, 2-15%, 15-40%, >40%, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Keadaan Wilayah Berdasarkan Kemiringan

Kabupaten Barru Tahun 2024

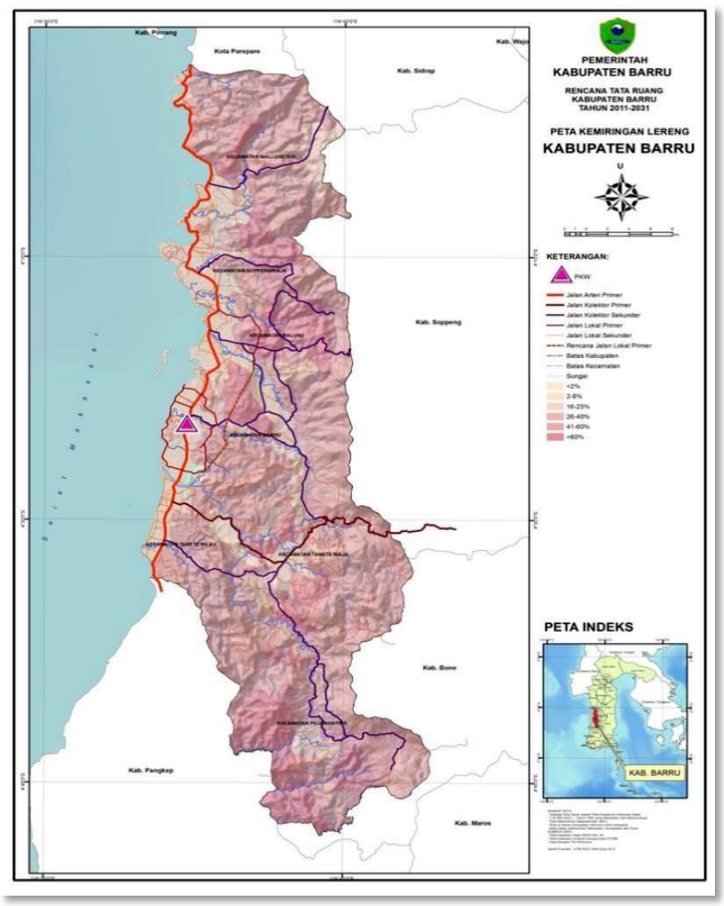
No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Kemiringan Tanah / Lereng				Total
		0-2%	2-15%	15-40%	>40%	
1	Tanete Riaja	5,93	55,52	79,85	32,99	174,29
2	Pujananting	3,38	57,30	157,18	96,40	314,26
3	Tanete Rilau	11,59	33,69	28,57	5,32	79,17
4	Barru	14,58	75,83	78,27	30,64	199,32
5	Soppeng Riaja	7,88	34,19	26,87	9,96	78,90
6	Balusu	10,84	40,00	47,64	13,72	112,20
7	Mallusetasi	6,11	43,60	93,71	73,16	216,58
TOTAL		**60,31**	**340,13**	**512,09**	**262,19**	**1.174,72**

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Barru berdasarkan kemiringan tanah/lereng lebih didominasi oleh wilayah dengan kemiringan antara 15%-40% yaitu sebesar 43,60%, sedangkan yang paling sedikit yaitu dengan kemiringan antara 0-2% hanya sebesar 5.05%. Secara spasial kemiringan lereng wilayah Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.3

Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barru Tahun 2024



Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025

Pegunungan yang ada di Kabupaten Barru sebagian besar merupakan batuan gunung api yang bagian selatannya lebih tinggi, tetapi ke utara menyempit dan merendah. Secara bersama batuan itu menyusun Formasi Camba yang tebalnya sekitar 5.000 m. Sebagian besar pegunungan terbentuk dari Formasi Camba yang menindih tak selaras Formasi Tonasa.

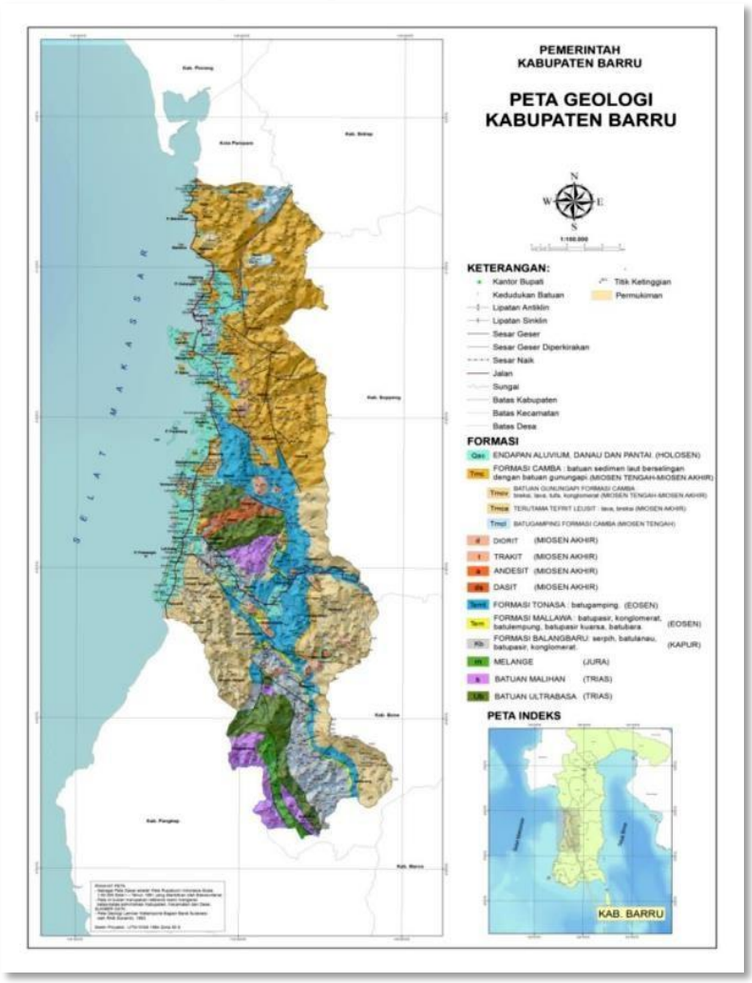
Terobosan batuan beku yang terjadi di Kabupaten Barru semuanya berkaitan erat dengan kegiatan gunung api. Bentuknya berupa stok, sill dan retas, bersusunan beraneka dari basal,andesit,

trakit, diorit, dasit dan granodiorit yang diperkirakan berumur pada kiasan Miosen Akhir.

Endapan Holosen yang luasannya berupa endapan aluvium, danaudan pantai terdiriatas lempung, lanau, lumpur pasirdan kerikil di sepanjang sungai besar dan disepanjang pantai. Endapan pantai setempat mengandung sisa kerang dan batu gamping koral. Secara umum endapan aluvium terdapat di sebelah barat atau pesisir pantai dari daerah Kabupaten Barru.

Gambar 2.4

Peta Geologi Kabupaten Barru Tahun 2024



Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025

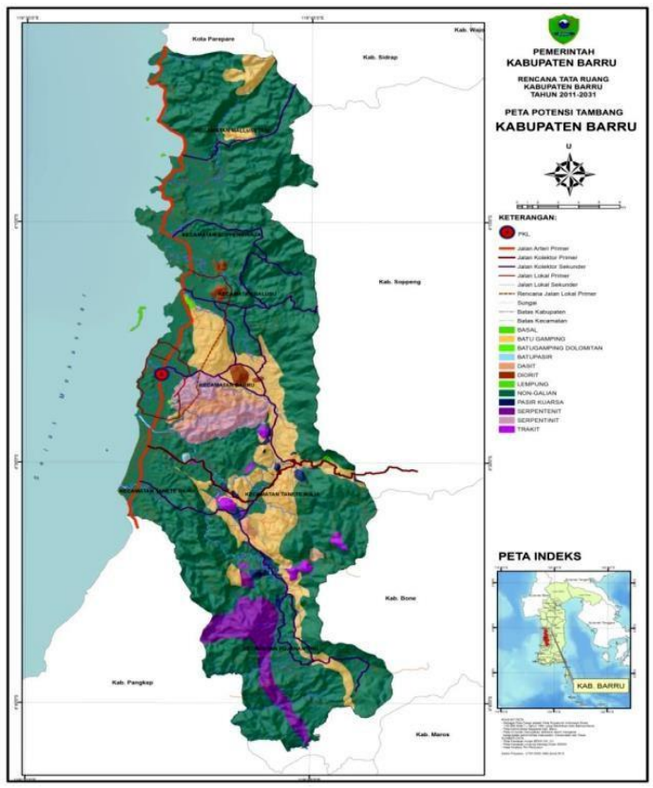
Struktur regional Kabupaten Barru terdiri atas struktur lipatan dan struktur sesar dimana struktur lipatan adalah suatu bentuk deformasi pada batuan sedimen, batuan vulkanik dan batuan metamorf yang memperlihatkan suatu bentuk bergelombang dan struktur yang berkembang di Kabupaten Barru adalah struktur sinklin. Sedangkan struktur sesar merupakan suatu rekahan pada batuan yang telah mengalami pergeseran sehingga terjadi perpindahan antara bagian-bagian yang berhadapan dan arahnya

sejajar dengan bidang patahan. Secara spasial peta geologi Kabupaten Barru dapat dilihat melalui gambar diatas.

Kondisi geologi daerah Barru yang kompleks akibat tektonik inilahyangmenyebabkan potensipertambangan di Kabupaten Barru sangat besar dari segi bahangalian batuan, mineral dan logam. Bahan galian yang bernilaiekonomis tersebar dari Utara hingga selatan daerah Barru. Kromit ditemukan dalam batuan ultrabasa di timur Barru, terutama pada bagian yang berlapis berupa lensa, tanah pelapukannya mengandung apungan kromit. Khusus disebelah Selatandaerah Barru di Kecamatan Pujananting dan Tanete Riaja potensi bahan galian yang bernilai ekonomis banyak dijumpai antara lain: emas, galena, mangan dan batubara.

Gambar 2.5

Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Barru Tahun 2024



Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025

Tabel 2.4

Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan

Kabupaten Barru Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jenis Tambang
1	Tanete Riaja	Batubara, kromit, batu gamping, pasir kuarsa, marmer, serpentinit, tanah liat, batupasir, pasir, dan batu sungai
2	Tanete Rilau	Pasir besi, pasir sungai, tanah liat dan serpentinit

3	Barru	Batu gamping, serpentinit, tanah liat, pasir dan batu Sungai
4	Soppeng Riaja	Pasir dan batu Sungai
5	Mallusetasi	Tras, pasir besi dan batu Sungai
6	Pujananting	Batubara, kromit, batu gamping, marmer, serpentinit, mangan, galena, emas, pasir kuarsa, tanah liat, pasir dan batu Sungai
7	Balusu	Batu gamping dan tanah liat

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Barru 2011-2031

Sedangkan potensi batuan menyebar dari Utara sampai Selatan daerah Barru, seperti yang terlihat pada tabel 2.4 JenisTanah di Kabupaten Barru dapat diklasifikasikan menjadi 4 (Empat) bagian yang tersebar di beberapa Kecamatan yaitu :

a. Jenis Tanah Aluvial Muda, dari bahan induk Aluvium,tekstur beranekaragam dengan kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebaran jenis tanah ini didaerah daratanAluvialSungai, daratan Aluvial Pantai dan di daerah cekungan (depresi). Jenis tanah ini meliputi 12,48 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan terdapat di Kecamatan Tanete Riaja.
b. Jenis tanah Litosol merupakan tanah mineral dari bahan induk batuan beku atau batuan sedimen keras, Solum dangkal, tekstur beraneka dan umumnya berpasir. Jenis tanah Litosol didapati umumnya di wilayah dengan tofograf berbukit, pegunungan. Di Kabupaten Barru jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Tanete Rilau dan Tanete Riaja yang meliputi 24,72 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru.
c. Jenis tanah Regosol meliputi 35,12 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan tersebar di seluruh kecamatan. Jenis tanah ini masih muda dengan tekstur pantai, kesuburan sedang berasal daribahan induk vulkanis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng volkan muda dan di daerah beting pantai atau gumuk–gumuk pasir.
d. Jenis tanah Mediteran berasal dari bahan induk batuankapur keras (Limestone) dan Tufa Vulkanis bersifat basa. Tekstur umumnya lempung permeabilitas sedang dan peka erosi. Di Kabupaten Barru jenis tanah mediteran ini meliputi 27,68

persen terdapat di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Tanete Rilau.

Dari keempat jenis tanah tersebut, digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5

Jenis Tanah Kabupaten Barru Tahun 2025

No	Jenis Tanah	Luas Dan Persentase	
		Ha	Persentase (%)
1.	Aluvial	14.659	12,48
2.	Litosol	29.043	24,72
3.	Regosol	41.254	35,12
4.	Mediteran	32.516	27,68
	Total	**117.472**	**100**

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

Dari tabel diatas, diantara ke 4 (empat) jenis tanah, yang memiliki persentase terbesar adalah Regosol sebanyak 35,12% dan terkecil adalah Aluvial sebesar 12,48%.

Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Potensi sumber air di Kabupaten Barru yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan adalah air hujan, air permukaan dan aliran sungai atau limpasan. Sungai-sungai yang ada selain airnya dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, industri, rumah tangga juga sungai-sungai yang ada berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan untuk budidaya perikanan. Berikut data sungai yang mengalir menurut lokasi:

Tabel 2.6

Sungai Mengalir Menurut Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Daerah Aliran Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
1	Kupa	Mallusetasi	11,25
2	Lakepo	Balusu, Barru	85,97
3	Lampoko	Balusu, Soppeng Riaja	113,51
4	Binangae	Balusu, Barru Tanete Riaja	44,85
5	Bojo	Mallusetasi	26,35
6	Jampue	Mallusetasi, Soppeng Riaja	88,70
7	Matajang	Tanete Rilau, Tanete Riaja,	53,25
8	Pangkajene	Pujananting	64,38
9	Pelapekkae	Mallusetasi	3,93

No	Daerah Aliran Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
10	Segeri	Pujananting, Kab. Pangkep	35,17 Km

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

Sementara itu, berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) terhadap ketersediaan air Kabupaten Barru, menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah yang telah melampaui ambang batas yakni antara kemampauan alam menyediakan pelayanan dalam hal penyediaan air terhadap kebutuhan yang digambarkan dari besarnya konsumsi air yang dibutuhkan masyarakat diwilayah tersebut. Rincian luasan status daya dukung wilayah penyediaan air disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7

Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Barru Tahun 2024

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun) 2024	2025	2030
Balusu	141.857.376,46	62.465.903,87	62.611.582,96	
Barru	245.567.237,89	150.661.297,69	84.345.738,50	
Mallusetasi	255.689.974,45	87.559.492,80	69.961.371,65	
Pujananting	373.710.355,22	78.718.635,47	57.747.159,22	
Soppeng Riaja	112.667.727,01	59.580.904,44	62.036.745,04	62.044.149,94
Tanete Riaja	185.572.694,83	102.934.313,42	68.509.687,15	
Tanete Rilau	111.936.874,18	96.950.353,18	78.439.551,64	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Barru Tahun 2025

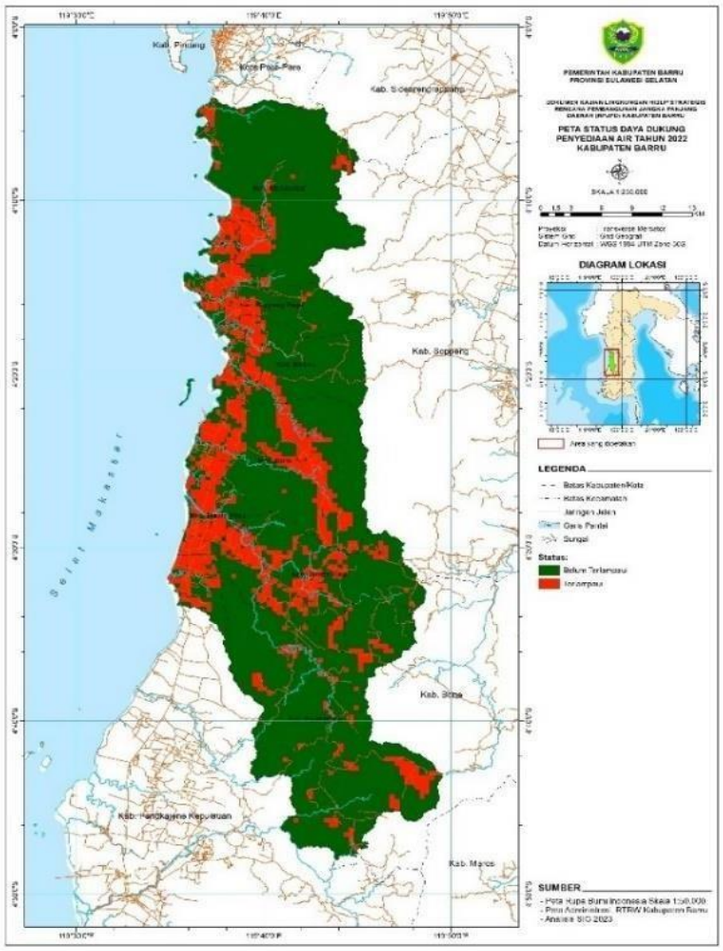
Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan hidup untuk menyediakan air dari setiap Kecamatan tertinggi di Kecamatan Pujananting sebesar 373.710.355,22 m3/tahun dan terendah di kecamatan Tanete Rilau sebesar 111.936.874,18 m3/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan air tertinggi di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 di Kecamatan Barru sebesar 150.661.297,69 m3/tahun, sedangkan kebutuhan air terendah yaitu di Kecamatan Soppeng Riaja sebesar 59.580.904,44 m3/tahun.

Berdasarkan tabel diatas, masih terdapat selisih daya dukung lingkungan hidup untuk menyediakan air di Kabupaten Barru dengan kebutuhan air bagi perikehidupan penduduk pada setiap Kecamatan di Kabupaten Barru sehingga dapat disimpulkan bahwa status daya dukung penyediaan air bagi penduduk Kabupaten Barru belum terlampaui atau masih surplus antara

ketersediaan dengan kebutuhan air pada setiap kecamatan di Kabupaten Barru. Peta status daya dukung penyediaan air di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.6

Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Barru Tahun 2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Pada Gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah yang telah melampaui ambang batas yakni antara kemampuan alam menyediakan air terhadap kebutuhan masyarakat baik untuk lahan maupun domestik. Hal ini digambarkan dari besarnya kebutuhan air oleh masyarakat di wilayah tersebut. Area yang berwarna merah pada peta di atas menunjukkan kebutuhan air yang lebih besar dari ketersediaan air. Rincian luasan status daya dukung penyediaan air pada setiap Kecamatan di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8

Status Daya Dukung Air di Kabupaten Barru Tahun 2024

Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Total
Balusu	8.666,31	2.341,01	11.007,32
Barru	14.292,92	6.161,14	20.454,07
Mallusetasi	19.916,05	2.886,06	22.802,11
Pujananting	32.115,61	2.929,99	35.045,60
Soppeng Riaja	5.823,15	2.246,15	8.069,30
Tanete Riaja	11.424,24	4.572,49	15.996,73
Tanete Rilau	3.153,66	3.857,70	7.011,36
Total	**95.391,94**	**24.994,55**	**120,386,49**
Persentase	**79,24%**	**20,76%**	**100,00%**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa di setiap kecamatan di Kabupaten Barru, sebagian wilayah dalam kecamatan tersebut kebutuhan air sudah melampaui ketersediaan air, atau dengan kata lain tidak mendukung sebagai fungsi penyedia air. Total wilayah Kabupaten Barru di tahun 2024 yang masih mendukung sebagai fungsi penyedia air yaitu 79,24%, sedangkan wilayah yang tidak mendukung sebagai fungsi penyedia air sebesar 20,76%.

Sementara itu untuk jumlah hari hujan dan curah hujan Kabupaten Barru pada tahun 2020 s/d 2024 mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9

Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Kabupaten Barru Tahun 2020 –2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Curah Hujan (mm)	1.804	3.136	4.234	3.341	3,462
2	Hari Hujan (hari)	152	208	211	141	311

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

Sedangkan jumlah hari hujan dan curah hujan menurut bulan sepanjang tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10

Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan Kabupaten Barru Tahun 2024

No.	Bulan	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm^3)
1	Januari	30	649,70
2	Februari	21	552,80
3	Maret	25	454,90
4	April	23	150,60

No.	Bulan	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm^3)
5	Mei	17	71,20
6	Juni	16	109,70
7	Juli	27	109,10
8	Agustus	31	1,70
9	September	30	4,70
10	Oktober	31	65,60
11	November	30	246,30
12	Desember	31	1.045,80

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sekitar 1.045,80 mm^3 dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sekitar 1,70 mm^3 .

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana terhadap karakteristik dan kecenderungan pola pemanfaatan ruang wilayah. Rencana pola ruang meliputi alokasi pemanfaatan ruang, kawasan budidaya, kawasan lindung, serta kawasan perkotaan dan pedesaan.

Kawasan budidaya dapat diartikan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan yang terkait. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang.Kriteria teknis sektoral kawasan budidaya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria ruang kawasan budidaya menentukan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang menghasilkan nilai sinergi terbesar untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan.Luas arahan kawasan budidaya Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11

Luas Arahan Kawasan Budidaya Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	%
1	Hutan Produksi	17.290,03	14,52
2	Hutan rakyat	5.923,35	4,97
3	Kawasan Budidaya Perikanan	2.682,69	2,25
	Tambak	2.682,69	2,25
4	Kawasan Budidaya Perkebunan	14.046,91	11,79
	Perkebunan	14.046,91	11,79
No	**Kawasan Budidaya**	**Luas (Ha)**	**%**
5	Kawasan Budidaya Pertanian	19.880,78	16,69
	Pertanian lahan basah	14.322,14	12,02
	Pertanian lahan kering	1.785,70	1,50
	Holtikultura	3.772,94	3,17
6	Kawasan Budidaya Peternakan	2.290,54	1,92
	Peternakan Besar	2.290,54	1,92
7	Kawasan Permukiman	3.771,64	3,17
	Permukiman	3.771,64	3,17
8	Kawasan Pertambangan	1.490,56	1,25
	Pertambangan	1.490,56	1,25
Total Kawasan Budidaya		**67.376,50**	**56,57**

Dokumen RTRW Kabupaten Barru Tahun 2011-2031

Sementara itu, Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan hutan lindung juga merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Kawasan sebagaimana dimaksud adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya terdiri dari :

- Kawasan hutan lindung yang memiliki skor >175, yang merupakan penjumlahan skor intensitas curah hujan, kepekaan tanah terhadap erosi dan kemiringan lereng. Selain itu kawasan ini meliputi pula wilayah dengan ketinggian > 2.000 meter dari permukaan laut.
- Kawasan resapan air yang meliputi hutan rawa.

- Kawasan sempadan sungai dan danau.

Secara keseluruhan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Barru seluas 51.969,00 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 17.879 hektar. Secara lebih rinci luasan kawasan hutan lindung berdasarkan kecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12

Luas Kawasan Hutan Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Fungsi Kawasan	Luas Hutan (Ha)
1	Hutan Lindung	49.949
2	Hutan Produksi Terbatas	17.162
3	Lainnya	50.361
Total		**117.412**

Sumber Data : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

Sedangkan kawasan perlindungan setempat terdiri dari beberapa kawasan sebagai berikut:

- Kawasan sempadan pantai ditetapkan berdasarkan pesisir pantai Kabupaten Barru sepanjang 78 Km yang terdistribusi pada lima kecamatan, yakni Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Balusu.
- Kawasan sempadan sungai ditetapkan pada Sungai Barru, Sungai Bojo, Sungai Kupa, Sungai Nepo, Sungai Manuba, Sungai Ceppaga, Sungai Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai Palakka, Sungai Bungi, Sungai Sikapa, Sungai Mareppang dan Sungai Jalanru.
- Kawasan sekitar mata air ditetapkan di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Mallusetasi.
- Kawasan lindung spiritual ditetapkan di kawasan perkampungan Suku Tobalo di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting.
- Kawasan ruang terbuka hijau berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologi, sosial budaya, estetika dan ekonomi dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau publik paling sedikit 20 persendan Ruang Terbuka Hijau privat

paling sedikit 10 persen dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, PKLp dan PPK.

Kawasan lindung yang selanjutnya adalah Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yang terdiri dari :

- Kawasan pantai berhutan bakau, dengan luasan kurang lebih 343,783Ha, ditetapkan sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan luasan kurang lebih 26,322 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja dengan luasan kurang lebih 86,804 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Balusu (termasuk Pulau Panikiang) dengan luasan kurang lebih 200,078 Ha dan sebagian wilayah Kecamatan Barru dengan luasan kurang lebih 30,579 Ha.
- Kawasan taman wisata alam, ditetapkan di Pulau Dutungan, Pulau Bakki dan Pulau Batu Kalasi Kecamatan Mallusetasi.
- Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di Kawasan Rumah Adat Saoraja Lapinceng di Kecamatan Balusu, Kawasan Monumen Paccekke di Kecamatan Soppeng Riaja, Kawasan Monumen Garongkong di Kecamatan Barru dan Kawasan Pendidikan Pesantren Mangkoso diKecamatan Soppeng Riaja.

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah. Kawasan imbuhan air tanah ditetapkan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Barru di sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting.

Untuk Kawasan Budidaya adapun Pengembangan wilayah Kabupaten Barru diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru. Hal ini guna mewujudkan ruang Kabupaten Barru yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkelanjutan.

Secara hirarki sebagaimana disebutkan dalam UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, telah ditetapkan istilah baku untuk pusat-pusat perkotaan mulai dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Wilayah Kota merupakan pusat kegiatan bagi wilayah di sekelilingnya, yang sering disebut dengan beberapa istilah seperti wilayah pengaruh, wilayah pelayanan, hinterland dan lain-lain. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka upaya yang akan dilakukan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan dengan mengutamakan pengembangan wilayah berbasis rencana tata ruang melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti Kawasan Industri (KI) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

Dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031, telah mengatur beberapa Potensi pengembangan wilayah yang berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah. Diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, petambangan dan lainnya dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Adapun dari hasil telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru maka diperoleh potensi pengembangan wilayah sebagai berikut.

1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dalam Dokumen RTRW Kabupaten Barru, Penetapan kawasan peruntukan pertanian, di bagi kedalam beberapa kawasan sebagai berikut.

a) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri dari: kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luasan kurang lebih 14.527,07 Ha yang diarahkan pada sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng

Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Selanjutnya kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luasan sekitar 12.781,73 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luasan kurang lebih 6.305,99 (enam ribu tiga ratus lima koma Sembilan puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja.

b) Kawasan peruntukan perkebunan. Kawasan peruntukan perkebunan terbagi dalam beberapa peruntukan. *Pertama*, kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hybrida dengan luasan kurang lebih 2.202 Ha, ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Kedua,* Kawasan peruntukan perkebunan kopi dengan luasan kurang lebih 758 Ha, ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Ketiga,* kawasan peruntukan perkebunan jambu mete dengan luasan kurang lebih 5.278Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Keempat,* kawasan peruntukan perkebunan cengkeh dan kakao dengan luasan kurang lebih 1.100 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah

Kecamatan Barru ,sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Kelima,* kawasan peruntukan perkebunan kemiri dan karet dengan luasan kurang lebih 4.617 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

c) Kawasan peruntukan peternakan, ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dengan luas sekitar 2.290,54 Ha, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

Sementara itu dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, arah pengembangan untuk kawasan pertanian untuk wilayah Kabupaten Barru diarahkan untuk sektor unggulan komoditas Tanaman Pangan padi, sementara untuk komoditas peternakan diarahkan untuk komoditas sapi potong.

Untuk Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi sebagaimana merupakan kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang lebih 17.879 Ha, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu dengan luasan kurang lebih 4.505 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Barru dengan luasan kurang lebih 3.272 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan luasan kurang lebih 14 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dengan luasan kurang lebih 4.305 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja dengan luasan kurang lebih 972 Ha, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dengan luasan kurang lebih 4.811 Ha.

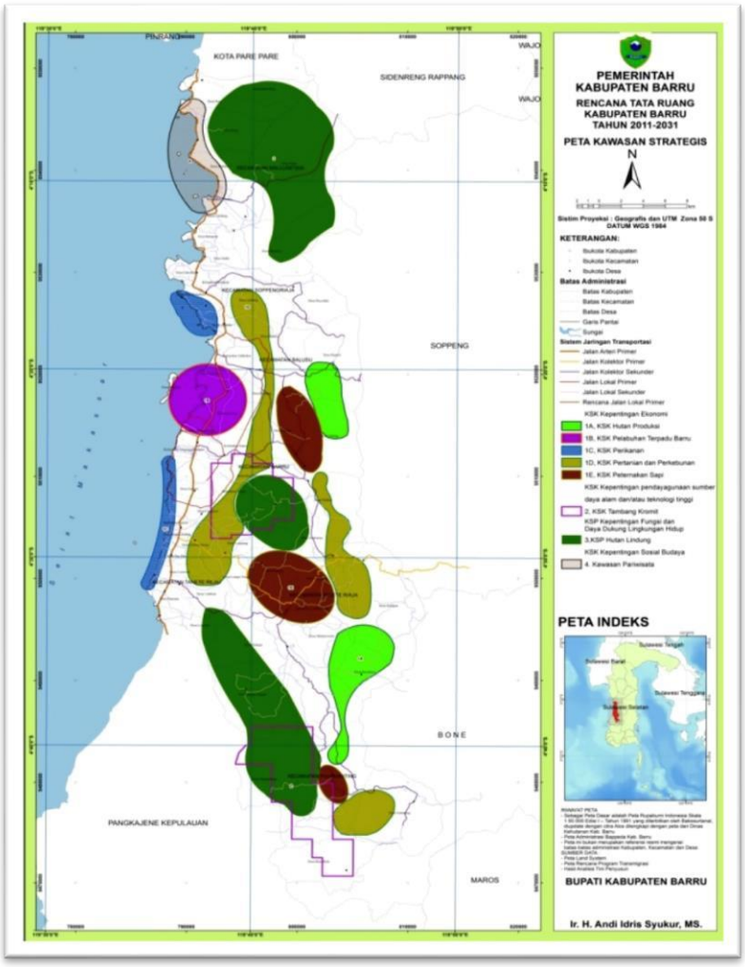
Dan untuk pengembangan Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Barru ditetapkan dengan luasan sekitar 5.923,35 Ha, berada di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi,

sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

Untuk pengembangan komoditas pangan jenis hortikultura, perkebunan dan kehutanan masih diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan konversi produk. Hal ini dalam rangka mendukung ketahanan pangan masyarakat yang tidak hanya mengandalkan dari sektor beras, namun juga harus didukung dengan komoditas pangan yang lain.

Gambar 2.7

Peta Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Barru Tahun 2024



Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025

2. Kawasan Perikanan

Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan. Pengelolaan kawasan perikanan di Kabupaten Barru diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan

sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan. Adapun Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di dalam Dokumen RTRW terdiri dari:

a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi kawasan pesisir dan laut Kecamatan Soppeng Riaja dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mallusetasi.
b) Kawasan peruntukan perikanan budidaya perikanan diarahkan pada; *Pertama*, kawasan budidaya perikanan air payau dengan komoditas udang dan bandeng ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Balusu dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. *Kedua,* Kawasan pengembangan minapolitan merupakan kawasan minapolitan terpadu ditetapkan akan dikembangkan disebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi.
c) Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) ditetapkan akan dikembangkan di PPI Polejiwa diKecamatan Tanete Rilau.

Sementara itu dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, arah pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Perairan Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, Teluk Bone, Kepulauan Spermonde, Kepulauan Selayar dan sekitar Kepulauan Tana Keke yang meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Sinjai, Pangkajene Kepulauan, Bone, dan Kota Makassar. Untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan budidaya laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Barru, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone, Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan

pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, dan Kabupaten Pinrang.

3. Kawasan Industri

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam RTRWP Sulawesi Selatan yang menetapkan kawasan industri dikawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yaitu kawasan perkotaan Mamminasata dan kawasan perkotaan di Kabupaten Bone, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Bantaeng, Luwu Timur, Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan kota Makassar.

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Barru untuk Pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri dari:

a. Kawasan peruntukan industri besar merupakan kawasan industri semen ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Barru.
b. Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan industri pengolahan makanan dan pakan ternak ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Balusu.
c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di kawasan perkotaan PKLp dan PPK.

Sementara untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Wilayah pertambangan di Kabupaten Barru terdiri dari:

a) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi : Pertama, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa kromit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan TaneteRiaja, sebagian Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. Kedua, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa mangan, galena dan emas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting.

Ketiga, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir besi, pasir kuarsa dan batu gamping ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. *Keempat*, wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa tras, kerikil berpasir alami, tanah liat dan marmer ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting; wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Pujananting dan sebagian Kecamatan Tanete Riaja.

b) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi dan gas alam terdiri dari wilayah usaha pertambangan panas bumi yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru dan wilayah usaha pertambangan gas alam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja.

4. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam; wisata budaya dan wisata buatan. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Barru pada beberapa kawasan berikut.

a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri dari:
   - ✓ Kawasan Makam Pajung Tenri Leleang, kawasan Makam Petta Pallase- LaseE, kawasan Makam We Pancai Tana, kawasan Masjid Tua Lalabata, kawasan Makam We Tenri Olle, kawasan

Makam Datu Maddusila To Appaewa dan kawasan Makam Karaeng Lipukasi di Kecamatan Tanete Rilau;

- ✓ Kawasan Mesjid Tua Barru, kawasan Makam H.M.Pudhail dan kawasan Monumen Garongkong di Kecamatan Barru;
- ✓ Kawasan Makam Arung Nepo dan kawasan Makam La Bongo di Kecamatan Mallusetasi;
- ✓ Kawasan permukiman suku To Balo di Kecamatan Pujananting;
- ✓ Kawasan Saoraja Lapinceng di Kecamatan Balusu.

b. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri dari:

- ✓ Kawasan Pantai Ujung Batu, kawasan Air Panas KalompiE, kawasan Air Terjun Tanjung Asap, Pantai LembaE dan kawasan Cek Dam Lajulo Indah di Kecamatan Barru.
- ✓ Pulau Dutungeng, Pulau Bakki, Pantai Kupa, Taman Laut Mallusetasi, Pantai Lapakaka, kawasan permandian Bujung MatimbaoE, Bendungan LanraE dan Kawasan Wisata Mareppang di Kecamatan Mallusetasi.
- ✓ Pulau Pasir Putih, Pantai Awerange dan Permandian Alam Batu SitongkoE di Kecamatan Soppeng Riaja.
- ✓ Permandian Alam Datae Salopuru di Kecamatan Pujananting.
- ✓ Permandian Waempubbu, Air Terjun Sarang Burung dan Gua Togenra di Kecamatan Balusu.
- ✓ Kawasan Waenungnge, kawasan Batu Mallopie, kawasan Air Terjun Waesai, kawasan Celebes Canyon dan kawasan Bukit Harapan di Kecamatan Tanete Riaja.

Pulau Puteanging, Sungai Bottoe dan Tanjung Butung di Kecamatan Tanete Rilau.

5. Sistem Perkotaan

Dalam Dokumen RTRW, Untuk Sistem Perkotaan di Kabupaten Barru diuraikan sebagai berikut :

a) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari; Kantor Komando Distrik Militer Barru di Kota Parepare, Kantor Komado Rayon Militer di Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting, Kantor Kepolisian

Resort Barru di Kecamatan Barru, Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting.

b) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yaitu kawasan yang merupakan kawasan pengembangan perdagangan dan jasa, terdiri dari:
   - ✓ Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di kawasan perdagangan Garongkong Kecamatan Barru, kawasan perdagangan Palanro Kecamatan Mallusetasi, kawasan perdagangan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, kawasan perdagangan Takkalasi Kecamatan Balusu, kawasan perdagangan Ralla Kecamatan Tanete Riaja, Kawasan perdagangan Doi-doi Kecamatan Pujananting, dan kawasan perdagangan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau.
   - ✓ Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kecamatan Balusu, Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Tanete Rilau.

c) Kawasan peruntukan perkantoran terdiri dari:
   - ✓ Kawasan perkantoran pemerintahan skala kabupaten diarahkan pada kawasan perkotaan Barru Kecamatan Barru dan kawasan perkantoran skala kecamatan dan desa diarahkan pada kawasan perkotaan PKLp, PPK dan PPL.
   - ✓ Kawasan perkantoran swasta diarahkan menyatu pada kawasan perkotaan Barru.

d) Kawasan peruntukan pelayanan umum terdiri dari:
   - ✓ Kawasan pendidikan di bagi atas kawasan pendidikan dasar diarahkan pada kawasan PPL di Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting, kawasan pendidikan menengah diarahkan pada kawasan PKLp dan PPK di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu,Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, dan Kecamatan Pujananting dan kawasan pendidikan tinggi diarahkan pada kawasan perkotaan Barru di Kecamatan Barru, kawasan

perkotaan Mangkoso diKecamatan Soppeng Riaja dan kawasan perkotaan Pekkae di Kecamatan Tanete Rilau.

- ✓ Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan terdiri dari puskesmas dan balai pengobatan diarahkan pada kawasan PPL di Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting dan pelayanan kesehatan skala regional berupa rumah sakit diarahkan pada kawasan perkotaan Barru di Kecamatan Barru.
- ✓ Kawasan peruntukan olahraga terdiri dari kawasan olahraga skala kabupaten diarahkan di kawasan perkotaan Barru Kecamatan Barru dan kawasan olahraga skala kecamatan diarahkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional.

e) Pengembangan Kawasan peruntukan permukiman tersebar pada semua wilayah dan secara spesifik dibagi menjadi dua kawasan permukiman seperti diuraikan berikut ini.

a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum serta prasarana wilayah perkotaan lainnya. Kawasan ini ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Barru Kecamatan Barru, Kawasan Perkotaan Palanro Kecamatan Mallusetasi, Kawasan Perkotaan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, Kawasan Perkotaan Ralla Kecamatan Tanete Riaja, Kawasan Perkotaan Takkalasi Kecamatan Balusu, Kawasan Perkotaan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau, dan Kawasan Perkotaan Doi-Doi Kecamatan Pujananting.

b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. Kawasan ini ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja,

sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Letak geografis dan kondisi geologis yang bervariasi dapat menyebabkan Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, badai, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin kencang. Kondisi tektonik Kabupaten Barru tidak dapat dipisahkan oleh struktur-struktur tektonik Sulawesi Selatan dan Sulawesi, secara keseluruhan yang mengakibatkan aktivitas gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Selatan dan sekitarnya antara lain :

1). Aktivitas tektonik, palung Sulawesi Utara terletak di pinggir Selatan cekungan Sulawesi, ujung Barat dimulai dari Selat Makassar memanjang ke arah Timur sepanjang Laut Sulawesi, gempa yang terjadi dalam palung ini adalah umumnya berasal dari kedalaman dangkal dan menengah yang didominasi oleh sesar naik (*Thrust Fault*).

2). Struktur tektonik inilah yang menyebabkan wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya sering mengalami gempa bumi. Jika gempa bumi ini berpusat di tengah lautan dengan magnitudo lebih besar dari 0,6 skala richter dan pusat gempanya dangkal (kurang dari 33 km), serta gempa bumi yang terjadi memiliki pola mekanisme dominan yaitu sesar naik atau turun akan menyebabkan tsunami.

Wilayah rawan bencana merupakan kawasan yang sering dan berpotensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam. Pada wilayah Kabupaten Barru terdapat wilayah rawan bencana alam yang terdiri dari kawasan rawan bencana alam banjir, kebakaran hutan, tanah longsor dan kawasan rawan ombak besar.

1). Banjir

Penyebab utama bencana banjir adalah curah hujan yang cukup tinggi, penggundulan hutan dihulu sungai, penyumbatan aliran atau saluran, tidak berfungsinya tanggul, selokan air yang tidak dapat menampung derasnya/besarnya debit air pada musim hujan.

2). Tanah Longsor

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barru terdiri dari tanah regosol, mediteran, litosol, aluvial, sebagian tanah tersebut berpotensi mengalami gerakan-gerakan yang dapat dikategorikan dalam empat jenis pergerakan yaitu; aliran tanak dan batu batuan, longsoran atau tanah longsor, runtuhan atau tanah runtuh, amblesan atau pergeseran tanah. Sedangkan penyebabnya atau terjadinya gerakan tanah tersebut antara lain : Topografi wilayah (lereng/ kemiringan); Keadaan tanah, bebatuan, struktur perlapisan dan lainnya; Kandungan air termasuk curah hujan; vegetasi, flora dan penggunaan lahan.

3). Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia.

4). Gelombang Pasang

Bencana gelombang pasang dan abrasi terjadi akibat pengikisan daerah pantai akibat gelombang laut yang sifatnya merusak.

5). Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan terjadi pada musim kemarau yaitu antara bulan April sampai bulan Oktober. Hal ini biasanya terjadi kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan pembabatan hutan atau pembukaan lahan oleh masyarakat serta musim kemarau yang berkepanjangan.

6). Kekeringan

Kekeringan adalah kondisi dimana Ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

Adapun wilayah di Kabupaten Barru yang merupakan wilayah rawan bencana dapat dilihat pada tabel 2.13. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan bencana di daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barru. Adapun tahapan proses dalam upaya mengurangi risiko bancana di Kabupaten Barru dimulai dari fase pra bencana. Tanggap darurat, pasca bencana dan juga dipengaruhi beberapa hal yaitu tingkat sinergitas antara organisasi perangkat daerah terkait, instansi lintas sektoral dan pihak dunia usaha dalam proses

pengurangan risiko bencana. Juga dibutuhkan kelengkapan dokumen perencanaan penanggulangan bencana.

Tabel 2.13

Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru

Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	Banjir		Longsor		Kebakaran		Angin Puting Beliung		Kekeringan	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Tanete Riaja	6	1	3	4	0	2	2	7	0	1
2	Tanete Rilau	0	1	0	7	0	2	2	12	0	1
3	B a r r u	14	1	0	3	0	3	2	9	0	1
4	Soppeng Riaja	0	1	0	3	0	1	2	9	0	1
5	Mallusetasi	2	1	0	2	0	1	0	3	0	0
6	Pujananting	8	0	15	21	0	1	2	0	0	1
7	Balusu	2	1	0	2	0	1	0	4	0	1

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025

Data kejadian bencana di Kabupaten Barru menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecendrungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian berdasarkan rentang tahun data. Data-data yang memperlihatkan kecendrungan peningkatan/penurunan kejadian secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14

Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Oleh

Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru 2022 – 2024

No	Kecamatan	Rusak Berat (Unit)		Rusak Sedang (Unit)		Rusak Ringan (Unit)		Terendam (Unit)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Tanete Riaja	7	0	4	3	19	5	0	0
2	Tanete Rilau	26	6	45	4	23	2	0	0
3	B a r r u	3	2	9	13	88	24	0	0
4	Soppeng Riaja	8	1	57	2	74	24	0	0
5	Mallusetasi	7	2	57	2	74	21	0	0
6	Pujananting	2	1	19	1	21	-	0	0
7	Balusu	-	1	-	9	-	29	-	0

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa terdapat kecendrungan peningkatan/penurunan kejadian bencana di Kabupaten Barru dalam rentang waktu tahun 2023 – 2024, dimana pada tahun 2023 menjadi tahun yang total bencananya cukup tinggi dibanding tahun 2024

khususnya bencana banjir, hal ini menjadi perhatian pemerintah kabupaten untuk melakukan antisipasi bencana.

Gambar 2.8

Dokumentasi Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Barru

Tahun 2024



Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

Adapun gambaran wilayah relokasi bencana untuk 7 kecamatan yang telah ditentukan oleh BPBD Kabupaten Barru dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.15

Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Kabupaten Barru

Tahun 2024

No	Jenis Bencana	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
1.	Tanete Riaja	Longsor	Lapangan Sepak Bola Ralla
		Cuaca Ekstrim	Pasar Ralla
		Kebakaran	PKG Maruala
2.	Tanete Rilau	Longsor	Lapangan Sepak Bola Pekkae
		Cuaca Ekstrim	SMA Aroppoe
		Kebakaran	Lapangan Sepak Bola Pancana
3.	Barru	Longsor	Lapangan Sepak Bola Sumpang Binangae
		Cuaca Ekstrim	SMA Lajulo
		Kebakaran	MAN Mangempang
4.	Soppeng Riaja	Longsor	Lahan Persawahan Pemda di Kel.Kiru-Kiru
		Cuaca Ekstrim	Lahan Perkebunan Pemda di Kel.Kiru-Kiru
		Kebakaran	Lapangan Sepak Bola Siddo
5.	Balusu	Longsor	Dusun Bulu Dua, Paddumpu, Baera, Rumpiah, dan Kamiri
		Cuaca Ekstrim	Dusun Madello, Pannikiang dan Ujunge
		Kebakaran	Lapangan Sepak Bola Madello
6.	Pujananting	Longsor	Lapangan Sepak Bola Doi-Doi
		Cuaca Ekstrim	PKG Ralla
		Kebakaran	SMP Doi-Doi

No	Jenis Bencana	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
7.	Mallusetasi	Longsor	Lapangan Sepak Bola Palanro
		Cuaca Ekstrim	SMK Bojo
		Kebakaran	MAN Lakkalitta

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir adalah meliputi ekosistem yang di dalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya banjir. Tempat- tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah area peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir dihilir. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh banjir umumnya terjadi pada bentuk lahan fluvial. Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi–sangat tinggi), kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah–rendah). Lahan yang berpotensi tinggi – sangat tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir memiliki luasan sebesar 55.221,88 Ha atau 45,76% dari keseluruhan lahan di Kabupaten Barru. Kategori sedang seluas 2.211,43 Ha (1,83%) dan kategori rendah seluas 63.208,71 Ha (52,41%). Rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16

Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir di Kab. Barru Tahun 2024

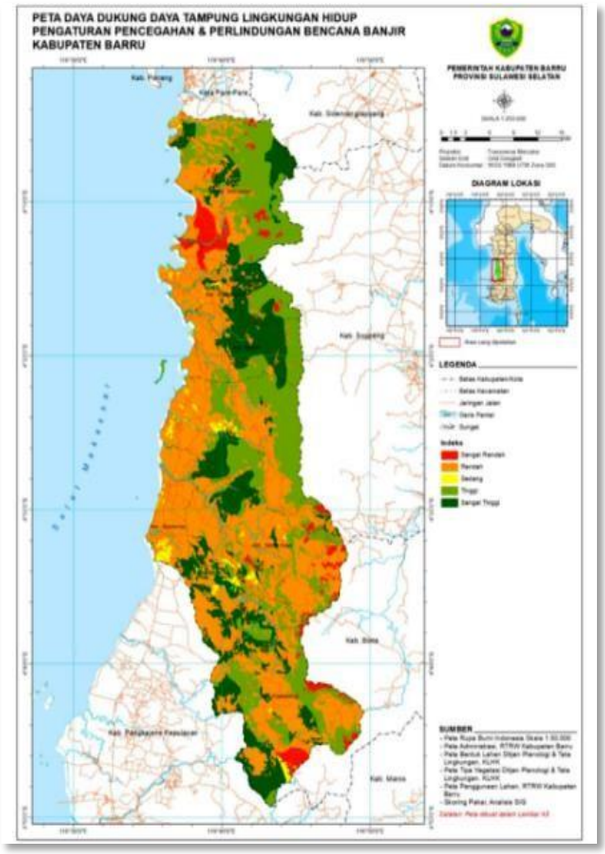
No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Banjir					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kec. Balusu	2,113.83	1,858.20	52.89	2,762.06	4,220.34	11,007.32
2	Kec. Barru	2,372.04	4,699.61	508.78	11,215.06	1,658.58	20,454.07
3	Kec. Mallusetasi	1,133.86	11,984.57	222.15	7,805.02	1,656.50	22,802.11
4	Kec. Pujananting	217.14	6,998.02	1,243.68	15,250.00	11,336.76	35,045.60
5	Kec. Soppeng Riaja	2,019.64	1,519.16	651.61	1,718.38	2,160.51	8,069.30
6	Kec. Tanete Riaja	101.72	5,659.34	1,105.20	7,956.42	1,174.05	15,996.73
7	Kec. Tanete Rilau	1,770.61	2,502.91	1,606.21	376.35	755.28	7,011.36
Grand Total		**9,728.84**	**35,221.81**	**5,390.53**	**47,083.29**	**22,962.02**	**120,386.49**

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kab Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas memberikan informasi bahwa Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dengan kategori tinggi (tinggi– sangat tinggi) yaitu Kec. Pujananting dengan luas 11,336.76 Ha, sedangkan kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dengan kategori rendah (sangat rendah–rendah) juga Kec. Tanete Riaja dengan luas 101.72 Ha.

Gambar 2.9

Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir Kabupaten Barru Tahun 2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru 2025

Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi– sangat tinggi), kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah– rendah). Lahan yang berpotensi tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor memiliki luasan sebesar 25.698,16 Ha(19,24%). Kategori sedang seluas 69.603,17 Ha (57,69%) dan kategori kelas rendah (sangat rendah–rendah) seluas 25.340,68 Ha (21%). Rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan

pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.17

Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor di Kabupaten Barru Tahun 2024

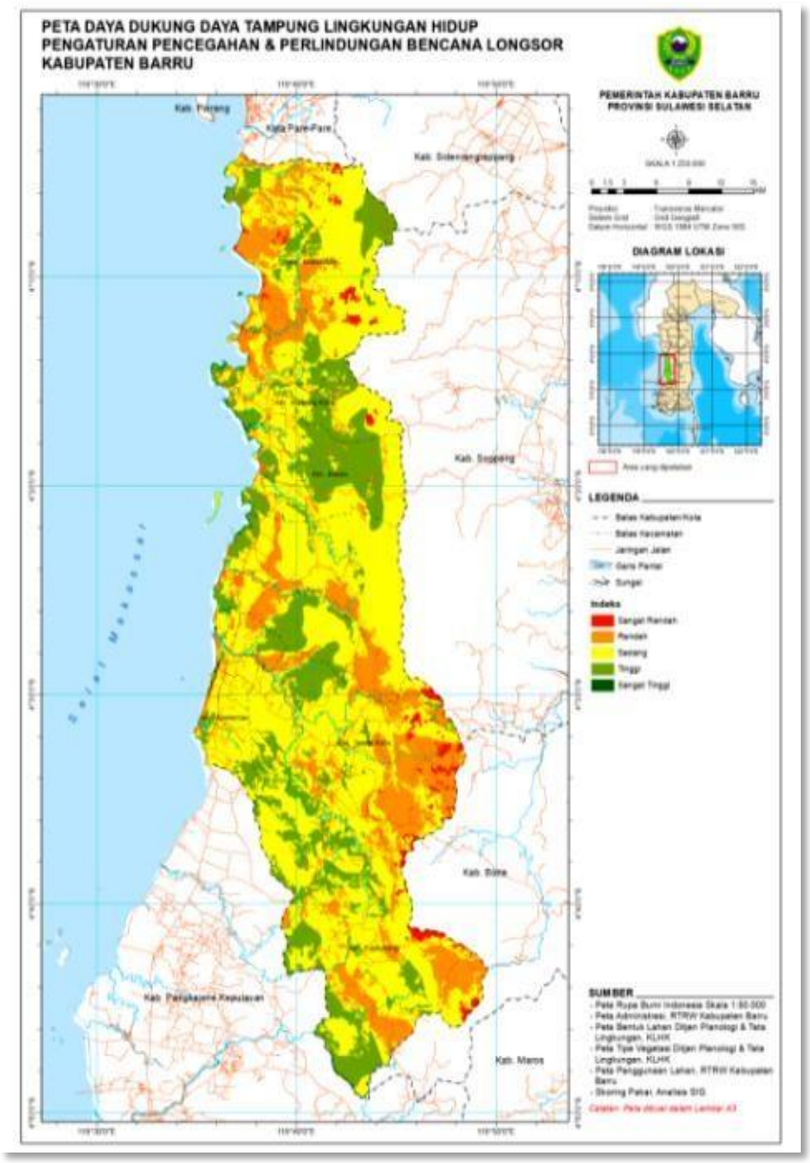
No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Longsor					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kec. Balusu	268.12	2,266.43	3,950.87	4,489.20	32.70	11,007.32
2	Kec. Barru	533.83	4,060.58	13,398.08	2,404.68	56.89	20,454.07
3	Kec. Mallusetasi	190.71	8,238.95	12,511.76	1,720.34	140.35	22,802.11
4	Kec. Pujananting	99.44	2,204.23	21,370.80	11,265.56	105.57	35,045.60
5	Kec. Soppeng Riaja	178.62	2,502.97	2,994.55	2,321.64	71.51	8,069.30
6	Kec. Tanete Riaja	53.45	1,815.88	12,675.05	1,312.68	139.68	15,996.73
7	Kec. Tanete Rilau	304.99	2,147.52	3,434.53	1,052.76	71.55	7,011.36
Grand Total		1,629.17	23,236.55	70,335.65	24,566.87	618.25	120,386.49

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dengan kategori sangat tinggi yaitu kecamatan Pujananting dengan luas 105.57 Ha sedangkan Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dengan kategori sangat rendah yaitu kecamatan Tanete Riaja dengan luas 53.45 Ha.

Gambar 2.10

Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor Kabupaten Barru Tahun 2024

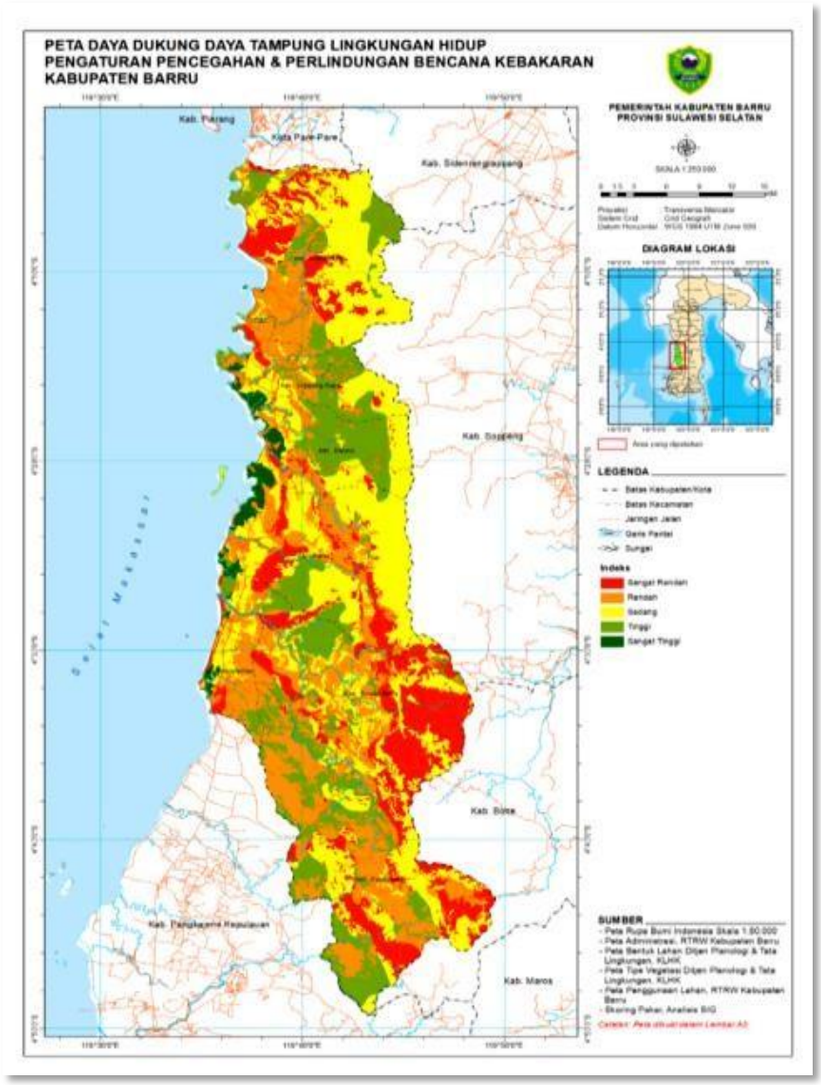


Sumber:Dinas Lingkungan Hidup 2025

Untuk Fungsi Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran dimana kinerja jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana kebakaran adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya kebakaran.

Gambar 2.11

Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2024



Sumber:Dinas Lingkungan Hidup 2025

Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi–sangat tinggi), kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah–rendah). Lahan yang berpotensi tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran memiliki luasan sebesar 25,800.97 Ha (19,67%). Kategori sedang seluas 53,569.85 Ha (57,69%) dan kategori kelas rendah (sangat rendah) seluas 28,388.28 Ha (21%).

Adapun rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18

Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran di Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Kebakaran					Grand Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kec. Balusu	361.47	2,716.32	2,989.05	4,882.08	58.40	11,007.32
2	Kec. Barru	656.32	5,154.10	12,157.77	2,347.41	138.45	20,454.07
3	Kec. Mallusetasi	6,911.55	5,431.54	8,545.48	1,737.00	176.53	22,802.11
4	Kec. Pujananting	653.47	5,454.75	17,566.26	11,275.28	95.85	35,045.60
5	Kec. Soppeng Riaja	433.28	2,738.91	1,982.28	2,789.61	125.21	8,069.30
6	Kec. Tanete Riaja	1,857.24	3,229.71	9,238.64	1,576.44	94.70	15,996.73
7	Kec. Tanete Rilau	693.40	3,662.94	1,090.37	1,193.13	371.51	7,011.36
Grand Total		11,566.73	28,388.28	53,569.85	25,800.97	1,060.66	120,386.49

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Barru Tahun 2025

2.1.1.4 Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Barru menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun periode 2020 - 2024 sebesar 1,38 persen, dimana Jumlah penduduk Kabupaten Barru pada Tahun 2020 sebesar 182.373 jiwa meningkat menjadi sebesar 195.358 jiwa pada Tahun 2024. Jumlah penduduk Kabupaten Barru dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan, seperti diuraikan pada tabel berikut ini..

Tabel 2.19

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Laju pertumbuhan Penduduk (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Tanete Riaja	25.702	26.016	26.265	26.755	26.869	1,87
2.	Tanete Rilau	37.788	38.429	38.858	39.451	39.736	1,53
3.	Barru	44.746	45.340	46.060	46.642	46.827	1,26
4.	Soppeng riaja	18.598	18.645	18.761	18.900	18.977	0,74
5.	Mallusetasi	27.746	28.059	28.218	28.500	28.538	1,00
6.	Pujananting	13.355	13.594	13.715	13.964	13.999	1,82
7.	Balusu	19.507	19.794	20.018	20.331	20.439	1,56
Total		**187.442**	**189.877**	**191.895**	**194.543**	**195.385**	**1,38**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Data kepadatan penduduk Kabupaten Barru berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyebutkan bahwa pada tahun 2024 dengan jumlah penduduk sebesar 195,385 jiwa, kepadatan penduduk Kabupaten Barru sebesar 166,32 Km^2.

Distribusi penduduk di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 ini terlihat sangat tinggi di Kecamatan Barru yakni sebesar 46.827 jiwa atau 23,97% penduduk, lalu disusul oleh Kecamatan Tanete Rilau sebesar 39.736 jiwa atau 20,34%, Kecamatan Mallusetasi sebesar 28.538 jiwa atau 14,61%, Kecamatan Tanete Riaja sebesar 26.869 jiwa atau 13,75%, Kecamatan Balusu sebesar 20.439 jiwa atau 10,46%, Kecamatan Soppeng Riaja sebesar 18.977 jiwa atau 9,71% dan Kecamatan Pujananting sebesar 13.999 jiwa atau 7,16%.

Komposisi penduduk menurut umur dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut umur tertentu. Komposisi menurut umur dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

a. Usia belum produktif (kelompok umur <14 tahun)
b. Usia produktif (kelompok umurantara 15 - 64 tahun),
c. Usia tidak produktif (kelompok umur > 64 tahun)

Untuk mengetahui struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Barru (Jiwa) Tahun 2024

No	Usia Non Produktif Dan Produktif	Jenis Kelamin		Penduduk n (jiwa)	Persen (%)
		laki2 n (jiwa)	perempuan n (jiwa)		
1.	00-14 Tahun (Usia Muda/Non Produktif)	22.367	20.985	43.352	22,19
2.	15-64 Tahun (Usia Produktif)	65.360	67.325	132.685	67,91
3.	>=65 Tahun (Usia Tua/Non Produktif)	8.279	11.069	19.348	9,90
Total		**96.006**	**99.379**	**195.385**	**100**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Barru masih didominasi oleh penduduk yang berusia produktif.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin adalah penduduk yang dibagi menjadi kelompok jenis kelamin yaitu laki–laki dan perempuan. Struktur penduduk menurut jenis kelamin disuatu wilayah dapat

dianalisis dengan menghitung rasio jenis kelamin (sex ratio) diwilayah tersebut. Rasio jenis kelamin merupakan angka yang didapat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Rasio jenis kelamin terakit penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana serta tingka kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.21

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kab.Barru Tahun 2020 s.d 2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio (%)
		L	P	Total	
1	2020	91.963	95.429	187.392	96
2	2021	93.231	96.646	189.877	96
3	2022	94.251	97.644	191.895	96
4	2023	95.571	98.972	194.543	97
5	2024	96.006	99.379	195.385	97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dan berdasarkan rasio pada tahun 2024 yang sebesar 97 berarti dari 100 orang perempuan terdapat 97 orang laki-laki.

Rumah tangga dapat diartikan satu orang anggota atau sekelompok orang yang tinggal bersama tetapi dengan atau tidak memiliki hubungan persaudaraan atau ikatan perkawinan. Untuk mengetahui struktur penduduk berdasarkan jumlah rumah tangga pada tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22

Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga

Kab.Barru Tahun 2020 - 2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (RT)				
		2020	2021	2022	2023	2024
731101	Tanete Riaja	8.189	8.446	8.690	8.880	9.056
731102	Tanete Rilau	11.870	12.245	12.594	12.844	13.152
731103	Barru	14.028	14.149	14.917	15.185	15.534
731104	Soppeng Riaja	5.991	6.180	6.301	6.355	6.463
731105	Mallusetasi	8.888	9.086	9.328	9.482	9.619
731106	Pujananting	4.237	4.354	4.500	4.567	4.674

Kode	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (RT)				
		2020	2021	2022	2023	2024
731107	Balusu	6.432	6.653	6.798	6.915	7.108
TOTAL		**54.707**	**56.657**	**63.128**	**64.228**	**65.606**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tangga di tiap tahunnya mengalami peningkatan, yakni dari tahun 2020 sebesar 51.510 RT meningkat sampai dengan tahun 2024 sebesar 64.228 RT.

Tingkat pendidikan penduduk yang dicapai oleh suatu wilayah akan memberkan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan di Kabupaten Barru pada tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Barru

Tahun 2020 s.d 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Belum/Tidak Punya ijazah	62.996	63.970	63.057	62.785	62.548
2	Tamat SD	54.021	53.309	53.125	52.734	52.325
3	Tamat SMP	25.353	26.516	27.557	28.523	28.707
4	Tamat SMA	31.448	32.180	33.500	35.140	36.429
5	Diploma	2.780	2.795	2.869	2.910	2.914
6	Sarjana S1	10.143	10.425	11.061	11.673	12.245
7	Sarjana S2	630	657	701	750	795
8	Sarjana S3	21	25	25	28	38
Total		**182.373**	**187.392**	**191.895**	**194.543**	**196.001**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Barru untuk kategori belum/ tidak punya ijazah dan tamat SD mengalami penurunan, sementara kategori tamat SMP hingga Sarjana S3 mengalami peningkatan.

Berdasarkan pengelompokan umur tersebut dapat diketahui rasio beban tanggungan (dependency ratio) yang dapat digunakan untuk melihat angka ketergantungan suatu wilayah. Rasio beban tanggungan adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif. Persentase rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) yang rendah menunjukkan rendahnya

beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi.

Tabel 2.24

Rasio Ketergantungan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia <15 tahun (Jiwa)	45.478	45.828	46.118	45.608	45.087
2	Jumlah Penduduk usia>64 tahun (Jiwa)	16.275	16.865	17.079	18.067	18.996
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (Jiwa)	61.753	62.693	63.197	63.675	64.083
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun (Jiwa)	125.639	127.184	128.698	130.868	131.918
5	**Rasio ketergantungan (%)**	**49,15**	**49,29**	**49,10**	**48,66**	**48.58**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2024

Berdasarkan Data yang diuraikan diatas, Kabupaten Barru memiliki Rasio Ketergantungan yang berfluktuatif pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 49,29 persen, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 48,58 persen.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatanya itu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan, yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian sedangkan PDRB atas dasar harga konstan atau yang dikenal dengan PDRB riil disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur laju pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi), angka yang ditunjukkan oleh PDRB merupakan penjumlahan seluruh

pendapatan yang diperoleh perekonomian suatu daerah yang dikelompokkan dalam 17 sektor rincian kategori lapangan usaha yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estate, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sektor Jasa Lainnya.

Untuk mengetahui nilai dan distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan dan harga berlaku dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.25

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), Tahun 2020 – 2024

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.662,67	1.751,02	1.829,94	1.843,85	1.924,07
2	Pertambangan dan Penggalian	139,11	144,10	148,21	158,11	164,81
3	Industri Pengolahan	247,14	259,09	282,11	289,19	302,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,80	7,28	7,41	8,67	8,57
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,80	6,08	6,69	6,98	7,10
6	Konstruksi	792,83	825,59	846,17	897,62	926,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	497,56	524,82	558,81	586,68	622,41
8	Transportasi dan Pergudangan	112,19	121,03	139,15	149,72	158,91
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	48,24	50,57	58,43	63,59	67,45
10	Informasi dan	313,08	332,02	354,82	385,96	410,45

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Komunikasi					
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	127,94	136,88	138,06	133,49	133,50
12	Real Estate	160,00	163,82	172,8	185,31	196,49
13	Jasa Perusahaan	1,18	1,24	1,44	1,56	1,67
14	Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan	371,71	376,89	395,40	395,14	412,99
15	Jasa Pendidikan	195,61	200,90	207,27	212,33	226,57
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125,65	134,24	145,40	157,12	176,25
17	Jasa Lainnya	31,60	34,41	37,22	40,94	47,34
Jumlah PDRB		**4.797,43**	**5.069,99**	**5.329,31**	**5.516,25**	**5.787,54**

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.26

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), Tahun 2020 – 2024

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.528,15	2.808,89	3.109,27	3.071,53	3.111,50
2	Pertambangan dan Penggalian	225,39	236,21	252,37	275,38	286,51
3	Industri Pengolahan	348,63	373,45	421,44	455,29	491,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,84	7,40	7,63	9,18	9,31
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,93	8,41	9,47	10,10	10,30
6	Konstruksi	1.428,09	1.556,41	1.690,44	1.918,05	2.003,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	688,31	740,99	827,12	896,01	998,17
8	Transportasi dan Pergudangan	181,39	206,40	268,68	330,25	366,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	75,78	80,59	96,93	108,11	117,65
10	Informasi dan Komunikasi	359,36	383,61	417,99	460,15	504,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	217,16	239,25	263,38	264,46	271,03

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
12	Real Estate	241,06	247,76	269,75	291,79	314,41
13	Jasa Perusahaan	1,67	1,79	2,18	2,47	2,71
14	Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	616,47	630,94	665,62	674,22	721,95
15	Jasa Pendidikan	273,55	279,55	293,92	307,05	324,08
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	180,57	198,01	217,42	241,89	270,02
17	Jasa Lainnya	51,94	57,56	64,78	75,28	88,46
Jumlah PDRB		**7.271,22**	**8.057,26**	**8.878,37**	**9.391,20**	**9.891,13**

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.27

Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Barru (Persen), 2020 – 2024

No	Lapangan Usaha	2020		2021		2022	2023			2024	
		Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,02	0,60	34,86	5,31	35,02	4,51	32,71	0,76	31,46	4.35
2	Pertambangan dan Penggalian	3,03	0,69	2,93	3,59	2,84	2,85	2,93	6,68	2,90	4.24
3	Industri Pengolahan	4,69	-2,59	4,63	4,48	4,75	8,88	4,85	2,51	4,97	4.43
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	6,49	0,09	6,98	0,09	1,86	0,10	16,89	0,09	-1.06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	13,63	0,10	4,89	0,11	10,01	0,11	4,32	0,10	1.82
6	Konstruksi	19,21	1,00	19,32	4,13	19,04	2,49	20,42	6,08	20,25	3.26
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,26	-1,54	9,20	-5,48	9,32	6,48	9,54	4,99	10,09	6.09
8	Transportasi dan Pergudangan	2,44	-11,07	2,56	7,87	3,03	14,97	3,52	7,60	3,70	6.14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,02	-0,08	1,00	4,83	1,09	15,54	1,15	8,83	1,19	6.08
10	Informasi dan Komunikasi	4,84	11,25	4,76	6,05	4,71	6,87	4,90	8,77	5,10	6.35
11	Jasa Keruangan dan Asuransi	2,92	2,65	2,97	6,99	2,97	0,86	2,82	-3,31	2,74	0.00
12	Real Estate	3,24	2,68	3,07	2,39	3,04	5,47	3,11	7,25	3,18	6.03

13	Jasa Perusahaan	0,02	-5,80	0,02	4,85	0,02	16,21	0,03	8,28	0,03	7.27
14	Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,29	-1,13	7,83	1,40	7,50	4,91	7,18	-0,07	7,30	4.52
15	Jasa Pendidikan	3,68	4,90	3,47	2,71	3,31	3,17	3,27	2,44	3,28	6.71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,43	7,12	2,56	6,83	2,45	8,31	2,58	8,06	2,73	12.17
17	Jasa Lainnya	0,70	-6,18	0,71	8,89	0,73	8,18	0,80	9,97	0,89	15.66
Produk Domestik Regional Bruto		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai produk domestik regional bruto (PDRB) baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, begitupula distribusi masing-masing kategori lapangan usaha terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) berfluktuatif dari tahun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dan dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan PDRB menurut sektor/kategori lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28

Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,6	5,31	4,51	0,76	4,34
2	Pertambangan dan Penggalian	0,69	3,59	2,85	6,68	4,24
3	Industri Pengolahan	-2,59	4,84	8,88	2,51	4,43
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,49	6,98	1,86	16,89	-1,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,63	4,89	10,01	4,32	1,82
6	Konstruksi	1	4,13	2,49	6,08	3,26

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,54	5,48	6,48	4,99	6,09
8	Transportasi dan Pergudangan	-11,07	7,87	14,97	7,60	6,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,08	4,83	15,54	8,83	6,08
10	Informasi dan Komunikasi	11,25	6,05	6,87	8,77	6,35
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,65	6,99	0,86	-3,31	0,00
12	Real Estate	2,68	2,39	5,47	7,25	6,03
13	Jasa Perusahaan	-5,8	4,85	16,21	8,28	7,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,13	1,40	4,91	-0,07	4,52
15	Jasa Pendidikan	4,9	2,71	3,17	2,44	6,71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,12	6,83	8,31	8,06	12,17
17	Jasa Lainnya	-6,18	8,89	8,18	9,97	15,66
Produk Domestik Regional Bruto		**7,41**	**4,77**	**5,11**	**3,51**	**4,92**

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas laju pertumbuhan masing-masing sektor lapangan usaha pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif namun cenderung meningkat setelah mengalami resesi pada saat pandemi di tahun 2021. Sementara itu perbandingan PDRB atas Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan Wilayah sekitar diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29

Perbandingan PDRB Atas Harga Konstan (ADHK) dan Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2022 – 2024 (Miliar Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	ADHB (Miliar Rupiah)			ADHK (Miliar Rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1		8.878,37	9.427,11	9.891,13	5.329,31	5.516,25	5.787,54
2	Kota Pare-pare	8.697,28	9.311,60	9.972,18	5.468,43	5.680,82	5.969,77
3		13.741,84	14.909,33	16.099,18	8.054,42	8.322,53	8.660,66

No	Kabupaten/ Kota	ADHB (Miliar Rupiah)			ADHK (Miliar Rupiah)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
4	Kab.Sidrap	16.699,00	18.204,03	19.614,67	9.297,02	9.601,72	9.990,29
5	Kab. Pangkep	30.481,86	32.667,18	34.607,22	18.363,59	19.236,71	20.197,59
6	Kab. Bone	43.640,84	46.935,17	50.015,24	24.491,73	25.416,03	26.825,37

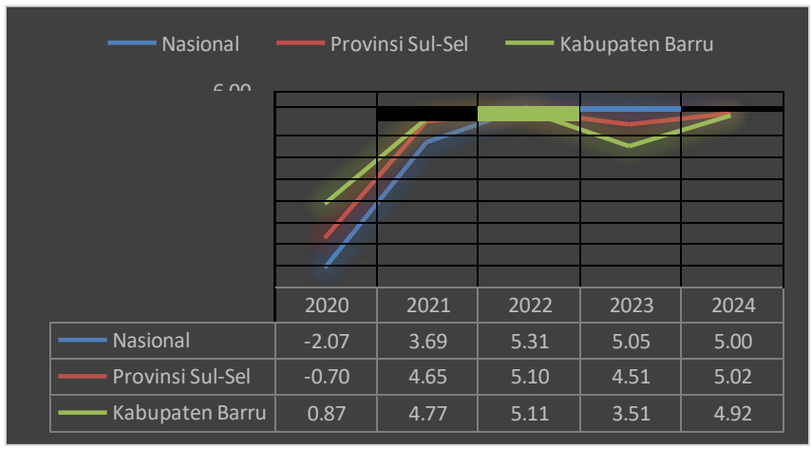
Sumber : BPS Tahun 2025

Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku seperti yang diuraikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota wilayah sekitar, Kabupaten Barru memiliki PDRB baik ADHK maupun ADHB yang lebih kecil dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya.

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dan dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.1

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	-2.07	3.69	5.31	5.05	5.00
Provinsi Sul-Sel	-0.70	4.65	5.10	4.51	5.02
Kabupaten Barru	0.87	4.77	5.11	3.51	4.92

Sumber : BPS Tahun 2025

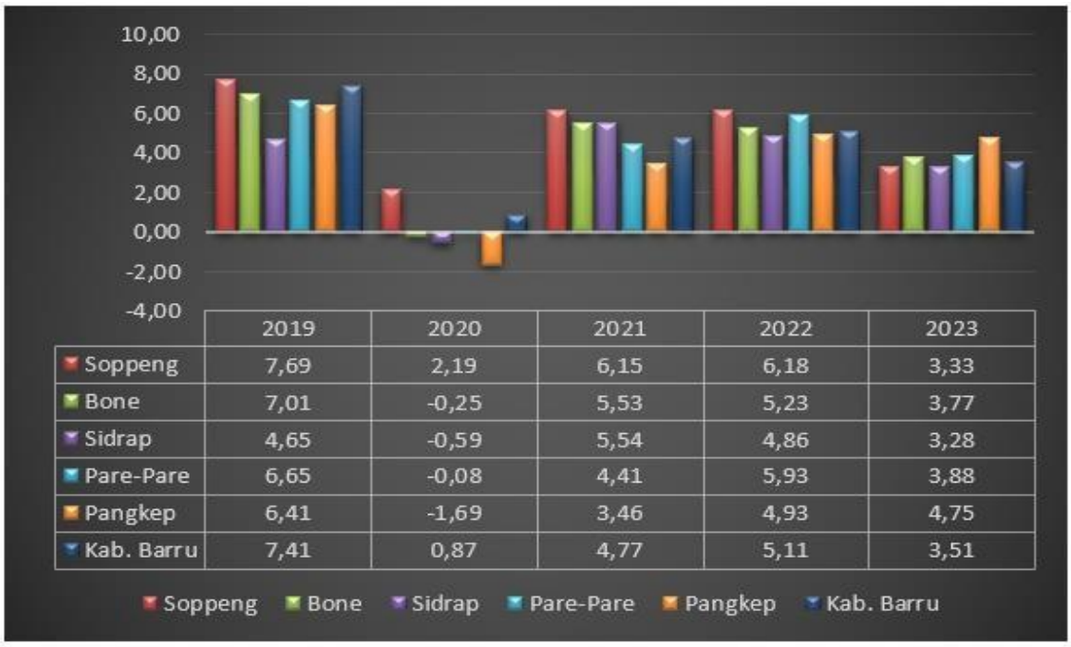
Grafik diatas menunjukkan dari tahun 2020-2024 trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, namun pada tahun 2023 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru berada di bawah

Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan pada tahun 2020 hingga tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru berada lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2020 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru mengalami resesi pada angka 0,87 akibat pandemi covid19. Pertumbuhan ekonomi setelah masa pandemi covid19 di tahun 2021-2022 pelan-pelan memperlihatkan trend yang positif, program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Daerah menunjukkan potensi keberhasilan dalam stabilisasi ekonomi nasional hingga ke daerah. Namun pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru kembali lebih turun dari tahun sebelumnya yaitu berada pada angka 3,51

Sementara untuk Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 2.2

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2020 – 2024



	2019	2020	2021	2022	2023
Soppeng	7,69	2,19	6,15	6,18	3,33
Bone	7,01	-0,25	5,53	5,23	3,77
Sidrap	4,65	-0,59	5,54	4,86	3,28
Pare-Pare	6,65	-0,08	4,41	5,93	3,88
Pangkep	6,41	-1,69	3,46	4,93	4,75
Kab. Barru	7,41	0,87	4,77	5,11	3,51

Sumber : BPS Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan wilayah tetangga yang berbatasan langsung yakni Kab. Pangkep, Kab. Soppeng. Kab. Sidrap, Kab.Bone dan Kota Parepare, Laju pertumbuhan ekonomi (PE) Kabupaten Barru dari tahun 2020 - 2022 secara gradual mengalami percepatan pertumbuhan dan meningkat tiap tahunnya jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten di wilayah sekitar yang cenderung fluktuatif.

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah dengan melihat peranan masing-masing sektor lapangan usaha terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Struktur perekonomian Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30

Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barru Tahun 2020 - Tahun 2024

No	Lapangan Usaha	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,02	34,86	35,02	32,71	31,46
2	Pertambangan dan Penggalian	3,03	2,93	2,84	2,93	2,90
3	Industri Pengolahan	4,69	4,63	4,75	4,85	4,97
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,1	0,11	0,11	0,10
6	Konstruksi	19,21	19,32	19,04	20,42	20,25
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,26	9,2	9,32	9,54	10,09
8	Transportasi dan Pergudangan	2,44	2,56	3,03	3,52	3,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,02	1,09	1,09	1,15	1,19
10	Informasi dan Komunikasi	4,84	4,76	4,71	4,90	5,10
11	Jasa Keruangan dan Asuransi	2,92	2,97	2,97	2,82	2,74
12	Real Estate	3,24	3,07	3,04	3,11	3,18
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
14	Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,29	7,83	7,50	7,18	7,30
15	Jasa Pendidikan	3,68	3,47	3,31	3,27	3,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,43	2,46	2,45	2,58	2,73
17	Jasa Lainnya	0,7	0,71	0,73	0,80	0,89
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

2. PDRB Per kapita

Nilai PDRB per kapita sering digunakan sebagai alat ukur atau indikator tingkat kemakmuran suatu daerah, angka ini diperoleh

dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku lebih banyak digunakan oleh para pengambil kebijakan di bidang ekonomi untuk melihat perkiraan pendapatan masyarakat pada waktu terkini, sedangkan atas dasar harga konstan biasanya dipergunakan untuk data perbandingan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (HB) dan harga konstan (HK) dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

Tahun	ADHB (Rp.)	ADHK (Rp.)
2020	40.363,08	26.280,12
2021	43.464,64	27.349,94
2022	47.559,79	28.548,14
2023	49.965,97	29.349,25
2024	52.274,82	30.587,26

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

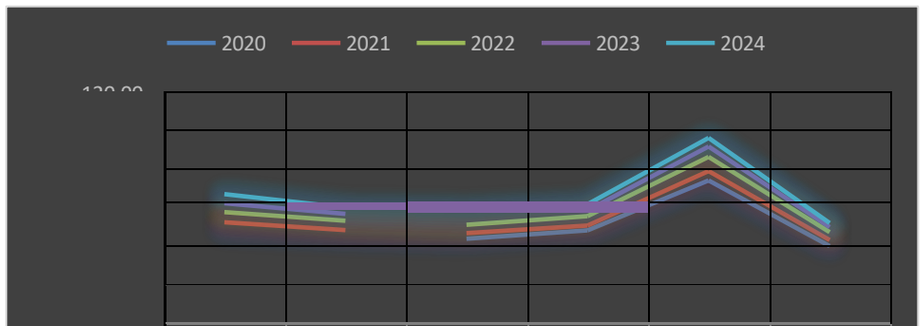
PDRB Perkapita atas dasar harga konstan (HK) mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. kondisi pandemi covid19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita di tahun 2021, sehingga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. PDRB Perkapita atas dasar harga Berlaku (Hb) mengalami peningkatan tahun 2020 sampai tahun 2024. Peningkatan signifikan dalam periode tahun 2020 -2024 terjadi pada tahun 2024 yang mana capaian PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tersebut mencapai 52,2 juta.

Dengan demikian, maka dapat dijelaskan bahwa capaian PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku di tahun 2024 telah melebihi target dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2024 sebesar 47,08 juta.

Grafik 2.3

Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020 - 2024

(dlm Juta Rupiah)



	Soppeng	Bone	Sidrap	Parepare	Pangkep	Barru
2020	48.82	45.68	44.12	48.50	74.38	40.36
2021	52.67	48.67	47.04	51.03	79.12	43.47
2022	57.95	53.48	51.37	55.78	86.58	47.56
2023	62.58	57.02	55.51	58.78	91.86	50.16
2024	67.26	60.25	59.30	61.97	96.35	52.27

Sumber : BPS Tahun 2025

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan PDRB perkapita kabupaten/kota wilayah sekitar, di Kabupaten Barru masih stabil, namun demikian Kabupaten Barru tetap berada di posisi paling bawah diantara 5 Kabupaten Kota pada wilayah sekitarnya.

3. Inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga- harga secara umum dan terus menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas dipasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu, hal ini bila berlebihan dapat berdampak penurunan daya beli masyarakat.

Data inflasi Kabupaten Barru sampai hari ini tidak tersedia (tidak dihitung) oleh Kabupaten Barru Dalam Angka (BPS) hanya ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan laju inflasi yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kota Parepare, dan kota Palopo. Kabupaten/kota yang paling dekat dengan Kabupaten Barru adalah Kota Parepare. Laju inflasi Kabupaten/Kota yang menjadi sampel Kabupaten Barru Dalam Angka di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32

Perbandingan Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 -2024

No	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Bulukumba	2,30	2,16	4,12	2,78	0.91
2	Kab. Bone	1,89	2,26	5,52	2,84	1.11
3	Kota Makassar	2,13	2,26	5,81	2,89	1.19
4	Kota Pare-pare	1,61	4,09	6,66	2,22	1.73
5	Kota Palopo	1,21	2,96	5,13	2,21	1.87

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

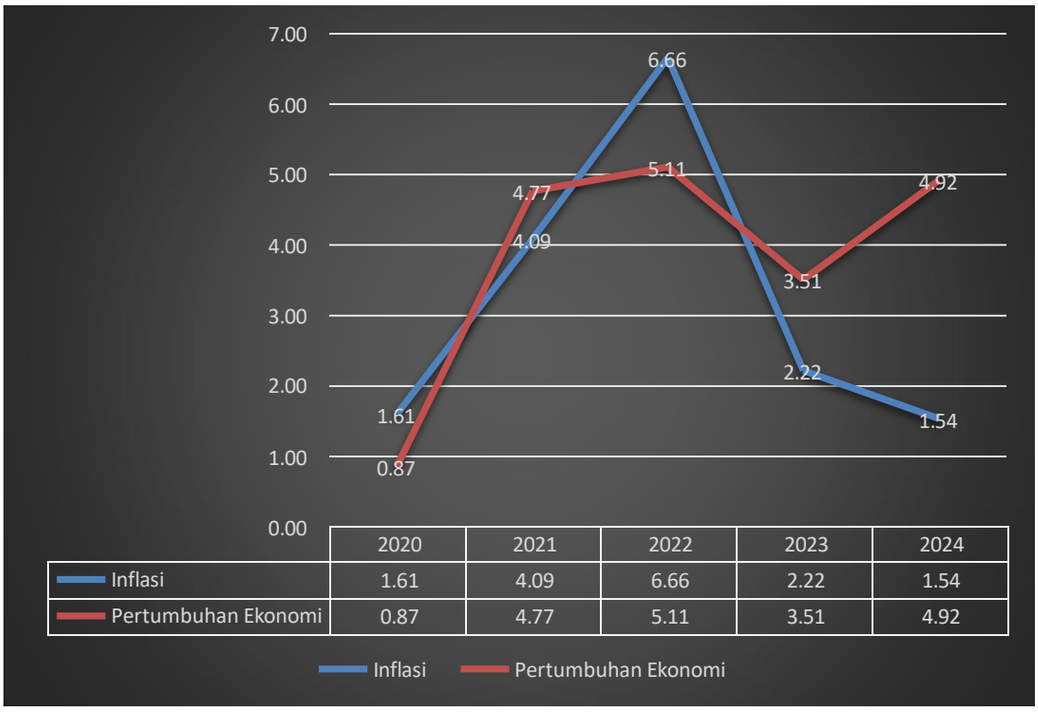
Berdasarkan tabel di atas trend inflasi di hampir seluruh kota di Sulawesi Selatan pada rentang tahun 2020 -2024 cenderung mengalami penurunan, terjadi peningkatan di periode tahun 2022 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024. Inflasi tertinggi di tahun 2024 terjadi di Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Pada tahun 2024, laju inflasi Kota Pare-Pare menurun drastis dari 6,66 pada tahun 2022 menjadi 1.73 pada tahun 2024, hal ini tentu harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Barru, karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Kota Pare-Pare yang berbatasan langsung dengannya.

Dalam beberapa teori laju inflasi yang rendah dan stabil akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Barru memperlihatkan inflasi yang fluktuatif, tingginya inflasi di tahun 2021 dan 2022 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru hal ini dikarenakan sektor rill masih mampu terdorong untuk berkembang serta sektor perdagangan berjalan dengan baik. Secara rinci hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik 2.4

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Tahun 2025

4. Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Standar penilaian ketimpangan Indeks Gini ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995) :

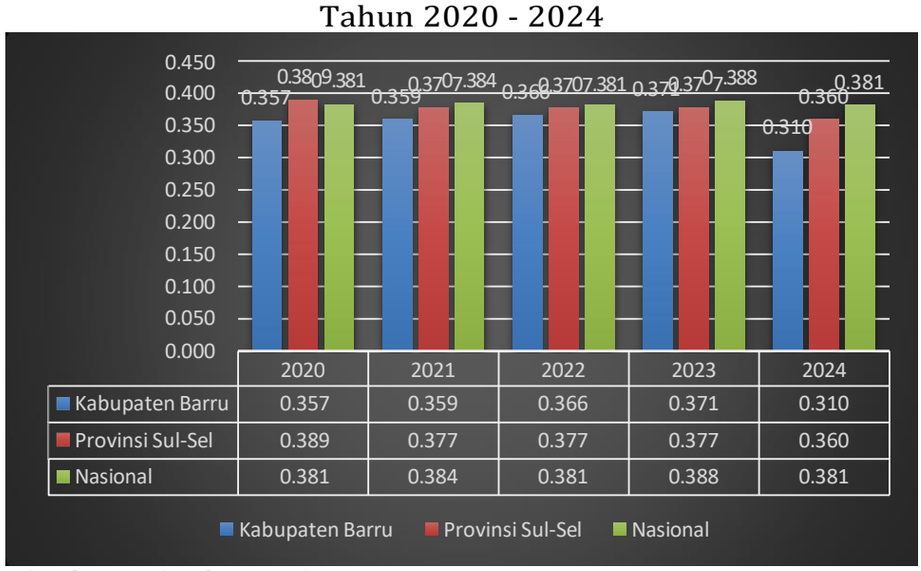
1. GR < 0.4 dikategorikan sebagaiketimpangan rendah
2. 0.4 <GR < 0.5dikategorikan sebagaiketimpangan sedang (Moderat)
3. GR >0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Indeks Gini di Kabupaten Barru pada tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.5

Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru

Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Tahun 2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Barru. Pada tahun 2020 Indeks Gini Kabupaten Barru sebesar 0,357 dan pada tahun 2024 menurun menjadi 0,340. Peningkatan Indeks Gini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan pendapatan di Kabupaten Barru. Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar kesenjangan antara pendapatan yang dimiliki oleh kelompok kaya dan miskin. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam distribusi kekayaan atau pendapatan di masyarakat. Peningkatan Indeks Gini wajib menjadi perhatian karena dapat mencerminkan ketidakadilan sosial dan ekonomi serta dapat memperburuk masalah kemiskinan dan ketimpangan social.

Tabel 2.33

Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar

Tahun 2020 – 2024

No	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Barru	0,357	0,359	0,366	0,371	0.310
2	Kota Pare-pare	0,373	0,381	0,379	0,381	0,376
3	Kab. Soppeng	0,357	0,406	0,386	0,390	0,381
4	Kab.Sidrap	0,349	0,358	0,354	0,345	0,319
5	Kab. Pangkep	0,345	0,363	0,334	0,354	0,317

No	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kab. Bone	0,404	0,383	0,376	0,389	0,386

Sumber : BPS Tahun 2025

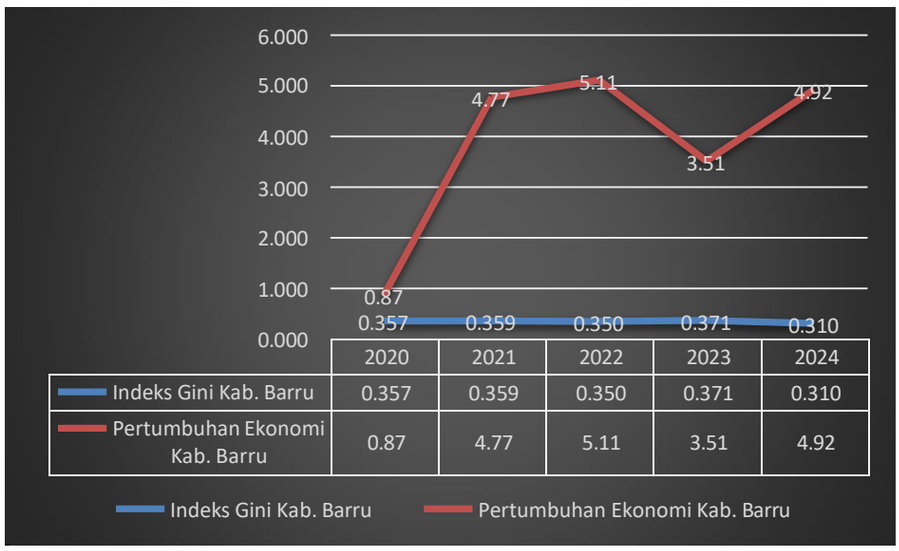
Berdasarkan Data yang diuraikan diatas, Kabupaten Barru memiliki ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) yang berfluktuatif pada periode tahun 2020 -2024, pada periode tahun 2020 -2021 mengalami penurunan, tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 dan 2024. Ini mengindikasikan bahwa sejak tahun 2020 – 2021 Kabupaten Barru telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta adanya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan yang mengarah pada kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah turut berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Konsen pemerintah Kabupaten barru dalam menurunkan kemiskinan memiliki peran yang cukup besar. Yang perlu menjadi perhatian adalah pada tahun 2024 indeks gini kabupaten barru mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan.

Pada gambar berikut menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh semakin menurunnya Indeks Gini berarti bahwa semakin inklusifnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan Indeks Gini secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 2.6

Hubungan Indeks Gini dengan pertumbuhan ekonomi

Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Tahun 2025

6. Indeks Williamson

Indeks wiliamson merupakan salah satu indeks yang digunakan dalam melihat disparitas yang terjadi antar wilayah dan lebih sensitif terhadap perubahan ketimpangan (Rustiadi *et al.* 2011). Indeks wiliamson merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan untuk melihat disparitas antara wilayah secara horizontal. Indeks Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika Yi = Y maka akan dihasilkan indeks = 0, yang berarti tidak adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat ketimpangan antar kecamatan di satu kabupaten.

Menurut Rustiadi *et al.* (2011), wilayah yang memiliki PDRB per kapita tinggi, dan jumlah penduduknya relatif kecil, tingkat kesenjangannya tidak terlalu tinggi. Namun, besaran PDRB per kapita suatu wilayah relatif moderat apabila dibandingkan dengan wilayah lain yang kecil dengan jumlah penduduknya relatif besar, sehingga akan menyebabkan kesenjangan secara keseluruhan. Adapun indeks Williamson Kabupaten Barru seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34

Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Barru

Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketimpangan Williamson	0,29	0,29	0,57	0,56	0,26

Sumber : Data Olahan tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat tingkat disparitas yang terjadi di Kabupaten Barru berdasarkan PDRB Perkapita per Kecamatan. Dapat dilihat bahwa tingkat disparitas antar wilayah kecamatan di Kabupaten Barru pada tahun 2020 hingga 2023 cenderung sama dan meningkat nilainya, hanya di tahun 2024 menurun menjadi 0,26. perhitungan indeks Williamson sangat tergantung pada data PDRB per kecamatan. Meskipun nilai indeks menunjukkan tingkat disparitas wilayah yang rendah yang berarti bahwa kinerja pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi wilayah dapat menekan terjadinya disparitas wilayah, namun kecendrungan terjadinya peningkatan nilai indeks

menunjukkan bahwa jika tidak diantisipasi di masa mendatang akan rentan terjadi disparitas wilayah.

Sementara untuk melihat tingkat hirarki perkembangan wilayah berdasarkan jumlah ketersediaan fasilitas, luas wilayah, jumlah penduduk serta jarak tempuh wilayah ke pusat pelayanan digunakan metode skalogram. Metode yang banyak digunakan untuk menentukan hierarkhi wilayah oleh Struktural Analisis adalah *Guttman scales.* Metode ini mengidentifikasi hierarkhi pusat dari fasilitas umum yang dimiliki suatu wilayah. Skalogram yang merupakan penggabungan atau penyederhanaan Skala Guttman. Dalam metode skalogram, seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap unit wilayah didata dan disusun dalam satu Tabel. Metode skalogram ini bisa digunakan dengan menuliskan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh setiap wilayah, atau menuliskan ada/tidaknya fasilitas tersebut di suatu wilayah tanpa memperhatikan jumlah/kuantitasnya.

Indeks Perkembangan Wilayah dikelompokkan ke dalam tiga kelas hirarki, yaitu; hirarki I (tinggi), hirarki II (sedang), hirarki III (rendah). Penentuannya didasarkan pada nilai hasil standar deviasi IPW dan nilai rataannya. Nilai yang didapat untuk selang hirarki dan digunakan untuk menentukan kelas hirarki dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.35

Penentuan nilai selang kelas hirarki

untuk Analisis Skalogram

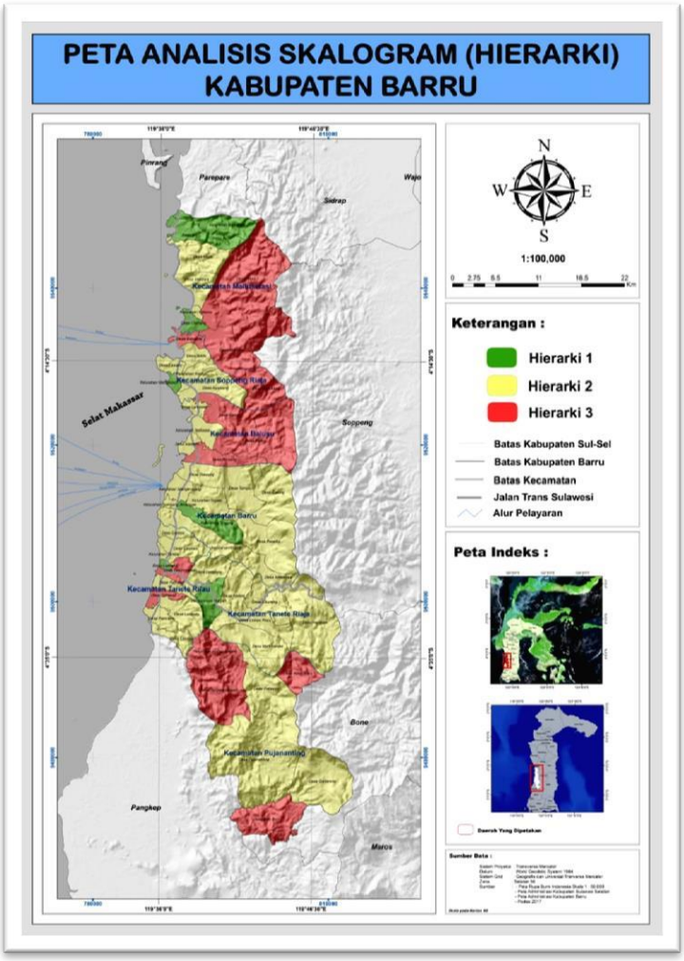
No	Kelas	Nilai Selang (x)	Tingkat Hirarki
1	Hirarki I	X > [rataan + (St Dev.IPW)]	Tinggi
2	Hirarki II	rataan < X < (St Dev.IPW)	Sedang
3	Hirarki III	X < rataan	Rendah

Tingkat perkembangan desa/kelurahan di tujuh kecamatan di Kabupaten Barru ditentukan dengan metode skalogram dimodifikasi dan dicerminkan oleh nilai Indeks Perkembangan Wilayah (IPW). Umumnya, semakin tinggi nilai IPW, semakin tinggi pula kapasitas pelayanan suatu desa dan tingkat perkembangannya. Sebaliknya, semakin rendah nilai IPW berarti semakin rendah kapasitas pelayanan suatu desa dan tingkat perkembangannya.

Dari hasil analisis skalogram dapat terlihat tingkat perkembangan wilayah desa dari pendekatan ketersediaan infrastruktur. Secara spasial hasil perhitungan skalogram dengan tiga hirarki dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.12

Peta Hasil Skalogram Kab.Barru Tahun 2024



Sumber : Data Olahan tahun 2025

Berdasarkan Gambar diatas terlihat penyebaran tingkat hirarki wilayah dari hasil analisis skalogram dimana tiga tingkatan hirarki di jelaskan sebagai berikut :

- Tingkat hirarki I (tinggi) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan tinggi. Terdapat tujuh (7) desa/kelurahan yang termasuk dalam hirarki I, atau hanya sekitar 12,73% desa/kelurahan dari seluruh jumlah desa yang ada di Kabupaten Barru. Hirarki I umumnya memiliki ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang lebih tinggi, lebih lengkap, dan tentunya lebih memadai daripada desa/kelurahan dengan hirarki yang lebih rendah (hirarki II dan III).

- Tingkat hirarki II (sedang) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan sedang. Terdapat 35 desa atau sekitar 63,64% dari seluruh jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Barru. Adapun wilayah desa/kelurahan dengan tingkat hirarki II mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut lebih sedikit dari hirarki I; (2) umumnya letaknya berada di pinggir wilayah berhirarki I dengan tingkat kehidupan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan wilayah di hirarki I.
- Tingkat hirarki III (rendah) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan rendah. Terdapat 13 desa/kelurahan atau sekitar 23,64% dari seluruh jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Barru. Desa/kelurahan pada tingkat hirarki III pada umumnya memiliki tingkat kehidupan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan desa/kelurahan yang termasuk ke dalam tingkat hirarki yang lebih tinggi.

Pada dasarnya, untuk fasilitas-fasilitas tertentu dengan kapasitas pemenuhan kebutuhan yang lebih kompleks, desa/kelurahan dengan tingkat hirarki yang lebih rendah masih harus mengaksesnya di desa/kelurahan dengan tingkat hirarki yang lebih tinggi.

7. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 angka kemiskinan) sedangkan angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

1. Angka Kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata

pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program;

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Adapun persentase garis kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kab.Barru

Tahun 2020– 2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Kemiskinan (%)	garis kemiskinan (Rupiah/Kapita/ Bulan)
1	2020	14.440	187.392	8,26	337.047
2	2021	15.180	189.377	8,68	351.924
3	2022	14.730	191.895	8,40	368.160
4	2023	14.880	194.543	8,46	400.702
5	2024	14.640	195.385	8,31	417.396

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

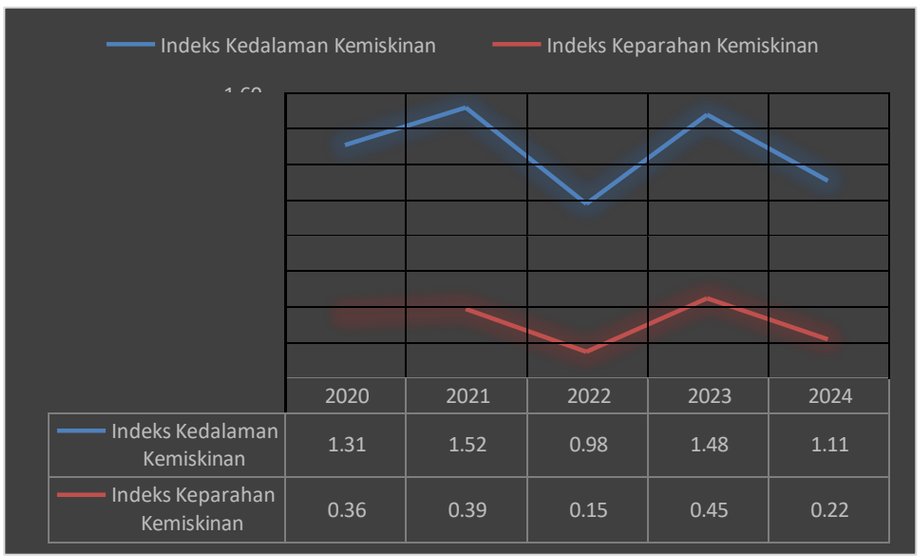
Dari tabel diatas terlihat bahwa trend tingkat kemiskinan Kabupaten Barru berfluktuatif, proses pembangunan di kabupaten Barru terus berkontribusi dalam trend pertumbuhan penduduk

miskin, meskipun relatif tidak stabil. Selain itu fokus penanggulangan kemiskinan dalam bentuk terwujudnya program-program penanggulangan kemiskinan baik yang berkontribusi secara langsung maupun program-program prioritas pembangunan lainnya terus berusaha menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten Barru. Selain itu secara simultan, pemerintah kabupaten Barru juga harus fokus untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim yang menjadi program strategis nasional.

Selanjutnya, identifikasi kondisi kemiskinan dari dimensi indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan trend penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada grafik berikut.

Grafik 2.7

Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan
di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.31	1.52	0.98	1.48	1.11
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.36	0.39	0.15	0.45	0.22

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

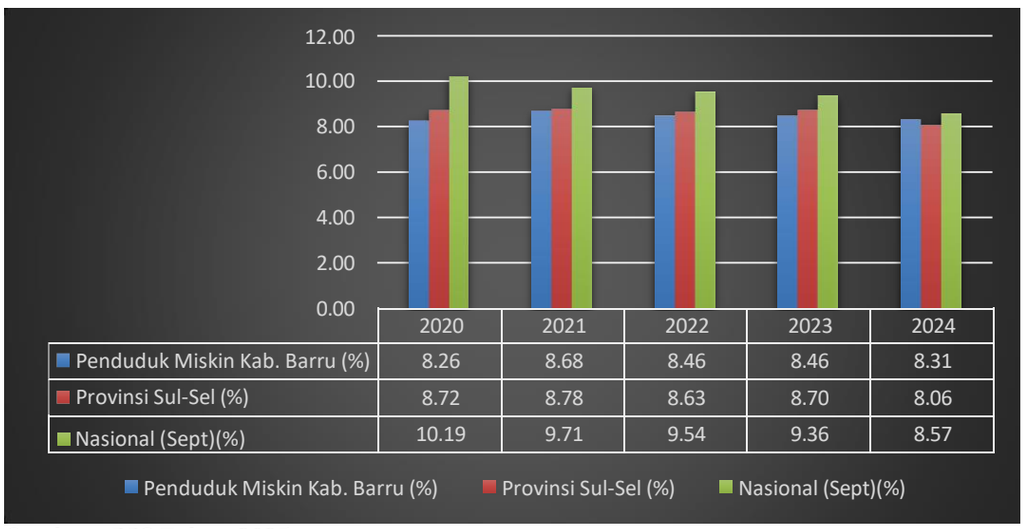
Indeks kedalaman dan indeks keparahan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, indikator ini menunjukkan kesenjangan dan kedalaman tingkat kemiskinan di suatu wilayah, pada gambar diatas terlihat bahwa angka P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) dan P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan) Kabupaten Barru berfluktuasi, sementara pada Tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini berindikasi bahwa rata- rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Barru cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran

penduduk miskin juga semakin menyempit. Namun pada Tahun 2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Barru kembali terjadi peningkatan dan di tahun 2024 kembali mengalami penurunan.

Adapun perbandingan persentase kemiskinan antara Kabupaten Barru dengan Capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.8

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Capaian Nasional, Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Kab.Barru Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Tahun 2025

Berdasarkan angka diatas terlihat bahwa persentase kemiskinan Kabupaten Barru selalu berada di bawah angka kemiskinan Nasional, sementara jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 juga berhasil berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk perbandingan dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.37

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab.Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2020 - 2024

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2
1	Kab. Barru	8,26	1,31	0,36	8.68	1.52	0.39	8,40	0,98	0,15	8,46	1,48	0,45	8,31	1,11	0,22
2	Kota Pare-pare	5,44	0,94	0,24	5.40	0.72	0.13	3,45	0,56	0,09	5,34	0,58	0,12	5,27	0.72	0.14

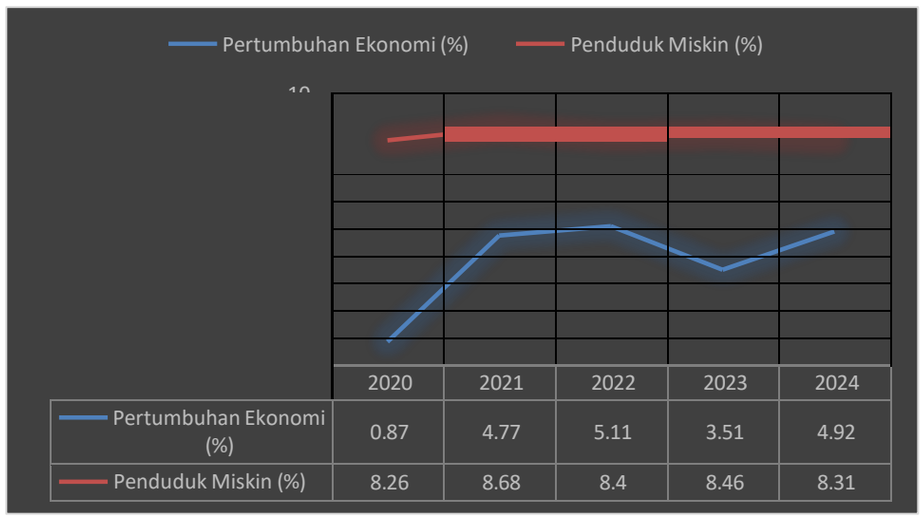
No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2
3	Kab. Soppeng	7,59	0,83	0,16	7.53	1.24	0.28	7,49	0,06	0,21	7,48	1,44	0,40	6,90	0.79	0.15
4	Kab.Sidrap	5,05	0,82	0,19	5.04	0.64	0.13	5,11	0,06	0,21	5,41	0,54	0,10	5,02	0.51	0.08
5	Kab. Pangkep	13,96	2,52	0,71	14.28	2.78	0.78	6,05	2,09	0,49	13,40	2,15	0,50	12,41	1.78	0.38
6	Kab. Bone	10,68	1.59	0.36	10.52	1.67	0.42	10,58	1,35	0,26	10,53	1,23	0,26	9,58	1.14	0.19

Sumber : BPS Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi sangat besar terutama melalui pengeluaran pemerintah untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pemerintahan, berbagai proyek pembangunan memberikan stimulasi kepada pengusaha-pengusaha local untuk meningkatkan pendapatan usahanya, grafik dibawah ini menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Barru.

Grafik 2.9

Perbandingan perubahan Persentase Penduduk Miskin dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas terlihat korelasi yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan persentase penduduk miskin. Jika Pertumbuhan ekonomi meningkat persentase penduduk miskin juga menurun terutama tercermin pada tahun 2021 . Berbeda dengan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid19. Pada Tahun 2024 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun sebelumnya. Peningkatan

kesejahteraan dan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu.

8. Persentase PAD terhadap pendapatan

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang sumbernya adalah pajak dan retribusi daerah. Persentase PAD terhadap pendapatan digunakan untuk mengetahui proporsi PAD pada pendapatan daerah. Adapun persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38

Persentase PAD terhadap Pendapatan di Kabupaten Barru

Tahun 2020 -2024

No	Tahun	PAD (Rupiah)	Total Pendapatan (Rupiah)	Persentase (%)
1	2020	101.324.046.920,50	914.860.358.822,21	11.08
2	2021	84.872.841.440	940.680.195.326	9,02
3	2022	80.653.632.709	902.412.131.655	8,93
4	2023	116.536.037.481	906.712.660.330	12,85
5	2024	115.670.018.762,59	907.944.475.146,89	12,74

Sumber : BKAD Kab Barru Tahun 2022/SIPD Keuangan Tahun 2025

PAD Kabupaten Barru dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan trend yang kurang baik, dimana angkanya menurun tiap tahunnya. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang berimbas pada perekonomian daerah. Namun pada Tahun 2023 PAD Kabupaten Barru mulai membaik, dimana terjadi peningkatan sebesar 3,92% dari tahun sebelumnya, namun di tahun 2024 terjadi penurunan 0,11% yang dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan terhadap pembayaran pajak menurun dan penurunan daya beli.

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

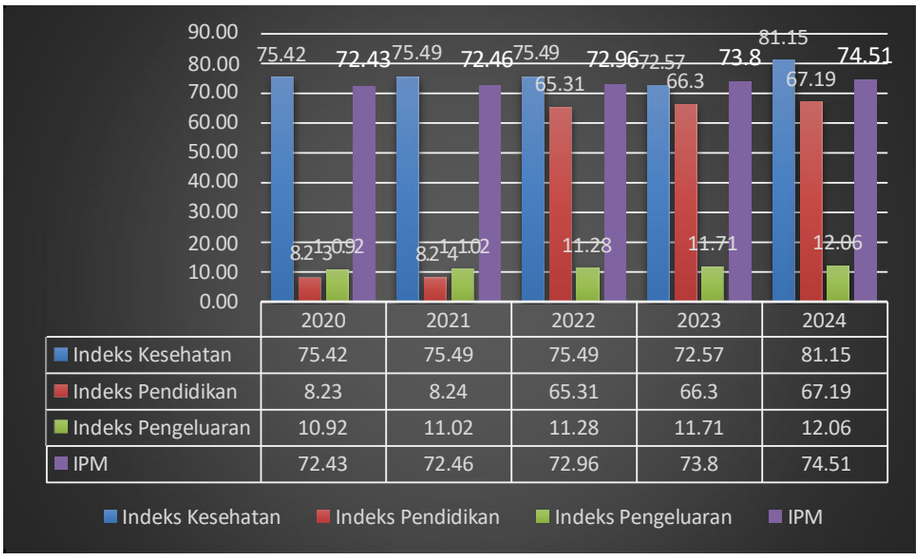
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Adapun IPM Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.10

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

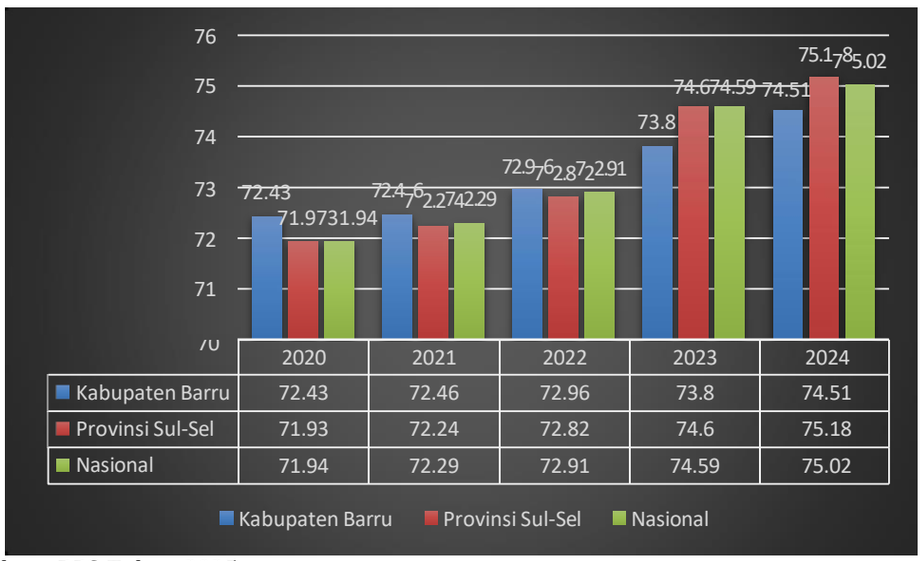


Sumber :Kabupaten Barru Dalam Angka 2025

IPM Kabupaten Barru dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan trend positif, dimana angkanya meningkat tiap tahunnya. Namun ketika disandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, capaian IPM Kabupaten Barru masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, seperti yang tersaji pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.11

Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Tahun 2025

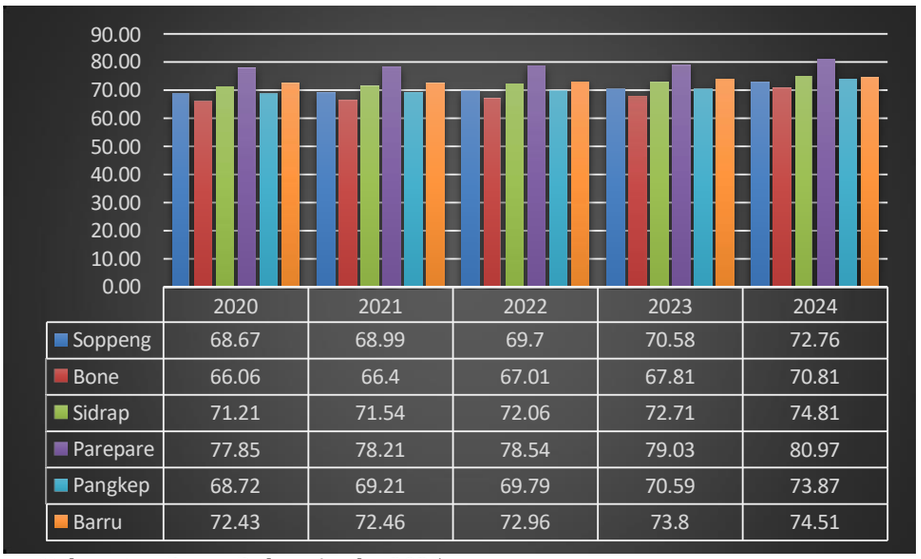
Sementara itu, untuk perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar yang terdiri dari Kabupaten Pangkep, Bone,

Soppeng, Sidrap dan Kota Parepare dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.12

Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar

Tahun 2020 - 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Soppeng	68.67	68.99	69.7	70.58	72.76
Bone	66.06	66.4	67.01	67.81	70.81
Sidrap	71.21	71.54	72.06	72.71	74.81
Parepare	77.85	78.21	78.54	79.03	80.97
Pangkep	68.72	69.21	69.79	70.59	73.87
Barru	72.43	72.46	72.96	73.8	74.51

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka 2025

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian Kabupaten Barru untuk IPM tahun 2024 berada pada posisi kedua setelah Kota Parepare. Untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri Kabupaten Barru di tahun 2024 berada pada posisi 8 diantara 24 Kabupaten/Kota setelah tahun 2020 pada posisi ke 15.

Untuk indikator pembangun IPM sendiri pada Tahun 2015 metode perhitungan IPM telah dilakukan revisi/perbaikan dengan menyesuaikan metode yang dilakukan *United Nation Development Programme* (UNDP). Adapun indikatornya adalah :

a. Indeks Kesehatan

   Diperoleh dari angka harapan hidup yang merupakan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

b. Indeks Pendidikan

   Diperoleh dari dua unsur yaitu angka harapan lama bersekolah dan rata-rata lama sekolah dimana angka harapan lama sekolah mencerminkan pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan

(dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan rata-rata lama bersekolah merupakan angka yang menggambarkan tingkat capain penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dalam bersekolah. Interprestasinya bahwa semakin tinggi angka lama bersekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai.

c. Paritas Daya Beli

Dikenal dengan *Purchasing Power Parity* (PPP); adalah PDRB riil per kapita yang telah disesuaikan dengan menggunakan PDRB riil per kapita, berarti mengasumsikan bahwa hasil pendapatan bruto daerah dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan indikator pendukungnya selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39

Angka IPM dan Indikator Pendukungnya di Kabupaten Barru

Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,05	72,10	72,37	72,57	72,75
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,58	13,59	13,61	13,62	13,63
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,23	8,24	8,25	8,54	8,80
4	Paritas Daya Beli (Rp.000.000)	10,92	11,02	11,28	11,71	12.06
IPM		72,43	72,46	72,96	73,80	74,51

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Angka statistik di atas mengindikasikan performa pembangunan pemerintah Kabupaten Barru, realisasi program dan kegiatan selama periode tersebut terbukti mampu meningkatkan derajat dan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Barru, dibuktikan dengan nilai IPM pada periode tahun 2020 yang cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2024.

2. Indeks Kesehatan

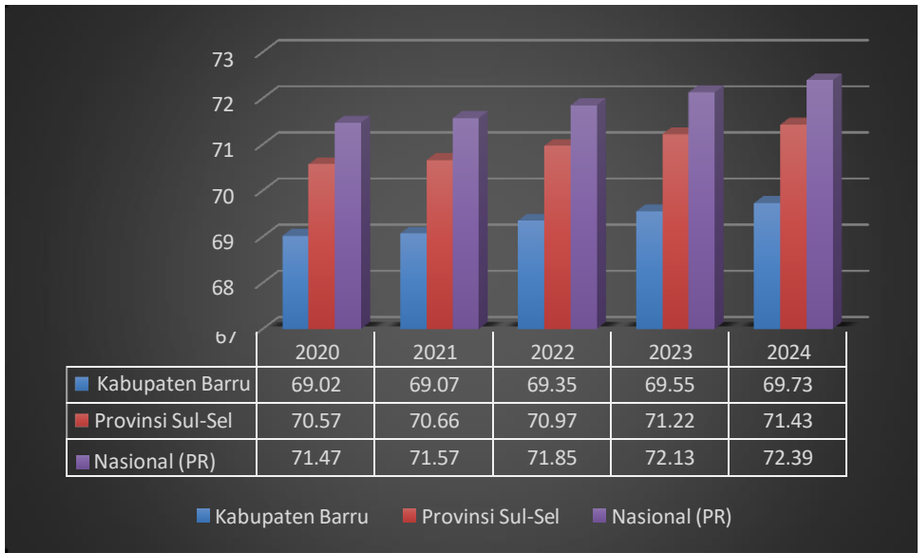
Indeks Kesehatan digambarkan melalui Umur Harapan Hidup yang mempersentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus

meningkat dari tahun ke tahun. Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup semakin panjang, dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan.

Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Barru jika dibandingkan antara capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar tersaji secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.13

Perbandingan Umur Harapan Hidup Saat Lahir Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Tahun 2025

Tabel 2.40

Perbandingan Umur Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020 - 2024

No	Kabupaten/ Kota	UHH (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Barru	69,02	69,07	69,35	69,55	69,73
2	Kota Pare-pare	71.27	71.31	71,57	71,78	71,98
3	Kab. Soppeng	69.65	69.81	70,20	70,50	70,79
4	Kab.Sidrap	69.83	70.01	70,41	70,74	71,03
5	Kab. Pangkep	66.66	66.78	67,12	67,36	67,59
6	Kab. Bone	67.07	67.21	67,57	67,85	68,10

Sumber : BPS Tahun 2025

Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa meskipun dengan pergerakan lambat, Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Barru

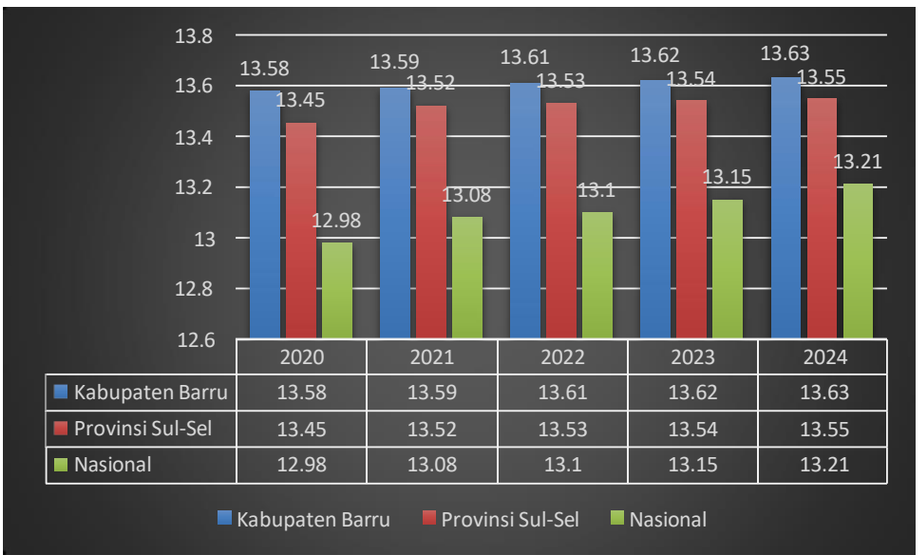
selalu meningkat sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Namun jika dibandingkan dengan capaian Nasional, capaian provinsi sulsel dan wilayah sekitar, UHH Kabupaten Barru masih berada di urutan bawah namun bukan yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Barru perlu memperhatikan pembangunan dibidang kesehatan sebagai investasi untuk mendukung peningkatan kualitas SDM. Masyarakat yang terbiasa berlaku hidup bersih dan sehat, berpeluang lebih produktif dan menghemat pengeluaran biaya berobat sehingga menyumbangkan peluang hidup sejahtera lebih besar.

3. Indeks Pendidikan

lndikator pembangun IPM berikutnya adalah lndeks Pendidikan yang ditunjukkan oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk angka Harapan Lama sekolah Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 jika disandingkan antara capaian HLS Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan wilayah sekitar disajikan secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.14

Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Barru	13.58	13.59	13.61	13.62	13.63
Provinsi Sul-Sel	13.45	13.52	13.53	13.54	13.55
Nasional	12.98	13.08	13.1	13.15	13.21

Sumber : BPS Tahun 2025

Tabel 2.41

Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/ Kota	HLS (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Barru	13,58	13,59	13,61	13,62	13,63
2	Kota Pare-pare	14.50	14.51	14.52	14,54	14,55
3	Kab. Soppeng	12.90	13.05	13.20	13,21	13,22
4	Kab.Sidrap	12.94	12.95	13,01	13,02	13,03
5	Kab. Pangkep	12.76	12.77	12.78	12,80	12,81
6	Kab. Bone	12.88	12.98	12.99	13,00	13,02

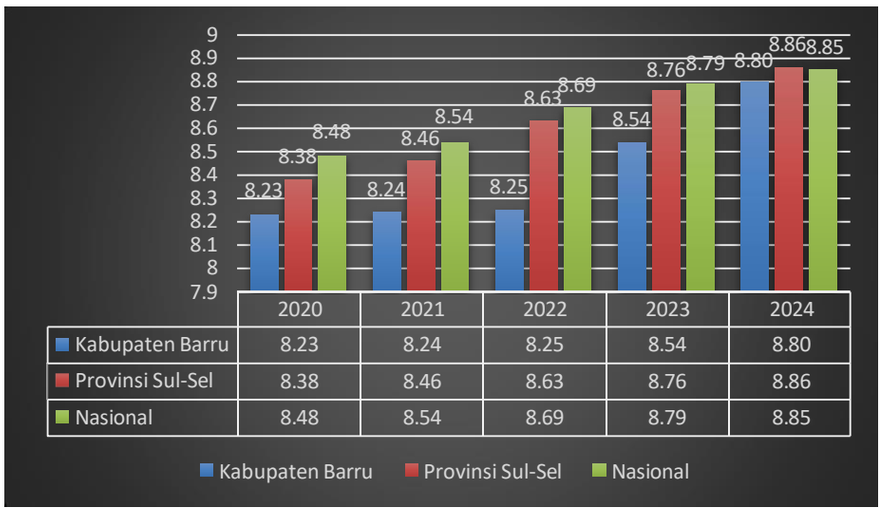
Sumber : BPS Tahun 2025

Berdasarkan data statistik di atas terlihat bahwa capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Nasional dan capaian Provinsi Sulawesi Selatan begitupun dengan Wilayah Sekitar, kecuali Kota Parepare yang selalu menempati posisi teratas.

Selanjutnya masih dari Dimensi Pendidikan, Indikator pembangun IPM Lainnya adalah angka Rata-rata lama sekolah (RLS). Perbandingan antara capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar lainnya disajikan secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.15

Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Tahun 2025

Tabel 2.42

Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020- 2024

No	Kabupaten/ Kota	RLS (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Barru	8.23	8.24	8.25	8,54	8,80
2	Kota Pare-pare	10.45	10.65	10.66	10,70	10,88
3	Kab. Soppeng	7.81	7.82	7.96	8,27	8,45
4	Kab.Sidrap	7.84	7.94	8.04	8,20	8,21
5	Kab. Pangkep	7.66	7.92	8.05	8,31	8,47
6	Kab. Bone	7.15	7.23	7.36	7,54	7,55

Sumber: BPS Tahun 2025

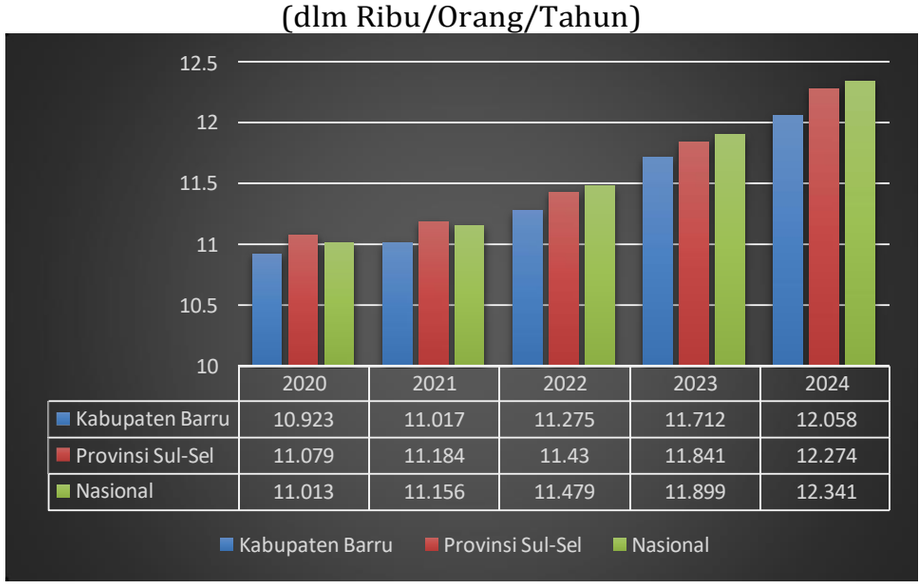
Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Barru berbeda dengan capaian Angka Harapan Lama Sekolah. Untuk sektor pendidikan lainnya yang merupakan pendukung IPM, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru capaiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Nasional, sementara berfluktuatif jika dibandingkan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, dan berada pada posisi kedua setelah Kota Parepare jika dibandingkan dengan wilayah sekitar.

4. Paritas Daya Beli/Pengeluaran Per Kapita

Indikator standar hidup layak pada komponen IPM diproyeksi berdasarkan nilai pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak membaiknya kondisi ekonomi dan pemerataannya. Capaian Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Barru Tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar lainnya disajikan secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.16

Perbandingan Pengeluran Per Kapita Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020 - 2024
(dlm Ribu/Orang/Tahun)



Sumber : BPS Tahun 2025

Tabel 2.43

Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2020 - 2024
(dalam Ribu/Orang/Tahun)

	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Barru	10.923	11.017	11.275	11.712	12.058
	Kota Pare-pare	13.663	13.786	14.027	14.495	14.928
	Kab. Soppeng	9.483	9.558	9.756	10.098	10.547
	Kab.Sidrap	12.073	12.201	12.379	12.739	13.209
	Kab. Pangkep	11.405	11.519	11.817	12.241	12.643
6	Kab. Bone	8.963	9.030	9.277	9.682	10.084

Sumber : BPS Tahun 2025

Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa Paritas Daya Beli yang diproyeksi dengan pengeluaran per kapita Kabupaten Barru telah menunjukkan peningkatan tiap tahunnya namun tetap perlu mendapat perhatian, dikarenakan jika dibandingkan dengan capaian Nasional dan Provinsi masih rendah, juga apabila disandingkan dengan wilayah sekitar.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat partisipasi angkatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh

penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan tingkat pengengguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tiak terserap di dunia kerja. TPAK dan TPT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

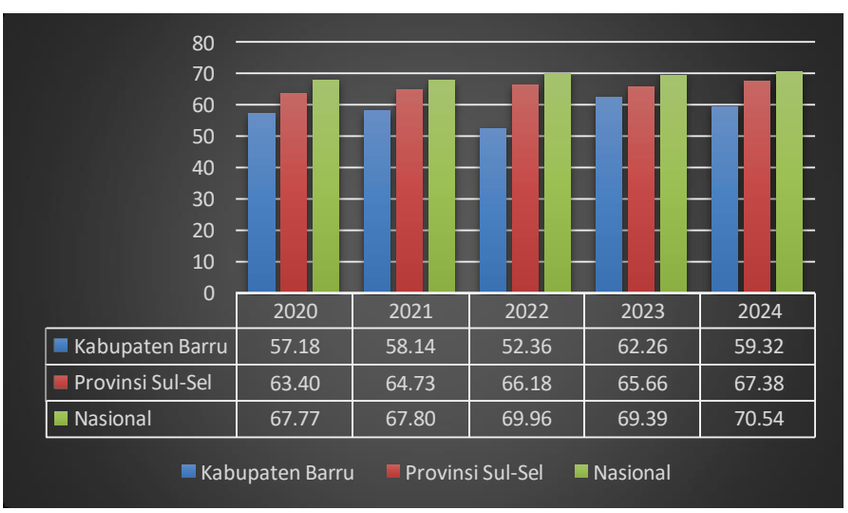
No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	57,18	58,14	62,36	62,26	59,32
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,39	6,74	5,32	5,89	6,42

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

Sepanjang tahun 2020 - 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di kabupaten barru mengalami fluktuasi, dengan tingkat partisipasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 62,36% dan tingkat partisipasi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 57,18%. Selanjutnya, untuk data tingkat penganguran terbuka juga menunjukkan trend yang fluktuatif, dengan tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,74% dan tingkat pengangguran terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,32%.

Grafik 2.18

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2024



Sumber : BPS Tahun 2025

Tabel 2.45

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Kab. Barru	57.18	58,14	62,36	62,26	59,32
2	Kota Pare-pare	65.53	66,94	63,60	65,52	69,67
3	Kab. Soppeng	57.5	58,94	61,90	59,44	62,49
4	Kab.Sidrap	56.92	58,70	57,60	55,49	61,19
5	Kab. Pangkep	63.85	64,43	63,30	69,98	71,17
6	Kab. Bone	60.57	65,67	67,40	62,69	64,23

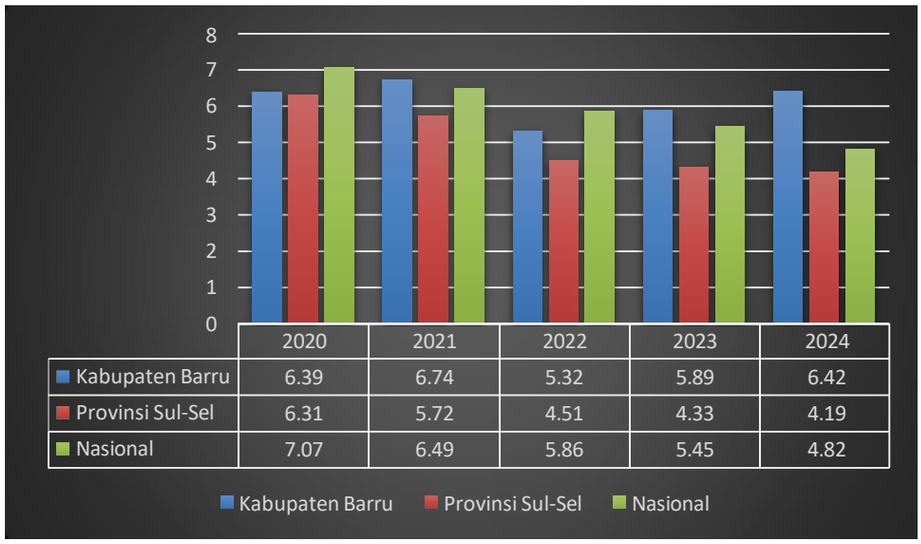
Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka 2025

TPAK yang tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha. Dari tabel diatas sejak tahun 2020 - 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Barru selalu di atas 50%, dengan TPAK tertinggi yaitu mencapai 62,36% pada Tahun 2022.

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Grafik 2.19

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Tahun 2025

Tabel 2.46

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2020 - 2024

No	Kabupaten/ Kota	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Kab. Barru	6.39	6,74	5,32	5,89	6,42
2	Kota Pare-pare	7.14	6,72	6,72	5,86	5,23
3	Kab. Soppeng	4.42	3,92	3,92	4,34	3,33
4	Kab.Sidrap	5.91	4,93	4,93	3,29	3,02
5	Kab. Pangkep	5.18	5,86	5,86	5,05	3,99
6	Kab. Bone	3.20	4,15	4,15	2,88	2,28

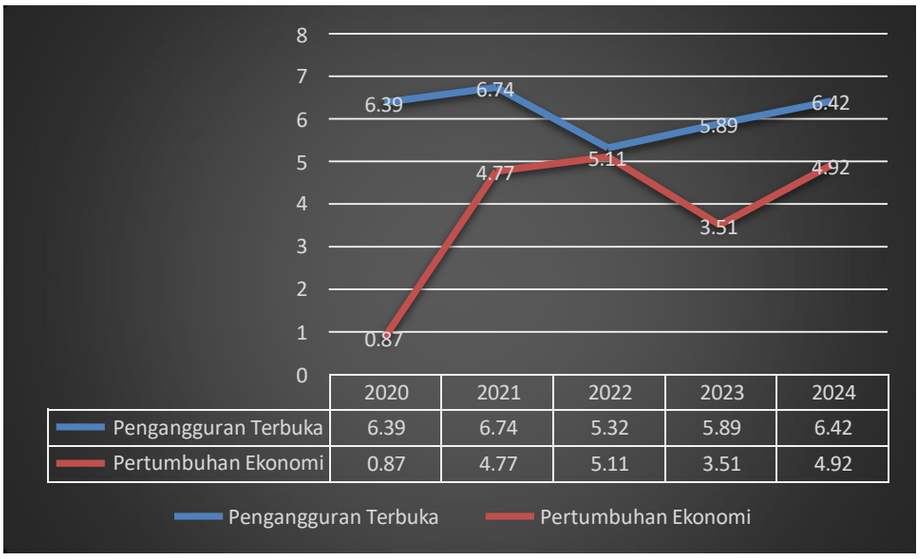
Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan data statistik diatas menunjukkan bahwa baik TAPK maupun TPT, capaian yang diperoleh Kabupaten Barru menunjukkan kinerja yang rendah.

Beberapa teori mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru Barru diilustrasikan pada grafik berikut ini.

Grafik 2.20

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 -2024



Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan gambar diatas hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran pada rentang tahun 2020 - 2024 menunjukkan korelasi yang lemah. Hal tersebut ditunjukkan oleh kecenderungan di tahun 2020 dan 2021 yang memperlihatkan fakta bahwa meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat akan tetapi jumlah pengangguran juga meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh perusahaan yang awalnya meningkatkan produksinya melalui penambahan tenaga kerja beralih pada peningkatan penggunaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya digital yang menggantikan peran sumber daya manusia.

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pemberdayaan perempuan merupakan urusan yang sangat penting untuk menuju pencapaian kesetaraan gender yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan. Sedangkan perlindungan anak merupakan amanah undang-undang nomor 35 tahun 2013 tentang perlindungan anak dan dengan ditandatanganinya deklarasi menuju kabupaten layak anak pada tahun 2020 , mengharuskan Kabupaten Barru memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak anak. Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, selama periode 2020 - 2024 telah disiapkan untuk

mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender. capaian pemberdayaan Perempuan ditunjukkan dari angka lndeks Pembangunan Gender dan lndeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	95.52	95.51	95,64	95,65	95,74
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	63.96	63.98	65,24	64,91	65,09

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025/BPS Tahun 2025

lndeks Pembangunan Gender (IPG) adalah digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti lndeks Pembangunan Manusia. Hal ini menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara lndeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dari angka IPG dan IDG pada tabel diatas memperlihatkan bahwa angka untuk IPG dalam periode tahun 2020 - 2024 menunjukkan perolehan yang memuaskan meskipun mengalami penurunan seiring dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa, untuk itu sangat penting memberikan perhatian dan fokus terhadap Pemberdayaan Perempuan.

Untuk perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Barru juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, diharapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah dapat melindungi hak-hak anak di Kabupaten Barru.

7. Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020 - 2024. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Barru telah berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2024 adalah 50,02 dengan kategori CC.

Tabel 2.48

Indeks Reformasi Birokrasi

Kabupaten Barru Tahun 2023 – 2024

No	Komponen Penilaian	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**50,02**	**68.02**

Sumber : Kemenpan RB RI, Tahun 2025

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten barru telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan peningkatan nilai pada komponen pungungkit dan penghasil.

8. Nilai sakip

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematika dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisarian dan pelapaoran kinerja pada instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Barru dalam hal ini telah melakukan penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya dinilai dan dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap seluruh Instansi Pemerintah pada setiap tahunnya. Adapun nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperolah Pemerintah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49

Komponen Penilaian Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2023-2024

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2023	2024
A	Perencanaan Kinerja	30	23,02	23,04
B	Pengukuran Kinerja	25	15,84	15,92
C	Pelaporan Kinerja	15	9,82	10,09
D	Evaluasi Internal	10	11,36	12,37
	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,04	61,42
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Sumber : Kemepan RB RI, Tahun 2025

Nilai SAKIP tahun 2024 yang sebesar 61,42 dengan kategori B meningkat dari tahun sebelumnya, menunjukkan pemerintah kabupaten barru telah melakukan perbaikan-perbaikan yang terkait dengan komponen penilaian yang menentukan nilai akhir hasil evaluasi SAKIP.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dipertahankan dengan predikat Baik.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Bidang Urusan Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman kanak-kanak adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6(enam) tahun yang dilakukan mulai pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang di selenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal. Perkembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51

Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	80,05	91,38	74,14	94,14	78,31

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat angka partisipasi PAUD di Kabupaten Barru, mengalami fluktuatif sampai tahun 2024. Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang bersekolah pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan, sehingga dibutuhkan upaya peningkatan minat orang tua untuk mengikutsertakan anaknya pada jenjang pendidikan PAUD.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan anak usia dini meliputi faktor internal (faktor bawaan anak dan kondisi kesehatan) dan faktor eksternal (faktor lingkungan, keluarga, dan sekolah). Faktor internal meliputi perkembangan kognitif, sosial emosional, dan fisik motorik anak, serta kondisi kesehatan yang memengaruhi kemampuan belajar anak. Faktor eksternal meliputi kualitas guru, metode pengajaran, lingkungan belajar, dukungan keluarga, dan kondisi ekonomi keluarga.

b. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. Angka partisipasi kasar (APK) yang meliputi APK SD/MI, APK SMP/MTs di Kabupaten Barru tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%)	100,67	101,57	103,23	98,83	96,14
2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (%)	112,09	88,87	91,41	96,59	96,50

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025/BPS Kab. Barru 2025

Tabel diatas menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Barru pada jenjang SD Sederajat dan jenjang SMP Sederajat tahun 2020 - 2024 berfluktuatif. APK tertinggi pada jenjang SD Sederajat yaitu 103,23% pada tahun 2022, kemudian jenjang SMP Sederajat sebesar 112,09% pada tahun 2020. Penyebab APK SD/Sederajat maupun SMP/Sederajat mencapai lebih dari 100%, disebabkan karena terdapat anak berusia kurang dari 7 tahun dan anak berusia lebih dari 15 tahun yang sekolah di jenjang SD dan SMP/Sederajat.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemiskinan, tingkat pendidikan penduduk, ketersediaan layanan pendidikan, dan kondisi geografis. Secara

lebih rinci, meningkatnya angka kemiskinan menghambat akses ke pendidikan karena kemampuan orang tua membayar biaya sekolah. Tingkat pendidikan orang tua juga berperan, karena mereka yang lebih berpendidikan cenderung lebih mengutamakan pendidikan anak-anak mereka. Rasio guru di Kabupaten Barru masih terbatas atau belum berimbang dengan jumlah siswa dan jumlah sekolah yang ada. Untuk faktor geografis jarak ke sekolah sudah tidak menjadi masalah di Kabupaten Barru.

c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A dan SMP/ MTs/ Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka partisipasi murni yang meliputi angka partisipasi murni SD/MI, angka partisipasi murni SMP/MTs di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket Adan SMP/MTs/ Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	98,25	98,20	99,39	98,82	99,30
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	81,38	82,28	82,21	96,59	96,51

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, selama kurun waktu 5 (lima) tahun, APM SD/Sederajat menunjukkan kecenderungan meningkat, sedangkan APM/SMP Sederajat cenderung berfluktuasi. Baik APM SD/Sederajat maupun APM SMP/Sederajat belum mencapai angka ideal karena terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah dan anak usia sekolah yang sekolah tidak pada jenjang kelompok usianya.

Angka Partisipasi Murni (APM) dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemiskinan, tingkat pendidikan penduduk, ketersediaan layanan pendidikan, dan kondisi geografis. Secara lebih rinci, meningkatnya angka kemiskinan menghambat akses ke pendidikan karena kemampuan orang tua membayar biaya sekolah.

Tingkat pendidikan orang tua juga berperan, karena mereka yang lebih berpendidikan cenderung lebih mengutamakan pendidikan anak-anak mereka. Rasio guru di Kabupaten Barru masih terbatas atau belum berimbang dengan jumlah siswa dan jumlah sekolah yang ada. Untuk faktor geografis jarak ke sekolah sudah tidak menjadi masalah di Kabupaten Barru.

d. Angka partisipasi sekolah (APS) SD/ MI/ Paket A dan SMP/ MTs/ Paket B

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai dan dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan dan merupakan alat ukur pemerataan pendidikan yang paling mendekati dan paling baik jika dibandingkan dengan APK atau APM. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.54

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A
dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	97,69	98,19	99,38	98,82	99,30
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	93,41	95,32	94,01	96,59	96,51

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat diuraikan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A di Kabupaten Barru untuk periode 2020 -2024 berfluktuatif. Yang mana capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 99,38 persen dan capaian terendah pada tahun 2020 dengan angka sebesar 97,69 persen. Sedangkan pada tingkat pendidikan SMP/MTs/Paket B pada tahun 2020 - 2024 juga

berfluktuatif, dimana capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 96,59% dan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 93,41%.

Angka partisipasi sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara umum, faktor-faktor ini mencakup faktor-faktor terkait siswa, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor-faktor yang signifikan antara lain tingkat kemiskinan, akses pendidikan, kualitas guru, dan jumlah sekolah yang tersedia.

e. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI & SMP/MTs Kabupaten Barru Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,44	0,45	0,52	0,52	0,76
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,19	1,36	1,90	1,93	1,92

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, angka putus sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs fluktuatif namun cenderung meningkat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya APS SD/MI dan SMP/MTs antara lain yaitu siswa yang motivasi belajarnya rendah, tingkat ekonomi keluarga, dan karena alasan sosial budaya lainnya.

Putus sekolah disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya minat sekolah, kurangnya motivasi, dan kesulitan belajar. Faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi keluarga yang kurang, kurangnya dukungan dari orang tua, faktor sosial seperti bullying, dan kurangnya akses ke fasilitas Pendidikan

f. Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs

Angka kelulusan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses belajar mengajar disekolah. Semakin baik proses belajar mengajar, maka persentase angka kelulusan semakin baik pula. Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56

Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	98,63	99,66	99
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100	97,82	98.85	99

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa AL SD/MI dan AL SMP/MTs pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan pencapaian hingga 100%, namun pada Tahun 2022 dan 2024 mengalami penurunan hanya diangka 98 – 99%. Hal ini disebabkan karena kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan.

Faktor utama yang mempengaruhi angka kelulusan meliputi faktor internal (seperti kesiapan mental, motivasi belajar, dan kesehatan) dan faktor eksternal (seperti lingkungan belajar, dukungan keluarga, dan akses ke sumber belajar). Selain itu, faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya juga memainkan peran penting

g. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Angka Melanjutkan berguna untuk melihat apakah penduduk usia sekolah menyelesaikan pendidikannya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Idealnya adalah semua lulusan melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya. Namun di Kabupaten Barru pada tahun 2020 hingga tahun 2024, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs melebihi 100% disebabkan karena jumlah siswa/siswi yang masuk sekolah

SMP/MTs lebih besar dari jumlah siswa/siswi yang lulus SD/MI yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI dan SMP/MTs
di Kab.Barru 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	122,23	93,61	90,29	93,52	93,52

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, selama tahun 2020 - 2024 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs berfluktuatif. Capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 122,23 persen, sedangkan capaian terendah pada tahun 2022 sebesar 90,29 persen.

Angka Melanjutkan (AM) dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs atau dari SMP/MTs ke jenjang lebih tinggi bisa mengalami kenaikan atau penurunan karena berbagai faktor. Kenaikan AM biasanya disebabkan oleh meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, seperti pembangunan sekolah baru, program beasiswa, dan bantuan dari pemerintah seperti BOS dan Program Indonesia Pintar. Selain itu, kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan serta membaiknya kondisi ekonomi keluarga juga mendorong anak untuk melanjutkan sekolah. Di sisi lain, penurunan AM dapat terjadi karena masalah ekonomi yang membuat anak terpaksa bekerja, sulitnya akses ke sekolah lanjutan terutama di daerah terpencil, serta masih adanya pernikahan dini dan anggapan budaya yang membatasi pendidikan, terutama bagi anak perempuan. Faktor lain seperti bencana alam, konflik, kurangnya motivasi belajar, dan proses administrasi yang rumit juga bisa menjadi penyebab turunnya angka melanjutkan sekolah.

h. Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik

Sekolah dengan kondisi bangunan baik merupakan perbandingan antara jumlah sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik dengan jumlah seluruh sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang dinyatakan dalam persen. Sekolah mempunyai jumlah ruang kelas yang berbeda-beda dan kondisi ruang kelas terbagi atas 4 (empat) kondisi yaitu kondisi

baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Sekolah yang mempunyai ruang kelas dengan kondisi baik baik dan rusak ringan dinyatakan sebagai sekolah dengan kondisi bangunan baik karena ruang kelas yang rusak ringan bisa di biayai oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58

Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	**SD/MI**					
1	Jumlah Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Unit)	210	212	212	213	209
2	Jumlah Seluruh Sekolah SD/MI (Unit)	226	226	226	226	226
3	**Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)**	**94,23**	**98,81**	**94,24**	**92,47**	**94,24**
B	**SMP/MTS**					
1	Jumlah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (Unit)	29	29	30	46	48
2	Jumlah Seluruh Sekolah SMP/MTs (Unit)	53	54	54	54	54
3	**Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)**	**55**	**53,70**	**55,56**	**85,19**	**88,88**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Selama kurun waktu 2020 - 2024 Persentase bangunan SD/MI dan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik cenderung berfluktuatif.

Angka Melanjutkan (AM) dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs atau dari SMP/MTs ke jenjang lebih tinggi bisa mengalami kenaikan atau penurunan karena berbagai faktor. Kenaikan AM biasanya disebabkan oleh meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, seperti pembangunan sekolah baru, program beasiswa, dan bantuan dari pemerintah seperti BOS dan Program Indonesia Pintar. Selain itu, kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan serta membaiknya kondisi ekonomi keluarga juga mendorong anak untuk melanjutkan sekolah. Di sisi lain, penurunan AM dapat terjadi

karena masalah ekonomi yang membuat anak terpaksa bekerja, sulitnya akses ke sekolah lanjutan terutama di daerah terpencil, serta masih adanya pernikahan dini dan anggapan budaya yang membatasi pendidikan, terutama bagi anak perempuan. Faktor lain seperti bencana alam, konflik, kurangnya motivasi belajar, dan proses administrasi yang rumit juga bisa menjadi penyebab turunnya angka melanjutkan sekolah.

i. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP)

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Barru disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.59

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru
Tahun 2020 - 2024

No		2020	2021	2022	2023	2024
1		100,06	100,51	99,50	116,51	118,61
2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SMP) (%)	52,10	34,07	38,24	51,99	50,88

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 - 2024 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD) dan tingkatan SMP/MTs di kabupaten Barru kondisinya cenderung berfluktuatif.

Ketersediaan sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah perubahan jumlah kelahiran yang berdampak langsung pada jumlah anak usia sekolah di suatu wilayah. Jika angka kelahiran menurun, maka jumlah siswa baru juga ikut berkurang, sementara peningkatan kelahiran akan menambah kebutuhan sekolah. Selain itu, migrasi penduduk juga

memengaruhi fluktuasi, karena perpindahan keluarga dari satu daerah ke daerah lain bisa menyebabkan penumpukan atau kekurangan siswa di wilayah tertentu. Kebijakan pembangunan sekolah baru atau penggabungan sekolah (regrouping) oleh pemerintah juga bisa memengaruhi ketersediaan satuan pendidikan. Di sisi lain, perubahan tata ruang wilayah, seperti urbanisasi dan pembangunan kawasan pemukiman baru, dapat menciptakan kebutuhan akan sekolah baru di satu daerah, sementara di daerah lain justru terjadi penurunan jumlah sekolah karena kekurangan siswa. Semua faktor ini membuat jumlah sekolah dan populasi siswa usia sekolah pada jenjang SD dan SMP tidak selalu stabil setiap tahunnya.

j. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP)

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran. Rasio jumlah guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.60

Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar SD	1.100,34	1.130,48	664,98	868,63	763,06
2	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar SMP	1.216,47	1.038,69	1.434,29	777,51	665,03

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 - 2024 Rasio guru dan murid untuk tingkatan Sekolah Pendidikan Dasar (SD) dan SMP di kabupaten Barru cenderung fluktuatif, dengan capaian tertinggi untuk tingkatan SD di tahun 2021 sebesar 1.130,48, yang apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024, mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 763,06. Sementara untuk tingkatan SMP capaian tahun 2024 sebesar 665,03

mengalami penurunn apabila dibandingkan dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 1.434,29.

Rasio guru dan murid pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Barru cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun karena dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah perubahan jumlah murid yang bisa naik atau turun akibat dinamika jumlah penduduk usia sekolah, tingkat kelahiran, dan mobilitas penduduk. Jika jumlah siswa meningkat tajam tanpa diimbangi penambahan guru, maka rasio akan membesar. Sebaliknya, jika jumlah siswa menurun atau sekolah melakukan regrouping, rasio bisa menurun.

Selain itu, mutasi, pensiun, atau pengangkatan guru baru juga sangat memengaruhi fluktuasi. Setiap tahun, ada guru yang pensiun atau pindah tugas, dan tidak selalu diiringi dengan perekrutan atau penempatan guru baru secara seimbang. Distribusi guru yang belum merata antar sekolah atau wilayah juga menjadi penyebab, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di beberapa sekolah, kekurangan guru masih menjadi masalah, sementara di sekolah lain bisa terjadi kelebihan.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kebijakan pendidikan daerah, seperti pengangkatan guru honorer, relokasi guru, atau pembukaan sekolah baru, yang bisa mengubah proporsi antara jumlah guru dan murid. Semua faktor tersebut menyebabkan rasio guru dan murid di Kabupaten Barru mengalami perubahan yang tidak konsisten dari tahun ke tahun.

k. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf
(tidak buta aksara) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	90,42	90,81	89,17	75,48	99,02

Sumber : BPS Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 - 2024, Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidakbuta aksara) Kabupaten Barru berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 90,81 persen. Untuk tahun 2024 tidak ada data dari perangkat daerah terkait jumlah penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) karena tidak dilakukan pendataan.

Penduduk yang berusia di atas 15 tahun dan melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Barru cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah perubahan jumlah penduduk usia dewasa, baik karena pertambahan penduduk, migrasi, maupun angka kematian. Mobilitas penduduk seperti masuknya penduduk baru dari daerah lain yang memiliki tingkat literasi berbeda, juga bisa mempengaruhi angka keseluruhan.

Selain itu, program pemberantasan buta aksara yang dijalankan oleh pemerintah daerah atau lembaga non-formal memiliki pengaruh besar. Jika program ini dijalankan secara aktif dan berkelanjutan, maka jumlah penduduk yang melek huruf meningkat. Namun jika program ini terhenti atau berkurang cakupannya, angka buta huruf bisa kembali naik. Akses terhadap pendidikan nonformal atau kejar paket A dan B juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan baca tulis warga dewasa.

Faktor lainnya adalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi, yang dapat berbeda-beda antar wilayah, serta dukungan keluarga dan lingkungan dalam mendorong warga belajar baca tulis. Karena semua faktor ini tidak berjalan secara konsisten setiap tahun, maka jumlah penduduk usia >15 tahun yang melek huruf di Kabupaten Barru pun cenderung mengalami fluktuasi.

l. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru sebagai tenaga pendidik berinteraksi langsung dengan peserta didik sehingga harus memiliki keahlian atau kualifikasi atau kompetensi dalam menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik, hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mensyaratkan bahwa guru wajib memiliki latar belakang akademis strata satu (S1) atau diploma empat(D-IV). Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	88,24	94,89	100	100	98,05

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Perkembangan jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di atas. Selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik cenderung meningkat.

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D-IV di Kabupaten Barru cenderung meningkat karena beberapa faktor penting. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah pusat yang mendorong guru untuk menempuh pendidikan tinggi melalui program beasiswa dan bantuan peningkatan kualifikasi. Selain itu, pemerintah daerah juga aktif memberikan pelatihan dan pembinaan bagi para guru agar terus meningkatkan kompetensinya. Undang-Undang Guru dan Dosen yang mewajibkan kualifikasi minimal S1/D-IV turut mempercepat peningkatan ini, terutama dalam rekrutmen guru baru yang harus memenuhi syarat tersebut.

Pergantian guru-guru yang pensiun dengan tenaga pengajar yang sudah berkualifikasi juga berkontribusi terhadap peningkatan ini. Di samping itu, kesadaran guru akan pentingnya pendidikan tinggi untuk menunjang karier dan mendapatkan tunjangan profesional ikut mendorong mereka melanjutkan studi. Semua

faktor tersebut menjadikan jumlah guru berkualifikasi S1/D-IV di Barru terus bertambah meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun tertentu.

2. Bidang Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Capaian indikator kesehatan antara lain:

a. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup). Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) (Jiwa)	10	9	46	27	35
2	Jumlah kelahiran hidup (Jiwa)	3.068	3.047	2.983	2.780	2.385
3	Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup	3	3	15	10	15

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

AKB pada tahun 2020 - 2024 cenderung berfluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKB harus tetap di kedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita. Pada tahun 2020 hingga 2021 telah mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 dan 2024 kembali mengalami peningkatan.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Barru pada periode 2020–2024 cenderung fluktuatif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kondisi gizi dan kesehatan ibu hamil, tingginya kasus pernikahan dini, serta akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan ibu dan bayi. Ketidakkonsistenan dalam program intervensi seperti edukasi ASI, imunisasi, dan pemantauan kehamilan juga berdampak pada naik turunnya AKB. Selain itu, karena jumlah kelahiran di Barru relatif kecil, sedikit perubahan kasus bisa menyebabkan pergeseran angka AKB yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

b. Angka kelangsungan hidup bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun dimana AKHB=1-Angka Kematian Bayi. Sedangkan untuk AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi dibawah usia 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKHB di Kabupaten Barru dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.64

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Kab.Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (%)	99,70	99,70	99,60	98,90	99,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

AKHB pada periode tahun 2020 cenderung berfluktuasi, yang mana pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding periode 4 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKHB harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita.

c. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk

kematian bayi). Angka Kematian Balita (AKBa) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65

Angka Kematian Balita (AKBa)/1000 kelahiran hidup

Kab.Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kematian Balita (Jiwa)	2	2	3	0	0
2	Jumlah kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu (Jiwa)	3069	3069	2983	2.780	2.385
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

AKBa pada periode tahun 2020 - 2024 cenderung berfluktuasi, yang mana pada periode tahun 2020 - 2022 mengalami kondisi stagnan dibandingkan periode tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKHB harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita.

Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kondisi gizi anak, di mana balita yang mengalami gizi buruk atau stunting lebih rentan terhadap penyakit dan kematian. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan, seperti imunisasi, pemeriksaan rutin, dan pengobatan saat sakit, juga sangat menentukan. Jika layanan ini tidak merata atau menurun kualitasnya, AKBa bisa meningkat. Pola asuh keluarga, sanitasi lingkungan, serta kebersihan makanan dan air juga turut memengaruhi ketahanan balita terhadap penyakit. Faktor lainnya adalah ketidakkonsistenan program kesehatan masyarakat seperti posyandu atau intervensi gizi, yang jika tidak dilakukan secara berkelanjutan, bisa menyebabkan angka kematian balita naik

kembali. Karena berbagai faktor ini dapat berubah setiap tahun, AKBa pun cenderung mengalami fluktuasi.

d. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau di dapat selama kehamilan. Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66

Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup Kab.Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) (Jiwa)	6	8	44	27	26
2	Jumlah kelahiran hidup (Jiwa)	3069	3.047	2.983	2.780	2.385
3	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	2	3	15	10	11

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Angka kematian neonatal pada periode tahun 2020 - 2024 cenderung berfluktuasi, yang mana angka kematian tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2022, yang mencapai 15 angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 2 angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup.

Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru cenderung fluktuatif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kondisi kesehatan ibu dan bayi saat persalinan, seperti gizi ibu, komplikasi kehamilan, dan berat lahir rendah. Faktor lainnya adalah jumlah kelahiran yang relatif kecil, sehingga perubahan kasus kematian sedikit saja dapat berdampak signifikan terhadap angka kematian neonatal secara keseluruhan.

e. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

Indikator ini menunjukkan Angka Kematian Ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas dari per 100.000 kelahiran. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas (jiwa)	3	7	2	2	5
Z	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	3069	3.047	2.983	2.780	2.385
3	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	98	230	67	72	210

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 - 2024 cenderung berfluktuasi, yang mana angka kematian tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2021, yang mencapai 230 angka kematian per 100.000 kelahiran hidup, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 67 angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Barru antara tahun 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif karena kombinasi faktor-faktor yang saling memengaruhi. Kondisi kesehatan ibu seperti anemia, kehamilan usia muda, dan komplikasi obstetri menjadi penyumbang utama.

f. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka

kematian ibu dan bayi. rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68

Rasio Posyandu Persatuan Balita Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah posyandu (Unit)	267	270	270	272	273
2	Jumlah balita (Jiwa)	13.343	12.788	12.355	9.574	11.352
3	Rasio posyandu per satuan balita (%)	20.01	21.11	21,85	28,41	24,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 - 2024 cenderung berfluktuasi, yang mana rasio tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2024, yang mencapai angka 28,41, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencapai angka 20,01.

Rasio posyandu per balita di Kabupaten Barru fluktuatif karena jumlah posyandu dan balita berubah setiap tahun, sementara tingkat kunjungan dipengaruhi oleh pengetahuan orang tua, akses dan jarak, serta daya tarik layanan. Inovasi seperti Wisata Posyandu dan pelatihan kader mampu meningkatkan partisipasi, tetapi jika intervensi dan edukasi tidak dijalankan secara konsisten, kunjungan dapat menurun. Karena variasi ini, rasio posyandu per balita tampak bergerak naik-turun dari waktu ke waktu.

g. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu dihitung berdasarkan jumlah puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000 jumlah penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.69

Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000 jumlah penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Thn	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	2020	187.392	12	0.064	0	0	33	186,774
2	2021	189.877	12	0.064	0	0	33	184,329
3	2022	191.895	12	0,063	7	0,037	33	0,182
4	2023	194.543	12	0.062	7	0,036	35	0,181
5	2024	195.385	12	0,061	7	0,036	35	0,179

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Rasio jumlah puskesmas terhadap jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami penurunan. Namun rasio jumlah pustu terhadap jumlah penduduk cenderung stagnan. Hal ini disebabkan karena laju pertambahan jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami penambahan sementara jumlah puskesmas dan jumlah pustu tetap.

h. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit mempunyai peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rasio rumah sakit per satuan penduduk yang menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70

Rasio rumah sakit/1.000 jumlah penduduk Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Sakit (Unit)	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	195.385
3	**Rasio Rumah Sakit**	**0,0053**	**0,0052**	**0,0052**	**0,0051**	**0,0051**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	per seribu Penduduk					

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Rasio Jumlah Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena laju pertambahan jumlah rumah sakit lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami penambahan sementara tidak ada penambahan jumlah rumah sakit. Rasio Rumah Sakit terhadap Jumlah rasio tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 0,0054 dan terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,0051.

i. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter yang diukur berdasarkan jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71

Rasio Dokter Persatuan penduduk Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah dokter (Orang)	25	25	54	69	50
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	195.385
3	**Rasio dokter per satuan penduduk**	**0.13**	**0.14**	**0,28**	**0,35**	**0,26**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Rasio Dokter Persatuan penduduk belum mencapai target jika berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, dimana pada lampirannya disebutkan rasio yang layak untuk dokter/satuan penduduk adalah 1 : 2500, sementara di Kabupaten Barru masih jauh dari layak terkait ketersediaan tenaga dokternya. Hal tersebut juga terlihat pada beberapa puskesmas yang jumlah tenaga dokternya belum mencapai standar nasional. Adapun beberapa alternatif solusi

yang telah dilakukan adalah melakukan perekrutan tenaga kontrak dokter daerah dan pendayagunaan dokter internship di beberapa tempat yakni RSUD, PKM Padongko dan PKM Palanro (di tempat tersebut terdapat dokter pendamping internship).

j. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk yang diukur berdasarkan jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio tenaga medis persatuan penduduk disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.72

Rasio Tenaga Medis per 1.000 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah tenaga medis (Orang)	57	57	83	85	103
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	195.385
3	**Rasio tenaga medis per satuan penduduk**	**0,30**	**0,31**	**0,43**	**0,44**	**0,53**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat rasio tenaga medis persatuan penduduk belum mencapai target karena tenaga medis yang ada di RSUD dan puskesmas jumlah tenaganya masih kurang sementara disisi lain penduduk terus bertambah. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah perekrutan tenaga kontrak daerah, kontrak BOK dan tenaga sukarela serta pendayagunaan dokter internship di beberapa tempat yakni RSUD, PKM Padongko dan PKM Palanro (di tempat tersebut terdapat dokter pendamping internship).

k. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada proses persalinan sehingga untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu maternal salah satunya melalui persalinan yang sehat dan aman, yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang

terlatih. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (kasus)	775	753	1149	863	1062
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (Jiwa)	775	753	655	863	1062
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (Persen)	100	100	175,4	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 175,4 persen dan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 100 persen. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Barru cenderung fluktuatif karena dipengaruhi oleh variasi akses layanan kesehatan, kesiapan tenaga medis, dan kesadaran ibu hamil terhadap tanda bahaya. Selain itu, ketidakkonsistenan pelaporan dan edukasi kesehatan juga memengaruhi capaian setiap tahunnya.

l. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan adalah cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (linakes). Adapun perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Barru 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Jiwa)	3.181	3.085	2.989	2.796	2379
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (Jiwa)	3.246	3.199	3.199	3.245	3251
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	98,00	96,00	93,40	86,16	73

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2024 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya sebesar 86,16 persen, hal ini dipengaruhi oleh jumlah ibu bersalin yang ditolong yang ikut menurun jumlahnya di tahun 2024.

Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah berkurangnya jumlah kelahiran, yang dapat dipengaruhi oleh penurunan angka kehamilan atau program keluarga berencana yang efektif. Selain itu, masih adanya persalinan di luar fasilitas kesehatan, seperti di rumah tanpa pendamping tenaga kesehatan, juga dapat menurunkan angka cakupan. Akses yang terbatas ke fasilitas layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil, serta keterbatasan tenaga kesehatan di beberapa daerah turut menjadi penyebab. Faktor lain yang memengaruhi adalah kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya persalinan yang aman di fasilitas kesehatan. Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Barru mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

m. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/kelurahan dimana bayi yang ada di

desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap pada satu kurun waktu tertentu. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75

Cakupan Desa Kelurahan UCI Kab. Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI (Desa/Kel)	19	44	52	53	39
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan (Desa/Kel)	55	55	55	55	55
3	**CakupanDesa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)**	**35**	**80**	**95**	**96**	**71**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas terlihat bahwa persentase Cakupan Desa Kelurahan UCI Kab. Barru pada periode tahun 2020 -2024 mengalami perubahan setiap tahunnya. Dengan capaian cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 96 persen, dan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencapai 35 persen.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Barru pada periode 2020–2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan capaian tertinggi sebesar 96 persen pada tahun 2023 dan terendah sebesar 35 persen pada tahun 2020. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah ketersediaan dan distribusi vaksin, jumlah tenaga kesehatan di lapangan, serta dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program imunisasi. Pada tahun-tahun awal, seperti 2020, cakupan rendah dapat disebabkan oleh terhambatnya pelayanan imunisasi akibat pandemi COVID-19, keterbatasan mobilitas, dan penurunan kunjungan ke posyandu atau puskesmas. Sebaliknya, peningkatan pada 2023 menunjukkan adanya perbaikan sistem distribusi vaksin, peningkatan sosialisasi, serta pemulihan layanan kesehatan dasar. Faktor lain seperti dukungan lintas sektor, program percepatan imunisasi, dan pelatihan kader posyandu juga turut berkontribusi terhadap peningkatan cakupan UCI di tahun-tahun berikutnya.

n. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah keseluruhan balita yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali seratus persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.76

Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita gizi buruk (jiwa)	5	4	4	5	5
2	Jumlah seluruh balita (Jiwa)	13.343	13.024	12.571	12.250	11352
3	**Persentase balita gizi buruk (%)**	**0.04**	**0,03**	**0,03**	**0,04**	**0,04**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase balita gizi buruk Kabupaten Barru cenderung fluktuatif, namun masih dibawah angka 1%, termasuk kategori rendah menurut WHO dan masih berada di bawah target nasional yaitu kurang dari 5%. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya diare, cacingan, demam berdarah, thypus dan lain-lain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita.

Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan yang mengikuti kaidah gizi dan kesehatan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Salah satu akibat kurang gizi balita dapat menyebabkan *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh

pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Prevalensi *Stunting* pada balita dan baduta di Kabupaten Barru dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.77

Prevalensi Stunting Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (%)	11,04	8,30	8,70	11,9	16

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Prevalensi *stunting* balita di Kabupaten Barru pada tahun 2020 (17,43%) berada pada angka tertinggi artinya lebih buruk dari tahun-tahun berikutnya, hingga tahun 2020 – 2022 terus mengalami penurunan, namun kembali mengamali peningkatan di tahun 2024 sebesar 16 persen. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Oleh sebab itu pada perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak menjadi hal yang penting melalui praktek pengasuhan yang baik, perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses ke makanan bergizi serta air minum dan sanitasi yang memenuhi syarat.

o. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang di temukan dan telah mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah keseluruhan balita yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali seratus persen. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu (Jiwa)	3	4	4	5	5
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama (Jiwa)	3	4	4	5	5
3	**Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas terlihat bahwa persentase Cakupan Balita gizi buruk Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 sudah mencapai 100 persen setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh balita gizi buruk yang ditemukan telah mendapatkan perawatan di sarana kesehatan.

Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan tenaga kesehatan dalam menangani kasus gizi buruk secara tuntas. Capaian ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain sistem deteksi dini kasus gizi buruk melalui posyandu dan pemantauan pertumbuhan balita yang aktif. Selain itu, tersedianya layanan rujukan dan fasilitas perawatan gizi, seperti Puskesmas dan rumah sakit dengan program perbaikan gizi, turut memastikan setiap balita yang ditemukan segera ditangani. Pelatihan kader kesehatan, pendampingan keluarga, serta dukungan program dari lintas sektor dan mitra seperti UNICEF atau Dinas Sosial, juga berperan dalam memperkuat intervensi. Konsistensi pelaporan dan koordinasi lintas layanan kesehatan menjadikan cakupan penanganan gizi buruk tetap optimal sepanjang periode tersebut.

p. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Persentase imunisasi campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak usia 1 tahun dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini merupakan

ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar sebagai perlindungan terhadap penyakit campak. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (jiwa)	2.706	2856	2943	2700	2626
2	Jumlah anak usia 1 tahun (jiwa)	2.967	3048	2213	2449	3025
3	**Persentase anak usia 1 tahun diimunisasi campak (%)**	**91**	**93,70**	**83,5**	**110**	**87**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas terlihat bahwa Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kab. Barru pada periode tahun 2020 -2024 mengalami perubahan setiap tahunnya. Dengan capaian cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 110 persen, dan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 yang hanya mencapai 83,5 persen.

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten Barru pada periode 2020–2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Capaian tertinggi sebesar 110 persen pada tahun 2023 disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan imunisasi tambahan (PIN) atau sweeping yang menjangkau anak usia lebih dari 1 tahun, sehingga jumlah yang tercatat melebihi target. Sebaliknya, capaian terendah pada tahun 2022 sebesar 83,5 persen bisa disebabkan oleh penurunan kunjungan ke fasilitas kesehatan, keterbatasan vaksin, atau gangguan pelayanan akibat pandemi COVID-19 yang masih berdampak. Selain itu, perbedaan dalam cakupan pelaporan, kesadaran orang tua, dan akses ke layanan imunisasi juga memengaruhi jumlah anak yang mendapat imunisasi campak setiap tahun. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan dan dinamika dalam pelaksanaan program imunisasi di lapangan.

q. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Acute Flacid Paralys (AFP) adalah gejala kelumpuhan pada anak yang berumur di bawah 15 tahun yang terjadi secara mendadak (akut). Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80

Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus AFP non Polio (kasus)	0	0	3	3	6
2	Jumlah penduduk < 15 tahun (jiwa)	45.583	0	45.828	44.905	39053
3	**Non Polio rate per 100.000**	**0**	**0**	**6,5**	**6,7**	**15,4**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah Non Polio rate per 100.000 penduduk Kab. Barru pada periode tahun 2020 -2024 mengalami perubahan setiap tahunnya. Dengan kejadian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 15,4, dan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 dan 2021 yang pada tahun tersebut tidak terjadi kasus Non polio.

r. Cakupan balita pneumonia yang ditangani

Pneumonia adalah penyakit infeksi akut yang mengenai jaringan paru (alveoli) yang disebabkan terutama oleh bakteri dan merupakan penyakit saluran pernafasan akut yang sering menyebabkan meningkatnya angka kematian balita. Cakupan balita pneumonia yang ditangani merupakan indikator untuk mengetahui proporsi pneumonia balita di suatu wilayah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81

Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita pneumonia balita (Jiwa)	24	23	26	28	31
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia (jiwa)	744	744	744	744	744
3	**Cakupan balita**	**3,23**	**3,09**	**3,49**	**3,76**	**4,17**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	pneumonia yang ditangani (%)					

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Penderita pneumonia yang ditangani mengalami penurunan tiap tahunnya karena jumlah penderita pneumonia yang datang dan dilayani di sarana kesehatan cenderung lebih rendah dibandingkan tahun 2020 . Kurangnya kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan dikarenakan mereka enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena masih takut tertular virus corona atau lebih memilih menahan diri untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan. Capaian tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 4,17 persen, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebanyak 3,09 persen.

s. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA merupakan cakupan dari jumlah penderita TBC/BTA (+) yang ditemukan dan diobati disuatu wilayah kerja selama 1 tahun dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC/BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA di Kabaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun (Jiwa)	202	256	298	298	477
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) (Jiwa)	388	388	460	460	945
3	**Cakupan penemuan dan penanganan (%)**	**52.06**	**65,98**	**64,78**	**64,78**	**50,69**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas terlihat bahwa Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung mengalami penurunan dari

tahun ke tahun. Hal ini tentu mengindikasikan masih kurangnya kemampuan untuk menemukan dan mengobati kasus TBC BTA sesuai perkiraan yang ada.

Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebanyak 65,98 persen, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebanyak 50,69 persen

t. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi kronis yang menyerang paru dan merupakan salah satu penyebab kematian dengan jumlah yang tinggi. Tingkat prevalensi Tuberkulosi (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 pddk)

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) (Kasus)	202	256	460	341	477
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	193.358	195.385
3	**Tingkat prevalensi Tubercolosis (per100.000 pdk)**	**108,00**	**135,00**	**239,76**	**176,36**	**244,13**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Populasi yang beresiko terjangkit penyakit menular masih tinggi. Tingginya kasus penderita TB dikarenakan masih tingginya penularan kontak serumah. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah menurunkan angka CDR dengan penemuan dini kasus TB penjaringan suspek, pemberdayaan CBS (Community Base Surveylans), peningkatan pengobatan penderita manajemen program P2ML, masyarakat dilibatkan secara aktif, kemitraan para stake holder serta pemeriksaan kontak serumah penderita TB.

u. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi kronis yang menyerang paru dan bisa menyebakan kematian. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.84

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien TB yang meninggal (Jiwa)	13	24	16	15	28
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	195.385
3	**Tingkat kematian karena Tubercolosis (per100.000 pddk)**	**7,00**	**13,00**	**8,34**	**7,71**	**14,3**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2024 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya tetapi nilainya masih tetap tinggi. Hal ini tentu mengindikasikan masih tingginya tingkat kematian akibat penyakit Tuberkolosis.

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) dipengaruhi oleh beberapa faktor umum. Salah satunya adalah keterlambatan diagnosis, di mana pasien baru memeriksakan diri saat kondisi sudah parah. Selain itu, kepatuhan pengobatan yang rendah juga menjadi penyebab utama, karena pengobatan TB membutuhkan waktu lama dan disiplin tinggi. Penyakit penyerta seperti HIV, diabetes, atau gizi buruk turut memperparah kondisi penderita. Faktor lain seperti terbatasnya akses ke layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang gejala TB, juga berkontribusi. Gangguan layanan kesehatan, misalnya

saat pandemi, juga memengaruhi upaya penanganan TB dan dapat meningkatkan angka kematian.

v. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Proporsi jumlah kasus tubercolosis yang terdeteksi dalam Program Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) merupakan presentase jumlah pasien baru TB/BTA yang diperkirakan ada terhadap jumlah pasien yang telah mendapat pengobatan melalui program DOTS. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang terdeteteksi dalam program DOTS (Jiwa)		256	298	341	477
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang Terdeteksi dalam program DOTS (Jiwa)		388	298	570	945
3	**Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)**		**65,98**	**100,00**	**59,82**	**50,48**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Populasi yang beresiko terjangkit penyakit menular masih tinggi. Tingginya kasus penderita TB dikarenakan masih tingginya penularan kontak serumah. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah menurunkan angka CDR dengan penemuan dini kasus TB penjaringan suspek, pemberdayaan CBS, peningkatan pengobatan penderita manajemen program P2ML, masyarakat dilibatkan secara aktif, kemitraan para stake holder serta pengiriman dan pengambilan sedimen TBC di PRM.

w. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Proporsi kasus kasus tubercolosis yang di obati dan sembuh dalam Program Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) merupakan presentase jumlah pasien TB/BTA yang telah mendapat pengobatan melalui program DOTS terhadap jumlah pasien yang sembuh. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA Yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (Jiwa)	77	203	298	341	360
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA Yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (Jiwa)	388	388	460	570	477
3	**Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis Yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)**	**20**	**52**	**65**	**60**	**75**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluktuasi. Dengan cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 75 persen dan cakupan terendah pada tahun 2020 dengan capaian 20 persen.

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS cenderung fluktuatif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan hingga tuntas, karena program DOTS memerlukan pemantauan ketat dan pengobatan jangka panjang. Fluktuasi juga dapat terjadi akibat ketidakteraturan pelaporan data, mutu layanan kesehatan yang berbeda antar wilayah, serta adanya kasus TB dengan komplikasi atau penyakit penyerta yang sulit disembuhkan. Perubahan dalam kebijakan, dukungan logistik, atau situasi seperti pandemi juga bisa menyebabkan ketidakstabilan capaian program dari tahun ke tahun.

x. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan ini merupakan persentase atas jumlah penderita DBD yang ditemukan dengan jumlah penderita DBD yang ditangani.

Tabel 2.87

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Tahun 2020 - 2024

Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai (Jiwa)	32	36	25	32	103
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu (Jiwa)	32	36	25	32	103
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung stagnan dan telah berhasil mempertahankan cakupan selama lima tahun sebesar 100 persen.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Barru yang konsisten sebesar 100 persen selama tahun 2020–2024 mencerminkan efektivitas sistem surveilans dan layanan kesehatan yang berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh tersedianya prosedur penanganan kasus yang terstandar, koordinasi lintas sektor yang solid, serta komitmen tenaga kesehatan dalam melakukan deteksi dini dan tindak lanjut kasus. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan, seperti pemberantasan sarang nyamuk, turut berkontribusi dalam menjaga cakupan tetap optimal.

y. Penderita diare yang ditangani

Indikator ini merupakan persentase penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader disuatu wilayah dalam waktu satu tahun terhadap jumlah perkiraan penderita diare dalam suatu wilayah tertentu pada waktu yang sama dimana 10% dari angka kesakitan dikalikan jumlah

penduduk. Penderita diare yang ditangani Di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88

Penderita diare yang ditangani Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan Kader (Jiwa)	2.024	1.168	1.779	1.779	1.754
	Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x (Jiwa)	6.721	5.127	5.127	5.127	1.789
	Penderita diare yang ditangani (%)	**60.29**	**22,78**	**34,70**	**34,70**	**98**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Penderita diare yang ditangani mengalami penurunan karena jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan mengalami penurunan akibat pandemi Covid 19, masyarakat enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut tertular virus corona atau lebih memilih menahan diri untuk tidak datang ke fasilitas Kesehatan.

z. Angka kejadian Malaria

Angka kejadian malaria merupakan indikator untuk mengetahui insiden penyakit malaria pada satu daerah tertentu selama satu tahun. Angka kejadian malaria di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89

Angka kejadian Malaria Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk yang menderita malaria (Jiwa)	1	3	24	31	44
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	195.385
3	**Angka kejadian malaria (per 100.000 penduduk)**	**0.53**	**1,58**	**12,5**	**15,93**	**0,02**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Angka kejadian malaria Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung

berfluaktif, dengan jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 15,93 kasus, sementara jumlah kasus terendah terjadi pada tahun 2024 hanya sebesar 0,02 kasus.

Angka kejadian malaria di Kabupaten Barru pada periode 2020–2024 yang cenderung fluktuatif disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah perubahan kondisi lingkungan dan cuaca yang memengaruhi penyebaran nyamuk, mobilitas penduduk dari dan ke daerah endemis, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan. Selain itu, perbedaan upaya deteksi dan pelaporan kasus setiap tahunnya juga dapat memengaruhi jumlah kasus yang tercatat. Fluktuasi ini menunjukkan pentingnya pengendalian malaria yang rutin dan berkelanjutan.

aa. Tingkat kematian akibat malaria

Tingkat kematian akibat malaria adalah jumlah kematian tersangka malaria terhadap jumlah penduduk per 1000 jiwa. Tingkat kematian akibat malaria di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90

Tingkat kematian akibat malaria Tahun 2020 - 2024

No		2020	2021	2022	2023	2024
1		0	0	0	0	0
2		187.392	189.877	191.895	194.543	195.385
3		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Tingkat kematian akibat malaria dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah 0 per 1000 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa penanganan penderita malaria di Kabupaten Barru termasuk berhasil karena semua penderita malaria tidak ada yang meninggal.

Tingkat kematian akibat malaria di Kabupaten Barru yang tercatat 0 per 1.000 penduduk selama periode 2020–2024 menunjukkan keberhasilan dalam penanganan kasus. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti deteksi dini kasus,

penatalaksanaan yang cepat dan tepat di fasilitas kesehatan, serta tersedianya obat anti malaria secara memadai. Selain itu, dukungan program pencegahan dan pengendalian malaria, seperti penyemprotan dan penggunaan kelambu, turut membantu mengurangi tingkat keparahan infeksi. Keberhasilan ini juga mencerminkan efektivitas koordinasi lintas sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gejala dan penanganan malaria.

bb. Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida adalah persentase banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur dengan menggunakan kelambu yang sudah dipoteksi dengan insektisida terhadap jumlah balita keseluruhan. Namun di Kabupaten Barru belum ditemukan indikasi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survey tidur dengan menggunakan kelambu yang sudah diproteksi dengan insektisida (Jiwa)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Jumlah Balita (Jiwa)	13.343	13.024	12.355	9.574	
3	**Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

cc. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

HIV dan AIDS merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik yang sering dikaitkan dengan kesehatan reproduksi terutama perempuan. Persentase Prevalensi HIV/AIDS merupakan jumlah

pasien HIV dan AIDS terhadap total populasi penduduk. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS (Jiwa)	5	6	11	18	21
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	195.385
3	**Prevelensi HIV/AIDS dari Total Populasi (%)**	**0.003**	**0,003**	**0,006**	**0,01**	**0,01**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 - 2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah prevelensi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 0,006 persen, sementara jumlah prevelensi terendah terjadi pada tahun 2024 yang hanya sebanyak 0,001 persen.

Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Barru pada periode 2020–2024 yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh beberapa faktor umum. Di antaranya adalah perbedaan intensitas skrining dan deteksi kasus setiap tahun, tingkat pelaporan dan pencatatan yang bervariasi, serta mobilitas penduduk dan perubahan perilaku berisiko. Selain itu, stigma terhadap HIV/AIDS dapat membuat sebagian orang enggan melakukan pemeriksaan, sehingga memengaruhi angka kasus yang tercatat. Fluktuasi ini mencerminkan pentingnya konsistensi dalam upaya pencegahan, edukasi, dan deteksi dini agar kasus HIV/AIDS dapat dikendalikan secara berkelanjutan.

dd. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin merupakan pemberian pelayanan kesehatan perorangan meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat

inap dengan sarana kesehatan strata 1 dan jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada dalam satu wilayah tertentu (jumlah Penerima Bantuan Iuran/PBI lokal).

Tabel 2.93

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan starta 1 (Jiwa)	7.808	113.948	16.971	16.971	
2	Jumlah Masyarakat Penerima KIS di Kabupaten (Jiwa)	135.423	142.732	59.231	59.231	
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	5,80	80,00	29,00	29,00	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 80,00 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 5,80 persen.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien masyarakat miskin di Kabupaten Barru pada periode 2020–2024 yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh beberapa faktor normatif. Di antaranya adalah ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan rujukan, efisiensi sistem rujukan yang berjalan, serta dukungan kebijakan dan pembiayaan melalui program jaminan kesehatan. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur rujukan dan perubahan situasi pelayanan, seperti kondisi pandemi, juga berperan dalam memengaruhi tingkat cakupan. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem rujukan yang responsif, inklusif, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

ee. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard dibagi jumlah seluruh bayi lahir hidup disuatu wilayah. Cakupan

kunjungan bayi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94

Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Jiwa)	2.955	3.026	2.965	3381	2339
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (Jiwa)	3.094	3.059	3.061	3122	3091
	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	**95,51**	**98,92**	**96,86**	**108,30**	**75,67**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan kunjungan bayi Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 108,30 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2024 yang hanya sebesar 75,67 persen.

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Barru pada periode 2020–2024 yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh beberapa faktor normatif. Di antaranya adalah aksesibilitas dan ketersediaan layanan kesehatan dasar, kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemeriksaan bayi secara rutin, serta ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana pendukung pelayanan. Selain itu, perubahan dalam pelaporan data, mobilitas penduduk, serta kondisi khusus seperti pandemi juga turut memengaruhi tingkat kunjungan. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya penguatan edukasi masyarakat dan pemerataan pelayanan kesehatan anak secara berkelanjutan.

ff. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan kunjungan ke-4 ibu hamil dan mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yaitu paling minim empat kali terhadap

jumlah sasaran ibu hamil. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 (Jiwa)	3.173	3.070	3.011	2.630	2.292
2	Jumlah sasaran ibu hamil (Jiwa)	3.404	3.391	3.402	3.436	3270
3	**Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)**	**93,21**	**90,53**	**88,51**	**89,14**	**70,09**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 93,21 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2024 yang hanya sebesar 70,09 persen.

Fluktuasi cakupan kunjungan ibu hamil K4 di suatu kabupaten dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, kurangnya edukasi tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan, serta faktor sosial ekonomi seperti biaya dan waktu. Selain itu, situasi khusus seperti pandemi COVID-19, kualitas pelayanan yang kurang memadai, perubahan kebijakan, serta ketidaktepatan dalam pencatatan dan pelaporan data juga turut memengaruhi naik turunnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 dari tahun ke tahun.

gg. Cakupan Pelayanan Nifas

Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari. Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96

Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar (Jiwa)	3.112	2.962	2.970	2.970	2325
2	Jumlah seluruh ibu nifas (Jiwa)	3.246	3.199	3.199	3.199	3251
3	**Cakupan pelayanan nifas (%)**	**95,87**	**92,59**	**92,84**	**92,84**	**71,52**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 95,87 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2024 yang hanya sebesar 71,52 persen.

Angka yang fluktuatif umumnya disebabkan karna faktor tingkat pengetahuan dan kesadaran ibu tentang pentingnya pemeriksaan nifas, karena banyak yang menganggap masa nifas tidak memerlukan pengawasan medis jika tidak ada keluhan. Selain itu, faktor sosial ekonomi, seperti keterbatasan biaya transportasi dan waktu, dapat menghambat kunjungan, ketidaktepatan pelaporan data juga dapat memicu fluktuasi cakupan pelayanan nifas dari tahun ke tahun.

hh. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97

Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah neonatus dengan	313	609	289	263	975

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	komplikasi yang tertangani (Kasus)					
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada (Kasus)	313	609	521	522	975
3	**Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)**	**100**	**100**	**55,47**	**50,38**	**100**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 100 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2023 yang hanya sebesar 50,38 persen.

Tingkat deteksi dini komplikasi neonatus yang masih rendah, karena minimnya kunjungan pasca-persalinan atau keterlambatan orang tua membawa bayi ke fasilitas kesehatan, juga turut memengaruhi cakupan. Ketidaktepatan dalam pencatatan dan pelaporan data, serta perbedaan metode identifikasi kasus dari tahun ke tahun, bisa menyebabkan angka tampak naik turun. Faktor lain seperti pandemi, perubahan program intervensi, dan kesadaran orang tua terhadap tanda bahaya pada bayi juga ikut berperan dalam terjadinya fluktuasi tersebut.

ii. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah persentase anak balita (usia 12 sampai dengan 59 bulan) yang memperoleh pelayanan sesuai standard. Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98

Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali (Jiwa)	7.750	8.682	10.216	10.393	12.506
2	Jumlah seluruh anak balita (Jiwa)	12.788	12.788	12.355	13.413	15.177

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	**Cakupan pelayanan anak balita (%)**	**60,60**	**67,89**	**82,60**	**77,46**	**82,40**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Pelayanan anak balita Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 82,60 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 60,60 persen.

Cakupan pelayanan anak balita di suatu kabupaten mencerminkan sejauh mana anak usia di bawah lima tahun memperoleh layanan kesehatan dasar yang sesuai standar, seperti pemantauan pertumbuhan, imunisasi, serta deteksi dini masalah gizi dan perkembangan. Fluktuasi cakupan dari tahun ke tahun dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, tingkat pengetahuan dan kesadaran orang tua, serta dukungan kebijakan dan program dari pemerintah daerah. Di samping itu, kondisi eksternal seperti situasi pandemi, bencana alam, serta dinamika pencatatan dan pelaporan data juga dapat memengaruhi capaian cakupan pelayanan anak balita.

jj. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin

Gizi memegang peranan penting dalam siklus hidup manusia. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan dapat pula menyebabkan penurunan tingkat kecerdasan. Untuk itu pemberian MP-ASI pada bayi usia 6-24 bulan dari keluarga miskin karena mereka memiliki keterbatasan dalam penyediaan pangan di rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99

Cakupan Pemberian MP ASI Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI (Jiwa)	421	215	596	0	0
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (Jiwa)	890	215	596	0	0
3	**Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)**	**47,30**	**100**	**100**	**0**	**0**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Pemberian MP ASI Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2022 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 100 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencapai 5,04 persen. Sementara untuk data Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin pada tahun 2024 tidak tersedia data terpilah.

Variasi capaian tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pengetahuan dan kesadaran ibu mengenai pemberian MP-ASI yang tepat, ketersediaan bahan pangan bergizi, serta peran aktif tenaga kesehatan dan kader dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Di samping itu, faktor sosial ekonomi keluarga, akses terhadap pelayanan gizi, serta dukungan program pemerintah seperti penyuluhan gizi dan pemantauan tumbuh kembang juga turut menentukan keberhasilan cakupan. Kondisi khusus seperti pandemi COVID-19 yang terjadi di awal periode dapat pula memengaruhi pelaksanaan dan pencapaian program, baik dari sisi pelayanan langsung maupun partisipasi masyarakat. Dengan demikian, peningkatan cakupan pemberian MP-ASI memerlukan upaya berkelanjutan yang mencakup intervensi gizi, edukasi masyarakat, dan penguatan layanan kesehatan dasar.

kk. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD/MI yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan seterusnya. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Barru dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.100

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (Jiwa)	10.764	5.211	8.425	2.793	3.203
2	Jumlah murid SD dan setingkat (Jiwa)	16.737	6.762	9.471	3.209	4.472
3	**Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)**	**64,00**	**77,06**	**88,95**	**87,00**	**72**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat di Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 88,95 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 64,00 persen.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat menunjukkan sejauh mana pemeriksaan kesehatan dasar dilakukan pada anak usia sekolah. Fluktuasinya dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kesehatan, dukungan sekolah, sarana prasarana, serta partisipasi orang tua. Faktor eksternal seperti pandemi juga dapat memengaruhi pelaksanaan. Kerja sama lintas sektor diperlukan untuk menjaga cakupan tetap optimal.

ll. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin merupakan pemberian pelayanan kesehatan perorangan meliputi observasi, diagnosa, pengobatan,

keperawatan, rehabilitasi medik tanpa rawat inap terhadap jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada dalam satu wilayah tertentu (Penerima Bantuan Iuran/PBI Lokal). Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Kab. Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan pasien miskin sarkes strata 1 (Jiwa)	7.808	113.948	16.971	16.971	
2	Jumlah Seluruh Masyarakat Miskin (Jiwa)	135.423	142.732	18.704	18.704	
3	**Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)**	**5,80**	**80,00**	**90,70**	**90,70**	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 90,7 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 5,80 persen.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin mencerminkan sejauh mana kelompok rentan ini memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang layak, seperti pengobatan dasar, imunisasi, pelayanan ibu dan anak, serta gizi. Fluktuasi cakupan dapat disebabkan oleh faktor seperti keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan, kendala administrasi dalam kepesertaan jaminan kesehatan, serta tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Selain itu, kondisi geografis, sosial ekonomi, serta efektivitas program bantuan pemerintah turut memengaruhi capaian. Untuk menjaga cakupan yang optimal, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat secara berkelanjutan.

mm. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

Indikator ini memberikan acuan pelayanan keperawatan dan penanganan gawat darurat sesuai dengan standar pelayanan yang dilakukan. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Gawat Darurat Level 1 (Unit)	1	1	1	1	1
2	Jumlah RS (Unit)	1	1	1	1	1
3	**Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan saranan kesehatan (RS) (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) dari tahun 2020 hingga tahun 2024 telah mencapai 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rumah sakit di wilayah tersebut telah mampu menyediakan pelayanan gawat darurat dasar sesuai standar. Hal ini mencerminkan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menangani kasus-kasus kedaruratan yang bersifat umum dan membutuhkan penanganan cepat, serta adanya komitmen pemerintah daerah dalam memastikan akses layanan darurat tersedia secara merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

nn. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103

Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KLBdi Desa/Kelurahan yang ditangani <24 (Kasus)	233	1.268	468	11	12
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi (Kasus)	233	1.268	468	11	12
3	**Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam di Kabupaten Barru pada periode tahun 2020 -2024 telah terpenuhi 100 persen dalam kurun waktu tersebut. Hal ini mencerminkan respons cepat dan kesiapsiagaan sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) di tingkat daerah dalam menangani potensi wabah atau kejadian kesehatan masyarakat yang tidak biasa. Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dan peran petugas surveilans di lapangan telah berjalan dengan baik dalam mendukung pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit secara tepat waktu.

4. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik merupakan perbandingan panjang jalan dalam kondisi baik terhadap panjang jalan secara keseluruhan. Jalan kondisi baik adalah semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis. Kondisi jaringan jalan terbagi dalam empat kondisi yaitu kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang dan kondisi rusak berat. Kondisi panjang jaringan jalan di Kabupaten Barru tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104

Kondisi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian		2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Baik (km)	445,05	444,24	404,21	425,07	359,865
2	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Ringan (km)		59,04	38,94	29,14	135,49
3	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Sedang (km)		53,80	66,53	146,95	58,527
4	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Berat (km)	126,28	126,28	173,69	82,94	130,23
5	Jalan secara keseluruhan (kabupaten)		683,36	683,36	684,11	684,106
6	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**		**0,65**	**0,65**	**0,59**	**0,52**

Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2024 berkurang secara signifikan sebesar 60,205 km dibanding tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2020 merupakan pencapaian tertinggi panjang jalan dalam kondisi baik selama periode tahun 2020 -2024. Kondisi ini mengakibatkan penambahan panjang jalan rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya kerusakan atau penurunan kualitas infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya tertangani, serta perlunya upaya pemeliharaan dan rehabilitasi jalan secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas jaringan transportasi di wilayah tersebut.

b. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.105

Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Panjang Jalan Kabupaten (km)	683,36	683,36	683,36	684,11	684,11
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	196.002

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3.	**Rasio**	**0,36**	**0,36**	**0,36**	**0,35**	**0,35**

Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio panjang jalan per satuan penduduk pada periode tahun 2020-2024 cenderung stagnan, Hal ini dipengaruhi oleh jumlah jalan kabupaten yang cenderung stagnan dan tidak bertambah. Pada tahun 2024 rasio panjang jalan per satuan penduduk sama dengan tahun sebelumnya sebesar 0,35.

c. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar dengan kecepatan diatas 40 km/jam tanpa ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.106

Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020		2022	2023	2024
1	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (km)	445,05	444,24	404,21	425,07	359,865
2	Panjang Seluruh Jalan Kabupaten (Km)	683,36	683,36	683,36	684,11	684,11
3	**Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)**	**65,1**		**59,15**	**66,39**	**52,60**

Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam) yang diasumsikan sebagai jalan dalam kondisi mantap berdasarkan Permen PU No. 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan, dari tahun 2020 sampai 2024 cenderung meningkat meskipun

kembali terjadi penurunan di tahun 2024 akibat kerusakan jalan yang terjadi. Pada tahun 2024 persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam) meningkt sebesar 52,60 persen.

d. Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pebuangan air (minimal 1,5 m) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.107
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pebuangan air (minimal 1,5 m)
di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan	-	-	4.650	4.650	4.650
2.	Panjang seluruh Jalan Kabupaten	683,36	683,36	683,36	684,11	684,11
3.	**Persentase**	**-**	**-**	**6,8**	**6,8**	**6,8**

Sumber : Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas mulai tahun 2020 sampai tahun 2021 panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase belum dilakukan pengukuran secara menyeluruh sehingga data yang tersedia tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten Barru, namun pada tahun 2022 sampai tahun 2024 telah dilakukan pengukuran dan didapatkan data persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase sebesar 6,8 persen.

e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi merupakan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dengan pemahaman akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.108

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	46.663	46.663	47.318	48.638	33.473
2.	Jumlah rumah tinggal	46.663	46.663	47.318	48.638	48.654
3.	**Persentase**	**95,79**	**100**	**100**	**100**	**68,8**

Sumber : Data Olahan Pokja PKP Tahun 2025

Pada tabel diatas terlihat jumlah rumah yang berakses sanitasi meningkat setiap tahunnya dengan penjelasan data bahwa jumlah rumah dipersamakan dengan jumlah rumah tangga atau Kepala Keluarga. Pada tahun 2024 merupakan angka yang menunjukkan penjumlahan jumlah Rumah tangga atau kepala keluarga yang berakses layak bersama, layak sendiri, dan akses aman yang telah mencapai 100 % dengan predikat ODF. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Barru tahun 2024 sebesar 68,8 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

e. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Untuk drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.109

Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air

Tidak Tersumbat Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020		2022	2023	2024
1	Panjang Drainase	-		4.130	4.130	3.969

No	Uraian	2020		2022	2023	2024
	tersumbat pembuangan aliran air (Km)					
2	Panjang Seluruh Drainase (Km)	643.954		643.954	643.954	646.522
3	**Persen (%)**	**-**	**-**	**6,41**	**6,41**	**6,14**

Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas mulai tahun 2020 sampai tahun 2021 panjang drainase tersumbat dan panjang drainase keseluruhan belum dilakukan pengukuran secara menyeluruh sehingga data yang tersedia tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten Barru. Pada tabel diatas menunjukkan Persentase panjang drainase yang tersumbat pembuangan aliran airnya dengan total seluruh panjang drainase Kabupaten Barru mengalami penurunan dibandingkan dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi dikarenakan masih adanya masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke saluran drainase serta adanya tumpukan sedimen yang seharusnya diselesaikan secara gotong royong, namun harus menunggu lagi dari pemerintah, sehingga drainase yang baik dapat berkurang kualitasnya dan mengalami kerusakan dan penyumbatan.

f. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Irigasi berarti mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110

Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (m)	3.488	3.514	3.575	3.779	3.464
2	Luas Irigasi kabupaten (m)	6.919	6.919	6.919	6.919	6.919
3	**Persentase (%)**	**50,41**	**50,79**	**51,67**	**54,62**	**50,07**

Sumber: Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2025

Irigasi Kabupaten Barru tersebar di 7 kecamatan dengan klasifikasi berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 (tiga) yakni Fungsi Primer, Sekunder dan Tersier dengan persentase dalam kondisi baik pada tahun 2024 mengalami penurunan yang disebabkan beberapa Irigasi Jaringan Tersier di kabupaten Barru mengalami kerusakan. Hal ini juga disebabkan kurangnya komitmen tentang Lahan Pangan Berkelanjutan sehingga luasan tidak dapat dipertahankan dan yang dalam kondisi baik cenderung akan menurun.

g. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah satu kesatuan bangunan dan saluran yang dipergunakan untuk mengatur jalannya air irigasi, dimulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pemanfaatannya. Secara umum saluran atau jaringan irigasi di bagi menjadi jaringan primer, sekunder dan tersier. Rasio jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.111

Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Irigasi Jaringan primer (m)	22.356	22.356	22.356	22.356	125.941
2	Irigasi Jaringan Sekunder (m)	90.264	90.823	91.474	91.474	108.192
3	Irigasi Jaringan Tersier(m)	79.217	79.217	79.217	79.217	55.811
4	Panjang saluran irigasi(m)	191.837	191.837	193.047	193.047	289.944
5	Luas Lahan Budidaya pertanian (Ha)	6.919	6.919	6.919	6.919	6.919
6	**Rasio (%)**	**27,73**	**27,81**	**27,90**	**27,90**	**41,91**

Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan rasio panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian pada tahun 2024 mengalami kenaikan hal ini dikarenakan adanya dukungan dari Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Kabupaten Barru. Selanjutnya hal ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan partisipasi bukan hanya dari GP3A, tetapi dari unsur masyarakat lainnya.

h. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air minum/air bersih adalah air yang berasal dari air ledeng/PAM dengan menggunakan meteran atau tanpa meteran, pompa air/sumur bor, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal dimana syarat-syarat air minum menurut kementerian kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112

Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

NO		2020	2021	2022	2023	2024
1.		176.223	183.744	183.744	189.292	189.789
2.		187.392	189.877	191.895	194.548	196.001
3.		**96,63**	**96,77**	**95,75**	**97,30**	**96,83**

Sumber : Data Olahan Pokja PKP Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan persentase penduduk berakses air minum sampai tahun 2020 - 2024 berfluktuatif. Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 96,83 persen. Akses air minum yang dimaksud terdiri dari akses perpipaan dan non perpipaan dimana non perpipaan meliputi mata air terlindungi, air kemasan, air dijual eceran dan penampungan air hujan.

i. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Permukiman kumuh menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan, Pemukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113

Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Bidang/Urusan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Kawasan kumuh (Ha)	21,07	18,55	71,55	122,37	86,77
2	Luas Wilayah Kabupaten (Ha)	117.472	117.472	117.472	117.472	117.472
3	**Persentase areal kawasan Kumuh (%)**	**0,02**	**0,02**	**0,06**	**0,10**	**0,07**

Sumber : Data Olahan Pokja PKP Tahun 2024/Kotaku Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan areal kawasan kumuh mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung menurun, peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Barru telah melakukan beberapa intervensi penganggaran pada lokasi kumuh tersebut, hanya saja belum pernah dilakukan deliniasi kembali luas areal kawasan kumuh yang ditetapkan tersebut. Pada tahun 2024 persentase areal kawasan kumuh Kabupaten Barru sebesar 0,07 persen.

j. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat pemakaman terdiri atas Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Sedangkan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus. Sedangkan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Kab. Barru Tahun 2022-2024

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Jmlh	Luas (m2)	Daya Tampung	Jmlh	Luas (m2)	Daya Tampung	Jmlh	Luas (m2)	Daya Tampung
1.	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	39	40.001	26.667	39	40.001	26.667	39	40.001	26.667
2.	Tempat Pemakaman Bukan Umum(TPBU)	29	15.910	10.606	29	15.910	10.606	29	15.910	10.606
3.	Tempat Pemakaman Khusus (TPK)	11	218.000	-	11	218.000	-	11	218.000	-
4.	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Tempat Pemakaman	79	77.711	37.273	79	77.711	37.273	79	77.711	37.273
6.	Jumlah Penduduk (jiwa)	-	-	191.895	-	-	194.543	-	-	196.001
7.	**Rasio TPU Persatuan Penduduk (1/6)**	**-**	**-**	**0,139**	**-**	**-**	**0,137**	**-**	**-**	**0,136**

Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tabel diatas mengalami penurunan karena tidak adanya penambahan daya tampung yang signifikan meskipun dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang juga meningkat. penambahan daya tampung pemakaman tersebut dilakukan dengan cara optimalisasi pemanfaatan lahan untuk setiap makam di areal pemakaman.

5. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115

Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	44719	59.920	47.318	48.219	46.967
2.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	196.001
3.	**Rasio**	**0.24**	**0.31**	**0,24**	**0,25**	**0,24**

Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk berfluktuasi hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya yang tidak beriringan dengan jumlah rumah layak huni. Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sebesar 0,24. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam pembangunan perumahan yang memenuhi standar kelayakan, seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah tersebut.

b. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman yang layak huni di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116

Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Permukiman Layak Huni (Ha)	3.750,57	3.769,12	3.771,32	3.696,00	3.684,87
2	Luas Wilayah Pemukiman (Ha)	3.771,64	3.771,64	3.771,64	3.771,64	3.771,64
3	**Rasio**	**0,99**	**0,99**	**0,99**	**0,97**	**0,98**

Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas rasio permukiman layak huni cenderung stagnan dari tahun 2020 sampai tahun 2022, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan. Untuk luas permukiman layak huni didapatkan dari hasil pengurangan luas wilayah permukiman secara keseluruhan dengan luas permukiman kumuh yang pengertiannya dipersamakan dengan permukiman tidak layak huni. Kondisi tersebut mencerminkan perlunya peningkatan upaya penataan kawasan dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman agar rasio permukiman layak huni dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

6. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) yakni 100 orang petugas linmas kabupaten dibagi dengan satu wilayah kerja kabupaten. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.117

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kab.Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru (Orang)	898	898	736	1084	
2	1 Wilayah kerja kabupaten (Jiwa)	187.392	189.877	191.895	194.543	
3	**Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**	**0,48**	**0,47**	**0,38**	**0,56**	

Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) cenderung menurun dari tahun 2020 ke 2022, namun pada tahun 2023 kembali meningkat sebesar 1.084 orang. hal ini tidak mempengaruhi kinerja linmas seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kab. Barru pada tahun 2024. Selain itu, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Barru pada tahun 2024, keberadaan dan peran Linmas menjadi semakin penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan.

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dengan jumlah pelanggaran K3 dikali 100 persen. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelanggaran K3 Yang terselesaikan (kasus)	254	70	83	70	
2	Jumlah Pelanggaran K3 Yang Dilaporkan Masyarakat Dan Teridentifikasi (kasus)	14	7	4	5	
3	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)**	**18,14**	**10,00**	**20,75**	**14**	

Sumber : Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2025

Data Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) menunjukkan bahwa semua kasus pelanggaran K3 yang diselesaikan cenderung berfluktuatif dalam kurun tahun 2020 -2024. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 100 persen. Sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 14 persen. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya jumlah pelanggaran, keterbatasan sumber daya aparatur penegak ketertiban, atau kendala dalam koordinasi antarinstansi terkait. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan mekanisme penanganan pelanggaran K3 agar ketertiban, ketentraman, dan keindahan lingkungan dapat terus terjaga.

c. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran meliputi jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dibagi dengan luas wilayah kabupaten. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.119

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (Km^2)	1.174.7	1.174,7	1.174,7	1.174,7	
2	Luas Wilayah (Km^2)	1.174.7	1.174,7	1.174,7	1.174,7	

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	

Sumber : Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa hingga tahun 2022 target cakupan wilayah manajemen kebakaran dipertahankan dari tahun 2020 sebesar 100 persen, penempatan armada mobil pemadam kebakaran di WMK Kecamatan Pujananting menjadi unsur keterpenuhan jangkauan wilayah sehingga sampai Tahun 2022 ini sudah ada 6 WMK yang ada di Kabupaten Barru (Tanete Riaja, Balusu, Mallusetasi, Soppeng Riaja, Tanete Rilau, dan Pujananting) serta Posko Induk yang ada di Kecamatan Barru, yang diharapkan dapat meminimalisir kerugian masyarakat atau pun korban jiwa akibat kebakaran.

d. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Penanganan kebakaran merupakan hal yang diantaranya memerlukan keahlian, ketepatan dan kecepatan. Waktu penanganan kebakaran sangat menentukan tingkat keberhasilan penanganan dalam setiap kasus kebakaran. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan Jumlah Kasus Kebakaran Di WMK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit terhadap Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK yang dinyatakan dalam persen. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120

Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kasus Kebakaran Di WMK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit (Kasus)	70	35	26	146	
2	Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK (kasus)	70	35	26	146	
3	**Tingkat Waktu Tanggap (Respon**	**100**	**100**	**100**	**100**	

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (%)					

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan kasus kebakaran di Kabupaten Barru dari tahun 2020 , hal ini dikarenakan musim kemarau relatif lebih singkat, Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan kasus kebakaran sebesar 146. Disamping itu optimalisasi sosialisasi terhadap masyarakat tentang pencegahan dan bahaya kebakaran terus ditingkatkan. Adapun tingkat waktu tanggap daerah WMK telah mencapai 100%, hal ini diasumsikan dengan adanya pemadam kebakaran di tiap Kecamatan maka waktu respon terhadap setiap kejadian kebakaran relatif dapat terpenuhi.

e. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan PERDA merupakan salah satu tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dimana setiap PERDA yang dihasilkan Kabupaten Barru menjadi tanggung jawab Satpol PP dalam Penegakannya. Persentase penegakan PERDA di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121

Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda (Perda)	18	31	55	70	
2	Jumlah Pelanggaran Perda (perda)	18	31	55	70	
3	**Persentase Penegakan Perda (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	

Sumber : Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase penegakan PERDA Kabupaten Barru periode tahun 2020 -2024 cenderung dapat dipertahankan. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dengan capaian 100 persen. Capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 56,58, persen yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, pengawasan yang belum optimal, atau peningkatan jumlah pelanggaran. Meskipun demikian, secara umum

pelaksanaan penegakan PERDA di Kabupaten Barru masih menunjukkan tren yang positif dan memerlukan penguatan berkelanjutan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum daerah.

6. Bidang Urusan Sosial

a. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.122

Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PMKS yang diberi bantuan (jiwa)	17.967	18.027	13.171	14.279	6.922
2	Jumlah PMKS yang belum mendapatkan bantuan (jiwa)	21.821	3.794	4.856	3.748	300
3	Jumlah PMKS yang ada (jiwa)	39.785	18.027	13.171	12.063	7.222
4	**Prosentase PMKS memperoleh Bantuan Sosial (%)**	**45,15**	**100**	**100**	**118,37**	**95,85**

Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyandang PMKS yang memperoleh bantuan sosial berfluktuatif setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya.

b. Persentase PMKS Yang Tertangani

Persentase PMKS yang tertangani adalah perbandingan jumlah PMKS yang tertangani dengan jumlah PMKS yang ada, yang

dinyatakan dalam persen. Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.123

Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PMKS yang tertangani (jiwa)	17.967	18.027	13.171	14.279	6.922
2	Jumlah PMKS yang ada (jiwa)	17.967	18.027	13.171	12.063	7.222
3	**Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani (%)**	**100**	**100**	**100**	**118,37**	**95,85**

Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang PMKS yang tertangani meningkat tiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya sekaligus memenuhi pencapaian SPM.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi : angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

a. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Angka sengketa pengusaha/pekerja pertahun adalah perbandingan jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja

dibandingkan dengan jumlah perusahaan di kali 100 persen. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.124

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja (Kasus)	0	0	1	0	1
2	Jumlah Perusahaan (Unit)	51	51	39	54	54
3	**Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per-Tahun (%)**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**1,85**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2025

Jumlah perselisihan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja pada tahun 2024 yang dilaporkan dan ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan Pengawas Ketenagakerjaan wilayah Parepare dan Barru sebanyak 1 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat sengketa ketenagakerjaan di Kabupaten Barru relatif rendah pada tahun tersebut, yang dapat mencerminkan hubungan industrial yang cukup kondusif antara perusahaan dan tenaga kerja. Namun demikian, upaya pencegahan melalui dialog sosial, pengawasan ketenagakerjaan, serta penyuluhan hak dan kewajiban tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas hubungan kerja di daerah tersebut.

b. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Kerjasama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama adalah perbandingan jumlah kasus yang diselesiakan dengan perjanjian kerjasama dibandingkan dengan jumlah kasus yang dicatatkan di kali 100 persen. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.125

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama

Kabupaten Barru Tahun2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2022	2024
1	Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan kerjasama (PB) (Kasus)	0	0	1	0	0
2	Jumlah kasus yang dicatatkan (Kasus)	0	0	1	0	0
3	**Besaran kasus yang diselessikan dengan perjanjian kerjasama (PB) (Kasus)**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2025

c. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar di kali 100 persen. Data besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.126

Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Kabupaten Barru Tahun 2020 -2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan (orang)	132	638	844	729	415
2	Jumlah Pencari kerja yang mendaftar (orang)	250	1.694	2.140	1129	981
3	**Pencari Kerja yang ditempatkan (%)**	**52,80**	**38**	**39**	64,5	42,30

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2025

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan berdasarkan monitoring tenaga kerja pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 844 tenaga kerja dari total pencari kerja yang mendaftar sebanyak 2.140 tenaga kerja atau sebesar 39%.

d. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek adalah perbandingan antara pekerja/buruh jamsostek dengan pekerja/buruh secara keseluruhan di kali 100 persen. Data Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek di Kabupaten Barru dapat dilhat pada tabel berikut.

Tabel 2.127

Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pekerja/ Buruh JAMSOSTEK (orang)	38.111	40,008	1.367	2.435	2.335
2	Pekerja/ Buruh (orang)	48.075	48,007	2.045	2.585	2.552
3	**Persentase (%)**	**79**	**83**	**67**	94	**91**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2025

Peningkatan yang signifikan terhadap kepesertaan Jaminan ketenagakerjaan di Kabupaten Barru dari 0,73 % pada tahun 2020 menjadi 77% di tahun 2020 hingga 83% di tahun 2021, dan kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 67% di tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek pada tahun 2024 belum mencapai target (belum sesuai), yang mana target RPJMD pada tahun tersebut sebesar 70,53 persen

e. Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda dengan jumlah kejadian perselisahan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda di kali 100 persen. Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tidak ada

perselisihan. Data perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.128

Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda (Kasus)	0	0	1	1	0
2	Jumlah Kejadian perselisahan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda (Kasus)	0	0	1	1	0
3	**Persentase penyelesaian perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah (%)**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2025

Jumlah Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada periode Tahun 2020 -2024 jumlahnya sangat sedikit, hanya ada 1 kasus pada tahun 2022, sementara pada tahun 2020 -2021 sama sekali tidak ada kasus perselihan.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Jumlah Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada Tahun 2024 tidak mencapai target dengan adanya 1 kasus perselisihan, sementara target RPJMD pada tahun tersebut mengharapkan tidak ada kasus perselisihan.

f. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah perbandingan tenaga kerja yang dilatih dengan pendaftar pelatihan berbasis kompetensi. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.129

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tenaga kerja yang dilatih (orang)	20	152	40	32	64
2	Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi (orang)	20	152	40	32	64
3	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2025

Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan sertifikasi pada tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melalui Bidang Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Jasa Konstruksi sebanyak 40 Tenaga Kerja dengan capaian 100 persen apabila dibandingkan dengan jumlah pendaftar pelatihan.

g. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan adalah perbandingan antara tenaga kerja yang dilatih dengan pendaftar pelatihan kewirausahaan dikali 100 persen. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.130

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan kewirausahaan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tenaga kerja yang dilatih (Orang)	20	0	0	0	0
2	Pendaftar pelatihan (Orang)	20	0	0	0	0
3	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2025

Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Barru pada periode 2020 -2024, cenderung menurun, sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 belum ada lagi tenaga kerja yang dilatih, hal ini mempengaruhi cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan urusan yang sangat penting untuk menuju pencapaian kesetaraan gender yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan. Sedangkan perlindungan anak merupakan amanah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan dengan ditandatanganinya deklarasi menuju kabupaten layak anak pada tahun 2020 , mengharuskan Kabupaten Barru memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, selama periode 2020 -2024 telah disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender. Capaian pemberdayaan Perempuan ditunjukkan dari angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.131

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	95,52	95,51	95,64	95,65	95,65
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	63,96	63,98	65,24	64,91	64,91

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menunjukkan

apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Dari angka IPG dan IDG pada tabel diatas memperlihatkan bahwasanya angka untuk IPG dalam periode tahun 2020 -2024 menunjukkan perolehan yang memuaskan meskipun berfluktuasi.

Selain itu pada Tahun 2021 telah terbit Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa, untuk itu sangat penting focusing terhadap Pemberdayaan Perempuan.

Untuk perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Barru juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, diharapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah dapat melindungi hak-hak anak di Kabupaten Barru.

a. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. pekerja perempuan dilembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi eselon I-IV. untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.132

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II (Orang)	2	2	2	2	2
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III (Orang)	32	34	41	39	38
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV (Orang)	220	102	101	109	110

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
4	Pekerja perempuan di pemerintah (Orang)	4.088	2.435	2.547	2.580	2.566
5	Jumlah pekerja perempuan (Orang)	21.687	25.649	25.854	30.630	29,162
6	**Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah (%)**	**18,55**	**9,49**	**9.85**	**8,42**	**8,40**

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2024/BPS Kab. Barru tahun 2025

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2020 -2024 cenderung menurun, dari tahun 2020 persentasenya kisaran 18 persen, akan tetapi pada tahun 2021 dan 2024 persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintahan cenderung menurun pada kisaran angka 9 dan 8 persen.

b. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah perbandingan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dengan jumlah total kursi di keanggotaan DPRD yang dinyatakan dalam persen. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.133

Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan (Orang)	5	5	5	5	6
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD (Orang)	25	25	25	25	25
3	**Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)**	**20**	**20**	**20**	**20**	**24**

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Barru Tahun 2025

Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2020-2024 cenderung stagnan, capaian tertinggi pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 24 persen.

c. Rasio KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.134

Rasio KDRT terhadap Total Jumlah Rumah Tangga

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KDRT (Kasus)	8	8	0	3	2
2	Jumlah Rumah Tangga (KK)	54.707	56.657	63.128	63.128	54.073
3	**Rasio KDRT (%)**	**0,01**	**0,01**	**0**	**0,04**	**0,05**

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Rasio KDRT terhadap Total Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2020-2024 cenderung menurun, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan rasio 0,05 persen. capaian terbaik terjadi pada tahun 2022 dengan tidak adanya kasus KDRT pada tahun tersebut.

d. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.135

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu (Kasus)	3	13	11	24	27
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu (Kasus)	3	13	11	24	27
3	**Persentase (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan ditindaklanjuti.

e. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT Di Rumah Sakit

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Barru Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.136

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	0	0	0	10	11
2	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana	0	0	0	10	11

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu					
3	**Persentase (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

f. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.137

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan rehabsos	0	0	0	0	
2	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos dalam kurun waktu tertentu	0	0	0	0	
3	**Persentase (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

g. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Kasus)	0	0	5	7	15
2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan (Kasus)	0	0	5	7	15
3	**Persentase (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Persentase penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sangat baik dengan cakupan persentase sebesar 100 persen. Hal ini mengindikasikan penegakan hukum yang baik atas perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.

h. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.139

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hokum (Orang)	0	0	6	5	4
2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hokum (Orang)	0	0	6	5	4
	Persentase (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan mendapatkan layanan bantuan hukum.

i. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.140

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan (Orang)	0	0	6	24	27
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT (Orang)	0	0	6	24	27
3	**Persentase (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Persentase Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan mendapatkan pelayanan pemulangan.

j. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.141

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	0	0	3	5	10
2	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	0	0	3	5	10
3	**Persentase (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Persentase Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan mendapatkan pelayanan reintegrasi sosial.

3. Pangan

a. Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pangan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Indikator ketersediaan pangan utama, energi dan protein perkapita dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan meningkatkan ketahanan pangan. Ketersediaan pangan utama, energi dan protein perkapita dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.142

Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan keamanan Pangan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2022
1	Ketersediaan pangan utama (Ton)	261.588	229.133	237.980	296.488	366.780

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2022
2	Ketersediaan energi (mT)	2782	2.352	2.354,29	2.063	2.068
3	Protein perkapita (kalori)	69,77	96,91	81,90	107,40	98,50
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	53	45,2	77,3	73,76	73,61

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru Tahun 2025

Persentase Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan keamanan Pangan Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2020 -2024 berfluktuasi, Capaian tertinggi pada tahun 2022 dengan persentasenya 77,3 persen, capaian terendah tahun 2029 dengan persentase 0,42 persen.

b. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah persentase angka kecukupan gizi (AKG) di kalikan bobot masing-masing kelompok pangan. Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.143

Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) (%)	93	93	93,20	82,00	78,60

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru Tahun 2025

Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2020 -2024 mengalami peningkatan, capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 93,20 persen sedangkan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 91 persen.

4. Lingkungan Hidup

a. Tersusunnya RPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai instrument perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola

ligkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup dan harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan. Tersusunnya RPPLH dan terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.144

Tersusunnya RPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

NO.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersusunnya RPPLH kab/Kota (Ada/Tidak ada)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kab/Kota (Ada/Tidak Ada)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Dalam periode tahun 2020 -2024, belum ada dokumen RPPLH yang disusun dan diintegrasikan Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru.

b. Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P

Regulasi yang mengatur tiap daerah untuk wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam Pasal 15 ayat (2). Pada ayat ini menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi : (a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan (b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Pada prinsipnya KLHS adalah suatu kajian/penilaian mandiri (self assessment) untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun terlaksananya KLHS sebagai bagian dalam pengambilan

kebijakan rencana program Kabupaten Barru tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.145

Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah (Ada/Tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Dalam periode tahun 2020 -2024, setiap tahun telah diselenggarakan KLHS untuk K/R/P tingkat daerah di Kabupaten Barru dengan output dokuman KLHS yang disusun dan diintegrasikan Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru.

c. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air, Indeks kualitas Udara, Indeks kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan merupakan indikator pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kualitas lingkungan dan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Indeks kualitas air adalah nilai yang menunjukkan status mutu air dengan metode indeks pencemaran, Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya yang dihitung berdasarkan emisi dari 2 (dua) polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Perhitungan indeks tutupan lahan dilakukan melalui perbandingan jumlah luas tutupan ber-hutan dibagi dengan jumlah luas wilayah Kabupaten Barru

Tabel 2.146

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil Pengukuran indeks Kualitas Air	50	60,67	50,67	50,67	64,00
2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	90,59	92,52	92,74	92,74	91,67
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69,77	70,25	70,44	70,44	70,59
4	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)**	**69,85**	**75,67**	**72,04**	**72,04**	**76,65**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Barru dilakukan pada 3 sungai, yaitu sungai Sumpang BinangaE di Kecamatan Barru, Sungai BottoE yang melintasi wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan Tanete Rilau dan sungai Takkalasi yang melintasi wilayah Kecamatan Barru dan Kecamatan Balusu. Setiap sungai memiliki 3 titik pantau dengan pengambilan sampel minimal 2 kali dalam setahun. Parameter yang dinilai dalam indeks kualitas air yaitu TSS,DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli. Pada Tahun 2020 Nilai Indeks kualitas Air (IKA) Kabupaten Barru pada sebesar 50 berada pada kondisi baik. Nilai IKA tersebut dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain:

- Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada berbagai sumber air.
- ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global
- penggunaan air
- Tingkat erosi dan sedimentasi

Kualitas udara ambient di Kabupaten Barru dipengaruhi oleh kegiatan transportasi dan industri. Pemantauan dilakukan di 4 titik lokasi yang mewakili dari pemukiman, industri, dan padat lalu lintas dengan menggunakan metode passive sampler. Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pencemaran Udara adalah konsentrasi NO2 dan SO2. Nilai konsentrasi tahunan adalah rata-rata dari nilai konsentrasi yang terpantau setiap bulan untuk selanjutnya dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala

0-100. Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2024 di Kabupaten Barru pada Tabel di atas menunjukkan angka 91,67 menurun sedikit dari tahun sebelumnya, yang berarti indeks kualitas udara di Kabupaten Barru > 50 jadi termasuk dalam kondisi baik. Tetapi nilai IKU tersebut berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena konsentrasi SO2 mengalami penurunan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Barru harus meningkatkan upaya dalam peningkatan kualitas udara di Kabupaten Barru terutama pada lokasi perkantoran dan pemukiman. Berdasarkan data tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa status IKLH Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sebesar 76,65 persen meningkat dari tahun sebelumnya.

d. Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan perbandingan antara Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani dengan Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang dinyatakan dalam persen. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.147

Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

NO.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (%)	10	10	23	8	11

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Dalam periode tahun 2020-2024, Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Barru setiap tahunnya telah dilaksanakan, meskipun demikian capaian persentasenya masih rendah dengan kisaran di bawah 25 persen.

e. Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)

Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) terdiri atas Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina dan Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum. Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.148

Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)	1	1	2	1	1
2	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina;	0	0	0	0	0
3	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	0	0	0	3	3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Dalam periode tahun 2020 -2024, Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) berfluktuasi, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebanyak 2 kali. Sementara capaian terendah pada tahun 2020 , yang mana pada tahun tersebut tidak ada kegiatan peningkatan sama sekali.

f. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Penghargaan lingkungan hidup merupakan reward yang diberikan kepada individu atau kelompok karena telah berjasa menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan serta memenuhi dan/atau melebihi standar nilai yang ditentukan.

Tabel 2.149

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	0	1	3	2	2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Dalam periode tahun 2020-2024, setiap tahunnya telah terlaksana pemberian penghargaan lingkungan hidup. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah kabupaten Barru dalam pengelolan dan pelestarian lingkungan hidup.

g. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH yang di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.150

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengaduan masyarakat yang ditangani (Kasus)	10	4	6	4	4
2.	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi (Kasus)	10	4	6	4	4
3.	**Persentase (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Persentase Cakupan layanan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah di Kabupaten Barru pada Tahun 2024 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan terregisterasi.

h. Timbulan Sampah yang ditangani

Timbulan sampah yang ditangani adalah perbandingan antara volume timbulan yang ditangani dengan total timbulan sampah dikali dengan 100 persen. Timbulan sampah yang ditangani tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.151

Timbulan Sampah yang ditangani di Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2022

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Volume timbulan sampah yang ditangani (Ton)	22.030	5.130,47	27.817,00	24.562,18	24.855,36
2.	Total timbulan sampah (Ton)	27.359	9.929,31	27.817,23	28.230,27	28.526,2
3.	**Persentase (%)**	**80,52**	**51,67**	**99,99**	**87,01**	**87,13**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Persentase Timbulan Sampah yang ditangani di Kabupaten Barru pada tahun 2020-2024 berfluktuasi. Capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 99,99 persen, capaian terendah tahun 2020 sebanyak 80,41 persen. Sementara capaian tahun 2024 sebesar 87,13 persen, Hal ini mengindikasikan volume timbulan sampah yang ditangani kabupaten Barru sudah cukup besar.

i. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R

Sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.152

Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R

di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%)**	34,38	34,54	36,86	38,5	39,45

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R pada tahun 2024 di kabupaten Barru sebesar 39,45 persen, Hal ini mengindikasikan pengurangan jumlah sampah melalui program ini masih rendah begitupula efektifitas dari program ini.

j. Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani

Jumlah sampah yang tertangani yaitu volume sampah yang di tangani di bagi dengan Volume produksi sampah yang dinyatakan dalan persen. Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.153

Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

NO.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani (Persen)	80,52	81,93	85,05	86,48	87,13

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Persentase jumlah sampah yang ditangani dari tahun 2020 - 2024 berfluktuasi, dengan persentase tertinggi pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 87,13 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 80,52 persen.

k. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.154

Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

NO.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat operasionalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Stasiun Pemindahan Antara (SPA) di Kabupaten Barru selama periode tahun 2020 hingga 2024 berada pada tingkat 100 persen setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh fasilitas pengelolaan sampah yang ada di kabupaten tersebut berfungsi secara optimal dan konsisten dalam lima tahun terakhir, mencerminkan komitmen daerah dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor persampahan.

1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.155

Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP (Jiwa)	135.033	137.147	139.463	144.566	144.224

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah (Jiwa)	135.045	137.159	142.219	145.556	145.141
3	**Rasio (Persen)**	**0,99**	**0,99**	**0,98**	**0,99**	**0,99**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barru terus menunjukkan tren positif. Terkait kepemilikan KTP terlihat bahwa pada tahun 2024 menunjukkan angka 0,99 yang mendekati angka 1, yang mana berarti jumlah penduduk yang bersyarat memiliki KTP sudah hampir semuanya telah memiliki KTP.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Kabupaten Barru pada tahun 2024 belum mencapai target dengan capaian sebesar 0,99, sementara target RPJMD pada tahun tersebut ditetapkan sebesar
1 (dikonversikan dari IKK Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk).

b. Rasio Bayi Dan Penduduk Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Sedangkan Rasio penduduk berakte kelahiran adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang mempunyai akte kelahiran dengan jumlah penduduk. Rasio bayi dan penduduk berakte kelahiran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.156

Rasio Bayi dan Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru
Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bayi berakte kelahiran Jiwa)	1.403	1.745	1.745	1.604	1.624
2	Jumlah bayi (Jiwa)	1.422	1.745	1.745	1.604	1.624
3	**Rasio (%)**	**0,99**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Sedangkan rasio penduduk berakte kelahiran tahun 2022 - 2024 perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.157

Rasio Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru

Tahun 2022-2024

Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk Yang Mempunyai Akte Kelahiran		Jumlah Penduduk		Rasio	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
731101	Tanete Riaja	7.260	7.065	7.487	7.198	0,97	0,97
731102	Tanete Rilau	11.571	11.277	11.887	11.469	0,97	0,97
731103	Barru	13.533	12.914	13.712	13.147	0,97	0,97
731104	Soppeng Riaja	5.111	4.919	5.232	5.004	0,98	0,97
731105	Mallusetasi	7.943	7.686	8.138	7.803	0,98	0,97
731106	Pujananting	3.793	3.669	3.955	3.786	0,96	0,97
731107	Balusu	5.440	5.304	5.589	5.390	0,97	0,97
7311	**Kab. Barru**	**54.472**	**52.834**	**56.000**	**53.797**	**0,97**	**0,97**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat kepemilikan akte kelahiran tidak mencapai angka maksimal. Pemerintah Kabupaten Barru perlu mengatasi keterlambatan pengurusan akte kelahiran yang menjadi permasalahan mengapa tidak pernah mencapai 100%.

c. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah. Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.158

Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah (Jiwa)	32.810	38.630	45.498	49.653	51.356
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah (Jiwa)	87.208	88.111	89.700	90.383	90.339

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	**Rasio (%)**	**37,62**	**43,84**	**50,72**	**54,94**	**56,85**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Persentase Cakupan Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Barru Tahun 2024 masih cukup rendah dengan cakupan persentase 54,94 persen. Hal ini mengindikasikan masih banyak pasangan nikah yang belum berakte nikah.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa Persentase Cakupan Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Barru pada tahun 2024 belum mencapai target dengan capaian hanya sebesar 54,94 persen, sementara target RPJMD pada tahun tersebut ditetapkan sebesar 100 persen.

d. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.159

Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024 telah tersedia database dengan skala provinsi, begitupula telah diterapkan KTP nasional berbasis NIK. Hal ini sejalan dengan

target RPJMD Pada tahun 2024 yang mengharapkan ada database kependudukan skala propinsi dan sudah dilaksanakan penerapan KTP Nasional Berbasis NIK.

e. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.160

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan (Orang)	135.045	137.147	139.463	144.566	144.224
2	Jumlah penduduk wajib KTP (Orang)	135.033	137.159	142.219	145.556	145.141
3	**Persen ((1/2)x100%)**	**99,99**	**99,99**	**98,06**	**99,32**	**99,37**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barru sangat baik, dengan kisaran 98 persen ke atas.

Meskipun demikian, apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2024 yang mengharapkan Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barru sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2024 belum mencapai target karna baru mencapai 99,32 persen.

f. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

Cakupan penerbitan akte kelahiran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.161

Cakupan penerbitan akte kelahiran di Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan penerbitan akte kelahiran (%)	44,54	47,27	51.44	97,27	97,08

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2024 Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran di Kabupaten Barru cenderung meningkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 97,27 persen, apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2024 yang mengharapkan Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Kabupaten Barru sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2024 belum mencapai target karna baru mencapai 97,27 persen.

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Pembangunan Prasarana diwilayah kelurahan/pedesaan mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Prasarana yang dibangun harus dapat dimanfaatkan sampai masa yang panjang, untuk itu diperlukan upaya pemanfaatan dan pemeliharaan. Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program. Selain faktor kualitas konstruksi yang dihasilkan, faktor-faktor penting yang mempengaruhi berfungsinya suatu prasarana dan sarana adalah Pengelolan prasarana, yang mencakup Organisasi Pengelola, Pemanfaatan/Pengoperasian dan Pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan. Bila salah satu hal tersebut tidak dipenuhi maka akan berpengaruh kepada kualitas pelayanan dan umur pemanfaatan yang akhirnya akan mengakibatkan tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan dibangunnya prasaran dan sarana tersebut. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan

desa yang baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.162

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kantor pemerintahan Desa yang Baik (Unit)	40	40	40	40	40
2	Jumlah seluruh pemerintahan desa (Unit)	40	40	40	40	40
3	**Persentse (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024 Persentase cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik di Kabupaten Barru sudah cukup tinggi, dengan kisaran persentase sebesar 100 persen dalam kurun waktu lima tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Barru telah memiliki fasilitas perkantoran yang memadai untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui penyediaan infrastruktur yang layak dan representatif.

b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah perbandingan jumlah kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dengan jumlah LPM yang dinyatakan dalam persen. Rata-rata kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.163

Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok binaan	55	55	55	55	55

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (Unit)					
2	Jumlah LPM (Unit)	55	55	55	55	55
3	**Rata-rata**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024, Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Barru sudah cukup tinggi, dengan kisaran rata rata sebesar 1 dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Meskipun jumlah tersebut relatif stabil dan mencerminkan adanya keberlanjutan program pemberdayaan, angkanya masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan peran LPM dalam membentuk dan membina lebih banyak kelompok masyarakat guna meningkatkan partisipasi, kemandirian, serta efektivitas pembangunan berbasis masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

c. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.164

Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok binaan PKK (Kelompok)	2485	NA	2.627	2.677	2.677
2	Jumlah PKK (Kelompok)	63	63	63	63	63
3	**Rata-rata (%(**	**39,44**	**NA**	**41,70**	**42,49**	**42,49**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024, Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Barru masih cukup rendah, dengan kisaran rata rata di bawah 50 dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan peran dan kapasitas PKK dalam melakukan pembinaan masyarakat, terutama dalam

bidang pemberdayaan keluarga, kesehatan, dan pendidikan. Upaya peningkatan jumlah dan kualitas kelompok binaan menjadi penting agar program-program PKK dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan berbasis keluarga di tingkat desa dan kelurahan.

d. Persentase LSM Aktif

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif. Persentase LSM yang aktif adalah jumlah LSM yang terdaftar di pemerintah dari jumlah yang ada di Kabupaten Barru. Persentase LSM aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.165

Persentase LSM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah LSM terdaftar	56	51	41	39	41
2	Jumlah LSM tidak aktif	19	15	11	9	3
3	Jumlah LSM aktif (1-2)	37	36	30	30	38
4	Jumlah LSM	56	51	41	39	41
5	**Persentase (%)**	**66**	**71**	**73**	**77**	**93**

Sumber : Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024, persentase LSM Aktif di Kabupaten Barru cukup tinggi, dengan kisaran diatas 50 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat melalui LSM dalam mendukung pembangunan dan pengawasan kebijakan daerah cukup kuat dan konsisten. Keberadaan LSM yang aktif menjadi indikator positif dalam mendorong partisipasi publik, transparansi, serta penguatan kontrol sosial di berbagai sektor pembangunan.

e. Persentase LPM Berprestasi

Jumlah LPM berprestasi yaitu Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif melaksanakan kegiatan dibagi jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berprestasi dikali seratus. Persentase LPM berprestasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.166

Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah LPM Berprestasi	14	14	14	23	23
2	Jumlah LPM	55	55	55	55	55
3	**Persentase (%)**	**25,45**	**25,45**	**25,45**	**41,82**	**41,82**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024, Rata-rata persentase LPM Berprestasi di Kabupaten Barru menunjukkan trend yang stagnan dari tahun ke tahun, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 41,82 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat LPM yang aktif dan berkinerja baik, peningkatan jumlah LPM berprestasi belum signifikan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas, pendampingan, serta pemberian insentif atau apresiasi bagi LPM agar lebih termotivasi dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

f. Persentase PKK aktif

PKK aktif yaitu jumlah PKK yang memiliki pengurus dan sekretariat dan memiliki program kerja. Persentase PKK aktif adalah perbandingan antara jumlah PKK yang aktif dengan keseluruhan jumlah PKK yang dinyatakan dalam persen. Persentase PKK aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.167

Persentase PKK Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	*2021*	*2022*	2023	2024
1	Jumlah PKK Aktif (Kelompok)	63	63	63	63	63
2	Jumlah PKK (Kelompok)	63	63	63	63	63
3	**Persentase (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024, persentase PKK Aktif di Kabupaten Barru cukup tinggi, dengan kisaran 100 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh tim Penggerak PKK di tingkat desa dan kelurahan berperan aktif dalam mendukung program-program pemberdayaan keluarga, kesehatan,

pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Konsistensi ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat peran PKK sebagai mitra strategis dalam pembangunan berbasis keluarga di tingkat lokal.

g. Persentase Posyandu Aktif

Persentase posyandu aktif adalah perbandingan jumlah posyandu aktif dengan jumlah semua posyandu yang dinyatakan dalam persen. Persentase posyandu aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.168

Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Posyandu Aktif (Posyandu)	262	262	270	270	189
2	Total Posyandu (Posyandu)	262	262	270	270	189
3	**Persenentase (Persen)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024, persentase posyandu Aktif di Kabupaten Barru cukup tinggi, dengan kisaran 100 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Posyandu di wilayah tersebut berfungsi secara optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, khususnya ibu dan anak. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang kuat dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas kegiatan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat desa dan kelurahan.

h. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat bisa berupa ide, gagasan, pikiran dan bisa pula berupa bantuan finansial. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.169

Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	180	180	180	180	180
	Total program pemberdayaan Masyarakat	6	6	6	6	6
3	**Persentase (%)**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024, persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Barru cenderung stagnan dari tahun ke tahun, dengan kisaran 30 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan masih terbatas, baik dalam bentuk tenaga, waktu, maupun kontribusi material. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan strategi pemberdayaan yang lebih efektif, termasuk penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan kesadaran kolektif, serta dukungan pemerintah dalam membangun kemitraan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan lokal.

i. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Pada saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan maka dilakukan serah terima dari pelaksana kegiatan kepada masyarakat dan masyarakat diwajibkan membentuk tim pemelihara sehingga apabila suatu saat ada kerusakan maka menjadi kewajiban masyarakat dan anggota tim pemelihara mempunyai kewajiban mengkoordinir iuran pemeliharaan serta proses pemeliharaannya.

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.170

Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembang dan dipelihara masyarakat	3	3	3	3	3
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	6	6	6	6	6
3	**Persentase (%)**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 -2024 persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Barru cenderung stagnan dari tahun ke tahun, dengan kisaran 50 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan perlunya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan hasil program pemberdayaan. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas kelembagaan lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan monitoring dan evaluasi agar hasil program dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang.

3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah angka kelahiran total. Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.171

Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

NO.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,55	2,55	2,52	2,40	2,18

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2024, jumlah total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten barru sebesar 2,18. Angka ini menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Capaian TFR sebesar 2,18 mendekati angka ideal penggantian generasi (replacement level) yang umumnya berada pada kisaran 2,1. Hal

ini mencerminkan bahwa tingkat kelahiran di Kabupaten Barru berada pada level yang relatif seimbang dan berpotensi mendukung stabilitas pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang. Namun demikian, upaya pengendalian kelahiran serta peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana tetap perlu dilakukan secara konsisten untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kependudukan.

b. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.172

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB
Di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

NO.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	28	28	11	15	22
2	Jumlah Seluruh Perangkat Daerah	45	36	36	33	33
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	62,22	77,75	30,55	45,45	66,67
b						

Sumber: Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2024, persentase OPD yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB sebesar 66,67 persen, atau dengan kata lain sebanyak 22 OPD yang berperan aktif, dari keseluruhan 33 OPD.

Artinya, dari total 33 OPD yang ada, sebanyak 22 OPD telah berkontribusi secara aktif dalam mendukung program Kampung KB. Capaian ini mencerminkan adanya keterlibatan lintas sektor dalam mendukung integrasi program kependudukan, keluarga

berencana, dan pembangunan keluarga di tingkat desa atau kelurahan. Meskipun demikian, masih terdapat sepertiga OPD yang belum terlibat secara optimal, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, komitmen, dan sinergi antar perangkat daerah agar implementasi Kampung KB dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

c. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.173

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
Di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

NO.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	45	36	36	33	33
2	Jumlah Seluruh Perangkat Daerah	45	36	36	33	33
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun dari tahun ke tahun perangkat daerah baik Dinas maupun Badan di Kabupaten Barru belum mengalami peningkatan atau pertambahan yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan dokumen perencanaan tersebut belum optimal dalam mendukung pelaksanaan program pengendalian penduduk lintas sektor. Kurangnya integrasi dan kesadaran akan pentingnya pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas perencanaan, serta advokasi kepada perangkat daerah agar

Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dapat diintegrasikan secara menyeluruh dalam dokumen kebijakan dan program pembangunan daerah.

d. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.174

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

NO.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2024, Belum ada kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan kependudukan masih belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pendidikan di berbagai jalur. Kurangnya inisiatif atau koordinasi antara instansi terkait, lembaga pendidikan, dan pihak ketiga menjadi salah satu tantangan dalam mendorong pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak guna mengembangkan pendidikan kependudukan yang terstruktur, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

e. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah perbandingan antara jumlah anak dengan jumlah keluarga. Rata-rata jumlah anak perkeluarga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.175

Rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak	61.280	54.881	51.580	56.000	24.804
2	Jumlah keluarga	54320	61.838	52.641	64.228	64.748
3	**Rata-rata jumlah anak per keluarga**	**1,128**	**0,887**	**0,979**	**0,872**	**2,61**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2023, Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Barru dibawah 1,2. Capaian rata-rata tertinggi tejadi pada tahun 2024 sebesar 2,61, dan terendah sebesar 0,887 pada tahun 2021. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam struktur dan perilaku keluarga yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti program keluarga berencana, kondisi sosial ekonomi, serta kesadaran masyarakat terhadap pengendalian jumlah anggota keluarga. Peningkatan tajam pada tahun 2024 mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap konsistensi pelaksanaan program kependudukan agar pertumbuhan jumlah anak per keluarga tetap seimbang dan sesuai dengan arah kebijakan pengendalian penduduk.

f. Ratio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah akseptor KB dengan jumlah pasangan usia subur yang dinyatakan dalam persen. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.176

Rasio akseptor KB Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah akseptor KB (Jiwa)	61.280	18.860	14.538	18.808	17.760

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah pasangan usia subur (Jiwa)	54.320	27.087	27.083	35.752	26.010
3	**Rasio akseptor KB (%)**	**112,81**	**69,63**	**53,68**	**52,61**	**68,20**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2023, Rasio akseptor KB di kabupaten Barru menunjukkan trend penurunan. Capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 112,81, dan terendah sebesar 52,61 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 Rasio akseptor KB di kabupaten Barru mengalami penigkatan sebesar 68,20 persen.

Penurunan yang terjadi sebelumnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menurunnya partisipasi masyarakat dalam program KB, keterbatasan akses layanan, atau dampak pandemi. Sementara peningkatan di tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program KB, baik dari sisi pelayanan maupun kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, upaya penguatan sosialisasi, pelayanan yang merata, dan kemitraan lintas sektor tetap diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan capaian program KB secara berkelanjutan.

g. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja. CPR adalah perbandingan antara jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-49 tahun) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang ditanyakan dalam persen. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.177

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta KB aktif (Jiwa)	19.562	13.753	14.187	23.250	17.760
2	Jumlah pasangan usia subur (Jiwa)	29.361	27.089	27.083	35.752	26.010
3	**Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15– 49 (%)**	**66,63**	**75,01**	**64,99**	**65,03**	**68,20**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 sudah diatas 65 persen selama lima tahun terakhir, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 75,01 dan terendah sebesar 64,99 pada tahun 2022. Pada tahun 2024 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 meningkat sebesar 68,20 persen.

Tren ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam penggunaan alat kontrasepsi relatif tinggi, meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Hal ini mencerminkan keberhasilan program keluarga berencana di daerah tersebut, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan dalam penyuluhan, pemerataan akses pelayanan, dan peningkatan kualitas layanan agar capaian CPR dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

h. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15-49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20-35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20-35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun. Dengan demikian yang dimaksud Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih

di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.178

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 thn (Jiwa)	443	474	389	621	312
2	Jumlah pasangan usia subur (Jiwa)	29361	27087	27.083	35.752	26.010
3	**Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)**	**1,51**	**1,75**	**1,44**	**1,74**	**0,87**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 1,75 persen dan terendah sebesar 0,87 persen pada tahun 2024.

Fluktuasi ini dapat mencerminkan dinamika sosial terkait usia pernikahan, serta efektivitas upaya pemerintah dalam menunda usia pernikahan melalui edukasi dan kampanye kesehatan reproduksi. Penurunan pada tahun 2024 menunjukkan arah yang positif dalam mendukung program peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan kesehatan reproduksi remaja.

i. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) adalah perbandingan antara jumlah PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani dengan jumlah pasangan usia subur yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.179

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (*unmet need*)

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani (Jiwa)	4906	13.753	4.716	6.156	2.018
	Jumlah pasangan usia subur (Jiwa)	29361	27.087	27.083	35.752	26.010
	Persentase ((1/2)x100%) (%)	**16,71**	**15,89**	**17,41**	**17,22**	**7,7**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (*unmet need*) berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 17,41 dan terendah sebesar 7,7 pada tahun 2024.

Penurunan *unmet need* pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan pelayanan program Keluarga Berencana, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga. Meskipun demikian, upaya untuk memperluas jangkauan layanan dan mengatasi hambatan kultural maupun logistik tetap diperlukan untuk menurunkan unmet need secara berkelanjutan.

j. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP) adalah perbandingan jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP dengan jumlah akseptor yang dinyatakan dalam persen. Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.180

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP (Jiwa)	2760	3.398	1.447	1.790	2.206
2	Jumlah akseptor KB (Jiwa)	19859	18.860	14.187	18.808	17.760
3	**Persentase ((1/2)x100%) (%)**	**13,90**	**18,02**	**10,20**	**9,52**	**12,4**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 -2024, Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 18,02 persen, capaian terendah pada 2023 sebesar 9,52 persen. Pada tahun 2024 capaian Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Barru sebesar 12,4 persen. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti preferensi metode kontrasepsi, keterjangkauan layanan, serta efektivitas penyuluhan dan pendampingan program KB yang dilaksanakan.

k. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah perbandingan jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi dengan jumlah akseptor KB yang dinyatakan dalam persen. Peresentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.181

Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

o	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi (Jiwa)	9.799	7.977	4.716	2.830	4.440
2	Jumlah akseptor KB (Jiwa)	19.562	18.860	14.537	18.808	17.760
3	**Persentase ((1/2)x100%)**	**50,09**	**42,3**	**32,44**	**15,05**	**25,00**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 50,09 persen kemudian menurun signifikan secara berturut-turut pada tiga tahun selanjutnya sekaligus menjadi capaian terendah pada tahun 2023 selama periode lima tahun terakhir yang hanya sebesar 15,05 persen. Sementara capaian tahun 2024 sebesar

25,00 persen. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan penggunaan kontrasepsi, yang bisa dipengaruhi oleh faktor sosialisasi program, ketersediaan layanan, serta perubahan preferensi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

l. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKB yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.182

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB (Jiwa)	3642	3.488	2.642	3.866	2.077
2	Jumlah anggota kelompok BKB (Jiwa)	7672	5.693	5.168	7.432	2.660
3	**Persentase ((1/2)x100%)**	**45,13**	**61,05**	**51,12**	**52,02**	**78,00**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 78,00 persen sedangkan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 45,13 persen. Perubahan ini dapat mencerminkan peningkatan kesadaran ber-KB di kalangan anggota BKB, meskipun masih terdapat dinamika dalam pencapaiannya setiap tahun.

m. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKR yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.183

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB (Jiwa)	3008	2.940	2.249	3.882	1.067
2	Jumlah anggota kelompok BKR (Jiwa)	9992	7.730	5.222	6.421	2.452
3	**Persentase ((1/2)x100%)**	**30,10**	**30,90**	**43,06**	**60,46**	**43,51**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 60,46 persen kemudian capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 30,10 persen. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan partisipasi keluarga remaja dalam program KB, meskipun masih belum konsisten dari tahun ke tahun.

n. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB adalah jumlah anggota kelompok BKL yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.184

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB (Jiwa)	2325	301	2.499	3.014	215
2	Jumlah anggota kelompok BKL (Jiwa)	7012	5.331	4.963	5.326	2.574
3	**Persentase ((1/2)x100%)**	**33,16**	**34,05**	**50,35**	**56,59**	**8,35**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan

capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 56,59 persen kemudian capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 8,35 persen.

Fluktuasi ini mencerminkan pentingnya konsistensi dalam penyuluhan dan pelayanan KB, terutama untuk segmen usia lanjut, agar cakupan partisipasi dapat dipertahankan atau ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu melakukan evaluasi serta meningkatkan pendekatan yang lebih tepat sasaran untuk mendorong keterlibatan lansia dalam program KB sebagai bagian dari penguatan ketahanan keluarga.

o. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan adalah perbandingan antara jumlah PPKS dengan jumlah kecamatan yang dinyatakan dalam persen. Persentase pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.185

Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PPKS (Unit)	7	7	7	7	7
2	Jumlah kecamatan (Unit)	7	7	7	7	7
3	**Persentase ((1/2)x100%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir. Setiap Kecamatan di kabupaten barru telah memiliki setidaknya 1 unit PPKS. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendukung ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara merata. Ke depan, kualitas layanan PPKS perlu terus ditingkatkan agar lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

p. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa adalah jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa dengan jumlah kecamatan yang dinyatakan dalam persen. Untuk mengetahui cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.186

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PIK R/M	63	72	53	62	62
2	Jumlah kecamatan	7	7	7	7	7
3	**Persentase (%)**	**900**	**1024**	**757**	**885**	**885**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa di Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebsar 1024 persen, semsntara capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 757 persen. Capaian Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa di Kabupaten Barru pada tahun 2024 sebesar 885 persen. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan perlunya penguatan keberlanjutan program, peningkatan kualitas layanan, serta dukungan kolaboratif dari berbagai sektor untuk memastikan PIK-R/M terus berperan aktif dalam pembangunan generasi muda yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

q. Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang penegendalian penduduk adalah perbandingan jumlah PKB

dan PLKB yang didayagunakan dengan jumlah PKB/PKLB yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PKB/PKLB yang didayagunakan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.187

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	50	50	49	54	54
2	Jumlah PKB/PLKB	50	50	49	54	54
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Persentase Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh PKB/PLKB yang tersedia telah diberdayakan secara optimal oleh Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Keberhasilan ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk dan pemberdayaan keluarga, serta sinergi yang baik antarinstansi dalam mewujudkan tujuan pembangunan keluarga yang berkualitas di Kabupaten Barru.

r. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang ber-KB Mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri adalah perbandingan jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber KB mandiri dengan jumlah anggota kelompok UPPKS yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.188

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri (Unit)	469	358	219	120	245
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS (Unit)	917	917	224	161	733
3	**Persentase ((1/2)x100%)**	**51,15**	**39,02**	**97,77**	**74,53**	**33,42**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Barru di Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebsar 97,77 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 33,42 persen.

Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan program KB mandiri di kalangan anggota UPPKS, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, akses terhadap layanan KB, tingkat kesadaran, maupun efektivitas pendampingan dari petugas terkait. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan pendekatan yang lebih strategis agar capaian cakupan KB mandiri di kalangan PUS anggota UPPKS dapat ditingkatkan dan dipertahankan secara berkelanjutan.

s. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa kelurahan adalah perbandingan jumlah petugas pembantu Pembina KB desa dengan jumlah desa kelurahan yang dinyatakan dalam persen. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.189

Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)

Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	55	55	55	55	55
2	Jumlah desa/kelurahan	55	55	55	55	55
3	**Persentase ((1/2)x100%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir. Dengan kata lain setiap desa dan kelurahan di kabupaten Barru memiliki petugas pembantu Pembina KB Desa.

Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memastikan keberadaan tenaga pendamping di lini lapangan guna mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga di tingkat desa. Keberadaan PPKBD secara merata ini juga menjadi salah satu indikator kesiapan daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana secara berkelanjutan.

t. Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah perbandingan jumlah alkon per mix kontarsepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon dengan perkiraan permintaan masyarakat yang dinyatakan persen. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.190

Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat Kontrasepsi

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah alkon per mix	34.279	34.279	2.198	2.412	16.401

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota					
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	34.279	34.279	20.840	22.360	15.543
3	**Cakupan (1/2)x100%)**	**100**	**100**	**10,55**	**10,79**	**1,05**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat Kontrasepsi di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama tahun 2020 - 2021. Baru pada tahun 2022 - 2024 terjadi penurunan yang signifikan dengan realisasi terendah pada tahun 2024 sebesar 1,05 persen.

Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala dalam rantai pasok, distribusi, atau manajemen logistik alat dan obat kontrasepsi, yang memerlukan perhatian dan intervensi segera untuk memastikan keberlanjutan program Keluarga Berencana di daerah.

u. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan adalah perbandingan jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dengan jumlah faskes dan jejaring yang dinyatakan dalam persen. Persentase faskes dan jejaringnya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.191

Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS (Unit)	14	14	14	14	14

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah Faskes dan jejaring (Unit)	14	14	14	14	14
3	**Persentase ((1/2)x100%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir. Dengan kata lain semua faskes dan jejaringnya selama lima tahun terakhir sudah bekerjasama dengan BPJS.

v. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa adalah perbandingan antara jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia dengan jumlah seluruh informasi data mikro keluarga yang dinyatakan dalam persen. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.192

Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia (Bulan)	12	12	12	12	12
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga (Bulan)	12	12	12	12	12
3	**Persentase ((1/2)x100%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir. Artinya, seluruh desa di Kabupaten Barru secara konsisten telah menyediakan data mikro keluarga yang diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program

pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana). Konsistensi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan perangkat desa dalam memperkuat sistem pendataan keluarga yang akurat dan berkelanjutan.

w. Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui fungsi keluarga merupakan perbandingan antara jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga dengan jumlah kelompok kegiatan yang dinyatakan dalam persen. Cakupan kelompok kegiatan melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.193

Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	255	255	255	92	992
2	Jumlah kelompok kegiatan	255	255	255	255	255
3	**Persentase ((1/2)x100%)**	**100**	**100**	**100**	**36,08**	**36,08**

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 dan 2024 capaian Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kabupaten Barru sebesar 36,08 persen.

Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam kesinambungan program pembinaan keluarga, khususnya dalam pelaksanaan delapan fungsi keluarga yang mencakup fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.

4. Perhubungan

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang umum adalah jumlah keseluruhan penumpang yang menggunakan angkutan umum yang keluar masuk pada suatu daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.194

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Jumlah penumpang angkutan desa (Jiwa)**	**826.600**	**592.908**	**189.900**	**60.000**	**151.680**
2	Jumlah penumpang Kapal laut (Jiwa)	22.78	22.993	23.362	30.816	5.576
3	Jumlah Arus Penumpang Kapal Penyebrangan	29.298	3.802	52.342	55.024	45.201
4	Jumlah Arus Penumpang Kereta Api	-	-	-	80.470	203.595
5	**Total Jumlah Penumpang (Jiwa)**	**853.764**	**641.295**	**264.704**	**226.310**	**256.548**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah penumpang (jiwa) bis maupun jumlah penumpang kapal laut berfluktuasi. Capaian tertinggi total jumlah Penumpang pada tahun 2020 sebesar 853.764, sedangkan capaian terendah pada tahun 2023 sebesar 226.310. Capaian total jumlah Penumpang pada tahun 2024 sebesar 256.548 jiwa. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pembatasan perjalanan, kondisi ekonomi, serta preferensi moda transportasi masyarakat.

b. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Jumlah Uji Kir Angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.195

Jumlah Uji Kir Angkutan umum Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

NO.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Uji Kir angkutan umum	20	0	0	0	0
2	Persentase Kepemilikan Kir angkutan umum	0,68	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025

Kegiatan Uji Kir tahun di Kabupaten Barru mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 tidak dilakukan kerena masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengujian tersebut, belum lagi persoalan sumberdaya manusia yang masih terbatas

c. Rasio Ijin Trayek

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Rasio ijin trayek adalah perbandingan antara jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.196

Rasio Ijin Trayek Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Izin Trayek perkotaan	-	-	-	-	-
2	Izin Trayek perdesaan	41	41	41	41	41
3	Jumlah Izin Trayek	41	41	41	41	41
4	Jumlah penduduk	187,392	189,877	191.895	194,543	195.385
5	**Rasio Izin Trayek**	**0,00022**	**0,00022**	**0,00022**	**0,00021**	**0,00021**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rasio ijin trayek dari tahun 2020 sampai 2024 cenderung menurun, hal ini di pengaruhi jumlah permintaan ijin yang berkurang dan jumlah penduduk yang terus bertambah. Kondisi ini mengindikasikan

ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan layanan transportasi umum yang legal. Selain itu, faktor lain yang turut memengaruhi adalah peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, keterbatasan armada angkutan umum, dan minimnya inovasi atau dukungan regulasi yang mendorong pelaku usaha untuk mengajukan izin trayek baru.

d. Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima kapal laut dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bis dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Jumlah pelabuhan laut/terminal bis di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.197

Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelabuhan laut	5	5	5	5	5
2	Jumlah terminal bis	4	3	3	3	3
3	**Jumlah**	**9**	**8**	**8**	**8**	**8**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pelabuhan laut/terminal bis cenderung stagnan, hanya saja khusus untuk terminal bis pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan oleh adanya pengalihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi. Hal ini berdampak pada pencatatan administrasi dan pengelolaan terminal yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kabupaten.

e. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat adalah perbandingan antara jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang yang terangkut yang dinyatakan dalam persen. Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.198

Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Angkutan darat	5250	31026	8.277	9.600	20.344
2	Jumlah penumpang angkutan darat	825.600	592.908	237.738	60.000	400.476
3	**Persentase (%)**	**0,64**	**5,23**	**3,48**	**16**	**5,08**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase layanan angkutan darat mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif, hal ini di sebabkan oleh menurunnya jumlah penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan kendaraan pribadi, disamping itu terjadinya penurunan jumlah angkutan darat karena kurangnya peremajaan kendaraan.

f. Pemasangan Rambu-rambu

Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan

Tabel 2.199

Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pemasangan rambu-rambu	156	-	-	-	-
2	Jumlah Rambu-Rambu yang seharusnya tersedia	3951	-	-	-	-
3	**Persentase (%)**	**3.95**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas, khusus tahun 2021 dan 2024 data tidak tersedia karena, kegiatan pemasangan rambu-rambu tidak dilaksanakan dengan pertimbangan adanya refocusing anggaran.

g. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah orang atau barang yang diangkut dengan moda transportasi angkutan umum. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.200

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum (Jiwa)	825.600	592.908	189.900	145.840	151.680
2	Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum (Ton)	8.784	32.610	96.360	72.920	758.400

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum cenderung menurun mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, hal ini di sebabkan oleh menurunnya jumlah orang/barang yang menggunakan sarana angkutan umum karena beralih menggunakan kendaraan pribadi, disamping itu terjadinya penurunan jumlah angkutan umum karena kurangnya peremajaan kendaraan.

h. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Per Tahun

Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/ terminal adalah jumlah orang atau barang yang diangkut dengan moda transportasi angkutan umum yang melalui dermaga dan terminal. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.201

Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Pertahun

Di Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Satuan	Dermaga	Terminal	Jumlah
1	2020	Orang	51.977	825,600	877.577
		Barang	2.123.201	8,784	2.131.985
2	2021	Orang	61,013	592,908	653.921
		Barang	11.483.159	32.610	11.515.769

No	Tahun	Satuan	Dermaga	Terminal	Jumlah
3	2022	Orang	75.704	189.900	265.604
		Barang	24.851.564	96.360	24.947.924
4	2023	Orang	85.840	145.840	231.680
		Barang	39.470.568	72.920	39.543.488
5	2024	Orang	45.201	151.680	196.881
		Barang	13.597.999	758.400	14.356.399

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas jumlah orang melalui dermaga cenderung menurun disebabkan pemilihan moda transportasi masyarakat dari kapal laut ke pesawat udara. Untuk jumlah orang yang melalui terminal menurun sangat signifikan hal ini disebabkan menurunnya jumlah penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan jumlah barang yang melalui dermaga dan terminal meningkat, hal ini terjadi karena fungsi dermaga sangat optimal dari sisi pengangkutan barang, disamping itu pemilihan pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Barru menjadi alternatif para pengguna jasa.

5. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif merupakan perbandingan jumlah koperasi aktif dengan jumlah semua koperasi yang ada dan dinyatakan dalam persen. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.202

Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koperasi aktif (Unit)	65	66	68	N/A	N/A
2	Jumlah koperasi (Unit)	104	105	107	N/A	N/A
3	**Persentase koperasi aktif (%)**	**62,50**	**62,86**	**63,55**	N/A	N/A

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase Koperasi Aktif mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami trend peningkatan tiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pembinaan dan pengawasan koperasi oleh instansi terkait, peningkatan partisipasi

anggota, serta membaiknya manajemen kelembagaan koperasi. Selain itu, dukungan regulasi dan fasilitasi dari pemerintah daerah dalam mendorong koperasi untuk terus beroperasi sesuai prinsip dan asas koperasi turut berperan dalam menjaga keberlangsungan dan produktivitas koperasi di daerah tersebut. Peningkatan ini juga menjadi indikator positif dalam penguatan sektor ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat melalui koperasi.

b. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif

Persentase UKM non BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah UKM non BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM yang dinyatakan dalam persen. Persentase UKM non BPR/LKM di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.203

Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	762	762	N/A	N/A	N/A
2	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	790	790	N/A	N/A	N/A
3	**Persentase (%)**	**96,46**	**96,46**	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase UKM non BPR/LKM Aktif mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berfluktuatif dimana capaian tertinggi pada tahun 2018 sebessar 100 persen, sedangkan capaian terendah pada tahun 2020 hanya sebesar 93,88 persen. Berdasarkan sumber data dari Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Barru untuk tahun 2022 sudah tidak melakukan pendataan karena bukan merupakan kewenangan dinas koperasi sesuai SOTK nomor 19 Tahun 2022.

c. Persentase BPR/LKM Aktif

Persentase BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh BPR/LKM yang dinyatakan dengan persen. Persentase jumlah BPR/LKM aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.204

Persentase BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah BPR/LKM aktif	20	20	20	20	N/A
2	Jumlah seluruh BPR/LKM	28	28	28	28	N/A
3	**Persentase (%)**	**71.43**	**71,43**	**71,43**	**71,43**	N/A

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2025

Data BPR/LKM di Kabupaten Barru adalah sebanyak 28 LKM yakni 20 unit merupakan Bumdes binaan Dinas PMDPPKBP3A sedangkan 8 merupakan binaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang sudah tidak aktif karena baik dari usaha maupun pengurus sudah tidak ada.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase BPR/LKM Aktif mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan trend yang sama setiap tahunnya.

d. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Persentase usaha mikro dan kecil merupakan perbandingan antara jumlah usaha mikro dan kecil dengan jumlah seluruh usaha mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Barru dan dinyatakan dalam persen. Persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.205

Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2032
1	Jumlah Usaha mikro	9.208	9.229	10.081	N/A	N/A
2	Jumlah Usaha Kecil	718	718	36	N/A	N/A
3	Usaha Menengah	72	72	5	N/A	N/A
4	Jumlah UKM	9.998	10.091	10.122	N/A	N/A
5	**Persentase (%)**	**99,27**	**99,35**	**99,36**	N/A	N/A

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2025

Jumlah usaha mikro dan kecil artinya jumlah seluruh usaha yang mempunyai omzet maksimal 300 juta. Jumlah usaha mikro dan kecil merupakan akumulasi dari jumlah pelaku industri, perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan. Berdasarkan tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan adalah 99,27% artinya

dari 20.656 unit usaha yang ada di Barru ada 20.505 unit merupakan usaha mikro dan kecil.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan trend yang sama setiap tahunnya,

6. Penanaman Modal

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investor adalah orang perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik yang melakukan suatu investasi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.206

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PMDN	118	46	47	209	71
2	PMA	-	2	2	4	5
	Total					

Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2025

Jumlah Persetujuan Investasi (usaha) tahun 2024 sebanyak 76 yang dikategorikan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan nilai investasi lebih dari 500 juta dan penambahan investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal Daerah tahun 2024.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuasi setiap tahunnya, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 213 investor. Capaian terndah pada tahun 2021 sebanyak 48 investor.

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik untuk jangka waktu tertentu. Jumlah nilai investasi PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui dinas terkait. Jumlah nilai

investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.207

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
1	2020	118	855.316.873.042
2	2021	48	401.993.726.034
3	2022	49	424.182.849.592
4	2023	213	635.321.350.909
5	2024	76	696.033.763.643

Sumber : DPMPTSPT Kab. Barru Tahun 2025

Terjadi Peningkatan nilai investasi sebesar dari nilai investasi tahun sebelumnya. Hal yang perlu menjadi perhatian utamanya dalam hal kepastian lahan kemudian dalam sektor investasi yang dapat ditawarkan kepada investor dengan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Percepatan RDTR untuk seluruh wilayah di Kabupaten Barru, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kemudahan/ kebijakan investasi lainnya yang dapat ditawarkan oleh Pemda Kabupaten Barru.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif setiap tahunnya, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 855.316.873.042 Rupiah dan rendah pada tahun 2021 sebesar 401.993.726.034 Rupiah.

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan dengan jumlah seluruh PMDN/PMA. Rasio daya serap tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.208

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio daya serap tenaga kerja	237	32	33	32	33

Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Barru pada tahun 2024 sebesar 33 Point. Angka ini menunjukkan proporsi tenaga kerja yang berhasil terserap di berbagai sektor ekonomi dari total angkatan kerja yang tersedia. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2020–2022), data ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, yang dapat dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan ekonomi, investasi, sektor industri, serta kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah. Rasio ini menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas pembangunan ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dihitung dengan membandingkan realisasi PMDN tahun evaluasi dikurang realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi dengan realisasi PMDN sebelum evaluasi. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.209

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Realisasi PMDN Tahun Evaluasi	Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)
1	2020	855.316.873.042	730.659.151.736	17,06
2	2021	400.889.608.880	360.728.443.384	11,13
3	2022	375.412.751.766	400.899.608.880	-6,36
4	2023	629.278.511.398	375.412.751.766	67,62
5	2024	662.982.182.201	629. 278.511.398	5,36

Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif setiap tahunnya, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 67,62 Miliar Rupiah dan rendah pada tahun 2022 sebesar -6,36 Miliar Rupiah. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi nasional, regulasi investasi, kesiapan infrastruktur, serta iklim usaha di daerah.

7. Kepemudaan dan Olah Raga

a. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Persentase organisasi pemuda yang aktif adalah perbandingan antara jumlah organisasi pemuda yang aktif dengan jumlah seluruh organisasi pemuda yang dinyatakan dalam persen. Persentase organisasi pemuda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.210

Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Barru	64	79	124	124	11
2	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Tanete Rilau	44	53	123	123	0
3	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Tanete Riaja	38	45	116	116	0
4	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Pujananting	35	47	63	63	0
5	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Balusu	40	59	79	79	0
6	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Soppeng Riaja	39	48	91	91	0
7	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Mallusetasi	38	53	100	100	0
8	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	298	384	696	696	0
9	Jumlah seluruh organisasi pemuda	298	384	696	696	100
10	**Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mempunyai caoaian yang sama setiap tahunnya yaitu sebsar 100 persen. Hal ini mencerminkan keberlangsungan dan keberfungsian organisasi kepemudaan di daerah tersebut, serta adanya dukungan yang cukup dalam hal pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi terhadap aktivitas pemuda oleh pemerintah daerah.

b. Persentase Wirausaha Muda

Wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya untuk melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi atau orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Persentase wirausaha muda adalah perbandingan antara jumlah wirausaha muda di bagi dengan jumlah seluruh wirausaha yang dinyatakan dalam persen. Persentase wirausaha muda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.211

Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah wirausaha muda	139	173	318	357	400
2	Jumlah seluruh wirausaha	150	197	10.127	10.127	10.127
3	**Persen ((1/2)x100%)**	**92,66**	**87,82**	**3,14**	**3,53**	**3,95**

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase wirausaha muda kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mempunyai capaian berfluktuatif setiap tahunnya dimana capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 92,66 persen sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 3,14 persen. Sedangkan capaian pada tahun 2024 sebesar 3,95 persen.

Fluktuasi ini dapat mencerminkan berbagai dinamika, seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, minat dan partisipasi pemuda dalam kewirausahaan, serta efektivitas program pemberdayaan wirausaha muda di tingkat daerah.

c. Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan olahraga merupakan perbandingan jumlah cabang olahraga yang dibina dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.212

Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina (Cabang)	27	27	26	26	31
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar (Cabang)	29	29	28	28	31
3	**Persentase ((1/2)x100%) (%)**	**93,1**	**93,1**	**92,86**	**92,86**	**100**

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Cakupan pembinaan olahraga kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mempunyai capaian berfluktuatif setiap tahunnya dimana capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 100 persen sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 92,86 persen. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti alokasi anggaran, jumlah program pembinaan yang dilaksanakan, partisipasi masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana olahraga di daerah.

d. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi

Cakupan pelatih yang bersertifikasi adalah perbandingan antara jumlah pelatih bersertifikat dengan jumlah seluruh pelatih yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pelatih yang bersertifikat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.213

Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelatih bersertifikat	57	18	42	41	41
2	Jumlah seluruh pelatih	75	18	42	59	59

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	**Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)**	**76,00**	**100**	**100**	**69,49**	**69,49**

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Cakupan pelatih yang bersertifikat kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mempunyai capaian berfluktuatif setiap tahunnya dimana capaian tertinggi pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 100 persen sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2023 dan 2023 sebesar 69,49 persen. Fluktuasi capaian ini menjadi catatan penting bagi pemangku kebijakan untuk memastikan kesinambungan program pelatihan dan sertifikasi pelatih secara berkala, guna menjamin kualitas pembinaan olahraga di Kabupaten Barru tetap terjaga dan kompetitif.

e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan pembinaan atlet muda adalah perbandingan antara jumlah pembinaan atlet muda dengan jumlah seluruh pembinaan atlet muda yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pembinaan altlet muda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.214

Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah atlit pelajar yang dibina	430	-	71	97	38
2	Jumlah seluruh atlit pelajar	606	-	104	135	411
3	**Persen ((1/2)x100%)**	**70,90**	**-**	**68,27**	**71,85**	**9,25**

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Cakupan pembinaan Atlet Muda kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan setiap tahunnya dimana capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 71,85 persen sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 9,25 persen.

Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya anggaran pembinaan, kurangnya regenerasi atlet muda, minimnya kompetisi atau ajang pencarian bakat di tingkat

daerah, serta menurunnya minat generasi muda terhadap olahraga sebagai pilihan kegiatan utama. Selain itu, pandemi dan dampaknya pada sektor pendidikan dan olahraga juga dapat berkontribusi terhadap berkurangnya intensitas pembinaan selama beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini menandakan perlunya evaluasi dan perencanaan strategis yang lebih intensif oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait, agar pembinaan atlet muda dapat kembali ditingkatkan secara berkelanjutan dan merata.

f. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.215

Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun (atlet)	0	0	0	1	1

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah atlet berprestasi kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 belum terdapat atlet yang berprestasi. Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat 1 atlet berprestasi.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembinaan atlet di Kabupaten Barru masih memerlukan penguatan, baik dari segi pelatihan, dukungan sarana-prasarana olahraga, pendanaan, maupun sistem pencarian dan pengembangan bakat atlet sejak usia dini. Meningkatkan jumlah atlet berprestasi membutuhkan komitmen lintas sektor serta sinergi antara pemerintah, sekolah, dan organisasi olahraga.

g. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi cabang olahraga adalah jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Jumlah prestasi cabang olahraga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.216

Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun (cabang olahraga)	0	0	0	1	1

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah berprestasi olahraga kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 belum ada prestasi cabang olehraga yang di menengkan di tingkat nasional dan internasional. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 terdapat 1 prestasi cabang olahraga yang di menengkan di tingkat nasional dan internasional.

Hal ini mencerminkan perlunya penguatan sistem pembinaan olahraga, peningkatan kapasitas pelatih dan atlet, serta dukungan fasilitas yang memadai agar prestasi olahraga daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dukungan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor juga penting untuk mendorong kemajuan prestasi olahraga di Kabupaten Barru.

8. Statistik

a. Buku "Kabupaten Barru Dalam Angka" dan Buku "PDRB Kabupaten Barru"

Buku Kabupaten Dalam Angka sebagai sarana untuk menyediakan data statistik yang dapat menggambarkan indikator capaian pembangunan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah maupun swasta dan selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan. Sedangkan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah buku yang memuat jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Ketersediaan Buku Kabupaten Barru Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.217

Buku ”Kabupaten Barru Dalam Angka” dan

Buku ”PDRB Kabupaten Barru” Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Buku Kabupaten dalam angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Buku ”Kabupaten Barru Dalam Angka” dan Buku ”PDRB Kabupaten Barru” mulai pada tahun 2020sampai dengan tahun 2024 tetap tersedia. Ketersediaan rutin kedua publikasi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam menyediakan data dan informasi statistik yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

9. Persandian

a. Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah merupakan perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi dengan jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Barru dan dinyatakan dalam persen. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.218

Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi

Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat daerah (OPD)	1	1	1	1	1
2	Jumlah total perangkat daerah (OPD)	37	37	37	37	37

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	**Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (%)**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dipertahankan dengan capaian 2,7 persen selama lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sistem pengamanan informasi melalui penggunaan sandi belum mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, yang dapat menjadi perhatian dalam upaya penguatan keamanan informasi dan komunikasi antar instansi pemerintah daerah.

10. Kebudayaan

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Secara umum, seni budaya merupakan segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup yang berkembang pada suatu kelompok yang memiliki unsur keindahan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan biasanya ditampilkan pada kegiatan festival. Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.219

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival budaya (Kali)	5	5	8	9	6

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2023 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru kondisinya mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi di tahun 2022 sebanyak 15 kali dan capaian terendah pada tahun 2020 sebanyak 3 kali. Sedangkan pada tahun 2024 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru mengalami penurun sebanyak 6 kali. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya kendala anggaran,

perubahan prioritas program daerah, atau faktor eksternal lainnya yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan budaya.

b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan persentasenya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.220

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15	15	15	15	15
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	15	15	28	28	27
3	**Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya dilestarikan (%)**	**100**	**100**	**53,57**	**53,57**	**55,56**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, apabila dicermati dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Barru kondisinya mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi di tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020 sampai tahun 2021 sebesar 100 peren dan capaian terendah pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 53,57 peren.

c. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Revitalisasi dan inventarisasi karya budaya merupakan kewajiban dalam hal pelestarian budaya, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga, memelihara, membangkitkan serta memperkenalkan kekayaan budaya yang ada di suatu wilayah. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di

Kabupaten Barru yang dituangkan dalam bentuk dokumen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.221

Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Dokumen)	3	3	3	4	4

Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, apabila dicermati dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Barru selama tiga tahun terakhir masih bertahan sebanyak 3 Dokumen dan capaian pada tahun 2023 dan 2024 sebanyak 4 dokumen.

d. Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu

Pengelolaan cagar budaya Kabupaten Barru merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dari tahun ke tahun, hal ini sebagai bentuk pemeliharan dan pelestarian cagar budaya yang ada. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.222

Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu

Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Jenis)	28	15	15	15	15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu di Kabupaten Barru pada tahun 2020 sebanyak 28 jenis. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 15 jenis dan bertahan sampai tahun 2024 tetap bertahan dengan capaian sebanyak 15 jenis. alah satunya adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pelestarian budaya, sehingga tidak semua karya budaya dapat dijangkau setiap tahunnya. Selain itu, kurangnya sumber daya

manusia yang kompeten di bidang pelestarian budaya turut memperlambat proses inventarisasi dan revitalisasi.

11. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.223

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	121.286	123.347	127.693	133.453	170.969
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	0	0	0	0	0
3	**Total pengunjung Perpustakaan (1+2)**	**121.286**	**123.347**	**127.693**	**133.453**	**170.969**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Barru kondisinya cenderung berfluktuatif dengan capaian tertinggi di tahun 2024 sebanyak 170.969 orang dan terendah pada tahun 2020 sebanyak 121.286 orang.

Fluktuasi jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Barru dari tahun 2020 hingga 2024 dipengaruhi oleh beberapa

faktor, seperti dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat pada awal periode, serta variasi dalam minat baca dan aksesibilitas layanan perpustakaan. Selain itu, peningkatan jumlah pengunjung pada tahun-tahun terakhir juga didorong oleh upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan fasilitas, promosi literasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan perpustakaan.

b. Koleksi Buku dan Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku dan judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah jumlah buku dan judul buku yang ada di perpustakaan. Jumlah koleksi buku dan judul buku yang tersediadi perpustakaan daerah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.224

Koleksi Buku dan Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	58.685	59.137	59.837	59.909	59.318
2	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia diperpustakaan daerah	11.676	11.922	12.272	12.337	12.103

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 59.909 koleksi buku dan capaian terendah pada tahun 2020 sebanyak 58.685 koleksi buku, sedangkan untuk jumlah koleksi judul buku yang tersedia diperpustakaan daerah juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dimana capaian tertinggi terjadi di tahun 2023 sebanyak 12.337 judul buku dan terendah di tahun 2020 hanya 11.11.676 judul buku. Hal ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperkaya ragam bahan bacaan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat.

c. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi diwilayah pemerintah daerah dimana rasio perpustakaan persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah perpustakaan per 1.000 penduduk. Rasio perpustakaan persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.225

Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perpustakaan	56	56	56	56	56
2	Jumlah Penduduk	187,392	189,877	191.895	194.543	196.001
3	**Rasio (1/2*1000)**	**0,30**	**0,29**	**0,29**	**0,29**	**0,29**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk kabupaten barru mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan, dan pada tahun 2021 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Barru mengalami penurunan sebesar 0,29 dan bertahan sampai tahun 2024 tetap bertahan dengan capaian sebesar 0,29.

Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penambahan jumlah perpustakaan dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga rasio ketersediaan perpustakaan per penduduk mengalami stagnasi.

d. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/ Tahun

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.226

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rata-rata pengunjung	493	631	855	630	950

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	perpustakaan/tahun					

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah rata- rata pengunjung perpustakaan/tahun kabupaten barru pada tahun tahun 2024 sebanyak 950 orang. Angka ini mencerminkan tingkat kunjungan yang relatif rendah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor seperti minat baca masyarakat, aksesibilitas perpustakaan, serta ketersediaan dan variasi koleksi buku.

e. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki Sertifikat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.227

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	3	5	10	9	9
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	3	5	10	9	9
3	**Persentase (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Barru pada tahun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan dimana capaian tertinggi pada tahun 2022 sebanyak 10 orang dan capaian terendah terjadi pada tahun 202020 sampai dengan 2021 sebanyak 3 orang.

Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga perpustakaan melalui pelatihan dan sertifikasi. Sertifikasi menjadi indikator penting dalam menjamin kompetensi tenaga pustakawan, tenaga teknis, dan penilai, yang pada akhirnya

berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kepada masyarakat.

12. Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dengan jumlah seluruh perangkat daerah. Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.228

Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	29	29	18	19	25
2	Jumlah Perangkat Daerah	36	36	33	33	34
3	**Persentase (%)**	**80,50**	**80,50**	**55,00**	**57**	**73**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di kabupaten Barru cenderung berfluktuatif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dimana capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 81,08 persen dan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebessar 55 persen.

Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kearsipan, belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan arsip, serta perbedaan tingkat pemahaman dan komitmen antar perangkat daerah. Meskipun demikian, upaya perbaikan dan pembinaan diharapkan terus dilakukan untuk meningkatkan konsistensi pengelolaan arsip yang sesuai standar baku guna mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah.

b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.229

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	0	4	0	3	4

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 peningkatan SDM pengelolaan Kearsipan di kabupaten Barru cenderung berfluktuatif dimana pada tahun 2020 dan 2022 tidak ada kegiatan peningkatan SDM pengelolaan Kearsipan. Capaian tertinggi pada tahun 2021 terdapat 4 kegiatan dan capaian terendah terdapat pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 3 kegiatan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip melalui pelatihan atau bimbingan teknis, pelaksanaannya belum dilakukan secara konsisten setiap tahun. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat serta alokasi sumber daya yang memadai agar peningkatan kapasitas SDM kearsipan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan merata di seluruh perangkat daerah.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

a. Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata dihitung dengan membandingkan antara Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten dengan jumlah seluruh kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten yang dinyatakan dalam persen. Kujungan wisata di Kabupaten Barru dapat dlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.230

Kunjungan Wisata Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah capaian kinerja	61,52	87,13	233,97	234,71	97,57

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	kunjungan wisata se-kabupaten					
2	Lama kunjungan wisata	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
3	Jumlah seluruh kunjungan wisata se-kabupaten	61.519	57.133	88.441	95.330	98.594
4	Jumlah seluruh kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten	33.000	35.000	37.800	40.616	101.050
5	**Persentase (%)**	**186.42**	**248,95**	**154,80**	**107,79**	**103,42**

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2022 persentase kunjungan wisata di kabupaten Barru cenderung berfluktuatif dimana capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 248,95 persen dan capaian terendah terdapat pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 103,42 persen. Fluktuasi ini menunjukkan pentingnya upaya peningkatan kualitas layanan wisata, strategi pemasaran yang berkelanjutan, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata guna menjaga dan meningkatkan tren kunjungan wisata ke depan.

b. PAD Sektor Pariwisata

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata merupakan perbandingan antara PAD sektor pariwisata dengan total PAD yang dinyatakan dalam persen. Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.231

PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	PAD sektor pariwisata	Total PAD	Persen
1	2020	64.119.000	107.388.426.060	0.06
2	2021	988.335.966	92.407.370.305	0.07
3	2022	1.240.615.399	95.606.566.726	0,30
4	2023	1.889.291.399	95.606.566.727	1,98
5	2024	3.741.400.768	111.783.921.346	3,35

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Barru pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, dengan

capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 3,35 persen dan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 0,06 persen.

Tren peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata daerah, baik dari sisi promosi, penataan destinasi, maupun perbaikan fasilitas penunjang pariwisata. Selain itu, peningkatan ini juga menunjukkan kontribusi sektor pariwisata yang semakin signifikan terhadap pendapatan daerah, yang dapat menjadi dasar penguatan perencanaan dan kebijakan pembangunan sektor pariwisata ke depan.

3. Pertanian

a. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal merupakan perbandingan antara produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya dengan luas areal tanaman padi/bahan pangan utama local yang dinyatakan dalam persen. Produktivitas padi atau bahan pangan local dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.232

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton)	132.097,08	135.698,00	141.676,46	143.114,91	147.411,87
2	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal (Ha)	23.385	23.995	24.768	24.963	28.516
3	**Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ku/Ha)**	**56,49**	**56,55**	**57,20**	**57,33**	**51,7**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahana Pangan Kab. Barru 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan, meskipun kenaikan pertahunnya tidak signifikan. Pada tahun 2024 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya mengalami penurunan sebesar 51,7 persen.

Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya penguatan sektor pertanian, baik melalui pemanfaatan teknologi pertanian,

perbaikan irigasi, maupun pendampingan kepada petani. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup tajam sebesar 51,7 persen. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi cuaca ekstrem, serangan hama dan penyakit tanaman, keterbatasan sarana produksi pertanian, serta perubahan alih fungsi lahan. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam menjaga ketahanan pangan daerah, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan serta penguatan dukungan teknis dan kelembagaan di sektor pertanian.

b. Cakupan Bina Kelompok Petani

Cakupan bina kelompok petani merupakan perbandingan antara jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda dengan jumlah kelompok tani yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.233

Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda	87	105	88	314	407
2	Jumlah kelompok tani	729	756	783	809	890
3	**Persentase (%)**	**23,88**	**13,89**	**11,24**	**38,81**	**45,73**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahana Pangan Kab. Barru 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 persentase Cakupan Bina kelompok petani di Kabupaten Barru cenderung berfluktuatif dimana capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 45,73 persen dan capaian terendah terdapat pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 11,24 persen.

Fluktuasi ini mengindikasikan adanya dinamika dalam pelaksanaan program pembinaan kelompok tani, yang dapat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, jumlah tenaga penyuluh, partisipasi aktif petani, serta kondisi eksternal seperti cuaca dan bencana alam. Meningkatnya cakupan pada tahun 2024 menunjukkan adanya upaya intensifikasi program pembinaan yang lebih baik, baik melalui peningkatan kualitas pendampingan,

pelatihan, maupun fasilitasi kelompok tani dalam mengakses sarana dan prasarana produksi.

4. Perdagangan

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor. Ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.234

Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Nilai ekspor	Nilai Impor	Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan
1	2020	97.264.928	0	97.264.928
2	2021	-	-	-
3	2022	-	-	-
4	2023	116.834.755.620	-	116.834.755.620
5	2024			

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Barru cenderung menurun, sementara untuk data tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 tidak tersedia data di dinas terkait namun untuk tahun 2023 kembali disajikan.

Penurunan tren ekspor bersih ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti menurunnya permintaan pasar luar negeri, gangguan rantai pasok, atau menurunnya volume produksi barang ekspor unggulan. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong penguatan sektor produksi dan fasilitasi akses pasar guna meningkatkan nilai ekspor ke depan.

b. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahunn dengan jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.235

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	12	-	-	-	-
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	39	-	-	-	-
3	**Cakupan (%)**	**30,77**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 terjadi kenaikan Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Barru ditandai dengan meningkatnya jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda, sementara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2020, tidak terjadi peningkatan jumlah kelompok. Untuk tahun 2021 dan 2022, tidak tersedia data di dinas terkait. Untuk target RPJMD Pada tahun 2022 sebesar 28,82 persen.

5. Perindustrian

a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda dengan jumlah kelompok pengrajin yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok pengrajin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.236

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	14	-	-	-	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terjadi penurunan Cakupan Bina Kelompok Pengrajin setelah sebelumnya pada periode 2018-2020 cakupan tersebut dapat

dipertahankan. Untuk tahun 2021 dan 2022, tidak tersedia data di dinas terkait.

6. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah banyaknya produksi perikanan yang diperoleh dalam rentan waktu tertentu. Produksi perikanan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.237

Produksi Perikanan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah produksi ikan (ton)	25.773,9	26.167,72	26.421,3	26.616,1	26.939.05
2	Target Daerah (ton)	27.324,19	27.906,01	26.615,74	27.047,56	27.486.13
3	**Persentase (%)**	**94,32**	**93,77**	**99,19**	**98,40**	**98,01**

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 produksi Perikanan di Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 26.939,05 Ton dan capaian terendah terdapat pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 25.773,9 Ton.

Penurunan persentase produksi perikanan disebabkan oleh beberapa factor utama, antara lain adanya penangkapan ikan berlebihan (overfishing), perubahan iklim, penggunaan alat tangkap yang masoh tradisional, dan mahalnya biaya operasional.

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah konsumsi ikan dengan target daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase konsumsi ikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.238

Konsumsi Ikan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Jumlah Konsumsi ikan	Target Daerah	Persentase
		Kg	Kg	
1	2020	8.014.464	8.014.496	99,99

No	Tahun	Jumlah Konsumsi ikan	Target Daerah	Persentase
		Kg	Kg	
2	2021	8.020.407	8.080.130	99,26
3	2022	8.558.380	8.556.739	100,01
4	2023	8.893.360	8.875.132	100,20
5	2024	9.008.972	8.991.888	100,18

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2025

Apabila dicermati dari tahun 2020 – 2024 persentase konsumsi ikan di Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,dimana capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 100,21 persen dan capaian terendah terdapat pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 99,26. Pada tahun 2024 persentase konsumsi ikan di Kabupaten Barru sebesar 100,18 persen.

Konsumsi ikan meningkat karena beberapa factor, diantaranya tingginya gizi ikan, khususnya protein dan asam lemak omega-3, mendorong orang untuk mengonsumsinya sebagai sumber nutrisi penting. Selain itu, ikan juga relatif lebih terjangkau dibandingkan sumber protein hewani lainnya. Program makan ikan yang dicanangkan Pemkab Barru untuk mencegah stunting juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan konsumsi ikan di masyarakat.

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dengan target kelompok nelayan yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.239

Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan	69	69	51	20	20
2	Target Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan	18	18	18	18	18
3	**Persentase (%)**	**383**	**383**	**283**	**111**	**111**

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Barru pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 - 2021 sebesar 383 persen dan capaian terendah pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 111 persen.

Penurunan Bina Kelompok nelayan dikabupaten Barru seiring dengan keterbatasan anggaran, selain itu factor kewenangan yang membuat Pemerintah Kabupaten berhati-hati dalam pengelolaan dan Pembinaan nelayan.

d. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan perbandingan jumlah produksi ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan dengan jumlah produksi ikan di daerah yang dinyatakan dalam persen. Produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.240

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	Jumlah Produksi ikan di daerah	Prosentase
1	2020	12.554,69	25.773,90	48,71
2	2021	12.703,36	26.167,72	48,54
3	2022	14.640,82	26.421,3	55,41
4	2023	15.879,68	26.616,1	59,66
5	2024	9.335.55	26.939.05	34,65

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Produksi Perikanan Kelompok Nelayan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 cenderung meningkat, penurunan hanya terjadi pada periode tahun 2024 sebesar 34,65 persen, hal ini disebabkan oleh krisis iklim, ekspansi industri ekstraktif, dan perubahan musim yang menyebabkan penurunan pendapatan nelayan. Selain itu, faktor seperti keterbatasan akses teknologi, persaingan dengan industri perikanan besar, dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan juga berperan.

2.1.3.4 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD, RPJMD, RKPD dan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan rentan waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan rentan waktu 5 tahun, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rentan waktu 30 tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan ditetapkan dengan PERKADA. Ketersediaan dokumen perencanaan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.241

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	RPJPD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	RPJMD	ADA				
3	RKPD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
4	RTRW	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas, mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Barru konsisten dalam penyediaan dokumen perencanaan baik dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan RTRW.

Tabel 2.242

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Kabupaten Barru Tahun 2020 -2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan (Program)	276	104	221	221	221
2	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan (Program)	276	104	221	221	221
3	**Persentase (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 capainnya 100 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh program prioritas yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) telah terakomodasi secara optimal dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah secara terstruktur dan terarah, serta memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan tetap sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

b. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD merupakan perbandingan antara jumlah program yang ada di APBD dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan dan dinyatakan dalam persen. Angka 100% menunjukkan dokumen RKPD telah konsisten dan angka dibawah 100% menunjukkan terjadi inkonsistensi antar dokumen APBD dengan RKPD. Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.243

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan (Program)	276	104	221	221	221
2	Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan (Program)	276	104	221	221	221
3	**Persentase (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 capainnya 100

persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan penganggaran yang sinergis, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Keuangan

a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK terhadap laporan keuangan merupakan penilaian ketaatan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.244

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barru

Tahun 2020 -2024

No	Tahun	Opini BPK
1	2020	WTP
2	2020	WTP
	2021	
4	2022	WTP
5	2024	WTP

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025

Pada tabel diatas, mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Barru konsisten dengan predikat WTP dalam mempertahankan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan setiap tahunnya.

Konsistensi ini mencerminkan komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan regulasi yang berlaku. Capaian ini juga menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

b. Persentase SILPA

Silpa adalah sisa lebih perhitungan anggaran sebagai selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Sedangkan persentase SILPA merupakan perbandingan antara total

SILPA dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase SILPA di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.245

Persentase SILPA Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No.	Tahun	Total SILPA	Total APBD	Persentase (%)
1	2020	83.734.357.547,35	920.669.003.812,00	9,09
2	2021	118.879.623.079,89	940.680.195.326,00	12,63
3	2022	118.943.534.504,89	902.412.131.655,00	13,18
4	2023	92.840.837.151	1.007.608.922.840	9,21
5	2024	111.087.252.917,80	1.029.655.210.843	10,79

Sumber :BBKADKab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 -2024, persentase SILPA Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebsar 13,318 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 9,09 persen. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam pengelolaan anggaran daerah, yang dapat dipengaruhi oleh efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program, efisiensi belanja, serta realisasi pendapatan daerah setiap tahunnya.

c. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase belanja pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan pendidikan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase belanja pendidikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.246

Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No.	Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Total APBD	Persentase (%)
1	2020	232.729.629.587,00	920.669.003.812,00	22,92
2	2021	297.079.401.936	940.680.195.326,00	31,58
3	2022	284.755.591.738	902.412.131.655,00	31,55
4	2023	320.936.846.904	1.007.608.922.840	31,85
5	2024	308.623.499.999	1.029.655.210.843	29,97

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 -2024, persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebsar 31,85 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 22,92 persen. Meskipun demikian, alokasi anggaran tersebut secara umum telah melampaui amanat minimal 20% sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sektor pendidikan.

d. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase belanja kesehatan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan kesehatan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase belanja kesehatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.247

Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No.	Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Total APBD	Persentase
1	2020	189.542.241.675	920.669.003.812,00	18,66
2	2021	200.340.333.581	940.680.195.326,00	21,29
3	2022	163.577.216.781	902.412.131.655,00	18,13
4	2023	222.023.338.7541	1.007.608.922.840	22.03
5	2024	140.864.443.486	1.029.655.210.843	13,68

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2024, persentase Belanja kesehatan (10%) Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebsar 22,03 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 13,68 persen.

Fluktuasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan prioritas kebijakan daerah, dampak pandemi COVID-19 pada awal periode yang mendorong peningkatan belanja kesehatan, serta adanya program atau proyek kesehatan berskala besar di tahun-tahun tertentu. Selain itu, peningkatan total APBD yang tidak diiringi dengan kenaikan proporsional pada

belanja kesehatan turut menyebabkan penurunan persentase, terutama pada tahun 2024. Penurunan tajam ini juga bisa disebabkan oleh realokasi anggaran ke sektor lain serta rendahnya serapan anggaran pada sektor kesehatan.

e. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung merupakan perbandingan antara jumlah belanja langsung dan jumlah belanja tidak langsung terhadapt total APBD yang dinyatakan dalam persen. Perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.248

Perbandingan Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Jumlah Belanja Langsung		Total APBD	Persentase Belanja Langsung (%)	Persentase Belanja tidak Langsung (%)
1	2020	413.690.046.654,10	586.660.283.440,98	920.669.003.812,00	44,93	63,72
2	2021	716.429.332.596,00	60.840.341.589,00	940.680.195.326,00	76,16	6,47
3	2022	710.668.831.700	200.250.069.935	902.412.131.655,00	79,00	22,00
		Jumlah Belanja Operasi	**Jumlah Belanja Modal**		**Persentase Belanja Operasi (%)**	**Persentase Belanja Modal (%)**
4	2023	730.275.965.899	181.612.170.854	1.007.608.922.840	72,47	18,02
5	2024	861.128.602.764	168.526.608.078	1.029.655.210.843	83,63	16,37

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 -2024, perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian belanja langsung tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 83,63 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 44,93 persen. Sedangkan persentase belanja tidak langsung capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 63,72 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 6,47 persen.

Perubahan ini mencerminkan pergeseran fokus penganggaran daerah dari belanja tidak langsung, seperti gaji dan tunjangan, ke belanja langsung yang mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan secara nyata. Peningkatan belanja langsung dapat mengindikasikan penguatan peran pembangunan fisik dan layanan publik, sedangkan penurunan belanja tidak langsung menunjukkan efisiensi atau penyesuaian struktur belanja pegawai dan hibah.

f. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Bagi hasil kabupaten/kota dan desa merupakan perbandingan antara jumlah belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa yang dinyatakan dalam persen. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.249

Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No.	Tahun	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa	Total APBD	Persentase (%)
1		108.940.698.605	920.669.003.812,00	11,83
2		107.273.106.000	940.680.195.326,00	11,40
3		95.523.960.500	902.412.131.655,00	10,58
	2023			
5		96.044.198.660	1.029.655.210.843	9,33

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 -2024, persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 11,83 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 9,22 persen.

Meskipun nilai nominal belanja bagi hasil relatif stabil, penurunan persentase ini menunjukkan bahwa alokasi belanja bagi hasil tidak meningkat sebanding dengan pertumbuhan total APBD. Hal ini dapat disebabkan oleh prioritas anggaran yang lebih difokuskan pada belanja sektor lain seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan. Selain itu, fluktuasi juga bisa dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, perubahan regulasi dana transfer, dan kebutuhan fiskal desa atau kabupaten pada tahun tertentu.

g. Penetapan APBD

APBD ditetapkan dengan perkada yang sebelumnya telah dibahas dengan badan legislatif (DPRD). Penetapan APBD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.250

Penetapan APBD Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No.	Tahun	Penetapan APBD
1	2020	17 Desember 2019
2	2021	30 Desember 2020
3		29 Desember 2021
4		28 Desember 2022
5		28 Desember 2023

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan data penetapan APBD Kabupaten Barru tahun 2020–2024, diketahui bahwa seluruh penetapan APBD dilakukan pada akhir bulan Desember setiap tahunnya, yaitu antara tanggal 17 hingga 30 Desember. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan APBD tidak dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni paling lambat 30 November tahun anggaran sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Keterlambatan ini dapat berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan di awal tahun anggaran serta menghambat efektivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Salah satu kebijakan pemerintah dalam UU ASN nomor 5 Tahun 2014, Setiap ASN berhak mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan minimal 20 jam per tahun. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dihitung beradsarkan perbandingan antara jumlah jam pelajaran yang telah diikuti PNS dengan jumlah PNS. Rata-rata lama pegawai mendaptkan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.251

Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah JPL yang telah diikuti PNS Kab. Barru (JPL)	64.816	100.386	101.863	13.123	174.397
2	Jumlah PNS (Orang)	3.919	3.909	3.745	3519	3947
3	**Rata - Rata lama Diklat (JPL)**	**16,54**	**25,68**	**27,20**	**3,73**	**44,18**

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari tahun ketahun cenderung meningkat, penurunan terjadi pada tahun 2023 sebesar 3,73 JPL. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 44,18 JPL.

Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan anggaran, fokus kegiatan pada prioritas lain, atau penyesuaian pasca-pandemi. Secara umum, peningkatan JPL mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN, terutama pada tahun 2024 yang mengalami lonjakan pelatihan secara signifikan.

b. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal adalah perbandingan antara ASN yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah seluruh ASN yang dinyatakan dalam persen. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.252

Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Diklat Teknis (Orang)	417	282	888	1.438	1394
2	Jumlah PNS (Orang)	3.919	3.909	3.745	3.519	3947
3	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)**	**10,64**	**7,21**	**23,71**	**40,86**	**35,32**

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dari tahun ketahun berfluktuatif, penurunan terjadi pada tahun 2021. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 40,86 persen, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 7,21 peren. Penurunan persentase kemungkinan disebabkan oleh pembatasan kegiatan pelatihan akibat pandemi COVID-19 atau keterbatasan anggaran. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023, yakni sebesar 40,86%, yang menunjukkan adanya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan kompetensi ASN, baik melalui pelatihan teknis maupun program peningkatan kapasitas. Meskipun pada tahun 2024 persentase sedikit menurun menjadi 35,32%, angka ini tetap tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa pelatihan formal bagi ASN masih menjadi prioritas dalam pengelolaan sumber daya aparatur di Kabupaten Barru.

c. Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural adalah perbandingan antara jumlah ASN yang telah mengikuti diklat struktural dengan jumlah total jabatan yang dinyatakan dalam persen. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.253

Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural (ASN)	383	202	161	144	134
2	Jumlah Total Jabatan (Jabatan)	664	371	381	396	412
3	**Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (%)**	**57,68**	**54,45**	**42,26**	**36,36**	**32,52**

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural dari tahun ketahun mengalami penurunan. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 57,68 persen, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 32,52 peren.

Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya kuota atau anggaran pelatihan struktural, pergeseran kebijakan pengembangan SDM, atau rotasi jabatan yang lebih cepat dibandingkan dengan pelaksanaan diklat. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam upaya peningkatan kompetensi manajerial pejabat struktural, agar pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial di lingkungan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih optimal dan profesional.

d. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabaatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sedangkan jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.254

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu
Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah (Orang)	28	28	32	30	24
2	Jumlah jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah (Orang)	1.341	1.022	976	920	895

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah (Orang)	2.546	2.857	2.733	2.555	3.011

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 32 orang dan terendah pada tahun 2024 sebanyak 24 orang. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah dari tahun ke tahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 1.341 orang dan capaian terendah pada tahun 2024 sebanyak 895 orang. Sedangkan untuk Jumlah jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah dari tahun ke tahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 3.011 orang dan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebanyak 2.546 orang.

Perubahan ini mencerminkan adanya pergeseran struktur organisasi ke arah birokrasi yang lebih ramping dan berbasis keahlian, sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi yang mendorong transformasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah.

4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu penunjang urusan pemerintahan yang berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu daerah dimana hasil penelitian dan pengembangan yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul disuatu wilayah.

a. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan dalam RKPD dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD yang dinyatakan dalam persen. Persentase implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.255

Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelitbangan dalam RKPD (kegiatan)	8	14	8	**2**	2
2.	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD (kegiatan)	8	14	8	**2**	2
3	**Persentase (%)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan dari tahun ketahun cenderung dapat di pertahankan dengan angka 100 persen.

Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh kegiatan kelitbangan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah, baik dalam RKPD maupun RPJMD, berhasil diimplementasikan secara penuh. Meskipun jumlah kegiatan kelitbangan mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2022, konsistensi dalam pelaksanaannya menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap program kelitbangan yang dirumuskan benar- benar dijalankan, mendukung proses perencanaan berbasis eviden serta pengambilan kebijakan yang lebih terarah dan efektif.

b. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dalam hal ini hasil-hasil kelitbangan yang sesuai dengan renja perangakt daerah yang berkenaan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dengan jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.256

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelitbangan yang ditindak lanjuti (Kegiatan)	7	14	8	**2**	2

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah (Kegiatan)	8	14	8	**2**	2
3	**Persentase (%)**	**87,5**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dari tahun ketahun cenderung dapat di pertahankan, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sampai tahun 2024 sebesar 100 persen, capaian terendah pada tahun 2020 sebanyak 87,5 persen.

Konsistensi ini menunjukkan bahwa hasil kelitbangan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah, serta mencerminkan peran strategis fungsi litbang dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data dan analisis kebijakan yang akurat.

c. Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah.

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah jumlah perangkat derah yang difasilitasi dengan jumlah total perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.257

Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	40	44	42	**42**	42
2	Jumlah total perangkat daerah	44	44	42	**42**	42
3	**Persentase (%)**	**52,77**	**90,90**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Bappeltibangda Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah dari

tahun ketahun meningkat, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sampai tahun 2024 sebesar 100 persen, capaian terendah pada tahun 2020 sebanyak 52,77 persen.

Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam mendorong budaya inovasi di seluruh perangkat daerah, melalui fasilitasi yang mencakup pendampingan, pelatihan, hingga pengembangan model inovatif. Keberhasilan mempertahankan angka 100% selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah telah aktif terlibat dalam pengembangan dan penerapan inovasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kinerja pemerintahan.

d. Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah.

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah adalah jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dengan jumlah inovasi yang diusulkan. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.258

Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang diterapkan

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	50	70	18	20	8
	Jumlah inovasi yang Diusulkan	77	96	25	30	14
3	**Persentase (%)**	**64,93**	**72,92**	**72,00**	**66,66**	**57,14**

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang diterapkan dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 72,92 persen, capaian terendah pada tahun 2024 sebesar 57,14 persen.

Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, kesiapan perangkat daerah, maupun proses seleksi dan validasi inovasi yang ketat. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun semangat berinovasi cukup tinggi, tantangan dalam tahap implementasi masih perlu

mendapatkan perhatian lebih agar kualitas dan kuantitas kebijakan inovatif yang diterapkan dapat terus ditingkatkan.

Tabel 2.259

Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024

NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
1.	TARO ADA TARO GAU (Tera/Tera Ulang Metrologi Legal Secara Digital Tanpa Mengganggu Proses Perdagangan dan Jual Beli)	Dinas Koperasi
2.	SIPAKARIO	Dinas Koperasi
3	TAPADA SALAMA	Dinas Perhubungan
4	PESTAKI (Pedoman Standar Belanja Stunting dan Kemiskinan dalam APBD	BKAD
5	STMB CANTIK	Dinas Kesehatan
6	Penguatan Kapasitas Guru PAUD untuk Penanganan Stunting	Dinas Pendidikan
7	DENI dan CENI (Deteksi Dini dan Cegah Dini) Terhadap ATHG	Dinas Kesbangpol
8	MPOK DARTI (Kelompok Sadar Stunting)	Dinas Sosial
9	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 MATiPPe	Dinas DUKCAPIL
10	POSKESMAS (Pos Kesehatan Masjid)	Puskesmas Pekkae
11	KLIK DESA (Klinik Layanan Konsultasi Desa)	Dinas Pmdp2kbp3a
12	SI PANCA (Sinergi Pendataan Bencana)	Bpbd
13	PARENTING (Pemberdayaan Remaja Peduli Stunting)	Dinas Kesehatan
14	PEPAYA MATANG	Dinas Pertanian

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

Kegiatan Penilaian Indeks Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Kemendagri setiap tahunnya, hal ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Bagi Pemerintahan Kabupaten Barru penilaian Indeks Inovasi Daerah merupakan motivasi untuk mewujudkan Kabupaten Barru sebagai daerah yang inovatif. Namun, tentu saja perlu dukungan dari Organisasi Pemerintahan Daerah yang berada di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Barru untuk mewujudkan hal itu. OPD harus berpartisipasi dalam menciptakan inovasi baru di tiap tahunnya agar penilaian IID untuk Kabupaten Barru mendapatkan predikat Inovatif hingga Sangat Inovatif tiap tahunnya.

Penilaian IID ini dengan maksud untuk memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara

transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Berdasarkan hasil penilaian Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024, dapat disampaikan bahwa Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru sebesar 34.34 dan berada pada kategori Kabupaten *Kurang Inovatif*. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai indeks inovasi Kabupaten Barru Tahun 2024 menurun sebesar 14.16 poin.

5. Pengawasan

a. Persentase Tindaklanjut Temuan

Persentase tindaklanjut temuan merupakan perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah total temuan yang dinyatakan dalam persen. Persentase tindaklanjut temuan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.260

Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	42	19	27	85	710
2	Jumlah total temuan	50	21	53	254	899
3	**Persen ((1/2)x100%)**	**84,00**	**90,47**	**50,94**	**33,46**	**78,98**

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Tindak lanjut Temuan Kabupaten Barru dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 89,19 persen, capaian terendah pada tahun 2024 sebanyak 33,46 persen.

Meskipun jumlah temuan yang ditindaklanjuti meningkat signifikan pada tahun 2024 (710 temuan), namun total temuan juga melonjak, sehingga persentasenya tetap lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kapasitas tindak lanjut rekomendasi agar akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah dapat lebih optimal.

b. Persentase Pelanggaran Pegawai

Persentase pelanggaran pegawai merupakan perbandingan antara jumlah ASN yang dikenai sanksi dengan jumlah total ASN yang dinyatakan dalam persen. Persentase pelanggaran pegawai di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.261

Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	7	22	4	7	2
2	Jumlah total ASN	3.919	3.919	3.909	3.992	3.947
3	**Persen ((1/2)x100%)**	**0,18**	**0,56**	**0,10**	**0,17**	**0,05**

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase pelanggaran pegawai Kabupaten Barru dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,56 persen, capaian terendah pada tahun 2024 sebanyak 0,05 persen. Penurunan ini dapat diartikan sebagai hasil dari meningkatnya kesadaran disiplin pegawai, efektivitas pembinaan dan pengawasan internal, serta penerapan regulasi kepegawaian yang lebih ketat. Secara umum, persentase pelanggaran tetap berada pada tingkat yang sangat rendah, mencerminkan iklim kerja yang semakin tertib dan profesional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.

c. Jumlah Temuan BPK

Indikator jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Tabel 2.262

Jumlah Temuan BPK Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah temuan BPK (Kasus)	8	20	21	10	12

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah Temuan BPK Kabupaten Barru dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 21 kasus, capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 8 kasus.

Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam pengelolaan keuangan dan kinerja instansi pemerintah daerah, di mana meningkatnya temuan pada tahun tertentu dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian internal, atau akuntabilitas pengelolaan anggaran. Sebaliknya, penurunan jumlah temuan dapat menunjukkan perbaikan tata kelola serta meningkatnya kepatuhan terhadap standar pemeriksaan dan regulasi keuangan daerah.

6. Sekretariat Dewan

a. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota serta Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD dan RKPD) dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Tabel 2.263

Tersedianya Rencana Kerja, terintegrasi program-program DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Sumber : Sekretarat DPRD Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Barru menunjukkan konsistensi dalam penyediaan dan integrasi dokumen perencanaan kerja DPRD. Setiap tahun, rencana kerja tahunan alat kelengkapan DPRD selalu tersedia, dan program-program kerja DPRD yang meliputi fungsi pengawasan, pembentukan Perda, serta fungsi anggaran telah tersusun dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Selain itu, program-program DPRD juga secara konsisten telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD (Setwan) dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan komitmen dan sinergi yang baik antara DPRD dan perangkat daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang partisipatif, terarah, dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah sesuai dengan target RPJMD.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

a. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang perjumlah kendaraan merupakan perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Barru tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.264

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan	683,36	683,36	683,36	683,36	683,36
2	Jumlah Kendaraan Bermotor	54.634	55.994	60.986	51.402	55.110
3	Rasio(1/2)	0,012	0,012	0,011	0,013	0,012

Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan/BPS Kabupaten Barru Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Barru pada tahun 2020 sampai tahun 2024 cenderung mengalami penurunan. Capaian tertinggi pada tahun 2020 dengan rasio 0,013 sedangkan capaian terendah pada tahun 2020 sampai tahun 2022 dengan rasio 0,12.

Meskipun terdapat sedikit perbaikan pada tahun 2023, secara keseluruhan rasio ini mencerminkan bahwa pertumbuhan kendaraan lebih cepat dibandingkan pembangunan atau penambahan panjang jalan. Hal ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan transportasi dan infrastruktur, agar daya dukung jalan tetap mampu mengimbangi kebutuhan lalu lintas yang terus meningkat.

b. Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan daerah dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini seagai motor pembangunan suatu daerah. Jaringan transportasi merupakan salah satu tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan jalan, pelabuhan, terminal, bandara, layanan air minum dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru. Kerangka kebijakan regulasi dan investasi,

diharapkan akan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur. Namun ketersediaan infrastruktur perlu ditingkatkan agar angka kecelakaan di sektor transportasi, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat ditekan. Ketersediaan layanan infrastruktur secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.265

Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Daya saing daerah pilar Infrastruktur	3,58	3,33	1,95	2,99	3,99

Sumber data : Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur Kabupaten Barru pada tahun 2020 sampai tahun 2024 cenderung berfluktuasi. Capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 3,99 point sedangkan capaian terendah pada tahun 2022 sebesar 1,95 point. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti realisasi pembangunan fisik, pemeliharaan infrastruktur, serta dukungan anggaran dan kebijakan strategis daerah. Peningkatan indeks di tahun 2024 menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan infrastruktur yang berkontribusi terhadap daya saing daerah secara keseluruhan.

b. Jenis dan Jumlah Bank

Jenis dan jumlah Bank di Kabupaten Barru pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.266

Jenis dan Jumlah Bank Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Uraian	Kantor Cabang	Kantor Capem	Kantor Kas
1	Bank Pemerintah Indonesia	1	9	-
2	Bank Pembangunan Daerah	1	-	3
3	Bank Swasta	-	-	-
4	Jumlah	2	9	3

Sumber : BPS (Kabupaten Barru dalam Angka) Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Jenis Bank Kabupaten Barru pada tahun 2024 yang terdiri dari Bank Pemerintah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Swasta dengan jumlah kantor cabang 2 unit, jumlah kantor cabang pembantu 9 unit dan jumlah Kantor Kas 3 unit. Daerah.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pelayanan perbankan di Kabupaten Barru masih didominasi oleh lembaga perbankan milik pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan distribusi layanan yang cukup namun masih terbatas, terutama dalam hal kehadiran bank swasta.

c. Jumlah Hotel dan Restoran/ Rumah Makan

Jumlah hotel dan restoran/rumah makan di Kabupaten Barru tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.267

Jumlah Hotel dan Restoran/Rumah Makan Kabupaten Barru

Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hotel Non Bintang (Unit)	23	20	23	15	15
2	Restoran/Rumah Makan (Unit)	66	57	67	61	61

Sumber : BPS Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Hotel non Bintang di Kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 memiliki trend berfluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2022 dengan jumlah 23 unit dan capaian terendah pada tahun 2024 dengan jumlah 15 unit. Sedangkan jumlah Restoran/ Rumah makan di Kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 juga memiliki trend berfluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah 127 unit dan capaian terendah pada tahun 2021 dengan jumlah 57 unit. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika sektor pariwisata dan kuliner di daerah, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, daya beli masyarakat, serta mobilitas wisatawan dan pengunjung ke Kabupaten Barru.

d. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah seluruh rumah tangga yang dinyatakan dalam

persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Barru tahun 2020 -2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.268

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik (Unit)	49,738	52.524	54.272	56.010	56.010
2	Seluruh Rumah Tangga (Unit)	54.707	56.657	63.128	63.128	63.128
3	**Persentase (%)**	**90,92**	**92,71**	**83,20**	**83,20**	**83,20**

Sumber : BPS Tahun 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 92,71 persen, capaian terendah pada tahun 2022 sebesar 83,20 persen. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah total rumah tangga yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan rumah tangga berlistrik secara proporsional. Selain itu, data untuk tahun 2023 dan 2024 belum lengkap, sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan menyeluruh untuk dua tahun terakhir.

2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Kawasan industri di Kabupaten Barru memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Dengan posisi geografis yang strategis, dekat dengan jalur transportasi utama dan pelabuhan, serta sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Barru dapat menjadi pusat industri yang tidak hanya melayani pasar lokal, tetapi juga pasar internasional. Proyeksi kebutuhan investasi untuk pengembangan kawasan industri di wilayah ini mencakup beberapa sektor yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

a. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Industri

Salah satu kebutuhan mendesak untuk pengembangan kawasan

industri di Kabupaten Barru adalah pembangunan infrastruktur yang memadai. Beberapa sektor yang membutuhkan investasi untuk mendukung kawasan industri ini antara lain:

- Pembangunan Jalan Akses dan Jaringan Transportasi
- Fasilitas Energi dan Sumber Daya
- Jaringan Telekomunikasi dan Teknologi

b. Sektor Industri Pengolahan Sumber Daya Alam

Kabupaten Barru memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Oleh karena itu, sektor industri pengolahan menjadi salah satu area yang sangat menjanjikan untuk investasi. Beberapa subsektor yang perlu mendapat perhatian dalam proyeksi investasi ini meliputi:

- Industri Pengolahan Hasil Perikanan
- Industri Pengolahan Hasil Pertanian

c. Pembangunan Kawasan Industri Berbasis Teknologi dan Inovasi

Dalam rangka mempercepat diversifikasi ekonomi, investasi di kawasan industri berbasis teknologi dan inovasi juga menjadi hal yang penting. Kabupaten Barru perlu mengembangkan kawasan industri yang mendukung sektor teknologi, termasuk:

- Industri Manufaktur Berbasis Teknologi
- Inkubator Bisnis dan Teknologi
- Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Keterampilan

d. Pembangunan Pergudangan

Pembangunan pergudangan di kawasan industri Barru memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam mendukung distribusi barang, logistik, dan memenuhi kebutuhan pasar baik domestik maupun internasional. Kawasan industri Barru, yang terletak strategis dekat dengan jalur transportasi dan pelabuhan, menjadi lokasi yang ideal untuk pengembangan pergudangan guna mendukung kegiatan manufaktur, perdagangan, dan ekspor.

Untuk mewujudkan pembangunan pergudangan yang efisien dan efektif, dibutuhkan investasi yang mencakup beberapa aspek penting mulai dari infrastruktur, fasilitas pendukung, hingga system manajemen logistik yang modern. Berikut adalah rincian

kebutuhan investasi yang diperlukan dalam pembangunan pergudangan di kawasan industri Barru.

- Pengadaan Lahan
- Pembangunan Infrastruktur Fisik Pergudangan
- Pembangunan Gudang
- Fasilitas Akses dan Jalan Raya
- Fasilitas Listrik dan Air
- Pembangunan Keamanan
- Pembangunan Sistem Manajemen Pergudangan
- Sistem Manajemen Gudang (WMS)
- Automasi Pergudangan
- Sistem Keamanan dan Pemantauan
- Penyediaan Fasilitas Penunjang

e. Fasilitas Penunjang Kawasan Industri

Untuk mendukung kelancaran operasional kawasan industri, berbagai fasilitas penunjang juga perlu diperhatikan, antara lain:

- Pembangunan Kawasan Hunian dan Perumahan
- Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan
- Area Komersial dan Pusat Logistik

f. Sektor Industri Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan, kawasan industri di Kabupaten Barru harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Beberapa sektor yang dapat menjadi fokus investasi adalah:

- Industri Daur Ulang dan Pengolahan Limbah
- Industri Energi Terbarukan

Dalam mendukung iklim berinvestasi beberapa hal yang menjadi Fokus Pemerintah Kabupaten Barru yakni:

1. Lama Proses Perizinan

Lama proses perizinan merupakan salah satu indikator yang snagat mempengaruhi iklim investasi pada suatu daerah. Adapun lama proses perizinan di Kabupaten Barru pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.269

Lama Proses Perizinan Kabupaten Barru Tahun 2024

No.	Uraian	Lama Penyelesaian
1.	Surat izin tempat usaha (SITU)	25 Menit
2.	PB-UMKU (Yang Tidak Membutuhkan Pembayaran PNBP)	20 Menit
3.	PB-UMKU (Yang Membutuhkan Pembayaran PNBP)	5 HAri
4.	PBG (Penerbitan SKRD dan Penerbitan PNBP)	1 Hari
5.	PKKPR (Setelah Pembayaran PNBP)	30 Menit
6.	Persetujuan Lingkungan (Setelahverifikasi Tim Teknis)	30 Menit
7.	Izin penyelenggaraan reklame	7 Hari
8.	Izin Titik Reklame	21 Hari
9	Izin trayek	3 Hari
10	Izin Penelitian	1 Hari
11	Persetujuan Awal Terkait Rencana Kegiatan Usaha	21 Hari
12	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2 Hari
13	Izin Operasional Sekolah	7 Hari
14	Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatiham	7 Hari
15	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	7 Hari
16	Izin Operasional Penyelenggaraan (PAUD)	7 Hari
17	Izin Praktik Tenaga Kesehatan	5 Hari
18	Rekomendasi Izin Penutupan Jalan	3 Hari
19	Kartu Pencari Kerja (AK1)	1 Hari

Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2025

Dari data ini dapat disimpulkan bahwa secara umum proses perizinan di Kabupaten Barru sudah cukup efisien, khususnya untuk jenis-jenis perizinan yang tidak memerlukan proses pembayaran atau verifikasi teknis yang kompleks.

2. Jenis dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Barru tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.270

Jumlah dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan
A	**PAJAK**	
1.	Pajak Hotel	66.787.000,00
2.	Pajak Restoran	1.430.063.024,00

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan
3.	Pajak Hiburan	6.823.300,00
4.	Pajak Reklame	588.235.790,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	9.198.143.190,00
6.	Pajak Parkir	3.750.000,00
7.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.690.466.788,00
8.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.004.712.622,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.717.682.808,00
10	Pajak Air Tanah	56.229.932,00
11	Pajak sarang Burung walet	29.618.800,00
B	**RETRIBUSI**	
B.1	**Retribusi jasa umum**	
1	Retribusi pelayanan kesehatan	0
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	126.577.000
3	Retribusi pelayanan pasar	874.169.050
4	Retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB)	0
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	196.489.264
6	Retribusi pelayanan tera /tera ulang	14.605.000
7	Retribusi Penyodotan Kakus	11.520.000
B.2	**Retribusi jasa usaha**	
1	Retribusi pemekaian kekayaan daerah (PKD)	1.154.700.000
2	Retribusi tempat pelelangan ikan-Bapenda	175.691.000
3	Retribusi terminal	78.628.000
4	Retribusi tempat khusus parkir	449.615.000
5	Retribusi pelayanan kepelabuhanan	201.227.808
6	Retribusi pelayanan tempat olahraga	73.632.000
7	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	121.805.000
B.3	**Retribusi perizinan tertentu**	
1	Retribusi izin mendirikan bangunan	365.928.481
2	Retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi	0

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Secara umum, penerimaan pajak mendominasi total pendapatan daerah dibandingkan dengan retribusi, menandakan pentingnya optimalisasi potensi pajak dalam mendukung pendapatan asli daerah Kabupaten Barru.

3. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Regulasi merupakan salah satu factor yang sangat penting untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pada suatu daerah. Adapun jumlah perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Barru sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.271

Jumlah PERDA yang Mendukung Iklim Usaha

Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Nama Perda	Nomor
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2020
2	Bangunan Gedung	Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2022
3	Izin Lingkungan	Sekarang menjadi Persetujuan Lingkungan berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 (Perda Belum ada)
4	Izin Lokasi	Sekarang menjadi PKKPR berdasarkan PP No. 16 Tahun 202 1 (Perda Belum ada)

Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan Tabel Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Barru Tahun 2024, tercatat terdapat dua Perda yang telah diterbitkan, yaitu Perda tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Perda Nomor 11 Tahun 2020) dan Perda tentang Bangunan Gedung (Perda Nomor 04 Tahun 2022). Sementara itu, untuk ketentuan mengenai Izin Lingkungan dan Izin Lokasi, telah mengalami perubahan menjadi Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 dan PP Nomor 16 Tahun 2021. Namun, hingga tahun 2024, Perda yang mengatur secara khusus dua hal tersebut belum tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat beberapa regulasi daerah yang mendukung kemudahan berusaha, masih dibutuhkan penguatan kerangka hukum daerah seiring perubahan regulasi nasional guna meningkatkan kepastian hukum dan mendukung iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Barru.

4. Persentase Desa Berstatus Desa Mandiri

Desa Mandiri yang disebut adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, punya infrastruktur memadai, serta punya pelayanan umum dan pemerintahan yang sangat baik. Data Jumlah desa Mandiri di Kabupaten Barru disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.272

Persentase Desa Berstatus Mandiri Terhadap Total Desa

Kabupaten Barru 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa Mandiri	1	7	17	23	33
2	Jumlah Desa	40	40	40	40	40
3	**Persentase (%)**	**2,5**	**17,5**	**42,5**	**57,5**	**82,5**

Sumber : Dinas PMDKBPPPA Kab. Barru Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel Persentase Desa Berstatus Mandiri Terhadap Total Desa di Kabupaten Barru Tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, hanya terdapat 1 desa mandiri atau sebesar 2,5 persen dari total 40 desa. Jumlah ini meningkat secara konsisten hingga pada tahun 2024 tercatat sebanyak 33 desa telah berstatus mandiri, atau setara dengan 82,5 persen dari total desa yang ada. Meskipun capaian ini menunjukkan progres yang sangat positif dalam upaya pemberdayaan dan penguatan kapasitas desa, namun masih terdapat 7 desa (17,5 persen) yang belum mencapai status desa mandiri. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Daerah untuk terus mendorong percepatan pembangunan desa-desa tersebut agar seluruh desa di Kabupaten Barru dapat mencapai status mandiri secara menyeluruh.

5. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban suatu daerah relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun untuk kegiatan investasi. Angka kriminalitas yang tertangani dari tahun ke tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.273

Angka Kriminalitas yang Tertangani

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Kriminalitas	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kriminalitas (Kasus)	103	62	106	113	111
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	182.373	189.877	191.895	193.358	196.001

No	Jenis Kriminalitas	2020	2021	2022	2023	2024
3	**Angka Kriminalitas (%)**	**5,6**	**3,3**	**5,6**	**5,8**	**5,7**

Sumber : Bakesbangpol dan Linmas Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 5,8 persen, capaian terendah pada tahun 2021 sebesar 3,3 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Barru cenderung tidak stabil dan perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum serta pemerintah daerah untuk melakukan upaya preventif dan represif secara berkelanjutan

2.1.4.3 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total di Kabupaten Barru didominasi oleh sektor pertanian, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, terutama didorong oleh peningkatan produktivitas lahan sawah. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas ini melalui program penyuluhan, subsidi pupuk, dan perbaikan infrastruktur seperti irigasi dan jalan tani.

Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.274

Produktifitas Total Daerah terhadap Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Barru Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton)	132.097,0	132.097,0	132.097,0	132.097,0	132.097,0
2	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal (Ha)	23.385	23.385	23.385	23.385	23.385
3	Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ku/Ha)	56,49	56,49	56,49	56,49	56,49

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Barru pada tahun 2020 hingga 2024 tercatat tetap stabil, yakni sebesar

56,49 kuintal per hektar setiap tahunnya. Tidak terdapat peningkatan atau penurunan selama periode tersebut, baik dari sisi produksi total maupun luas areal tanam. Oleh karena itu, pernyataan bahwa produktivitas mengalami peningkatan tidak sesuai dengan data dalam tabel. Meskipun demikian, capaian produktivitas yang stabil ini tetap mencerminkan adanya keberlangsungan sistem produksi pertanian di Kabupaten Barru, yang kemungkinan tetap didukung oleh berbagai intervensi pemerintah seperti penyuluhan, bantuan pupuk, dan penguatan infrastruktur pertanian. Namun, untuk mencapai peningkatan produktivitas di masa mendatang, diperlukan inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas petani secara berkelanjutan.

2.2 Capaian Indikator Pembangunan Daerah

2.2.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan

Tabel 2.275

Capaian Indikator Makro Kabupaten Barru

No	Indikator Kinerja Makro	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target RKPD 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	72,57	74,51	75,77
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,41	8,31	6,58
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,14	6,42	6,24
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,64	4,92	5,81
5	PDRB Perkapita (ADHB) (Juta Rp)	50,92	52.274,82	66,75
6	Rasio Gini (Angka)	0,33	0,310	0,297

Sumber : BPS Tahun 2024 dan Bappelitbangda 2025

2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barru

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) yang

bersifat kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan tahun 2024 dan target RKPD tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.276

Capaian Indikator Kinerja Utama 2024 Pemerintah Kabupaten Barru

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Target Tahun 2026
			Target	Capaian	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,57	74,51	73,22
2	Indeks Pendidikan	Poin	70,83	67,19	68,15
3	Indeks Kesehatan	Poin	77,26	81,15	83,31
4	Paritas Daya Beli	Juta Rupiah	11,63	12,06	-
5	Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana	%	0,006	tdi	-
6	Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 12,73%	%	9,09	10	-
7	Indeks Ketahanan Bencana	Poin	0,75	0,51	112
8	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	%	12,7	11,66	-
9	Indeks Williamson	Poin	0,27	0,26	-
10	Indeks daya saing daerah Pilarinfrastruktur	Poin	3,881	3,99	4
11	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,64	4,92	5,81
12	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	52,97	61,8	-
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,26	76,65	78,11
14	Indeks Gini	Poin	0,33	0,310	0,297
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,14	6,42	6,24
16	Angka Kemiskinan	%	6,41	8,31	6,58
17	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	73	68,02	73,37
18	Nilai SAKIP	Poin	70	61,42	65,87
19	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4	3,480	4,066
20	Angka Kriminalitas	Per 10.000 pddk	5,9	5,7	-

No	Indikator		Tahun 2024		Target Tahun
21	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Poin	0,001	tdi	0,01

Sumber : BPS Tahun 2024, Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025

Dari tabel capaian indicator kinerja utama diatas, beberapa indicator belum terisi capaian tahun 2024, hal ini disebabkan belum adanya informasi dari penyedia data atau SKPD pengampu. Selanjutnya untuk target tahun 2026, beberap kolom tidak terisi, disebabkan karena pada Dokumen Ranhir RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 tidak lagi menjadi Indicator Kinerja Utama, sehingga target tahun 2026 tidak tersedia.

2.2.3 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 diukur melalui indikator kinerja yang menunjukkan bahwa dari 199 yang diukur, terdapat 22 indikator yang telah melampaui target yang di tetapkan pada tahun 2024, 13 indikator yang sesuai target 2024 dan 66 indikator yang belum mencapai target 2024. Kinerja outcome penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024 dengan berbagai indikator dan capaiannya disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.277

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Realisasi					Target RPJMD 2026	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
								2021	2022	2023	2024		
1					**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	**1**				**KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI**								
1	1	1			Tingkat Kemiskinan	%	8,26	9,71	6,41	8,46	8,31	7,83	Melampaui
1	1	2			Pertumbuhan Ekonomi	%	0,87	4,77	5,11	3,51	4,92	5,81	Belum tercapai
1	1	3			PDRB per kapita	Juta Rp	40,30	43,40	47,50	50,16	52.274,82	57,38	Belum Tercapai
1	1	4			Indeks Gini	Poin	0,36	0,36	0,36	0,37	0,310	0,352	Melampaui
1	1	5			Laju inflasi	%	1,61	4,09	6,66	2,22	1,73	3,0-1,0	Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
1	1	6			Indeks Williamson	Poin	0,29	0,29	0,57	0,56	0,26	0,25	Belum Tercapai
1	**2**				**KESEJAHTERAAN SOSIAL**								
1	2	1			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,00	71,13	71,53	73,80	74,51	73	Melampaui
1	2	2			Tingkat pengangguran terbuka	%	6,39	6,74	5,32	5,89	6,42	6,24	Belum tercapai
1	2	3			Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,58	13,59	13,61	13,62	13,63	13,65	Belum Mencapai
1	2	4			Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,23	8,24	8,25	8,54	8,80	9	Belum Mencapai
1	2	5			Angka usia harapan hidup	Tahun	69,02	69,07	69,35	72,57	72,75	69,11	Melampaui
1	2	6			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	95,52	95,51	95,64	95,65	95,74	95,75	Belum Tercapai
1	2	7			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	63,96	63,98	65,24	64,91	65,09	66,9	Melampaui
2					**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
2	**2**				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**								
2	**2**	**1**			**Pendidikan**								
2	2	1	1		Tingkat partisipasi warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	85,05	91,38	74,14	94,14	86,96	100	Belum Tercapai
2	2	1	2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	90,50	96,32	97,22	98,82	92,43	100	Belum Tercapai
2	2	1	3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah Pertama	%	90,50	96,32	97,22	98,82	92,40	100	Belum Tercapai
2	2	1	4		Tingkat	%	36,10	84,19	100	100	81,04	100	Belum Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan								
2	2	1	2	1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ Paket A	%	100,67	101,57	103,23	98,83	96,14	109,05	Belum Tercapai
2	2	1	2	2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	112,09	88,87	91,41	96,59	96,50	111,13	Belum Tercapai
2	2	1	3	1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	%	97,69	98,19	99,39	98,82	99,30	100	Belum Tercapai
2	2	1	3	2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	93,41	95,32	94,01	96,59	96,51	100	Belum Tercapai
2	2	1	4	1	Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A	%	97,69	98,19	99,38	98,82	99,30	100	Belum Tercapai
2	2	1	4	2	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B	%	v	93,41	95,32	94,01	96,51	100	Belum Tercapai
2	2	1	5	1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,44	0,45	0,52	0,52	0,76	0	Belum Tercapai
2	2	1	5	2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,19	1,36	1,90	1,93	1,92	0	Belum Tercapai
2	2	1	6	1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	98,63	99,66	99	100	Belum Tercapai
2	2	1	6	2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	97,82	98,85	99	100	Belum Tercapai
2	2	1	7	1	Angka Melanjutkan	%	122,23	93,61	90,29	93,52	93,52	100	Belum Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					(AM) dari SD/MI ke SMP/MTs								
2	2	1	7	2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	8	1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	94,23	98,81	94,24	92,47	209	98,61	Belum Tercapai
2	2	1	8	2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	55	53,70	55,56	85,19	48	57,56	Belum Tercapai
2	2	1	9	1	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SD	%	100,06	100,51	99,50	116,51	118,61	107,4	Belum Tercapai
2	2	1	9	2	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SMP	%	52,1	34,07	38,24	51,99	50,88	58,5	Belum Tercapai
2	2	1	10	1	Rasio guru/murid Pendidikan Dasar (SD)		1.100,34	1.130,48	664,98	868,63	763,06	1017,35	Belum Tercapai
2	2	1	10	2	Rasio guru/murid pendidikan dasar SMP (SMP)		1,216,47	1.038,69	1.434,29	777,51	665,03	697,34	Belum Tercapai
2	2	1	11		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	90,42	90,81	89,17	NA	99,02	99,59	Belum Tercapai
2	2	1	12		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	88,24	94,89	100	100	98,05	92,09	Belum Tercapai
2	**2**	**2**			**Kesehatan**								
2	2	2	1		Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	3	3	15	10	15	1,51	Belum Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
2	2	2	2		Angka Kelangsungan Hidup Bayi	angka per 100.000	99,7	99,7	99,60	98,90	99,9	100	Belum Tercapai
2	2	2	3		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	1,59	1	1	1	0	0,19	Melampaui
2	2	2	4		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	6,37	2	3	15	11	1,24	Belum tercapai
2	2	2	5		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	angka per 100.000	222,93	98	230	67	210	47	Belum tercapai
2	2	2	6		Rasio dokter per satuan penduduk	angka per 1000	0,2	0.13	0,14	0,28	0,26	0,28	Melampaui
2	2	2	7		Rasio tenaga medispersatuan penduduk	angka per 1000	0,41	0.30	0,31	0,43	0,53	0,45	Belum tercapai
2	2	2	8		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	NA	NA	NA	0,1	NA	0,5	Belum tercapai
2	2	2	9		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	2	2	10		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	91,96	100	91	97	89	100	Belum tercapai
2	2	2	11		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	98,98	100	93	93	85	100	Belum tercapai
2	2	2	12		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	97,64	100	99	95	87	100	Belum tercapai
2	2	2	13		Cakupan pelayanan kesehatan	%	95,94	67,89	82,60	77,46	82,40	63,10	Melampaui

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					balita sesuai standar								
2	2	2	14		Persentase a usia pendidikan dasar yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97,17	64,00	77,00	89,00	88,00	66,10	Melampaui
2	2	2	15		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	91,16	57,00	2,00	69,00	88,00	59,1	Melampaui
2	2	2	16		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	91,17	79,00	3,00	53,00	72,00	81,10	Belum tercapai
2	2	2	17		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	%	100	100	4,00	65,00	76,00	100	Belum tercapai
2	2	2	18		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	33,00	94,00	116	100	Melampaui
2	2	2	19		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	51,00	89,00	104	100	Melampaui
2	2	2	20		Persentase	%	100	100	39	102	97	100	Belum tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar								
2	2	2	21		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	98,00	72,00	82,00	91,00	85,00	74,70	Melampaui
2	2	2	22		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	92,83	64,00	77,06	88,95	87,00	100	Belum tercapai
2	**2**	**3**			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
2	2	3	1		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota		-	-	-	8,46	9,85	6,54	Melampaui
2	2	3	2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		-	-	-	17,06	21,60	31,04	Belum Tercapai
2	2	3	3		Rasio Jaringan Irigasi		27,73	27,73	27,81	27,90	27,94	54,49	Belum Tercapai
2	2	3	4		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik		48,06	50,41	50,79	51,67	54,62	56	Belum Tercapai
2	2	3	5		Presentase penduduk		95,3	95,61	96,77	95,75	97,30	98,31	Belum Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					berakses air minum								
2	2	3	6		Persentase rumahtinggal bersanitasi	%	95,79	100	100	100	100	95,49	Melampaui
2	2	3	7		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota		-	-	-	100	100	100	Tercapai
2	2	3	8		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	-	-	-	74,58	66,39	84,01	Belum Tercapau
2	2	3	9		Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	-	-	-	25	22,22	72,19	Belum Tercapai
2	2	3	10		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	-	-	-	100	100	100	Tercapai
2	2	3	11		Presentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	3,88	3,88	NA	6,41	6,14	100	Belum Tercapai
2	2	3	12		Persentase areal kawasan kumuh		0,02	0,02	0,02	0,06	0,06	0,06	Tercapai
2	**2**	**4**			**Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman**								
2	2	3	1		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	-	-	-	100	98,39	100	Belum Tercapai
2	2	3	2		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		-	-	-	100	100	100	Tercapai
2	2	4	3		Persentase		-	-	-	86,21	75,64	75,37	Melampaui

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani								
2	2	4	4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		-	-	-	1,09	0,86	3,29	Belum Tercapai
2	2	4	5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	-	-	-	54,6	54,6	38,32	Belum Tercapai
2	**2**	**5**			**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**								
2	2	5	1		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		NA	NA	NA	100	100	100	Tercapai
2	2	5	2		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		NA	NA	NA	100	100	100	Tercapai
2	2	5	3		Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)		0,6	0,48	0,47	0,38	0,60	0,56	Melampaui
2	2	5	4		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	2	5	5		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	NA	NA	NA	177.648	135.737	25.319	Melampaui
2	2	5	6		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan		NA	NA	NA	177.648	135.737	27.819	Melampaui

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja	Realisasi						Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					kesiapsiagaan terhadap bencana								
2	2	5	7		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	NA	NA	NA	100	100	100	Tercapai
2	2	5	8		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	NA	NA	NA	100	100	100	Tercapai
2	2	5	9		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten		100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	2	5	10		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK)		100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	**2**	**6**			**Sosial**								
2	2	6	1		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	NA	NA	NA	100	100	100	Tercapai
2	2	6	2		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap		NA	NA	NA	100	100	100	Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					darurat bencana daerah kabupaten/kota								
2	2	6	3		Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	95,68	45,15	100,00	100,00	118,37	80,00	Melampaui
2	2	6	4		Presentase PMKS yang tertangani		95,68	45,15	100,00	100,00	118,37	80,00	Melampaui
2	**3**				**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**								
2	**3**	**1**			**Tenaga Kerja**								
2	3	1	1		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		NA	NA	NA	58	NA	66,00	Undefined
2	3	1	2		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		NA	NA	53,66	56,86	NA	58,46	Undefined
2	3	1	2		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		NA	NA	NA	3.982,83	NA	61	Undefined
2	3	1	3		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	NA	NA	NA	78,60	NA	52,16	Undefined
2	3	1	4		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota		NA	NA	NA	42,81	NA	12,10	Undefined
2	3	1	5		Persentase pekerja/buruh yang menjadi		77,00	79,00	83,00	67,00	NA	71,07	Undefined

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					peserta program Jamsostek								
2	3	1	6		Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	NA	0	Undefined
2	**3**	**2**			**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
2	3	2	1		Persentase ARG pada belanja langsung APBD		NA	NA	NA	41,42	NA	13,85	Undefined
2	3	2	2		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		NA	NA	NA	100	100	0,28	Melampaui
2	3	2	3		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	18,55	18,55	9,49	9,85	8,40	19,01	Belum Tercapai
2	3	2	4		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD		20	20	20	20	24	21,70	Melampaui
2	3	2	5		Rasio KDRT		0,02	0,02	0,02	0	0,05	0,33	Melampaui
2	3	2	6		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	2	7		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di		100	100	100	100	100	100	Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit								
2	3	2	8		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.		100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	**3**	**3**			**Pangan**								
2	3	3	1		Ketersediaan pangan utama		4.379	261.588	229.133	237.980	3,95	46,92	Belum Tercapai
2	3	3	2		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		0,42	0,42	45,20	77,30	73,76	68,00	Melampaui
2	**3**	**5**			**Lingkungan Hidup**								
2	3	5	9		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh PEMDA		100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	5	1		Tersusunnya RPPLH Kabupaten		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Belum Tercapai
2	3	5	2		Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Daerah	Ada/ Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Belum Tercapai
2	3	5	3		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
2	3	5	4		Hasil		62,22	50,00	60,67	50,67	50,67	62,00	Belum

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					Pengukuruan Indeks kualitas Air								Tercapai
2	3	5	5		Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara		93,4	90,59	92,52	92,74	92,74	91,84	Melampaui
2	3	5	6		Hasil Pengukuruan Indeks kualitas tutupan Lahan		63,77	69,77	70,25	70,44	70,44	71,00	Belum Tercapai
2	3	5	7		Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		8,00	0,05	10,00	23,00	8	7,17	Melampaui
2	3	5	8		Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidupdi Daerah (PPLHD) di daerah		0	100	100	100	100	100	Tercapai
2	**3**	**6**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
2	3	6	1		Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk		100	0,99	0,99	0,99	0,99	100	Belum Tercapai
2	3	6	3		Rasio pasangan berakte nikah		100	-	-	50,72	55,00	100	Belum Tercapai
2	3	6	4		Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
2	3	6	5		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja	Realisasi						Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
2	3	6	6		Cakupan Penerbitan KTP	%	100	99,99	99,99	98,06	99,32	100	Belum Tercapai
2	3	6	2		Rasio bayi berakte kelahiran	%	0,92	0,97	0,99	1,00	1,00	-	Tercapai
2	**3**	**7**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
2	3	7	1		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	100	100	100	100	1	Tercapai
2	3	7	2		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		1	1	1	1	1	1	Tercapai
2	3	7	3		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		27,18	39,44	25,44	41,70	42,49	42,80	Belum Tercapai
2	3	7	4		Presentase LPM Berprestasi	%	12,72	25,45	25,45	35,00	41,82	36,49	Melampaui
2	3	7	5		Presentase PKK aktif		100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	7	6		Presentase Posyandu aktif		100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	7	7		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan Masyarakat		30	30	30	30	30	30	Tercapai
2	3	7	8		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	50	50	50	50	50	50	Tercapai
2	**3**	**8**			**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
2	3	8	1		Rasio akseptor KB		67,88	66,63	69,63	53,68	68,20	52,61	Melampaui
2	3	8	2		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 -49		67,88	66.63	75,01	64,99	68,20	72,30	Belum Tercapai
2	3	8	3		Cakupan Pasangan Usia	%	1,71	1,51	1,75	1,44	0,87	1,00	Belum Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi				Target RPJMD		Interpretasi (Belum Tercapai,
					Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun								
2	3	8	4		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	19,35	16,71	15,89	17,41	7,7	18,13	Melampaui
2	3	8	5		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	13,62	13,9	18,02	10,20	12,4	15,08	Belum Tercapai
2	3	8	6		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	46,38	50.09	42,3	32,44	25	54,35	Belum Tercapai
2	3	8	7		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB	%	56,65	45,13	61,05	51,12	78,00	48,97	Melampaui
2	3	8	8		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	%	43,13	30,1	30,90	43,06	43,51	32,66	Melampaui
2	3	8	9		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB	%	37,32	33,16	34,05	50,35	8,35	35,98	Belum Mencapai
2	3	8	10		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	8	11		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	1042	900	1024	759	885	976,60	Belum Tercapai
2	3	8	12		Cakupan PKB/ PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja	Realisasi						Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					untuk perencanaann & pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk								
2	3	8	13		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	44,92	51,15	39,02	97,77	33,42	58,34	Belum Tercapai
2	3	8	14		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	8	15		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	10,55	1,05	100	Belum Tercapai
2	3	8	16		Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	8	17		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap desa	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	8	1		Cakupan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
			8		kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga								
2	**3**	**9**			**Perhubungan**								
2	3	9	1		Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1.682.943	853.764	641.295	288.282	226.310	2.096.196	Belum Tercapai
2	3	9	2		Rasio konektivitas kabupaten/kota		NA	NA	NA	0,76	NA	72,89	Undefined
2	3	9	3		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis		9	8	8	8	8	11	Belum Tercapai
2	3	9	4		Presentase layanan Angkutan darat	%	0,08	0,06	0,05	0,04	0,16	100	Belum Tercapai
2	3	9	5		Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang /Ton	907.025 Org/ 10.884 Ton	825.600 Org/ 8.784 Ton	592.908 Org/ 32.610 Ton	189.900 Org/ 96.360 Ton	145.840 Org/ 72.920 Ton	931.890 Org/ 13.093 Ton	Belum Tercapai
2	3	9	6		Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang /Ton	1.728.230 Org/ 9.694. 239 Ton	853.764 Org/ 21.441 Ton	641.395 Org/ 14.237. 510 Ton	237.738 Org/ 18.552. 717 Ton	231.680 Org/ 39.543. 488 Ton	1.893.899 Org/ 9.792. 798 Ton	Belum Tercapai
2	**3**	**10**			**Komunikasi dan Informatika**								
2	3	10	1		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	NA	NA	NA	86,04	NA	100	Undefined
2	3	10	2		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah danpemerintah	%	NA	NA	NA	42,54	NA	98	Undefined

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja	Realisasi						Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					daerah kabupaten/kota								
2	**3**	**11**			**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**								
2	3	11	1		Persentase koperasi aktif	%	61,76	62,5	62,86	63,55	NA	79,89	Undefined
2	3	11	2		Persentase UKM non BPR/LKM UKM	%	93,88	96,46	96,46	-	NA	95,87	Undefined
2	3	11	3		Presentase BPR/LKM Aktif	%	71,43	71,43	71,43	71,43	NA	75,14	Undefined
2	3	11	4		Presentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,74	99,27	99,35	99,36	NA	99,87	Undefined
2	**3**	**12**			**Penanaman Modal**								
2	3	12	1		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		260	118	48	49	213	124	Melampaui
2	3	12	2		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	730.659. 151.736	855.316. 873.042	401.993. 726.034	424.182. 849.592	394.607. 557.755	873.404. 546.203	Belum Tercapai
2	3	12	3		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	0,15	17,06	11,13	-6,36	3,50	17,42	Belum Tercapai
2	**3**	**13**			**Kepemudaan dan Olahraga**								
2	3	13	1		Presentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	13	2		Presentase wirausaha muda	%	13,33	92,66	87,82	3,14	3,53	14,02	Belum Tercapai
2	3	13	3		Cakupan pembinaan olahraga	%	93,1	93,1	92,86	92,86	92,86	100	Belum Tercapai
2	3	13	4		Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	76	76	100	77,78	69,49	7,59	Melampaui
2	3	13	5		Jumlah atlet berprestasi	%	0	0	0	0	2	2	Tercapai
2	3	13	6		Cakupan pembinaan atlet muda	%	70,9	70,9	0	68,27	71,85	74,58	Belum Tercapai
2	3	13	7		Jumlah Prestasi olahraga	Org	0	0	0	0	1	2	Belum Tercapai
2	**3**	**14**			**Statistik**								
2	3	14	1		Persentase	%	NA	NA	NA	100	100	84	Melampaui

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah								
2	3	14	2		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		NA	NA	NA	100	100	84	Melampaui
2	**3**	**15**			**Persandian**								
2	3	15	1		Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	NA	NA	NA	100	100	100	Tercapai
2	3	15	2		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	Tercapai
2	**3**	**16**			**Kebudayaan**								
2	3	16	1		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegia-tan	5	5	5	8	9	10	Melampaui
2	3	16	2		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	53,57	100	100	53,57	53,57	84,15	Belum Tercapai
2	3	16	3		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya	3	3	3	3	4	10	Belum Tercapai
2	3	16	4		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	28	15	15	15	15	32	Belum Tercapai
2	**3**	**17**			**Perpustakaan**								
2	3	17	1		Jumlah pengunjung perpustakaan	Jiwa/ tahun	202.142	121.286	123.347	127.693	133.453	127.577	Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja	Realisasi						Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					pertahun								
2	3	17	2		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eks	58.685	58.685	59.137	59.837	59.909	61.729	Belum Tercapai
2	3	17	3		Rasio perpustakaan persatuan penduduk		0,31	0,31	0,29	0,29	0,29	0,3	Belum Tercapai
2	3	18	4		Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Org	3	3	5	10	9	2	Melampaui
2	**3**	**18**			**Kearsipan**								
2	3	18	1		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku		81,08	80,50	80,50	55,00	57,00	100	Belum Tercapai
2	3	18	2		Peningkatan SDM pengelola kearsipan		3	0	4	0	3	3	Tercapai
2	3	18	3		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	%	NA	NA	NA	75	75	57,50	Melampaui
2	3	18	4		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan erbangsa dan bernegara Untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan		NA	NA	NA	50	66,67	59	Melampaui

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					rakyat								
2	**4**				**Pelayanan Urusan Pilihan**								
2	**4**	**1**			**Pariwisata**								
2	4	1	1		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		NA	NA	NA	122,22	665,00	3	Melampaui
2	4	1	2		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	NA	NA	NA	54,80	7,77	5	Melampaui
2	4	1	3		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		NA	NA	NA	1,09	NA	1,04	Undefined
2	4	1	4		PAD Sektor Pariwisata		0,03	0,06	1,07	1,30	3,38	1,01	Melampaui
2	**4**	**2**			**Pertanian**								
2	4	2	1		Produktivitas pertanian per hektar per tahun		NA	NA	NA	5,83	6,10	7,48	Belum Tercapai
2	4	2	2		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		NA	NA	NA	-84,50	-41,31	0,3	Melampaui
2	4	2	3		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	51,86	56,49	56,55	57,20	62,28	54,65	Melampaui
2	4	2	4		Cakupan bina kelompok petani	%	6.17	23.88	13,88	11,24	47,28	12,2	Melampaui
2	**4**	**3**			**Perdagangan**								
2	4	3	1		Ekspor Bersih Perdagangan		97.264.928	97.264.928	97.264.928	-	NA	107.293.137	Undefined
2	4	3	2		Cakupan bina kelompok pedagang/usah ainformal	%	30,77	30,77	30,77	-	-	31,87	Undefined
2	**4**	**4**			**Perindustrian**								
2	4	4	1		Cakupan bina kelompok pengrajin		20,67	14,00	14,00	15,00	NA	15,34	Undefined
2	**4**	**5**			**Kelautan dan Perikanan**								

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
2	4	5	1		Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	25.648,66	25.733,90	26.167,72	26.421,30	26.616,10	27.350,51	Belum Tercapai
2	4	5	2		Produksi perikanan	Ton	25.648,66	25.733,90	26.167,72	26.421,30	26.616,10	26.563,42	Melampaui
2	4	5	3		Konsumsi ikan		99,53	99,99	99,26	100,02	100,20	46,52	Melampaui
2	4	5	4		Cakupan bina kelompok nelayan		350	383	383	283	111	85	Melampaui
2	4	5	5		Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	8.583,00	12.554,69	12.703,36	14.640,82	15.879,68	13.058,00	Melampaui
2	**5**				**Penunjang Urusan**								
2	**5**	**1**			**Sekretariat Daerah**								
2	5	1	1		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		NA	NA	NA	25,94	NA	28,49	Undefined
2	5	1	2		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	NA	NA	NA	38,33	NA	21,8	Undefined
2	**5**	**2**			**Sekretariat Dewan**								
2	5	2	1		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
2	5	2	2		Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)								
2	5	2	3		Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
2	**5**	**3**			**Perencanaan Pembangunan**								
2	5	3	1		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
2	5	3	2		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
2	5	3	3		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
2	5	3	4		Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
2	5	3	5		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD		100	100	100	100	100	100	Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					kedalam RKPD								
2	5	3	6		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		84,29	100	100	100	100	100	Tercapai
2	**5**	**4**			**Keuangan**								
2	5	4	1		Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
2	5	4	2		Persentase SILPA	%	13,37	9,09	12,63	13,18	10,32	5	Melampaui
2	5	4	3		Persentase belanja pendidikan (20%)		25,55	22,92	31,58	31,55	31,85	20	Melampaui
2	5	4	4		Persentase belanja kesehatan (10%)	%	17,06	18,66	21,29	18,13	22,03	10	Melampaui
2	5	4	5		Penetapan APBD		17 Desember 2018	29 Desember 2020	30 Desember 2020	30 Desember 2021	25 November 2022	30 November 2021	Belum Tercapai
2	5	4	6		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		NA	NA	NA	-12,04	-2,88	5,83	Melampaui
2	5	4	7		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		NA	NA	NA	18,56	0,43	3,84	Melampaui
2	5	4	8		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		NA	NA	NA	11,83	11,20	6,63	Belum Tercapai
2	**5**	**5**			**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**								
2	5	5	1		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan		NA	NA	NA	299,10	NA	6,01	Undefined
2	5	5	2		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		NA	NA	NA	24,31	8,50	26,07	Belum Tercapai
2	5	5	3		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat		NA	NA	NA	11,08	NA	41	Undefined

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)								
2	5	5	4		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan		5,39	16,54	25,68	27,20	3,73	20	Belum Tercapai
2	5	5	5		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		37,63	7,25	11,72	25,10	40,86	20	Melampaui
2	5	5	6		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural		69,58	57,34	67,31	29,02	36,36	72	Belum Tercapai
2	5	5	7		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi Pemerintah		33	30	28	32	30	29	Belum Tercapai
2	5	5	8		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		579	544	343	980	920	200	Belum Tercapai
2	5	5	9		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		2.654	3.345	2857	2.733	2.555	3.345	Belum Tercapai
2	**5**	**6**			**Penelitian dan Pengembangan**								
2	5	6	1		Persentase implementasi rencana kelitbangan.		50	100	100	100	100	100	Tercapai
2	5	6	2		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	75	87,5	100	100	100	100	Tercapai
2	5	6	3		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan		52,77	90,90	100	100	100	100	Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja		Realisasi					Target RPJMD	Interpretasi (Belum Tercapai,
					inovasi daerah (SIDA)								
2	5	6	4		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	52,77	64,93	72,92	72,00	50,00	100	Belum Tercapai
2	**5**	**7**			**Pengawasan**								
2	5	7	1		Persentase tindaklanjut temuan	%	99,66	99,33	81,00	81,33	77,67	100	Belum Tercapai
2	5	7	2		Persentase pelanggaran pegawai		0,09	0,53	0,18	0,08	0,03	0	Belum Tercapai
2	5	7	3		Jumlah temuan BPK		14	8	20	12	85	9	Belum Tercapai
2	5	7	4		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		NA	NA	NA	2	NA	3	Undefined
2	5	7	5		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		NA	NA	NA	2	NA	3	undefined

Sumber : Bappeltibangda Kab. Barru Tahun 2024

2.2.4 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimala (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv)

pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Capain indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.279

Capain Indikator SPM Kabupaten Barru 2020 -2024

No	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
SPM PENDIDIKAN							
1	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	100	80,25	85,05	91,38	74,14	86,96
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) (%)	100	90,42	90,50	96,32	97,22	97,13
3	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100	36,10	36,10	84,19	100	81,04
SPM KESEHATAN							
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil (%)	100	91,96	100	91	97	85,51
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (%)	100	98,98	100	93	93	77,95
3	Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir (%)	100	97,64	100	99	95	79,23
4	Pelayanan Kesehatan Bagi Balita (%)	100	95,94	61	68	83	85,59
5	Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar (%)	100	97,17	64	77	89	97,11
6	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif (%)	100	91,16	57	2	69	94,65
7	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut (%)	100	91,17	79	3	48	82,21
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)	100	100	100	4	65	91,12
9	Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus (%)	100	100	100	33	94	99,87

No	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat (%)	100	100	100	51	88	97,61
11	Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkolosis (%)	100	100	100	39	102	73,52
12	Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV (%)	100	98	72	82	91	76,64
SPM PEKERJAAN UMUM							
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	100	95.30	95,61	96,7	100	100
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic (%)	100	95,79	100	100	100	100
SPM PERUMAHAN RAKYAT							
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	100	14	0	0	100	100
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	100	0	0	0	0	0
SPM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN							
1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	100	100	100
2	pelayanan informasi rawan bencana (%)	100	80	80	80	100	100
3	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	40	40	40	100	100
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran (%)	100	100	100	100	100	100
SPM SOSIAL							
1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti (%)	100	63,24	100	100	100	100
2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti (%)	100	63,24	100	100	100	100
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti (%)	100	75	100	100	100	100
4	rehabilitasi sosial das ar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (%)	100	100	100	100	100	100
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeltibangda Kab. Barru Tahun 2024/www.spm.banda.kemendagri.go.id

Berdasarkan tabel diatas capaian SPM kabupaten Barru masih perlu perhatian karena pencapaian yang belum maksimal. Koordinasi integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya sangat diperlukan. Adapun permasalahan terkait pencapaian SPM adalah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya pendekatan integratif untuk pencapaian SPM sehingga program–program terkait SPM yang diupayakan belum dapat mendorong akselerasi dan efektitas pencapaian target SPM menuju 100%.
2. Pada jenjang Pendidikan dan Kesehatan diperlukan upaya pemenuhan sarana prasarana, akses, pemerataan dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidikan dan kesehatan. Tantangan yang berat dikarenakan tidak hanya terkait penyediaan fasilitas dan tenaga pendidikan dan juga kesehatan oleh pemerintah namun juga kesadaran masyarakat itu sendiri.
3. Belum optimalnya dukungan terhadap penanggulangan bencana termasuk belum adanya Dokumen Penanggulangan Bencana, selain itu luasnya wilayah yang menjadi cakupan pelayan penanggulangan bencana dalam hal ini bencana kebakaran serta belum terpenuhinya fasilitas bencana.
4. Belum adanya inisiasi kebijakan rehabilitasi sosial luar panti dalam bentuk *home/day care services* bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak potensial. Untuk itu perlu adanya inisiasi tersebut diatas sebagai upaya pemberian pelayanan dasar kepada warga miskin tidak potensial.

Perlunya pemantapan kualitas dan akses layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin termarginalkan untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak.

2.2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistanable Development Goals (TPB/SDGs)

Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dan berkomitmen penuh dalam penentuan sasaran dan

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru juga ikut berkomitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 terdapat 220 indikator SDGs/TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Kabupaten Barru diamanahi target pencapaian TPB sebanyak 220 indikator dengan 16 Tujuan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun dari 220 indikator tersebut yang kemudian dilaksanakan hanya sebanyak 55 indikator. Adapun capaian SDGs/TPB Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.280

Rekapitulasi Capaian SDGs/TPB Kabupaten Barru Tahun 2020 s/d 2024 Berdasarkan Tujuan

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Realisasi					Target Akhir Periode (2026)	Interpretasi
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	8,57	8,26	8,68	8,40	8,31	7,45	Belum Tercapai
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.							37.391	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	95,30	95,61	96,70	96,75	100	100	Tercapai
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	95,79	100	100	100	100	100	Tercapai
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	%	94,71	93,99	98,20	99,39	99,30	99,71	Belum Tercapai
		Jumlah lokasi penguatan	Desa	2	3	NA	NA	27	25	-

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Realisasi					Target Akhir Periode (2026)	Interpretasi
				2020	2021	2022	2023	2024		
		pengurangan risiko bencana daerah.								
		Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	-	-	-	-	-	3	358	
		Pendampingan psikososial korban bencana sosial.							0	
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	259.048.000	147.230.000	NA	7.755.290.000		58.682.407	Meningkat
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada/Tidak	-	-	-	ADA	ADA	ADA	Tercapai
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Poin	0,020	11,04	8,30	8,70	16	6,19	Belum Tercapai
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%	42,01	41,87	NA	NA		26	
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	%	NA	91,20	93	93,2	78,60	96,00	Belum Tercapai
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.		1,59	1	1	1	0	0,41	Melampaui
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran	/1000 Jiwa	6,37	2,00	3,00	15,00	13,31	2,95	Belum Tercapai

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Realisasi					Target Akhir Periode (2026)	Interpretasi
				2020	2021	2022	2023	2024		
		hidup.								
		Kejadian Malaria per 1000 orang.	/1000 Jiwa	2,00	0,53	2,00	0,07		0,02	Belum Tercapai
		Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	13,62	13,90	18,02	10,20		28,00	Belum Tercapai
		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	%						0,57	
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	81,24	81,24	NA	NA	98,83	99,37	Belum Tercapai
		Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	74,36	74,36	NA	NA	88,48	97,19	Belum Tercapai
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	%	100,49	100,67	101,57	103,23	96,59	114,00	Belum Tercapai
		Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	%					TK: 83.16	93,47	Belum Tercapai
		Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	%					SD : 78.66,	100	Belum Tercapai
		Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	%					SMP: 83.80	100	Belum Tercapai
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.							21	
		Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	19,35	16,71	15,89	17,41	7,7	10	Belum Tercapai
		Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi							95	

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Realisasi					Target Akhir Periode (2026)	Interpretasi
				2020	2021	2022	2023	2024		
		modern.								
		Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Keg	5	6	6	36		10	Melampaui
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	95,3	95,61	96,70	95,75	96,83	100,00	Tercapai
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	95,3	95,61	96,70	95,75	96,83	100,00	Belum Tercapai
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	KK	1.810	1.810	1.221	NA	50	3852	Belum Tercapai
		Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	%	61,67	50,00	60,67	50,67	64,00	95,06	Belum Tercapai
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	PDB per kapita.	Juta Rupiah	40,36	43,47	47,56	50,16	52,27	64,38	Belum Tercapai
		Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.							68,87	
		Persentase tenaga kerja formal.							59,77	
		Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.							60,11	
		Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan	%	5,79	6,39	6,74	NA		4,45	

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Realisasi					Target Akhir Periode (2026)	Interpretasi
				2020	2021	2022	2023	2024		
		jenis kelamin dan kelompok umur.								
		Jumlah wisatawan mancanegara.							1759	
		Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.							57,02	
		Laju pertumbuhan PDB per kapita.	%	6,13	6,02	NA	1,09		7,03	
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.							ADA	
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.							37391	
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.							ADA	
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	259.048.000	147.230.000	NA	NA		100.682.407	
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	80,41	80,52	81,93	85,05	87,13	100	Belum Tercapai
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		-	-	ADA	ADA	ADA	ADA	Tercapai
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jiwa	0,03	0,01	NA	0,061		0,00	Belum Tercapai
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dok	0	0	0	0	0	3	Belum Tercapai

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Realisasi					Target Akhir Periode (2026)	Interpretasi
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati									
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%	0,01	0,01	NA	NA		0,00	
		Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	%	CC	CC	CC	B	B	BB	Belum Tercapai
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	%	NA	NA	NA	46,66		98,99	Belum Tercapai
		Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.							5	
		Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan							ADA	

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Realisasi					Target Akhir Periode (2026)	Interpretasi
				2020	2021	2022	2023	2024		
		pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.								
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.							1.131.828.048.820	

Sumber : Bappelitbangda Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa indikator TPB yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai target mendapatkan perhatian dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 untuk dipenuhi target pencapaiannya sebanyak 55 Indikator. 46 indikator sampai dengan Tahun 2020 belum tercapai, 3 indikator yang sesuai dan 6 indikator TPB yang telah mencapai target. Adapun beberapa kendala dalam pencapaian TPB/SDGs dikarenakan penerapan SGDs dari keseluruhan stakeholders terdapat kurang pemahaman akan pentingnya implementasi SDGs, yaitu dari segi masyarakat. Masyarakat tidak sepenuhnya paham akan pentingnya penerapan pembangunan berkelanjutan ini. Hal ini menjadi tugas dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan SDGs. Sehingga harapannya para stakeholders dapat saling memaksimalkan dan mendukung akan implementasi dari Sustainable Development Goals.

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan realisasi RPJMD

2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Barru melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan

untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

1. untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
2. serta konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
3. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

A. Konsistensi Program Kegiatan, dan Sub. Kegiatan

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program, Kegiatan dan Sub-kegiatan antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan APBD.

Tabel 2.281

Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM				PROGRAM YANG SAMA				PROGRAM YANG TIDAK SAMA			
		RPJMD 2016 - 2021	RKPD 2024	RENJA-PD 2024	APBD 2024	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	2
2	DINAS KESEHATAN	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	17	26		26	17		26	17	9			9
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
7	DINAS SOSIAL	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0
8	DINAS TENAGA KERJA	5	6		6	5		6	5	1			1
9	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	6		6	6		6	6				
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0
11	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	11	9		9	9		9	9	2			2
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	10		10	10		10	10				
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
14	DINAS PERHUBUNGAN	3	3		3	3		3	3				
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	5	5		5	5		5	5				
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	16	15		15	15		15	15	1			1
17	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9	8		8	8		8	8	1			1
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
19	DINAS PERIKANAN	4	4		4	4		4	4				

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM				PROGRAM YANG SAMA				PROGRAM YANG TIDAK SAMA			
		RPJMD 2016 - 2021	RKPD 2024	RENJA-PD 2024	APBD 2024	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
20	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
21	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
22	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	2
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
26	INSPEKTORAT	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
27	KECAMATAN TANETE RIAJA	6	6		6	6		6	6				
28	KECAMATAN MALLUSETASI	6	6		6	6		6	6				
29	KECAMATAN SOPPENG RIAJA	6	6		6	6		6	6				
30	KECAMATAN BALUSU	6	6		6	6		6	6				
31	KECAMATAN BARRU	6	6		6	6		6	6				
32	KECAMATAN PUJANANTING	6	5		6	5		5	5	1		1	1
33	KECAMATAN TANETE RILAU	6	6		6	6		6	6				
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
	JUMLAH	**200**	**201**	**68**	**202**	**191**	**68**	**201**	**191**	**19**	**0**	**1**	**19**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD antara lain sebagai berikut:

1. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
    a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 200 program (jumlah pada kolom 3), dan jumlah program dalam RKPD Tahun 2024 berjumlah 201 program (jumlah pada kolom 4).
    b. Antara dokumen RPJMD dan RKPD terdapat selisih 19 program yang tidak sama diantara kedua dokumen tersebut (jumlah pada kolom 11).
2. Kesesuaian program RKPD dan Renja-PD
    a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 201 program (jumlah pada kolom 4), dan jumlah program dalam Renja-PD adalah 68 program (jumlah pada kolom 5).
    b. Antara dokumen RKPD dan Renja-PD tidak terdapat program yang tidak sama (sudah konsisten).
3. Kesesuaian program RKPD dan APBD
    a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 201 program (jumlah pada kolom 4), sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 202 program (jumlah pada kolom 6).
    b. Antara RKPD dan APBD terdapat selisih 1 program yang tidak sama antara jumlah APBD dan RPKD (jumlah pada kolom 13).
4. Kesesuaian program RPJMD dan APBD
    a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 200 program (jumlah pada kolom 4), sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 202 program (jumlah pada kolom 6).
    b. Antara RPJMD dan APBD terdapat 19 program yang tidak sesuai antara kedua dokumen tersebut (jumlah pada kolom 14).

Dari hal tersebut diatas, adanya perbedaan antara jumlah program RPJMD, RKPD, Renja PD dan APBD Tahun 2024 disebabkan adanya penyesuaian nomenkelatur dan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang SOTK dan Penyesuaian terhadap Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.

Tabel 2.282

Konsistensi Kegiatan RKPD dalam APBD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH KEGIATAN			KEGIATAN YANG SAMA		KEGIATAN YANG TIDAK SAMA	
		RKPD 2024	RENJA-PD 2024	APBD 2024	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	15	15	15	15	15	0	0
2	DINAS KESEHATAN	23	23	23	23	23	0	0
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	4	4	4	4	4	0	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	47		47		47		
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	10	10	10	10	10	0	0
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9	9	9	9	9	0	0
7	DINAS SOSIAL	14	14	14	14	14	0	0
8	DINAS TENAGA KERJA	18		18		18		
9	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17		17		17		
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	22	22	22	22	22	0	0
11	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	46		46		46		
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17		17		17		
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16	16	16	16	16	0	0
14	DINAS PERHUBUNGAN	14		14		14		
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	12		12		12		
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	26		26		26		
17	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21		21		21		
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14	14	14	14	14	0	0
19	DINAS PERIKANAN	19		19		19		
20	SEKRETARIAT DAERAH	18	18	18	18	18	0	0
21	SEKRETARIAT DPRD	12	12	12	12	12	0	0
		14	14					
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7	7	7	7	7	0	0
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14	14	14	14	14	0	0
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12	12	12	12	12	0	0
26	INSPEKTORAT	10	10	10	10	10	0	0
27	KECAMATAN TANETE RIAJA	16		16		16		

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH KEGIATAN			KEGIATAN YANG SAMA		KEGIATAN YANG TIDAK SAMA	
		RKPD 2024	RENJA-PD 2024	APBD 2024	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
28	KECAMATAN MALLUSETASI	14		14		14		
29	KECAMATAN SOPPENG RIAJA	14		14		14		
30	KECAMATAN BALUSU	15		15		15		
31	KECAMATAN BARRU	14		14		14		
32	KECAMATAN PUJANANTING	15		16		15		1
33	KECAMATAN TANETE RILAU	14		14		14		
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11	11	11	11	11	0	0
	Jumlah	**564**	**225**	**565**	**225**	**564**	**0**	**1**

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD 2024 dan APBD 2024.
   a. Kegiatan dalam RKPD 2024 adalah sejumlah 564, dalam APBD sejumlah 565 kegiatan.
   b. Untuk jumlah Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 564 (jumlah pada kolom 7), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 1 kegiatan (jumlah pada kolom 9).

Untuk pelaksanaan RKPD tahun 2024 sudah mengacu kepada permendagri 90 tahun 2020 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yang dalam pelaksanaan penjabarannya memuat rincian sampai pada sub kegiatan. Sebagai bentuk dari pelaksanaan evaluasi terkait konsistensi pelaksanaan sub kegiatan pada RKPD tahun 2024.

Tabel 2.283

Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dalam APBD

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH SUB. KEGIATAN			SUB. KEGIATAN YANG SAMA		SUB. KEGIATAN YANG TIDAK SAMA	
		RKPD 2024	RENJA-PD 2024	APBD 2024	RENJA & RKPD	APBD & RKPD	RENJA & RKPD	APBD & RKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	58	58	59	58	58	0	1
2	DINAS KESEHATAN	89	89	91	89	89	0	2
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9	9	9	9	9	0	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	112	34	122	31	112	78	10
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	34	34	34	34	34	0	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	31	31	31	31	31	0	
7	DINAS SOSIAL	45	45	47	45	45	0	2
8	DINAS TENAGA KERJA	45	39	45	39	45	6	
9	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	42	40	42	40	42	2	
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	48	48	48	48	48	0	
11	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	116	33	116	33	116	83	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33	48	33	48	33	-15	
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	39	39	39	39	39	0	
14	DINAS PERHUBUNGAN	47	99	47	99	47	-52	
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	50	25	52	25	50	25	2
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	61	29	61	29	61	32	
17	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	73	23	73	23	73	50	
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	40	40	40	40	40	0	
19	DINAS PERIKANAN	43	64	43		43	-21	
20	SEKRETARIAT DAERAH	64	64	64	64	64	0	
21	SEKRETARIAT DPRD	33	33	33	33	33	0	
22	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	48	48	49	48	48	0	1
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	24	24	24	24	24	0	
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	99	99	102	99	99	0	3
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25	25	25	25	25	0	
26	INSPEKTORAT	29	29	29	29	29	0	
27	KECAMATAN TANETE RIAJA	42		42		42	42	
28	KECAMATAN MALLUSETASI	31		31		31	31	
29	KECAMATAN SOPPENG RIAJA	34		34		34	34	
30	KECAMATAN BALUSU	42		42		42	42	
31	KECAMATAN BARRU	32		32		32	32	
32	KECAMATAN PUJANANTING	44		47		44	44	3
33	KECAMATAN TANETE RILAU	34		34		34	34	
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23	23	23	23	23	0	
	JUMLAH	**1619**	**1172**	**1643**	**1105**	**1619**	**447**	**24**

Berdasarkan data yang tercantum dalam table diatas, dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD 2022 dan APBD 2022 .
    a. Sub. Kegiatan dalam RKPD 2024 adalah sejumlah 1619 dan APBD sejumlah 1643 Sub kegiatan.
    b. Untuk jumlah Jumlah sub kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1619 (jumlah pada kolom 7), sedangkan yang tidak sesuai adalah 24 sub kegiatan (jumlah pada kolom 9)

B. Konsistensi Kerangka Pendanaan

Salah satu hal penting dalam muatan RPJMD dan RKPD adalah adanya kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dalam APBD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD.

APBD disusun berpedoman pada KUA-PPAS yang dirumuskan berdasarkan RKPD setelah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karena itu RPJMD sampai dengan APBD memiliki hubungan yang sangat terkait dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran pendanaan belanja langsung dalam RPJMD ke dalam RKPD dan APBD selengkapnya pada setiap perangkat daerah adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.284

Penjabaran Kerangka Pendanaan RPJMD kedalam RKPD dan APBD

Kabupaten Barru Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN OPD 2024							SELISIH KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN		
		RPJMD	RKPD		DPA 2024		APBD				
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RKPD	Rp.	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7) = (4) - (3)	(8) = (6) - (4)	(9) = (6) - (3)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	304.276.884.167	308.110.078.716	101,26	301.168.737.024	97,75	301.168.737.024	98,98	3.833.194.549	(6.941.341.692)	(3.108.147.143)
2	DINAS KESEHATAN	139.273.256.740	137.965.492.401	99,06	164.208.246.830	119,02	134.704.347.686	96,72	(1.307.764.339)	(3.261.144.715)	(4.568.909.054)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	92.634.168.005	56.447.447.691	60,94	55.860.656.112	98,96	55.860.656.112	60,30	(36.186.720.314)	(586.791.579)	(36.773.511.893)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	73.396.398.946	121.341.468.479	165,32			118.615.920.433	161,61	47.945.069.533	(2.725.548.046)	45.219.521.487
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	7.932.831.133	8.322.870.114	104,92	7.907.624.297	95,01	7.937.624.297	100,06	390.038.981	(385.245.817)	4.793.164
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.111.118.082	2.745.289.270	88,24	2.608.257.298	95,01	2.873.192.542	92,35	(365.828.812)	127.903.272	(237.925.540)
7	DINAS SOSIAL	4.406.551.625	3.793.309.583	86,08	3.764.734.455	99,25	3.764.734.455	85,43	(613.242.042)	(28.575.128)	(641.817.170)
8	DINAS TENAGA KERJA	4.157.930.731	1.894.591.009	45,57			2.286.530.720	54,99	(2.263.339.722)	391.939.711	(1.871.400.011)
9	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4.380.686.734	3.979.792.049	90,85			3.909.660.434	89,25	(400.894.685)	(70.131.615)	(471.026.300)
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.707.875.653	8.308.136.175	85,58	9.308.310.348	112,04	9.311.297.798	95,91	(1.399.739.478)	1.003.161.623	(396.577.855)
11	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	30.182.594.024	14.688.831.622	48,67			17.570.634.456	58,21	(15.493.762.402)	2.881.802.834	(12.611.959.568)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.151.834.900	7.451.988.236	144,65			7.491.946.734	145,42	2.300.153.336	39.958.498	2.340.111.834
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.469.171.586	3.948.552.006	72,20	4.048.226.977	102,52	4.048.226.977	74,02	(1.520.619.580)	99.674.971	(1.420.944.609)
14	DINAS PERHUBUNGAN	7.295.103.688	7.531.715.233	103,24			8.012.762.277	109,84	236.611.545	481.047.044	717.658.589
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	10.989.768.684	6.865.682.459	62,47			7.035.664.404	64,02	(4.124.086.225)	169.981.945	(3.954.104.280)

NO	PERANGKAT DAERAH	KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN OPD 2024							SELISIH KERANGKA PENDANAAN DAN ANGGARAN		
		RPJMD	RKPD		DPA 2024		APBD				
		Rp.	Rp.	% RPJMD	Rp.	% RKPD	Rp.	% RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7) = (4) - (3)	(8) = (6) - (4)	(9) = (6) - (3)
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	8.415.254.478	5.527.421.070	65,68			5.813.142.068	69,08	(2.887.833.408)	285.720.998	(2.602.112.410)
17	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.730.244.237	9.147.286.716	62,10			9.591.506.613	65,11	(5.582.957.521)	444.219.897	(5.138.737.624)
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.583.931.842	15.236.046.220	332,38	15.089.218.747	99,04	15.089.218.747	329,18	10.652.114.378	(146.827.473)	10.505.286.905
19	DINAS PERIKANAN	5.916.373.260	4.360.195.263	73,70			4.626.926.923	78,21	(1.556.177.997)	266.731.660	(1.289.446.337)
20	SEKRETARIAT DAERAH	58.396.035.590	51.201.390.227	87,68	40.410.267.551	78,92	49.552.913.435	84,86	(7.194.645.363)	(1.648.476.792)	(8.843.122.155)
21	SEKRETARIAT DPRD	21.029.553.212	29.577.629.077	140,65	24.319.987.508	82,22	29.602.106.257	140,76	8.548.075.865	24.477.180	8.572.553.045
22	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.286.416.947	3.870.875.748	73,22	3.687.538.617	95,26	3.687.538.617	69,75	(1.415.541.199)	(183.337.131)	(1.598.878.330)
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.152.668.879	8.903.479.417	97,28	8.903.479.417	100,00	9.302.088.782	101,63	(249.189.462)	398.609.365	149.419.903
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	121.464.680.638	107.783.246.066	88,74	106.521.325.669	98,83	100.896.262.510	83,07	(13.681.434.572)	(6.886.983.556)	(20.568.418.128)
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.473.768.181	4.075.951.361	54,54	4.197.404.001	102,98	4.197.404.001	56,16	(3.397.816.820)	121.452.640	(3.276.364.180)
26	INSPEKTORAT	9.015.300.248	6.067.144.319	67,30	6.061.041.963	99,90	6.061.041.963	67,23	(2.948.155.929)	(6.102.356)	(2.954.258.285)
27	KECAMATAN TANETE RIAJA	29.352.359.301	3.484.918.209	11,87			3.732.565.069	12,72	(25.867.441.092)	247.646.860	(25.619.794.232)
28	KECAMATAN MALLUSETASI		4.877.242.537	16,62			5.044.147.593	17,18	(24.475.116.764)	166.905.056	(24.308.211.708)
29	KECAMATAN SOPPENG RIAJA		3.487.519.315	11,88			3.637.464.800	12,39	(25.864.839.986)	149.945.485	(25.714.894.501)
30	KECAMATAN BALUSU		2.752.169.890	9,38			2.917.543.466	9,94	(26.600.189.411)	165.373.576	(26.434.815.835)
31	KECAMATAN BARRU		6.759.665.157	23,03			6.843.629.050	23,32	(22.592.694.144)	83.963.893	(22.508.730.251)
32	KECAMATAN PUJANANTING		2.554.989.709	8,70			2.718.121.520	9,26	(26.797.369.592)	163.131.811	(26.634.237.781)
33	KECAMATAN TANETE RILAU		4.025.714.133	13,72			4.454.041.518	15,17	(25.326.645.168)	428.327.385	(24.898.317.783)
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.418.203.769	18.980.736.278	555,28	16.690.779.693	87,94	15.750.201.361	460,77	15.562.532.509	(3.230.534.917)	12.331.997.592
	JUMLAH	**1.000.600.965.280**	**986.068.865.755**	**98,55**	**774.755.836.507**	**78,57**	**968.109.800.642**	**96,75**	**(190.646.255.331)**	**(17.959.065.113)**	**(208.605.320.444)**

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada tabel di atas, antara lain adalah sebagai berikut:

a. RKPD terhadap RPJMD
   1) Jumlah pagu indikatif di dalam RKPD terdapat perbedaan dengan kerangka pendanaan RPJMD, dimana dalam RPJMD sebesar Rp.1.000.600.965.280 sementara dalam RKPD sebesar Rp.986.068.865.755 Dengan demikian terdapat selisih Rp. (14.532.099.525) atau -1,45%
   2) Pagu indikatif RKPD dan kerangka pendanaan RPJMD diperuntukkan pada semua Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
b. APBD terhadap RKPD
   1) Jumlah pagu indikatif di dalam APBD terdapat perbedaan terhadap kerangka pendanaan di dalam RKPD, dimana dalam APBD sebesar Rp. 968.109.800.642 sementara dalam RKPD sebesar Rp. 986.068.865.755 Dengan demikian terdapat selisih Rp. (17.959.065.113) atau -1,82%
   2) Pada APBD terdapat 21 (dua puluh satu) perangkat daerah yang memiliki jumlah pagu indikatif dan angggaran yang lebih besar dari pagu RKPD dengan persentase penambahan, sejumlah 13 (tiga belas) perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu indikatif RKPD.
c. APBD terhadap RPJMD
   1) Jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu RPJMD secara persentase sebesar -3,25% dari pada RPJMD, dengan total selisih Rp. (32.491.164.638).

Pada APBD terdapat 8 (delapan) perangkat daerah yang memiliki jumlah pagu indikatif dan angggaran yang lebih besar dari pagu RPJMD, sejumlah 26 (dua puluh enam) perangkat daerah memiliki jumlah pagu APBD lebih kecil dibanding pagu indikatif RPJMD.

C. Capaian Kinerja dan Anggaran Sub Kegiatan RKPD Tahun 2024

Terkait penggambaran Pelaksanaan Capaian Kinerja pada subkegiatan pada pelaksanan RKPD tahun 2024 terdapat 1846 Subkegiatan dengan jumlah indikator sebanyak 3085 dengan rata- rata capaian kinerja outcome 87.49% dengan interpretasi Tinggi (T) dan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 68.84% dengan

interpretasi Sedang (S) untuk penggambaran pencapaian kinerja subkegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat digambarkan pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.285

Capaian Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN KINERJA SUB KEGIATAN					RATA-RATA CAPAIAN SUB. KEGIATAN (%) DAN PREDIKSI KINERJA			
		JUMLAH SUB. KEGIATAN	JUMLAH INDIKATOR	BELUM TERCAPAI	SESUAI	MELAMPAUI	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	59	59							
2	DINAS KESEHATAN	91								
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	9								
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	122	122							
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	34								
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	31								
7	DINAS SOSIAL	47								
8	DINAS TENAGA KERJA	45								
9	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	42								
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	48								
11	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	116								
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33								
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	39								
14	DINAS PERHUBUNGAN	47								
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	52	52	0	46	6	100	84,45	ST	T

NO	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN KINERJA SUB KEGIATAN					RATA-RATA CAPAIAN SUB. KEGIATAN (%) DAN PREDIKSI KINERJA			
		JUMLAH SUB. KEGIATAN	JUMLAH INDIKATOR	BELUM TERCAPAI	SESUAI	MELAMPAUI	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	61								
17	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	73	73	14	55	4	105	116	ST	ST
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	40								
19	DINAS PERIKANAN	43								
20	SEKRETARIAT DAERAH	64								
21	SEKRETARIAT DPRD	33								
22	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	49								
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	24								
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	102								
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25								
26	INSPEKTORAT	29								
27	KECAMATAN TANETE RIAJA	42								
28	KECAMATAN MALLUSETASI	31								
29	KECAMATAN SOPPENG RIAJA	34								
30	KECAMATAN BALUSU	42								
31	KECAMATAN BARRU	32	32	1	31	0	100	98,76	ST	ST
32	KECAMATAN PUJANANTING	47								
33	KECAMATAN TANETE RILAU	34								
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23								
	JUMLAH	**1643**	**279**	**15**	**132**	**10**	**305**	**116**	**0**	**0**

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian kinerja subkegiatan dengan jumlah sukegiatan sebanyak 1643 dengan jumlah indikator sebanyak 279, dengan interpretasi pencapaian yakni: terdapat 15 Sub kegiatan yang belum tercapai atau secara persentase mencapai 0,91%, untuk Kegiatan dengan interpretasi sesuai sebanyak 132 atau 8,03% dan ada 10 capaian Kegiatan yang melampaui atau sebesar

0,61%. Capaian outcome program pembangunan daerah dan program perangkat daerah dalam RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.286

Capaian Target Outcome Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN TARGET OUTCOME				
		JUMLAH INDIKATOR	RERATA ANGGARAN	BELUM TERCAPAI	SESUAI	MELAMPAUI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	6.489.006.820	4	1	-
2	DINAS KESEHATAN	8	410.858.314	3	-	5
3						
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	6	10.289.755.888	1	1	4
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2	2.706.188.558		2	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3	17.704.470	3		
7	DINAS SOSIAL	2	313.645.375	2		
8	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1	367.606.000	1		
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	82.810.525			2
10	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	4	1.297.766.720			1
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	1.959.434.786			2
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	114.198.400	2		1
13	DINAS PERHUBUNGAN	1		1		
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK					
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	2	393.472.552	1		1
16	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	260.690.730	2		
17	DINAS PERIKANAN	2	491.369.941			2
18	SEKRETARIAT DAERAH	2	2.034.582.160	2		
19	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2	183.081.845	1		1
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4	22.786.099.687	1	3	
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2	390.685.947	1	1	

NO	PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN TARGET OUTCOME				
		JUMLAH INDIKATOR	RERATA ANGGARAN	BELUM TERCAPAI	SESUAI	MELAMPAUI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
22	INSPEKTORAT	1	1.224.007.129	1		
23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2	48.714.225	1	1	
	JUMLAH	**58**	**51.861.680.070**	**27**	**9**	**19**

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat 58 indikator kinerja outcome dalam RKPD Tahun 2024.
2. Sejumlah 27 outcome belum mencapai target dari yang ditetapkan, sementara 9 outcome mencapai target 100%, dan 19 outcome melampaui target yang ditetapkan.

Hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana digambarkan di atas merupakan gambaran kinerja perangkat daerah, mengingat pelaksanaan RKPD dalam operasionalnya dilakukan oleh perangkat daerah. Terkait dengan realisasi program dan kegiatan RKPD berdasarkan tabel-tabel di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:
   1) Faktor utama yang mempengaruhi Tidak tercapainya target indikator antara lain tidak dialokasikannya Anggaran dalam APBD.
   2) Recofusing anggaran sehingga diperlukan penataan ulang penggangaran dan belanja daerah
   3) Tidak diperoleh data yang valid dan terferifikasi dari perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab program/kegiatan.
   4) Tidak dilaksanakan karena perubahan peraturan perundang dan/ atau kewenangan yang mendasari pelaksanaan suatu kegiatan.
   5) Permasalahan teknis lainnya seperti, lelang yang terlambat, cuaca, dan lain-lain.
b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:

1) Dianggarkan dalam APBD.
2) Pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
3) Anggaran yang tersedia mencukup untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana.

c. Faktor-faktor penyebab realisasi melebihi target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:
   1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai APBN.
   2) Dukungan stakeholders terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
   3) Penetapan target lebih rendah dari anggaran yang tersedia.
   4) Adanya rescheduling pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

d. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:
   1) Peningkatan pemahaman aparatur perangkat daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
   2) Penyusunan dokumen rencana dan anggaran sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundangan.
   3) Pengelolaan data yang baik.

D. Review Capaian Kinerja RPJMD

Review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai. Review capaian kinerja RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.287

Review Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Visi : Sejahterah																		
	Misi : Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya																		
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,6	72,16							73							
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	68,91	70,28							71,78							
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Persen	85,05	100	12.223.862.400	94,14	10.357.473.620	94,14	84,73	Sangat Tinggi	100	10.357.473.620	94,14	84,73	Belum Mencapai	ST	T	Dinas Pendidikan
		Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam	Persen	92,25	100	44.108.950.779	98,82	17.539.034.579	98,82	39,76	Sangat Tinggi	100	219.998.554.465	98,82	39,76	Belum Mencapai	ST	SR	Dinas Pendidikan

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) (SPM)																	
		Persentase Jumlah warga Negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan (SPM)	Poin	60,71	100	5.833.562.700	100	3.692.800.000	100	63,30	Sangat Tinggi	100	27.267.633.500	100	63,30	Mencapai	ST	S	Dinas Pendidikan
	Sasaran 2 : Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	75,25	76,93							77,93							
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan layanan Kesehatan (SPM)	Persen	100	100	980.571.125	89		89		Tinggi	100	4.942.371.673	89		Belum Mencapai	T		Dinas Kesehatan
		Persentase	Persen	100	100	193.395.8	87		87		Tinggi	100	976.745.53	87		Belum	T		Dinas

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)				10							8			Mencapai			Kesehatan
		Angka Status Gizi Masyarakat	Persen	89	91,57	1.835.162.021	88,7		96,87		Sangat Tinggi	92,97	9.255.472.016	96,87		Melampaui	ST		Dinas Kesehatan
		Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	80	84	660.559.630	102		121,43		Sangat Tinggi	87	3.336.156.420	121,43		Melampaui	ST		Dinas Kesehatan
		Indeks Keluarga Sehat	Poin	0,02	0,05	85.892.764.154	0,3		600		Sangat Tinggi	0,08	429.997.805.688	600,00		Melampaui	ST		Dinas Kesehatan
		Persentase warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	Persen	100	100	8.080.000	88		88		Tinggi	100	40.808.040	88,00		Belum Mencapai	T		Dinas Kesehatan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pememenuhan SDM kesehatan yang kompeten sesuai standar dan peraturan perundang-	Persen	47	83	49.402.000	91,67	659.059.427	110,45	1334,07	Sangat Tinggi	100	242.164.460	110,45	1334,07	Melampaui	ST	ST	Dinas Kesehatan

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		undangan																	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	Persentase penduduk yang menerapkan PHBS	Persen	75	80	187.136.000	60,6	162.657.200	75,75	86,92	Sedang	88	772.718.227	75,75	86,92	Melampaui	T	S	Dinas Kesehatan
5	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Persen	0,42	0,73	302.000.000	0,2	26.003.500	27,40	8,61	Rendah	0,2	1.542.500.000	27,40	8,61	Melampaui	R	SR	DPMDPPKBPPPA
6	Program Pemenuhan HAK Anak (PHA)	Nilai Capaian evaluasi Kabupaten Layak Anak	Angka	601	700	113.000.000	Nindya	139.617.550	Nindya	123,56		970	575.000.000	Nindya	123,56		T	ST	DPMDPPKBPPPA
	Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Kualitas Daya Beli Masyarakat	Paritas Daya Beli	Angka	10,91	11,35							12,02							
7	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	42,3	68	140.000.000	73,76	32.516.500	108,47	23,23	Sangat Tinggi	78	595.000.000	108,47	23,23	Melampaui	ST	SR	Dinas Pertanian & KP
8	Program Stabilitas Harga Barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga antar waktu	Angka	13	10	54.353.617	10	13.830.900,00	100,00	25,45	Sangat Tinggi	10	277.312.163	100,00	25,45	Mencapai	ST	SR	Diskumdag
	Misi 2 : Menciptakan Lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal																		

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Tujuan 2 : Mewujudkan ketahanan terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Poin		0,72							0,8							
	Sasaran 4 : Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	persentase penurunan Korban Meninggal dan hilang karna bencana	Persen	0,004	0,009							0,001							
9	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	Persen	100	100	45.000.000		17.704.470	0,00	39,34		100	330000000	0,00	39,34			SR	BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Persen	100	100	424.145.421		17.704.470	0,00	4,17		100	2.148.880.037	0,00	4,17			SR	BPBD
		Persentase warga negara	Persen	100	100	150.000.000		17.704.470	0,00	11,80		100	680.000.000	0,00	11,80			SR	BPBD

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)																	
10	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	Persen	100	100	1.672.317.476	100	2.650.793.065	100,00	158,51	Sangat Tinggi	100	8.532.164.024,00	100,00	158,51	Mencapai	ST	ST	Satpol PP & Damkar
		Waktu tanggap (response time)	Menit	15	15	55.681.636						15	284.087.714,00						
11	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	Persen	100	100	335.634.088		162.818.650		48,51	Rendah	100	1.721.650.371,00		48,51	Belum Mencapai		Rendah	Dinas Sosial

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		bencana daearah kab/kota (SPM)																	
	Tujuan 3 : Mewujudkan Pengembangan Kemajuan Kebudayaan	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan pemajuan kebudayaan dari 0 menjadi 12,73%																	
	Sasaran 5 : Terwujudnya Penguatan Seni Budaya dan Kearifan Lokal	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara																	
12	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase cagar dan karya budaya yang ditetapkan sebagai WBTB	Persen	0	0,22	657.000.000		792.795.600,00		120,67		0,66	1.285.000.000		120,67			ST	Disdikbud
13	Program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan	Persen	0	0,75	181.450.000		62.930.300,00		34,68		1,5	941.186.000		34,68			ST	Disdikbud

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		dan ditetapkan sebagai WBTB																	
	Misi 3 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan Ekonomi melalui pemanfaatan Sumberdaya Lokal																		
	Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Pemerataan Pembangunan antar wilayah	Indeks Williamson	Poin	0,29	0,28							0,25							
	Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur	Poin	3,583	3,874							3,901							
14	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten /kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	50	54,49	8.000.000.000	274	24.134.100	502,84	0,30	Sangat Tinggi	60	44.500.000.000	502,84	0,30	Malam paui	ST	SR	Dinas PUTR
		Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh	Persen	4,05	6,54	13.425.590.971						9,03	67.498.948.728						

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota																	
15	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	Persen	96.63 Air Minum Layak, dan 62,30 Aman	98,31 66,31	1.651.045.360	100 0,2	1.192.530.133	101,72 0,30	72,23	Tinggi Sangat Rendah	100 72,22	9.803.233.653	101,72 0,30	72,23	Melampaui Belum Mencapai	ST SR	S	Dinas PUTR
16	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	Persen	88,74	100	3.764.022.649	100	97.952.700	100,00	2,60	Sangat Tinggi	100	19.570.609.864	100,00	2,60	Mencapai	ST	SR	Dinas PUTR
17	Program Penyelenggaraan jalan	Tingkat kemantapan jalan kab/kota	Persen	65,12	74,64	38.863.998.923	66,39	57.055.830.042	88,95	146,81	Tinggi	85	200.142.306.812	88,95	146,81	Melampaui	T	ST	Dinas PUTR
18	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara korban bencana yang	Persen	100	100	1.607.775.000	96	20.012.600	96,00	1,24	Sangat Tinggi	100	6.848.975.000	96,00	1,24	Belum Mencapai	ST	SR	Dinas PUTR

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		memperoleh rumah layak huni (SPM)																	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni (SPM)	Persen	100	100	300.000.000						100	1.600.000.000						
19	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase peningkatan kawasan perumahan memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	45	55	348.025.450	96	3.348.075.750	174,55	962,02	Sangat Tinggi	65	1.982.617.200	174,55	962,02	Melampaui	ST	ST	Dinas PUTR
20	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase peningkatan jumlah orang/barang yang terangkut melalui	Persen	2	2	2.105.160.966						2	10.740.531.579						Dishub

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		dermaga/ kapal laut																	
	Misi 4 : Meningkatkan Daya Saing Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan																		
	Tujuan 5 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,41	5,91							7,51							
	Sasaran 7 : Meningkatnya Sektor-Sektor Strategis Prekonomian Daerah	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	Persen	50,27	52,52							53,86							
21	Program Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Miliar	942	350	335.604.949	45,27	367.606.000	12,93	109,54	Sangat Rendah	695	1.712.256.503	12,93	109,54	Belum Mencapai	SR	ST	DPMPTSP
22	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	6203,9	6491	1.550.400.000	20341,1	649.507.530	313,37	41,89	Sangat Tinggi	6986,59	7.908.286.441	313,37	41,89	Melampaui	ST	R	Dinas Perikanan
23	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Total Produksi Produk Olahan Perikanan	Ton	1325,85	1393	250.920.000	2751	333.232.352	197,49	132,80	Sangat Tinggi	1494	1.280.193.879	197,49	132,80	Melampaui	ST	ST	Dinas Perikanan

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
24	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah PAD Pariwisata	Persen	2	2	5.478.986.370	1,03	131.440.000	51,50	2,40	Rendah	2	27.716.806.943	51,50	2,40	Belum Mencapai	R	SR	Disparpora
25	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	Persen		7,45	417.883.501		389.941.460		93,31		6,09	2.099.916.830		93,31			ST	Disparpora
26	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian Perhektar Pertahun	Persen	6,48	7,48	2.047.540.000		2.614.808.407		127,70		8,98	11.333.283.845		127,70			ST	Dinas Pertanian & KP
		Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Pertahun	Persen	1,45	2,95	350.000.000		895027500		255,72		4,45	1.750.000.000		255,72			ST	Dinas Pertanian & KP
27	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Persen	1,43	1,47	9.507.500.000		1.648.714.474		17,34		1,55	48.273.850.000		17,34			ST	Dinas Pertanian & KP
	Sasaran 8 : Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	72,19	74							75							

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	terpadu																		
28	Program Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup	Persentase Penurunan Tingkat Pencemaran dan atau Kerusakan lingkungan hidup	Persen	35	28	260.458.733	97,29	47.892.505	347,46	18,39	Sangat Tinggi	21	1.358.766.566	347,46	18,39	Melampaui	ST	SR	Dinas Lingkungan Hidup
29	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang Tertangani	Persen	80,52	81,63	1.598.950.000	98,5	3.870.977.067	120,67	242,09	Sangat Tinggi	82,74	8.324.226.950	120,67	242,09	Melampaui	ST	ST	Dinas Lingkungan Hidup
	Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, Pembangunan antar wilayah dan Penanggulangan Kemiskinan																		
	Tujuan 6 : Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Antar Masyarakat dan Angka Kemiskinan	Indeks Gini	poin	0,36	0,34							0,31							
	sasaran 9 : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Penganggura n Terbuka	Persen	5,79	5,31							4,45							
		Angka Kemiskinan	Persen	8,26	6,67							6,05							
30	Program Pelatihan	Persentase Tenaga kerja	Persen	25	60	547.467.202	47	124.082.500	78,33	22,66	Sedang	70	2.793.687.949	78,33	22,66	Belum Menca	S	SR	Dinas Tenaga

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	dan Produktivitas Tenaga Kerja	bersertifikat kompetensi														pai			Kerja
31	Program Penempatan Tenaga kerja	Persentase tenag kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	0	12,1	195.708.271	35	16.423.500	289,26	8,39	Sangat Tinggi	19	998.503.630	289,26	8,39	Melampaui	ST	SR	Dinas Tenaga Kerja
32	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	Persen	100	100	75.931.630						100	387.085.321						
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	Persen	100	100	42.000.000						100	217.000.000						
		Persentase	Persen	100	100	42.000.00						100	217.000.00						

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)				0							0						
		Persentase warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tna sosial diluar panti (SPM)	Persen	100	100	78.100.000						100	405.200.000						
		Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Persen	100	100	60.900.000						100	304.500.000						
33	Program Perlindungan dan Jaminan	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan	Persen	100	100	538.683.987		464.472.100		86,22	Tinggi	100	2.828.265.041		86,22	Belum Mencapai		T	Dinas Sosial

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Sosial	Sosial																	
34	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persen	10	10,55	2.806.600.000	10,18	157.836.200	96,49	5,62	Sangat Tinggi	11,54	8.559.800.000	96,49	5,62	Belum Mencapai	ST	SR	Diskumdag
35	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro	Persen	0,46	0,9	321.838.897	20	629.108.904	2222,22	195,47	Sangat Tinggi	1,56	1.642.022.101	2222,22	195,47	Melampaui	ST	ST	Diskumdag
	Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi																		
	Tujuan 7 : mewujudkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	40,34	70							80							
	Sasaran 10 : Meningkatnya kinerja Pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan	Nilai SAKIP	Angka	55,52	65							80							

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	publik yang baik																		
36	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Tingkat Kematangan Organisasi	Angka/ Level	1	1	461.811.900		222.660.020		48,21		2	2.563.098.028		48,21			R	Sekretariat Daerah
37	Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka/ Level	1	2	350.000.000						3	1.825.000.000,00						
38	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Perencanaan, Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD,RKPD) yang sesuai peraturan per UU dan ditetapkan tepat waktu	Persen	100	100	404.000.000	100	183.081.845	100,00	45,32	Sangat Tinggi	100	3.205.000.000	100,00	45,32	Mencapai	ST	R	Bappelitbangda
		Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	Persen	100	100	120.000.000	40	0	40,00	0,00	Rendah	100	710.000.000	40,00	0,00	Belum Mencapai	R	SR	Bappelitbangda
39	Program Pengelolaan keuangan	Persentase penetapan PERDA APBD	Persen	100	100	104.218.767.249	100	45.066.465.201	100,00	43,24	Sangat Tinggi	100	558.988.604.458	100,00	43,24	Mencapai	ST	S	BKAD

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Daerah	tepat waktu dan sesuai peraturan per Undang-Undangan																	
		Persentase Realisasi pengeluaran Kas daerah terhadap realisasi penerimaan kas daerah	Persen	100	100	670.000.000	81,87		81,87		Tinggi	100	3.407.839.400	81,87		Belum Mencapai	T		BKAD
		Persentase penyampaian laporan keuangan ke BPK RI tepat waktu	Persen	100	100	710.000.000	100		100		Sangat Tinggi	100	3.617.017.850	100		Mencapai	ST		BKAD
40	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemberdayaan aset tetap tanah dan bangunan	Persen	100	100	1.097.333.830	100	505.734.172	100	46	Sangat Tinggi	100	5.960.084.605	100	46	Mencapai	ST	R	BKAD
41	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Poin		B (61 - 80)	2.588.427.258	63,74	708.821.943	80	27	Tinggi	A (81-100)	13.676.202.382	80	27	Mencapai	T	SR	BKPSDM
42	Program Pengembangan Sumber Daya	Persentase PNS yang mengikuti Pengembangan	Persen	5	80	1.145.006.500	8,27	72.549.950	10	6	Sangat Tinggi	100	5.389.241.250	10	6	Belum Mencapai	SR	SR	BKPSDM

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Manusia	kompetensi 20 JP pertahun																	
43	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan eksternal (temuan BPK) dan internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti	Persen		90	2.507.762.000	94	1.224.007.129	104	49	Sangat Tinggi	95	12.469.358.000	104	49	Belum Mencapai	ST	R	Inspektorat
	Sasaran 11 : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,27	3,7							4,25							
44	Program pendaftaran penduduk	Persentase perekeman E-KTP el	Persen	99	99	246.649.500	98,06	182.416.400	99	74	Sangat Tinggi	99	1.233.841.500	99	74	Belum Mencapai	ST	S	Disdukcapil
45	Program pencatatan Sipil	persentase kepemilikan akte kelahiran	Persen	89	98	179.773.000	96,94	62.184.800	99	35	Sangat Tinggi	99	899.255.250	99	35	Belum Mencapai	ST	SR	Disdukcapil
46	Program Pelayanan	Persentase peningkatan	Persen	94,98	97,99	532.892.672	98	97.994.000	100	18	Sangat Tinggi	100	2.718.818.496	100	18	Melampaui	ST	SR	Disdukcapil

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Penanaman Modal	ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan																	
	Misi 7 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama																		
	Tujuan 8 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama	Angka Kriminalitas	Persen	7,6	6,1							5							
	Sasaran 12 : Meningkatnya Penerapan nilai-nilai Agama, norma-norma hukum dan ideologi kebangsaan pada	proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Persen	0,002	0,001							0							

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	masyarakat																		
47	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM)	Persen	100	100	1.097.437.758	100	2.761.584.050	100	252	Sangat Tinggi	100	5.550.147.614	100	252	Mencapai	ST	ST	Satpol PP & Damkar
48	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pelaksanaan kebijakan pembinaan dan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persen	100	100	121.136.061	100	16.819.400	100	14	Sangat Tinggi	100	618.036.202	100	14	Mencapai	ST	SR	Badan Kesbangpol
49	Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	presentase pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	Persen	100	100	23.812.710.579	50	3.846.504.300	50	16	Sangat Tinggi	100	121.299.856.297	50	16	Belum Mencapai	S	SR	Sekretariat Daerah

No	Isi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcom	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target RPJMD Kabupaten Pada RKPD Kabupaten Tahun Ke- 2024		Capaian Target RPJMD Kabupaten Melalui pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Realisasi 2024 (Triwulan IV)		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun Ke-(%) 2024 (Triwulan IV)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Rasio Capaian Akhir		Interpretasi capaian pelaksanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kinerja	Rp.	capaian	Rp.			Predikat Kinerja 2024	Target	Rp.	(%) K	(%) Rp.	K		Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
50	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	presentase penurunan konflik sosial dilingkungan masyarakat	Persen	50	50	335.447.121	20	80.609.050	40	24	Rendah	50	1.711.451.262	40	24	Belum Mencapai	R	SR	Badan Kesbangpol

2.4. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2026, tidak jauh dari permasalahan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya dicapai. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan yang perlu diselesaikan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu, sub bab ini berupaya mengungkap berbagai permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Barru ditinjau dari level makro daerah untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan permasalahan pembangunan daerah dalam level mikro sektoral / penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk menentukan program prioritas daerah.

2.4.1. Permasalahan Umum Daerah

- Aspek Geograf dan Demografi

  Masalah utama terkait dengan aspek geografis dan demografis Kabupaten Barru terutama terkait dengan kondisi menurunnya fungsi lingkungan dan meningkatnya potensi bencana. Secara detail permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

  1. Peningkatan potensi Alih fungsi lahan dan hutan

     Alih fungsi lahan dan hutan di Kabupaten Barru telah menjadi permasalahan dalam konteks pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Proses konversi lahan, baik untuk pertanian, pemukiman, maupun infrastruktur, berpotensi menyebabkan degradasi ekosistem yang signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barru, distribusi luas kawasan hutan menurun. Alih fungsi hutan yang tidak terkendali dapat memperburuk kerusakan tanah, mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap karbon, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Di samping itu, perubahan penggunaan lahan ini berpotensi meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang dapat menurunkan kualitas hidup dan mengancam keselamatan masyarakat setempat.

2. Peningkatan Risiko Bencana Hidrometeorologi

   Kabupaten Barru merupakan wilayah yang memiliki kerentanannya terhadap bencana hidrometeorologi yang besar. Dengan tren yang terus meningkat akibat perubahan iklim sesuai data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan kondisi ini sangat penting untuk terus memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih baik, melalui pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana serta penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko perubahan iklim dan bencana alam. Serta dengan terus mendorong peningkatan kemampuan petugas penanganan bencana secara berkelanjutan

3. Polusi Udara dan Pengelolaan Sampah yang belum Optimal

   Polusi udara dan pengelolaan sampah yang tidak optimal menjadi isu lingkungan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Barru terutama di sektor kesehatan. Pengelolaan sampah yang tidak efisien, yang tercermin dari minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, memperburuk kondisi lingkungan dan meningkatkan risiko polusi. Sampah yang tidak dikelola dengan baik, baik sampah rumah tangga maupun limbah industri, berpotensi menyebabkan pencemaran udara dan air, yang pada gilirannya dapat memicu gangguan kesehatan dan penyebaran penyakit di tengah masyarakat.

4. Minimnya Edukasi dan Pengawasan dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam.

   Kurangnya edukasi dan pengawasan yang efektif dalam pengelolaan lingkungan menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Kabupaten Barru. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan pencapaian yang relatif tinggi, yaitu mencapai angka 98,68% dari target yang ditetapkan, tantangan yang lebih besar terletak pada implementasi kebijakan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan. Pengawasan yang tidak optimal terhadap kegiatan alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, serta pemanfaatan sumber daya alam lainnya menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan yang lebih intensif dan pengawasan

yang lebih ketat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan tidak merusak keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup yang ada.

- Aspek Kesejahteraan Masyarakat

  Masalah utama kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barru erkait dengan angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada tahun 2024 angka kemiskinan Kabupaten Barru sebesar 8,31 %, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,42%. Masalah utama ini kemudian dijabarkan dalam masalah-masalah daerah yaitu:

  1. Penanganan kemiskinan yang belum optimal

     Tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru berfluktuasi dari tahun 2014 hingga 2024, dengan persentase angka kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 9,74 persen, dan yang terendah di tahun 2020 sebesar 8,26 persen. Tingkat kemiskinan Kabupaten Barru pada tahun 2024 sebesar 8,31% dan diatas angka kemiskinan provinsi sulawesi selatan yang angkanya berjumlah 8,31%. Hal tersebut memberi gambaran bahwa upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Barru masih belum sesuai harapan.

  2. Masih rendahnya angka partisipasi angkatan kerja

     Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru di tahun 2023 sebesar 62,26%, dan menurun di tahun 2024 sebesar hanya 59,32% . Rendahnya angka partisipasi angkatan kerja disebabkan oleh calon tenaga kerja yang kurang terampil, pengembangan wirausaha belum optimal serta pengembangan UMK belum memadai. Selain itu terdapat juga permasalahan lain seperti masih rendahnya kualitas lulusan lembaga pelatihan serta belum optimalnya link and match antara dunia pelatihan dengan dunia industri.

  3. Belum Optimalnya Infrastruktur Kesehatan

     Kabupaten Barru menghadapi tantangan serius dalam hal ketersediaan infrastruktur kesehatan dan kelangkaan air bersih yang semakin memburuk akibat degradasi sumber daya alam. Belum optimalnya layanan kesehatan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, menjadi salah satu

indikator ketimpangan dalam penyediaan fasilitas kesehatan. Situasi ini diperburuk oleh terbatasnya sarana dan prasarana sanitasi serta pengelolaan sampah, yang berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

4. Kerentanan Sosial dan Ekonomi terhadap Dampak Lingkungan dan Perubahan Iklim

   Dampak lingkungan dan perubahan iklim di Kabupaten Barru tidak hanya mempengaruhi aspek ekologis, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Peningkatan angka kematian bayi yang terjadi, dari 27 kasus pada tahun 2023 menjadi 35 kasus pada tahun 2024, menunjukkan bahwa perubahan kondisi lingkungan yang memburuk dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat Barru sangat sensitif terhadap perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu, dan frekuensi bencana alam dapat mempengaruhi hasil pertanian dan perikanan, yang pada gilirannya memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kelompok masyarakat miskin yang bergantung pada sektor-sektor tersebut paling rentan terhadap dampak tersebut. Oleh karena itu, upaya pengurangan kerentanan sosial dan ekonomi terhadap dampak perubahan iklim harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

- Aspek Daya Saing Daerah

  1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah

     Kualitas SDM dapat diukur dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai Indeks IPM Kabupaten Barru mengalami tren peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, hal tersebut terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita, meskipun demikian capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Barru tahun 2024 yang mencapai angka 74,51 masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di angka 75,18. Capaian IPM Kabupaten Barru yang masih lebih rendah dari nilai IPM nasional dipengaruhi oleh faktor Umur Harapan Hidup (UHH) yang masih di angka

72,57 tahun, masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional yang mencapai angka 73,93 tahun, dan berada pada urutan terakhir dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Akses pendidikan yang belum merata juga menjadi salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Barru yang berada pada angka 8,54 tahun. Pengeluaran per kapita yang masih rendah juga menyebabkan rendahnya IPM Kabupaten Barru. Pengeluaran per kapita hanya di angka 11,7 juta yang masih dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan

2. Minimnya Inovasi daerah

   Tahun 2023 capaian indeks Inovasi daerah di Kabupaten Barru sebesar 48,50 poin atau masuk dalam kategeri inovatif, akan tetapi pada tahun 2024 capaiannya menurun dan dikategorikan kurang inovatif. Hal ini perlu mendapat perhatian bersama mengingat inovasi daerah penting ketika melihat realitas bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Tidak semua kebijakan atau program pembangunan yang diterapkan di satu daerah dapat diimplementasikan dengan efektif di daerah lain. Oleh karena itu, inovasi daerah menjadi sangat penting untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh masing-masing daerah.

- Aspek Pelayanan Umum

1. Daya saing daerah yang masih belum optimal

   Capaian indeks daya saing daerah Kabupaten Barru tahun 2024 sebesar 3,42 dan masih berada di bawah indeks daya saing daerah provinsi sulawesi selatan yang sebesar 3,61. Belum optimalnya daya saing daerah Kabupaten Barru dikontribusi oleh keterbatasan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan mobilitas. Jalan yang rusak, terbatasnya akses transportasi, serta minimnya fasilitas umum dan digitalisasi yang menjadi hambatan bagi pengembangan industri dan sektor-sektor lainnya. Selain itu ada juga permasalahan terkait rendahnya kualitas lingkungan yang mampu mendorong para produsen untuk menjadi lebih inovatif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Peningkatan daya saing daerah perlu didorong dengan hadirnya kebijakan daerah yang mendukung fleksibilitas pasar tenaga kerja,

pelatihan keterampilan, dan insentif bagi perusahaan untuk merekrut lebih banyak pekerja yang dapat membantu menekan angka pengangguran dan perbaikan infrastruktur secara berkelanjutan.

2. Pelayanan publik yang masih belum optimal

   Capaian indeks pelayanan publik tahun 2024 yang menurun dibandingkan tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Barru belum memadai. Urgensi pelayanan publik sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan kelancaran administrasi di daerah. Selain itu pelayanan publik juga sangat terkait dengan hadirnya layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.

   Selain itu ada masalah terkait dengan belum optimalnya implementasi SPBE di Kabupaten Barru, padahal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. SPBE adalah suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, termasuk dalam hal pelayanan publik, pengelolaan data, hingga pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat.

2.5. Isu Strategis

1. Dinamika Politik Global

   Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

   Perang antara Rusia dan Ukraina serta perang antara israel dan palestina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut China Selatan.

Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Hal tahu krisis ini berlanjut hingga kapan karena dengan pengaruh perang ini hingga sangat dirasakan di Indonesia hingga pada level Kabupaten, di Kabupaten Barru sendiri, telah dilakukan berbagai upaya dalam menekan angka inflasi dan krisis pangan, alokasi APBD banyak diarahkan untuk penanganan hal tersebut.

2. Tingginya Potensi Pergeseran Jumlah Penduduk Kelas Menengah Dunia

   Menurut Laporan Pew Research Center tahun 2024, dalam satu decade terakhir ada sekitar 63 juta orang yang masuk ke dalam golongan kelas menengah khususnya di Benua Amerika. Begitupula di Benua afrika dan asia, diperkirakan ada potensi peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah hingga 200 persen. Pada 2030 diperkirakan sekitar 65 persen dari masyarakat kelas menengah hidup dan tinggal di Asia Pasifik. Seiring dengan bertambahnya masyarakat golongan kelas menengah ini, keadaan ekonomi mereka juga bertambah makmur, menciptakan konsumen baru dengan daya beli yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ekspansi yang cepat ini tidak hanya menciptakan perubahan ekonomi, namun juga mendorong peningkatan permintaan akan barang- barang berkualitas yang lebih tinggi.

3. Potensi Dan Dampak Terjadinya Perubahan Iklim

   Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Hal ini akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi dengan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lebih rendah di berbagai sektor, seperti sector energi, industri, lahan, kelautan dan

pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

4. Terjadinya Perubahan Struktur Tata Kelola Keuangan Global

   Bank dunia memprediksi terjadinya perubahan struktur tata kelola keuangan global, pasca pandemi covid 19 yang harus disikapi agar dapat kembali ke jalur pertumbuhan serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial. Reformasi ini meliputi penguatan lembaga pendanaan global dan pengendalian inflasi secara berkelanjutan.

   Salah satu dampak perubahan struktur tata Kelola keuangan adalah bergesernya dominasi pemerintah ke sistem/mekanisme pasar dan membuat nilai saham cenderung menjadi menurun dan nilai mata uang domestik menurun. Terkait dengan perubahan ini pemerintah Pusat dan daerah termasuk pemerintah Kabupaten Barru harus mempu mensinergikan berbagai program dalam penanganan inflasi, penguatan pendanaan dalam negeri, serta peningkatan dukungan terhadap lembaga keuangan dalam mendukung pembangunan.

5. Tingginya Potensi dan Ancaman Urbanisasi Penduduk Dan Tenaga Kerja Dunia

   Era keterbukaan migrasi tenaga kerja seperti sekarang ini mendorong kita untuk menyiapkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja domestik agar bisa bersaing di tingkat global, serta menyediakan lapangan kerja yang memadai. Saat ini dengan terbatasnya kesempatan kerja di Indonesia, pekerja Indonesia berketerampilan rendah mencari pekerjaan di luar negeri. Negara- negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Republik Korea berhasil mengubah pertumbuhan ekonominya menjadi pertumbuhan lapangan kerja, dan dengan meningkatnya integrasi ekonomi dan berkurangnya hambatan untuk bermigrasi, maka semakin mudah bagi tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri.

6. Terjadinya perang dagang Global dan perubahan Konstalasi Perdagangan Global

   Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendrong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia – Afrika. Perekonomian negara berkembang diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam

forum G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intraasia yang menujukkan tren yang berlanjut terutama dari tiongkok, india, dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria, dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

7. Tingginya Kecepatan Perubahan Teknologi Dunia

   Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal, yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya distrupsi teknologi. Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor.

   Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan Koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisini. Digitalisasi usaha dapat menndorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisien usaha sehinggan dapat meningkatkan produktifitas.

8. Tingginya Perkembangan Jumlah Penduduk

   Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa pada 2023. Jumlah tersebut naik 1,1% dibandingkan jumlah penduduk tahun lalu yakni pada tahun 2022 yang berjumlah sebanyak 275,7 juta jiwa. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan jumlah penduduk nasional setiap tahunnya yang bertambah secara konstan. Di Kabupaten Barru sendiri tren peningkatan penduduk setiap tahunnya secara konstan juga terjadi dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebesar 2,13 persen. Sampai dengan tahun 2045 proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Barru

mencapai angka 266.264 jiwa atau meningkat sebesar sekitar 38,77 persen dari jumlah penduduk di kabupaten Barru pada tahun 2022 yang hanya mencapai 191.895 jiwa. Tingginya jumlah penduduk ini yang trennya selalu meningkat setiap tahunnya harus disikapi dengan pemerataan pembangunan secara inklusif dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana layanan publik yang memadai dan berkualitas yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk secara berkelanjutan.

9. Potensi SDA Dan Maritim

   Kekayaan alam merupakan modal dasar pembangunan nasional untuk kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kekayaan alam termasuk di dalamnya sumber daya alam yang bersifat ekstraktif meliputi hutan, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral, serta sumber energi baru dan terbarukan, serta keanekaragaman hayati yang mencakup keragaman genetik, spesies dan ekosistem.

   Hutan tropis Indonesia yang luas memiliki fungsi sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, penggerak aktivitas ekonomi dan aktivitas social budaya masyarakat. Indonesia memiliki 125,57 juta hektar kawasan hutan yang terdiri dari 120,25 juta hektar kawasan hutan daratan dan 5,32 juta hektar kawasan hutan yang berupa hutan konservasi perairan. Kawasan hutan daratan meliputi hampir 63 persen dari luas total wilayah daratan Indonesia. Selain berfungsi sebagai penyedia jasa lingkungan seperti pengatur tata air, penyerap dan penyimpan karbon, hutan dan laut juga berfungsi sebagai sumber mata pencaharian dan tempat aktivitas social budaya masyarakat.

10. Tingginya Tuntutan Transformasi Digital dan E-Government

    Transformasi digital adalah proses yang diterapkan organisasi untuk mengintegrasikan teknologi digital di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Proses ini secara mendasar mengubah cara organisasi untuk menyediakan layanan dan melaksanakan proses kerjanya. Transformasi digital menciptakan pergeseran budaya dalam organisasi. Di sector pemerintahan sendiri transformasi digital ditandai dengan pelaksanaan E-Government. E-government merupakan upaya sistematis untuk mengembangkan penyelenggaraan proses kerja pemerintah dan penyediaan layanan

publik yang berbasis elektronik dan digital. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi., untuk meningkatkan efisiensi internal, kualitas pelayanan publik, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang demokratis.

Pelaksanaan e-Government sendiri lahir terutama untuk mengakomodir tuntutan penyedian layanan publik yang semakin berkembang, apalagi apabila dikaitkan dengan era society 5.0 yang mana masyarakat akan sangat familiar dengan perkembangan tekhnologi dan penggunaan perangkat digital. Pemerintah Kabupaten Barru sendiri telah memulai untuk menerapkan e- government melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berbagai inovasi pelayanan publik yang berbasis digital. Kedepannya penerapan tranformasi digital dan e- government di Kabupaten Barru perlu terus didorong dengan tetap mengacu pada prinsip efisiensi, efektifitas dan taat azas.

11. Tuntutan Penerapan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

    Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten sebesar sekitar 6% per tahun selama 15 tahun terakhir. Dengan citacita untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2030, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga inklusif dan berkelanjutan, agar dapat memberikan standar kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakatnya. Pertumbuhan Ekonomi Hijau mendukung Indonesia dalam mencapai cita-cita yang ambisius untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan inklusif di tiga sektor prioritas yaitu energi berkelanjutan, lanskap berkelanjutan dan infrastruktur berkelanjutan dalam konteks Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Pertumbuhan yang inklusif dan merata, ketahanan social, ekonomi dan lingkungan, ekosistem yang sehat dan produktif dalam menghasilkan jasa ekosistem serta penurunan emisi GRK.

    Program Pertumbuhan Hijau terus melakukan upaya-upaya serius untuk memastikan pertumbuhan yang lebih hijau dan kemajuan yang lebih hijau tercemin dalam RPJMN. Prioritas ini mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak serta komitmen internasional negara Indonesia untuk mewujudkan Kontribusi yang

Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Prinsip, konsep dan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia untuk membantu negara ini mewujudkan cita-cita yang ambisius tersebut.

12. Tingginya Ancaman Kerawanan Pangan

    Indonesia memiliki potensi sumber daya dan keragaman hayati yang besar yang berasal dari sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan dan energi dan lainnya sehingga mempunyai peluang untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, namun berdasarkan hasil analisis ketahanan dan kerentanan pangan masih terdapat daerah-daerah di Indonesia yang berpotensi rawan pangan dan gizi baik itu kerawanan transien maupun kerawanan kronis. Selain itu, kondisi geografis Indonesia mengakibatkan Indonesia sebagai wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam.

    Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA), jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan terus menurun sejak tahun 2018 sampai tahun 2020. Penurunan tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah kabupaten/kota tahan pangan, yang artinya situasi ketahanan pangan nasional semakin membaik. Namun demikian, pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota yang rentan rawan pangan dari 70 kabupaten/kota menjadi 74 kabupaten/kota. Sebaran daerah rentan rawan pangan berada di Wilayah Indonesia Timur, Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan Wilayah Kepulauan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor antara lain produksi pangan wilayah lebih kecil dibanding kebutuhan, prevalensi balita stunting tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk miskin tinggi.

    Dampak kerawanan pangan dan gizi akan menjadi lebih signifikan untuk rumah tangga lapisan sosial-ekonomi kelas bawah. Kejadian kerawanan pangan jika tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi krisis pangan sehingga masalah kerawanan pangan harus diketahui dan segera diselesaikan oleh pengambil kebijakan. Dengan mengetahui keadaan pangan di wilayah masing-masing hingga ke

tingkat rumah tangga, maka akan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang sesuai kondisi wilayah mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota hingga ke rumah tangga.

13. Potensi Bonus Demografi

    Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, Indonesia memiliki potensi pasar yang tinggi. Hal tersebut juga berimbas pada potensi bonus demografi dan menjadikan Produk Domestik Bruto Indonesia diproyeksi berada di posisi kedua di Asia dengan nilai USD 9,1 triliun pada tahun 2045 yang menandai era Indonesia emas, sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah. Pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2040, Indonesia akan mengalami periode bonus demografi. Pada rentan waktu tersebut, diperkirakan penduduk usia produktif Indonesia akan mencapai presentase 70 persen dibanding total jumlah penduduk. Pada saat itu, sekitar 2 juta penduduk dengan usia produktif diperkirakan akan masuk ke pasar tenaga kerja setiap tahunnya. Untuk memaksimalkan potensi dari bonus demografi tersebut, pengembangan kualitas SDM menjadi sangat krusial.

14. Tingginya Ekspektasi Terhadap Penerapan Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum

    Sejak era reformasi, isu penerapan demokrasi menjadi krusial sebagai pondasi pelaksanan pembangunan yang partisipatif. Aspek terpenting dari Demokrasi adalah prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip ini menekankan bahwa kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dijalankan terutama untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat dijamin haknya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi publik lainnya. Selain itu perlu ditempuh upaya Penguatan Lembaga Demokrasi, penjaminan Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik.

    Berkaitan dengan penerapan demokrasi juga, salah satu isu penting lainnya adalah perlindungan Hak asasi Manusia. Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sendiri telah mengalami kemajuan, di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Pembentukan Komnas Ham dan Pengadilan HAM juga merupakan sebuah kemajuan dalam

penegakan dan pengadilan tentang hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan hak asasi manusia adalah tugas seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tugas bagi lembaga negara saja. Semua lapisan masyarakat tersebut diharapkan dapat berkerjasama dan saling membantu dalam menegakkan hak asasi manusia.

15. Meningkatnya Ancaman Terhadap Stabilitas Politik Dan Keamanan

    Stabilitas politik dan keamanan menjadi elemen penting yang harus diciptakan dan dipelihara dalam mendukung pembangunan nasional. Selain pertumbuhan ekonomi yang stabil, untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 salah satu syarat utamanya adalah terciptanya stabilitas keamanan dan politik. Stabilitas politik dan keamanan diwujudkan melalui penguatan kebebasan sipil dan hak politik, penciptaan kondisi aman, dan peningkatan akses dan kualitas informasi publik. Selain itu pemerintah juga perlu memastikan adanya regulasi yang memadai dan komprehensif, pemerintah disisi lain juga berkewajiban untuk mensosialisasikan kebijakan- kebijakan dalam bidang politik dan keamanan kepada seluruh masyarakat dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan.

16. Integrasi Moda Transportasi Pulau Sulawesi

    Integrasi moda transportasi di Pulau Sulawesi merupakan suatu pendekatan yang penting untuk meningkatkan efisiensi, konektivitas, dan mobilitas di wilayah tersebut. Pulau Sulawesi, dengan karakteristik geografisnya yang unik, memerlukan strategi integrasi moda transportasi yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kehidupan sehari-hari penduduk. Integrasi moda transportasi di Pulau Sulawesi sangat penting dalam rangka membangun jaringan transportasi yang terpadu, termasuk darat, laut, dan udara, untuk memastikan konektivitas yang baik antara berbagai daerah di Pulau Sulawesi. Kondisi infrastruktur dasar maupun konektivitas di Pulau Sulawesi masih belum optimal.

    Pelabuhan yang menjadi simpul utama di Pulau Sulawesi seperti Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara) belum berperan optimal sebagai hub transhipment Kawasan Timur Indonesia (KTI) karena belum optimalnya pengembangan kawasan ekonomi pada hinterland serta belum berkembangnya konektivitas feeder yang menghubungkan Pelabuhan Bitung dengan pelabuhan- pelabuhan di sekitarnya. Di

samping itu, keterbatasan kapasitas dan fasilitas pelabuhan di KTI menyebabkan kapal-kapal kontainer On/Lift-Off atau LoLo) belum beroperasi secara optimal. Kapal RoRo angkutan barang, yang memiliki keunggulan untuk angkutan logistik dengan keterbatasan kedalaman perairan dan fasilitas bongkar muat dan lebih sesuai dengan tipikal Wilayah Sulawesi yang berbentuk semenanjung dan teluk, belum dikembangkan.

17. Cadangan Biosfer Kawasan Marupanne

    Isu strategis terkait cadangan biosfer di daerah mencakup berbagai tantangan dan peluang yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Cadangan biosfer, sebagai kawasan yang dilindungi untuk menjaga keragaman hayati dan ekosistem, memiliki peran vital dalam memastikan keseimbangan ekologi yang mendukung kehidupan manusia.

    Salah satu isu utama yang sering muncul adalah ancaman terhadap kelestarian cadangan biosfer akibat konversi lahan untuk keperluan pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur. Aktivitas manusia ini dapat mengancam habitat alami dan menyebabkan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan cadangan biosfer yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan menjaga fungsi ekologisnya.

18. Potensi Ekonomi Biru

    Ekonomi biru merupakan konsep yang semakin mendapat perhatian dalam fokus pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana, ekonomi biru bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari ekosistem laut dan pesisir tanpa merusak keseimbangan alam. Konsep ini mencakup berbagai sektor, mulai dari perikanan, pariwisata, energy terbarukan, hingga pelabuhan dan transportasi laut.

    Kabupaten Barru dan Kabupaten Sekitarnya di pesisir barat daya Provensi sulawesi selatan dengan garis pantai yang panjang dan berbatasan dengan selat makassar memiliki potensi ekonomi biru yang cukup besar yang harus dioptimalkan. Dari segi pariwisata, potensi pariwisata kelautan dan mangrove dapat menjadi penggerak ekonomi. Selain itu potensi pemanfaatan pelabuhan dan transportasi

laut juga cukup menjanjikan apalagi bila dikaitkan dengan potensi laut yang cukup dalam dan posisi Sulawesi selatan sebagai penyangga Ibukota Nusantara.

19. Transformasi pendidikan nonformal dan pendidikan vokasi

    Transformasi pendidikan nonformal dan penguatan pendidikan vokasi merupakan dua hal penting dalam menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai di dunia kerja. Keduanya berfokus pada pengembangan keterampilan praktis, keterampilan hidup, dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang dapat diakses oleh siapa saja, tanpa terikat pada sistem pendidikan formal. Pendidikan ini berfokus pada pengembangan keterampilan, karakter, serta pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks transformasi, pendidikan nonformal perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial-ekonomi. Transformasi ini bisa mencakup penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran, pengembangan kurikulum yang berbasis kebutuhan industri dan masyarakat, serta memperluas akses pendidikan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

2.6. Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah dan Surat Mendagri tentang Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA), Jumlah inovasi daerah Kabupaten Barru yang dilaporkan melalui sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) http://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/, pada Tahun 2022 berjumlah 18 (delapan belas) Inovasi. Terdiri dari 16 Inovasi tahapan penerapan, 2 Inovasi tahapan Ujicoba dan Inisiatif. Inovasi daerah yang telah dilaporkan melalui aplikasi indeks inovasi daerah menentukan nilai indeks inovasi Kabupaten Barru yang ditetapkan melalui surat keputusan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022.

Hasil penilaian Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri

Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022, dapat disampaikan bahwa Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru sebesar 46.13 dan berada pada kategori Kabupaten Inovatif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai indeks inovasi Kabupaten Barru Tahun 2021 meningkat sebesar 14.15 poin.

Pada Tahun 2023 Jumlah inovasi daerah Kabupaten Barru yang dilaporkan melalui sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) http://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/, berjumlah 30 (tiga puluh) Inovasi. Terdiri dari 15 Inovasi tahapan penerapan, 5 Inovasi tahapan Ujicoba dan 10 Inovasi tahapan Inisiatif. Inovasi daerah yang telah dilaporkan melalui aplikasi indeks inovasi daerah menentukan nilai indeks inovasi Kabupaten Barru yang ditetapkan melalui surat keputusan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023.

Hasil penilaian Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023, dapat disampaikan bahwa Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru sebesar 48.50 dan berada pada kategori Kabupaten Inovatif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai indeks inovasi Kabupaten Barru Tahun 2023 meningkat sebesar 2.37 poin.

Pada Tahun 2024 Jumlah inovasi daerah Kabupaten Barru yang dilaporkan melalui sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) http://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/, berjumlah 14 (empat belas) Inovasi. Terdiri dari 8 Inovasi tahapan penerapan, 4 Inovasi tahapan Ujicoba dan 2 Inovasi tahapan Inisiatif. Inovasi daerah yang telah dilaporkan melalui aplikasi indeks inovasi daerah menentukan nilai indeks inovasi Kabupaten Barru yang ditetapkan melalui surat keputusan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024.

Hasil penilaian Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri pada sistem aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024, dapat disampaikan bahwa Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru sebesar 34,34 dan berada

pada kategori Kabupaten Kurang Inovatif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai indeks inovasi Kabupaten Barru Tahun 2023 menurun sebesar 14,16 poin.

Turunnya nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor struktural, sistemik, dan kebijakan yang saling terkait. Untuk memperbaiki atau mencegah penurunan nilai tersebut, perlu ada perubahan yang mendalam dalam kebijakan, penguatan ekosistem inovasi, serta peningkatan kapasitas SDM di tingkat daerah.

Tabel 2.288
Inovasi Kabupaten Barru yang masuk pada
Innovative Government Award (IGA)
Tahun 2023 – 2024

NO	INOVASI	OPD	INOVASI	OPD	INOVASI	OPD
	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
1.	Bolata Yassiberrui		BOLATA YASSIBERRUI	DINAS KOMINFO	MPOK DARTI (Kelompok Sadar Stunting)	DINAS SOSIAL
2.	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 LaO KeDesa		LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 KIAMiSOL	DINAS DUKCAPIL	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 MATiPPe	DINAS DUKCAPIL
3	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 KIAMiSOL		LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 MATiPPe	DINAS DUKCAPIL	PARENTING (Pemberdayaan Remaja Peduli Stunting)	DINAS KESEHATAN
4	KEGIATAN RENCANA KOTA BERBASIS DIGITAL		TARO ADA TARO GAU	DINAS KOPERASI	SI PANCA (Sinergi Pendataan Bencana)	BPBD
5	TARO ADA TARO GAU	DINAS KOPERASI	KITA BERBAGI (Kegiatan Rencana Kota Berbasis Digital	DINAS PUPR	PEPAYA MATANG	DINAS PERTANIAN
6	SIM-KGB Online		GERAKAN JUS MANIS	PUSKESMAS RALLA	TARO ADA TARO GAU	DINAS KOPERASI
7	Sistem Pendaftaran Online Pasien Lama Rawat Jalan	RSUD	PEPAYA MATANG	DINAS PERTANIAN	POSKESMAS (Pos Kesehatan Masjid)	PUSKESMAS PEKKAE

8	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 GISA SiDesaKu MaLePPu		MPOK DARTI (Kelompok Sadar Stunting)	DINAS SOSIAL	KLIK DESA (Klinik Layanan Konsultasi Desa)	DINAS PMDP2KBP 3A
9	KUPAS (UKURAN PAS, AMAN, dan SEHAT) lawan Covid-19		RUKIA (Rumah Klinik Anggaran)	INSPEKTORAT	-	-
10	SIM-MUTASIPD (Sistem Manajemen Rekomendasi Mutasi Peserta Didik)		POSKESMAS (Pos Kesehatan Masjid)	PUSKESMAS PEKKAE	-	-
11	GERAKAN JUS MANIS (Jumat Serentak mendukung aksi hidup sehat)		KLIK DESA (Klinik Layanan Konsultasi Desa)	DINAS PMDP2KBP3A	-	-
12	RUMAH KLINIK ANGGARAN	INSPEKTORAT	SI PANCA (Sinergi Pendataan Bencana)	BPBD	-	-
13	LaNCAR D'DukCapil MPC-19 pada Sektor PTSP		WISATA POSYANDU	PUSKESMAS PALAKKA	-	-
14	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 MATiPPe		Posyandu SUBUR (Sore Hari Bagi Yang Tidak Hadir)	PUSKESMAS MANGKOSO	-	-
15	POSKESMAS (Pos Kesehatan Masjid)	PKM PEKKAE	GEMAR SYANTIK (Gerakan Marennu Sayang Anak, Ibu Dan Keluarga)	PUSKESMAS PUJANANTING	-	-
16	Klik Desa (Klinik Layanan Konsultasi Desa)	DINAS PMDP2KBP3A			-	-

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah ini akan menjadi pedoman dan arah aktivitas pembangunan ekonomi oleh lintas pelaku (stakeholder) untuk mengantar Kabupaten Barru pada kondisi ekonomi yang diharapkan dengan mengembangkan dan memantapkan ketahanan ekonomi daerah. Adapun rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, diuraikan sebagai berikut:

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Barru berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp 9.891 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 5.788 miliar. Ekonomi Kabupaten Barru Tahun 2024 terhadap tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,92 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 15,66 persen, sedangkan kontraksi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan gas sebesar 1,06 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 20,80 persen.

Kinerja perekonomian Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil, terutama didorong oleh sektor pertanian. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11%, meningkat dari tahun sebelumnya. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar, dengan produktivitas yang meningkat dan perluasan lahan sawah. Beberapa poin penting mengenai kinerja perekonomian Kabupaten Barru yakni dari sisi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru cukup stabil, dengan sektor pertanian menjadi penggerak utama, untuk Sektor pertanian memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, didukung oleh peningkatan produktivitas dan perluasan lahan, TKD merupakan sumber pendapatan utama daerah, yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sector sehingga berdampak pada persentase kemiskinan di Kabupaten Barru pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,31%, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya Pada tahun 2024, terdapat 14.640 jiwa penduduk miskin dari total populasi 195.385 jiwa, dari sisi pembangunan manusia juga mengalami dampak yang positif dengan Kabupaten Barru menempati peringkat ke-8 di Sulawesi Selatan dalam hal IPM, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

Kabupaten Barru di tahun 2025 menargetkan angka pertumbuhan ekonomi di 5,74%, dengan asumsi geliat ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat dan stabilitas politik berjalan dengan baik, meskipun di tahun 2025 kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat berdampak pada realisasi program-program pemerintah, namun melalui pembiyaan stimulus yang dikelurakan oleh pemerintah dengan jumlah terbatas, masih optimis dapat mencapai angka pertumbuhan ekonomi, selanjutnya untuk sector kemiskinan di tahun 2025, diharapkan mengalami penurunan di angka 7,45%, pelibatan pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan program bantuan ke masyarakat miskin diharapkan menjadi pengungkit untuk menekan angka kemiskinan.

Selanjutnya pada tahun 2026, melalui pemerintahan baru yang secara efektif merupakan tahun awal pemerintahan, meskipun secara dokumen perencanaan seharusnya dimulai pada tahun 2025, program-program prioritas yang merupakan penjelmaan dari janji politik yang disertai dengan startegi, diharapkan jauh lebih baik, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,81%, kemiskinan ditargetkan berada pada range 7,48 - 6,58 %, pengangguran dapat ditekan di angka 6,24 % dan PDRB dapat meningkat menjadi 58,14 juta rupiah.

3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Barru

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan capaian pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sector, urusan, dan bidang pemerintahan sebagaimana dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Capaian, Target, dan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2029 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barru Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target RKPD 2026	Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2030

1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,51	75,22	73,22	77,97
2	Angka Kemiskinan	%	8,31	7,45	7,48 - 6,58	4,07
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,42	6,33	6,24	4,43
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,92	5,74	5,81	7,03
5	PDRB Perkapita	Juta Rp.	52,28	56,26	58,14	108,75
6	Rasio Gini	Angka	0,354	0,300	0,297	0,288

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Secara umum kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan structural dan mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selaras dengan hal tersebut maka pengelolaan keuangan daerah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan dengan tetap menjaga *fiscal sustainability* jangka menengah.

Perencanaan diarahkan lebih fokus pada program prioritas, efisien dan berdaya saing serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian agar keberlanjutan fiskal dapat dijaga. Kerangka kebijakan fiscal juga harus menjadi aggregate control untuk menjaga konsistensi kebijakan dan sekaligus menjembatani keselarasan antara kebijkan jangka pendek dan jangka menengah melalui pengelolaan fiscal yang konsisten, efektif, hati-hati dan berkelanjutan. Pengelolaan fiscal perlu didorong agar responsive, integrative, komprehensif dan efektif untuk memperkuat pondasi perekonomian daerah.

Dari sisi potensi, untuk pencapaian target perekonomian tahun 2025 dan tahun 2026 Kawasan industri di Kabupaten Barru memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Dengan posisi geografis yang strategis, dekat dengan jalur transportasi utama dan pelabuhan, serta sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Barru dapat menjadi pusat industri yang tidak hanya melayani pasar lokal, tetapi juga pasar internasional. Proyeksi kebutuhan investasi untuk

pengembangan kawasan industri di wilayah ini mencakup beberapa sektor yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Olehnya itu, peluang Kabupaten Barru dalam pengembangan ekonomi biru sangat besar. Berdasarkan data diatas dapat terlihat potensi yang dimiliki Kabupaten Barru dalam pengembangan sektor perekonomian berbasis ekonomi biru, dengan garis pantai sepanjang 78 kilometer, beberapa potensi perairan yang dimiliki Kabupaten Barru diantaranya:

1. Pada bidang Wisata Bahari Kabupaten Barru memiliki 4 lokasi wisata bahari yang terdiri dari Pulau Pannikiang, Pulau Dutungan, Pantai Ujung Batu, dan Pantai Laguna.
2. Dua pelabuhan untuk transportasi Laut yaitu Pelabuhan Garongkong dan Awerange memiliki jumlah angkutan penumpang untuk Tahun 2023 sebesar 59.565 orang. Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap Total PDRB Kabupaten Barru pada Tahun 2023 sebesar 21,14 persen.

Dari potensi ekonomi yang ada, tentu aspek fiscal dan keuangan menjadi penunjang dalam menggerakkan potensi yang ada. Perkembangan berbagai kebijakan terkait kebijakan fiscal dan keuangan yang ditetapkan pemerintah diantaranya:

1. Kebijakan Pemindahan ibukota negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2022. Kebijakan ini merupakan upaya untuk memperbaiki tata Kelola wilayah ibukota negara untuk mewujudkan tujuan bernegara, selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibukota Negara yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan. Sebagai landasan pembangunan IKN di Kalimantan Timur dengan Nama Nusantara.
2. Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada

tanggal 5 Januari 2022. Kebijakan ini merupakan pemuktahiran kebijakan transfer ke daerah yang berbasis kinerja, pengembangan sistem pajak daerah yang efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Kebijakan ini juga mengatur penguatan sistem pajak daerah dan retribusi daerah melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi daerah. Mengatur perencanaan belanja daerah melalui penganggaran belanja daerah, simplikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan belanja daerah yang didasarkan atas standar harga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong penggunaan *creative financing* untuk akselerasi pembangunan di daerah.

3. Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Efisiensi anggara ini diidikasikan akan berlanjut hingga tahun 2026, dengan estimasi efisiensi sebesar 750 Triliun Rupiah.

Ketiga kebijakan diatas akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 akan memberi peluang bagi Kabupaten Barru meningkatan PAD nya melalui peningkatan investasi dan penerimaan pajak daerah. Namun kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran menjadi tantangan besar dalam pembangunan Kabupaten Barru, hal ini disebabkan karena APBD Kabupaten Barru masih sangat tergantung pada Alokasi DAU dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Barru perlu bertransformasi dalam peningkatan PAD.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Global

A. Perekonomian Global

Tantangan perekonomian global di tahun 2026 diperkirakan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti inflasi yang lebih

tinggi dari perkiraan dan persisten, kondisi keuangan yang semakin ketat, perang Rusia melawan Ukraina, dan ketidaksesuaian penawaran-permintaan yang semakin memperlambat prospek ekonomi global. Beberapa tantangan spesifik yang dihadapi oleh perekonomian global di tahun 2026 adalah:

1. Inflasi dan Ketidakstabilan Harga: Inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan belanja masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
2. Ketidakpastian Keuangan: Kondisi keuangan yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Perubahan Iklim dan Energi: Perubahan iklim dan kebutuhan akan energi yang lebih bersih dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan akan investasi dalam infrastruktur yang lebih ramah lingkungan, dan
4. Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat: Pertumbuhan ekonomi yang melambat dapat mempengaruhi kemampuan belanja masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerja sama internasional yang lebih erat dan kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

B. Tantangan Perekonomian Nasional

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 akan membaik meskipun di tengah tantangan dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik ke rentang 4,8%—5,6% pada 2025 dan 4,9%—5,7% pada 2026. dan sejauh ini ekonomi Indonesia sudah memiliki daya tahan tinggi sebagai hasil sinergi berbagai pihak—tercermin dari bangkitnya ekonomi usai pandemi Covid-19.

Kinerja ekspor dioerkirakan akan membaik di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Sementara inflasi akan terus dijaga

pada 2,5±1% pada 2025 maupun 2026 melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Cadangan devisa akan semakin meningkat. Kemudian dari hasil stress test Bank Indonesia bahwa ketahanan sistem keuangan Indonesia berdaya tahan dari dampak gejolak global.

Lima Tantangan Global, BI terus mewaspadai perlambatan ekonomi global pada 2025 dan 2026 akibat kondisi ekonomi dunia yang terus bergejolak dan akan adanya rambatan sebagai efek dari terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. Ketidakpastian global yang masih akan terus berlangsung pada 2025 dan 2026 tercermin dari lima hal.

Pertama, slower and divergent growth yang mana pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi turun pada 2025 dan 2026. Sejalan dengan kebijakan American First, ekonomi AS akan membaik sementara ekonomi Cina dan Eropa akan melambat, namun India dan Indonesia masih akan cukup baik. Kedua, inflasi dunia yang sebelumnya menujukkan arah penurunan, akan turun lebih lambat bahkan berisiko naik pada 2026 karena gangguan rantai pasok dan perang dagang. Ketiga, penurunan suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate (FFR) yang juga melambat. Di sisi lain, imbal hasil atau yield US Treasury (UST) naik tinggi ke 4,7% di 2025 dan 5% pada 2026. Hal tersebut sebagai akibat dari membengkaknya defisit fiskal dan utang pemerintah AS sehingga perlu menarik utang lebih banyak. Keempat, fenomena strong dollar akan segera berakhir. Tercatat sebelumnya indeks dolar atau DXY sempat menuju level 101, setelah terpilihnya Trump terus menguat ke level 107. “Mengakibatkan tekanan depresiasi nilai tukar seluruh dunia termasuk rupiah, semoga dolar AS tidak menguat lagi,” ungkapnya. Kelima, gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia.

C. Tantangan Perekonomian Provinsi

Setidaknya ada lima hal yang menjadi tantangan dan fenomena perekonomia Sulawesi Selatan yakni,

1. Inflasi pada triwulan III-2024 terjaga pada kisaran 1,6 – 1,7 persen (y-on-y),
2. Berdasarkan hasil survei KSA (Kerangka Sampel Area) menunjukkan adanya peningkatan produksi padi dan luas panen jagung (y-on-y) pada triwulan III-2024. Produksi padi naik hingga 6,7 persen. Selain itu, terjadi kenaikan produksi pada sektor perikanan. Produksi rumput laut, budidaya ikan bandeng, serta penangkapan ikan di perairan umum mengalami peningkatan. (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulsel)
3. Terjadi peningkatan perjalanan Wisatawan Nusantara (Wisnus) pada triwulan III-2024 dibandingkan triwulan III-2023, Dampak positif pada sektor akomodasi, tempat rekreasi/hiburan, dan lainnya.
4. Terjadi penurunan produksi ind logam dasar secara y-on-y; Hal ini tercermin pula dengan turunnya penggunaan listrik sektor industri.
5. Peningkatan signifikan pada realisasi belanja pegawai pemerintah; Hal ini dampak penerimaan P3K dan kenaikan gaji dan tunjangan nakes

D. Tantangan Perekonomian Daerah

Secara umum kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan struktural dan mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025-2029. Selaras dengan hal tersebut maka pengelolaan keuangan daerah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga *fiscal sustainability* jangka menengah.

Perencanaan diarahkan lebih fokus pada program prioritas, efisien dan berdaya tahan serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian agar keberlanjutan fiskal dapat dijaga. Kerangka kebijakan fiskal juga harus menjadi *aggregate control* untuk menjaga konsistensi kebijakan dan sekaligus menjembatani keselarasan antara kebijkan jangka

pendek dan jangka menengah melalui pengelolaan fiscal yang konsisten, efektif, hati-hati dan berkelanjutan. Pengelolaan fiscal perlu didorong agar responsive, integrative, komprehensif dan efektif untuk memperkuat pondasi perekonomian daerah.

Peningkatan peran Kabupaten Barru terhadap pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, merupakan tantangan sendiri. Berikut ini akan ditampilkan tabel capaian 2024, perkiraan capaian 2025 dan target 2026 Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Barru.

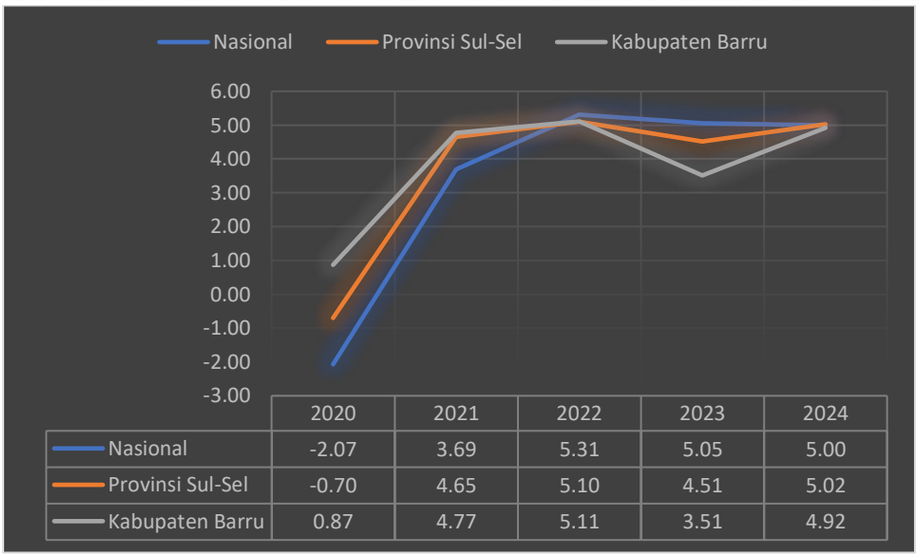
A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Barru pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh produksi di beberapa lapangan usaha mengalami memperlihatkan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya, disamping itu perbedaan perhitungan antara BPS dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru telah dikoordiasikan dan dikomunikasikan dengan baik. Nilai PDRB Kabupaten Barru 2024 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 9,42 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 8,87 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,92 persen, atau meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 3,51 persen.

Kondisi perekonomian Kabupaten Barru sebagaimana dijelaskan diatas serta perannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut :

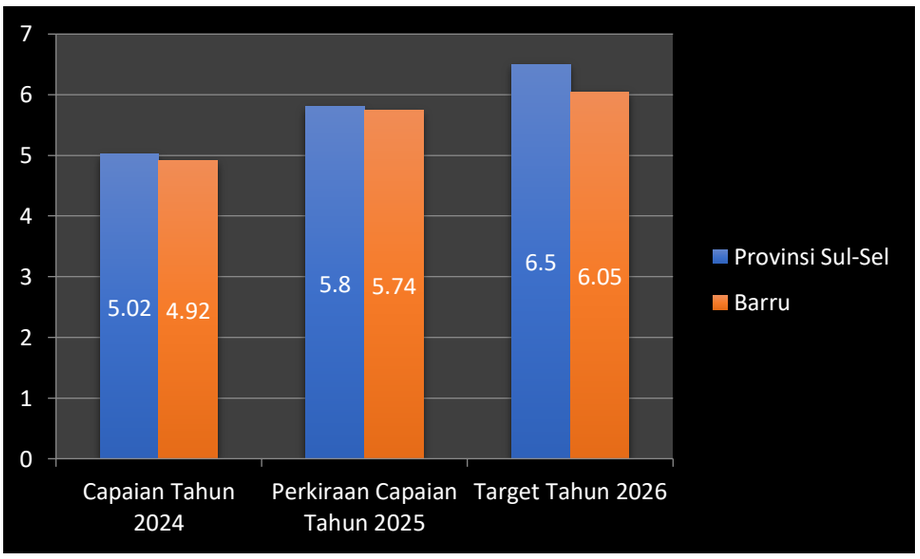
Grafik 3.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	-2.07	3.69	5.31	5.05	5.00
Provinsi Sul-Sel	-0.70	4.65	5.10	4.51	5.02
Kabupaten Barru	0.87	4.77	5.11	3.51	4.92

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Grafik 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025, Ranhir RPJMD 2025-2029

Dari grafik diatas, untuk tahun 2025 dan tahu 2026 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru diproyeksi meningkat, namun dengan adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Disamping itu legalitas dan kesiapan kawasan Industri yang direncanakan mulai tahun 2025 masih dalam proses penyelesaian, sehingga ha ini juga dapat menjadi tantangan sekaligus hambatan.

Selanjutnya berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp 9.891 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 5.788 miliar. Ekonomi Kabupaten Barru Tahun 2024 terhadap tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,92 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 15,66 persen, sedangkan kontraksi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan gas sebesar 1,06 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 20,80 persen, hal ini menunjukkan pada sektor jasa usaha lainnya dapat menjanjikan pertumbuhan yang lebih baik pada tahun 2025 dan 2026, begitupula pada komponan pengeluaran Konsumsi LNPRT.

B. PDRB Per Kapita

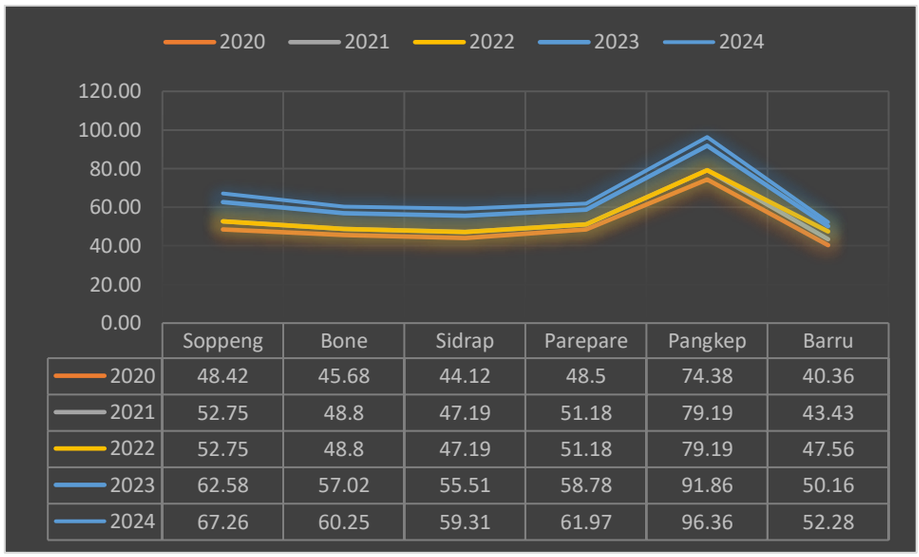
Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Barru atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2020 hingga 2024 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 PDRB per kapita tercatat sebesar 43,43 juta rupiah kemudian tercatat meningkat pada tahun 2022 sebesar 47,56 juta rupiah. Pada tahun 2023 PDRB perkapita Kabupaten Barru ADHB adalah sebesar 50,1 juta rupiah dan tahun 2024 sebesar 52,28 juta rupiah

Kondisi pendapatan per kapita Kabupaten Barru sebagaimana dijelaskan diatas serta perannya terhadap

pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut :

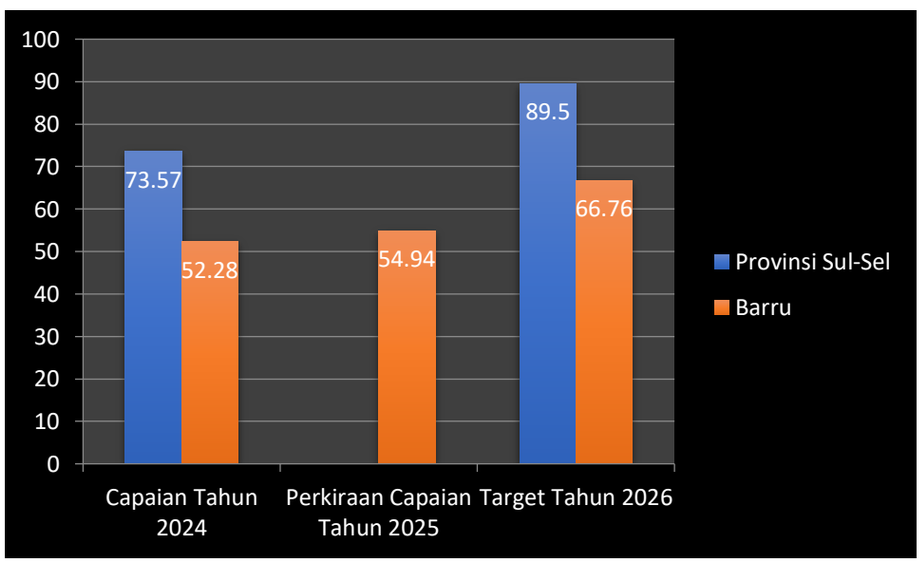
Grafik 3.3
Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020 s.d Tahun 2024 (dlm Juta Rupiah)



	Soppeng	Bone	Sidrap	Parepare	Pangkep	Barru
2020	48.42	45.68	44.12	48.5	74.38	40.36
2021	52.75	48.8	47.19	51.18	79.19	43.43
2022	52.75	48.8	47.19	51.18	79.19	47.56
2023	62.58	57.02	55.51	58.78	91.86	50.16
2024	67.26	60.25	59.31	61.97	96.36	52.28

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Grafik 3.4
PDRB Perkapita Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025, Ranhir RPJMD 2025-2029

Dari grafik diatas, untuk tahun 2025 dan tahun 2026 PDRB perkapita Kabupaten Barru diproyeksi meningkat seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Penngkatan PDRB ini diasumsikan karena beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru yang mendukung pertumbuhan, seperti

investasi, tenaga kerja, UMKM, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengendalian inflasi dan lainnya.

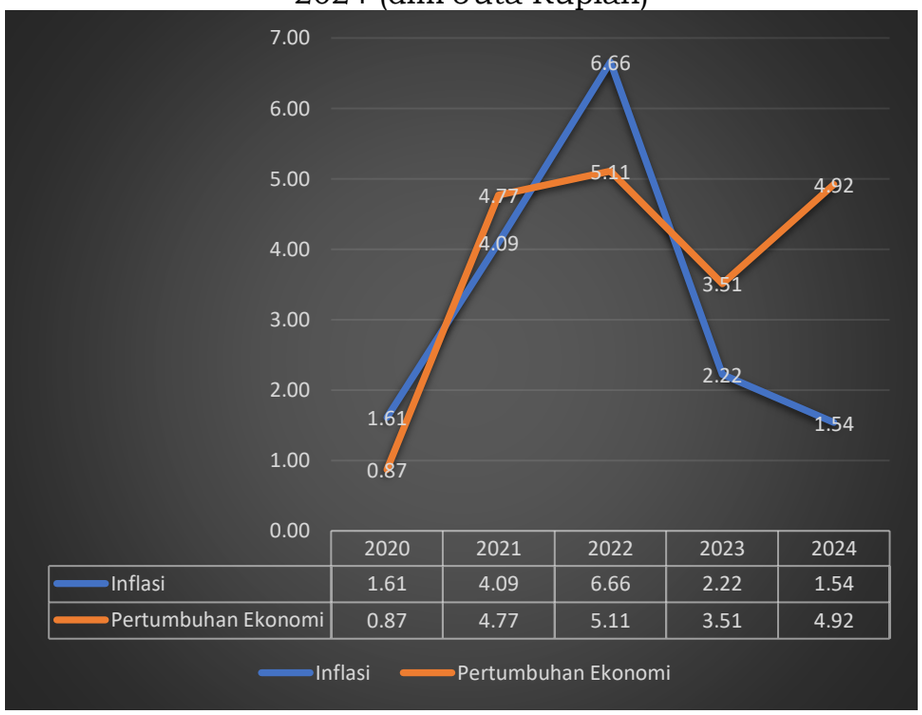
C. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan tingginya inflasi, akan memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

inflasi di hampir seluruh kota di Sulawesi Selatan pada rentang tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi, terjadi peningkatan di periode tahun 2022 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 dan di awal tahun 2025. hal ini tentu harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Barru, karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Kota Pare-Pare yang berbatasan langsung dengannya.

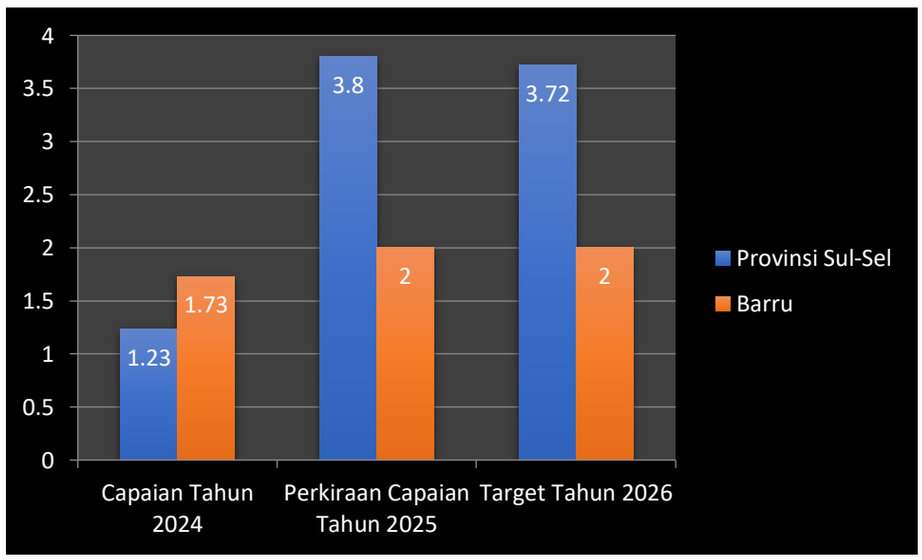
Dalam beberapa teori laju inflasi yang rendah dan stabil akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Barru memperlihatkan inflasi yang fluktuatif, tingginya inflasi di tahun 2021 dan 2022 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru hal ini dikarenakan sektor rill masih mampu terdorong untuk berkembang serta sektor perdagangan berjalan dengan baik. Secara rinci hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.5
Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020 s.d Tahun 2024 (dlm Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Grafik 3.6
Inflasi Kabupaten Barru dan
Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025, Ranhir RPJMD 2025-2029

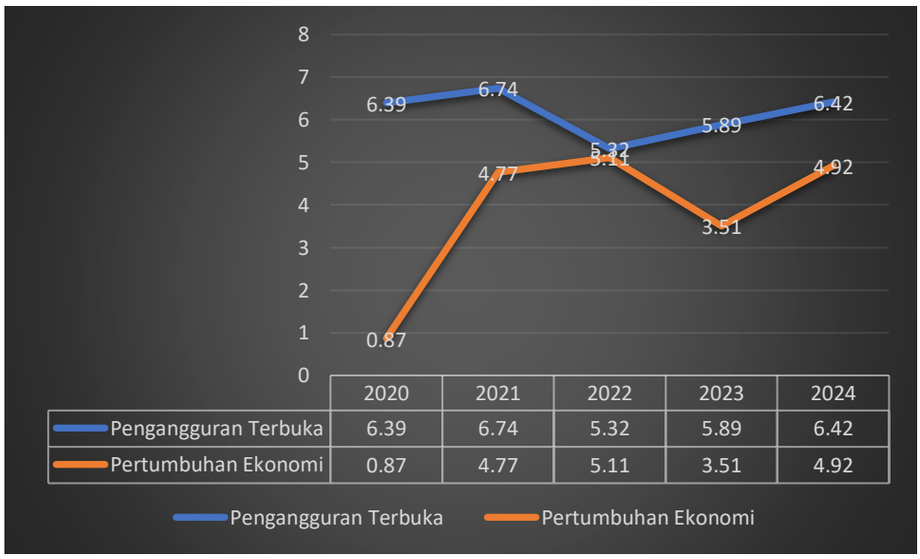
Dari grafik diatas, untuk tahun 2025 dan tahun 2026 Inflasi Kabupaten Barru diproyeksi stagnan. Proyeksi tersebut dengan mempertimbangkan upaya-upaya pemerintah dalam menekan harga, baik melalui operasi pasar maupun pengendalian distribusi barang yang ada di Kabupaten Barru. Inflasi Kabupaten Barru dapat terpengaruh jika kondisi

ekonomi global dan regional tidak menentu, kenaikan harga pangan dan permintaan produk-produk tertentu sangat memicu pergerakan inflasi.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

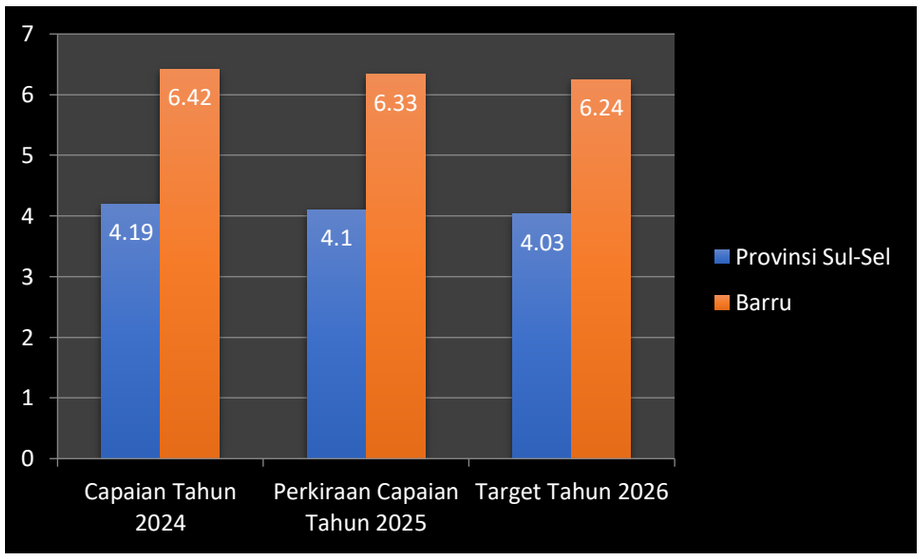
Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan pada Tahun 2024 dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan. Meski mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding dengan periode sebelumnya, lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Sulawesi Selatan. Peran pemerintah Kabupaten Barru terhadap kondisi perbaikan ini belum terlihat, karena lebih tingginya tingkat pengangguran terbukanya yang berada pada angka 6.42 persen, peringkat tiga setelah Makassar dan Palopo.

Grafik 3.7
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Grafik 3.8
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025, Ranhir RPJMD 2025-2029

Dari grafik diatas, untuk tahun 2025 dan tahun 2026 Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru diproyeksi menurun. Proyeksi tersebut dengan mempertimbangkan upaya-upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, peningkatan keterampilan pemuda dan masyarakat dan mendorong keberlanjutan pendidikan. Upaya Pemerintah Kabupaten Barru dalam menghadirkan Kawasan Industri Barru (KIBAR), menjadi hal kongkrit dalam menekan angka pengangguran, hal ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan ekonomi di Kabupaten Barru.

E. Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 angka kemiskinan) sedangkan angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

1. Tingkat Kemiskinan;

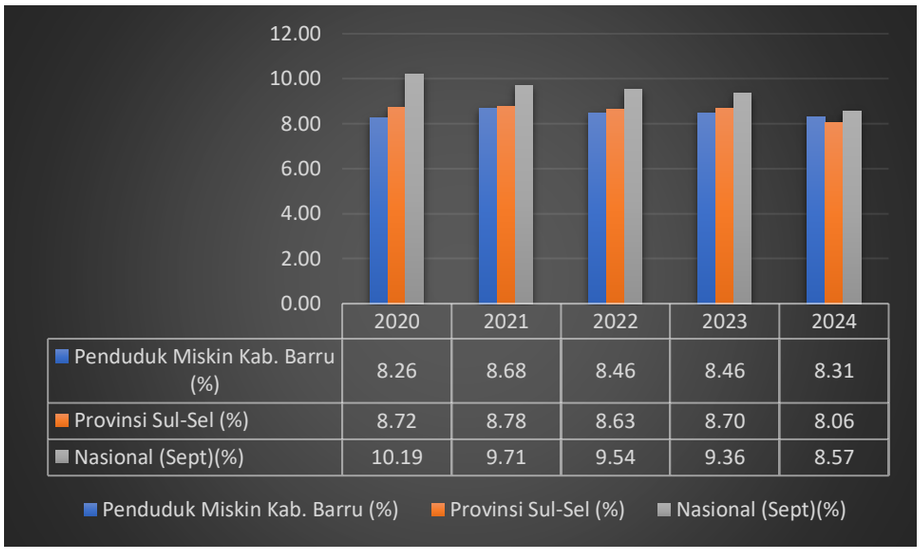
   Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan

maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari Nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Adapun gambaran kemiskinan di Kabupaten Barru dan perannnya terhadap penanggulangan kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.9
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Capaian Nasional, Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Kab.Barru
Tahun 2020 – 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Miskin Kab. Barru (%)	8.26	8.68	8.46	8.46	8.31
Provinsi Sul-Sel (%)	8.72	8.78	8.63	8.70	8.06
Nasional (Sept)(%)	10.19	9.71	9.54	9.36	8.57

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Grafik 3.10
Kemiskinan Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025, Ranhir RPJMD 2025-2029

Dari grafik diatas, untuk tahun 2025 dan tahun 2026 Kemiskinan Kabupaten Barru diproyeksi menurun. Proyeksi tersebut mempertimbangkan upaya-upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan melalui pencanangan Sekolah Rakyat yang juga merupakan program staretgis Nasional, pemberian bantuan baik melalui mekanisme BLT maupun bantuan melalui BAZNAS Kabupaten Barru. Disampin itu melalui Dinas Tenaga Kerja dilakukan pelatihan

keterampilan kerja dan pembedayaan masyarakat melalui Dinas PMDPPKBPPPA.

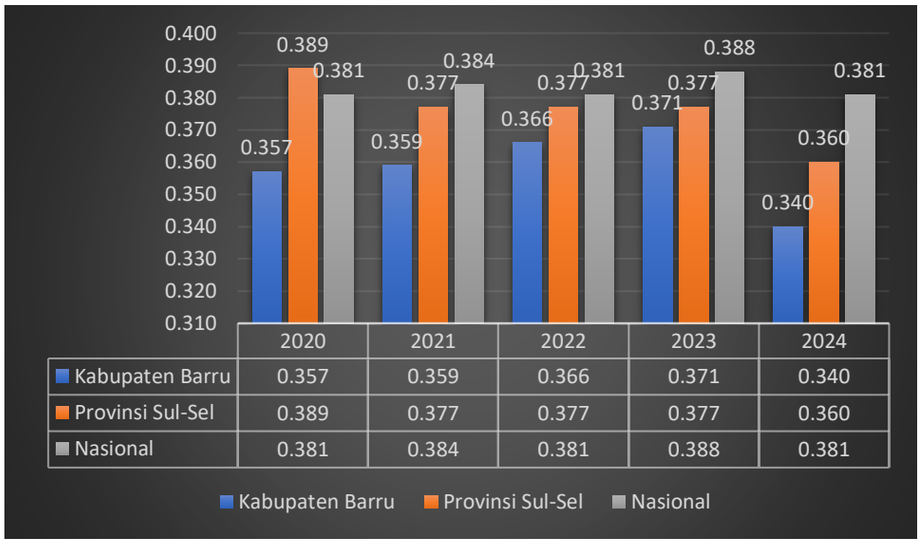
F. Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Gini Ratio Kabupaten Barru sebesar 0,340 berada dibawah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 mencapai sebesar 0,360, atau berada dibawah capaian angka Nasional yaitu 0,381. Untuk tahun 2025, Gini Ratio di Kabupaten Barru di prediksi mencapai nilai 0,353. Dan di Sulawesi Selatan di prediksi akan mencapai angka 0,381, dan di tahun yang sama Nasional memprediksi angka Gini Rasio Indonesia sebesar 0,376–0,378, atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Sementara pada tahun 2024, angka Gini Rasio Sulawesi Selatan di targetkan sebesar 0,381, atau menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan target Nasional sebesar 0,360–0,374 atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Hal Ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup signifikan kenaikannya dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan 2024. Kenaikan Gini Ratio ini disebabkan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan penduduk (didekati dengan pengeluaran) desil 1 meningkat, sementara golongan menengah atas walaupun dari sisi pengeluaran meningkat namun pendapatannya naik. Akibat pendapatan penduduk menengah atas lebih tinggi, maka menyebabkan gap (jarak) antara penduduk miskin dan menengah atas menjadi semakin jauh.

Grafik 3.11

Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru Tahun 2020 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Grafik 3.12

Gini Ratio Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan, Capaian Tahun 2024, Perkiraan Capaian Tahun 2025 dan Target Tahun 2026



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2025, Ranhir RPJMD 2025-2029

Dari grafik diatas, untuk tahun 2025 dan tahun 2026 Gini Ratio Kabupaten Barru diproyeksi menurun. Proyeksi tersebut seiring dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Upaya-upaya kongkrit Pemerintah Kabupaten Barru berupa pengembangan UMKM, operasi pasar, pangan murah, peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan infrastruktur layanan trasnportasi diharapkan dapat menjadi penyeimbang dalam pemerataan

pendapatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Barru.

Dari tantangan berdasarkan indikator makro pembangunan diatas, secara spesifik, tantangan pembangunan Kabupaten Barru di tahun 2026 yakni:

1. Pertanian Dominan, tapi industri pengolahan hasil pertanian tidak berkembang. Hal ini sesuai data kontribusi sektor pertanian di tahun 2019 sebesar 33,82 % dan hingga tahun 2024 kontribusinya 31.46 % dan cenderung menurun. Pada kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2019 sebesar 4,89 % dan di tahun 2024 cenderung meningkat ke 4,97 %.
2. Tingkat pengangguran relatif tinggi dan tingkat produktivitas tenaga kerja relatif rendah,
   a) TPT sebesar 5,89%, tertinggi ketiga di Sulsel, setelah Makassar dan Palopo.
   b) Jumlah pengangguran juga cenderung meningkat.
   c) 41,86% pekerja hanya tamat SD ke bawah;
   d) 41,35% pekerja sebagai buruh/karyawan;
   e) 13,39% pekerja hanya bekerja 1-14 jam perminggu.
3. Lahan pertanian cukup luas, tapi produktivitas lahan relatif rendah,
   a) 63,71% lahan sawah masih tadah hujan;
   b) Tingkat produktivitas padi = 50,79 Ku/Ha.
   c) Tingkat produktivitas padi juga cenderung menurun.
4. Tingkat kemiskinan menurun, tapi jumlah penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) cenderung meningkat. Selama periode 2020 – 2024:
   a) Jumlah penduduk miskin meningkat dari 14.440 jiwa menjadi 14.640 jiwa, meskipun P1 dan P2 cenderung menurun
   b) P1 menurun dari 1,31 menjadi 1,11.
   c) P2 Menurun dari 0,36 menjadi 0,22.
5. Masalah pembangunan yang banyak, namun anggaran terbatas.

a) Pendapatan Daerah cenderung stagnan;
b) Transfer Fiskal berkurang;
c) Daya serap anggaran tidak maksimal;
d) Adanya belanja mandatory dan instruksional.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Mencermati dinamika perekonomian global yang bergerak sangat dinamis, maupun tantangan ke depan maka desain kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi" dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkokoh kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkokoh kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua.

Strategi jangka pendek diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan fiscal dalam meredam gejolak dengan menjaga (i) stabilisasi ekonomi melalui diplomasi ekonomi terkait perdagangan, investasi melalui negosiasi, deregulasi dan perluasan pasar ekspor. Termasuk memperkuat kolaborasi fiskal, moneter, dan sektor keuangan; (ii) melindungi dunia usaha dan daya beli melalui pemberian insentif fiskal, dan berbagai program perlindungan sosial; dan (iii) menjaga APBN tetap sehat dan kredibel dengan mengendalikan defisit dan utang, efisiensi dan rekonstruksi belanja, serta menjaga fiscal buffer dan fleksibilitas.

Sementara itu, strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera melalui 8 (delapan) strategi yang difokuskan pada: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan

energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Untuk merespons gejolak perekonomian global, APBN dioptimalkan sebagai shock absorber untuk meredam gejolak melalui stabilisasi ekonomi, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Upaya stabilisasi ekonomi ditempuh dengan melakukan negosiasi perdagangan dan investasi, deregulasi serta penguatan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan mampu memelihara momentum, menjaga kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi. Hal terefleksi pada pertumbuhan ekonomi yang resilien, terjaganya nilai tukar dan suku bunga, serta terkendalinya inflasi di level rendah. Berikut Strategi Ekonomi Makro Tahun 2026:

1. Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga SBN 10 Tahun

   Pada tahun 2026, kondisi nilai tukar diperkirakan akan lebih stabil dan cenderung menguat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu faktor utama yang mendukung perbaikan nilai tukar adalah potensi penurunan FFR dan kebijakan moneter global yang lebih longgar. Hal ini memberikan ruang bagi kebijakan moneter dalam negeri untuk lebih akomodatif. Selain itu, inflasi domestik yang tetap terkendali berkat sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia turut memperkuat stabilitas ekonomi. Di sisi lain, arus modal asing juga diproyeksikan meningkat, didorong upaya perbaikan sector riil, pengembangan dan pendalaman sektor keuangan domestik, pengembangan sumber pertumbuhan ekspor baru, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2026 berpotensi bergerak dalam kisaran Rp16.500 - Rp16.900 per USD dengan kecenderungan apresiasi.

   Rata-rata suku bunga SBN 10 tahun di tahun 2026 diperkirakan mengalami kecenderungan penurunan bila dibandingkan tahun 2025. Suku bunga SBN 10 tahun pada 2026 akan bergerak pada

kisaran 6,6 – 7,2 persen. Meski akan diwarnai ketidakpastian global khususnya dari perkembangan suku bunga acuan negara maju, namun peningkatan perekonomian domestik diperkirakan akan berdampak positif pada kinerja SBN. Perbaikan kondisi domestik melalui berbagai kebijakan pro-growth diperkirakan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada instrumen surat berharga pemerintah.

2. Inflasi

   Tingkat inflasi terus diupayakan bergerak pada sasaran inflasi 1,5-3,5 persen di tahun 2026. Kisaran tersebut diharapkan mencerminkan stabilitas harga yang mampu menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain stabilitas harga yang dicapai, sasaran ini juga diharapkan tetap memberikan ruang insentif bagi dunia usaha. Oleh karena itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas inflasi melalui strategi menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi.

   Strategi kebijakan pengendalian inflasi terus diupayakan melalui koordinasi kebijakan pusat dan daerah. Koordinasi kebijakan dilakukan melalui sinergi TPIP dan TPID (tingkat provinsi dan kabupaten/kota). Dukungan data yang semakin kredibel memadai terus ditingkatkan. Selain itu, komunikasi publik yang efektif juga terus dilaksanakan guna menjangkar ekspektasi inflasi agar tetap positif.

3. Indonesian Crude-oil Price

   Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjadi salah satu factor utama yang memengaruhi harga minyak mentah dunia. Ketegangan perdagangan antara dua negara adidaya ini telah menciptakan ketidakpastian global, yang menyebabkan investor menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Hal ini berdampak pada penurunan permintaan minyak mentah, yang kemudian mempengaruhi harga. Perubahan pola perdagangan juga dapat terjadi sebagai akibat dari perang dagang ini.

Tantangan juga berasal dari sisi suplai dan demand yang turut mewarnai pergerakan harga minyak mentah Indonesia/ICP. Dari sisi suplai, kebijakan peningkatan produksi minyak mentah dari OPEC+ yang dimulai pada triwulan II 2025 diprediksi akan mendorong turunnya harga minyak mentah di 2026. Tekanan harga minyak mentah juga berasal dari pertumbuhan produksi negara-negara di luar OPEC+, seperti Rusia, dimana biasanya harganya masih lebih rendah dibanding negara OPEC+. Lebih lanjut, terdapat potensi meredanya ketegangan Rusia-Ukraina sehingga embargo ekonomi yang dilakukan oleh AS berakhir dan memungkinkan untuk mendorong peningkatan suplai minyak mentah dunia. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi dunia yang masih stabil juga belum mendorong permintaan minyak global secara signifikan. Selain itu, inovasi dan pertumbuhan produksi moda transportasi berbasis non-fossil fuel juga cukup mereduksi permintaan minyak global.

4. Lifting Migas

Produksi migas Indonesia menghadapi tantangan besar. Capaian lifting migas tahun 2024 sebesar 579,7 rbph (93 persen dari target APBN) dan 978,8 rbsmph (95 persen dari target APBN). Beberapa kendala pelaksanaan lifting migas adalah gangguan operasional akibat cuaca ekstrem dan shutdown fasilitas, rendahnya permintaan pasar, tertundanya kegiatan eksplorasi karena bencana dan perizinan, serta keterlambatan proyek-proyek strategis di beberapa lapangan migas. Tantangan-tantangan tersebut masih akan berdampak pada capaian lifting migas tahun 2025.

Dalam jangka pendek, berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan lifting migas. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah pengeboran lebih dari seribu sumur pengembangan per tahun, reaktivasi ribuan sumur idle yang belum beroperasi, serta percepatan proyek EOR di beberapa wilayah potensial yang kedepannya memiliki prospek produksi minyak jutaan barel. Dengan pelaksanaan kebijakan peningkatan lifting tersebut,

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkiraan tumbuh kuat pada kisaran 5,2 – 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada programprogram produktif yang mendorong kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk melalui implementasi program MBG. Kinerja ekspor juga didorong melalui berbagai kebijakan diantaranya, melalui strategi hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor ke berbagai negara (trade diversion dan trade creation). Sementara itu, akselerasi investasi akan terus diperkuat dengan pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi melalui BPI Danantara, serta penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif. Transformasi ekonomi menuju sector-sektor bernilai tambah tinggi, berorientasi pada keberlanjutan dan rendah emisi, akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika global. Meski demikian, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik dan melemahnya permintaan global tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif, responsif, serta berorientasi jangka panjang.

Gambar 3.1

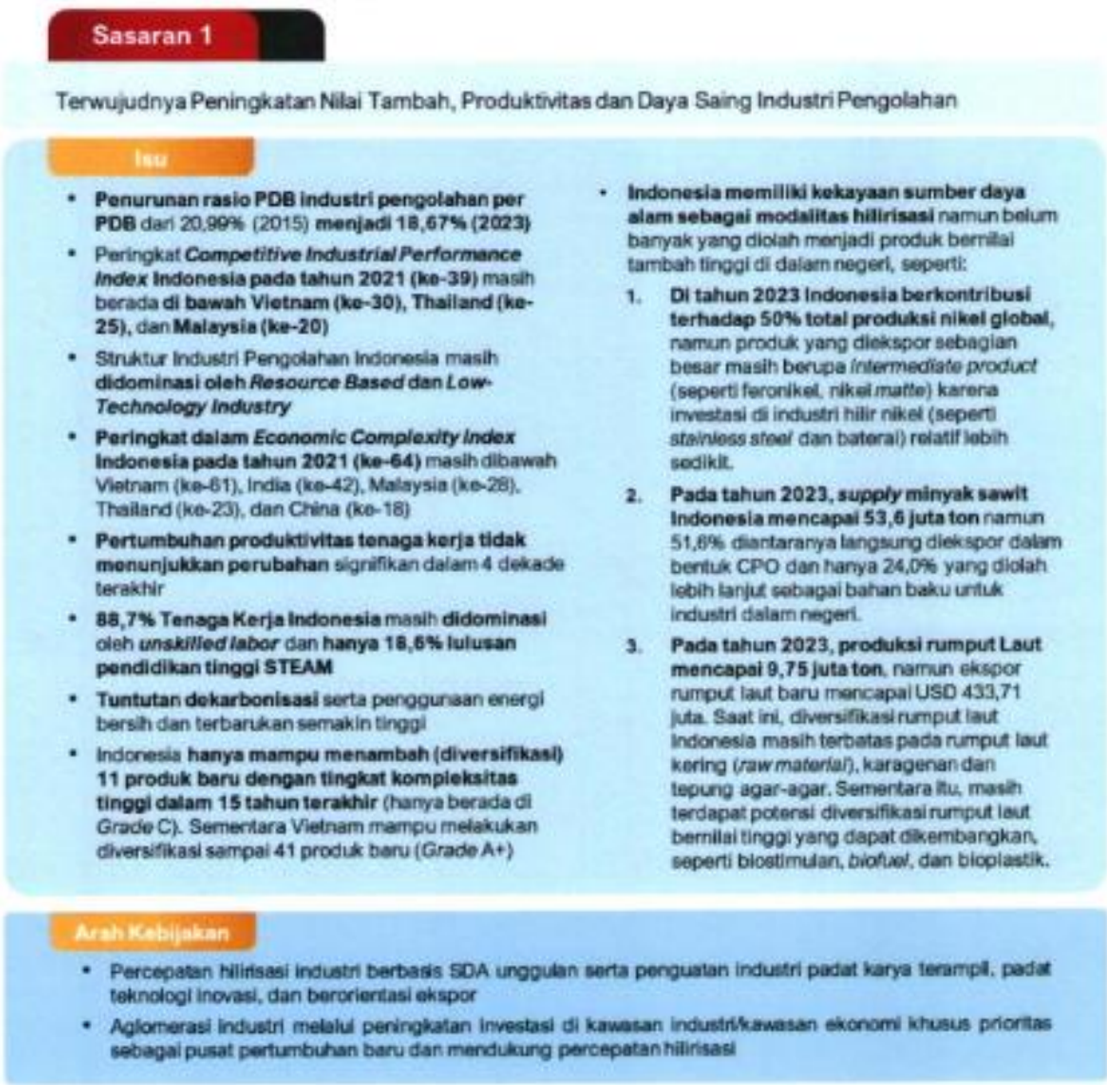
Tema RKP Tahun 2026

"Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"

Gambar 3.2

Arah Kebijakan Ekonomi RPJMN 2025-2030

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Arah Kebijakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5 adalah sebagai berikut:

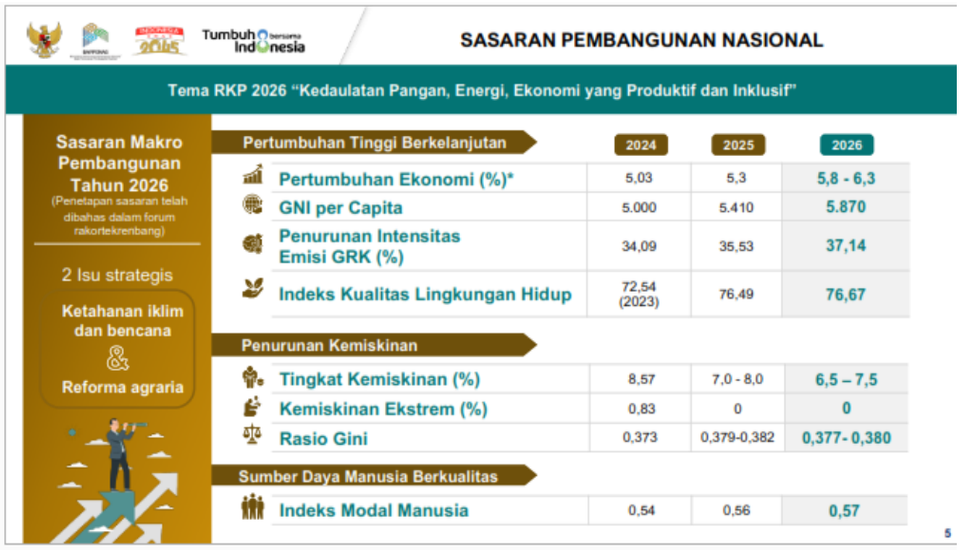


Sumber : RPJMN 2025-2029

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro perekonomian nasional, yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.3

Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026



Sumber : Rancangan RKP 2026,

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Arah kebijakan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2026 berfokus pada beberapa area utama, seperti:

1. Pertumbuhan Ekonomi Hijau

   Capaian Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif dengan peningkatan skor komposit dari 57,42 pada tahun 2020 menjadi 70,46 pada tahun 2023, menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kemajuan menuju ekonomi hijau. Naiknya capaian Indeks Ekonomi Hijau Tahun 2023, salah satunya dipengaruhi oleh pilar ekonomi, utamanya pada indikator intensitas energi final, produktivitas perikanan budidaya, dan produktivitas tenaga kerja sektor industri. Meskipun demikian, Sulawesi Selatan perlu meningkatkan perhatian pada pilar lingkungan (indicator tutupan hutan dan penurunan emisi kumulatif dari baseline) dan pilar ekonomi (indikator tingkat kemiskinan). Pendetailan strategi dan intervensi untuk meningkatkan capaian indeks ekonomi hijau telah dituangkan dalam rencana induk dan peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Peningkatan Kualitas Data

   Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan capaian yang sangat baik selama lima tahun terakhir. Sejak tahun 2020 hingga 2024, seluruh OPD di Provinsi Sulawesi

Selatan secara konsisten telah memanfaatkan data statistic dalam proses evaluasi pembangunan daerah dengan tingkat penggunaan yang mencapai 100% setiap tahunnya. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kapasitas dan kesadaran OPD dalam menggunakan data statistik telah terbangun dengan baik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kebijakan yang berbasis data memiliki potensi lebih besar dalam menghasilkan keputusan yang efektif serta mampu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran pembangunan. Selain itu, penggunaan data statistik yang optimal juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi tantangan pembangunan secara lebih akurat, mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat, serta melakukan intervensi kebijakan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini turut mencerminkan meningkatnya akses dan kualitas data yang tersedia bagi OPD, baik melalui sumber resmi seperti BPS maupun sistem informasi internal pemerintah daerah.

3. Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

   mencakup upaya umum dalam mengembangkan hilirisasi ekonomi di Sulawesi Selatan meliputi hilirisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pertambangan, serta pengembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah baik pada industri pengolahan/manufaktur maupun pada industri ekstraktif dan pariwisata, termasuk dalam pemanfaatan dan pemeliharaan potensi ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi syariah. Upaya umum ini diharapkan secara signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat, menguatkan fiskal daerah, menguatkan integrasi ekonomi domestic dan global, meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan berusaha, serta menguatkan swasembada pangan dan posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi syariah sebagai bagian penting transformasi ekonomi Sulawesi Selatan akan mendorong ekosistem usaha dan industri yang sehat dan produktif; pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, adil, dan merata; serta penghidupan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan.

4. Peningkatan Kemampuan SDM

   peningkatan nilai tambah ekonomi bukan hanya sekedar pada ketersediaan SDA, tetapi juga penyiapan daya dukung sumber daya manusia serta sarana prasarana dan infrastruktur wilayahnya. Sulawesi Selatan sejatinya mengambil peran sebagai pusat pengembangan SDM Indonesia dalam mendukung hilirisasi/pembangunan ekonomi. Pengembangan SDM menjadi fokus perhatian pada setiap daerah dengan berbasis pada pemenuhan kompetensi sesuai dengan potensi SDA yang akan dikelola pada setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM untuk pengembangan IPTEKIN harus sejalan dengan potensi SDA yang dimiliki setiap daerah di Sulawesi Selatan.

3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Barru

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima (5) tahunan RPJMD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kabupaten Barru terkait peningkatan perekonomian daerah melalui Mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata, serta memperkuat kapasitas UMKM, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah

3.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Pada tahun 2025 pemerintah masih terus melakukan pemulihan ekonomi daerah. Kebijakan pemerintah dalam rangka efisiensi anggaran melalui instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 menjadi tantangan dalam mengelola APBD. Namun deficit APBD diupayakan secara gradual menurun sehingga risiko pembiayaan bisa terkendali.

Di tahun 2026, untuk menjaga keberlanjutan fiscal dilakukan dengan melakukan pengelolaan fiscal secara pruden melalui konsolidasi APBD secara bertahap. Defisit APBD dijaga terus mengecil semakin mendekati batas deficit 3% sementara itu primary balance diupayakan terus menuju positif melalui peningkatan pendapatan dan penguatan spending better serta inovasi pembiayaan. Upaya–upaya mendukung kesinambungan fiscal sebagai berikut :

a. Mobilisasi Pendapatan melalui optimalisasi penerimaan PAD (digitalisasi pajak/retribusi) Penyesuaian regulasi untuk meningkatkan rasio pajak.
b. Belanja efisien dan Produktif melalui e planning dan e budgeting.
c. Pembiayaan INOVATIF : Kolaborasi Fiskal, KPBU, pinjaman daerah, CSR Penguatan sinergi dengan pemerintah pusat melalui dukungan DANANTARA.

Untuk melajutkan upaya-upaya tersebut dalam kaitannya antara proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja /pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan public. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasi anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Berbagai arah kebijakan terkait pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja ini tidak lepas dari arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dijelaskan pada sub bab berikut ini.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersh dalam periode tahun anggaran

berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Menurut peraturan perundang – undangan pendapatan daerah terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2024–2026 didasarkan pada beberapa asumsi. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) serta kebijakan efisiensi anggaran sebagai rangkaian dari tahun 2025 yang membawa konsekuensi adanya penurunan Alokasi dana transfer. demikian juga adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Pada Undangundang HKPD, opsen PKB dan BBNKB diterapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan Kabupaten/Kota.

Adapun ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah mengacu pada pasal 30 sampai dengan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

   Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk tahun 2025, Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 38.921.855.239,00

b. Retribusi daerah

   Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk tahun 2025, Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 72.436.483.917,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

   Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah

Selanjutnya ketentuan terkait Pendapatan Transfer mengacu pada pasal 34 sampai dengan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi :

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut :

a. Dana Perimbangan terdiri atas
    1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
    2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
    3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
b. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
c. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Transfer Antar Daerah

Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

a. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:
   1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi;
   2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota

Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

a. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya

Struktur pendapatan diatas diharapkan dapat merespon kebijakan keuangan daerah Kabupaten Barru pada tahun 2025 yang akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Barru. Penyusunan postur pendapatan didasarkan pada realisasi pendapatan dari tahun 2020-2024 dan kondisi pendapatan pada tahun 2025 dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan meningkat sebesar 4 % melalui perkiraan potensi peningkatan masing masing jenis pendapatan daerah sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan Transfer diperkirakan menurun sebesar 2 persen. Penurunan ini diperkirakan karena tidak adanya lagi pendapatan melalui transfer antar daerah.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat sebesar 14 persen.

Untuk memenuhi asumsi pendapatan tersebut maka kebijakan keuangan diarahkan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Efisiensi Pajak: Meningkatkan efisiensi pajak dengan memperbaiki sistem administrasi pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak.
b. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mengoptimalkan PAD dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah dan meningkatkan pendapatan dari sektor strategis..
c. Meningkatkan Investasi: Meningkatkan investasi dengan meningkatkan kemudahan berusaha dan meningkatkan kualitas infrastruktur.

Postur Pendapatan Daerah yang menggambarkan realisasi dan kondisi 2025 secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan 2023 – 2024, APBD 2025 dan Proyeksi Pendapatan 2026-2027 Kabupaten Barru

URAIAN (Sesuai PP 12 TAHUN 2019	Tahun 2023	Tahun 2024	APBD Tahun 2025*	Proyeksi Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027
PENDAPATAN	**888.425.426.755,75**	**907.944.475.146.89**	**919.672.265.715,00**	**921.137.072.985,00**	**924.647.684.421,00**
Pendapatan Asli Daerah	**108.669.905.583.75**	**115.670.018.762..59**	**128.517.022.299,00**	**115.982.078.698,00**	**118.533.070.342,00**
Pajak Daerah	25.785.922.730.01	24.006.600.642.00	38.921.855.239.00	28.218.028.338,00	29.078.678.202,00
Retribusi daerah	3.844.587.603.00	48.891.198.719.00	72.436.483.917.00	4.157.188.252,00	4.266.938.022,00
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	9.922.742.013.00	10.008.783.290.00	10.418.879.114.00	10.582.831.472,00	10.812.478.915,00
Opsen PKB	-	-	7.235.864.713,00-	7.603.179.742,00	
Opsen BNKB	-	-	6.310.075.464,00	6.483.942.234,00	
Lain - Lain PAD Yang sah	69.116.653.237.74	32.763.436.111.59	6.739.804.029.00	73.024.030.636,00	74.374.975.203,00
Pendapatan Transfer	**779.755.521.172.00**	**792.274.456.384.30**	**791.155.243.416.00**	**805.154.994.288,00**	**824.114.614.079,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**701.463.994.931.00**	757.347.838.108.00	741.015.871.528.00	**712.548.273.963,00**	**729.984.777.546,00**
Dana Perimbangan	**662.724.372.931.00**	698.388.046.108.00	-		
- Transfer Umum	**-**	**-**	**-**		
a.1. Dana bagi hasil/ bagi hasil bukan pajak	-	-	11.841.683.000,00	14.074.396.771,00	14.409.367.415,00
a.2. Dana alokasi umum	-	-	534.940.002.000,00	539.049.822.795,00	552.957.308.223,00
b. Transfer khusus (DAK)	-	-	146.781.651.528,00	41.728.959.635,00	42.722.108.874,00
c. Transfer Khusus (DAK) Non Fisik				117.695.094.762,00	119.895.993.034,00
Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-
- Dana Desa	**38.739.622.000.00**	39.357.327.000.00	39.135.404.000,00	**42.711.254.113,00**	**43.766.222.089,00**
- Insentif Fiskal	**0**	19.602.465.000.00	8.317.131.000,00	**9.909.264.000,00**	**9.909.264.000,00**
B. Pendapatan Transfer Antar Daerah	**78.291.526.241.00**	**34.926.618.276.30**	**50.139.371.888.00**	**64.754.206.635,00**	65.965.110.299,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	**61.253.240.366.00**	30.154.212.276.30	**50.139.618.276.00**	**64.754.206.635,00**	**65.965.110.299,00**
Bantuan Keuangan	**17.038.285.875.00**	4.772.406.000.00	**9.336.720.960,00**	**17.943.249.690,00**	**8.255.462.235,00**
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-	-

Sumber : LRA 2023 – 2024, APBD 2025.

Tabel diatas menggambarkan perkembangan realisasi tahun 2023 dan tahun 2024 serta APBD Tahun 2025. berdasarkan struktur yang tercantum dalam PP 12 Tahun 2019. Realisasi pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 888.425.426.755.75,- mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 907.944.475.146.89,- dan pada tahun 2025 APBD Kabupaten Barru naik sebesar Rp. 919.672.265.715,-. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan dana transfer,. Penentuan besaran yang dilakukan berdasarkan permendagri yang mengatur tentang besaran pendapatan daerah melalui transfer pusat.

Pada tahun 2026 diproyeksikan total pendapatan daerah sebesar Rp. 921.137.072.985,00, cenderung mengalami stagnasi bahkan penurunan. Proyeksi tersebut diperoleh melalui forecasting data dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :

1. Realisasi APBD Tahun 2023 – 2024 dan Kondisi APBD 2025
2. Pendapatan transfer umum mengalami penurunan sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Barru. Peningkatan kualitas belanja menjadi sangat penting agar APBD sebagai instrument fiscal dapat menghasilkan output dan outcome yang berkualitas serta optimal memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah secara konsisten terus melakukan berbagai strategi kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas fundamental perekonomian.

Isu krusial dalam APBD 2026 berkaitan dengan dukungan anggaran yang spesifik dalam pelaksanaan urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten, diantaranya :

1. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Hak Keuangan, Biaya Sarana dan Prasarana, Biaya Mobilitas dan Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (Wa KDH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
7. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik pengelolaan tatalaksana, kualitas, terpadu, terintegrasi dan percepatan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha, (Ease of Doing Bussiness/EoDB), sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Turunan dan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme.
8. Penguatan Perencanaan Badan layanan Umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Percepatan Implementasi Visi Presiden melalui Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat.
10. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.
11. Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah

Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengacu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

12. Penyelenggaran jaminan sosial dilaksanakan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Struktur Belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi :

1) Belanja Pegawai
   a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
   c) Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

d) Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
f) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
g) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
h) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
i) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :
    1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
    2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
    3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
j) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
    1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS

dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN
   a. Ketentuan pemberian TPP ASN :
      1. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
      2. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

3. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
4. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan
5. dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.

b. Kebijakan TPP untuk TA 2025, yaitu :
   1. sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya;
   2. dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang:
      1) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya;
      2) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease* 19 yang diatur lebih lanjut oleh kepala daerah; dan
      3) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada

belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintregrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.

c. Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar memedomani:

1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
4. mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.

d. Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:
    1. permohonan persetujuan TPP diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. berdasarkan hasil validasi pada butir ii, Ditjen Bina Keuangan Daerah meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
    4. berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.

e. Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2025 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024.

8) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2025 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:
   a. Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
   b. Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.

2) Belanja Barang dan Jasa
   1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
   2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
   3) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
      1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain :
         a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:
   a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:
      1. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.
   b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:

1. Menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
2. Mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.
4. Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
    1) Kepala desa dan perangkat desa; serta
    2) PNPNSD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan :
    1) Pemerintah Daerah Provinsi berkontribusi dalam membayar luran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
    2) Pemerintah Daerah Provinsi menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
    3) Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran kontribusi iuran pada Tahun Anggaran. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD TA 2024 agar dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Selain itu, Pemerintah Daerah juga membayarkan Bantuan luran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8) Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah:
   (1) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan

manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;

(2) wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan

(3) kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) bulan.

6. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
7. Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai berikut:
   1) Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/ manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

2) Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya *ambulance* peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

3) Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS;

c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap

memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi non konstruksi sedangkan jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah

Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain:
   1. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
   3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
   4. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau

sejenisnya di luar wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.

5. Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*.
6. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) dirangkaikan dengan sertifikasi/uji Kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, dimana sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat administrasi seleksi JPT Madya dan JPT Pratama serta pengangkatan dalam jabatan

administrator maupun pengawas pada instansi tersebut.

8. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2026, untuk:
    1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
9. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran

persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.

10. Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Pemeliharaan:
   (a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   (b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:
   (a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
      1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;

3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
4. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.
    1) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:
        (1) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
        (2) Biaya paket meeting (*halfday/fullday/ fullboard/ residence*);
        (3) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
        (4) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau

narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

2) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang *transport*, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.

1) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:

(1) Biaya transportasi peserta, panitia / moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

(2) Biaya paket meeting (*halfday/fullday/ fullboard/ residence*);

(3) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

(4) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

2) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang *transport*, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

(b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.

2. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.

(c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:

1. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

(d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:

1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
5. Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

(e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:
   1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
   2) penghargaan atas suatu prestasi;
   3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
   4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   6) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.

(b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.

(c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3) Belanja Bunga

(a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.

(b) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

(c) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

(d) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2024 pada SKPKD.

(e) Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

(f) Belanja Subsidi

(g) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

(h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(i) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan

dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(j) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja Hibah

1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;

3) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

(a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

(b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

(c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:

i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

iii. partai politik dan/atau;
iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

(d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
(e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(f) memenuhi persyaratan penerima hibah.

4) Belanja hibah diberikan kepada:
(a) Pemerintah Pusat;
(b) Pemerintah Daerah lainnya;
(c) Badan Usaha Milik Negara;
(d) BUMD;
(e) BUMDes;
(f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
(g) Partai Politik.
i. Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.
ii. Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
   (a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
   (b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
6) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
   (a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program,

kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;

(b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;

(c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

7) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.

8) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

9) Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2023 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

(1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barangkepada:
   (a) individu;
   (b) keluarga;
   (c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
   (d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

(3) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga / pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan / pembangunan sampai siap diserahkan.

(4) Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

(5) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(7) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(8) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

(9) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

   (a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;

   (b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan

dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

(10) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.

(11) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

(12) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2025 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

1) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
2) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

4) Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
   a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
   b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
      (1) belanja modal tanah;
      (2) belanja modal peralatan dan mesin;
      (3) belanja modal bangunan dan gedung;
      (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
      (5) belanja modal aset tetap lainnya;
      (6) belanja aset lainnya.
5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
   a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
   b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.

c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

8) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

9) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:
   a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
   b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
   c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

10) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

11) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

C. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-

kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

D. Belanja Transfer

1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
2) Belanja transfer dirinci atas jenis:
   a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
      (1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
      (2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      (3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
         (a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
         (b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
         (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh

puluh persen);

(d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan

(e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

(4) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2025.

(6) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2024, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(7) Pemerintah Daerah Provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.

(8) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

(a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.

(c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

(d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2025.

b) Belanja Bantuan Keuangan

(1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

(a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;

(b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten / kota;

(c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah

kabupaten/kota di luar wilayahnya;

(d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau

(e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

(3) Bantuan keuangan terdiri dari:

(a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;

(b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.

(5) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam

LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

(6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2025 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.

(9) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.

(10) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2024 dan terpisah dari ADD TA 2025.

(11) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

(13) Penganggaran belanja daerah pada saat kejadian bencana sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Kajian Risiko Bencana.

Postur Belanja Daerah yang menggambarkan realisasi dan kondisi 2024 serta proyeksi tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Kabupaten Barru Tahun 2023 – 2024, APBD 2025 dan Proyeksi Tahun 2026 dan Tahun 2027

URAIAN (Sesuai PP 12 TAHUN 2019	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025*	Proyeksi Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027
BELANJA	**906.753.762.122**	**887.246.950.281**	**942.682.702.023**	**939.739.833.732**	**951.749.845.077**
Belanja Operasi	**665.057.375.056**	**655.455.055.238.**	**750.035.132.520**	**688.815.754.624**	**698.218.801.931**
Belanja Pegawai	380.173.392.967	402.002.603.509	435.156.760.755	396.482.540.225	402.072.944.042
Belanja Barang dan jasa	258.845.601.745	220.720.777.540	295.222.246.175	265.776.681.950	269.311.511.820
Belanja Bunga	2.088.449.782	1.720.723.191	2.530.000.000	2.043.169.705	2.020.899.156
Belanja Subsidi	313.026.525	0	0	313.026.525	313.026.525
Belanja Hibah	23.636.904.037	30.184.150.998	16.958.125.590	24.200.336.219	24.500.420.388
Belanja Bantuan Sosial	0	826.800.000	168.000.000		
Belanja Modal	**148.016.364.234**	**134.582.391.427**	**84.942.469.613**	**155.572.935.543**	**158.179.899.581**
Belanja tidak Terduga	**839.982.105**	**2.565.714.654**	**9.841.903.790**	**839.982.105**	**839.982.105**
Belanja Transfer	**92.840.040.727**	**94.643.788.961**	**97.863.196.100**	**94.511.161.460**	**94.511.161.460**
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	92.840.040.727	94.643.788.961	97.863.196.100	94.511.161.460	96.707.180.217

Sumber : LRA 2023 – 2024, APBD 2025 dan Data Olahan 2025

Tabel diatas menggambarkan perkembangan realisasi tahun 2023 dan tahun 2024 serta APBD Tahun 2025. berdasarkan struktur yang tercantum dalam PP 12 Tahun 2019.

Realisasi belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 906.753.762.122,- mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar Rp. 887.246.950.281,-. Hal ini selain adanya efisiensi, juga disebabkan adanya penganggaran yang meluncur ke tahun 2025. Pada APBD tahun 2025 menunjukkan peningkatan menjadi Rp. 942.682.702.023,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan DAU sehingga Pada tahun 2025 APBD Kabupaten Barru di sisi belanja mengalami peningkatan menjadi Rp. 942.682.702.023,-.

Sedangkan untuk tahun 2026 total belanja daerah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp. 939.739.833.732,-. Proyeksi tersebut diperoleh melalui forecasting data dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :

1. Realisasi APBD Tahun 2023 – 2024 dan Kondisi APBD 2025
2. Belanja Pegawai mengalami penurunan dengan nilai sebesar Rp. 396.482.540.225,- sebagai upaya untuk memenuhi mandatory 30 %, Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data pada nilai *upper* .
3. Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan dengan nilai sebesar Rp. 265.776.681.950. Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data dan pertimbangan inflasi.
4. Belanja Bunga diasumsikan turun sebesar Rp 2.043.169.705.
5. Belanja Hibah mengalami peningkatan dengan nilai sebesar Rp. 24.200.336.219, Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data pada nilai *upper*.
6. Belanja Modal mengalami peningkatan dengan nilai sebesar Rp. 155.572.935.543. Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data pada nilai *upper*.
7. Alokasi anggaran dalam rangka percepatan penurunan Stunting yang di Taging di 18 Perangkat Daerah dengan 59 Sub. Kegiatan di tahun 2026 sebesar Rp. 77,755,644,413.00, atau 8,06 % dari Proyeksi Total Belanja Tahun 2026.
8. Alokasi anggaran dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang di Taging di 10 Perangkat Daerah dengan 48 Sub. Kegiatan di tahun 2026 sebesar Rp. 76,863,806,874.00 atau 7,96 % dari Proyeksi Total Belanja Tahun 2026.

9. Alokasi anggaran dalam rangka ketahanan pangan yang di Taging di 12 Perangkat Daerah dengan 55 Sub. Kegiatan di tahun 2026 sebesar Rp. 26,328,920,513.00 atau 2,73 % dari Proyeksi Total Belanja Tahun 2026.
10. Alokasi anggaran dalam rangka penanganan inflasi yang di Taging di 3 Perangkat Daerah dengan 9 Sub. Kegiatan di tahun 2026 sebesar Rp. 427,573,700.00 atau 0,04 % dari Proyeksi Total Belanja Tahun 2026.
11. Alokasi anggaran dalam rangka reformasi birokrasi dan Grand Design Reformasi Birokrasi. yang di Taging di 24 Perangkat Daerah dengan 101 Sub. Kegiatan di tahun 2026 sebesar Rp. 610,444,670,760.00 atau 63,25 % dari Proyeksi Total Belanja Tahun 2026.
12. Alokasi anggaran dalam rangka optimalisasi kawasan agrowisata Gurilla. yang di Taging di lima Perangkat Daerah dengan 10 program di tahun 2026 sebesar Rp. 37,483,479,398.00 atau 3,88 % dari Proyeksi Total Belanja Tahun 2026.

Tabel 3.4
Proyeksi Alokasi Belanja terhadap Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan SPM

O P D	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026 (Rp.)
Dinas Pendidikan	309,385,958,504
Dinas Kesehatan	221,013,120,857
Rumah Sakit Umum Daerah	54,972,579,784
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman	64,661,150,470
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,054,536,538
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8,472,274,633
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,060,081,723
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,536,615,445
Total	**677.156.317.954**

Tabel 3.5
Proyeksi Alokasi Belanja terhadap Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

O P D	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026 (Rp.)
Dinas Koperasi dan UKM	2,469,670,780
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	10,869,655,110
Dinas Lingkungan Hidup	12,590,679,273
Dinas Kependudukan dan Capil	3,771,716,346
Dinas Perhubungan	6,368,362,997
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	11,345,238,359

Dinas Koperasi dan UKM	2,469,670,780
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,956,811,430
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,064,761,857.
Total	**57.906.566.932**

Tabel 3.6
Pagu Perangkat Daerah

O P D	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026 (Rp.)
Dinas Pendidikan	309,385,958,504
Dinas Kesehatan	221,013,120,857
Rumah Sakit Umum Daerah	54,972,579,784
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman	64,661,150,470
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,054,536,538
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8,472,274,633
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,060,081,723
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	10,869,655,110
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,536,615,445
Dinas Lingkungan Hidup	7,352,887,044
Dinas Kependudukan dan Capil	12,590,679,273
Dinas Perhubungan	3,771,716,346
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6,368,362,997
Dinas Koperasi dan UKM	2,469,670,780
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12,590,679,273
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,064,761,857
Dinas Perikanan	4,637,610,212
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	14,148,741,378
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13,114,281,704
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2,406,440,724
Sekretariat Daerah	47,208,705,526
Sekretariat DPRD	26,336,162,296
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4,330,703,242
Badan Keuangan dan Aset Daerah	118,875,002,336
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,079,069,660
Inspektorat Daerah	13,717,571,922
Kecamatan Tanete Riaja	3,969,703,227
Kecamatan Mallusetasi	5,816,739,511
Kecamatan Soppeng Riaja	4,212,289,144
Kecamatan Balusu	3,053,248,490
Kecamatan Pujananting	2,900,258,930
Kecamatan Tanete Rilau	5,097,138,054
Kecamatan Barru	8,000,734,364

Badan Pendapatan Daerah	4,967,854,305
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4,389,571,922
Total	**970.531.014.776**

Tabel 3.7
Proyeksi Pagu Anggaran Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / SDgs Tahun 2026

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)		Perkiraan Maju Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
BIDANG PENDIDIKAN						
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (SPM)	100	51,772,586,500	100	52,218,586,500	Dinas `Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) (SPM)	100		100		
	Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan (SPM)	100		100		
BIDANG KESEHATAN						
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100%	74,239,025,026	100%	74,797,730,811	Dinas Kesehatan
	Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100%		100%		Dinas Kesehatan
	Angka Status Gizi Masyarakat	92.55%		92.55%		Dinas Kesehatan
	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	86%		86%		Dinas Kesehatan
	Indeks Keluarga Sehat	0.07		0.07		Dinas Kesehatan

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)		Perkiraan Maju Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan (SPM)	100%		100%		Dinas Kesehatan
BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN						
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	100%	606,087,560	100%	624,270,187	BPBD
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	100%		100%		BPBD
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100%		100%		BPBD
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM)	100%	1,756,236,450	100%	1,914,297,730	Satpol PP dan Damkar
	Waktu tanggap (rensponse time)	15 Menit		15 Menit		Satpol PP dan Damkar
BIDANG SOSIAL						
Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Warga Negara Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta PMKS lainnya yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100%	137,783,300	100%	138,196,650	Dinas Sosial dan PPPA
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	100%	517,361,200	100%	518,913,284	Dinas Sosil dan PPPAl
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM						

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)		Perkiraan Maju Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengelolaan Sumber Daya Air(Sda)	persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dalam kondisi baik	57,15 %	2,953,353,000	57,15 %	4,462,213,059	Dinas PUTR dan PERKIM
	Persentase luas kawasan permukaan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	8.2 %		9.03 %		Dinas PUTR dan PERKIM
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	81,96 %	35,341,450,929	85 %	37,440,708,515	Dinas PUTR dan PERKIM
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	99,43 layak dan 70,32 Aman	895,000,000	100 Layak 72,22 Aman	2,897,685,000	Dinas PUTR dan PERKIM
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100 %	957,300,000	100 %	960,171,900	Dinas PUTR dan PERKIM
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100 %	1,250,000,000	100 %	1,253,750,000	Dinas PUTR dan PERKIM
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (SPM)	100 %		100 %		Dinas PUTR dan PERKIM
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni	3,21 %	550,000,000	3,01%	551,650,000	Dinas PUTR dan PERKIM
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan kawasan perumahan yang memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	31,66 %	4,150,000,000	41,91%	4,162,450,000	Dinas PUTR dan PERKIM

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)		Perkiraan Maju Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	18,90%	43,856,670	19.25%	43,988,240	Dinas PMD dan PPKB
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP-EL	99%	142,691,200	99%	143,119,274	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10,4%	3,214,233,983	11,8%	3,223,876,685	Dinas PMD dan PPKB
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Sejahtera	83,33%	1,111,146,000	83,33%	1,114,479,438	Dinas PMD dan PPKB
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH						
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100%	14,240,539,920	100%	14,292,383,792	Bag. Kesejahteraan Rakyat
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.	Persentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara.	100%	1,060,179,800	100%	1,069,721,418	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pilkada.	80%	594,363,126	80%	596,146,215	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Persentase Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi.	100%	150,000,000	100%	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)		Perkiraan Maju Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pemnbinaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	100%	15,952,000	100%	16,159,376	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kwalitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	Persentase penurunan konflik sosial di Lingkungan Masyarakat.	50%	266,446,800	50%	267,246,140	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA						
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100%	204,493,600	100 %	205,107,081	Dinas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	100%	50,978,000	100%	50,007,934	Dinas Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETAHANAN PANGAN						
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	39,14%	5,000,0000	40,38%	5,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein	84,81%	414,589,940	86,25%	431,173,538	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Kasus Kerawanan Pangan	10 %	42,363,400	10 %	44,057,936	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	72%	84,000,000	73%	95.000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati	69%	30,933,400	70%	31,026,200	Dinas Lingkungan Hidup

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)		Perkiraan Maju Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	85,43%	17,439,500	86,85 %	19,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	15,000,000	100%	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	84%	24,254,000	84%	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Presentase sampah yang tertangani	81,63%	9,219,060,900	82%	5,006,718,083	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	0,80%	6,107,894,400	0,81%	1,110,948,083	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	10,55%	15,681,700	10,97%	15,728,745	Dinas Koperasi dan UKM
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	15.30%	2,999,987,300	19,30%	3,008,987,262	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Peran Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,91%		1.33%		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAH PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)		Perkiraan Maju Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	21,030,80 Ton	219,306,800	21,346, 26 Ton	219,829,720	Dinas Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	6,650,21 Ton	863,373,830	6784,3 Ton	864,463,951	Dinas Perikanan
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA						
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Pad Pariwisata	2%	4,289,000,001	2%	4,644,689,943	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisataawan	6,94%	188,021,400	6,94%	188,585,464	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN						
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian Perhektar Pertahun	5,37%	1,053,843,000	5,50%	1,095,996,720	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	3,23%		3,32%		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1.52%	824,129,700	1.55%	833,094,888	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah berupa :

1) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

1. SiLPA;
2. pencairan Dana Cadangan;
3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. penerimaan Pinjaman Daerah;
5. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
6. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

1. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
2. penyertaan modal daerah;
3. pembentukan Dana Cadangan;
4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
5. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang deficit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Mekanisme pembiayaan diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah.Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

1) Apabila APBD surplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok utang. penyertaan modal (investasi) daerah pemberian peningkatan jaminan sosial;
2) Apabila APBD defisit, maka ditutup dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah
3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup deficit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Arah kebijakan pembiayaan akan ditujukan untuk mendorong countercyclical melalui kebijakan pembiayaan yang inovatif dan prudent antara lain :

1. Mendorong pembiayaan inovatif diantaranya pengutan peran BUMD dan BLUD
2. Menjaga efektivitas pembiayaan investasi
3. Mengelola Sisa Anggaran Lebih pada level yang aman sebagai fiscal

buffer melalui perbaikan manajemen kas.

Postur Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Barru
Tahun 2023 – 2027

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran pembiayaan Daerah	Realisasi APBD 2023	Target Realisasi APBD 2024	Target APBD 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027
Penerimaan Pembiayaan	**113.804.956.324**	**92.423.589.692**	**26.063.467.573**	**5,053,031,265**	**5,053,031,265**
Sisa Lebih Pembiayan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA	92.423.589.693	94.408.368.759	8.887.376.715	5,053,031,265	5,053,031,265
Pengeluaran Pembiayaan	3.053.031.264	3.053.031.265	3.053.031.264	5,053,031,265	5,053,031,265
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	3,053,031,265.	3.053.031.265	3.053.031.265	3.053.031.265	3.053.031.265

Sumber : LRA 2023– 2024, APBD 2025, RPJMD Kab. Barru, dan Data Olahan 2025

3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 157 yaitu :

1. Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Adapun belanja wajib dan mengikat yang dimaksud adalah belanja gaji dan tunjangan, Belanja penerimaan pimpinan dan anggota DPRD serta operasional KDH/WKDH, Belanja Bunga dan Belanja Bagi hasil.
2. Prioritas kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Perhitungan kerangka pendanaan dengan memperhatikan belanja wajib mengikat dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.9
Total Belanja Wajib Mengikat Tahun 2026

NO	URAIAN	TAHUN 2026
A	**Belanja Operasi**	**423.039.072.674.00**
1	Belanja Pegawai	396,482,540,225.00
2	Belanja Bunga	2,043,169,705.00
3	Belanja Subsidi	313,026,525.00

4	Belanja Hibah	24,200,336,219.00
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**5,053,031,265.00**
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00
2	Pembayaran Pokok Utang	3.053.031.265,00
Total Belanja Wajib Mengikat		**428.092.103.939.00**

Sumber : Data Olahan 2025

Pada tabel dapat dilihat bahwa komponen total belanja wajib mengikat terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Transfer serta pengeluaran transfer yang besarannya sekitar 51,08 persen dari perkiraan pendapatan Kabupaten Barru Tahun 2025.

Untuk melihat Kapasitas Rill Kemapuan Keuangan Daerah yang dapat digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang dapat digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal

NO	URAIAN	TAHUN 2026
1	Pendapatan	921,137,072,985.00
2	Pencairan dana cadangan	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	23,655,792,012.00
Total Penerimaan (A)		944.792.864.997,00
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Mengikat (B)		428.092.103.939.00
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang dapat digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal (A – B)		516.700.761.058,00

Sumber : Data Olahan 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kapasitas rill kemampuan keuangan daerah yang dapat digunakan diperoleh dari penjumlahan dari pendapatan, pencairan dana cadangan dikurangi total belanja wajib yaitu sebesar Rp. 516.700.761.058,00

Pada tabel selanjutnya memperlihatkan Kapasitas Rill Kemapuan Keuangan Daerah secara keseluruhan yang dibagi atas belanja pegawai, prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah

NO	URAIAN	TAHUN 2026	Proporsi (%)
Total Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah		**944.792.864.997,00**	
1	Belanja Wajib Mengikat	**428.092.103.939.00**	
2	Prioritas I	129.175.190.264,00	25
3	Prioritas II	310.020.456.634,00	60
4	Prioritas III	77.505.114.158,00	15

Sumber : Data Olahan 2025

3.4 Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber–sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Barru mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Barru untuk mencari alternatif pendanaan dalam membangun sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1) APBN/Tugas Pembantuan; 2) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 3) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 4) Pembiayaan Utang Daerah (Pinjaman Daerah, Obilgasi Daerah, Sukuk Daerah). Adapun penjelasan alternatif pendanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

3.5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Barru selain bersumber dari APBD Kabupaten Barru, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah kabupaten.

3.5.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didasari atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kondisi yang berkembang saat ini menyebabkan banyak pemerintah daerah menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”. Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain,

pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

3.5.3 Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan utang daerah tersebut terdiri atas : **(1) Pinjaman Daerah** yaitu Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, **(2) Obligasi Daerah** yaitu surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, **(3) Sukuk Daerah** yaitu surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan asset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Usulan pembiayaan utang daerah tersebut harus termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan lebih dulu menetapkan nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam periodisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Barru pada tahun 2026 merupakan periode tahun ke dua dari RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029. Dalam rangka menjamin asas keberlanjutan dan sinergitas pembangunan maka dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah didasarkan dari analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta identifikasi permasalahan di tingkat lokal, regional, nasional dan global yang kemudian diselaraskan dengan program dari perangkat daerah dan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan prioritas pembangunan ini juga tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi termasuk adanya permasalahan mendesak yang perlu segera diatasi, serta penyesuaian dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya finansial.

Bab ini memuat dua hal, yaitu; 1) tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2026; dan 2) penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2026.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Visi Pembangunan daerah untuk periode RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“Barru Berkeadilan, Barru Maju Berkelanjutan,

Barru Sejahterah Lebih Cepat"

Rumusan visi ini mengandung tiga kata kunci visi yakni Berkeadilan, Maju Berkelanjutan dan sejahtera lebih cepat. Ketiga pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2026 sesuai tema pembangunan Kabupaten Barru yaitu "Kolaborasi Untuk Barru yang Berkeadilan, Maju Berkelanjutan dan Sejahterah Lebih Cepat".

Berdasarkan pokok-pokok visi, maka visi RPJMD Kabupaten Barru 2025-2029 dapat dijelaskan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1.
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2029

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Barru Berkeadilan, Barru Maju Berkelanjutan, Barru Sejahterah Lebih Cepat	Berkeadilan	merupakan kondisi dimana pada tahun 2029 pembangunan Kabupaten Barru telah mengimplementasikan prinsip keadilan yaitu seimbang, merata dan inklusif yang ditunjukkan dengan rasio gini yang rendah
	Maju Berkelanjutan	merupakan kondisi dimana pada tahun 2029 infrastruktur wilayah Kabupaten Barru berkembang dan menjangkau semua wilayah, memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, berketahanan iklim, berketahanan terhadap bencana dan ekologi yang aman dan terjaga
	Sejahatera lebih cepat	merupakan kondisi dimana pada tahun 2029 Kabupaten Barru menjadi kabupaten yang tingkat perekonomian tinggi, produktif, dan mandiri yang dibuktikan dengan PDRB (ADHB) yang meningkat dan masyarakatnyanya memiliki pendapatan perkapita tinggi.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut :

1. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka.
2. Membangun Manusia Yang Unggul dan Inklusif.
3. Membangun dan mengembangkan Infrastruktur dan Wilayah Yang Berketahanan Iklim.
4. Meningkatkan Good Governance Yang Bernafaskan Keagamaan.
5. Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Yang Berdaya Saing.

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat sebagaimana diuraikan tabel berikut.

Tabel 4.2
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Barru
Tahun 2025 – 2029

No.	Pokok-pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	***Barru Berkeadilan, Barru Maju Berkelanjuta, Barru Sejahterah Lebih Cepat***	Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	Mengarah pada penciptaan perubahan sosial dimana pembangunan tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Misi ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, layanan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka. misi ini fokus pada program dan kebijakan untuk mengurangi dan menangani kemiskinan. Serta fokus pada mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan peluang kerja, memberikan pelatihan keterampilan, dan mendorong wirausaha dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru
2		Membangun Manusia Yang Unggul dan Inklusif	Mengarah pada upaya untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Barru yang memiliki kualitas

			Fisik, moral dan budaya yang baik. Ini mencakup pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang baik, dan pembangunan budaya yang memperkuat nilai-nilai positif dalam masyarakat. Selain itu upaya pengembangan manusia yang unggul dan inklusif juga mengarahkan pada penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif. Keamanan dan ketertiban diupayakan melalui mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan norma sosial untuk menciptakan lingkungan yang tertib.
3		Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur dan Wilayah Yang Berketahanan Iklim	Mengarahkan perwujudan suatu kondisi di mana pembangunan infrastruktur terlaksana dengan memperhatikan dampak lingkungan, yang mengandung makna bahwa memanfaatkan sumber daya secara efisien, ekosistem alami terjaga dan dikelola secara berkelanjutan, berketahanan terhadap bencana namun tetap membangun infrastruktur baru berdasarkan potensi dan daya dukung wilayah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini dimaksud untuk melindungi dan memulihkan ekosistem alami untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi

			ekologisnya. Sementara itu berketahanan iklim mengandung makna berketahanan terhadap kondisi ekstrem yang dapat mengakibatkan bencana, ketahanan terhadap bencana diupayakan melalui mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, termasuk bencana alam dan non alam.
4		Meningkatkan Good Governance Yang Bernafaskan Keagamaan	Mengarahkan perwujudan pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai keagamaan. Pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas yang berarti setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dapat diakses dan dipahami oleh publik. Serta bertanggung jawab. atas segala keputusan dan tindakan yang diambil serta meningkatkan kompetensi ASN yang berkahlak. Pemerintah harus bersedia diawasi dan dievaluasi oleh publik serta memberikan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan sumber daya publik. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan kunci

			untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan responsif, menuju reformasi Birokrasi. Misi ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan. Ini mencakup integritas, keadilan, dan penghormatan terhadap etika dan moral dalam menjalankan pemerintahan.
5		Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Yang Berdaya Saing	Mengarahkan sumber daya dan upaya dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal guna menciptakan transformasi ekonomi yang berdaya saing. Melalui strategi ini, kami berkomitmen untuk mengidentifikasi dan mengembangkan keunggulan ekonomi Kabupaten Barru, memanfaatkan serta mengintegrasikan sumber daya lokal dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan. Peningkatan investasi menjadi pilar utama dalam mendukung upaya ini, dengan mengundang investasi dalam skala lokal dan internasional untuk mendukung pertumbuhan sektor basis seperti sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, transformasi

			ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud, memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barru dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing- masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu- isu strategis pembangunan daerah;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
5. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu- isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C

Target dari tujuan dan sasaran tahun 2026 menjadi landasan RKPD Tahun 2026, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan
Kabupaten Barru dan Target Kinerja Tahun 2026

No	Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
	Visi : Barru Berkeadilan, Barru Maju Berkelanjuta, Barru Sejahterah Lebih Cepat						
1	**Misi 1: Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka**						
	1	**Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat**	**Indeks Gini**	**Poin**	**0,354**	**0,300**	**0,298**
	1	Sasaran : Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat	Angka Kemiskinan	%	8,31	7,65	7.47
	2	Sasaran : Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,42	6,33	6,24
2	**Misi 2 : Membangun Manusia Yang Unggul dan Inklusif**						
	2	**Tujuan : Meningkatkan kualitas manusia yang cerdas dan sehat**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Poin**	**74,51**	**75,22**	**75,77**
	3	Sasaran : Meningkatnya mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	67,19	67,51	68,15
			Nilai Rapor pendidikan	Poin	62,62	80.21	82,17
	4	Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	poin	81,15	82,51	83,31
			Prevalensi Stunting	%	21,00	24,6	22,3
3	**Misi 3 : Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur dan Wilayah Yang Berketahanan Iklim**						
	3	**Tujuan : Meningkatkan daya saing infrastruktur dan wilayah yang berkelanjutan serta berketahanan bencana**	**Indeks daya saing pilar infrastruktur**	**Poin**	3,990	3,995	4,000
			Indeks Resiko Bencana	**Poin**	143,89	136,41	128,93
	5	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	-	55	56,85
	6	Sasaran : Menurunnya emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	-	36,56	39,88
	7	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,49	0,54	0,56

No	Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026
		Penanggulangan Bencana					
4	**Misi 4 : Meningkatkan Good Governance Yang Bernafaskan Keagamaan**						
	4	**Tujuan : Meningkatkan Integritas tata kelola Pemerintahan**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**68,28**	**70,82**	**73,37**
	8	Sasaran : Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan	Nilai SAKIP	Poin	61,43	62,83	65,87
			Indeks Pemeritnahan Digital	Poin	-	0,8	1,00
			Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,480	4,010	4,066
			Maturitas SPIP	Level	2	3	3
5	**Misi 5: Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Yang Berdaya Saing**						
	5	**Tujuan : Meningkatkan produktifitas ekonomi daerah**	**PDRB Perkapita**	**Rp. Juta**	**52,28**	**56,26**	**66,75**
	9	Sasaran : Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,92	5,74	5,81
	10	Sasaran : Meningkatnya daya saing industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	4,97	5,29	5,62
	11	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	13,46	12,97	13,36

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2025

Tabel 4.4
Konsistensi Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun pelaksanaan 2026 dan RKPD Tahun 2026

No	RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026				RKPD Tahun 2026				Keterangan
	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
1	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	Poin	0,297	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	Poin	0,297	
1	Sasaran : Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat	Angka Kemiskinan	%	7,47	Sasaran : Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat	Angka Kemiskinan	%	7,47	
2	Sasaran : Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,24	Sasaran : Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,24	
2	Tujuan : Meningkatkan kualitas manusia yang cerdas dan sehat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,77	Tujuan : Meningkatkan kualitas manusia yang cerdas dan sehat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,77	
3	Sasaran : Meningkatnya mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	68,15	Sasaran : Meningkatnya mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	68,15	
		Nilai Rapor pendidikan	Poin	82,17		Nilai Rapor pendidikan	Poin	82,17	
4	Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	poin	83,31	Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	poin	83,31	
		Prevalensi Stunting	%	22,3		Prevalensi Stunting	%	22,3	
3	Tujuan : Meningkatkan daya saing infrastruktur dan wilayah yang berkelanjutan serta berketahanan bencana	Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur	Poin	4,000	Tujuan : Meningkatkan daya saing infrastruktur dan wilayah yang berkelanjutan serta berketahanan bencana	Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur	Poin	4,000	
		Indeks Resiko Bencana	Poin	128,93		Indeks Resiko Bencana	Poin	128,93	
5	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur daerah	Poin	56,85	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur daerah	Poin	56,85	
6	Sasaran : Menurunnya emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	39,88	Sasaran : Menurunnya emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	39,88	

No	RPJMD Tahun Pelaksanaan 2026				RKPD Tahun 2026				Keterangan
	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	
7	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,54	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,54	
4	Tujuan : Meningkatkan Integritas tata kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	73,37	Tujuan : Meningkatkan Integritas tata kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	73,37	
8	Sasaran : Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan	Nilai SAKIP	Poin	65,87	Sasaran : Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan	Nilai SAKIP	Poin	65,87	
		Indeks Pemerintahan Digital	Poin	0,8		Indeks Pemerintahan Digital	Poin	0,8	
		Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,066		Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,066	
		Maturitas SPIP	Level	3		Maturitas SPIP	Level	3	
5	Tujuan : Meningkatkan produktifitas ekonomi daerah	PDRB Perkapita	Rp. Juta	66,75	Tujuan : Meningkatkan produktifitas ekonomi daerah	PDRB Perkapita	Rp. Juta	66,75	
9	Sasaran : Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,81	Sasaran : Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,81	
10	Sasaran : Meningkatnya daya saing industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	5,62	Sasaran : Meningkatnya daya saing industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	5,62	
11	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	13,36	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	13,36	

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kab. Barru 2025-2029 dan Rumusan RKPD 2026

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Barru tahun 2026 disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru tahun 2025-2029, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional 2025-2029. RPJMN ini menjadi acuan penyusunan prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026.

Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dan selanjutnya diturunkan ke visi RPJMN 2025-2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai Visi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 maka ditetapkan asta cita pembangunan yang juga menjadi Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), Prioritas Nasional 1.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui slyasembada pangan, energi, air ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, Prioritas Nasional 2.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, Prioritas Nasional 3.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas, Prioritas Nasional 4.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Prioritas Nasional 5.
6. Membangun daridesa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, Priroitas Nasional 6.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, Prioritas Nasional 7.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, Prioritas Nasional 8.

4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Tema pembangunan RKP pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”.

RKP Tahun 2026 ini diproyeksikan sebagai respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Kedudukan RKP Tahun 2026 sebagai rencana kerja Tahap kedua Pembangunan 5 Tahunan yang merupakan tahapan penguatan fondasi dalam kerangka pencapaian Indonesi Emas 2045.

4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Untuk mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045 maka ditetapkan 5 (lima) sasaran pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatnya Pendapatan per kapita menuju setara negara maju
2. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional Meningkat
3. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
4. daya saing sumber daya manusia meningkat, dan
5. intensitas Emisi GRK menuju *net zero emission*

Adapun sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 sampai dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029



Sumber : Perpres 12 Tahun 2025

4.2.1.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Tema RKP 2026 "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif", diwujudkan melalui sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Secara visual tema dan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2026 disajikan sebagai berikut:

Gambar 4.2

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026



Sumber : Rancangan Awal RKP Tahun 2026

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan rahun 2026, ditetapkan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

Gambar 4.3
Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

4.2.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

4.2.2.1 Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2026. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 yaitu **"Peningkatan Kualitas SDM Yang Berahlak dan Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mewujudkan**

Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif" dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

4.2.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKPD Provinsi Tahun 2026, maka arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensidan kinerja ASN berdasarkan kebutuhan organisasi
2. Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan
3. Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel
4. Peningkatan kualitas data,informasi dan keterbukaan informasi berbasis teknologi informasi yang didukung oleh keamanan informasi digital serta pengembangan inovasi
5. Peningkatan keterjangkauan terhadap layanan infrastruktur yang berkualias memenuhi standar GESI (Gender Equality and Social Inclusion)
6. Peningkatan kualitas produksi dan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan
7. Mendorong peningkatan persebaran investasi ke daerah yang belum berkembang; peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan/insentif penanaman modal di daerah
8. Peningkatan kualitas dan partisipasi Angkatan kerjadi berbagai bidang pembangunan termasuk bagi penyandang disabilitas
9. Peningkatan kualitas SDM masyarakat miskin, penguatan pemberdayaan masyarakat, pemberian kemudahan akses usaha dan

pasar berbasis potensi local serta peningkatan kualitas layanan dasar kepada masyarakat miskin

10. Mendorong Kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga ketrampilan untuk kemandirian PPKS dan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin melalui dukungan berbagai sektor
11. Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis IT dengan pendekatan yang adaptif dan merata serta memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas
12. Penguatan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan kualitas pendidikan
13. Peningkatan pemerataan dan kualitas akses pelayanan kesehatan dengan (1) Pemenuhan sarana prasarana; (2) Pemenuhan jumlah dan distribusi SDM Kesehatan secara bertahap dan menyeluruh termasuk SDM Kesehatan mental dan disabilitas; (3) Penyusunan kebijakan dan perbaikan baseline data
14. Perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting
15. Peningkatan kualitas pelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah
16. Peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi
17. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal, termasuk bagi kelompok rentan
18. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak di seluruh sektor pembangunan
19. Pemantapan pengelolaan sektor pertanian ,perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dankehutanan secara berkelanjutandan berkeadilan
20. Peningkatan kualitas air, udara dan air laut serta upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
21. Pemantapan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, termasuk kelompok rentan, serta implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim

4.2.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Berdasarkan tema, sasaran dan arah kebijakan untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 difokuskan pada sasaran sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	Target 2026	Target 2030
T.1. Meningkatnya Kualitas Modal Manusia	IT.1. Indeks Modal Manusia	Angka	n.a	0,53	0,57
S. 1. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	IS.1. Usia Harapan Hidup	Tahun	73,83	74,06	75,14
S. 2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	IS.2. Rata rata lama sekolah	Tahun	8,86	9,59-9,60	10,09-10,11
	IS.3. Harapan Lama sekolah	Tahun	13,55	13,87-13,88	14,16-14,19
	IS.4. Persentase siswa yang terserap di perguruan tinggi	Persen	23,04	25,71*	29,43*
T.2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang adaptif	IT.2. Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,87	3,09	3,29
S. 3. Meningkatnya kualitas demokrasi	IS.5. Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	76,43(2023)	83,54	86,99
S. 4.Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan	IS.6. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	79,04	79,46	82,9
	IS.7. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor	55,26 (2023)	56,99–57,11	59,24-59,52

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	Target 2026	Target 2030
S. 5. Meningkatnya kualitas generasi dan kesetaraan gender	IS.8. Indeks Perlindungan Anak	Angka	60,74 (2023)	61,97-63,48	64,41 – 67,51
	IS.9. Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,67 (2023)	56,98*	58,21-59,86
	IS.10. Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,366 (2023)	0,336-0,331	0,289-0,278
T.3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	IT.3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,02	4,8-6,5	6,1-8,5
	IT.3.2. Indeks Gini	Angka	0,363	0,358	0,340
	IT.3.3. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Skor	80,86 (data tahun 2023)	84,06	135,05
S.6. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan	IS.11. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	13,02	46,67-47,13	14,73-15,2
	IS.12. Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDRB (&)	Persen	n.a	1	2,01*
	IS.13. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Persen	6,99	6,63	4.98
	IS.14. Indeks Ketahanan Pangan	Persen	83,82	86,01	89,97
IS. 7. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global	IS.15. Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	9,68	10,9*	12,6*
IS. 8. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah	IS.16. Tingkat Inflasi (%)	Persen	1,23	3,05-3,72	2,45 - 3,43
	IS.17. Inklusi Keuangan	Persen	75,02	85,03	95,61

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	Target 2026	Target 2030
IS.9. Meningkatnya pembangunan perdesaan	IS.18. Persentase Desa Mandiri	Persen	32,88	34,05	38,71
IS.10. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	IS.19. Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	7,77	6,85 – 7,08	5,35 -5.96
	IS.20. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,19 (Agst)	3,64-4,03	3,02-3,76
I.T. 4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital	IT.4. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	Nilai	54,43 (2022)	55,66	56,56
IS. 11. Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	IS.21. Nilai Pilar Infrastruktur ITDN	Nilai	59,93 (2022)	62,12	63,58
IS. 12. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat	IS.22. Nilai Pilar Ketrampilan Masyarakat ITDN	Nilai	53,92 (2022)	62,12	63,58
T. 5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan responsif	IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	81,74	81,86	82,80
S. 13.Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	IS.23. Nilai SAKIP	Angka	69,02	70,03	70,50
S.14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.24. Indeks Inovasi Daerah	Angka	59,66	61,5	65
S.15. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah	IS.25. Indeks SPBE	Poin	3,94	4,05	4,25

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	Target 2026	Target 2030
	IS.26. Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,12	4,44	4,59
I.T. 6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan lingkungan yang berkelanjutan	IT.6.1. Indeks Wiliamson	Angka	n.a	0,54	0,5
	IT.6.2. IKLH	Angka	75,69	77,82	78,67
	IT.6.3. Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	n.a	33,46	48,49
S.16. Meningkatnya kualitas infrastruktur	IS.27. Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	85,64	88,83	90,33
S.17. Meningkatya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	IS.28. Indeks RIsiko Bencana	Poin	140,76	134,20-133,12	129,17 – 123,78

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

4.2.3 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026

4.2.3.1 Tema Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran yang pada dasarnya meliputi program program unggulan perangkat daerah, target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Adapun tema pembangunan daerah tahun 2026 yaitu "**Kolaborasi untuk Barru yang Berkeadilan, Maju Berkelanjutan dan Sejahtera Lebih Cepat"** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran
2. Peningkatan sumber daya manusia yang inklusif
3. Peningkatan kualitas insfrastruktur yang berketahanan iklim
4. Tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai agama
5. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi

Adapun penjelasan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.6

Penjelasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	Penjelasan Prioritas Pembangunan Daerah
1	Pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran	Mencakup upaya umum dalam penanggulangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi tingkat pengangguran
2	Peningkatan sumber daya manusia yang inklusif	Mencakup upaya umum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan dan kesehatan.
3	Peningkatan kualitas insfrastruktur yang berketahanan iklim	Mencakup upaya umum dalam membangun, memelihara dan mengembangkan infrastruktur yang berorientasi strategis yang berwawasan lingkungan dan berketahanan terhadap bencana
4	Tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai agama	Mencakup upaya umum dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi, ketentraman dan ketertiban umum, penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya
5	Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi	Mencakup upaya umum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan meliputi peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi wilayah

Sumber : *Rancangan RPJMD Kab. Barru Tahun 2025-2029*

Penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 telah diselaraskan dengan 8 program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 yang merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Barru yang menjadi acuan dalam menetapkan program prioritas pembangunan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 dengan Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026	PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029
1	Pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran	- Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi dan terpadu (PIK Paket); - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2	Peningkatan sumber daya manusia yang inklusif	- Peningkatan Kualitas dan akses pelayanan Pendidikan; - Pembangunan Akademi Sepak Bola Ramang; - Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SD/MI dan SMP/Mts - Subsidi SPP Mahasiswa S1, S2, dan S3 dan terutama Beasiswa 5 orang untuk Mahasiswa Kedokteran; - Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD; - Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan; - Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan; - Peningkatan kesejahteraan kader posyandu.
3	Peningkatan kualitas insfrastruktur yang berketahanan iklim	- Peningkatan Infrastruktur Jalan - Peningkatan Infrastruktur Irigasi - Peningkatan Infrastruktur air Bersih
4	Tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai agama	- Penerapan dan Pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektornik (SPBE) - Merit system ASN; - Digitalisasi Desa; - Perbaikan Tata Kelola dan peningkatan TPP ASN termasuk TPP bagi guru bersertifikasi - Perbaikan tata kelola musabah tilawatil qur'an dan umroh serta peningkatan insentif bagi pegawai sara dan guru mengaji

5	Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi	- Pembangunan dan pengembangan kawasan industri Barru (KIBAR) - Perbaikan tata kelola dan subsidi pupuk - Pembangunan dan pengembangan agroteknologi, agropolitan serta hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. - SPBU Nelayan - Pembangunan Pariwisata Gurilla, - Penguatan Kapasitas UMKM dan Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis lokal

Sumber : *Rancangan RPJMD Kab. Barru Tahun 2025-2029*

4.2.3.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026

Berdasarkan tema pembangunan tahun 2026 "**Kolaborasi untuk Barru yang Berkeadilan, Maju Berkelanjutan dan Sejahtera Lebih Cepat"** maka sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Barru tahun 2025-2029 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.8

Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026

No	Sasaran Pembangunan	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
1	Berkurangnya kemiskinan masyarakat	Angka Kemiskinan	%	7,47
2	Berkembangnya Lapangan kerja dan peluang usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,24
3	Meningkatnya mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	68,15
		Nilai Rapor pendidikan	Poin	82,17
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	83,31
		Prevalensi Stunting	%	22,3
5	Meningkatnya kualitas infrastrukut	Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	56,85
6	Menurunnya emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	39,88
7	Meningkatnya Kualitas Manajemen	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,54

No	Sasaran Pembangunan	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana			
8	Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsive, adaptif, kolaboratif, yang bernafaskan keagamaan	Nilai SAKIP	Poin	65,87
		Indeks Pemerintahan Digital	Poin	0,8
		Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,066
		Maturitas SPIP	Level	3
9	Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,81
10	Meningkatnya daya saing industry pengolahan	Kontribusi sector industry pengolahan terhadap PDRB	%	5,62
11	Meningkatnya kemandirian fiscal daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	13,36

Sumber : *Rancangan RPJMD Kab. Barru Tahun 2025-2029*

4.2.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKPD tahun 2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2026 sebagai berikut :

1. mengintegrasian penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan sistem terpadu berbasis teknologi yang mencakup perbaikan infrastruktur layanan dasar, peningkatan akses dan pendidikan vokasi, dan pengembangan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja;
2. Meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, derajat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, organisasi non pemerintah dan lembaga terkait lainnya, dengan dukungan kebijakan yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

3. Meningkatkan kualitas infrastruktur bekrlanjutan dan berketahanan wilayah terhadap bencana melalui perencanaan terpadu berbasis resiko, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, penguatan kapasitas sumberdaya manusia dengan penerapan teknologi inovatif, penguatan sistem peringatan dini, serta perluasan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna membangun infrastruktur yang tangguh, ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim serta resiko bencana.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah dan transparan dengan dukungan pengembangan sumberdaya manusia yang kompeten serta berbasis hasil penelitian
5. Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah dengan arah kebijakan mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, serta memperkuat kapasitas UMKM, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

4.2.3.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026

Tema, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dituangkan dalam 5 (lima) Prioritas Kabupaten (PK) RKPD tahun 2026. Lima PK tersebut merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 dan dilanjutkan pada RKPD Tahun 2026 sebagai koridor pencapaian tema, sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektifitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2026 difokuskan pada sasaran pembangunan, arah kebijakan dan program prioritas serta indikator kinerjanya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Prioritas Pembangunan Tujuan dan Sasaran Tahun 2026

Prioritas Pembangunan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2026
P.1. Pengentasan Kemiskinan dan Mengurangi Penagngguran	T.1. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,354	0,298
	S.1. Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat	Angka Kemiskinan	8,31	7,47
	S.2. Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,42	6,24
P.2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif	T.2. Meningkatkan kualitas manusia yang cerdas dan sehat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,51	75,77
	S.3. Meningkatnya mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	67,19	68,15
		Nilai Rapor pendidikan	80,21	82,17
	S.4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	81,15	83,31
		Prevalensi Stunting	21,00	22,3
P.3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Yang berketahanan Iklim	T.3. Meningkatkan daya saing infrastruktur dan wilayah yang berkelanjutan serta berketahanan bencana	Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur	3,990	4,000
		Indeks Resiko Bencana	143,89	128,93
	S.5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks infrastruktur daerah	3,42	56,85
	S.6. Menurunnya emisi GRK	Penurunan Intensitas Emisi GRK	-	39,88
	S.7. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,53	0,54
P.4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Agama	T.4. Meningkatkan Integritas tata kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	68,28	73,37
	S.8. Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif,	Nilai SAKIP	61,43	65,87
		Indeks Pemerintahan Digital	-	0,8

Prioritas Pembangunan	Tujuan/Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2026
	adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan	Indeks Pelayanan Publik	3,480	4,066
		Maturitas SPIP	2	3
P.5. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi	T.5. Meningkatkan produktifitas ekonomi daerah	PDRB Perkapita	52,28	58,14
	S.9. Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4,92	5,81
	S.10. Meningkatnya daya saing industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	4,97	5,62
	S.11. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	13,46	13,36

Sumber : Ranhir RPJMD Kab. Barru Tahun 2025-2029 dan Rumusan RKPD 2026

Tabel 4.10

Prioritas, sasaran, arah kebijakan pembangunan daerah dan Program Prioritas Kabupaten Barru Tahun 2026

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Perangkat daerah
1	Pengetasan Kemiskinan dan Mengurangi Penagngguran	Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat	Pengintegrasian penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan sistem terpadu berbasis teknologi yang mencakup perbaikan infrastruktur layanan dasar, peningkatan akses dan pendidikan vokasi, dan pengembangan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja	Percepatan Penanggulangan kemiskinan terintegrasi dan Terpadu (PIK PAKET)	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ahli dan kompeten sesuai standart peraturan perUUan	100 %	Dinas Sosial dan PPPA dan PPPA
						Persentase PPKS yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial	100 %	
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	Dinas Sosial dan PPPA
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Dinas Sosial dan PPPA

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Perangkat daerah
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mengakses layanan pengolahan air limbah domestik layak	74 %	Dinas PUTR
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mengakses air minum layak	86 %	Dinas PUTR
					Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak layak Huni	12,70 %	Dinas PUTR
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100 %	Dinas PUTR
						Persentase Warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100 %	
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10,55 %	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan	0,90 %	Dinas Koperasi dan UKM

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Perangkat daerah
						sertifikasi produk usaha mikro		
		Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100 %	Dinas Tenaga Kerja
					Program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	15,30 %	Disparpora
						Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,91 %	
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi terlatih yang Bersertifikat	100 %	Dinas PUTR
					Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	15,30 %	Disparpora
						Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,91 %	

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Perangkat daerah
2	PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG INKLUSIF	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, derajat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, organisasi non pemerintah dan lembaga terkait lainnya, dengan dukungan kebijakan yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.	Peningkatan kualitas dan akses pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SD/MI dan SMP/Mts, Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	APM PAUD	92,10 %	Diknasbud
						APM SD	95 %	
						APM SMP	95 %	
						Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS)	1400 Orang	
				Pembangunan Akademi Sepak bola ramang	Program pengembangan Kapasitas daya saing Keolahragaan	Persentase Raihan prestasi / Medali pada Event olahraga Nasional dan Provinsi	2,00 %	Disparpora
				Subsidi SPP Mahasiswa S1, S2, dan S3 dan terutama Beasiswa 5 orang untuk	Program pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	15,30 %	Disparpora

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Perangkat daerah
				Mahasiswa Kedokteran		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,91 %	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan, Peningkatan kesejahteraan kader posyandu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 Kelahiran Hidup	< 5	Dinas Kesehatan
						ngka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	< 20	
						Persentase Balita Stunting	17,3 %	
						Persentase Pasien yang tertangani sesuai standar berdasarkan peraturan perundangundangan	100 %	
						Jumlah penyakit menular dan tidak menular yang tertangani	100 %	

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Perangkat daerah
				Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	18,90 %	DPMDPPKB
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Yang Aktif	100 %	DPMPDPKB
3	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKETAHANAN IKLIM	Meningkatnya daya saing infrastruktur wilayah	Meningkatkan kualitas infrastruktur bekrlanjutan dan berketahanan wilayah terhadap bencana melalui perencanaan terpadu berbasis resiko, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, penguatan kapasitas sumberdaya manusia dengan penerapan teknologi inovatif, penguatan sistem peringatan dini, serta perluasan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna membangun infrastruktur yang tangguh, ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan	Peningkatan Infrastruktur jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	35,06 %	Dinas PUTR
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten	42 %	Dinas PUTR
				Peningkatan Infrastruktur Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	72 %	Dinas PUTR
						Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	12,9 %	

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Perangkat daerah
			iklim serta resiko bencana	Peningkatan Infrastruktur Air Bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mengakses layanan pengolahan air limbah domestik layak	74 %	Dinas PUTR
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mengakses air minum layak	86 %	Dinas PUTR
		Menurunnya emisi GRK			Program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	71	Dinas Lingkungan Hidup
						Indeks Kualitas Udara	72	
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana			Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM)	100 %	BPBD
					Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana (SPM)	100 %	BPBD
						Persentase jumlah warga negara yang memeperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (SPM)	100 %	

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Perangkat daerah
						Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (SPM)	100 %	
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA	Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsive, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah dan transparan dengan dukungan pengembangan sumberdaya manusia yang kompeten serta berbasis hasil penelitian	enerapan dan Pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektornik (SPBE)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0,88 %	Diskominfo
				Digitalisasi Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan desa yang mencapai tertib adimistrasi sesuai peraturan Per UU an	100 %	DPMDPPKB
					Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa yang baik sesuai peraturan Per UU an	7,5 %	DPMDPPKB
				Perbaikan tata kelola musabah tilawatil qur'an dan umroh serta peningkatan insentif bagi pegawai sara dan guru mengaji	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100 %	Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Perangkat daerah
5	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI	Meningkatnya daya saing industry pengolahan	Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah dengan arah kebijakan mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, serta memperkuat kapasitas UMKM, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.	Pembangunan dan pengembangan kawasan industri Barru (KIBAR)	Program perencanaan dan Pembangunan industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIK	100 %	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Pengendalian izin usaha industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	100 %	Dinas PUTR
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan	100 %	DPMPTSP
		Meningkatnya nlai tambah ekonomi daerah		Perbaikan tata kelola dan subsidi pupuk, Pembangunan dan pengembangan agroteknologi, agropolitan serta hilirisasi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan, Perkebunan dan Holtikultura	100 %	Dinas Pangan, Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Perangkat daerah
				pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan.SPBU nelayan		Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung Peternakan	100 %	
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,37 %	Dinas Pangan, Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan
						Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	3,23 %	
					Program Penyuluh Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	25 %	Dinas Pangan, Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	6.650,21 Ton	Dinas Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap Nelayan	21.030,80 Ton	Dinas Perikanan
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan	Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan UMKK	1.463,85 Ton	Dinas Perikanan

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Perangkat daerah
				Pembangunan Pariwisata Gurilla	Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase Peningkatan Jumlah PAD Pariwisata	2 %	Disparpora
				Penguatan Kapasitas UMKM dan Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis local	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro	0,90 %	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian	65	Dinas Koperasi dan UKM
					Program pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang	100	Dinas Koperasi dan UKM
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah			Rogram Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0,02 %	Bapenda

Sumber : Data olah Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah tersebut dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis dan arah pembangunan tahun 2026 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029. Adapun keterkaitan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Kab.Barru Tahun 2026

No	Permasalahan Pembangunan	No	Isu Strategis Daerah	No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026
1	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan,dan pemerataan pendapatan	1	Peningkatan penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan.	1	Pengentasan Kemiskinan dan mengurangi pengangguran
2	Masih rendahnya kualitas pembangunan manusia	2	Perluasan dan peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	2	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang inklusif
3	Masih Minimnya kualitas infrastruktur, dan tingginya Risiko Bencana Hidrometeorologi	4	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah serta Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan	3	Peningkatan kualitas Infrastuktur yang berketahanan iklim
4	Tata kelola pemerintahan daerah belum efektif dan efisien	5	Penguatan reformasi birokrasi dan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4	Tata Kelola Pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai agama
5	Masih rendahnya daya saing daerah	6	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan berkelanjutan	5	Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2025

4.2.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
f. Sosial.

Tabel 4.12

Prioritas Pembangunan yang mendukung atau terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2026	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Pengentasan Kemiskinan dan mengurangi pengangguran	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah Tanggap
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang inklusif	1. Pendidikan Anak usia dini 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Kesetaraan 4. Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil 5. Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin 6. Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir 7. Pelayanan Kesehatan Bagi Balita 8. Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar 9. Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif 10. Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut 11. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 12. Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus 13. Pelayanan Kesehatan Bagi gangguan jiwa berat 14. Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkulosis 15. Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV
Peningkatan kualitas Infrastuktur yang berketahanan iklim	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah 3. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air minum sehari- Hari 4. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik.

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2026	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Tata Kelola Pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai agama	1. Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum 2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana 3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Bencana 5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah 3. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air minum sehari- Hari

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang optimal, maka program prioritas pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 yang mendukung SPM dalam rangka sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan. Adapun program prioritas pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 yang mendukung SPM disajikan pada tabel berikut :

4.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SASARAN PEMBANGUNAN

Arah kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah dengan efektif dan efisien. Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab II, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut.

4.3.2 Arah Kebijkan Pembangunan Daerah

A. Perumusan Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran prioritas pembangunan yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RKPD. Adapun perumusan arah kebijakan RKPD sebagai berikut:

Tabel 4.14
Permusuan Arah Kebijakan RKPD

No	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Ket
1	Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	Mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan sistem terpadu berbasis teknologi informasi, yang mencakup perbaikan infrastruktur layanan dasar, peningkatan akses pendidikan vokasi, dan pengembangan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja (AK.1)	
2	Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif	Peningkatkan mutu pendidikan, derajat kesehatan,ndan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi nonpemerintah, dan lembaga terkait lainnya, dengan dukungan kebijakan yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjtan (AK.2)	
3	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah yang Berkekuatan Iklim	Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan wilayah terhadap bencana melalui perencanaan terpadu berbasis risiko, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan penerapan teknologi inovatif, penguatan sistem peringatan dini, serta perluasan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna membangun infrastruktur yang tangguh, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan iklim serta risiko bencana (AK.3)	
4	Meningkatkan *Good Governance* yang Bernafaskan Keagamaan	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten serta berbasis hasil penelitian (AK.4)	
5	Meningkatkan Produkivitas Perekonomian yang Berdaya Saing	engembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata, serta memperkuat kapasitas UMKM, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah (AK.5)	

Sumber: Analisis Tim Penyusun RKPD 2026

4.3.2 Strategi Pembangunan Daerah

A. Perumusan Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RKPD. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Rumusan strategi merasionalkan pilihan arah kebijakan sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Adapun penahapan pembangunan sebagai berikut.

Tabel 4.15
Perumusan Strategi RKPD

Prioritas Pembangunan	Optimalisasi Sumber Daya	Fokus Kewilayahan	Program Prioritas
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	- Pemetaan Berbasis Teknologi Informasi untuk identifikasi kantong kemiskinan dan wilayah TPT tinggi - Penataan Layanan Dasar yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat miskin - Bantuan Sosial yang terarahberbasis data terpadu yang terintegrasi - Pelatihan vokasi berbasis kebutuhan sektor pertanian, perikanan, UMKM dan konstruksi dan pertambangan - Pengembangan Sekolah Rakyat	- Desa tertinggal dengann Angka kemiskinan dan pengangguran tertinggi - Daerah Infrastruktur Terbatas (Desa Bulo-Bulo, Gattareng, Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting)	- Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi dan Terpadu (PIK PAKET) - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif	- Pemetaan Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan dengan wilayah akses yang rendah - Peningkatan Akses Layanan dasar Sekolah, Puskesmas, dan Posyandu di wilayah tertinggal - Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan - Pelatihan bagi guru, tenaga kesehatan dan kader posyandu untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	- Wilayah dengan Anak Putus Sekolah yang Tinggi - Wilayah dengan pravalensi tinggi	- Peningkatan Kualitas dan akses pelayanan pendidikan - Subsidi SPP Mahasiswa SI S2, dan S3 dan terutama Beasiswa 5 orang untuk mahasiswa Kedokteran - Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD

	- Peningkatan kesejahteraan kader posyandu, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD - Subsidi SPP Mahasiswa S1, S2, dan S3 dan terutama Beasiswa 5 orang untuk mahasiswa Kedokteran - Pendampingan Makan Bergizi Sehat (MBG)		- Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan - Peningkatan kesejahteraan kader posyandu -
Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan Iklm	- Peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi) untuk mendukung pemerataan pembangunan dan akses ekonomi. - Penguatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang ramah lingkungan guna meningkatkan ketahanan pangan dan efisiensi air. - Kajian lingkungan awal (AMDAL) untuk Kawasan Industri dan inisiasi program pengadaan lahan secara berkelanjutan untuk KIBAR	Wilayah rural dengan infrastruktur terbatas, resiko bencana banjir dan wilayah potensi meningkatkan pendapatan masyarakat	- Peningkatan Infrastruktur Jalan - Peningkatan Infrastruktur Irigasi - Peningkatan Infrastruktur air Bersih
Meningkatan *Good Governance* yang Bernafaskan Keagamaan	- Penguatan SPIP dan SAKIP serta penerapan E-Government - Peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN melalui implementasi merit system, pelatihan berkelanjutan, digitalisasi manajemen kinerja, dan pembentukan budaya kerja yang adaptif serta bernafaskan keagamaan - Penguatan kolaborasi riset dan kebijakan publik bersama akademisi, lembaga riset - Digitalisasi pelayanan desa tahap I (70% Desa sudah pelayanan berbasis digital) Peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan dan organisasi masyarakat untuk mendukung keharmonisan sosial, toleransi antarumat, serta keterlibatan dalam pelayanan publik - Pengarahan program kegiatan CSR swasta agar mendukung pembangunanprioritas daerah.	- Wilayah dengan indeks pelayanan rendah, minim digitalisasi (Desa/Kecamatan)	- Penerapan dan Pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE) - Merit system ASN - Digitalisasi Desa - Kelola dan peningkatan TPP ASN termasuk TPP bagi guru bersertifikasi -
Meningkatkan Produktivitas Perekonomian	- Penyusunan master plan kawasan industri berbasis	- Kawasan Industri Barru (KIBAR) dan sekitarnya sebagai	- Pembangunan dan pengembangan

yang Berdaya Saing	data spasial dan potensi ekonomi lokal. - Kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah pusat, daerah, dan swasta untuk menyusun regulasi insentif dan tata ruang yang mendukung. - Penguatan UMKM dan koperasi terutama koperasi merah putih sebagai tulang punggung ekonomi lokal melalui pembiayaan, pendampingan dan teknologi - Penyusunan rencana pengelolaan kawasan dan membangun kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelola Kawasan Industri - Peningkatan kawasan pengendalian dan monitoring yang ketat terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah - Optimalisasi potensi sumber-sumber pajak daerah melalui perluasan dan pemutkhiran basis pajak, peningkatan kepatuhan pajak serta digitalisasi sistem perpajakan daerah	lokomotif transformasi ekonomi industri - Wilayah agropolitan dan pesisir dengan potensi pertanian, perikanan, dan peternakan untuk pengembangan hirilisasi dan agroteknologi.	Kawasan Industri Barru - Perbaikan tata kelola dan subsdi pupuk - Pembangunan dan pengembangan agroteknologi, agropolitan serta hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. - SPBU Nelayan

Sumber: Analisis Tim Penyusun RKPD 2026

4.4 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Dan Kabupaten

Dalam rangka keselarasan antar rencana pembangunan mulai dari level nasional hingga kabupaten/kota, maka dibutuhkan sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan. Adapun Kesesuaian sasaran indikator makro pembangunan provinsi dan kabupaten sesuai tabel berikut:

Tabel 4.16
Kesesuaian Sasaran Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2026 terhadap Target Provinsi Tahun 2026

No	Indikator Makro	Capaian 2024	Target Provinsi Terhadap Kab/Kota	Target Ranwal RKPD Kab. Barru Tahun 2026	Kesepakatan Pembahasan Rakortekbang	Target RKPD Kab. Barru Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,92	5,81	6,05	5,81	5,81
2	PDRB Perkapita	52,27	58,14	71,39	58,14	58,14
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota					
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,31	7.48 - 6.58	5,4	7.48 - 6.58	7.48 - 6.58

5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,42	6,24	5,64	6,24	6,24
6	Rasio Gini	0,31	0,297	0,352	0,297	0,297
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,31	73,22	75,77	73,22	73,22
8	Penurunan Emisi GRK (%)	-	32,66	43,2	32,66	32,66
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,65				

Sumber Data : Data Olah Bappelitbangda Kab.Barru Tahun 2025

Selanjutnya keselarasan sasaran pembangunan kabupaten , dengan sasaran pembangunan provinsi, dan prioritas nasional (Asta Cita) dilengkapi dengan penyajian tabel berikut :

Tabel 4.17

Keselarasan Sasaran Pembangun Kabupaten Barru terhadap Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Asta Cita

Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	**Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru**	**Prioritas Nasional/ Asta Cita**
1. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas, Prioritas Nasional 4.
1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif 2. Meningkatnya kualitas demokrasi 3. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan	1. Meningkatnya Mutu pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi millenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas, Prioritas Nasional 4. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), Prioritas Nasional 1.
1. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan	1. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui slyasembada pangan, energi, air

2. Meningkatnya kualitas generasi muda dan kesetaraan gender		ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, Prioritas Nasional 2.
1. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global	1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Prioritas Nasional 5.
1. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah	1. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, Prioritas Nasional 3.
1. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran 2. Meningkatnya pembangunan perdesaan	1. Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat	Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, Priroitas Nasional 6.
1. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat	1. Berkembangnya Lapangan Kerja dan kualitas tenaga kerja	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, Prioritas Nasional 3.
1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah 2. Meningkatnya kualitas pelayanan public 3. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah	1. Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, Prioritas Nasional 7.
1. Meningkatnya kualitas infrastruktur 2. Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, Prioritas Nasional 3.
1. Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 2. Menurunnya Emisi GRK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, Prioritas Nasional 8.

sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Barru dengan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 dapat dijelaskan sebagaimana uraian tabel berikut.

Tabel 4.18

Keselarasan Asta Cita, Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, dan Prioritas Kab. Barru Tahun 2026

Asta Cita / PN	PROVINSI	KABUPATEN BARRU
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2026		
Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	Peningkatan Kualitas SDM Yang Berahlak dan Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif	Kolaborasi untuk Barru yang Berkeadilan, Maju Berkelanjutan dan Sejaterah Lebih Cepat
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026		
PN1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM **PN2** memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru **PN3** Melanjutkan pembangunan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	**PP 1** Peningkatan akses danlayanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi **PP 2** Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan	**PK 1** Pengentasan Kemiskinan dan Mengurangi Pengangguran; **PK 2** Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Inklusif; **PK 3** Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang berketahanan iklim; **PK 4** Tata Kelola Pemerintahan yang Berlandaskan Nilai-nilai agama; dan **PK 5** Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis

kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui peran aktif Koperasi **PN4** Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan Gender, Serta penguatan peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas **PN5** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di Dalam Negeri **PN6** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan **PN7** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan **PN8** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	pelibatan kelompok marjinal **PP 3** Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru **PP 4** Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing **PP 5** Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan **PP 6** Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital **PP 7** Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan **PP 8** Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Potensi. .
PEMETAAN SINKRONISASI PRIORITAS		
PN1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM **PN7** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,	**PP 6** Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	**PK 4** Tata Kelola Pemerintahan yang Berlandaskan Nilai-nilai agama;

dan Penyelundupan		
PN3 Melanjutkan pembangunan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui peran aktif Koperasi	**PP 7** Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan **PP 8** Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	**PK 3** Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang berketahanan iklim.
PN4 Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan Gender, Serta penguatan peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas **PN8** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	**PP 1** Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi **PP 2** Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	**PK 2** Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Inklusif
PN6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	**PP 5** Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	**PK 1** Pengentasan Kemiskinan dan Mengurangi Pengangguran
PN2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air,	**PP 3** Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam	**PK 5** Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi;

Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru **PN5** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah	lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru **PP 4** Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	

Keterangan : PN (Prioritas Nasional); PP (Prioritas Provinsi); PK (Prioritas Kabupaten)

Berdasarkan tabel diatas sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Barru dengan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, dan agenda prioritas pembangunan nasional tahun 2026, maka dilakukan sinkronisasi Program Priroitas Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 dengan Program Prioritas Kabupaten Barru sebagaimana uraian tabel sebagai berikut.

Tabel 4.19

Dukungan Program Kabupaten terhadap Program Prioritas Provinsi

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Target Tahun 2026
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	80 %
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	100 %
5	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
6	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	30,32 %
8	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100 %
9	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
10	Program Peningkatan Kewasapadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewasapadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
11	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Target Tahun 2026
12	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
13	Program Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	
14	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	0,66 %
15	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 %
16	Program Pemenuhan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	100 %
17	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	100 %
18	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100 %
19	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	
20	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	18,90 %
21	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	100 %
22	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
23	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	0,90 %
24	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	65 %
25	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	100%
26	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2 %
27	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	84,81 %
28	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	10 %
29	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %
30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	25 %
31	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	50 %
32	Program Penyuluh Pertanian	Program Penyuluh Pertanian	
33	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	100 %
34	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %
35	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	79,63 %
36	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	21.030,80 Ton

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Target Tahun 2026
37	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6,650,21 Ton
38	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
39	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.463,85 Ton
40	Progam pengembangan ekspor	Progam pengembangan ekspor	
41	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	90,59 %
42	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	100 %
43	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
44	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	31,65 %
45	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
46	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0,00 %
47	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	100 %
48	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,02 %
49	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100 %
50	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %
51	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %
52	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	100 %
53	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	100 %
54	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	100 %
55	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100 %
56	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	100 %
57	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	0.88 %
58	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	0.80 %
59	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	7 Dokumen
60	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %
61	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	90 %

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Target Tahun 2026
62	Program Penataan Organisasi	Program Penataan Organisasi	
63	Program Pengelolaan barang Milik Daerah	Program Pengelolaan barang Milik Daerah	
64	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %
65	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	
66	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100 %
67	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	
68	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	
69	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	0.88 %
70	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	0,80 %
71	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	100 %
72	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	36 %
73	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	99 %
74	Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	98,75 %
75	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	42 %
76	Program Penelitian Dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan	
77	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
78	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	35,06 %
79	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	
80	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	100 %
81	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran	2 %
82	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	100 %
83	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	31,66 %
84	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	
85	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	100 %
86	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	
87	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	100%
88	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	86 %

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Target Tahun 2026
89	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	
90	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	
91	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	12,70 %
92	Program Pengelolaan Hutan	Program Pengelolaan Hutan	
93	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
94	Program Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Sampah	
95	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	71 %
96	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	100%

Keselasaran Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20

Keselasaran Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2025
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.											0	0		
2.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal								0	0		
3.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						0	0		
4.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	25	27582720		25

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : - saat pembahasan DPMPTSP kab. barru tidak melakukan penginputan target indikator nilai realisasi penanaman modal - Target RPJMD untuk nilai realisasi penanaman modal kab. barru sebesar 695 M - target DPMPTSP provinsi untuk kabupaten barru tahun 2026 300,9 M - target yang disepakati untuk tahun 2026 sebesar 695 M - untuk kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha disepakati sesuai dengan usulan dari daerah dengan target 25 kegiatan usaha dengan pagu 27.582.720 - kegiatan harus dilaksanakan karena merupakan kegiatan yang mendukung asta cita dan arah kebijakan pembangunan sulsel															
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	100	38463876		45
Catatan Hasil Pembahasan : - untuk kegiatan pengawasan penanaman modal disepakati target 45 kegiatan usaha dengan pagu 38.463.876 - kegiatan harus dilaksanakan karena merupakan kegiatan yang mendukung asta cita dan arah kebijakan pembangunan sulsel															
6.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global								0	0		
7.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
8.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	0	0		0
Catatan Hasil Pembahasan : - Untuk sub kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan di Kabupaten karena kinerjanya masih menyatu dalam pengawasan Barang Beredar.															
9.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	0	0		0
Catatan Hasil Pembahasan : - Surat Keterangan Asal belum pernah dilaksanakan di kabupaten dan dilakukan koordinasi lebih lanjut pada instansi terkait. - Indikator outcome prioritas : pertumbuhan ekspor barang provinsi pada tahun 2024 Rp.163.576.242.291,- dengan peningkatan sebesar 12,26%. Target untuk tahun 2026 : 12,5%															
10.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						0	0		
11.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	0	0	Mengikutsertakan Produk / flayer produk perdagangan	10

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Pameran dagang skala lokal dalam setahun dilakukan sebanyak 1 kali dan skala nasional dalam setahun dilakukan sebanyak 2 kali seperti Inacraft dan Kriyanusa, dengan memfasilitasi 10 pelaku usaha.															
12.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	0	0	Mengikutsertakan Produk / flayer produk perdagangan	0
Catatan Hasil Pembahasan : - Misi dagang tidak pernah dilakukan oleh kabupaten Barru. - Indikator outcome prioritas : pertumbuhan total perdagangan dengan provinsi lainnya tidak pernah dilakukan (indikator baru) sehingga akan dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait indikator ini.															
13.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas								0	0		
14.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						0	0		
15.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	4	10000000	revisi RIPIK sesuai perencanaan pembangunan Kawasan Industri Barru (KIBAR)	1
Catatan Hasil Pembahasan : - Dokumen RPIK Kab Barru 2017-2037 sdh ada - Rencana akan dilaksanakan revisi tahun 2026															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
16.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggarany a Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	162132450		3
Catatan Hasil Pembahasan : - kegiatan yang dilaksanakan yaitu promosi, dekranasda dan pembinaan para pelaku IKM - Untuk segala kegiatan yang berbentuk pelatihan, pembinaan dan pendampingan pelaku IKM di arahkan ke sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pembangunan sumber daya industri - Indikator Outcame yaitu kontribusi Ekspor produk industri Non Migas terhadap total ekspor karena belum perna dilakukan perhitungan disarankan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Barru dan BPS Kab Barru															
17.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						0	0		
18.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggarany a Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	2	3000000		2

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : - Kegiatan pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan ijin usaha industri (IUI), sertifikasi halal															
19.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	30088900		5
Catatan Hasil Pembahasan : - Fasilitasi yang dilakukan yaitu fasilitasi sertifikasi halal, TKDN, NIB,PIRT, Ijin Usaha Industri - Indikator Outcame yaitu Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas tRealisasi Tahun 2024 yaitu sebesar 1,8 M utk target 2026 sebesar 2 M.															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
20.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.											0	0		
21.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air								0	0		
22.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						0	0		
23.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0.874	832784518	Sub kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan dapat mendukung Asta Cita yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan	0.874
Catatan Hasil Pembahasan : Pada sub kegiatan peningkatan jaringan irigasi ditargetkan panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan sebesar 0,874 Ha. Lokasi peningkatan jaringan irigasi direncanakan pada daerah irigasi kewenangan kabupaten yang tersebar pada 7 Kecamatan, target yang ditetapkan kabupaten Barru sepanjang 0,874 KM jaringan irigasi yang ditingkatkan. Kesepatan ini selanjutnya akan tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD 2025 - 2029, RKPD dan renja 2026)														

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
24.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	4.968	28391126 50	Sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dapat mendukung Asta Cita yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan	4.968
Catatan Hasil Pembahasan : Pada sub kegiatan Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan direncanakan tersebar pada 7 Kecamatan irigasi kewenangan kabupaten berdasarkan usulan hasil musrembang kecamatan. dengan target panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi sepanjang 4,9 KM. Hal ini akan menjadi bahan lebih lanjut dalam dikumen perencanaan (RPJMD 2025 - 2029, RKPD 2026 dan renja 2026)															
25.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
26.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	3	976136799		1
Catatan Hasil Pembahasan : pada sub kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan target yang ditetapkan sebesar 1 ltr/dtk, lokasi direncanakan pada Kec. Pujananting, Kec.Tanete Riaja, Kecamatan Baruu dan Kec. Balusu dengan target sambungan rumah sebesar 1 ltr/dtk. Adapun target akses air minum aman untuk Kabupaten barru tahun disesuaikan menjadi 15% dengan harapan 12% telah tercapai di tahun 2025. Selanjutnya target tersebut akan termuat dalam dokumen perencanaan (RPJMD 2025 - 2029. RKPD dan Renja tahun 2026)														

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
27.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	50	750000000		50

Catatan Hasil Pembahasan :
Sub kegiatan Perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan direncanakan lokasi pelaksanaan kegiatannya pada kec. Barru, Kec. Balusu dan Tanete Riaja dengan target sambungan rumah sebesar 50, kegiatan ini merupakan dukungan terhapat meningkatnya ketahanan air dan akses air minum aman di Kabupaten Barru, selanjutnya akan termuat dalam dokumen perencanaan RKPD dan Renja Kabupaten Barru Tahun 2026

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
28.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang								0	0		
29.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						0	0		
30.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Revisi RDTR Kab. Barru sedang dalam proses tahun 2025, diharapkan proses ini dapat terselesaikan, maka pada tahun 2026 sudah tidak kami rencanakan.	0

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Dinas PUPR Kabupaten Barru 1. RTRW ditargetkan selesai tahun 2025, sehingga tidak dialokasikan target keluaran sub kegiatan dan pagu indikatif untuk penetapan 2. Penetapan RDTR tidak dialokasikan pada Tahun 2026, karena akan diprioritaskan pada sub kegiatan Penyusunan Materi Teknis 3. Pemerintah Kabupaten Barru telah mengupayakan semua pemenuhan yang dibutuhkan untuk penetapan Perda RTRWK Barru, antara lain hasil Audit RTRWK, sudah melakukan asistensi dan sudah mengirimkan perbaikannya ke Kementerian ATR, sehingga pemerintah kabupaten Barru optimis dapat menetapkan RTRWK Barru pada Tahun 2025. Bappelitbangda Kabupaten Barru Revisi RTRWK Barru ditargetkan penetapannya pada Tahun RDTR KI Garongkong Matek nya direncanakan akan dialokasikan pada perubahan RKPD Tahun 2025, namun karena adanya efisiensi maka penyusunan materi teknis RDTR tersebut akan dialokasikan pada RKPD dan Renja OPD Tahun 2026. Dinas SDACKTR Provinsi Sulawesi Selatan 1. RTRWK Barru yang belum ditetapkan menjadi Perda, berdasarkan informasinya terdapat kendala khususnya terkait pengalokasian anggaran pada Tahun 2025. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diharapkan Dinas agar segera menyampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapat tambahan anggaran. 2. Memperhatikan panjangnya waktu yang dibutuhkan dalam penetapan Perda RTRWK Barru dan sangat bergantung pada waktu dan kesempatan Pemerintah, maka untuk mengantisipasi jika RTRWK Barru tidak dapat ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2025, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Barru tetap mengakomodasi sub kegiatan Penetapan RTRWK Barru untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan Bersama dengan DPRDK Barru dan evaluasi Ranperda dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengusulkan Bantek Penyusunan RDTR Kabupaten Barru kepada Kementerian ATR, namun Kementerian ATR tidak mengalokasikan Bantek Penyusunan RDTRK Kabupaten 4. Perlu upaya lebih bagi Pemerintah Kabupaten Barru jika ingin tetap menetapkan Perda RTRWK Barru Tahun 2025. Namun, pemerintah Prov. Sulsel tetap mendukung pemerintah kabupaten Barru untuk menetapkan Perda RTRWK di tahun 5. Sehubungan dengan adanya Surat dari Menteri ATR/Kepala BPN perihal pemberitahuan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2026, sehingga diharapkan kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan kegiatan, anggaran, dan sumber daya manusia (SK Tim Pengawas) untuk mendukung Pengawasan Penyelenggaraan Daerah Tahun 2026 sehingga Kabupaten Barru perlu mempersiapkan hal terkait diatas. BAPPELITBANGDA Prov. Sulawesi Selatan 1. Beberapa catatan berdasarkan pembahasan Rakortekrenbang Tahun 2025 dengan Pemerintah Pusat, yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, termasuk pemerintah kabupaten/kota, antara lain: a) Untuk operasional PPNS penataan ruang di provinsi dan kab/kota pada tahun 2026 tetap dianggarkan oleh Kanwil ATR/BPN Sulawesi b) Pada tahun 2026 terdapat bimtek penilaian pelaksanaan KKPR untuk seluruh provinsi dan fasilitasi pembinaan pemerintah daerah kab/ c) Keterkaitan dengan efisiensi pada tahun 2025 ini sehingga untuk perekrutan, bimtek dan operasionalisasi lainnya terkait PPNS akan dilaksanakan di Kanwil ATR/BPN tahun 2026 dan bisa bersurat langsung ke Ditjen PPTR Kementerian ATR/ d) Beberapa subkegiatan yang diharapkan dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 adalah: 1) Sub Kegiatan 1.03.12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan 2) Sub Kegiatan 1.03.12.2.04.0006 Pelaksanaan Audit Tata 3) Sub Kegiatan 1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam 4) Sub Kegiatan 1.03.12.2.04.0010 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis 5) Sub Kegiatan 1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR. 2. Pemerintah kabupaten Barru tidak mengisi target keluaran dan alokasi pagu indikatif untuk sub kegiatan Penetapan RDTRK dan sub kegiatan Penetapan RTRWK, namun untuk mengakomodasi keterbatasan waktu dan kesempatan Pemerintah dalam proses persetujuan lintas sektor dalam rangka penetapan RTRWK akibat banyaknya pemerintah daerah lain yang akan dibahas, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Barru tetap mengalokasikan target keluaran dan pagu indikatif pada sub kegiatan Penetapan Perda RTRWK pada RKPD dan Renja OPD Tahun 2026, khususnya untuk melaksanakan kegiatan Kesepakatan Bersama dengan DPRDK Barru dan Evaluasi Perda RTRWK Barru oleh Pemerintah Provinsi yang harus dikoordinasikan dengan Ditjen. Bina Bangda Kemendagri.															
31.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	Revisi RTRW Kab. Barru sedang dalam proses di tahun 2025, diharapkan dapat terselesaikan , maka pada tahun 2026 tidak kami rencanakan.	
Catatan Hasil Pembahasan :															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
32.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.											0	0		
33.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								0	0		
34.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						0	0		
35.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	34	470776350		34

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Dishub Kab. Barru: 1. 34 unit yang dimaksud terdiri dari Lampu jalan, Rambu lalu lintas, cermin tikungan 2. Rencana pemasangan faskesjal berada di 7 kecamatan Dishub Prov. Sulsel : 1. penyediaan perlengkapan jalan sebaiknya diprioritaskan untuk daerah rawan kecelakaan, LHR tinggi sehingga dapat mendukung penurunan angka kecelakaan lalu lintas.															
36.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	0	0		1
Catatan Hasil Pembahasan : Dishub Kab. Barru: 1.ada rencana pemeliharaan terminal tipe C (terminal Mattiro Walie) 2. rencana alokasi pagu 2026 sebesar RP. 200.000.000 3. kondisi terminal berfungsi baik berdampingan dengan pasar dan stasiun KA Barru															
37.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						0	0		
38.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	0	0		1

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
				Kabupaten/Kota											
Catatan Hasil Pembahasan : Dishub Kab. Barru: 1. kab. Barru memiliki pelabuhan penyeberangan yang dioperasionalkan oleh DInas Perhubungan Kab. Barru (pelabuhan penyeberangan Garongkong) 2. Rencana alokasi Pagu 2026 untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 1 Milyar untuk pemeliharaan dermaga Moring Dolphin dan pagar															
39.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	0	0		1
Catatan Hasil Pembahasan : Dishub Kab. Barru: 1. ada pelayanan di pelabuhan Garongkong 2. rencana alokasi Pagu 2026 pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 94.060.000 untuk kebutuhan operasional pelabuhan Bappelitbangda Prov. Sulsel 1. sebaiknya pemda kab. Barru memastikan sub kegiatan ini dapat terakomodir ke dalam dokumen RKPD 2026 dan Renja OPD 2026															
40.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru											0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
41.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan								0	0		
42.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						0	0		
43.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	0	0		1250
Catatan Hasil Pembahasan : 50 kwt dengan jumlah 1.250 keluarga diperuntukkan untuk bantuan benih dan sayuran termasuk kompos dengan pagu sebesar Rp.50. juta															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
44.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	0	0		1
Catatan Hasil Pembahasan : Pemantauan harga pangan dan pelaksanaan gelar pangan murah yang dilakukan sebanyak di 7 kecamatan dan 3 kali untuk kabupaten dengan pagu sebesar Rp.30 juta															
45.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
46.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50000000	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan sangat penting dalam menjamin ketersediaan pangan di daerah kabupaten/kota. a. Cadangan pangan dalam meningkatkan Ketersediaan Pangan 1. Mengantisipasi krisis pangan yang disebabkan oleh bencana alam, gagal panen, atau faktor lainnya. 2. Menjamin ketersediaan pangan di daerah kabupaten/kota b. Mengurangi Kerawanan Pangan c. Meningkatkan Kesiapsiagaan dalam 1. Membantu mengantisipasi bencana alam atau kejadian lainnya yang	1

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
														dapat mempengaruhi ketersediaan pangan. 2. Meningkatkan respons terhadap kebutuhan pangan pada saat krisis atau bencana. Meningkatkan Efisiensi 1. Mngurangi biaya yang terkait dengan pengadaan pangan pada saat krisis atau bencana. 2. Meningkatkan efektivitas dalam menangani kerawanan pangan dan krisis pangan.	
Catatan Hasil Pembahasan : Pemantauan dan penyaluran pangan serta invervensi terhadapa daerah rawan pangan dan daerah yang terdampak bencana															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
47.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	1	5000000	Dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi, perlu melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, dan masyarakat itu sendiri. a. Koordinasi dan sinkronisasi dapat menghindari tumpang tindih dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi. b.Koordinasi dan sinkronisasi dapat meningkatkan efisiensi dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi. c. Koordinasi dan sinkronisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan kerawanan pangan dan gizi.	1

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
														d. Koordinasi dan sinkronisasi dapat meningkatkan transparansi dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi. e. Koordinasi dan sinkronisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi.	
Catatan Hasil Pembahasan : Pelaksanaan sosialisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi sebanyak 2 kali pertemuan															
48.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan								0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		PERIKANAN												
49.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
50.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	50	35000000		150

Catatan Hasil Pembahasan :
Target Prod. disepakati sebesar 21.238, 5 TON
Dkp Barru : - Jumlah Nelayan 5.492 Nelayan =& yang terdaftar di KUSUKA 2.590 Nelayan
-Jumlah Nelayan Miskin 832 Nelayan (Nelayan Miskin yang dimaksud merupakan nelayan yang sudah terdata di P3KE)
- Mengusulkan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas nelayan (perbengkelan) dengan target 50 Orang, diprioritaskan nelayan yang telah memiliki KUSUKA dan masuk dalam data P3KE
Dkp Prov : -Mengusulkan agar jumlah orang (nelayan kecil) yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 150 Orang
- Disepakati Target 150 Nelayan, dengan pagu anggaran kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran kab/kota

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
51.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	10	5250000		30
Catatan Hasil Pembahasan : DKP Barru : - Jumlah Kelompok Nelayan sebanyak 286 Kelompok DKP Prov : - Mengusulkan sebanyak 30 kelompok yang difasilitasi - adapun kelompok yang difasilitasi terdiri dari pembentukan kelompok baru dan peningkatan kelas															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
52.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	100	611100702		100
Catatan Hasil Pembahasan : DKP Barru : - dari target 100 Unit terdiri dari, mesin motor tempel (6,5 Pk) 54 Unit, alat tangkap jaring (gill net) 28 Unit, Perahu Fiber 18 Unit DKP Prov : target kinerja produksi perikanan tangkap yang telah disepakati yaitu sebesar 21.238,5 TON, kab mendukung dalam penyedian sarpras pemberdayaan usaha nelayan skala kecil															
53.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	hijau, dan ekonomi biru														

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
54.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	10	5000000		25

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : DKP Barru : - Jumlah RTP Pembudidaya = 1.764 DKP Prov : - Pengawasan pada usaha pembudidaya ikan antara lain , NIB, CPIB dan CBIB,Kesesuaian dokumen dan keabsahannya, penggunaaan sarpras produksi yang ramah lingkungan (Pakan, Pupuk dan obat2an) - DKp kab Barru agar menganalisa Target persentase cakupan pengawasan berdasarkan kesesuaian data pelaku usaha - Untuk rencana aksi agar dikoordinasikan denagn bid. pengawasan dkp prov - disepakati untuk target pelaku usaha yang diawasi menjadi 25 pelaku usaha															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
55.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	5	5000000		10

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : DKP Barru : - Jumlah UPI sebanyak 112 UPI, tahun 2024 UPi yang sudah ber-SKP sebanyak 5 UPI - Mengusulkan target sebanyak 5 Pelaku usaha yang diawasi DKP Prov : - Dkp kab Barru agar melengkapi data dukung berupa jumlah pengplah/pemasar serta hasil olahan. - Pengawasan pada usaha pengawasan / pengolahan hasil perikanan, antara lain , Penggunaan Formalin dan bahan kimia lainnya, Kesesuaian dokumen dan keabsahannya, penggunaaan sarpras produksi yang ramah lingkungan (Pakan, Pupuk dan obat2an) - DKp kab Barru agar menganalisa Target persentase cakupan pengawasan berdasarkan kesesuaian data pelaku usaha - Untuk rencana aksi agar dikoordinasikan denagn bid. pengawasan dkp prov - disepakati untuk target pelaku usaha yang diawasi menjadi 10 pelaku usaha, agar bappeda kab barru memperhitungkan penambahan alokasi anggaran untuk mensupport program pengawasan SDKP.														

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
56.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	0	0		0
Catatan Hasil Pembahasan : DKP PROVINSI : untuk PUD aktifitas belum terdata															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
57.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	0	0		0
Catatan Hasil Pembahasan : Untuk kegiatan ekstraksi garam belum ada aktifitas															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
58.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian								0	0		
59.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
60.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	10000000	Pada sub Kegiatan ini menitikberatkan pada pengawasan dan pengendalian terhadap pengisian Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) terhadap pengadaan pupuk, peredaran pupuk, pengawasan alat dan mesin pertanian Pengawasan pupuk dan alsintan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memastikan bahwa produk yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan pupuk dan alsintan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dengan memastikan bahwa produk yang digunakan efektif dan sesuai dengan standar.	2

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : DTPHbun -Kabupaten Dinas Pengawasan dan pembinaan dalam bentuk perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi alokasi anggaran Penyusunan RDKK, 2 Laporan: Alat dan Mesin Pertanian dan Laporan Pupuk bersubsidi. (Pupuk bersubsidi mengambil dari pengecer dan distributor setiap bulan data penebusan dan penyaluran ke kelompok tani) Kegiatan ini penting karena untuk mengetahui kebutuhan setiap kelompok tani yang membutuhkan alsintan sehingga dapat diketahui ptresentase kelompok tani yang memiliki alsintan dalam keadaan baik sehingga dapat terdata untuk tahun berikutnya. -Provinsi: Perlu menambahkan sub kegiatan apa yang ada pengadaan alat mesin pertanian yang bisa kami lihat di Ranwal RKPDnya -Kabupaten Dinas: di Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan kawasan pertanian Target: 44.206 Ha, Pagu Indikatif: 1.242.804.684 Dinas Peternakan Prov. Sulsel dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru Menyepakati: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, SUB KEGIATAN ; Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provins, terkait penyediaan benih. Meskipun tdk ada tagging sub keg utk urusan peternakan, tetap diharapkan dukungan kab/kota utk mendukung produksi daging ternak di wil Sulsel. Penyediaan pakan juga penting utk dialokasikan anggarannya di kab/kota. program ; Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sub kegiatan ; Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular. Seluruh kabkota diharapkan utk melakukan mitigasi dan penyediaan vaksin wabah penyakit. adapun Target produksi daging 255 Ton Kab barru yang ditetapkan provinsi , Kab Barru menyepakati target tsb ,. . Ukt produksi telur, provinsi menetapkan 9.182 Ton dan Kab Barru menyepakati.														
61.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	0	0		0
Catatan Hasil Pembahasan : DTPHBun: Kabupaten Dinas: Sub Kegiatan ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya walaupun dengan kemendagri yang lama sub kegiatan ini akan menjadi tagging sesuai arahan pemerintah pusat yang mendukung prioritas presiden dan provinsi sulawesi selatan, diharapkan kabupaten mengalokasikan sub kegiatan ini kedalam Renja Tahun 2026 Bappelitbangda: Bersifat wajib di akomodir, apakah ada kegiatan lain yang mendukung kegiatan benih bersertifikat ini. disarankan mencari sub kegiatan mendukung yang menjadi kewenangan kabupaten dan memasukkan kedalam Ranwal Renstra dan diperbaiki pada dokumen Renja OPD Kabupaten Barru														

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
62.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						0	0		
63.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	4	5000000	Koordinasi dan sinkronisasi ini dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memastikan bahwa prasarana pendukung pertanian digunakan secara efektif, misalanya irigasi pertanian dan jalan usaha tani. Koordinasi dan sinkronisasi dapat mengintegrasikan dan meningkatkan kualitas infrastruktur pertanian, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan	4

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
														produktivitas. Koordinasi dan sinkronisasi dapat meningkatkan kesadaran petani/masyarakat tentang pentingnya prasarana pendukung pertanian.	
Catatan Hasil Pembahasan : DTPHBun Kabupaten Dinas: Bersifat di pengawasan dan pembinaan, kegiatannya merupakan perjalanan dinas (Survey Lokasi) dan Rapat Koordinasi Bappelitbangda Kabupaten: Untuk menjadi bahan pertimbangan terkait alokasi anggaran kepada pimpinan															

64.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	44206	1242804684	Pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian dengan garis besar kegiatan adanya pengadaan sarana pertanian yang saling mendukung dan menunjang prasarana pertanian. Pengadaan sarana pertanian baik berupa benih, bibit tanaman, pupuk, alat dan mesin pertanian serta prasarana dan prasarana pendukung pertanian lainnya untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertanian sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, serta menjaga kelestarian lingkungan.	44.206

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
														Tujuan kawasan pertanian untuk peningkatan produksi seperti produksi tanaman pangan, hortikultura, atau peternakan. Dengan mengidentifikasi potensi kawasan pertanian dapat diketahui jenis tanah, iklim, dan sumber daya air. Dengan Pengendalian dan Pengembangan Kawasan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, seperti air, tanah, dan energi, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.	

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : DTPHbun -Kabupaten Dinas Pengawasan dan pembinaan dalam bentuk perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi alokasi anggaran Penyusunan RDKK, 2 Laporan: Alat dan Mesin Pertanian dan Laporan Pupuk bersubsidi. (Pupuk bersubsidi mengambil dari pengecer dan distributor setiap bulan data penebusan dan penyaluran ke kelompok tani) Kegiatan ini penting karena untuk mengetahui kebutuhan setiap kelompok tani yang membutuhkan alsintan sehingga dapat diketahui ptresentase kelompok tani yang memiliki alsintan dalam keadaan baik sehingga dapat terdata untuk tahun berikutnya. -Provinsi: Perlu menambahkan sub kegiatan apa yang ada pengadaan alat mesin pertanian yang bisa kami lihat di Ranwal RKPDnya -Kabupaten Dinas: di Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan kawasan pertanian Target: 44.206 Ha, Pagu Indikatif: 1.242.804.684															
65.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru											0	0		
66.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah								0	0		
67.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru														
68.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	34	5000000	Dengan melampirkan Laporan Hasil Verifikasi Indeks KAMI	34
Catatan Hasil Pembahasan : kesepakatan target pada sub kegiatan penedian layanan keamanan informasi dan pesandian pemerintah daerah dengan 34 perangkat daerah, layanan TTE (tanda tangan elektronik), dengan pagu anggaran tahun 2026 Rp. 5.000.000															

69.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	1	1000000	Dengan melampirkan Daftar Kebijakan Persandian dan Keamanan Informasi	1

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : kabupaten Barru : Kesepakatan target sub kegiatan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah dengan 1 dokumen, menetapkan pagu anggaran tahun 2026 Rp. 1.000.000 Penetapan kebijakan tentang sistem menejemen keamanan informasi (berupa menejemen resiko, kebijakan menejemen aset, dan pedoman pengendalian keamanan informasi).															
70.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru											0	0		
71.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas								0	0		
72.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru														
73.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	19	20000000	Mendukung dalam pencapaian IKLH	19
Catatan Hasil Pembahasan : Hasil Pembahasan : - Untuk pemantauan kualitas air dilakukan pada 5 sungai : Sungai bottoe, Sungai sunpang, sungai jampue, sungai takkalasi, dan sungai Bungi setiap sungai terdapat 3 titik lokasi - Untuk pemantauan kualitas lahan dengan menghitung luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang terletak di 4 lokasi - Target IKLH 78,76 - Target IKA 78,71 - Target IKU 80,25 - Target IKL 76,11 - Perlu penggadaan alat ukur udara untuk parameter PM 2,5 - Pagu Anggaran 20.000.000 untuk kegiatan koordinasi dan operasional peninjauan lapangan															
74.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	33	50000000	Mendukung dalam pencapaian IKLH	33

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Hasil Pembahasan : - Pengambilan contoh uji dan pengujian untuk 5 sungai masing-masing 3 titik dilakukan 2 kali dalam setahun - Pengambilan contoh uji dan pengujian untuk air linggi TPA 1 dan sumur pantau 1 - Pengambilan contoh uji dan pengujian untuk IPLT 1 titik dilakukan sebanyak 1 kali - Untuk Pemantauan kualitas udara menggunakan pasif sampler yang disediakan oleh KLH tidak didanai oleh Pemda - Pengujian dilakukan di laboratorium LH Provinsi - Pagu anggaran 50.000.000 -															
75.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						0	0		
76.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	0	0		25044.07
Catatan Hasil Pembahasan : Hasil Pembahasan : - Pemerintah daerah Kab Barru belum melakukan penginputan untuk sub kegiatan pada program Pengelolaan Persampahan untuk itu diwajibkan untuk melakukan perbaikan pada Sistem RKPD dengan mengakomodir sub kegiatan terkait pengelolaan persampahan serta diakomodir didalam renja dan renstra OPD. - Target penanganan sampah sebesar 25.044, 07 Ton - Pemerintah daerah Kab. barru wajib menghitung persentase pengelolaan sampah setiap tahunnya dan memasukkan sebagai indikator program. - Menyesuaikan kembali renstra DLH Kab. Barru dengan sub kegiatan yang ada di RKPD karna merupakan kegiatan prioritas. - Target IKPS tahun 2026: 47 - Target IKPS digunakan sebagai indikator sasaran - Pagu anggaran sebesar Rp. 3.836.875.000 - Perlu ada DAK Non Fisik untuk mendukung pengelolaan persampahan															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
77.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	0	0		
Catatan Hasil Pembahasan :															
78.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	0	0		
Catatan Hasil Pembahasan :															
79.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru														
Catatan Hasil Pembahasan :															
80.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.											0	0		
81.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan								0	0		
82.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
83.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	50	1200000000		50

Catatan Hasil Pembahasan :
1) Target indikator outcome prioritas yang mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi yaitu Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Barru tahun 2026 sebesar 96,70%. Berdasarkan distribusi target provinsi untuk kabupaten/kota Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Barru ditargetkan mencapai 82,54% pada tahun 2026 untuk mendukung pencapaian target Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 80,08%.

2) Pencapaian target indikator outcome prioritas didukung oleh Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melalui sub kegiatan :
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan target 50 unit rumah dengan jumlah alokasi pagu sebesar Rp. 1.200.000.000. Berdasarkan hasil pembahasan disepakati target tetap berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten Barru pada sejumlah 5 (lima) kawasan kumuh pada Kawasan Barru, Kawasan Tanete Rilau, Kawasan Tanete Riaja Pujananting, Kawasan Mallusetasi, Kawasan Soppeng Riaja Balusu

84.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	2	120000000		2

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : 1) Pencapaian target indikator outcome prioritas didukung oleh Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melalui sub kegiatan : Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru dengan target 2 unit rumah dengan jumlah alokasi pagu sebesar Rp. 120.000.000. Berdasarkan hasil pembahasan disepakati target tetap berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten Barru pada sejumlah 1 kawasan kumuh, pada Kawasan Barru 2) Tahun 2024 Penyusunan SK Kumuh Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru. Luas penanganan kawasan kumuh ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 4 Ha dari total 86,77 Ha luasan kawasan kumuh. Berdasarkan data Balai Prasarana Permukiman Wilayah SulSel luas kawasan kumuh kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru 16,13 ha 3) Penanganan kumuh meliputi 3 aspek berupa RTLH, Jalan dan Drainase 4) Sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pencapaian target Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan bersumber dari KOTAku 5) Status Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan kewenangan Dinas Cipta Karya Kabupaten Barru 6) Status Penerapan Percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan kewenangan Dinas Cipta Karya Kabupaten Barru															
85.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
86.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	1	250000000		1
Catatan Hasil Pembahasan : Pencapaian target indikator outcome prioritas didukung oleh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum melalui sub kegiatan : Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dengan target 1 Lokasi dengan jumlah alokasi pagu sebesar Rp. 250.000.000. Berdasarkan hasil pembahasan disepakati target tetap berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten Barru															

87.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	4	200000000		4

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : 1) Pencapaian target indikator outcome prioritas didukung oleh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum melalui sub kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan ditargetkan sebanyak 4 lokasi dengan alokasi pagu sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Berdasarkan hasil pembahasan disepakati target tetap berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten Barru 2) Status kepemilikan daerah yang memiliki peraturan daerah terkait serah terima PSU : Pemerintah Kabupaten Barru belum menyusun Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah tentang Penyerahan PSU Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Barru 3) Status pengembang perumahan yang telah menyerahkan PSU perumahan berjumlah 2 Pengembang yaitu PT. Racita (Griya Racita Sari dan Griya Racita 2) dan CV. Agung Mulia Perkasa (Perumahan Griya Bahari Permai)														
88.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi								0	0		
89.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
90.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Terlaksananya Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang	0	0		0
Catatan Hasil Pembahasan : Tidak ada Dinas yang membidangi urusan transmigrasi di kabupaten barru															
91.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	0	0		0
Catatan Hasil Pembahasan : Tidak ada Dinas yang membidangi urusan transmigrasi di kabupaten barru															
92.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI						0	0		
93.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	0	0		0
Catatan Hasil Pembahasan : Tidak ada Dinas yang membidangi urusan transmigrasi di kabupaten barru															
94.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan											0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.														
95.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi								0	0		
96.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						0	0		
97.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	2	25000000		2

Catatan Hasil Pembahasan :
2 lembaga untuk panti asuhan dan kegiatan karang taruna dalam bentuk operasional. lembaga panti asuhan verifikasi validasi LKS. dicatat sampai untuk proses akreditasi

Outcome Prioritas :
1. Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan = PPKH ada 29 orang dengan target 10 KPM sehingga total 290 KPM
2. Lembaga kesejahteran sosial (LKS) ASN dan Non ASN yang mengikuti sertifikasi = 2 lembaga yang engikuti akreditasi
3. Lembaga dan PSKS kelembagaan yang mengikuti proses akreditasi = 2 orang Pekerjaan sosial ASN
4. Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan = 100 % dan dihonor melalui Dinas Sosial
5. Persentase pelaksanaan SPM = 100 %

Catatan lainnya :
untuk mendukung visi misi gubernur untuk meningkatkan daya beli masyarakat (khususnya warga miskin), data DTKS yang terverifikasi dan tervalidasi mohon disiapkan Kab/Kota

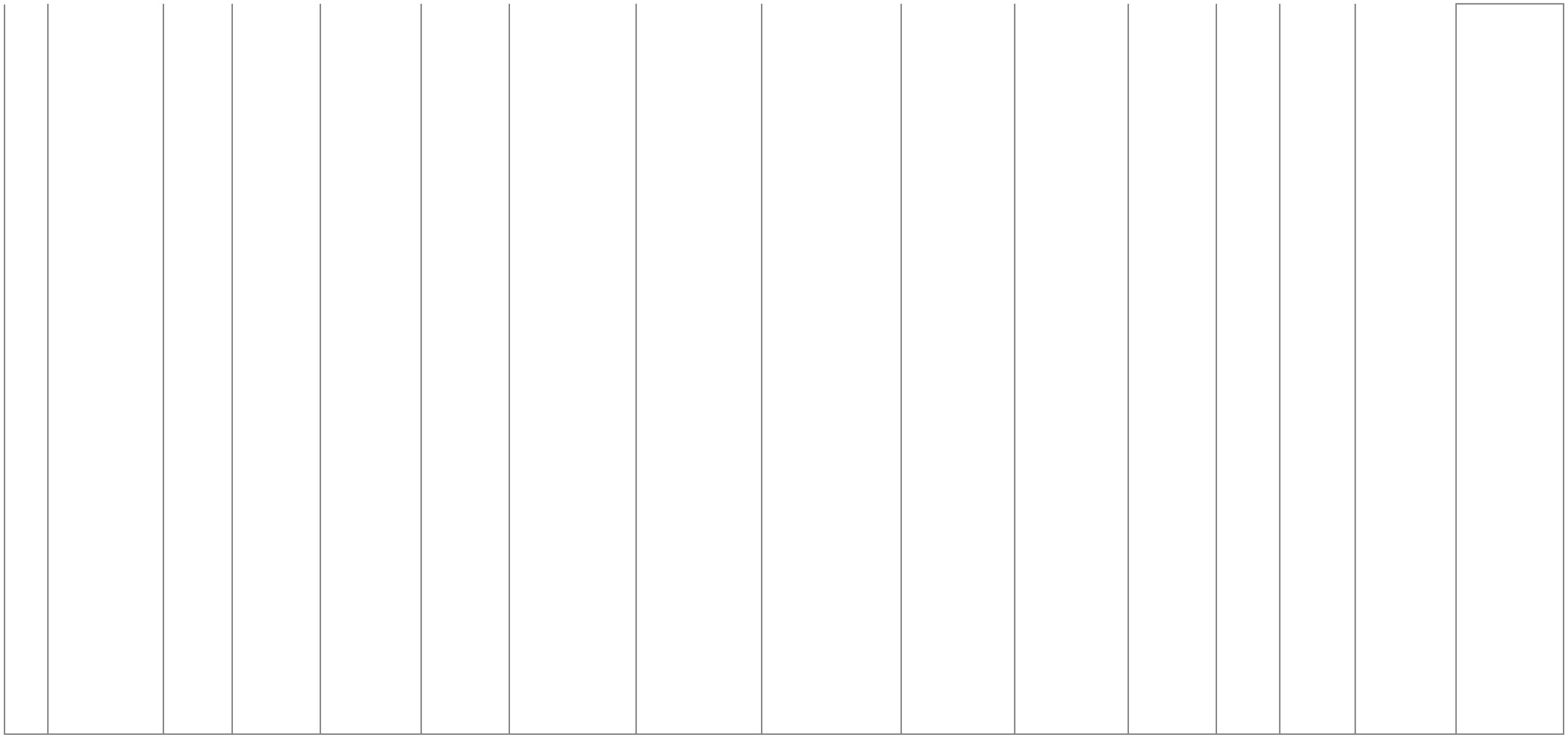
No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
98.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	0	0		0
Catatan Hasil Pembahasan : sudah ada direncanakan tetapi belum diinput di SIPD akan dikoordinasikan lagi dengan Bappeda Kab Barru. 55 orang yang akan ditargetkan termasuk TKSK.															
99.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						0	0		
100.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	30000000		0
Catatan Hasil Pembahasan : tidak direncanakan, agar dapat dikoordinasikan kembali tetapi ada di program pemberdayaan sosial terkait usaha kepada orang miskin. sebisa mungkin untuk diaktifkan kembali untuk subkegiatan ini dan disesuaikan kembali pada RKPD dan renja/renstra OPD.															
101.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1100	150000000		1100

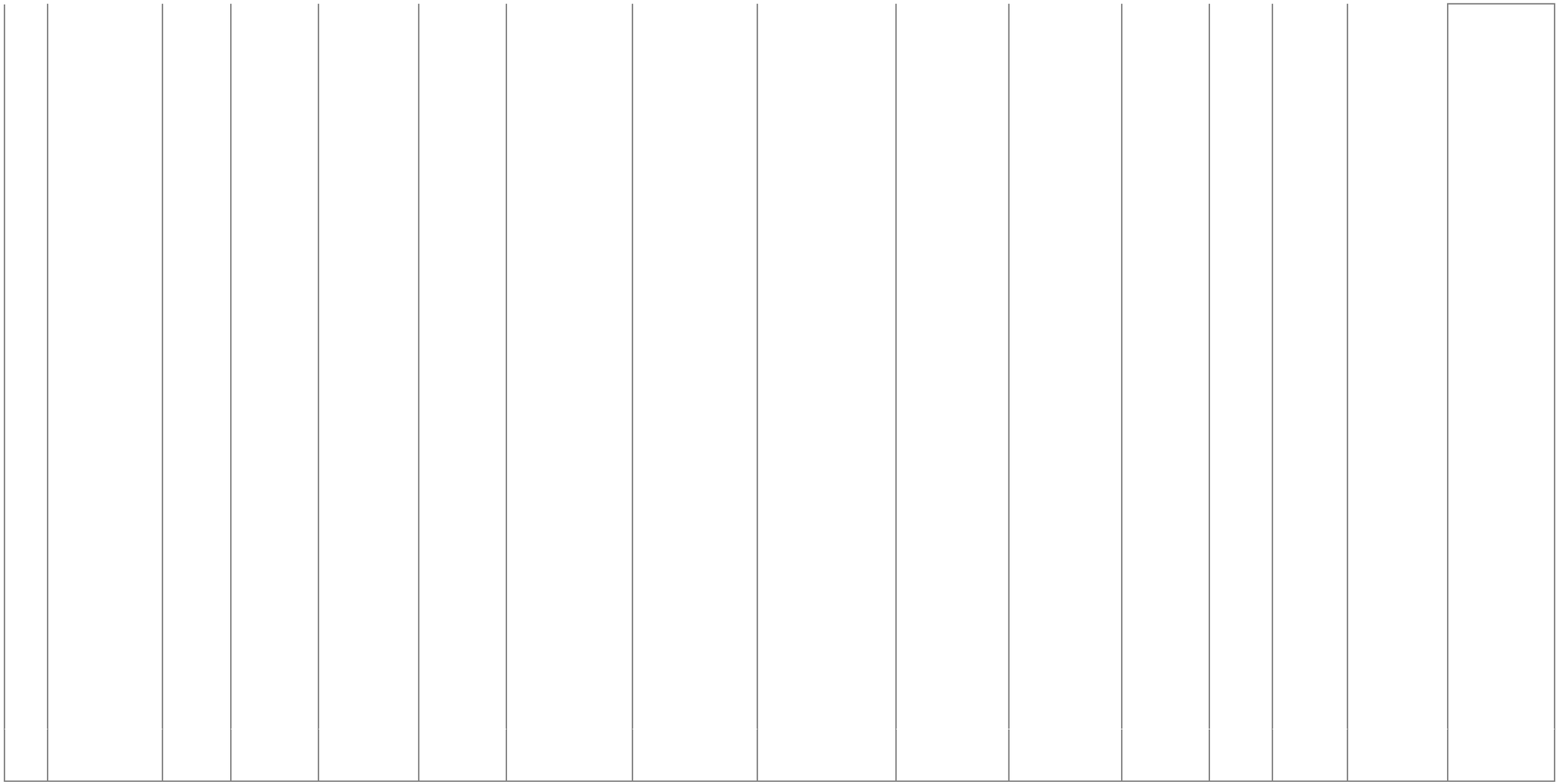
No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Target 1100 orng untuk masyarakt miskin yang tidak terdat di DTKS dan P3KE berupa bantuan 200 ribu/bulan/otrang untuk 350 orang dan kompor gas. dengan pagu yang benar 1.050.000.000. penerimanya ditetapkan dalam bentuk perbub dan verifikasi langsung ke lapangan agar disesuaikan lagi sesuai pedoman APBN maupun APBD yng berlaku. DTKS hampir seuruhnya sudah menerima bantuan, sehingga menyasar non DTKS. catatan untuk exclusion error ini diusulkan masuk ke DTKS karena termasuk bantuan sosial.														
102.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja								0	0		
103.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						0	0		
104.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	20	40000000		40
Catatan Hasil Pembahasan : (1) Kegiatan berupa Pelatihan Menjahit dan Otomotif Motor Injeksi (2) Pelaksanaan kegiatan pelatihan selama ini menggunakan bantuan anggaran dari BPVP Kabupaten Pangkep karena anggaran yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru tidak mencukupi untuk melaksanakan pelatihan. (3) Jumlah peserta pelatihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
105.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						0	0		
106.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	5	10000000		5
Catatan Hasil Pembahasan : (1) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru melakukan pembinaan dan fasilitasi terkait Peraturan Perusahaan (2) Beberapa cabang perusahaan yang ada di Kabupaten Barru melakukan Pengesahan Peraturan Perusahaan di Provinsi maupun di Pusat															
107.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	4000	17351890		4000
Catatan Hasil Pembahasan : (1) Pendataan kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang ada di Kabupaten Barru, selama ini hanya mendata pekerja di perusahaan dan Non ASN. (2) BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan masih dalam proses pembahasan tetapi akan tetap dilakukan pendataan tahun 2025 (3) Anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barru ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru akan dipindahkan tahun 2026 (4) Pendataan kepesertaan pekerja di perusahaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru turun langsung ke perusahaan, sedangkan untuk kepesertaan Non ASN, OPD yang ada di Kabupaten Barru melaporkan jumlah Non ASN mereka ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru															
108.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan											0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.														
109.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa								0	0		
110.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA						0	0		

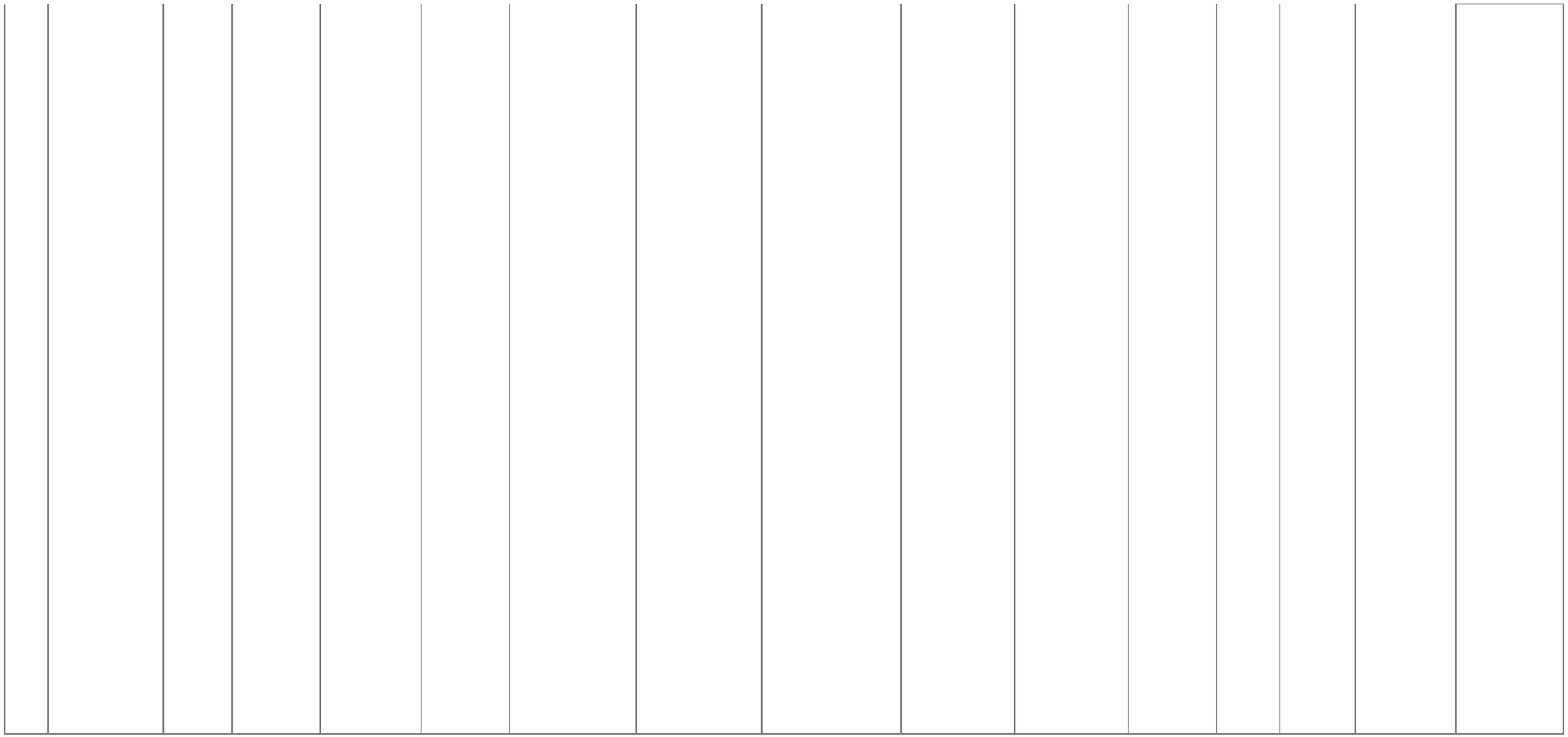
111.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	0	0		0





No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : 1. Tidak diakomodir di dokumen perencanaan untuk dilaksanakan di tahun 2026. Kondisi sarana dan prasarana desa di Kab. Barru sudah berkategori baik. 2. Data Jumlah Desa: 40 desa 3. Data Desa Mandiri: 33 desa, 7 desa maju 4. Target peningkatan Desa Mandiri sudah mencapai target dari RPJMD Kab. Barru. 5. Kab. Barru akan melakukan pendataan status desa mandiri sesuai dengan indeks desa Tanggapan dan Arahan DPMD Provinsi: 1. Mengkoordinakasikan baseline data desa mandiri dengan DPMD Provinsi 2. Memperhatikan sub kegiatan lain yang mendukung pencapaian dimensi indeks desa dalam perhitungan persentase desa mandiri. 3. Memperhatikan target Nasional pencapaian peningkatan Desa Mandiri di Sulawesi Selatan adalah 592 pada tahun 2026, dengan rata-rata peningkatan 28 desa mandiri setiap kab/kota. 4. Pemerintah Provinsi menargetkan peningkatan status desa mandiri di Kab. Barru: 2 desa (2025) dan 2 desa (2026).														
112.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						0	0		

113.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	40	40000000	Kegiatan ini mendukung kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan asli desa (PAD). BUMDes juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan potensi ekonomi desa untuk itu pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa menjadi kegiatan prioritas dan mendukung kebijakan Nasional	40



No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	

Catatan Hasil Pembahasan :
1. Mendukung pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES .Telah diakomodir di dokumen perencanaan untuk dilaksanakan di tahun 2026. Dengan target: 40 dokumen.
2. Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa pembinaan untuk peningkatan kapasitas BUMDES dalam hal pengelolaan usaha dalam mendukung PAD desa. Dokumen memuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDES
3. Data Status BUMDES masih dalam tahap pendataan.

Tanggapan dan Arahan DPMD Provinsi:
1. Mengkoordinasikan baseline data status BUMDES dengan DPMD Provinsi
2. Memperhatikan target Nasional dalam pencapaian indicator bagi hasil BUMDES terhadap APBDES. Target Sulawesi Selatan sebanyak 4,07% di tahun 2026.
3. Memperhatikan salah satu indikator persentasi BUMDES kategori Maju

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
114.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.											0	0		
115.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)								0	0		
116.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						0	0		

117.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	0	0		40

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	

Catatan Hasil Pembahasan :
Daerah:
Pencapaian IPS 2023 = 1,8 , 2024 = 2,61
Target IPS 2025 = 2,63 , 2026 = 2,65
Belum melakukan pembaharuan 1 data makax tidak menetapkan target tinggi. Karena ada Domain dalam penilaian IPS yang ditakutkan tidak terpenuhi.
Dukungan anggaran sangat kecil. Padal direkomendasi EPSS ada disebutkan perlu peningkatan kapasitas dan dukungan ke portal 1 data.
Tahun 2025 yang menjadi lokus EPSS adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian. Rencana lokusnya EPSS 2026 adalah dinas yang sama di 2025.
Belum ada portal 1 data,
Belum dilakukan pelatihan2 (sdh 2 tahun tidak dilakukan).
Dinaskominfo mengusulkan target sub kegiatan pemenuhan prinsip 1 data tahun 2026 = 40% dengan pagu anggaran = 60 juta Untuk melaksanakan kegiatan seperti bimtek, pemutakhiran data, FGD dan lainnya untuk mendukung pemenuhan prinsip 1 data Indonesia.

Provinsi:
Perlu menetapkan target dan pagu anggaran utk sub kegiatan ini karena masih kosong di SIPD.
Di Portal 1 data sudah terintegrasi dengan kab/kota tapi baru berupa link.
Saran 2026 target IPS dinaikkan di 2,7

118.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	100	26887150		50

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Daerah: Yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian kualitas statistik sektoral target 100% adalah dengan pencetakan buku, menunggu portal 1 data. Melaksanakan klinik meta data, dari 24 OPD dijadwalkan waktu penginputan meta data. Minimal disimpan dalam bentuk exel sambil menunggu pengaktifan portal. Kolaborasi dan kerjasama dengan BPS sangat baik. Daftar data sedang proses untuk dibuatkan SK. E-walidata SIPD telah dibuatkan akun walidata oleh bappeda untuk Diskominfo. Daftar Data telah dibuat oleh Bappeda. Diskominfo telah membuatkan akun bagi OPD hanya belum dilakukan penginputan. Saat ini sedang proses konfirmasi ke OPD terkait daftar data yang dimiliki dan data yang tidak diakomodir Kesepakatan Penurunan Target menjadi 50% Provinsi: Apakah walidata SIPD sudah berjalan? Diskominfo dapat bekerjasama dengan Bappeda untuk mengaktifkan e walidata SIPD. Untuk diskominfo akan ada 3 akun yang dimiliki yaitu, akun walidata, akun admin dan akun produsen data. Perlu SK penyebarluasan e walidata. Bappeda diharapkan membuat daftar data yang akan dikumpulkan oleh kominfo sebagai walidata. Kemudian data tsb diinput oleh OPD di portal 1 data. Sub kegiatan ini agar dimasukkan di Renja Diskominfo TA 2026 dan Renstra OPD 2025-2029. Untuk target 100% sub kegiatan ini apakah realistis dapat tercapai? Pastikan data sektoral dilaporkan tepat waktu sesuai daftar data dan tidak ada lagi kesalahan data (tervalidasi) dengan kondisi tersebut dapat membantu pencapaian target 100%															
119.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.											0	0		
120.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah								0	0		
121.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		INFORMATIKA												

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
122.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	1	8065810		2

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Untuk Tahun 2025 belum ada Komisi Informasi, sedangkan Tahun 2026 direncanakan 2 Laporan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.000.000,-. 2022 ada 1 sengketa dan diselesaikan di tahun 2024															
123.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	80	104791810		15
Catatan Hasil Pembahasan : Untuk Tahun 2025 sudah tersedia pelayanan informasi publik sebanyak 11 permohonan, sedangkan untuk Tahun 2026 merencanakan penambahan 15 permohonan informasi publik dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10.000.000,-.															
124.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	0	0		300
Catatan Hasil Pembahasan : Untuk Tahun 2025 tidak terdapat sub kegiatan ini, sedangkan untuk Tahun 2026 akan dimasukkan kedalam Dokumen Perencanaan kegiatan terkait aduan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 25.000.000,-															
125.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	50	980480000		73

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Untuk Tahun 2025 kerjasama Media dengan 33 Media Online, 7 Media Cetak, 4 Chanel Media Sosial (Youtube, Facebook, Tiktok dan IG), 1 Radio dan 1 Wabsite untuk media penyebarluasan informasi publik, sedangkan untuk Tahun 2026 tetap kegiatan yang sama dan penambahan menjadi target 27 Media Online dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.500.000.000,-.															
126.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						0	0		
127.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	0	0		3
Catatan Hasil Pembahasan : Untuk Tahun 2025 sudah ada 1 Portal Pelayanan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Tahun 2026 direncanakan pengembangan 3 portal layanan (portal layanan publik, portal layanan administrasi dan portal layanan data) dan untuk sub kegiatan ini dimasukkan kedalam Dokumen Perencanaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,-.															

128.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	3	45000000		6

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Untuk Tahun 2025 sudah terdapat 18 Aplikasi yang sudah dibangun dan baru 2 Aplikasi yang terintegrasi, sementara Tahun 2026 direncanakan penambahan 6 Aplikasi yang akan terintegrasi dan terdaftar dalam SPLP dengan pagu indikatif sebesar Rp. 180.000.000,-															
129.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	34	1500000000		64
Catatan Hasil Pembahasan : Untuk Tahun 2025 sudah Penyediaan Akses Internet sudah terpusat di Dinas Kominfo, sebanyak 34 OPD, 7 Kantor Kecamatan sudah terkoneksi, sedangkan Tahun 2026 direncanakan penambahan target 7 Puskesmas, 10 Kantor Kelurahan, 3 SD dan 3 SMP dalam Penyediaan Akses Internet dengan Infrastruktur pagu indikatif Rp. 2.000.000.000,- dan 40 Kantor Kelurahan sejumlah															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
130.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	1	248660480		1
Catatan Hasil Pembahasan : Untuk Tahun 2025 Kab. Barru belum memiliki Master Plan Smart City, untuk Tahun 2026 direncanakan pelaksanaan Smart City dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,-.															
131.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.											0	0		
132.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila								0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
133.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						0	0		
134.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	92110	596258126		400
Catatan Hasil Pembahasan : 1. (8.01.03) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, (8.01.03.2.01.0003) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Target 400 Orang Sudah mencakup pelaksanaan Pendidikan Politik, Target Peserta adalah anggota partai politik dan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Instansi yang bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik â€¢ Untuk Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakasanakan terdapat 2 kegiatan di antara hibah parpol dan bimtek pertanggung jawaban parpol â€¢ Untuk Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakasanakan Perlu perbaikan menjadi jumlah orang yang tadinya adari jumlah suara sah sebnayak 92210															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
135.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						0	0		
136.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	0	0		100
Catatan Hasil Pembahasan : 2. 8.01.04) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan , untuk (8.01.04.2.01.0003) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Target 100 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah â€¢ Untuk sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerahtarget dan pagu tidak terisi karena penemapatan anggaran pada sub kegiatan tidak sesuai. â€¢ Untuk kegiatan ormas terdapat pada sub kegiatan koordinasi agar di geser pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
137.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
138.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah								0	0		
139.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						0	0		
140.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0		0

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	peran aktif koperasi.														
Catatan Hasil Pembahasan : Tidak ada catatan hasil pembahasan, karena instansi teknis yang menangani urusan pertanahan dan Bappeda Kabupaten Barru tidak hadir dalam desk pembahasan yang disediakan.															
141.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	0	0		0
Catatan Hasil Pembahasan : Tidak ada catatan hasil pembahasan, karena instansi teknis yang menangani urusan pertanahan dan Bappeda Kabupaten Barru tidak hadir dalam desk pembahasan yang disediakan.															
142.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM								0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	peran aktif koperasi.														
143.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						0	0		
144.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	0	0	Pengembangan Kapasitas Anggota Koperasi Desa / Kelurahan	55

Catatan Hasil Pembahasan :
- Belum menginput dalam SIPD (target dan Anggaran)
- Diarahkan kegiatannya berdasarkan inpres no.9 Tahun 2025
- Target disesuaikan dengan jumlah Kopda Mereah putih yang terbentuk
- Kegiatan berupa pembinaan pembentukan kopda merah putih
- Anggaran disesuaian dengan target yang disepakati

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
145.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	0	0	Penguatan Tata Kelola 55 Koperasi Desa dan Kelurahan	88
Catatan Hasil Pembahasan : 1. Tidak melakukan penginputan di SIPD (Target dan anggaran masih kosong) 2. Rincian kegiatan berupa pemberdayaan Koperasi Merah Putih di desa dan Kel berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 3. Penentuan target berdasarkan jumlah Kopdes Merah Putih (Desa dan kelurahan), dan koperasi yang telah terbentuk 4. Anggaran disesuaikan dengan target yang ingin dicapai.															
146.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						0	0		
147.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	0	0	Pendampingan Usaha Mikro naik Kelas	875

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.														
Catatan Hasil Pembahasan : 1. Tidak melakukan penginputan di SIPD (Target dan anggaran masih kosong) 2. Pembinaan UMKM untuk naik kelas (Hulu ke hilir) 3. Target 3,15% dari jumlah 27.392 UMKM 4. Anggaran disesuaikan dengan target yang disepakati															
148.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	0	0	Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi UKM / Pelaku UKM dari Hulu Ke Hilir	875
Catatan Hasil Pembahasan : 1. Tidak melakukan penginputan di SIPD (Target dan anggaran masih kosong) 2. Kegiatan berupa pelatihan dan bimtek 3. Peningkatan kapasitas harus dilakukan secara berkelanjutan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha UMKM Target Indikator Kab Barru yang disepakati : - Target Ratio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB disepakati sebesar : 1,12% - Target Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi disepakati sebesar : 13% - Target Proporsi Jumlah UMK disepakati sebesar : 3,15% - Target Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi disepakati sebesar : 10% - Target Radio Kewirausahaan disepakati sebesar: 3,24 % - Target Update dan Pengumpulan Data UMKM disepakati sebesar : 20%															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
149.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional								0	0		
150.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						0	0		
151.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi	0	0		0

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	peran aktif koperasi.														
Catatan Hasil Pembahasan : Sub Kegiatan ini : Masih kosong pagu dan target kinerja karena belum ada penetapan wisata unggulan potensi destinasi antara lain pulau dutungan, diana waterpark lappa laona (SK Kementerian LH pengelolaan masy setempat), pantai ujung batu, terdapat 15 desa wisata															
152.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	219615000		1
Catatan Hasil Pembahasan : Pembuatan Masterplan untuk daya tarik wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten. Lokasi Daya tarik wisata yang berpotensi yaitu Pulau Pannikiang (ekowisata, ada 20 jenis burung, mangrove, diving, snorkling)															
153.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	0	0		0

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Sub Kegiatan ini : Masih kosong pagu dan target kinerja karena belum mempunyai kawasan strategis pariwisata															
154.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	1	181500000		1
Catatan Hasil Pembahasan : Destinasi pariwisata yang berpotensi akan ditetapkan yaitu Pulau Pannikiang dan sudah masuk dalam dokumen perencanaan															
155.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0		0
Catatan Hasil Pembahasan : Sub Kegiatan ini : Masih kosong pagu dan target kinerja, disebabkan keterbatasan anggaran															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
156.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	8	1744190800	sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan atraksi wisata pada destinasi wisata kabupaten seperti, ATV, Sepedah Gunung, kano, donat boats, Canyoning dan perlengkapan arung jeram dan revitalisasi boardwalk pulau pannikiang	8
Catatan Hasil Pembahasan : 8 jenis sarana pengelolaan destinasi pariwisata berada di Lokasi Pulau Pannikiang, salah satunya diperuntukkan untuk pembangunan Villa															
157.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
158.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	0	0		0
Catatan Hasil Pembahasan : Sub Kegiatan ini : Masih kosong pagu dan target kinerja karena belum menjadi prioritas, dan data masih terbatas terkait ekonomi kreatif															
159.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan	Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	0	0		0
Catatan Hasil Pembahasan : Sub Kegiatan ini : Masih kosong pagu dan target kinerja, dikarenakan keterbatasan anggaran dan belum menjadi prioritas di kabupaten															
160.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0		0

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.														
Catatan Hasil Pembahasan : Sub Kegiatan ini : Masih kosong pagu dan target kinerja, dikarenakan keterbatasan anggaran dan belum menjadi prioritas di kabupaten															
161.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	0	0		0
Catatan Hasil Pembahasan : Sub Kegiatan ini : Masih kosong pagu dan target kinerja, dikarenakan keterbatasan anggaran dan belum menjadi prioritas di kabupaten															
162.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen	0	0		0

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Sub Kegiatan ini : Masih kosong pagu dan target kinerja, dikarenakan keterbatasan anggaran dan belum menjadi prioritas di kabupaten															
163.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	80	209558800		80
Catatan Hasil Pembahasan : sub kegiatan ini untuk memfasilitasi tim HAKI , pelaku, produk yang akan di daftar antara lain kuliner, seni pertunjukan, musik															
164.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											0	0		
165.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)								0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.														
166.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						0	0		

167.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	0	40000000		4

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Kegiatan yang dilakukan adalah jasa pengimputan dapobud dan penulisan naska akademik warisan budaya tak benda, Dokumentasi foto/ video karya budaya yang diusulkan menjadi budaya tak benda,dengan anggaran Rp. 152.000.000															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
168.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	0	0		250
Catatan Hasil Pembahasan : pagu anggaran Rp. 468.669.9000. SDM lembaga dan pranata tradisional 250 Orang yang dibina dalam 7 komunitas budaya															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
169.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
170.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	27	26000000		7
Catatan Hasil Pembahasan : pagu anggaran yang disepakati Rp. 270.408.000. target 7 objek kompleks makam labonggo, kompleks makam arung nepo, kompleks makam megalitik sumpang ralla, situs megalitik ralla, kompleks makam lamakkarumpa daeng parani, batu alengtirengge raja barru, kompleks makam petta patimang ratu (arung balusu).															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
171.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	0	0		1
Catatan Hasil Pembahasan : 1 objek komleks makam we tenri olle dengan anggaran Rp.150.000.000															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
172.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											0	0		
173.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan								0	0		
174.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.														
175.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	0	0		0
Catatan Hasil Pembahasan : - utk 16 indikator target pendidikan sdh sesuai dengan target dikdasmen - Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional belum terisi karena kewenangan provinsi Disdik Kab. : sub kegiatan ini kami usulkan dengan catatan target, pagu dan data-data serta jstifikasi akan delengkapi Disdik Prov. : dapat diakomodir karena sdh selaras dengan program prov dan nasional, dan memnyesuaikan dengan usulan dari kab. barru															
176.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	6882	8228120000		6882

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	penyandang disabilitas.														
Catatan Hasil Pembahasan : Disdik Kab. : biaya personil ini merupakan dana BOS utk SMP, alokasi target dan pagu agar dikoordinasikan dengan bappeda barru Disdik Prov. : diakomodir															
177.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	0		0
Catatan Hasil Pembahasan : Disdik kab. : tidak tertuang dlm ranwal, akan berkoordinasi dengan bappeda barru Disdik Prov. : agar kegiatan ini tetap dimasukkan agar selaras dengan target prov dan nasional															
178.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	0		0

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.														
Catatan Hasil Pembahasan : Disdik Kab. : belum dapat dilaksanakan karena bukan pembangunan USB namun pembanguan RKB Disdik Prov. : disesuaikan dengan usulan dari kab. barru															
179.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1050	250000000		1050
Catatan Hasil Pembahasan : Disdik Kab. : digunakan utk administrasi peserta didik, pendataan ATS dll dalam pendidikan non formal/kestaraan. utk pagu dan target masih berubah dan akan disesuaikan kembali. Disdik Prov. : disesuaikan dengan kab barru															
180.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua								0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.														
181.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						0	0		
182.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas	Unit	0	580162171		1

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
									kapasitas pelayanan rumah sakit	pelayanan rumah sakit					

Catatan Hasil Pembahasan :
Dinas Kesehtan Provins
Program Prioritas Program Stunting, Pelayanan kesehatan bergerak,
ASTA Cita dibebankan ke Kab/Kota
kewenangan Provinsi pencapaian di bidang kesehatan

Dinas Kesehatan Barru :
1. Proposal untuk pembangunan rs tipe d ke tipe c belum disetujui.
2. belum pernah menginput sub kegiatan pengembangan rumah sakit baik dari rumah sakit ataupun dari dinkes barru sendiri
3. untuk rumah sakit kapal belum ada
4. terkait DPA punya akun terpisah antara Dinkes dan Rumah sakit.
5. masih banyak indikator yang belum dipenuhi untuk anggaran akan dipertimbangkan perubahannya kalau boleh ditingkatkan di rumah sakit lapatarai

bappelitbangda barru :
1. untuk di renstra dan RPJMD sudah mendukung Pengembangan rumah sakit di kabupaten barru

dinkes provinsi :
1. untuk tahun ini dan tahun depan untuk mendorong kris JKN. per juli 2025 implementasi kris JKN akan dimulai. maka kesiapan rumah sakit untuk pelaksanaan kegiatan ini dalam anggaran dan kesiapan dalam implementasi kris JKN ini.
2. perbaikan, renovasi dan lainnya untuk lebih mengutamakan kris JKN terlebih dahulu berupa anggaran.
3. mohon dipertimbangkan untuk mengalokasikan 60% kamar layanan untuk kris JKN.
4. DPAnya apakah sudah dikonfirmasi oleh dinas kesehatan provinsi?
5. memastikan alokasi anggaran untuk program program prioritas gubernur
6. tahun ini diharapkan seluruh rumah sakit untuk bisa mengimplementasikan kris JKN
7. untuk Rumah sakit jangan lupa untuk dituangkan di RPJMD tertuang secara eksplisit pengembangan rumah sakit.

Bappelitbangda provinsi :
1. mengingatkan untuk perubahan target sesuai dengan target kesepakatan dan pagu anggaran untuk dihitung berdasarkan pengembangan rumah sakit dan kris JKN

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
183.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	8338726481		2
Catatan Hasil Pembahasan : dinkes barru : 1. di rumah sakit melekat di DPA tersendiri untuk pengadaan obat dan BMHP 2. masing-masing terpisah paket BMHP dan paket obat 3. BLUD terbatas untuk pengadaan obat. Dinas kesehatan provinsi : 1. barru sudah mengisi rencana kebutuhan obat selama 1 tahun. ada beberapa item obat gizi dan ibu dan anak yang sudah disiapkan oleh dinkes untuk tidak diadakan lagi di kabupaten. 2. pemeriksaan kesehatan gratis untuk dichek kembali. 3. silahkan kab. barru untuk menginput di app smile jika sudah menerima obatnya 3. obat buffer untuk dibuat kebutuhannya 4. ada dana distribusi untuk obat dan vaksin yang akan didistribusi ke kab barru 5. RS tidak menjadi tujuan alokasi anggaran pengadaan obat jiwa. untuk rumah sakit agar menganggarkan sendiri dengan berkoordinasi dengan dinkes kab/kota. RKO sendiri dapat dibuat untuk kebutuhan obat jiwa selama setahun ditunggu sampai tanggal 30 April.															
184.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	12	174354250		12

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	generasi Z), dan penyandang disabilitas.														
Catatan Hasil Pembahasan : Dinas kesehatan kab barru 1. dana kegiatan bersumber dari dana BOK. 2. kegiatan bimtek puskesmas pertemuan lintas sektor untuk TB, Kusta, dan lainnya 3. alat tes TCM sudah ada di rumah sakit, puskesmas juga ada 4. screening dilaksanakan oleh petugas puskesmas 5. penanggulangan TB dilakukan pengadaan strip TCM 6. untuk kecacingan dan imunisasi dinkes cuman memantau ke puskesmas sedangkan untuk ke sasaran langsung dilakukan oleh puskesmas 7. PTM dan hipertensi memiliki sub kegiatan tersendiri. ada DOK khusus untuk PM dan PTM. dana DAU untuk hipertensi dan PM 8. barru baru ada 1 puskesmas palandro yang menyediakan obat untuk HIV 9. hipertensi, hiv dan PTM ada khusus dana DAU. ada yang ke BMHP ada yang ke puskesmas untuk pelacakan. 10. RAD TB belum dikoordinasikan dinkes pemprov: 1. terpisah antar sub kegiatan yang ada di PM dan PTM. TB dan P2p adalah upaya deteksi dini untuk pencegahan. 2. sasaran dari program berbeda beda, jadi perlu untuk sedari awal ditentukan sasarannya yang sejalan dengan proses selanjutnya mengenai pengelolaan sumber dayanya. dengan melihat sasaran dari kabupaten kotanya. 3. terkait dengan penanggaran pengambilan logistik yang sering terkendala terutama logistik spesifik yang perlu diadakan penjemputan terutama vaksin yang disediakan oleh provinsi, 4. terkait upaya pembinaan dari kab kota ke puskesmas. masih banyak yang dibawah target terkait pembinaan pelaksanaan SPM dan penemuan kasus dilapangan														
185.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	41908084784		12

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Dinas kesehatan barru : 1. dana sharing kabupaten 60:40% 2. Dinas Kesehatan Provinsi : 1. berfokus pada capaian uhc di kab barru 2. pemuktahiran data PBI agar cepat selesai bappelitbangda prov: 1. untuk memperhatikan sasaran dari JKM															
186.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	12	357444300		12

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : dinas kesehatan Barru : 1. belanja untuk balita stunting, kegiatan pertemuan tentang verifikasi kematian maternal dan prenatal, SHK untuk bayi baru lahir, koordinasi terkait kegiatan ibu dan anak ke puskesmas. 2. untuk pokja KIA belum terbentuk. 3. pembinaan ke puskesmas, bimtek dan audit kematian, pertemuan lintas sektor dilakukan dalam kegiatan penurunan KIA. 4. 70% untuk ibu hamil, 75 % untuk bersalin, dan 76% untuk bayi 5. untuk 1 day 1 egg dan pengadaan susu untuk balita stunting 6. untuk pelatihan phonad ada, alkes juga sudah, 7. pelatihan dokter usg sudah dilakukan tahun lalu di 12 puskesmas 8. dari 10 bidan baru 1 yang melakukan pelatihan ponek Dinas kesehatan provinsi : 1. pelaksanaan audit maternal prenatal agar bisa melakukan advokasi dan screening pasien usia subur apakah layak hail lagi atau tidak. 2. untuk penurunan kematian bayi untuk melakukan pelatihan poned. 3. Dokter USG untuk diperhatikan lagi 4. di RS ponek dan di puskesmas poned 5. edukasi terkait MMS terhadap ibu hamil bappelitbangda provinsi: 1. upaya upaya poned dan audit untuk dikawal lagi pelaksanaannya 2. perlu peningkatan pagu anggaran 3. permasalahan dari tidak tercapainya SPM harus bisa dijawab melalui sub kegiatan ini														
187.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
188.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	38	2223000		38
Catatan Hasil Pembahasan : dinas kesehatan Barru : 1. pelatihan dimasukan ke peningkatan mutu. 2. untuk pemenuhan dilakukan ke puskemas 3. untuk pemenuhan layanan di desa diberikan ke bidan dan perawat 4. sudah diusulkan untuk pemenuhan kebutuhan SDM di formasi CPNS dan p3k dinkes prov: 1. seharusnya target dilihat dari tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diperlukan untuk rumah sakit tipe c. untuk kab. barru puskesmas tenaga dokter 1 orang, kesling 1 orang, gizi 3 orang yang perlu dipenuhi. Bappelitbangda kab Barru : 1. dukungan anggaran untuk pemenuhan SPM terutama di bidang kesehatan terutama stunting dan washting. 2. DAU dibidang kesehatan berkurang drastis sekitar 9 M yang mempengaruhi pemenuhan SPM dan PKMK balita stunting. 3. penganggaran dan perencanaan SPM harus diperkuat serta pembiayaan lainnya perlu untuk dipertimbangkan															
189.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak								0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	generasi Z), dan penyandang disabilitas.														
190.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						0	0		

191.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	0	0	Kegiatan ini sangat mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dikabupaten Barru dengan penglibatan seluruh pemangku kepentingan, capaian pemberdasyaan dan pembangunan gender di kabupaten Barru terus meningkat seiring dengan penganugrahan APE kategori Pretama diperoleh Kabupaten Barru, hal ini mendukung prioritas nasional	36

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Kegiatan ini sangat mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Kab. Barru dengan penglibatan seluruh pemangku kepentingan, capaian pemberdayaan dan pembangunan gender di Kab. Barru terus meningkat seiring dengan Penganugerahan APE kategori Pratama diperoleh Kab. Barru hal ini mendukung prioritas nasional Target untuk tahun 2026, 36 Lembaga terdiri dari OPD dan Kecamatan pagu anggaran 77.000.000,- Bentuk kegiatan berupa pendampingan penyelenggaraan PUG bisa mendukung penilaian APE ditahun selanjutnya dan diharapkan agar melaksanakan kegiatan pelatihan PPRG bagi kasubag program dan koordinasi dan peningkatan kapasitas terkait PUG.														

192.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	0	0	Kegiatan ini sangat mendukung pencapaian kesetaraan gender , peran perempuan dan perlindungan anak dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dalam hal pengembangan kapasitas SDM lembaga masyarakat dan organisasi permberdayaan perempuan dikabupaten Barru, hal ini mendukung prioritas nasional	150

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan dibidang politik, hukum , sosial dan ekonomi ,kegiatan ini sangat mendukung pencapaian kesetaraan gender, peran perempuan dan perlindungan anak dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dalam hal pengembangan kapasitas SDM lembaga masyarakat dan organisasi pemberdayaan perempuan di Kab. Barru, hal ini mendukung prioritas nasional Target sub kegiatan 150 orang dengan anggaran sebesar Rp. 65.000.000. sasaran lembaga kemasyarakatan khususnya perempuan seperti pk, darma wanita dll. Adapun bentuk kegiatan workshop peningkatan kapasitas, sosialisasi terkait kelembagaan wanita seperti pkk, darma wanita, persit, muslimatÂ NU,Â Aisyiah, Kelompok Pengajian															
193.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						0	0		

194.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	0	0	Kegiatan ini medorong peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Barru, sub kegiatan ini adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengambil kebijakan serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak, melalui dialog, penyuluhan, dan penyampaian informasi yang relevan, guna mendorong tindakan dan kebijakan yang efektif dalam perlindungan anak, Kabupaten Barru dianugerahi penghargaan KLA kategori Nindya	46

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Kegiatan ini mendorong peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak di Kab. Barru sub kegiatan ini adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengambil kebijakan serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak, melalui dialog, penyuluhan dan relevan guna mendorong tindakan dan kebijakan yang efektig dalem perlindungan anak, kab Barru dianugerahi penghargaan kategori Nindya Target 46 orang pagu anggaran 16.500.000															

195.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	Kegiatan ini mendukung Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Barru, Sub kegiatan ini melakukan Layanan pendampingan korban yang merupakan proses pemberian layanan terhadap korban sesuai dengan kebutuhan korban, terutama tindakan pendampingan untuk mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.	24

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Kegiatan ini mendukung Kesetaraan Gender, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak di Kab. Barru, Sub kegiatan ini melakukan Layanan pendampingan korban yang merupakan proses pemberian layanan terhadap korban sesuai dengan kebutuhan korban, terutama tindakan pendampingan untuk mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Target 24 orang pagu 222.000.000 sumber dana DAK BOPPA															
196.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital								0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.														
197.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						0	0		
198.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	Akan disesuaikan pada tahapan renja 2026	0
Catatan Hasil Pembahasan : Pada sub kegiatan ini tidak mengalokasikan anggaran karena dianggap tidak sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan perangkat daerah serta mengoptimalkan kekurangan anggaran dengan mengalokasikan anggaran pada sub kegiatan yang lebih di butuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
199.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	0	0	Akan disesuaikan pada tahapan renja 2026	1
Catatan Hasil Pembahasan : Sepakat dengan target indikator yang ditetapkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut: 1. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Pelayanan Adminduk 55% 2. Persentase Kepemilikan Idintitas Kependudukan Digital (IKD) 20% Dan untuk pengalokasian anggaran pada sub kegiatan di maksud akan di sesuaikan pada tahapan RENJA 2026.															
200.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
201.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	Akan disesuaikan pada tahapan renja 2026	0
Catatan Hasil Pembahasan : Pada sub kegiatan ini tidak mengalokasikan anggaran karena dianggap tidak sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan perangkat daerah serta mengoptimalkan kekurangan anggaran dengan mengalokasikan anggaran pada sub kegiatan yang lebih di butuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.															
202.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	Akan disesuaikan pada tahapan renja 2026	1

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
Catatan Hasil Pembahasan : Sepakat dengan target indikator yang ditetapkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut: 1. Persentase Anak Berusia 0-4 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran 97% 2. Persentase Kepemilikan Akta Kematian Bagi Penduduk Yang Meninggal 70% 3. Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Perkawinan Bagi Penduduk Yang Menikah 63% 4. Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Cerai Bagi Penduduk Yang Bercerai 63% Dan untuk pengalokasian anggaran pada sub kegiatan di maksud akan di sesuaikan pada tahapan RENJA 2026.															
203.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)								0	0		
204.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
205.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	2	26125000	kegiatan ini merupakan salah satu upaya kabupaten untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang diberikan oleh fasilitas kesehatan, termasuk jaringan dan jejaringnya (seperti puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang diberikan di fasilitas kesehatan ini berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, kegiatan ini juga mendukung prioritas nasional	2
Catatan Hasil Pembahasan : Disepakati Indikator Pembinaan Pelakayanan KB dan KS sebanyak 2 Laporan untuk 2 Kali Kegiatan Pembinaan pada 15 Faskes di Kab. Barru dengan anggaran sebesar Rp. 26.125.000,-															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
206.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	24	792000000	Kegiatan ini merupakan stimulan dalam hal percepatan penurunan stunting dengan memberikan edukasi dan informasi bagaimana mengolah makanan untuk ibu hamil dan bayi balita, untuk tahun 2024 di kabupaten Barru telah dilaksanakan pada 21 desa dan 3 kelurahan, kegiatan ini mendukung prioritas nasional dalam hal pembangunan manusia di bidang kesehatan	24
Catatan Hasil Pembahasan : Disepakati Indikator Fasilitasi Pengelolaan Dashat sebanyak 24 Unit yang ada di 21 Desa dan 3 Kelurahan di Kabupaten Barru dengan Anggaran sebesar Rp. 792.000.000,- dan sebanyak 31 Unit Dashat di Desa dibiayai menggunakan Dana Desa.															
207.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.														
208.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	1	52735000	kegiatan ini berperan penting diKabupaten Barru dalam pengelolaan ketahanan keluarga dengan menyediakan layanan konsultasi, informasi, dan edukasi terkait berbagai aspek kehidupan keluarga. PPKS membantu keluarga mengatasi masalah, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai kesejahteraan masyarakat	1
Catatan Hasil Pembahasan : Disepakati indikator Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui PPKS sebanyak 1 Laporan yang berisi rekap laporan pelaksaaan kegiatan di 7 Balai di Kab. Barru dengan anggaran sebesar, Rp. 52.735.500,-															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
209.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	0	0		275
Catatan Hasil Pembahasan : Disepakati Indikator Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina sebanyak 275 Kelompok yang ada 55 Desa dan Kelurahan di Kab.Barru dengan rencana anggaran sebesar Rp. 156.000.000,-															
210.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga								0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
211.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						0	0		
212.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	240	93848000	Pelatihan Kewirausaaan, Pembimbingan, Pendampingan, Bantuan Akses Permodalan kepada wirausaha pemula pemuda sangat berdampak pada peningkatan Lapangan pekerjaan dan pengganguran, sehingga kegiatan ini menjadi prioritas kabupaten dan juga di usulkan kepada pemerintah provinsi karna berkenaan	100

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
														dengan Asta Citas ke 3 dan 4.	
Catatan Hasil Pembahasan : sub kegiatan ini penting sehingga disepakati dilaksanakan dengan target dari 240 orang menjadi 100 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dari anggaran awal Rp. 93.848.000, untuk peningkatan akses terhadap sumber daya sehingga wirausaha pemula akan lebih mudah mendapatkan akses pendaanaan, pendampingan dan pelatihan,															
213.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang	50	31500000		50
Catatan Hasil Pembahasan : sub kegiatan ini penting sehingga disepakati dilaksanakan untuk peningkatan akses terhadap sumber daya sehingga wirausaha pemula akan lebih mudah mendapatkan akses pendaanaan, pendampingan dan pelatihan, maupun jaringan pasar dalam rangka mengoptimalkan peran organisasi kepemudaan sehingga menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi pemuda,dan mencegah ketimpangan															
214.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.														
215.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	50	200000000		150
Catatan Hasil Pembahasan : Sub kegiatan ini penting sehingga disepakati dilaksanakan untuk seleksi atlet dari target 50 orang menjadi 150 atlet dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dalam rangka Meningkatkan prestasi olahraga daerah dengan memilih atlet-atlet terbaik untuk berkompetisi di tingkat Provinsi, nasional dan internasional.															
216.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	5	10000000		100

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	generasi Z), dan penyandang disabilitas.														
Catatan Hasil Pembahasan : Sub kegiatan ini penting sehingga disepakati dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dari ,dengan target100 Olahragawan, dalam rangka meningkatkan reputasi kabupaten dengan memiliki olahragawan yang berprestasi dan berbakat di tingkat provinsi atau nasional															
217.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	1	15000000	kegiatan event olahraga masyarakat Fun Run / Lari, kegiatan ini telah menjadi agenda rutin kabupaten 2 tahun terakhir, kegiatan ini sangat penting bagi kabupaten karna dianggap punya multiplier effect ekonomi selama kegiatan, seperti usaha penginapan (hotel), Usaha makanan dan Minuman, UMKM dll.	2
Catatan Hasil Pembahasan : ub kegiatan ini penting sehingga disepakati direncanakan dengan target 2 lembaga dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000, Meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap olahraga rekreasi dengan menampilkan manfaat dan kesenangan olahraga.dan telah menjadi agenda rutin kabupaten 2 tahun terakhir, kegiatan ini sangat penting bagi kabupaten karna dianggap punya multiplier effect ekonomi selama kegiatan															
218.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,											0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.														
219.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat								0	0		
220.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
221.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	0	0		26
Catatan Hasil Pembahasan : Sesuai kesepakatan maka jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina di kab. Barru 26 perpustakaan, dengan jumlah perpustakaan umum (kelurahan/desa) 25 dan perpustakaan khusus 1 (perpustakaan lapas,) . Dengan estimasi anggaran Rp. 30.000.000															
222.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	300	30000000		300
Catatan Hasil Pembahasan : Sesuai kesepakatan awal jumlah koleksi perpustakaan cetak/digital 300 eksemplar dengan anggaran Rp.30.000.000, dengan asumsi Rp. 100.000/eksemplar															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
223.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						0	0		
224.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	0	0		9
Catatan Hasil Pembahasan : Sesuai kesepakatan dengan jumlah 1 naskah kuno yang akan disimpan, dirawat dan dilestarikan membutuhkan 9 orang, (1 pemilik naskah, 3 tim ahli, dari dinas 5 orang) dengan estimasi anggaran Rp. 15.000.000 dengan kegiatan penelusuran naskah kuno															
225.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk	Eksemplar	0	0		1

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.								dilestarikan dan didayagunakan	dilestarikan dan didayagunakan					
Catatan Hasil Pembahasan : Program naskah kuno belum masuk di matrik Renstra Kab. Barru, tapi merupakan prohram prioritas nasional sehingga ditargetkan 1 eksemplar naskah kuno dengan estimasi anggaran Rp. 25.000.000															
226.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).											0	0		
227.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar								0	0		
228.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
229.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	0		1
Catatan Hasil Pembahasan : BPBD Provinsi Sulsel 1. Memperhatikan target BPBD kabupaten/kota agar selaras dengan target yang ditetapkan oleh BPBD Provinsi 2. Untuk dokumen RPB agar dilakukan legalilasasi melalui pembuatan Peraturan Bupati/Walikota 3. Memperhatikan tahapan penyusunan dokumen RPB meliputi Workshop, Asistensi/reviu, Diskusi Publik dan finalisasi dokumen BPBD Kabupaten Barru 1. BPBD Kabupaten sudah memiliki Dokumen RPB masa berlaku tahun 2023 - 2027 2. BPBD Kabupaten Barru akan memasukkan Revisi Penyusunan Dokumen RPB kedalam Dokumen Renstra, RKPD 2026 dan Renja 2026 Bappelitbangda Kabupaten Barru 1. Dokumen RPB kabupaten Barru periodenya 2023-2027 jd tdk dilakukan penyusunan di 2026 Penyesuaian terhadap renstra perangkat daerah periode 2025-2029 akan dilaksanakan di 2027 Bappelitabngda Provinsi Sulsel 1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Barru agar melengkapi target output sub kegiatan dan alokasi penganggaran kedalam Dokumen Renstra, RKPD 2026 dan Renja 2026.															
230.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	0	7000000		1
Catatan Hasil Pembahasan : BPBD Provinsi Sulsel 1. Menyarankan agar BPBD Kabupaten Barru melaksanakan kegiatan Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penenggulangan Bencana BPBD Kabupaten Barru 1. BPBD Kabupaten Barru telah mengalokasikan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 6.788.200 untuk sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bappelitbangda Kabupaten Barru 1. Penyusunan Indikator IKD menjadi Indikator Sasaran Perangkat Daerah BPBD tahun 2025-2029 Bappelitbangda Provinsi Sulsel 1. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Barru agar mengalokasikan sub kegiatan Binwas kedalam Dokumen Renstra, RKPD 2026 dan Renja 2026															

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
231.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar								0	0		
232.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
233.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksanaya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	12	951100000	Sub kegiatan ini untuk pembayaran gaji honorer satpol pp,pengawalan, pengamanan dan patroli	4

Catatan Hasil Pembahasan :
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Barru :
1. Pemerintah Kab. Barru melalui Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Barru mengusulkan target sebesar laporan dengan pagu Rp.951.100.000 pada sub-kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
2. Berdasarkan hasil pembahasan Rakortek Renbang, Pemerintah Kabupaten Barru melalui Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Barru menyepakati target sebesar 4 laporan dengan pagu Rp.951.100.000 pada sub-kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan termasuk Tenaga Non ASN Petugas Lapangan yang akan diusulkan kedalam Renja 2026 Satpol PP dan Renstra Tahun 2025 - 2029.
3. Target laporan sebanyak 4 laporan dilaporkan pertriwulan sekali.
4. Laporan mengandung hal-hal yang dilaksanakan oleh Satpol PP kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan termasuk Tenaga Non ASN Petugas Lapangan

Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan :
1.â□ â□ Satpol PP Kab. Barru diharapkan dapat memenuhi target Capaian SPM Trantibumlinmas 100% di Tahun 2026
2.â□ â□ â□ Merekomenasikan Bappelitbangda Kab. Barru untuk memperhatikan penganggaran Khususnya Diklat PPNS Peningkatan SDM Diklat Dasar Pol PP dan Pemadam Kebakaran mengingat sebagai Penunjang Layanan SPM Trantibumlinmas di Kabupaten Kota
3.â□ â□ â□ Merekomendasikan Satpol PP Kab. Barru untuk mengoptimalkan Kinerja PPNS dalam Penegakan Perda Perkada Kab. Barru
4.â□ â□ â□ Diharapkan kepada Bappelitbangda Kab. Barru untuk memperhatikan Penganggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Satpol PP seperti Tameng dan Pakaian Huru Hara

Bappelitbangda Prov. Sulsel :
Agar Bappelitbangda Barru mengawal usulan Satpol PP Barru untuk dimasukkan dalam Renja Satpol 2026 dan Renstra 2025-2029

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
234.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	7	17500000	Sub kegiatan ini untuk penanganan perda dan perkada contohnya perdaa imb,perda ktr dan perda lainnya yang ada dikabupaten barru	4
Catatan Hasil Pembahasan : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Barru : 1. Pemerintah Kabupaten Barru melalui Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Barru mengusulkan target sebesar 7 laporan dengan pagu Rp.17.500.000 pada sub-kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP. 2. Berdasarkan hasil pembahasan Rakortek Renbang, Pemerintah Kabupaten Barru melalui Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Barru menyepakati target sebesar 4 laporan dengan pagu Rp.17.500.000 pada sub-kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP yang akan diusulkan kedalam Renja 2026 Satpol PP dan Renstra Tahun 2025 - 2029. 3. Target laporan sebanyak 4 laporan dilaporkan setiap triwulan sekali. Satpol PP Prov. Sulsel : 1. Merekomendasikan kepada Bappelitbangda Kab. Barru agar memperhatikan sub Kegiatan Penanganan Pelanggaran Perda agar bukan hanya Pajak Rokok dalam sub kegiatan tersebut karena penggunaan Pajak Rokok diperuntukkan untk kegiatan Pemberantasan Rokok Ilegal dan Kawasan Tanpa Rokok, berdasarkan hal Tersebut kami berharap Bappelitbangda Kab. Barru dapat memberikan Anggaaran PAD Murni untuk Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada yang lainnya yang ada di Kabupaten Barru 2. Merekomendasikan agar mengoptimalkan Sekretariat PPNS di Kab. Barru untuk mewadahi PPNS yang ada di WilayahÂ Kab.Â Barru Bappelitbangda Prov. Sulsel : Agar Bappelitbangda Barru mengawal usulan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Barru untuk dimasukkan dalam Renja Satpol 2026 dan Renstra 2025-2029														
235.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
236.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	sub kegiatan ini tidak ada pada perencanaan 2026	0
Catatan Hasil Pembahasan : Satpol PP Prov. Sulsel. 1.â□ â□ â□ Merekomenasikan Bappelitbangda Kab. Barru untuk memperhatikan penganggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RIS) dimasukkan pada Renstra dan Renja 2026 dan diharapkan masuk kedalam RKA 2026 dan di perhatikan untuk diberikan dukungan Anggaran 2.â□ Merekomendasikan Bappelitbangda Kab. Bapperida untuk memperhatikan Pengadaan Unit Mobil Damkar serta Pengadaan Alat Pelindung Diri Petugas Damkar 3. Merekomendasikan Bappelitbangda Kab. Barru untuk memperhatikan Pemeliharaan Sarana Prasarana PemadamÂ Kebakaran Bappelitbangda Prov. Sulsel : Agar Bappelitbangda Kab. Barru memperhatikan penganggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RIS) dimasukkan pada usulan Renja 2026 dan Renstra 2025-2029														
237.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.											0	0		
238.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa								0	0		

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	masyarakat yang adil dan makmur.														
239.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						0	0		
240.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0		15
Catatan Hasil Pembahasan : - Pagu diaplikasi kosong tapi anggarannya ada sebesar 11.197.000 - target di aplikasi kosong tapi disepakati 15 laporan															
241.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	0	0		1

No.	Asta Cita (Misi)	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Outcome	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Sub Kegiatan	2026			Kesepakatan Target Sub Kegiatan 2026
												Target	Pagu	Catatan Daerah	
	masyarakat yang adil dan makmur.														
Catatan Hasil Pembahasan : - Pagu dan target kosong karena belum menginput tapi anggaran untuk pagu ada sebesar 10.798.000 - Target kosong tapi disepakati 50 pengguna															

Selanjutnya sesuai hasil rakortekbang Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Barru, berikut Keselarasan /Dukungan Program/Keg/Sub Kegiatan Kabupaten Barru terhadap Kegiatan Prioritas Utama sebagai berikut:

Tabel 4.21

Keselarasan dukungan Program, Sub Kegiatan Kabupaten Barru terhadap Kegiatan Prioritas Utama

No	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
1	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)			
2	Prioritas Nasional 2	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest			
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah			
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan			
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan			
		Pengembangan kawasan sentra produksi Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		

No	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
		(KSPP)/lumbung pangan Lainnya	Sub Kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan
		Pengembangan pangan akuatik (blue food)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
			Sub. Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	150 orang
			Sub. Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	30 Kelompok
			Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Kecil	100 Unit
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
			Sub Kegiatan: Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	25 Pelaku Usaha
			Sub Kegiatan: Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan	10 Pelaku Usaha

No	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
			hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
		Pengembangan pangan hewani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIA		
			Sub Kegiatan:Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan
		Pengembangan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIA		
			Sub Kegiatan:Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan
		Fortifikasi dan biofortifikasi pangan			
		Peningkatan penyediaan energi			
		Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi			
		Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan			
		Konservasi sumberdaya air			

No	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
			Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1 Liter/Detik
			Sub Kegiatan: Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	50 SR
		Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS			
		Pengembangan terpadu pesisir utara jawa			
		Penguatan faktor pendukung ekonomi digital			
		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya			
		Pengelolaan susut dan sisa pangan			
		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian			

No	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
		keuntungan sumber daya genetik			
		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	19 Lokasi
			Sub Kegiatan: Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	33 Paket
		Peningkatan kualitas ekosistem gambut			
		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan			
		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
			Sub Kegiatan: Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	25044.07 Ton
		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut			
3					

No	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
	Priortas Nasional 3	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya			
		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital			
		Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan			
		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
			Sub Kegiatan: Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
		Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
			Sub Kegiatan: Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Lokasi
		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo			
		Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim			
		Pengembangan koperasi sektor produksi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		

No	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
			Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	55 Kelompok Masyarakat
			Sub Kegiatan: Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	88 Unit Usaha
4	Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini			
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas			
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6882 Peserta Didik
			Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1050 Peserta Didik
		Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul			

No	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja			
		Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi			
		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi			
		Penurunan kematian ibu dan anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket
		Pencegahan dan penurunan stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di	2 Paket

No	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
				Fasilitas Kesehatan yang disediakan	
		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket
		Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket
		Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita			
		Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi			
		Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		

No	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
			Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket
		Investasi pelayanan kesehatan primer	. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket
		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Sub Kegiatan: Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam	1 Unit

No	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
				rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	
		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan			
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya			
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi			
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
			Sub Kegiatan: Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang
			Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100 Orang
5	Prioritas Nasional 5	Pengembangan hilirisasi Nikel			
		Pengembangan hilirisasi Tembaga			

No	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
		Pengembangan hilirisasi Bauksit			
		Pengembangan hilirisasi Timah			
		Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit			
		Pengembangan hilirisasi Kelapa			
		Pengembangan hilirisasi Rumput Laut			
		Pengembangan hilirisasi Kimia			
		Pengembangan industri semikonduktor			
		Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil			
		Penguatan industri logam dasar, besi dan baja			
		Pengembangan industri dirgantara			
		Pengembangan KEK Sei Mangkei			
		Pengembangan KIT Batang			
6	Prioritas Nasional 6	Pengembangan KI Weda bay			
		Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan			
		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif			
		Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif			

No	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
		Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara			
		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
			Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 Unit Rumah
			Sub Kegiatan: Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	2 Unit
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
			Sub Kegiatan: Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi
			Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	4 Lokasi

No	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
		Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa			
		Pencegahan tindak pidana korupsi			
		Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN			
		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
			Sub Kegiatan: Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi	2 Laporan
			Sub Kegiatan: Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	300 Rekomendasi
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		

No	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
			Sub Kegiatan: Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	3 Layanan
			Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	64 Perangkat Daerah
		Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan			
8	Prioritas Nasional 8	Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak			
		Penguatan karakter dan jati diri bangsa	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		

No	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 Orang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang
		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		

No	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
		kawasan pemajuan kebudayaan	Sub. Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek
			Sub. Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	250 Orang
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
			Sub. Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	7 Objek
			Sub. Kegiatan : Pengembangan CagarBudaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek
		Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut			

Untuk Keselarasan Highlight Intervensi Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.22

Keselarasan Highlight Intervensi Pembangunan Kewilayahan

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KET
	LOKASI PRIORITAS	*HIGHLIGHT* INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.6	Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya	Bantuan PSU bidang perumahan	Kawasan Metropolitan Makassar dan Sekitarnya	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
				Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	
				Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
		Pembangunan rumah susun dan rumah swadaya di perkotaan; Pemugaran Permukiman Kumuh, Peremajaan Permukiman Kumuh		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
		Peningkatan dan Perluasan SPAM Regional Mamminasata dan Ajatappareng;		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KET
	LOKASI PRIORITAS	*HIGHLIGHT* INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, dan Setempat		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
				Penyediaan Unit pengolahan setempat	
D.1	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Gurilla	Peningkatan Kawasan Perdesaan Prioritas Gurilla;	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Gurilla	• PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT , Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Puskesmas Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
		• pemenuhan akses layanan kesehatan; • Bantuan PSU		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KET
	LOKASI PRIORITAS	*HIGHLIGHT* INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perumahan dan Kawasan Permukiman; • Pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat; • Pembangunan jaringan distribusi; • Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik; • Sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat;		MINUM, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		• Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi; • Desa/kelurahan yang dibangun 4G oleh operator; • Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 jam/hari; • OM BTS 4G /Lastmile; • Sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), Penyediaan Unit pengolahan setempat	
		• Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, • Pengembangan obyek wisata, • Fasilitasi BUM Desa, • Promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan, • Pendampingan desa,		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, Pengelolaan Sampah, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan,	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KET
	LOKASI PRIORITAS	*HIGHLIGHT* INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		• Pengembangan BUM Desa			
		• Penguatan perbenihan komoditas pertanian, • Desa wisata di wilayah destinasi II yang dikembangkan, pengembangan dan penguatan tata kelola desa wisata		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN, Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		• Pengembangan Akademi Desa 4.0, • Pengembangan desa cerdas, • Penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, • Pengembangan sistem indeks desa, • Integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA, Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Monitoring dan Evaluasi	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KET
	LOKASI PRIORITAS	*HIGHLIGHT* INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		• Penguatan desa tanggap bencana • Peningkatan resiliensi adat istiadat,		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA, Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KET
	LOKASI PRIORITAS	*HIGHLIGHT* INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata,	
				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA, Fasilitasi Kerja Sama antar Desa, Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota, Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KET
	LOKASI PRIORITAS	*HIGHLIGHT* INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana), Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	

	Provinsi Sulawesi Selatan	• Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi	7 Kecamatan di Kabupaten Barru	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
	Provinsi Sulawesi Selatan	• Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan	7 Kecamatan di Kabupaten Barru	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
	Provinsi Sulawesi Selatan	• Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran • Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran jenjang PAUD, SD, dan SMP	7 Kecamatan di Kabupaten Barru	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan PAUD	
	Provinsi Sulawesi Selatan	• Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	7 Kecamatan di Kabupaten Barru	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM), Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro, PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM, Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, Pengembangan Usaha Mikro,	

				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI, Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi.	
	Provinsi Sulawesi Selatan	• Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir	7 Kecamatan di Kabupaten Barru	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, Pengelolaan Sampah, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.	
	Provinsi Sulawesi Selatan	• Penguatan konertifitas jalan dan darat	7 Kecamatan di Kabupaten Barru	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN, Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Penggantian Jembatan, Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pembangunan Jembatan PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU), Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan,	
	Provinsi Sulawesi Selatan	• Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T,	7 Kecamatan di Kabupaten Barru	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN, Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat	

				Bencana, Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana, Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator, Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota, PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH, Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan	

				terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru.	
	Provinsi Sulawesi Selatan	• Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola Kesehatan	7 Kecamatan di Kabupaten Barru	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengembangan Puskesmas, Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik ,	

				Tenaga Kesehatan, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Provinsi Sulawesi Selatan	• Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), serta Pencegahan dan penurunan Stunting dan kematian ibu dan anak	7 Kecamatan di Kabupaten Barru	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pengelolaan	

				Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV,	
	Provinsi Sulawesi Selatan	• Pengembangan kawasan pertanian, perikanan, dan peternakan	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Gurilla	• PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT , Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Puskesmas Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), Penyediaan Unit pengolahan setempat	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, Pengelolaan Sampah, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan,	

				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN, Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA, Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA, Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	

				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata,	
				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA, Fasilitasi Kerja Sama antar Desa, Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota, Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana), Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota,	

				Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
	Provinsi Sulawesi Selatan	• Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja	7 Kecamatan di Kabupaten Barru	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana	

				dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja, Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi, Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas,	
	Provinsi Sulawesi Selatan	• Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan	7 Kecamatan di Kabupaten Barru	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota.	
	Provinsi Sulawesi Selatan	• Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi,	7 Kecamatan di Kabupaten Barru	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana), Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,	

				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota, Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota, Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI), Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan.	
	Provinsi Sulawesi Selatan	• Percepatan pelaksanaan reforma agraria,	40 Desa dan 7 Kecamatan di Kebupaten Barru	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE, Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

4.5 POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

Pokok-pokok pikiran DPRD untuk rencana pembangunan tahun 2026 sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD dan RPJMD, dan RKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 merupakan tahun kedua perencanaan dari RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025- 2029, selain itu, sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 153 bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana meliputi antara lain penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, maka dalam proses penyusunan RKPD tahun 2026 harus memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Barru.

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD berisi saran dan pendapat dari DPRD berupa pokok-pokok pikiran yang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pokok-pokok pikiran yang diusulkan sebanyak 555 usulan. Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen pemikiran sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dan mikro yang berasal dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing partai politik untuk menjadi saran dan pendapat di dalam penyusunan Rancangan RKPD tahun 2026. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Barru secara garis besar adalah yang terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur meliputi jalan, sumber daya air, irigasi dan air minum.
2. Peningkatan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
3. Ketersediaan perlengkapan jalan berupa lampu jalan, rambu-rambu dan marka jalan.
4. Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana.
5. Pengembangan ekonomi kreatif, UMKM dan kewirausahaan.
6. Pemberian kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2026

Kerangka pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk tahun 2026 Kabupaten Barru. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan target dan pendanaan program.

Belanja daerah tahun 2026 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, belanja yang merupakan *Mandatory Spending* dan *Ear Mark* serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Barru Tahun 2026.

Adapun Struktur Alokasi Anggaran *Mandory Spending* Kabupaten Barru:

Tabel 5.1
Alokasi Anggaran *Mandatory Spending* Kabupaten Barru Tahun 2026

Sektor	Alokasi	Anggaran
Pendidikan	20%	184,227,414,597.00
Kesehatan	10%	92,113,707,298.50
Infrastruktur	40%	368,454,829,194.00
Jumlah	100%	644,795,951,089.50

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, dalam rangka pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dan Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibum Linmas, dan Sosial), Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Tematik Pembangunan “Posyandu”.

Tabel 5.2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan SPM

Nomenkelatur SPM	Indikator	Target	Anggaran
SPM Pendidikan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Program Pengelolaan Pendidikan			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah warga Negara usia 7 – 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	Rp. 25.651.139.700,00
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah warga Negara usia 13 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	Rp. 13.550.120.000,00
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional		
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah warga Negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	Rp. 5.009.472.800,00
SPM Kesehatan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3270 Orang	Rp. 194.120.700,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3251 Orang	Rp. 6.203.070,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	Rp. 16.410.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13655 Orang	Rp. 20.222.672,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2880 Orang	Rp. 72.145.600,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14100 Orang	Rp. 115.972.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4571 Orang	Rp. 83.861.700,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4510 Orang	Rp. 169.796.250,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3069 Orang	Rp. 15.297.250,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	475 Orang	Rp. 14.599.730,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3630 Orang	Rp. 206.418.700,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6975 Orang	Rp. 128.343.750,00
SPM PUPR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	Rp. 2.476.136.799,00
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	Rp. 250.000.000,00
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 liter/detik	Rp. 200.000.000,00
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	3 liter/detik	Rp. 976.136.799,00
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	Rp. 200.000.000,00
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	Rp. 100.000.000,00
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	50 SR	Rp. 750.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	Rp. 1.400.000.000,00
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	60 RT	Rp. 200.000.000,00
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	Rp. 200.000.000,00
Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	100 RT	Rp. 1.000.000.000,00
SPM PERUMAHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Rp. 85.000.000,00

Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	Rp. 20.000.000,00
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	Rp. 35.000.000,00
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 15.000.000,00
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	Rp. 15.000.000,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Rp. 3.200.000.000,00
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	80 Unit Rumah	Rp. 1.950.000.000,00
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit Rumah	Rp. 500.000.000,00

Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah	Rp. 750.000.000,00
SPM TRANTIBUMLINMAS			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kab/Kota	100 %	Rp. 999.800.000,00
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	Rp. 33.700.000,00
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	7 Dokumen	Rp. 2.000.000,00
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	Rp. 951.100.000,00

Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	7 Laporan	Rp. 7.500.000,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	Rp. 5.500.000,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Rp. 48.253.000,00
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	125 Orang	Rp. 48.253.000,00
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Rp. 272.350.000,00
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di	50 Unit	Rp. 15.000.000,00

	kawasan tempat tinggalnya		
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	50 Orang	Rp. 30.000.000,00
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	Rp. 2.000.000,-
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	7 Kawasan	Rp. 35.350.000,00
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	25 Orang	Rp. 25.000.000,00
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Rp. 50.000.000,00

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	Rp. 10.000.000,00
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	7 Kawasan	Rp. 105.000.000,00
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Rp. 567.000.000,00
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	Rp. 1.000.000,00
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	6 Dokumen	Rp. 400.000.000,00
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	355 Orang	Rp. 60.000.000,00
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	2 Dokumen	Rp. 10.000.000,00

Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	2 Laporan	Rp. 20.000.000,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Rp. 1.431.657.074,00
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	150 Laporan	Rp. 1.389.013.874,00
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	5 Orang	Rp. 10.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit	Rp. 30.643.200,00
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga,	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah	1 Dokumen	Rp. 2.000.000,00

dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		
SPM SOSIAL			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas, Anak, Lansia, dan tuna sosial terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Rp. 191.500.000,00
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Rp. 50.000.000,00
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Rp. 50.000.000,00
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Rp. 10.000.000,00
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	Rp. 13.500.000,00

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Rp. 10.000.000,00
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Rp. 5.000.000,00
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Rp. 53.000.000,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab./Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurar bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	Rp. 160.000.000,00
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Rp. 50.000.000,00
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Rp. 50.000.000,00

Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Rp. 30.000.000,00
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Rp. 10.000.000,00
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Rp. 20.000.000,00

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut :

Tabel 5.3
Proyeksi Rencana Pendanaan Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027 Kabupaten Barru

URAIAN (Sesuai PP 12 TAHUN 2019)	Rencana Pendanaan	Proyeksi Tahun
	2026	2027
Pendapatan	921.137.072.985,00	924.647.684.421,00
Pendapatan Asli Daerah	115.982.078.698,00	118.533.070.342,00
Opsen PKB	7.603.179.742,00	
Opsen BBNKB	6.483.942.234,00	
Pendapatan Transfer	805.154.994.288,00	824.114.614.079,00
A. Transfer Pemerintah Pusat	712.548.273.963,00	729.984.777.546,00
B. Transfer Antar Daerah	64.754.206.635,00	65.965.110.299,00
BELANJA	939.739.833.732	951.749.845.077
Belanja Operasi	688.815.754.624	698.218.801.931
Belanja Pegawai	396.482.540.225	402.072.944.042
Belanja Barang dan jasa	265.776.681.950	269.311.511.820
Belanja Bunga	2.043.169.705	2.020.899.156
Belanja Subsidi	313.026.525	313.026.525
Belanja Hibah	24.200.336.219	24.500.420.388
Belanja Bantuan Sosial		
Belanja Modal	155.572.935.543	158.179.899.581
Belanja tidak Terduga	839.982.105	839.982.105
Belanja Transfer	94.511.161.460	94.511.161.460
Belanja Bagi Hasil	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	94.511.161.460	96.707.180.217

Sumber : Data Olahan 2025

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah pada Bab III diproyeksi bahwa belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 921.137.072.985,00. Belanja daerah tahun 2026 disusun berdasarkan prinsip- prinsip

penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program priority dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2026, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Rincian belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 5.4

Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Pagu indikatif	Target tahun 2027	Pagu indikatif Tahun 2027	Perangkat daerah
1	Pengetasan Kemiskinan dan Mengurangi Penagngguran	Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat	Pengintegrasian penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan sistem terpadu berbasis teknologi yang mencakup perbaikan infrastruktur layanan dasar, peningkatan akses dan pendidikan vokasi, dan pengembangan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja	Percepatan Penanggulangan kemiskinan terintegrasi dan Terpadu (PIK PAKET)	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ahli dan kompeten sesuai standart peraturan perUUan	100 %	1,216,774,900	100 %	1,216,774,900	Dinas Sosial dan PPPA
						Persentase PPKS yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial	100 %		100 %		
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	197,783,300	100 %	197,783,300	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	183,921,200	100 %	183,921,200	Dinas Sosial
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mengakses layanan pengolahan air limbah domestik layak	74 %	957,300,000	74 %	960,171,900	Dinas PUTR

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Pagu indikatif	Target tahun 2027	Pagu indikatif Tahun 2027	Perangkat daerah
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mengakses air minum layak	86 %	895,000,000	86 %	2,897,685,000	Dinas PUTR
					Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak layak Huni	12,70 %	852,700,000	12,70 %	855,258,100	Dinas PUTR
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100 %	1,250,000,000	100 %	1,253,750,000	Dinas PUTR
						Persentase Warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100 %		100 %		
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10,55 %	15,681.700	10,55 %	15,728,745	Diskumdag
					Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro	0,90 %	150,000,000	0,90 %	153,000,000	Diskumdag

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Pagu indikatif	Target tahun 2027	Pagu indikatif Tahun 2027	Perangkat daerah
		Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100 %	204,493,600	100 %	205,107,081	Dinas Tenaga Kerja
					Program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	15,30 %	299,987,300	15,30 %	3,008,987,262	Disparpora
						Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,91 %		0,91 %		
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi terlatih yang Bersertifikat	100 %	1.125.000.000	100 %	1.128,375,000	Dinas PUTR
					Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	15,30 %	299,987,300	15,30 %	3,008,987,262	Disparpora
						Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,91 %		0,91 %		
2	PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG INKLUSIF	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, derajat kesehatan	Peningkatan kualitas dan akses pendidikan, Bantuan Operasional	Program Pengelolaan Pendidikan	APM PAUD	92,10 %	51,772,586,500	92,10 %	52,218,586,500	Diknasbud

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Pagu indikatif	Target tahun 2027	Pagu indikatif Tahun 2027	Perangkat daerah
			dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, organisasi non pemerintah dan lembaga terkait lainnya, dengan dukungan kebijakan yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.	Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SD/MI dan SMP/Mts, Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD		APM SD	95 %		95 %		
						APM SMP	95 %		95 %		
						Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS)	1400 Orang		1400 Orang		
				Pembangunan Akademi Sepak bola ramang	Program pengembangan Kapasitas daya saing Keolahragaan	Persentase Raihan prestasi / Medali pada Event olahraga Nasional dan Provinsi	2,00 %	2,404,184,009	2,00 %	2,411,396,561	Disparpora
				Subsidi SPP Mahasiswa S1, S2, dan S3 dan terutama Beasiswa 5 orang untuk Mahasiswa Kedokteran	Program pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	15,30 %	299,987,300	15,30 %	3,008,987,262	Disparpora
						Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,91 %		0,91 %		

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Pagu indikatif	Target tahun 2027	Pagu indikatif Tahun 2027	Perangkat daerah
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan, Peningkatan kesejahteraan kader posyandu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 Kelahiran Hidup	< 5	73,989,615,426	< 5	74,797,730,811	Dinas Kesehatan
						ngka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	< 20		< 20		
						Persentase Balita Stunting	17,3 %		17,3 %		
						Persentase Pasien yang tertangani sesuai standar berdasarkan peraturan perundangundangan	100 %		100 %		
						Jumlah penyakit menular dan tidak menular yang tertangani	100 %		100 %		
				Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	18,90 %	43,856,670	18,90 %	43,988,240	DPMDPPKBPPPA
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Yang Aktif	100 %	151,487,220	100 %	151,941,682	DPMPDPKBPPPA

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Pagu indikatif	Target tahun 2027	Pagu indikatif Tahun 2027	Perangkat daerah
					Masyarakat Hukum adat						
3	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKETAHANAN IKLIM	Meningkatnya daya saing infrastruktur wilayah	Meningkatkan kualitas infrastruktur bekrlanjutan dan berketahanan wilayah terhadap bencana melalui perencanaan terpadu berbasis resiko, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, penguatan kapasitas sumberdaya manusia dengan penerapan teknologi inovatif, penguatan sistem peringatan dini, serta perluasan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna membangun infrastruktur yang tangguh, ramah	Peningkatan Infrastruktur jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	35,06 %	35,341,450,929	35,06 %	37,440,708,515	Dinas PUTR
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten	42 %	1,616,484,033	42 %	621,333,485	Dinas PUTR
				Peningkatan Infrastruktur Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	72 %	2,953,353,000	72 %	4,462,213,059	Dinas PUTR
						Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	12,9 %		12,9 %		
				Peningkatan Infrastruktur Air Bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mengakses layanan pengolahan air limbah domestik layak	74 %	957,300,000	74 %	960,171,900	Dinas PUTR

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Pagu indikatif	Target tahun 2027	Pagu indikatif Tahun 2027	Perangkat daerah
			lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim serta resiko bencana		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mengakses air minum layak	86 %	895,000,000	86 %	960,171,900	Dinas PUTR
		Menurunnya emisi GRK			Program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	71	84,000,000	71	95,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Indeks Kualitas Udara	72		72		
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana			Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM)	100 %	1,756,236,450	100 %	1,914,297,730	BPBD
					Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana (SPM)	100 %	606,087,560	100 %	624,270,187	BPBD
						Persentase jumlah warga negara yang memeperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (SPM)	100 %		100 %		
						Persentase Jumlah warga negara yang	100 %		100 %		

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Pagu indikatif	Target tahun 2027	Pagu indikatif Tahun 2027	Perangkat daerah
						memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (SPM)					
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA	Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsive, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah dan transparan dengan dukungan pengembangan sumberdaya manusia yang kompeten serta berbasis hasil penelitian	enerapan dan Pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektornik (SPBE)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0,88 %	1.833,395,700	0,88 %	1,838,895,887	Diskominfo
				Digitalisasi Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan desa yang mencapai tertib adimistrasi sesuai peraturan Per UU an	100 %	2,056,491,122	100 %	1,240,200,595	DPMDPPKBPPPA
					Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa yang baik sesuai peraturan Per UU an	7,5 %	120,143,200	7,5 %	2,000,000	DPMDPPKBPPPA
				Perbaikan tata kelola musabah tilawatil qur'an dan umroh serta peningkatan insentif bagi pegawai sara dan guru mengaji	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100 %	14,320,539,920	100 %	14,292,383,792	Bagian Kesejahteraan Rakyat
5	PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT	Meningkatnya daya saing industry pengolahan	Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah dengan arah kebijakan	Pembangunan dan pengembangan kawasan industri Barru	Program perencanaan dan Pembangunan industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	100 %	5,057,679,485	100 %	19,400,944,472	Diskumdag

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Pagu indikatif	Target tahun 2027	Pagu indikatif Tahun 2027	Perangkat daerah
	BERBASIS POTENSI		mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, serta memperkuat kapasitas UMKM, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.	(KIBAR)		pembangunan industri dalam RIPIK					
					Program Pengendalian izin usaha industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	22,984,900	100	23,053,854	Diskumdag
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	100 %	757,010,100	100 %	858,820,241	Dinas PUTR
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan	100 %	66,704,300	100 %	66,904,413	DPMPTSP
		Meningkatnya nlai tambah ekonomi daerah		Perbaikan tata kelola dan subsidi pupuk, Pembangunan dan pengembangan agroteknologi, agropolitan serta hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan.SPBU nelayan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan, Perkebunan dan Holtikultura	100 %	824,129,700	100 %	833,094,888	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung Peternakan	100 %		100 %		
					Program Penyediaan dan	Tingkat Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,37 %	11.160.833.000	5,37 %	11.160.833.000	Dinas Pertanian dan

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Pagu indikatif	Target tahun 2027	Pagu indikatif Tahun 2027	Perangkat daerah
					Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	3,23 %		3,23 %		Ketahanan Pangan
					Program Penyuluh Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	25 %	647,587,114	25 %	673,490,599	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	6.650,21 Ton	863,373,830	6.650,21 Ton	864,463,951	Dinas Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap Nelayan	21.030,80 Ton	219,306,800	21.030,80 Ton	219,829,720	Dinas Perikanan
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan	Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan UMKK	1.463,85 Ton	222,048,660	1.463,85 Ton	222,579,806	Dinas Perikanan
				Pembangunan Pariwisata Gurilla	Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase Peningkatan Jumlah PAD Pariwisata	2 %	4,289,000,001	2 %	4,664,689,943	Disparpora
				Penguatan Kapasitas UMKM dan Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis local	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro	0,90 %	150,000,000	0,90 %	153,000,000	Diskumdag
					Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian	65	145,000,000	65	145,900,000	Diskumdag

No	Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2026	Program prioritas	Program (Kepmedagri)	Indikator kinerja	Target tahun 2026	Pagu indikatif	Target tahun 2027	Pagu indikatif Tahun 2027	Perangkat daerah
					Program pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang	100	0	100	0	Diskumdag
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah			Rogram Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0,02 %	1,813,098,323	0,02 %	1,869,304,371	Bapenda

Pada tabel 5.2 diatas pagu indikatif terhadap Program Prioritas telah berkesesuaian dengan Pagu Indikatif yang terdapat pada dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029, dengan kemampuan proyeksi kemampuan fiscal Kabupaten Barru tahun 2026 sebesar Rp. 921.137.072.985,00,-

Selanjutnya pada tebel diatas, indikator-indikator telah sesuai dengan Indikator pada dokumen RPJMD Kabupaten Barru tahun 2025-2029, karena telah mempedomani Kepmendagri terbaru yang tertanam di aplikasi SIPD-RI, dimana sebelumnya telah dilakukan pemetaan nomenkelatur dan indicator. Hal tersebut juga sama untuk indicator SPM

Tabel 5.5

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perangkat Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			309.385.458.618,00				279.667.246.581,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			308.224.441.418,00				278.569.505.481,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			308.224.441.418,00				278.569.505.481,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	257.680.408.918,00			-	227.787.472.981,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	40.000.000,00			-	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						[Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	Maturitas SPIP	3	257.680.408.918,00				227.787.472.981,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2180 Orang/bulan	255.990.408.918,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD		226.097.472.981,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	70,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	120.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	140,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		140,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	290.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		290.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	60.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	150,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	180,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		180,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	250.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	90,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		90,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	70,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	50.544.032.500,00			-	50.782.032.500,00	
						-								
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	25.141.139.700,00			-	25.171.139.700,00	
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	580.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD		580.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	340.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		340.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah								
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	410.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		410.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah								
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 Paket	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket	300.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	600 Peserta Didik	390.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		390.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	15 Orang	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	419 Orang	320.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	199 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	199 Satuan Pendidikan	2.571.809.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2.571.809.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	510.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	80 Orang	70.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik								
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	199 Satuan Pendidikan	280.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		280.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	570.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD		570.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar								
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16407 Peserta Didik	16.643.330.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER		16.643.330.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Diadakan		416,000,000.00				416,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	14.180.120.000,00			-	14.388.120.000,00	
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	570.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		570.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	170.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	1.100.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	1.200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah								
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	300.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket	320.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP		320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama								
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6882 Peserta Didik	8.228.120.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER		8.228.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	600 Peserta Didik	530.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		530.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3 Orang	36.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	244 Orang	320.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	39 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3407 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	450.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	10.852.772.800,00			-	10.852.772.800,00	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	700.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD								
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6859 Peserta Didik	3.719.472.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD		3.719.472.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	645 Orang	5.613.300.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5.613.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD								
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	160.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD								
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	254 Satuan Pendidikan	140.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	400.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	50,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	370.000.000,00			-	370.000.000,00	
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan								
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1050 Peserta Didik	250.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas								
									50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.161.017.200,00				1.097.741.100,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.161.017.200,00				1.097.741.100,00	
3	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	40.000.000,00			-	40.000.000,00	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pengadaan yang dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	40.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	576.741.100,00			-	576.741.100,00	
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional								
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	6 Laporan	456.741.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		456.741.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang dan Lembaga yang diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	71 Sertifikat	120,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		120,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	140.000.000,00			-	140.000.000,00	
	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	140.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	65.000.000,00			-	65.000.000,00	
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	300 Orang	65.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	89.276.100,00			-	26.000.000,00	
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya								
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	27 Objek	89.276.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	250.000.000,00			-	250.000.000,00	
	2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu								
									250.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						DINAS KESEHATAN			221.013.120.857,00				0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			221.013.120.857,00				0,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			221.013.120.857,00				0,00	
7	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
						[Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan dan Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas kinerja RSUD]	Maturitas SPIP	2	146.314.500.534,00				0,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	47.054.416,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	726 Orang/bulan	74.238.324.724,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuahn Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	6,716,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6,716,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	50.000.000,00			-	0,00	
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	12,991,123.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	85,087,326.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	18,204,644.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	122,305,639.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34,616,964.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.435.484,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	666.698.038,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	73,935,805.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	0	-	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	120.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lapporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	62,771,894.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	679,182,059.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	965.193.217,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	142,436,934.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	32,615,767.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	JumlahBangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	293,094,667.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	68.632.835.833,00			-	0,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
8	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	73.763.953.082,00			-	0,00	
						[Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Keberhasilan Penanganan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular, Persentase Capaian SPM Rumah Sakit, Persentase							
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	21.778.901.015,00			-	0,00	
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas								
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit	3.230.701.631,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan								
							Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	4 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas								
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	5.526.413.250,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8 Unit	3.189.089.245,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	825.323.088,00	-	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	412.661.544,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	5 Unit	1.082.280.593,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	200 Unit	151.255.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	7.242.719.415,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Pukesmas	34.890 Keluarga	50,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	144 Paket	68,457,249.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	51.840.519.177,00			-	0,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3259 Orang	493.158.375,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3239 Orang	100.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3080 Orang	100.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14866 Orang	100.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2880 Orang	360.291.162,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14100 Orang	100.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4571 Orang	100.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4510 Orang	140.136.765,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3069 Orang	100.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	475 Orang	140.057.105,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3630 Orang	206.418.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6975 Orang	105.925.060,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	2.132.884.603,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	54.182.873,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	244.673.632,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	70.029.076,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0 Dokumen	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	269.371.755,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	63.962.539,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	1.179.098.391,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	41.918.084.784,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
						-								
	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
						[Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Keberhasilan Penanganan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular, Persentase Capaian SPM Rumah Sakit, Persentase Puskesmas Dengan Nilai Penilaian Kinerja Puskesmas Baik]	Angka Kematian Bayi per 1000 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Persentase capaian SPM Rumah Sakit Persentase Pengendalian Penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular sesuai Peraturan PerUndang-undangan Persentase Puskesmas dengan nilai Penilaian kinerja puskesmas Baik	14.7 2.1 67 75 85	73.763.953.082,00				0,00	
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	0,00	DINAS KESEHATAN
						-								
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Kegiatan	80,830,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
						[Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Keberhasilan Penanganan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular, Persentase Capaian SPM Rumah Sakit, Persentase Puskesmas Dengan Nilai Penilaian Kinerja Puskesmas Baik]	Angka Kematian Bayi per 1000 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Persentase capaian SPM Rumah Sakit Persentase Pengendalian Penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular sesuai Peraturan PerUndang-undangan Persentase Puskesmas dengan nilai Penilaian kinerja puskesmas Baik	14.7 2.1 67 75 85	73.763.953.082,00				0,00	
	1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	1.479.038.810,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							0	7 0	586.672.638,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								
							0	12 0	5.281.688,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								
							0	13 0	859.518.617,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		0,00	DINAS KESEHATAN
						-								
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang degan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3630 Orang	385317517	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
						[Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Keberhasilan Penanganan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular, Persentase Capaian SPM Rumah Sakit, Persentase Puskesmas Dengan Nilai Penilaian Kinerja Puskesmas Baik]	Angka Kematian Bayi per 1000 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Persentase capaian SPM Rumah Sakit Persentase Pengendalian Penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular sesuai Peraturan PerUndang-undangan Persentase Puskesmas dengan nilai Penilaian kinerja puskesmas Baik	14.7 2.1 67 75 85	73.763.953.082,00				0,00	
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	4.910.672,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	0 Tatanan	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	214.843.170,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	88.474.635,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	13 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji								
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	139.630.471,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.902.419,00			-	0,00	
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	0 Unit	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	4,902,419.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
9	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	704.325.680,00			-	0,00	
						[Persentase Puskesmas dengan Jenis dan Jumlah SDM Kesehatan yang sesuai standar]								
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	9.020.026,00			-	0,00	
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	3,524,214.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
							0	1 0	5.496.812,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	10.439.396,00			-	0,00	
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							0	1 0	3.673.467,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia di Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar	38 Orang	2,246,216.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
							0	1 0	4.519.713,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 Orang	684.866.258,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		0,00	DINAS KESEHATAN
10	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								
						[Persentase Pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang berizin dan bersertifikat]	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	100	68.666.740,00				0,00	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	33.966.764,00			-	0,00	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 Dokumen	33.966.764,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		0,00	DINAS KESEHATAN
						-	-	-	68.666.740,00				0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	-	0,00			-	0,00	
	1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga								
							Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0 Dokumen	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
						[Persentase Pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang berizin dan bersertifikat]	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	100	68.666.740,00				0,00	
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4 Dokumen	18.760.996,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
						-								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	0,00			-	0,00	
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan								
									0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan			15.938.980,00			-	0,00	
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	20 Unit	15.938.980,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
11	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
						[Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS]	Persentase Penduduk yang menerapkan PHBS	57	161.674.821,00				0,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Dokumen	65.928.315,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	10 Dokumen	65.928.315,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6 Dokumen	29.818.191,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	0,00	DINAS KESEHATAN
						RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI								
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			54.972.579.784,00				55.942.589.598,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			54.972.579.784,00				55.942.589.598,00	
12	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	45.678.802.844,00			-	46.363.984.886,00	
						-								
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Maturitas SPIP	4 Poin	0,00			-	0,00	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	0,00	
	1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
									0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			45.678.802.844,00			-	46.363.984.886,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	45.678.802.844,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		46.363.984.886,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI
13	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterpenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk pelayanan pasien Persentase tingkat keterpenuhan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan Rumah Sakit sesuai standar (nilai aspak minimal 60%)	100 % 100 persen >60 %	9.293.776.940,00			-	9.578.604.712,00	
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		627.255.405,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI
	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		509.130.538,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	5.000.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN		5.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit								
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	2,281,228,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN		2,304,040,381.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI
						UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH			100.000.000,00				0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			100.000.000,00				0,00	
14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	56.387.245,00			-	0,00	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	22.191.500,00			-	0,00	
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.950.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
									2.120.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			0,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
									1.700.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	34.195.745,00			-	0,00	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	21.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
15	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	29.767.755,00			-	0,00	
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	29.767.755,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	13.845.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
						DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN								
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			64.603.314.470,00				104.270.554.807,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			57.800.614.470,00				91.974.296.707,00	
16	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
						[Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan]	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	8.042.279.509,00				7.572.052.634,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		68.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan	5,252,164,284.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5,671,740,134.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6,300,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	23,800,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24,990,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 %	95.000.000,00			-	126.000.000,00	
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		126.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	56.765.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	68.977.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		76.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,600,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2,730,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,663,825.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15,750,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	12,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12,600,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	68,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		83,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11.550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.400.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3.570.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		262.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	1	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan	1 Unit	165,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		165,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	75.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar								
							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	800.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	52.800.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100 %	392.988.800,00			-	413.650.000,00	
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82,250,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		117,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	11,775,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	279,600,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		261,600,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	417.120.600,00			-	459.272.500,00	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	49.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		54.022.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	77.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya								
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6 Unit	286.120.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		315.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
17	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
						-	-	-	2.953.353.000,00				22.524.885.224,00	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	1	03	02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Klembagaa Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibinaan dan diBerdayakan	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Tanggul dan Tebing Sungai yang Dilakukan Operasi dan Pemeliharaan	1 Paket	100,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Jumlah Kanal Banjir yang Dilakukan Operasi dan Pemeliharaan	1 Paket	200,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		300,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0099	Peningkatan Kanal Banjir								
							Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	0,1 KM	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing								
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0 KM	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		540.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya								
							Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0,025 KM	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0113	Pembangunan Kanal Banjir								
							Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0,1 KM	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,04 KM	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya								
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		17.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0122	Rehabilitasi Kanal Banjir								
							Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	0,2 KM	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir								
							Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku								
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	0 Dokumen	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya								
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	422.011.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Terbangun	0,2 KM	181,341,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.32	284,885,224.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,25 KM	200,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0,38 KM	300,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan								
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,71 KM	500.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,33 KM	200.000.000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0,5 KM	300,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
						[Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	72	2.953.353.000,00				22.524.885.224,00	
	1	03	02	2.02	0048	Peningkatan Bendung Irigasi								
							Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	1 UNIT	100.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
18	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
						[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	15	895.000.000,00				3.797.685.000,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mengakses air minum layak	82 %	895.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.797.685.000,00	
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun	1 Dokumen	250,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
						-	-	-	895.000.000,00				3.797.685.000,00	
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0 Liter/Detik	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Liter/Detik	500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
						[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]								
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1 Liter/Detik	450,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Liter/Detik	897,685,000.00	
						-	-	-	895.000.000,00				3.797.685.000,00	
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10 SR	195.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
19	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mengakses layanan pengolahan air limbah domestik layak	68 %	957.300.000,00			-	860.171.900,00	
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja								
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	50 Rumah Tangga	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	40 Rumah Tangga	557.300.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		460.171.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
20	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainse yang terbangun (rehabilitasi, peningkatan)	1,62 %	1.616.484.033,00			-	2.824.845.000,00	
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan								
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	500 M	409.094.033,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		359.825.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan								
							Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	500 Meter	75.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan								
							Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Lingkungan	150.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		863.580.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	0 Dokumen	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan								
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	150.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		251.877.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan								
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	157.390.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		899.562.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan								
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	75.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
21	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	100 %	6.112.736.900,00			-	13.185.322.499,00	
	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	7 Bangunan Gedung	3.800.736.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	49.914.799,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		49.914.799,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	2.142.613.501,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	100 Dokumen	119.471.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		135.407.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
22	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
						[Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	34.95	35.341.450.928,00				38.934.334.450,00	
	1	03	10	2.01		684,106 KM	Persentase panjang jalan dan jembatan yang terbangun	1,36 %	35.341.450.928,00			-	38.934.334.450,00	
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan								
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	684,106 KM	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	684,106 KM	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan								
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	37 KM	1.000.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan								
							Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	1 KM	2.120.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 KM	2.120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 KM	4.745.100.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 KM	5.745.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0057	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	1 Meter	2.112.668.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Meter	2.112.668.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	4.617 KM	17.520.541.675,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.907 KM	18.619.799.261	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	10 Jembatan	250.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Jembatan	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan								
23	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi terlatih yang Bersertifikat	100 %	1.125.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 %	1.225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100 %	1.000.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 %	1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis								
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	65 Orang	325.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	65 Orang	325.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	11	2.01	0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis								
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	65 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	64 Dokumen	28,375,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis								
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	65 Orang	650.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI								
							Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Orang	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Layanan Informasi	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota								
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	10 Paket Pekerjaan	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Paket Pekerjaan	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi								
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	3 Lembaga	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Lembaga	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	11	2.04	0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
24	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	100 %	757.010.100,00			-	1.050.000.000,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada Selain RTRW Kab/Kota	1 Dokumen						
									20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota								
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota								
							dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota								
							Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota								
							Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	39.263.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang								
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	0 Laporan	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
	1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah Data SHP Peta Dasar	1 Data	25,000,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Data	25,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota								
							Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	12	2.02	0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang								
							Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	10 Layanan	18,274,700,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Layanan	183,820,241.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	03	12	2.04	0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang								
							Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	3 Kasus	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Kasus	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	03	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			6.802.700.000,00				12.296.258.100,00	
25	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
						[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah]	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%	1.250.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100%	4.451.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
						[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana]	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%	1.250.000.000,00				4.451.000.000,00	
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani								
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana								
							Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus								
							Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
						-								
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	"Persentase orang yang mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	60.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100%	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana								
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	70 Orang	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	70 Orang	16.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator								
							Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	30 Orang	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
						[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah]								
	1	04	02	2.02	0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Orang	5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Orang	5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	04	02	2.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Orang	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi korban bencana yang direhabilitasi	25 Unit Rumah	600,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	75 Unit Rummah	2,400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi korban bencana yang terbangun	3 Unit Rumah	180,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit Rumah	180,000,000.00	
	1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang difasilitasi	1 Rumah Tangga	60,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Rumah Tangga	60,000,000.00	
	1	04	02	2.03	0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	2 Rumah Tangga	180,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Rumah Tangga	180,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota								
							Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	60.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit rumah tangga	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
26	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			852.700.000,00			-	1.085.258.100,00	
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani di bawah 10 (Sepuluh) Ha	5,9 Ha	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5,9 Ha	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	20,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani di bawah 10 (Sepuluh) Ha	5,9 Ha	832.700.000,00			-	1.065.258.100,00	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni								
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	8 Unit Rumah	192.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Unit Rumah	192.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh								
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Unit	70.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh								
							Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	4,8 Ha	561.700.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4,8 Ha	564.258.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
27	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			550.000.000,00				2.640.000.000,00	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah			550.000.000,00			-	2.640.000.000,00	
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan								
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	13 Unit Rumah	310.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 Unit Rumah	311,650,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	4 Rumah	240,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Rumah	240,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
28	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	42%	4.150.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	52%	4.120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan								
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU								
							Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	39 Kelompok	30.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	39 Kelompok	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang								
						[Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)]	Persentase Peningkatan Kawasan Perumahan memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	42.00	4.150.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	42.00	4.120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		4 Lokasi	1,000,000,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Lokasi	1,000,000,000	
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		6 Lokasi	3,000,000,000	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Lokasi	3,000,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			57.836.000,00				57.284.508,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			57.836.000,00				57.284.508,00	
29	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN								
						[Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan]	-	-	20.000.000,00				20.400.000,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,000,000.00				20.400.000,00	
30	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	25.000.000,00			-	24.010.000,00	
						[Meningkatnya keterseidaan lahan untuk kepentingan umum]								
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan tepat waktu	100 persen	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	24.010.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	24.010.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
31	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								
						[Meningkatnya Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian]	-	1 Dokumen	12.836.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	12.874.508,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	12.836.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	12.874.508,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.919.694.038,00				2.927.634.577,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.919.694.038,00				2.927.634.577,00	
32	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
						[Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan]	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	2.448.448.978,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3	2.473.681.180,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Darah dan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peragkat Daerah yang Disusun	2 Dokumen	1,500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	1,500,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	1,500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1,500,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menirima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	2,129,910,820.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Orang	2,129,910,819.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	500,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatas Usahaan Jumlah Daerah pada SKPD	4 Laporan	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatas Usahaan Jumlah Daerah pada SKPD	4 Laporan	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	11.000.000,00			-	11.000.000,00	
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	5.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Orang	5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	5.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Orang	5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	4,500,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	27,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Paket	30,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	2.980.988,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Paket	55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.271.170,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	11.271.270,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.971.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	4.971.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	32.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Laporan	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120 Paket	27,248,787.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Paket	45,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	1.704.201,00			-	0,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaaann Jasa Surat Menyurat			1.704.201,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	1.704.201,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
33	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	606.087.560,00			-	596.000.000,00	
						[Meningkatnya kualitas layanan informasi dan edukasi rawan bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana]	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	33.34	606.087.560,00				596.000.000,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	35,087,560.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	71.000.000,00			-	61.000.000,00	
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	60 Orang	21,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	60 Orang	21,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	20,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	20,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Kawasan	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						[Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat]								
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	430.000.000,00			-	430.000.000,00	
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	370.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	370.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	355 Orang	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	355 Orang	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						-								
	1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Operasi yang Sah/Legal	1 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	9.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan								
							Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	1 Orang	8.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Orang	8.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 Orang	17,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150 Orang	17,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						[Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana]								
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	70.000.000,00			-	75.000.000,00	
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan								
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana								
							0	1 Dokumen	8.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	1 Orang	8.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Orang	8.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota								
							Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	34,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	34,000,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X					NON URUSAN			134.842.500,00				83.042.500,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
34	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	134.842.500,00			-	83.042.500,00	
						-								
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.000.000,00			-	1.000.000,00	
	X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		57.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	46.800.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	18.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.042.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3.042.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN								
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.472.274.633,00				8.208.752.841,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			8.472.274.633,00				8.208.752.841,00	
35	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
						[Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	-	-	5.483.424.933,00				5.589.178.341,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1,200,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	1,200,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						-	-	-	5.483.424.933,00				5.589.178.341,00	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen	4.774.890.858,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 persen	4.774.890.858,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menrima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	5,280,123,020.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	60 Orang	5,280,123,020.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen laporan barang milik daerah pada perangkat daerah sesuai peraturan perundang undangan	100 persen	1.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 persen	1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	20,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	20,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	5,500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Orang	21,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Orang	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Paket	1,575,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2 Paket	1,500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	1,048,918.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	1,102,164.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan	6 Paket	29.500.000,00	Kab. Barru, Semua	DANA ALOKASI UMUM	6 Paket	32.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.785.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	4.785.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	99.948.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	250 Laporan	109.948.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	140.892.592,00			-	224.646.000,00	
	1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1,500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	11,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	4.358.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	14.358.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
									15.104.592,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			18.858.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			88.065.283,00			-	88.065.283,00	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	2.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150 Laporan	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	74.965.963,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3	74.965.963,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	9.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	171.871.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		181.871.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	5.420.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5.420.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	5,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
36	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan trantibumlinmas	100 persen	1.010.966.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1.013.999.199,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	1.700.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Dokumen	1.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	7 Dokumen	1.321.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Dokumen	1.353.899,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			971.100.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		975.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	7 Laporan	1.265.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Laporan	1.265.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada(SPM)	100 persen	35.080.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 persen	34.080.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7 Laporan	21.263.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Laporan	24.263.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	7 laporan	6.908.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 laporan	8.908.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap	7 Laporan	6.908.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 laporan	9.908.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
37	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	1.830.786.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 persen	1.501.843.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	150 Laporan	1.542.643.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	150 Laporan	1.640.143.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	5 Orang	22.593.250,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Orang	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit	150.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	215.654.530,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat								
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		15.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.636.293.093,00				0,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
38	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3	3.748.727.393,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3	3.591.975.772,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.736.438,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	1.736.438,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.245.504.919,00			-	0,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.245.504.919,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Orang/bulan	3.245.504.919,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	14.816.760,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	14.816.760,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	168.535.976,00			-	0,00	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	5,000,000.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Paket	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.860.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	7.860.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.017.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	24.017.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.090.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	6.090.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	5.568.176,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	5.568.176,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	125.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	101.065.139,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	18.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	-	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	116.800.000,00			-	0,00	
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	76.800.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	76.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			68.333.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		68.333.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	15.600.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	15.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	42.233.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Unit	42.233.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	5.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
39	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	1.216.774.900,00			-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.216.774.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	800.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Keluarga	800.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	27.994.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Lembaga	27.994.700,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	62 Orang	55.340.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	62 Orang	55.340.200,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial								
						Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti			333.440.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	774	333.440.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
40	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	-	10.000.000,00			-	0,00	
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	03	2.01	0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal								
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
41	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	197.783.300,00			-	0,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	49.425.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Orang	49.425.900,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang								
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	33.494.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Orang	33.494.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	11.043.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Orang	11.043.900,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	10.862.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Orang	10.862.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	10.600.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Orang	10.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Orang	25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	57.356.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Orang	57.356.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
42	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	183.921.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	183.921.200,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	14347 Orang	12.054.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1460 Orang	12.054.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga								
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1100 Orang	166.866.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1100 Orang	166.866.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	3586 Usulan	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3515 Usulan	5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
43	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100 Orang	234.086.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Orang	234.086.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	30.602.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1500 Orang	30.602.600,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	30.200.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Orang	30.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	25.118.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Orang	25.118.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	9.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Orang	9.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	139.165.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Orang	139.165.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana								
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	139.165.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Orang	139.165.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
44	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	45.000.000,00			-	0,00	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	100 Makam	45.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Makam	45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			623.788.627,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		625.584.995,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
45	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	33 Laporan	16.750.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	33 Laporan	18.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	33 Laporan	16.750.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	33 Laporan	18.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			27.106.670,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.238.240,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								
							Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	6 Lembaga	10.842.668,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Lembaga	10.095.296,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota								
							jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	140 orang	16.264.002,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	140 orang	15.142.944,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
46	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0.01%	198.192.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.01%	198.786.576,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	55 Lembaga	21.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	55 Lembaga	21.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
									176.692.000,00				177.286.576,00	
	2	08	03	2.02	0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatan/Kota	15 Orang	16.903.040,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Orang	16.974.389,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	15 Orang	26.736.880,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Orang	26.820.121,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat								
									22.736.880,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota								
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	7 orang	17.669.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 orang	17.728.658,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	15 orang	39.638.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Orang	39.757.315,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	15 Orang	53.007.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Orang	53.185.972,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
47	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	indeks kualitas keluarga (IKK)	79.00 Poin	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	79.37 Poin	25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Keluarga	11.840.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	66 Keluarga	11.840.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh								
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Orang	11.840.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	66 Orang	11.840.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	13.160.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.02	0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	6 Lembaga	6.056.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Lembaga	6.056.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.02	0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	7.104.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Lembaga	7.104.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
48	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	82%	14.546.630,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	86%	14.590.270,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	14.546.630,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	14.590.270,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
49	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	14.546.630,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	14.590.270,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								
	2	08	06	2.01	0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menerapkan pemenuhan Hak Anak dalam Pelayanan Tupoksi OPDnya	100%	65.210.230,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100%	65.405.861,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
50	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			276.983.097,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		277.814.048,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
	2	08	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2 Dokumen	13.295.188,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	13.335.074,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	4 Kegiatan	8.863.459,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Kegiatan	8.890.050,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	22 Orang	50.964.890,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Orang	51.117.785,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	22 Orang	25.482.445,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Orang	25.558.892,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	7 Orang	15.289.467,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Orang	15.335.335,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	7 Orang	20.385.956,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Orang	30.670.671,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	7 Orang	30.578.934,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Orang	30.670.671,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	22 Orang	76.447.335,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Orang	76.676.677,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	08	07	2.02	0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	6 Orang	35.675.423,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Orang	35.782.450,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA			10.859.646.509,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.357.662.801,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.789.222.424,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4.940.926.429,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
51	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	2	07	01				Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 Poin	3.945.917.224,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Poin	4.086.364.313,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	760.463,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Dokumen	1.500.000,00	
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	760.463,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	3.632.856.761,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Orang	3.632.856.761,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokument	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokument	2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokument	2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45 Orang	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0			0	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	185.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	253.207.552,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	338 Laporan	172.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	338 Laporan	234.207.552,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	0	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	43.800.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Laporan	43.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	5,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	2.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	1.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
52	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		-	0,00			-	0,00	
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Teanga Kerja Makro							DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Lporan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		0,00				0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
53	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	204.493.600,00			-	205.107.081,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi								
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	100.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 Orang	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja								
							Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	4.493.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Lembaga	5.107.081,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2 Unit	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi								
							Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	16 Orang	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 Orang	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	1 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas								
							Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	1 Kesepakatan	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Kesepakatan	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Lembaga	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1 Sumber Daya	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Sumber Daya	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1 Sumber Daya	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Sumber Daya	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	1 Perusahaan	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Perusahaan	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil								
							Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	1 Perusahaan	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Perusahaan	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
54	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	50.978.000,00			-	50.007.934,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota								
	2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	10 Orang	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Orang	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja								
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	5 Orang	3.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Orang	3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	5 Orang	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Orang	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	2 Orang	2.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Orang	2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	2 Orang	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Orang	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi								
							Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	1 Lembaga	1.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Lembaga	1.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1 Lembaga	2.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Lembaga	2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Data	1.978.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Data	1.007.934,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	5 Orang	3.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Orang	3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	5 Orang	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Orang	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota								
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5 Orang	7.802.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Orang	8.071.406,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	5 Orang	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Orang	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	5 Orang	5.198.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Orang	4.928.594,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
55	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100%	587.833.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100%	599.447.101,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	40.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	1 Perusahaan	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Perusahaan	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Perusahaan	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Perusahaan	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Data	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Data	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	547.833.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	549.447.101,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3 Perselisihan	3.888.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Perselisihan	5.502.101,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3 Perkara	6.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Perkara	6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi								
							Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	2.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 LKS	2.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 LKS	2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 Orang	533.945.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Orang	533.945.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			974.471.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		977.404.382,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
56	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	95%	928.073.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	95%	930.857.659,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan								
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	16.052.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	16.213.667,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8 Unit	912.020.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Unit	914.643.992,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
57	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	koefisien variasi harga antar waktu	10	6.739.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10	6.759.217,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat								
							Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	6.739.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	6.759.217,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
58	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	90.59%	39.659.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	91.39%	39.787.506,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	800 Unit	34.845.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	800 Unit	34.973.006,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal								
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	260 Orang	4.814.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	260 Orang	4.814.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
59	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	5.057.679.485,00			-	19.400.944.472,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	4.844.679.485,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		19.187.944.472,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	213.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	213.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
60	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan	1 Dokumen	22.984.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	23.053.855,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	22.984.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	23.053.855,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
61	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	15.287.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15.333.663,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	15.287.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	15.333.663,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.790.679.273,00				1.189.440.099,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
62	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP Dinas Lingkungan Hidup	20 JPL 4.00 Point	3.041.674.973,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 JPL 4.00 Point	3.072.956.170,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						[Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	Nilai SAKIP	3	3.041.674.973,00				0,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	500,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	2.676.651.972,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100%	2.676.651.972,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.676.651.972,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	26 Orang/bulan	2.676.651.972,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/fungsional	100 %	50.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 %	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	50.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Orang	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	173.036.501,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 %	176.949.198,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	4.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Paket	22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.500.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	4.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223 Laporan	111.536.501,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	238	103.949.198,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100 %	55.494.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	61.040.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	570.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	570.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	25.454.500,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	31.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	29.470.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	29.470.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	60.992.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 %	77.815.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	40.815.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	32 Unit	40.815.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	8.400.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24 Unit	17.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.777.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
63	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								
						[Terwujudnya Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan]	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100%	343.316.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100%	143.746.449,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								
	2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	143.316.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	0 Dokumen	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota								
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		149.920.359,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun			Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		143.746.449,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup								
							Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
64	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
						[Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan kerusakan LH]	-	-	84.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		95.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0 Dokumen	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1 Laporan	24.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	10 Data	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Data	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1 Kegiatan	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Kegiatan	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	6 Paket	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Paket	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	11	03	2.01	0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penanggulangan pencemaran/kerusakan LH yang disusun	1 DOK	0,00			-	15.000.000,00	
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat								
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0 Laporan	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
65	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
						[Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati]	Persentase RTH	76,11%	30.933.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	76,18%	31.026.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	20	30.933.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20	31.026.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
66	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	90,73 %	17.439.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	90,73 %	19.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						[Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun]								
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah usaha yang melakukan penyimpanan sementara LB3	1 usaha	17.439.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 usaha	19.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01	0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupate								
									0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01	0004	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	5.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01	0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1	3.750.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01	0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	8 Usaha	8.189.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Usaha	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	0 Dokumen	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
67	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 %	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 usaha	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Rekomendasi	7.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Rekomendasi	8,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD							
	2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya							
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10 Usaha	8.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Usaha	12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
68	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100%	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						[Terlaksananya Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat terkait dengan RPPLH]		-	5.000.000,00				0,00	
	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
69	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	90%	24.254.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	92%	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	2 Lembaga/Organisasi	24.254.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Lembaga/Organisasi	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0	0			0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	70 Masyarakat/Kelompok Masyarakat	9.701.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	70 Masyarakat/Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	14.552.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Lembaga	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
70	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								
						[Terlaksananya Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai peraturan per Uuan]	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100%	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100%	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	3 Pengaduan	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Pengaduan	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	3 Pengaduan	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Pengaduan	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
71	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	64.72 Poin	9.219.060.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	65.42 Poin	5.006.718.082,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	25810.6 Ton	9.219.060.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.006.718.082,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	24.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Kelompok	35.499.999,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	0 Dokumen	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	4.900.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	347.657.183,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota								
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	56.772.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	0 Dokumen	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	40 Unit	800.913.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Unit	910.913.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	19691.49 Ton	3.436.875.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20461.88	3.536.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3.771.716.346,00				3.808.361.374,00	
72	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	3.471.748.446,00			-	3.507.622.872,00	
						[Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah , keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan]	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 Poin	3.471.748.446,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Poin	3.507.622.872,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.779.459.946,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Orang/bulan	2.779.459.946,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.569.022.953,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Orang/bulan	2.779.459.946,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	153.704.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	153.754.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	520.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.774.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	1.317.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	89.348.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	113 Laporan	73.021.526,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	124.248.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	149.248.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40.220.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	40.220.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	244.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	244.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 Persen	64.181.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	64.181.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	47.681.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21 Unit	47.681.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Unit	11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	12	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
73	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
						[Meningkatnya persentase perekaman KTP-EL dan KIA]	PERSENTASE PEREKAMAN KTP-EL	99%	142.691.200,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	99%	143.119.273,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			88.693.800,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		88.851.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	76.942.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	77.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								
	2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	3.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	2 Dokumen	25.813.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	25.913.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	3.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	7 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Laporan	5.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								
	2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	4 Laporan	17.184.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	17.054.873,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
74	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								
						[TERSELENGGARANYA PENCATATAN SIPIL]	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	97.50%	81.408.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	98%	81.652.325,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4 Dokumen	2.424.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	2.424.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	64.084.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		58.059.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	18.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	4 Laporan	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	13.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	2 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	5.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	3.019.225,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	1 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	3.019.225,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
75	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	53.392.100,00			-	32.966.904,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						[TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN]	Pemanfaatan data kependudukan	42	53.392.100,00				32.966.904,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	4.658.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	4.683.351,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	3.771.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	3.796.151,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15 Laporan	24.438.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Laporan	24.487.402,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15 Laporan	24.438.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Laporan	24.487.402,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
76	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	43.000.000,00			-	43.000.000,00	
						[TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN]	Persentase Pemnafaatan Profil Kependudukan	100%	43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100%	43.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan								
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	43.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			9.536.615.444,26				12.613.889.871,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5.019.238.862,00				4.110.098.973,00	
77	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
						-	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 Poin	2.673.055.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Poin	2.699.841.152,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	1.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	1 Dokumen	2.189.236.278,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	2.191.836.278,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	2.184.536.278,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Orang/bulan	2.184.536.278,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.200.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	2.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Paket	2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.100.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	2.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	16 Unit	45.700.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	45.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5.200.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	5.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	7.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	18.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94.949.589,00			-	94.949.589,00	
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	35.405.150,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	35.405.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.744.439,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	18.744.439,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40.800.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	40.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	162.960.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	162.960.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	3.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	8.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	6.010.093,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	10.395.285,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
78	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase fasilitasi penataan Desa sesuai peraturan Per UU an	100 persen	120.143.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa								
	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	3 Desa	120.143.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
79	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama desa	100 persen	18.061.360,00			-	18.115.544,00	
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa								
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	40 Dokumen	10.836.816,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Dokumen	10.869.326,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	7.224.544,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7.246.218,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
80	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Pemerintahan yang Baik	100%	2.056.491.122,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100%	1.240.200.595,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40 Dokumen	1.299.770.706,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Dokumen	965.247.669,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	40 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	40 Dokumen	83.843.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Dokumen	83.843.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	80 Orang	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	80 Orang	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	40 Laporan	10.836.816,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Laporan	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	40 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Dokumen	10.869.326,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Laporan	500.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	18.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40 Laporan	10.240.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Laporan	10.240.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	55 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	55 Dokumen	17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	40 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Dokumen	9.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	80 Orang	14.800.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	80 Orang	14.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	40 Desa	4.700.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	55 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	55 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
81	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			151.487.220,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	151.941.682,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	22.723.083,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Lembaga	22.791.253,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	21.208.211,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Dokumen	21.271.835,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	40 Unit	37.871.805,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Unit	37.985.420,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	63 Dokumen	69.684.121,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	63 Dokumen	69.893.174,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			4.517.376.583,00				4.530.928.713,00	
82	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			191.996.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	192.572.590,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	61.438.912,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	61.623.229,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 Laporan	42.239.252,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	42.365.970,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga	2 Dokumen	67.198.810,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2 Dokumen	67.400.406,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	14	02	2.02	0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	5 Unit	21.119.626,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	5 Unit	21.182.985,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
83	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	22,4 %	3.214.233.983,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	24.60%	3.223.876.685,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			709.594.539,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		709.594.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	113.535.126,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	1 Laporan	113.535.127,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	241.262.143,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	1 Laporan	241.262.143,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	85.151.345,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	1 Laporan	85.151.346,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	106.439.181,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	3 Dokumen	106.439.180,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Laporan	14.191.891,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	1 Laporan	14.191.891,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	15 Organisasi	149.014.853,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	15 Organisasi	149.014.853,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	298 Orang	510.623.933,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	298 Orang	510.623.933,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	948.301.591,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR		855.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	16 Laporan	23.336.971,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	16 Laporan	23.336.971,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	717 Orang	280.043.654,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	789 Orang	280.043.654,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Unit	256.706.684,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	15 Unit	256.706.684,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	23.336.971,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	2 Laporan	23.336.971,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah dokumen hasil Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Dokumen	462.289.640,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	1 Dokumen	471.932.341,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	55 Unit	221.899.027,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	55 Unit	226.527.524,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	55 Kampung	226.521.924,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	55 Kampung	231.246.847,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	14	03	2.04	0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	13.868.689,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	1 Dokumen	14.157.970,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
84	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi bina Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	173.946.000,15			-	177.279.438,00	
	2	14	04	2.01	0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	1 Kegiatan	8.697.300,01	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	1 Kegiatan	8.863.971,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	34.789.200,03	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	1 Laporan / Dokumen	35.455.888,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	13.915.680,01	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	1 Laporan	14.182.355,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	17 Unit	104.367.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	21 Unit	106.367.663,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1 Kader	12.176.220,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	1 Kader	12.409.561,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Peningkatan peran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	937.200.000,00			-	937.200.000,00	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	5 laporan	426.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	5 laporan	426.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	5 laporan	511.200.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	5 laporan	511.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X					NON URUSAN								
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			147.800.000,00				175.100.000,00	
85	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas PMDPPKB	3 poin	147.800.000,00			-	175.100.000,00	
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	1 Dokumen	2.600.000,00			-	2.600.000,00	
	X	XX	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
	X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengadministrasian umum	1 Dokumen	125.000.000,00			-	128.000.000,00	
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	125.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		128.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	X	XX	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						DINAS PERHUBUNGAN								
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			10.923.721.916,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12.824.978.616,00	DINAS PERHUBUNGAN
86	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.354.573.384,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.381.573.384,00	DINAS PERHUBUNGAN
						[Meningkatnya Efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaantan terhadap peraturan perundang-undangan Dinas Perhubungan]	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 Level	5.354.573.384,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Level	5.381.573.384,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.187.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	3.187.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	0	0			0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan DPAA-SKPD	0	0			0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2.937.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.083.100,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	5.083.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602 Orang/Bulan	4.089.085.452,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	602 Orang/Bulan	4.089.085.452,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	380.621.032,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	244.621.032,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	244.621.032,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	100.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Orang	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang	36.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Orang	36.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	416.976.400,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	443.976.400,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.976.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	1.976.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	80.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	9.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	521 Laporan	300.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	521 Laporan	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	107.400.000,00			-	107.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	12.400.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	12.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120 Laporan	95.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	120 Laporan	95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	222.219.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	222.219.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	84.719.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	21 Unit	84.719.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	12.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Unit	12.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	80.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
87	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	1.820.752.230,00			-	6.228.653.482,00	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	34 Unit	545.062.150,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2.935.740.232,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah jalan yang direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	5 Unit	10,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	38,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan								
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	856 Unit	705.923.280,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	856 Unit	835.213.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								
	2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C			160.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	1 Orang	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Orang	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Orang	100.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Orang	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	225.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Unit	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2000 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	6 Unit	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Unit	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	5 Laporan	569.700.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	569.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								
	2	15	02	2.07	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	10 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08	0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	1.300.000.000,00	
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
88	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								
	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	1.250.000.000,00			-	1.250.000.000,00	
	2	15	03	2.13	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	750.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	15	03	2.13	0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	20 Unit	500.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Unit	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN								
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.345.238.359,00				6.848.958.761,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
89	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Diskominfo-SP	3 Level	3.320.307.559,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Level	3.333.302.242,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						[Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Dareah, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Daerah dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang Undangan]	Maturitas SPIP	3 Level	3.320.307.559,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Level	3.333.302.242,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	1.626.250,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 %	1.626.250,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	643.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	643.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	355.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	355.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	319.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	319.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	308.550,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	308.550,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	3.038.368.999,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 %	3.038.368.999,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.038.368.999,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	31 Orang/bulan	3.038.368.999,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	92.142.500,00	
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.795.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		41.347.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	86.961.810,00			-	94.956.493,00	
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.908.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	2.004.030,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.499.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	1.574.055,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.454.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Paket	24.627.540,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.192.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	1.251.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	58.907.310,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	63 Laporan	65.499.268,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel			0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporann	21.455.390,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporann	26.455.390,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	84.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	84.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	78.895.110,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 unit	78.895.110,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	84.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	78.895.110,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Unit	4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
90	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
						[Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik]	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik	80%	6.107.894.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	81%	1.110.948.083,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan	540 Informasi	6.107.894.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1.110.948.083,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	393.064.980,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	393.064.980,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	58 Komunitas	304.965.480,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	58 Komunitas	304.965.480,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2 Laporan	9.086.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	9.086.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	15 Permohonan	5.080.596.710,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Permohonan	80.596.710,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	300 Rekomendasi	21.631.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	300 Rekomendasi	21.631.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	73 Media	298.548.830,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	73 Media	301.602.513,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	6 Konten	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		168.289.250,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
91	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
						[Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik secara Online dan Terintegrasi]	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	88%	1.833.395.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	89%	1.838.895.887,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Sub Domain	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Sub Domain	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	57 Perangkat Daerah	210.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	57 Perangkat Daerah	210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	3 Layanan	110.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Layanan	110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	16	03	2.02	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	3 Aplikasi	30.395.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Aplikasi	30.895.887,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	30.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Aplikasi	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat	1.203.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	34 Perangkat	1.208.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			66.410.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		66.609.430,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
92	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
						[Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas]	Persentase Publikasi Statistik yang menerapkan standar akurasi dan berkualitas	80%	66.410.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	80%	66.609.430,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
	2	20	02	2.01	0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %	5.172.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 %	41.160.100,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Presentase Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	40%	38,937,600.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40%	29,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral								
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	50 %	2.950.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 %	2.950.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		2 Orang	8,191,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Orang	8,191,000.00	
	2	20	02	2.01	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar								
							Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	52 %	2.343.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	52 %	2.343.900,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Laporan	8,815,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	9,014,430.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			17.230.500,00				17.282.191,00	
93	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Skor Nilai Area Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	340 Poin	17.230.500,00			-	17.282.191,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						[Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi]	Skor Nilai Area Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	340	17.230.500,00				17.282.191,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	15.230.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	15.282.191,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumkah Perangkat Daerah Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	34 Perangkat Daerah	500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	34 Perangkat Daerah	500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	1 Dokumen	500,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
									500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah			500.000,00			-	500.000,00	
	2	21	02	2.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah								
							Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	1 Kegiatan	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Kegiatan	500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			2.469.670.780,00				2.399.995.895,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			2.469.670.780,00				2.399.995.895,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
94	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.108.126.080,00			-	2.028.869.593,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						[Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan]								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	2.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	2.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.065.535.709,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18 Orang/bulan	1.137.865.785,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.065.535.709,00	Kab. Barru, Barru, Tuwung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18 Orang/bulan	1.137.865.785,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/bulan	22.880.000,00	Kab. Barru, Barru, Tuwung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Orang/bulan	22.880.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang/bulan	22.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Orang/bulan	22.880.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.680.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	1.680.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.645.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	25.645.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	2.987.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	2.987.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155 Laporan	463.877.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	155 Laporan	463.877.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	299.862.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	279.898.308,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	34.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	34.050.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	180.812.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	138.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Unit	95.330.808,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	56.000.000,00			-	56.000.000,00	
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	18.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	36.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	157.157.971,00			-	130.035.900,00	
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	19.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Tuwung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Unit	19.380.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3.600.000,00	Kab. Barru, Barru, Tuwung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	3.672.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	132.612.971,00	Kab. Barru, Barru, Tuwung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	105.038.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.945.000,00	Kab. Barru, Barru, Tuwung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	1.945.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
95	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	79.89%	43.165.100,00	Kab. Barru, Barru, Tuwung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	83.65%	48.776.563,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	115 Unit	43.165.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	116 Unit	48.776.563,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	115 Unit Usaha	43.165.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		48.776.563,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
96	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								
						[Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi]	Persentase Koperasi Aktif	65%	7.697.900,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	70%	7.720.994,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	87 Unit Usaha	7.697.900,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7.720.994,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
97	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								
						[Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian]	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan		145.000.000,00				145.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	165 Orang	145.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	165 Orang	145.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
98	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10.55%	15.681.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.97%	15.728.745,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	15.681.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Unit Usaha	15.728.745,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	15.681.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Unit Usaha	15.728.745,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
99	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha usaha mikro	0.90%	150.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.12%	153.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	5 Unit Usaha	75.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		78.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5 Unit Usaha	75.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit Usaha	75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.956.811.430,00				3.231.519.566,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
100	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 Level	2.781.029.899,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Level	2.999.772.984,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						[meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah,keandalan pelaporan keuangan,pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan DPMPTSP]								
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	925.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	925.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	925.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	925.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.400.260.439,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Orang/bulan	2.400.260.439,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	119.710.945,00	
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		46.886.728,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		72.824.217,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	354.217,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	364.844,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.474.163,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	2.597.871,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.957.876,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	15.496.612,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.522.536,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	1.568.212,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.999.988,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	2.059.988,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	69.376.680,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45 Laporan	99.355.010,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	0,00	
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel			0,00				0,00	
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	306.631,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	255.600.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	255.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah siap Pakai	100 Persen	28.634.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	29.493.020,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		10 Unit	28,279,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	29,127,370.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						[meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah,keandalan pelaporan keuangan,pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan DPMPTSP]	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	2.781.336.530,00				2.999.772.984,00	
	2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	355.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								
101	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMDN / PMA	695 Milyar	21.508.200,00			-	21.572.725,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan fasilitas/ insentif	100 Persen	7.104.500,00			-	7.104.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	4.748.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.748.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kemitraan yang dilakukan pleh Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2,356,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	2,356,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2,867,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	2,867,400.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	1 Daerah	1,578,540.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Daerah	1,578,540.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	16.759.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	16.824.225,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
102	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang berinvestasi	3.80%	34.156.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4.10%	34.258.970,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
	2	18	03	2.01	0002	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0	-	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	34.258.970,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	34.156.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
103	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-	66.704.300,00			-	66.904.413,00	
						[Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko]	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan	100%	41.003.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100%	41.203.313,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	41.003.200,00	41.203.313,00		-	41.203.313,00	
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.200.113,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	37.361.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2500 Pelaku Usaha	36.361.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha	3.641.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Pelaku Usaha	3.641.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	550 Kegiatan Usaha	23.201.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		23.201.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
104	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100 Persen	53.105.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	53.208.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku usaha dalam membuka usaha	100 Persen	53.105.900,00			-	53.265.218,00	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	30 Kegiatan Usaha.	12.505.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Kegiatan Usaha.	17.104.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 Pelaku Usaha	23.667.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Pelaku Usaha	19.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	40 Kegiatan Usaha	16.932.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Kegiatan Usaha	17.104.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
105	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								
						-	-	-	0,00				55.745.256,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00			-	55.745.256,00	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		0,00			1 Dokumen	55,745,256.00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			5.027.502.287,00				5.073.215.176,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5.027.502.287,00				5.073.215.176,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
106	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.168.599.187,00			-	4.121.435.367,00	
						[Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan,pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan]	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 Level	4.168.599.187,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Level	4.211.735.367,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.500.000,00			-	4.500.000,00	
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.306.664.509,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	31 Orang/bulan	3.306.664.509,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.306.664.509,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	31 Orang/bulan	3.306.664.509,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Unit	12.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	12.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	45.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Orang	45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	23	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	45.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Orang	45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	104.261.400,00			-	105.261.400,00	
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	28.215.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Paket	28.215.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Paket	3.300.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Paket	28.215.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131 Laporan	72.246.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	131 Laporan	73.246.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	27.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	28.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	31.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	85.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24 Laporan	86.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	366.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	366.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	98.173.278,00			-	137.309.458,00	
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	27.120.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17 Unit	27.370.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	2.500.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	7.100.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Unit	7.100.000,00	
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	61.453.278,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	10.039.458,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
107	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								
						[Meningkatnya Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat]	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	71.92	809.903.100,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	72.20	871.332.809,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	135 Unit	51.413.490,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	135 Unit	51.413.490,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	26 Unit	30.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	26 Unit	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	300 Eksemplar	30.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	300 Eksemplar	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Orang	24.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	58.284.450,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	58.384.450,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	70.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1000 Eksemplar	70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Eksemplar	119.920.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Eksemplar	119.920.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Eksemplar	8.210.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Eksemplar	8.210.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	427.074.660,00			-	429.404.369,00	
	2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Orang	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 Perpustakaan	65.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Perpustakaan	65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	29.283.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Perpustakaan	29.283.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	55.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Orang	55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	7 Lokus	267.791.160,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Lokus	270.120.869,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
108	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	-	49.000.000,00			-	49.147.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						[Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno]								
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	0.01%	49.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.02%	49.147.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	9 Orang	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Orang	20.147.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar	29.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Eksemplar	29.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			37.259.570,00				37.371.349,00	
109	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								
						[Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis]	Tingkat Ketersediaan Arsip	75 Tingkat	25.352.570,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	75 Tingkat	25.428.628,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			15.500.000,00				15.576.058,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000 Naskah	4.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5000 Naskah	4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Laporan	2.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 Laporan	2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	15 Lembaga	4.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4.076.058,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.000.000,00			-	3.000.000,00	
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2 Arsip	3.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Arsip	3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	15 Layanan	2.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Layanan	2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4.352.570,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	4.352.570,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
110	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelematan Arsip	100%	11.907.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100%	11.942.721,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						[Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai SNPK]								
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	2.999.800,00			-	3.035.521,00	
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2000 Berkas	2.299.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2000 Berkas	2.335.521,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2000 Arsip	700.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2000 Arsip	700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	1 Arsip	8.494.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Arsip	8.494.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	1 Arsip	1.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Arsip	1.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	1 Arsip	6.994.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Arsip	6.994.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Berkas	412.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Berkas	412.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	412.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		412.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						DINAS PERIKANAN								
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.637.110.212,00				4.673.257.036,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			4.637.110.212,00				4.673.257.036,00	
111	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
						[Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah]	Maturitas SPIP	3 Level	3.322.380.922,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3.356.383.559,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1.000.000,00	DINAS PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.087.795.822,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	34 Orang/bulan	3.087.795.822,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			500.000,00			-	500.000,00	
	3	25	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			85.500.000,00			-	95.500.000,00	
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	3.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	80.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	120 Laporan	90.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	7.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	10.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	91.710.100,00			-	94.800.000,00	
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	210 Laporan	44.910.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	220 Laporan	48.000.000,00	DINAS PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	4.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	4.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40.800.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	40.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	34.375.000,00			-	31.787.737,00	
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	29.375.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 Unit	29.375.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	2.412.737,00	DINAS PERIKANAN
112	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	219.306.800,00			-	219.829.720,00	
						[Produksi Perikanan Tangkap]								
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	59.341.000,00			-	35.500.000,00	
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen Dokumen	25.311.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen Dokumen	20.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	10 Unit	34.030.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	15.000.000,00	DINAS PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok	149.659.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Kelompok	173.329.720,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	25 Orang	6.791.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Orang	6.700.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 Kelompok	4.345.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Kelompok	4.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	120 Unit	40.310.159,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	120 Unit	41.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	10 Unit	98.212.741,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Unit	121.129.720,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	10.306.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Layanan	11.000.000,00	DINAS PERIKANAN
113	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	863.373.830,00			-	864.463.951,00	
						[Produksi Perikanan Budidaya]	Produksi Perikanan Budidaya	6.801,7	863.373.830,00				864.463.951,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	9.868.080,00			-	7.868.080,00	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	8.470.380,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Kelompok	6.470.380,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	10 Kelompok	1.397.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Kelompok	1.397.700,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	25	04	2.03	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Rekomendasi	1.740.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Rekomendasi	1.740.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	851.765.750,00			-	854.855.871,00	
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.200.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	10.200.100,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	53.777.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	56.867.621,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2	5.844.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2	5.844.400,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	66 Unit	618.560.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	66 Unit	618.560.500,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40 Unit	4.860.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Unit	4.860.400,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	20 Unit	146.080.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Unit	146.080.600,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Usulan Dokumen	12.442.250,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Usulan Dokumen	12.442.250,00	DINAS PERIKANAN
114	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	10.000.000,00			-	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
						[Cakupan Pengawasan Sumberdaya Perikanan]								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 Pelaku Usaha	5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Pelaku Usaha	5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
115	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	222.048.660,00			-	222.579.806,00	
						[Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan UMKK]	-	-	222.048.660,00				222.579.806,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil								
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Data	17.372.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Data	17.372.800,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 Unit Usaha	9.636.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit Usaha	22.207.006,00	DINAS PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	3 Unit Usaha	9.636.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit Usaha	22.207.006,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12534,65 Ton	35.020.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100 Pelaku Usaha	160.019.260,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		143.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	X					NON URUSAN			500.000,00				500.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
116	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	500.000,00			-	500.000,00	
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	500.000,00			-	500.000,00	
	X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		500.000,00	DINAS PERIKANAN
						DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.577.246.177,00				13.180.658.695,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			9.577.246.177,00				9.629.225.466,00	
117	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.773.063.168,00			-	3.807.639.939,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
						[Meningkatnya Efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang2an disparpora]	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 Level	3.773.063.168,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Level	3.807.639.939,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	3.387.431.974,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	32 orang	3.387.431.974,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	500.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	500.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	2	19	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	400,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	400,000.00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 laporan	1.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	10.400.000,00			-	10.400.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	400.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	400.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	166.231.194,00			-	166.241.194,00	
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	2.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	3.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Kegiatan	160.931.194,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Kegiatan	191.507.965,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	300.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	300.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	2	19	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 unit	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 unit	25.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	160.000.000,00			-	160.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	80.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	80.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	80.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	80.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	8.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Unit	8.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	3.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
118	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	2.999.987.300,00			-	3.008.987.261,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						[Meningkatnya daya saing kepemudaan]	Rasio Wirausaha Pemuda	0.48				0.57		
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 dokumen	50.000.000,00					DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
									50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			0,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan								
									100.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	1792 Orang	2.469.287.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1792 orang	2.528.287.261,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota								
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	70.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Kegiatan	70.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota								
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	40 Orang	70.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Orang	70.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1	100.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1	100.000.000,00	
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	140.700.000,00			-	140.700.000,00	
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota								
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2 Organisasi	130.700.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Organisasi	130.700.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Orang	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
119	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	2.404.184.009,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.411.396.561,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						[Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga]								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	700.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	700.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	1 Sekolah	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Sekolah	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	10 Unit	400.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	400.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kejuaraan	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Kejuaraan	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	40 peserta	240.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 peserta	240.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	117.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Orang	117.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Orang	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	10 Orang	12.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Orang	12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	10 Orang	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Orang	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 orang	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 orang	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1%	1.000.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1%	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1%	1.000.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1%	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	147.184.009,00			-	154.396.561,00	
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan								
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 Unit	47.184.009,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	54.396.561,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional								
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Lembaga	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
120	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								
						[Meningkatnya kualitas kepramukaan]	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	2.48	400.011.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.72	401.201.705,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	400.011.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Organisasi	4.001.201.705,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	400.011.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Organisasi	4.001.201.705,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			4.571.495.201,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5.078.042.657,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
121	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								
						[Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata]	Presentase Peningkatan PAD Pariwisata	201.71%	4.289.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	302.56	4.644.689.942,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	4.111.490.001,00			-	4.467.189.942,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	3.886.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Lokasi	4.242.189.942,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota								
							Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	40 Orang	120.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Orang	120.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	162.500.000,00			-	162.500.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	15 Destinasi	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Destinasi	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	10 Unit	100.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	40 Laporan	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Laporan	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Lokasi	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	2.500.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.04	0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	10 Usaha	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Usaha	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.04	0015	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	30 Usaha Pariwisata	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Usaha Pariwisata	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
122	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	188.021.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	188.585.464,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						[Meningkatnya Wisatawan Nusantara dan Mancanegara]	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	6.00%	188.021.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		189.021.400,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	188.021.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	188.585.464,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	170.824.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Kegiatan	170.388.464,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	13.197.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	13.197.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
123	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-				-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif								
						[Meningkatnya Produk Ekonomi Kreatif yang Memiliki HAKI]	Jumlah Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya							
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual								
							Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif		0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10	12.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
124	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	94.483.800,00			-	94.767.251,00	
						[Meningkatnya Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekraf]								
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	30.000.000,00			-	30.000.000,00	
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	15 Orang	30.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Orang	25.000.000,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif								
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	15 Orang	64.483.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Orang	64.767.251,00	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN								
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.409.440.724,00				2.445.918.486,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			2.409.440.724,00				2.445.918.486,00	
125	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 Poin	1.664.499.844,00			-	1.678.599.844,00	
						-								
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	40.000.000,00			100 Persen	40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	1.319.009.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	1.319.009.600,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	1.299.009.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Orang/bulan	1.299.009.600,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 Persen	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompotensi Teknis terhadap keseluruhan ASN	18.86 Persen	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18.86 Persen	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Orang	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	80.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	82.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	51.790.244,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	51.790.244,00	51.790.244,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	31.790.244,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	33.799.742,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100 Persen	84.600.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	84.600.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	7.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.600.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	27.600.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	14.100.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Unit	14.100.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	7.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
126	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	3.23 Persen	350.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.23 Persen	360.500.000,00	
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman								
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	60.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Hijauan Pakan Ternak	100 Persen	6.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	6.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	27	02	2.05	0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan								
							Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	0.60 Ton	6.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.60 Ton	6.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain								
	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1275 Bibit	273.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	52 Bibit	283.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
127	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung Peternakan	100 Persen	157.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	162.225.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian								
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	19723 Ha	142.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	19723 Ha	142.225.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	2.01	0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			15.000.000,00			-	20.000.000,00	
	3	27	03	2.02	0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner								
							Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan								
							Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Unit	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
128	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	79.63 Persen	234.487.280,00			79.63 Persen	241.521.898,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota								
	3	27	04	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Laporan	7.034.618,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	5 Laporan	66.738.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	66.738.700,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpindahan Hewan/Ternak dan Produk Hewan yang diawasi sesuai standar peraturan perundang undangan	100 Persen	50.023.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	50.023.800,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	7 Laporan	39.079.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Laporan	39.079.300,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	3 Laporan	10.944.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	10.944.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah	100 Persen	74.606.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	74.606.600,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium								
							Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	2 Laporan	36.175.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	36.175.200,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner								
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2 Laporan	38.431.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	38.431.400,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang dibina dan diawasi	100 Persen	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan								
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0 Laporan	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.04	0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan								
							Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	0 Orang	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Orang	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.04	0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	0 Orang	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Orang	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Penerapan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan	100 Persen	43.118.180,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	43.118.180,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya								
							Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	7 Kasus	43.118.180,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Kasus	43.118.180,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
129	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN								
	3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase Pelayanan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	100 Persen	2.953.600,00			-	3.071.744,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	2 Laporan	2.953.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	3.071.744,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN								
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			500.935.940,00				520.773.378,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
130	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	39.14 Persen	5.000.000,00			-	5.000.000,00	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	100 Persen	5.000.000,00			-	5.000.000,00	
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya								
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						[Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan]								
	2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik								
						-	-	-	5.000.000,00				5.000.000,00	
	2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	0 unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
131	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
						[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	Skor PPH Konsumsi	81.30	414.589.940,00			81.30	431.173.538,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 Laporan	10.448.580,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	10.448.580,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1375 Keluarga	96.592.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1375 Keluarga	96.592.800,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota								
							Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	7 laporan	10.448.580,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 laporan	10.448.580,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
							Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	0 Laporan	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	7 Lembaga	11.338.240,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Lembaga	11.338.240,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan	8.993.230,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	8.993.230,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	5.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100 Persen	169.390.810,00			100 Persen	150.974.408,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	169.390.810,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Ton	125.974.408,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota								
							Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	10 Ton	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Ton	5.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota								
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	0 Ton	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Ton	10.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi								
	2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal								
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	0 Laporan	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 laporan	5.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	10.784.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	10.784.900,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	96.592.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	96.592.800,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 laporan	5.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
132	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Kasus Kerawanan Pangan	10 Persen	42.363.400,00			10 Persen	44.057.936,00	
						[Menurunnya kasus Kerawanan Pangan]								
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang tersusun	1 Dokumen	26.083.000,00			1 Dokumen	24.083.000,00	
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan								
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	26.083.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	24.083.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	10.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	16.280.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	9.974.936,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
133	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	78 Persen	38.982.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	78 Persen	40.541.904,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						[Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan]								
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar	78 Persen	38.982.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	78 Persen	40.541.904,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17.658.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan								
							Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	21.324.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	20.541.904,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			12.613.345.764,00				12.797.057.542,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
134	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 Poin	10.004.300.650,00			3 Poin	10.107.650.623,00	
						[Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan]								
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	65.000.000,00		100 Persen	100 Persen	65.000.000,00	
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	33.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	33.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	32.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	32.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	9.425.707.725,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	9.426.707.725,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang	9.405.707.725,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	99 Orang	9.405.707.725,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	15.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	6.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 Persen	8.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	8.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
						[Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan]	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	10.004.300.650,00			3	10.107.650.623,00	
	3	27	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						-								
	3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
						[Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan]	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	10.004.300.650,00				10.107.650.623,00	
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	3.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	3	27	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Orang	15.342.898,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	148.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	150.500.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	5.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	35.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	5.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	1.500.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	7.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	8.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	95.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	96.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	80.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	180.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Unit	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	20.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Unit	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	50.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	10.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100 Persen	146.600.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	146.600.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	40.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	36.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.600.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	60.600.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 Persen	110.492.925,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	110.500.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83 Unit	40.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	83 Unit	40.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	10.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	50.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	50.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	0	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
135	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5.37 Persen	1.053.843.000,00			5.37 Persen	1.095.996.720,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						[Meningkatnya hasil pertanian dengan sarana pertanian yang terpenuhi]	Tingkat Produktifitas Pertanian Per Hektar Pertahun Tingkat Produktiftas Sektor Peternakan Per Tahun	3.23 5.37	1.053.843.000,00			3.23 5.37	1.095.996.720,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penggunaan sarana pertanian	100 Persen	1.053.843.000,00			100 Persen	1.095.996.720,00	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi								
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	36.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	37.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian								
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	596.969.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	638.123.420,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih								
							Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	10 Ton	420.873.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Ton	420.873.300,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme		0,00					0,00	
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman								
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Unit	6.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	6.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman								
							Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	0	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
136	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								
						[Meningkatnya hasil pertanian dengan prasarana pertanian yang terpenuhi]	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung peternakan Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasrana Pertanian mendukung ketahanan pangan, perkebunan dan hortikultura	100 Persen	824.129.700,00			100 Persen	833.094.888,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian Hortikultura Luas Lahan Pertanian Perkebunan Luas Lahan Pertanian Tanaman Pangan	4.207,48 Ha 10.436,48 Ha 29.533,82 Ha	308.129.700,00			-	317.094.888,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya								
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	15.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	44206 Ha	283.129.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45056 Ha	292.094.888,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	2.01	0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan								
							Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Unit	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	2.01	0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan								
							Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Unit	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	27	03	2.01	0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Unit	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	2.01	0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan								
							Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Unit	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	2.01	0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Unit	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	2.01	0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Unit	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	2.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Unit	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			516.000.000,00			-	516.000.000,00	
	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian								
							Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	120.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	120.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Ruas	200.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Ruas	200.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Unit	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya								
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	113.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Unit	113.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Unit	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani								
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	83.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	83.000.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
137	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan kerugian akibat bencana pertanian	50 Persen	80.531.700,00			50 Persen	83.752.968,00	
						[Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian]								
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5 Ha	80.531.700,00			5 Ha	83.752.968,00	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5 Ha	31.550.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Ha	31.550.800,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2 Ha	48.980.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Ha	48.980.900,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3	3.221.268,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
138	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian yang memiliki Izin Usaha Sesuai Standart	100 Persen	2.953.600,00			100 Persen	3.071.744,00	
						[Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian]			2.953.600,00				3.071.744,00	
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah			2.953.600,00			-	3.071.744,00	
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian								
							Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	2.953.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	3.071.744,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
139	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								
						[Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian]	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25	647.587.114,00			25	673.490.599,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			647.587.114,00				673.490.599,00	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa								
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga	437.038.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Lembaga	437.038.600,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa								
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	26.381.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Unit	26.381.900,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 Unit	184.166.614,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Unit	184.166.614,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Unit	25.903.485,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian								
							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	0 Orang	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Orang	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	07	2.01	0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota								
							Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Unit	0,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani								
						BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			343.366.300,00				512.826.230,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			343.366.300,00				512.826.230,00	
140	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	67.731.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	112.073.350,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						-	-	-	67.731.800,00				112.073.350,00	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73 Laporan	34,346,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	73 Laporan	71,401,000.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 Unit	7.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	10.723.130,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	10.723.130,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.675.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	17.068.220,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Unit Kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	9.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	9.900.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	2,710,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Unit	2.981.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
141	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	275.634.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	400.752.880,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	275.634.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	400.752.880,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 Dokumen	6.220.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	13.616.680,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	198,442,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	262,946,200.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan								
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	70.972.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	124.190.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			13.695.388.170,00				16.757.056.387,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			13.695.388.170,00				16.757.056.387,00	
142	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	32.243.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	51.967.410,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	32.243.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	54 Laporan	51.967.410,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	20.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.808.190,00			-	22.889.009,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.808.190,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	22.889.009,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.920.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.476.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	1.650.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	4,420,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	4,826,000.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
143	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	13.621.416.880,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	16.655.723.968,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	6 Dokumen	13.621.416.880,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	16.655.723.968,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	12.960.716.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	15.928.953.990,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	657,021,480.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	722,723,628.00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		2 Dokumen	3.678.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	4.046.350,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	3.678.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	4.046.350,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
						BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			356.332.700,00				528.635.280,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			356.332.700,00				528.635.280,00	
144	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	9.080.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	9.988.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	9.080.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Orang	9.988.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			26.576.500,00				74.395.200,00	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	26,576,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Laporan	74.395.200,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	2 Unit	23.342.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	30.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	23.342.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	30.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 Laporan	30.120.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	36.443.330,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.120.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	36.443.330,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	8 Unit	3.965.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Unit	4.361.500,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	3.965.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Unit	4.361.500,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
145	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	263.247.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	373.447.250,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50 Dokumen	200,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Dokumen	276,116,170.00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3 Dokumen	52,836,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	82,231,380.00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	90 Orang	10,411,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	90 Orang	15,099,700.00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
						BAGIAN PEMERINTAHAN			415.991.240,00				496.528.740,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			403.274.740,00				483.812.240,00	
146	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	53.092.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	103.414.900,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99 Laporan	50,500,100.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	99 Laporan	70,822,100.00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	30.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	30.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Unit	2.592.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	2.592.800,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.592.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	2.592.800,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
147	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	6 Dokumen	311.606.640,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	310.973.640,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan								
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	3.159.650,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	13.266.650,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	153.924.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	98.519.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	154,522,490.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	199,187,990.00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	1 Dokumen	38.575.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	69.423.700,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	38.575.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	69.423.700,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	X					NON URUSAN								
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			12.716.500,00				12.716.500,00	
148	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.716.500,00			-	12.716.500,00	
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.716.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12.716.500,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
						BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA			231.296.490,00				235.883.386,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			231.296.490,00				235.883.386,00	
149	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	55.931.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	54.237.907,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Laporan	55.931.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	94 Laporan	54.237.907,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,836,300.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	8,619,930.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	11.750.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12.572.983,00	
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	8.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	9.350.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3.250.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	3.222.983,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
150	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			155.779.190,00			-	160.452.566,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	39.627.750,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	40.816.583,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	9,888,350.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	10,185,001.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	15.950.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	16.429.324,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil								
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	7.360.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	7.581.006,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	6,428,400.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	6,621,252.00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	116.151.440,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	119.635.983,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	5 Dokumen	116,151,440.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	119.635.983,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
						BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			447.999.990,00				796.990.316,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			447.999.990,00				796.990.316,00	
151	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.547.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	21.541.037,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	6.547.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17 Laporan	21.541.037,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.046.600,00			-	14.351.260,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.046.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	14.351.260,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.710.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.981.000,00	
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2.710.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	2.981.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			425.696.290,00				758.117.019,00	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokoleran	1 Laporan	194.303.900,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	320.781.340,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	135.720.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	243.301.960,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan								
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	95.671.790,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	194.033.719,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
						BAGIAN HUKUM								
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			404.408.650,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		685.571.425,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH								
152	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	-	66.547.450,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	100.503.645,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	11,439,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Orang	22,730,400.00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	36.514.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	57.319.350,00	BAGIAN HUKUM
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	36.514.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	57.319.350,00	BAGIAN HUKUM
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.644.450,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	17.208.895,00	BAGIAN HUKUM
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	2,950,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Unit	3,245,000.00	BAGIAN HUKUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
153	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	337.861.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	585.067.780,00	BAGIAN HUKUM
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah								
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 Dokumen	210.544.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	369.979.280,00	BAGIAN HUKUM
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum								
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	49.739.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Kasus	85.334.260,00	BAGIAN HUKUM
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan								
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 Dokumen	77.576.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	129.754.240,00	BAGIAN HUKUM
						BAGIAN UMUM								
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			29.257.942.733,00				37.409.470.603,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			29.257.942.733,00				37.409.470.603,00	
154	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.706.003.905,00			-	11.744.264.725,00	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	9.706.003.905,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	94 Orang/bulan	11.744.264.725,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	20,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	20.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	74,440,600.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Paket	90,073,126.00	BAGIAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	27,722,100.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	48,257,341.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	113,890,577.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Paket	177,076,966.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	966,298,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	1,200,511,180.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	473,231,500.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Laporan	1,155,147,675.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.465.069.800,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4.160.648.767,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1.800.882.400,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Unit	0,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	1,628,132,400.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Unit	4,148,947,704.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	36,055,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	11,701,063.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.402.459.901,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	11.167.396.329,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	190.231.500,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	230.790.983,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	6,445,468,401.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	8,762,525,746.00	BAGIAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	523,320,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	633,217,200.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,243,440,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	1,540,862,400.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.615.275.400,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.351.094.494,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	607,341,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Unit	700,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	390,407,800.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	38 Unit	570,155,850.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	13,895,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	29 Unit	35,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	370,591,600.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Unit	507,665,600.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	233,040,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Unit	538,273,044.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	3.498.797.750,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4.325.000.000,00	BAGIAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	752,050,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Orang/Bulan	800,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Paket	171,044,500.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	200,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	225,022,500.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Orang	350,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2.350.680.750,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Orang/Bulan	2.975.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 Paket	469,988,000.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	500,000,000.00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah								
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	349.772.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	380.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Paket	64,993,200.00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	70,000,000.00	BAGIAN UMUM
						\								
						BAGIAN ORGANISASI			524.826.880,00				727.593.768,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			508.554.600,00				709.694.260,00	
155	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	40.823.500,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	65.468.700,00	BAGIAN ORGANISASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 laporan	40.823.500,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	49 laporan	65.468.700,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	40.198.300,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	44.218.130,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	40.198.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	44.218.130,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	2,710,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Unit	2,981,000.00	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	424.822.800,00			-	597.026.430,00	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	59.745.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	74.961.040,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	46.318.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	84.466.140,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	49,743,800.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	102,522,530.00	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	269,015,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	335,076,720.00	BAGIAN ORGANISASI
	X					NON URUSAN			16.272.280,00				17.899.508,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			16.272.280,00				17.899.508,00	BAGIAN ORGANISASI
156	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	16.272.280,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	17.899.508,00	BAGIAN ORGANISASI
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.272.280,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	17.899.508,00	BAGIAN ORGANISASI
						SEKRETARIAT DPRD								
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			26.336.162.296,00				26.218.910.697,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD								
157	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	18.254.419.346,00			-	18.142.789.147,00	
						[Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan]								
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	0 Dokumen	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	2.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	4.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	2.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	2.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.477.469.608,00			-	2.477.469.608,00	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.473.469.608,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	26 Orang/bulan	2.473.469.608,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	2.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			16.000.000,00				6.000.000,00	
	4	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	2.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	2.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	2.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	4	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	41.139.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Orang	41.139.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	12.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Orang	15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	12.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Orang	29.325.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.611.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	61.411.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	146.087.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	146.087.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	61.411.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	61.411.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	67.641.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	67.641.800,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	69.600.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	69.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	38.095.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	38.095.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	235.546.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	259.100.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.469.000.000,00			-	1.419.000.000,00	
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	944.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	944.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	56.934.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	56.934.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	108.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Unit	108.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.048.400.000,00			-	1.035.400.000,00	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	7.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	320.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	728.400.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Laporan	728.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorrangan atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	159,540,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Unit	159,540,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	20.840.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	22 Unit	20.840.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	21.474.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Unit	21.474.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	419.313.654,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	318.430.247,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	10.772.455.384,00			-	10.780.371.384,00	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD								
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	10.343.717.884,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Orang/Bulan	10.343.717.884,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	294.237.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	301.945.500,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	137.500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Orang	208.822.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-	1.113.665.600,00			-	1.118.665.600,00	
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD								
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	33.407.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	38.407.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD								
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	1.080.258.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	1.080.258.600,00	SEKRETARIAT DPRD
158	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								
						-	-	-	8.081.742.950,00				8.076.121.550,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	836.621.400,00			-	885.428.000,00	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	159,910,750.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Dokumen	140,910,750.00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	291,953,900.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Dokumen	359,760,500.00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	2 Dokumen	384,756,750.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	384,756,750.00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tersedianya dokumen hasil pembahasan Kebijakan Anggaran	2 Dokumen	918.520.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	887.092.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	306.173.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		295.697.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0 Dokumen	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	306.173.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	295.697.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	0 Dokumen	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	0 Dokumen	0	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	306.173.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	295.697.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	5,376,500.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5,376,500.00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	19,251,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	19,251,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	1.934.381.000,00			-	1.926.381.000,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD								
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	919.381.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	919.381.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	420,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Orang	420,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	252,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Orang	252,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja DPRD	1 Dokumen	8,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	8,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	16 Dokumen	335,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 Dokumen	335,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	2.190.577.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.190.577.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dalam Daerah	25 Laporan	22,300,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Laporan	22,300,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2 Dokumen	4,000,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	4,000,000.00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	2,164,277,200.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	2,164,277,200.00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD			2.162.015.350,00			-	2.147.015.350,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	1.941.292.350,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	1.926.292.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD								
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	16 Laporan	7.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 Laporan	7.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	34.047.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	34.047.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	179,676,000.00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	179,676,000.00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	4	02	02	2.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus								
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DPRD
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH								
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.330.703.242,00				4.193.588.846,00	
	5	01				PERENCANAAN			4.032.370.642,00				4.094.764.583,00	
159	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.467.653.142,00			-	3.325.817.147,00	
						[Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan			3.467.653.142,00				3.325.817.147,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.250.000,00			-	1.250.000,00	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	250.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	250.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	250.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	250.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	250.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.057.051.510,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	31 Orang/bulan	3.057.051.510,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	250.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18 Laporan	250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	250.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	250.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	250.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	250.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	250.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	9.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Orang	3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.033.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	2.033.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.405.900,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	9.405.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.396.900,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	4.396.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.550.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	8.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.140.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	1.140.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.468.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	3.468.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122 Laporan	117.525.600,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	122 Laporan	44.284.455,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	20.370.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	20.370.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	11.463.500,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	2.583.933,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	56.863.100,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	3.147.817,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	111.006.192,00			-	111.006.192,00	
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	52.206.192,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		52.206.192,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	58.800.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		58.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	32.150.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Unit	32.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	1.500.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	1.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	15.050.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	33 Unit	15.050.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.929.440,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	3.929.440,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
160	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	254.519.900,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	457.198.848,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
						[Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah]	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD	100 86	254.519.900,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 86	457.198.848,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik								
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	10.674.200,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Berita Acara	19.945.884,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah								
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	19.432.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Berita Acara	37.293.644,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	31.068.100,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Berita Acara	59.525.562,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	7 Dokumen	137.774.600,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Dokumen	284.585.104,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	7.775.000,00			-	7.813.875,00	
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah								
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	44 Orang	7.775.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44 Orang	7.813.875,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	47.795.800,00			-	48.034.779,00	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	5.175.600,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	5.201.478,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Laporan	42.620.200,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 Laporan	42.833.301,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
161	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
						[Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	310.197.600,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	311.748.588,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24 Dokumen	21.416.800,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Dokumen	21.546.049,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12 Dokumen	55.300.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	55.429.249,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	15.431.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	15.560.249,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	53.401.400,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	53.530.649,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	14.614.500,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Dokumen	14.743.749,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	16.670.200,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	16.799.449,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	17.568.100,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	17.697.349,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	17.968.400,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18.097.649,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	37.538.100,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Dokumen	37.667.349,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	43.560.500,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	43.689.749,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	14 Dokumen	8.871.500,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Dokumen	9.000.749,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan								
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	7.857.100,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Laporan	7.986.349,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
162	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	298.332.600,00			-	98.824.263,00	
						[Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah dalam Perencanaan Pembangunan]	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100 Persen	298.332.600,00			100 Persen	98.824.263,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	47.435.700,00			-	47.763.475,00	
	5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	34.910.900,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	35.074.787,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	12.524.800,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	12.688.688,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								
	5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	100 Persen	50.896.900,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	51.060.788,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	50.896.900,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	51.060.788,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
						BADAN PENDAPATAN DAERAH								
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.613.500.667,00				5.613.500.667,00	
	5	02				KEUANGAN								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
163	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP BAPENDA	20 JPL 4.00 Point	3.800.402.344,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.800.402.344,00	
						[Meningkatnya efektivitas dan efisiensi Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan]								
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.432.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.432.600,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.432.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2.432.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang	3.166.355.144,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	27 Orang	3.166.355.144,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.487.800,00			-	1.487.800,00	
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.487.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.487.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	26.426.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Orang	26.426.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.772.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	1.772.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.024.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	2.024.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.685.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	5.685.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181 Laporan	185.719.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	181 Laporan	185.719.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	162.960.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	162.960.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22.700.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	22.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100 Persen	170.521.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	170.521.400,00	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	43.321.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	43.321.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	127.200.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Laporan	127.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	39.400.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17 Unit	39.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	7.900.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Unit	7.900.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.018.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	5.018.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
164	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
						[Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah]	-	-	1.813.098.323,00				1.813.098.323,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase keterpenuhan capaian intensifikasi dan ekstensifikasi	100 Persen	1.813.098.323,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	1.813.098.323,00	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah								
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	10.633.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	10.633.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	78.516.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	78.516.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	7 Laporan	24.102.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Laporan	24.102.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit	465.808.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Unit	465.808.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	47.010.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Laporan	47.010.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	28 Laporan	121.425.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	28 Laporan	121.425.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	14.332.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	14.332.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah								
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 Dokumen	677.594.923,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	677.594.923,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen	273.831.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	273.831.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	55.676.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	55.676.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah								
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	44.166.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	44.166.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			118.517.624.454,00				119.828.818.101,00	
	5	02				KEUANGAN								
165	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.405.803.343,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6.476.267.180,00	
						[Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan]								
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.496.387,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2.523.847,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.496.387,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	2.523.847,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.179.515.897,00				5.236.805.572,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang	5.144.515.897,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	47 Orang	5.201.105.572,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	35.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	35.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.400.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.428.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	151.713.917,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Orang	153.055.170,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	456.258.148,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	461.276.989,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.924.715,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	4.978.887,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.372.340,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	35.761.436,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.635.245,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	5.697.233,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	61.784.438,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	62.464.066,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.288.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Paket	14.445.674,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24.620.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	24.891.326,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	309.632.410,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	313.038.367,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	327.324.490,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	330.925.059,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	162.960.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	164.752.560,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	110.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	111.210.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	54.364.490,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	54.962.499,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	192.826.075,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	194.947.162,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.570.650,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	7.653.927,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	185.255.425,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	187.293.235,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	43.126.875,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	43.601.271,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	25.363.625,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17 Unit	25.642.625,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	21.576.250,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45 Unit	21.813.589,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.201.679,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	4.247.896,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
166	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase alokasi belanja infrastruktur Persentase Belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	17,04 % 37,76 %	110.960.003.410,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17,04 % 37,76 %	112.125.563.448,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						[Meningkatnya tata kelola anggaran yang berkinerja]								
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	1.067.534.298,00			-	1.079.277.174,00	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	35.250.662,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	35.638.419,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	27.038.208,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	27.335.628,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD								
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	4.210.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	54 Dokumen	4.257.018,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	20.458.590,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	54 Dokumen	20.683.634,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	10.848.087,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	54 Dokumen	10.967.416,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen	4.477.405,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	54 Dokumen	4.526.656,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	394.534.205,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	398.874.081,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	208.923.628,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	211.221.788,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	131.944.662,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	133.396.053,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	7.657.057,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.741.285,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	7.268.992,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.348.951,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	7.268.992,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	7.348.951,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	207.653.110,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	108 Orang	209.937.294,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						[Meningkatnya tata kelola perbendaharaan yang efisien]								
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	663.639.628,00			-	670.939.664,00	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	562.912.775,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	569.104.816,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	67.221.858,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	67.961.298,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	33.504.995,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	33.873.550,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						[Meningkatnya trasnparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran]	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	100 Persen	110.960.003.410,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	112.125.563.448,00	
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12.533.915,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	12.671.788,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban								
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	43.506.648,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	43.985.221,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran								
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	50.037.835,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	50.588.251,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	34.963.468,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	35.348.066,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	604.263.258,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	555.910.154,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	15.165.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	68.828.032,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Orang	69.585.141,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						[Meningkatnya tata kelola anggaran yang berkinerja]	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	17.04 37.76	110.960.003.410,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	17.04 37.76	112.125.563.448,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	2.530.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	2.530.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	99.200.546.105,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	100.571.329.860,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	6.451.296.918,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	6.270.513.436,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-	217.853.305,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	220.249.693,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	54.638.158,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	55.239.178,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	115.704.460,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	116.977.209,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	47.510.687,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	108 Orang	48.033.306,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
167	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3,88 %	1.151.817.701,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1.226.987.473,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						[Meningkatnya tata kelola barang milik daerah yang memadai]								
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	1.151.817.701,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1.226.987.473,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Satndar harga	107.998.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Satndar harga	109.186.888,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	5.823.825,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	5.887.887,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	25.672.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	25.954.999,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	417.208.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	484.297.471,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	68.399.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	69.151.692,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	137.564.276,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	139.077.483,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	84.356.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	85.284.320,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	15.165.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah								
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	129.912.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	131.341.942,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	49.918.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	50.467.199,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	109.963.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	108 Orang	111.172.592,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.079.069.660,00				5.119.531.070,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN								
168	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP BKPSDM	3 level	3.462.811.800,00			3 level	3.498.424.440,00	
						[Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah,dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan]								
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.150.000,00			-	2.150.000,00	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	200.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	200.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	1.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	250.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Laporan	250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.124.646.300,00			-	3.124.646.300,00	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3.124.396.300,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	33 Orang/bulan	3.124.396.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	250.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Laporan	250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	5.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Orang	5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.791.600,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	2.991.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.944.800,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	14.735.040,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	144.375.500,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Laporan	174.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	94.250.000,00			-	97.126.000,00	
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37 Paket	19.250.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	37 Paket	23.126.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	75.000.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		74.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	45.578.100,00			-	45.000.000,00	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	45.578.100,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	25.175.500,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18 Unit	25.175.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	6.900.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18 Unit	6.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
169	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai elemen NSPK Manajemen Mutasi dan pengembangan karier Nilai elemen NSPK Manajemen Pengembangan kompetensi, Kinerja dan Penghargaan Nilai elemen NSPK Manajemen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN	19 poin 22 poin 31,1 poin	704.826.960,00			19 poin 22 poin 31,1 poin	806.041.440,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						[Meningkatnya pengelolaan kepegawaian daerah]								
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase keterpenuhan ASN tiap tahun yang dikelola secara elektronik	57,53 Persen	245.889.520,00			57,53 Persen	308.902.700,00	
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	996.100,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	1.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	134.775.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	164.775.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi								
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	41.199.700,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	64.990.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN								
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	6 Lembaga	13.778.200,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Lembaga	15.156.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	44.481.520,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	44.481.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	10.659.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN								
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	48.095.540,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	56.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	23.062.800,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	337.745.600,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	335.904.740,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN								
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	25 Orang	10.111.700,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Orang	20.845.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	39.921.800,00			-	49.389.000,00	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	13.726.500,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	14.636.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	280 Orang	11.626.800,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	419 Orang	18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	6 Orang	14.568.500,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Orang	16.753.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			911.430.900,00				815.065.190,00	
170	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
						[Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional]	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan SDM	36.00	911.430.900,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36.00	815.065.190,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	911.430.900,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4	815.065.190,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						INSPEKTORAT			13.717.571.922,00				14.014.005.376,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			13.717.571.922,00				14.014.005.376,00	
171	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
						[Meningkatnya mutu layanan dan keterpenuhan administrasi Inspektorat]	Persentase keterpenuhan layanan administrasi	100	8.456.114.222,00				8.545.571.430,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	58.235.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	58.851.068,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	58.356.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 Persen	4.481.315.522,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	4.528.723.346,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	4.479.811.922,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44 Orang/bulan	4.527.203.839,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.503.600,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	1.519.507,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Barang Milik Daerah Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	435.100,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	439.703,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	435.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	439.703,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	190 Orang	1.502.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	190 Orang	1.518.597.059,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	134 Orang	531.385.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	134 Orang	537.007.329,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	33.659.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	34.015.382,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	19.587.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	19.794.918,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	81.237.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	82.096.406,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.981.100,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	12.107.848,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	403 Laporan	697.025.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	403 Laporan	704.399.331,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	162.960.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	164.683.953,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	78.819.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Unit	79.652.826,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	431.504.800,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Unit	436.069.688,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	100 %	63.442.100,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 %	64.113.254,00	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.742.400,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	8.834.886,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	41.896.800,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24 Laporan	42.340.026,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12.802.900,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Laporan	12.938.342,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			243.470.100,00				246.045.769,00	
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	50.975.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Unit	51.514.264,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	-		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	24.665.000,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	56 Unit	24.925.931,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	167.830.100,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	169.605.574,00	INSPEKTORAT
172	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pemeriksaan eksternal (temuan BPK) dan internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti	95 Persen	4.278.807.400,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	95 Persen	4.407.171.622,00	INSPEKTORAT
						[Menurunnya insidensi penyimpangan/ penyalahgunaan baik keuangan maupun yang bersifat kewenangan]								
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Hasil Pengawasan	28,5	1.670.503.000,00			-	1.720.618.090,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	212.903.100,00	Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Laporan	219.290.193,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	27 Laporan	650.864.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	27 Laporan	670.389.920,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja								
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	35 Laporan	107.349.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35 Laporan	110.569.779,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	59.782.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	61.575.460,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	80 Laporan	425.419.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	80 Laporan	438.182.291,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kerjasama	314.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Kerjasama	323.935,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	213.870.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	220.286.512,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %	2.608.304.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 %	2.686.553.532,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian								
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	100.557.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	103.573.710,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	71 Laporan	2.507.747.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	71 Laporan	2.582.979.822,00	INSPEKTORAT
173	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
						[Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi]	Presentase keterjadian penyalahgunaan/penyimpangan	0.16	982.650.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0.16	1.061.262.324,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 %	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 %	0,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan								
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Rekomendasi	0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan								
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi	0,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	0 Rekomendasi	0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi								
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	34 perangkat daerah	608.762.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		657.463.824,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 perangkat daerah	310.476.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	34 perangkat daerah	335.315.052,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	33.315.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Kegiatan	35.980.200,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	34 perangkat daerah	30.095.600,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30.095.600,00	32.503.248,00	INSPEKTORAT
						KECAMATAN TANETE RIAJA			3.969.703.227,00				4.039.358.656,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								
	7	01				KECAMATAN			3.969.703.227,00				4.039.358.656,00	
174	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
						[Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Kecamatan Tanete Riaja]	Nilai SAKIP	3	3.483.480.794,00				3.519.201.699,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	3.064.558.155,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	3.064.558.155,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.064.558.155,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	34 Orang/bulan	3.064.558.155,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	1.256.000,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	1.256.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang berkinerja Baik	100 Persen	4.598.000,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	4.598.000,00	
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	4.598.000,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4.598.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	238.997.507,00			-	242.528.400,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.457.700,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	2.700.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.844.700,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	2.500.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	32.628.400,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Paket	32.628.400,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.929.440,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Paket	6.500.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.510.000,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.600.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.032.000,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	6.500.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	189.595.267,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	190.100.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat digunakan	100 Persen	35.996.800,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	45.510.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	29.510.000,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	29.510.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1.486.800,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	68.949.500,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	70.300.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	29.161.532,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Laporan	32.000.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36.436.000,00				54.691.144,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	22.718.100,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Unit	32.091.144,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	1.265.000,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	2.000.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5.130.000,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5.822.900,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	8.900.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5.822.900,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	8.900.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
175	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya layanan pemerintahan dan publik kepada masyarakat secara efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan standar pelayanan	100 Persen	18.532.400,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	18.587.997,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
						[Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik]	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85.35	18.532.400,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	85.35	18.587.997,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan								
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	12.638.600,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	12.694.197,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.669.300,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	5.669.300,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase urusan pemerintahan kewenangan perangkat daerah yang diselenggarakan oleh kecamatan	100 Persen	224.500,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	224.500,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	224.500,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		224.500,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
176	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
						[Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan]	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan	100 Persen	406.316.433,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	440.011.241,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30 Lembaga Kemasyarakatan	1.151.700,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Lembaga Kemasyarakatan	1.151.700,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 Persen	188.628.633,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	205.465.441,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	18.460.740,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Lembaga Kemasyarakatan	20.845.441,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	45.886.793,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	123.711.100,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Pokmas / Ormas	123.800.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan								
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina dan diberdayakan	100 Persen	216.536.100,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	233.394.100,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	216.536.100,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Lembaga Kemasyarakatan	233.394.100,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
177	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
						[Meningkatnya Layanan terkait Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas]	Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	100 Persen	30.033.600,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	30.123.700,00	KECAMATAN TANETE RIAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Keterlibatan Aktif Stakeholder dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	30.033.600,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	30.123.700,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	16.270.000,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	16.313.700,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	13.763.600,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	13.810.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
178	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
						[Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum]	Persentase Penyelesaian Tugas Pemerintahan Umum Tepat Waktu	100 Persen	28.115.500,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	28.199.846,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan	100 Persen	28.115.500,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	28.199.846,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13 Orang	26.493.500,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 Orang	26.577.846,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	1.622.000,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	1.622.000,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
179	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
						[Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa]	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina dan diawasi	100 Persen	3.224.500,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	3.234.173,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	3.224.500,00	Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Laporan	3.234.173,00	KECAMATAN TANETE RIAJA
						KECAMATAN MALLUSETASI			5.816.739.511,00				6.569.237.188,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			5.816.739.511,00				6.569.237.188,00	
	7	01				KECAMATAN			5.816.739.511,00				6.569.237.188,00	
180	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
						[Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	Maturitas SPIP	3	4.879.652.541,00				5.570.202.338,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Dokumen	3.500.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.935.991.943,00			-	4.501.098.342,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	3.935.991.943,13	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45 Orang	3.935.991.943,13	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.000.000,00			-	4.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Unit	4.000.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Unit	4.000.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	18.500.000,00			-	18.500.000,00	
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	18.500.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Orang	18.500.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.500.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	6.500.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7.500.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	7.500.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	19.800.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	19.800.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.300.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	10.800.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	11.500.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	11.500.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.500.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	12 Laporan	9.500.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1546 Laporan	354.928.722,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1546 Laporan	277.530.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	6.500.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Paket	6.500.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	92.487.100,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	51.432.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	4.500.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	5.500.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	233.823.452,00			-	482.661.996,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	48.592.720,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	50.782.850,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	70.630.732,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Laporan	72.630.732,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	114.600.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	114.600.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	158.821.324,00			-	152.380.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	64.110.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Unit	61.250.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	7.500.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	7.500.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	15.058.500,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	23 Unit	15.058.500,00	KECAMATAN MALLUSETASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	52.500.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	52.680.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	19.652.824,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Unit	20.750.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
181	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
						[Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik]	Indeks Pelayanan Publik.	3.69	9.423.600,00				11.308.320,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	9.423.600,00			-	11.308.320,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	9.423.600,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	11.308.320,00	KECAMATAN MALLUSETASI
182	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
						[Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan]	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan	100	861.116.670,00				898.844.760,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	1.800.000,00			-	1.800.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga Kemasyarakatan	1.800.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Lembaga Kemasyarakatan	1.800.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga	24.624.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Lembaga	24.624.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	247.328.000,00			3 Unit	326.650.834,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25 Pokmas / Ormas	338.692.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	25 Pokmas / Ormas	135.579.600,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan								
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	247.358.670,00			-	287.238.360,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	247.358.670,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	5 Lembaga Kemasyarakatan	287.238.360,00	KECAMATAN MALLUSETASI
183	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	28.833.100,00			-	32.250.000,00	
						[Meningkatnya Layanan terkait Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas]	Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	100	28.833.100,00				32.250.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	19.629.600,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	19.750.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	9.203.500,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	12.500.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
184	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
						[Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum]	Persentase Penyelesaian Tugas Pemerintahan Umum Tepat Waktu	100 Persen	34.213.600,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	52.881.770,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	29.213.600,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Orang	29.316.240,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
185	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
						[Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa]	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina dan diawasi	100 Persen	3.500.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	3.750.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	3.500.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3.750.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	3.500.000,00	Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	3.750.000,00	KECAMATAN MALLUSETASI
						KECAMATAN SOPPENG RIAJA			4.212.289.144,00				4.325.110.748,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			4.212.289.144,00				4.325.110.748,00	
	7	01				KECAMATAN								
186	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Soppeng Riaja	3 point	3.528.156.044,00			-	3.562.540.535,00	
						[Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundah-undangan kecamatan Soppeng Riaja]	Nilai SAKIP	3	3.528.156.044,00				3.562.540.535,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah terpenuhi	100 persen	2.364.000,00			100 persen	2.531.500,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	1.353.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Dokumen	1.377.000,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.011.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	1.154.500,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	2.902.864.072,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Orang	2.902.864.072,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.296.000,00			-	1.866.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	1.296.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	1.866.000,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	13.794.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Orang	13.794.000,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	373.400,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	394.800,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1.043.800,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	1.076.400,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	37.097.200,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Paket	37.237.200,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.427.302,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	5.734.630,00	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3.360.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	3.360.000,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.088.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	12.938.000,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	202.537.900,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	204.653.400,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	14.938.500,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Paket	22.770.000,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	82.684.600,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	99.410.500,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1.572.400,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	3.072.400,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	10 Unit	169.689.670,00			10 Unit	171.196.933,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	41.000.500,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	42.507.763,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	32.089.170,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Laporan	32.089.170,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	96.600.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	96.600.000,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	54.473.600,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 Laporan	55.211.100,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	680.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	795.000,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unir	8.485.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Unit	8.840.000,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	11.386.600,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	12.294.600,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.000.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	2.500.000,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
187	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya layanan pemerintahan dan publik kepada masyarakat secara efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan standar pelayanan	100 persen	25.492.940,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 persen	25.569.418,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
						[Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik]								
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang terkoordinasi dengan baik	100 persen	24.817.420,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 persen	24.883.518,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	16.556.380,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Laporan	16.622.478,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	8.261.040,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	8.261.040,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase urusan pemerintahan kewenangan perangkat daerah yang diselenggarakan oleh kecamatan	100 Persen	675.520,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	685.900,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	675.520,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	685.900,00	
188	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan	100 persen	608.728.660,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 persen	684.939.562,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
						[Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan]								
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Partisipasi Lembaga masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan di Desa	100 persen	820.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 persen	1.070.107,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35 Lembaga Kemasyarakatan	820.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35 Lembaga Kemasyarakatan	1.070.107,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	20.424.650,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Lembaga Kemasyarakatan	48.435.400,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	184.122.457,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Unit	189.244.525,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	83.792.660,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Pokmas / Ormas	83.014.630,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan								
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	846.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	846.000,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
189	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	100 persen	28.475.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 persen	28.560.425,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
						[Meningkatnya Layanan terkait Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas]	Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	100	28.475.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100	28.560.425,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Keterlibatan Aktif Stakeholder dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	28.475.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 persen	28.560.425,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	18.775.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	18.860.425,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	9.700.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	9.700.000,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
190	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelesaian tugas pemerintahan umum tepat waktu	100 persen	19.858.500,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 persen	19.918.075,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
						[Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum]								
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan	100 persen	19.858.500,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 persen	19.918.075,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13 Orang	18.995.520,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 Orang	19.055.095,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	862.980,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	862.980,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
191	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100 persen	1.578.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 persen	3.582.733,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
						[Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa]								
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	5 Laporan	1.578.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	3.582.733,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 Laporan	1.578.000,00	Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	3.582.733,00	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
						KECAMATAN BALUSU								
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			695.098.205,00				719.444.668,00	
	7	01				KECAMATAN								
192	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	295.847.338,00			-	309.347.338,00	KECAMATAN BALUSU
						[Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	Maturitas SPIP	3	295.847.338,00				309.347.338,00	KECAMATAN BALUSU
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN BALUSU
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	437.000,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	437.000,00	KECAMATAN BALUSU
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.000.000,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	4.500.000,00	KECAMATAN BALUSU
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	74.307.165,00			-	79.307.165,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	27.310.265,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	30.310.265,00	KECAMATAN BALUSU
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	46.996.900,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	48.996.900,00	KECAMATAN BALUSU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
									114.919.100,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa			117.419.100,00	KECAMATAN BALUSU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
									19.497.873,00	Kab. Barru, Balusu, Balusu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20.497.873,00	KECAMATAN BALUSU
						[Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	Maturitas SPIP	3	295.847.338,00				309.347.338,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	61.528.700,00			-	63.528.700,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	38.406.600,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Unit	38.406.600,00	KECAMATAN BALUSU
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 Unit	4.075.500,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	22 Unit	5.075.500,00	KECAMATAN BALUSU
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	8.050.005,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	11.005.000,00	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	8.041.600,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	8.041.600,00	KECAMATAN BALUSU
193	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
						-	-	-	20.777.577,00				21.830.336,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	20.777.577,00			-	21.830.336,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	17.586.170,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	17.638.929,00	KECAMATAN BALUSU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	35.330.830,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	35.330.830,00	KECAMATAN BALUSU
194	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	323.334.850,00			-	332.963.480,00	
						[Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan]								
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	2.327.000,00			-	2.327.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.327.000,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.327.000,00	KECAMATAN BALUSU
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	13.723.820,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Lembaga Kemasyarakatan	13.723.820,00	KECAMATAN BALUSU
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	56.371.370,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN BALUSU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	164.024.480,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Pokmas / Ormas	166.024.480,00	KECAMATAN BALUSU
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	5.696.500,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	5.696.500,00	KECAMATAN BALUSU
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	75.915.500,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Lembaga Kemasyarakatan	78.915.500,00	KECAMATAN BALUSU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
195	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
						[Meningkatnya Layanan terkait Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas]	-	-	21.792.140,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		21.857.175,00	KECAMATAN BALUSU
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	6.876.800,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	7.876.500,00	KECAMATAN BALUSU
						-	-	-	21.792.140,00				21.857.175,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	14.915.000,00			-	14.915.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	14.915.000,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	14.915.000,00	KECAMATAN BALUSU
196	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	31.909.800,00			-	32.005.529,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13 Orang	31.909.800,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 Orang	32.005.529,00	KECAMATAN BALUSU
197	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
						[Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa]	-	-	1.436.500,00				1.440.810,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	1.436.500,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.440.810,00	KECAMATAN BALUSU
	X					NON URUSAN			2.358.150.285,00				2.361.993.285,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
198	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.358.150.285,00			-	2.361.993.285,00	
						-								
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.169.469.275,00			-	2.169.469.275,00	
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.169.469.275,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	23 Orang/bulan	2.169.469.275,00	KECAMATAN BALUSU
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4.328.000,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Paket	4.328.000,00	KECAMATAN BALUSU
	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	49.692.600,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Paket	50.692.600,00	KECAMATAN BALUSU
	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.619.410,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Paket	13.462.410,00	KECAMATAN BALUSU
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.960.000,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	3.960.000,00	KECAMATAN BALUSU
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	118.081.000,00	Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	120.081.000,00	KECAMATAN BALUSU
						KECAMATAN BARRU			8.000.734.364,00				8.231.412.984,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								
	7	01				KECAMATAN			8.000.734.364,00				8.231.412.984,00	
199	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Barru	3 Poin	6.210.440.968,00			-	6.274.843.737,00	
						[Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan]	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	3	6.210.440.968,00				6.274.843.737,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	566.800,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	1.133.600,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	4.690.985.150,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	4.690.985.150,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	4.690.985.150,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	52 Orang/bulan	4.690.985.150,00	KECAMATAN BARRU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 Persen	1.256.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	1.556.000,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan	1.256.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	1.256.000,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang berkinerja Baik	100 Persen	11.396.000,00			100 Persen	13.794.000,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	11.396.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Orang	13.794.000,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			484.900.780,00			-	486.805.650,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6.341.900,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Paket	6.489.500,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	6.321.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Paket	4.241.000,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	77.704.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Paket	80.291.800,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	14.110.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	14.110.000,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.410.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	11.410.000,00	KECAMATAN BARRU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat digunakan	100 Persen	268.850.453,00			100 Persen	251.670.500,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Paket	127.169.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	56 Paket	139.400.400,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	91.120.953,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Unit	79.732.600,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50.560.500,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Unit	32.537.500,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	100 Persen	584.125.313,00			100 Persen	590.411.400,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	492.911.400,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	494.731.400,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	55.143.913,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24 Laporan	59.610.000,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.070.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	36.070.000,00	KECAMATAN BARRU
						-								
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100 Persen	166.672.672,00			100 Persen	236.799.637,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						[Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan]	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	3	6.210.440.968,00			3	6.274.843.737,00	
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	1.960.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Unit	2.705.000,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	18.020.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	43 Unit	19.810.000,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	69.959.872,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Unit	116.181.138,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4.550.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	4.550.000,00	KECAMATAN BARRU
200	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya layanan pemerintahan dan publik kepada masyarakat secara efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan standar pelayanan	100 Persen	52.880.330,00			100 Persen	53.988.830,00	
						[Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik]								
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang terkoordinasi dengan baik	100 Persen	51.801.530,00			100 Persen	52.910.030,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	16.470.700,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 laporan	16.470.700,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	35.330.830,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	35.330.830,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase urusan pemerintahan kewenangan perangkat daerah yang diselenggarakan oleh kecamatan	100 Persen	1.078.800,00			100 Persen	1.078.800,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1.078.800,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	1.078.800,00	KECAMATAN BARRU
201	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
						[Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan]	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan	100 Persen	1.700.515.066,00			100 Persen	1.865.571.723,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35 Lembaga Kemasyarakatan	4.570.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35 lembaga	5.070.000,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 Persen	715.156.066,00			100 Persen	806.512.723,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35 Lembaga Kemasyarakatan	45.500.800,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	35 Lembaga Kemasyarakatan	47.246.800,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	612.931.766,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	620.000.000,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan								
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	1.578.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	1.578.000,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina dan diberdayakan	100 Persen	980.789.000,00			100 Persen	1.053.989.000,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	30 Lembaga Kemasyarakatan	980.789.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Lembaga Kemasyarakatan	1.053.989.000,00	KECAMATAN BARRU
202	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	100 Persen	30.594.000,00			100 Persen	30.685.782,00	
						[Meningkatnya Layanan terkait Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas]								
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Keterlibatan Aktif Stakeholder dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	30.594.000,00			100 Persen	30.685.782,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	21.670.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	21.670.000,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 Laporan	8.924.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Laporan	9.015.782,00	KECAMATAN BARRU
203	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
						[Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum]	Persentase Penyelesaian Tugas Pemerintahan Umum Tepat Waktu	100 Persen	1.234.000,00			100 Persen	1.237.702,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan	100 Persen	1.234.000,00			100 Persen	1.237.702,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	782.500,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	25 Orang	782.500,00	KECAMATAN BARRU
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	451.500,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	455.202,00	KECAMATAN BARRU
204	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
						[Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa]	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina dan diawasi	100 Persen	5.070.000,00			100 Persen	5.085.210,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	5.070.000,00	Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Laporan	5.085.210,00	KECAMATAN BARRU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
						KECAMATAN PUJANANTING			2.900.258.523,00				3.012.336.703,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								
	7	01				KECAMATAN			2.900.258.523,00				3.012.336.703,00	
205	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
						[Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Pujananting]	Rata-rata nilai komponen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada hasil evaluasi atas AKIP Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1 6	2.483.368.303,00				2.503.324.903,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	565.000,00			-	1.750.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3.050.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	3.050.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.048.677.143,00			-	2.048.677.143,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.048.677.143,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	23 Orang/bulan	2.048.677.143,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	500.000,00			-	1.000.000,00	
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	500.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	7.627.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Orang	20.500.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
						[Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Pujananting]								
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	221.196.760,00			-	223.393.560,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.452.800,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 paket	3.452.800,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.589.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	4.000.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	38.646.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	38.646.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.974.760,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Paket	7.974.760,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	4.320.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	4.320.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	30.000.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 laporan	30.000.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	135.000.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 laporan	140.000.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 paket	11.000.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 paket	11.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	29.700.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Unit	29.700.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	25.357.400,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 laporan	25.357.400,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	15.407.500,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 laporan	15.407.500,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.800.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	70.800.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	32.704.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Unit	32.704.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	1.450.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	1.450.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.500.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	15 Unit	7.500.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.535.300,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3	17.500.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.500.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	1.500.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
206	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
						[Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Masyarakat Kec.Pujananting]	-	-	24.000.000,00				24.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	15.749.500,00			-	15.749.500,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	14.249.500,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Laporan	14.249.500,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
207	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	329.967.720,00			-	408.512.400,00	
						[Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan]								
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	3.000.000,00			-	3.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga	3.200.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Lembaga	3.200.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	135.000.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	135.000.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Kelompok	150.000.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Kelompok	150.000.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan								
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	750.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	36.762.400,00			-	36.762.400,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	36.762.400,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Lembaga Kemasyarakatan	36.762.400,00	KECAMATAN PUJANANTING
208	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
						[Mewujudkan Masyarakat yang Aman di Kecamatan Pujananting]	Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Konflik dan Kriminalitas	12	24.109.400,00				26.999.400,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	16.349.400,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	16.349.400,00	KECAMATAN PUJANANTING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	7.760.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Laporan	7.760.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
209	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	37.074.100,00			-	47.500.000,00	
						[Meningkatnya Penyelesaian tugas pemerintahan umum tepat waktu]	-	-	37.074.100,00				47.500.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	37.074.100,00			-	47.500.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13 Orang	32.074.100,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 Orang	32.074.100,00	KECAMATAN PUJANANTING
210	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	1.739.000,00			-	2.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
						[Meningkatnya Pemerintahan desa/kel yang dibina dan diawasi]	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibina dan diawasi	6	1.739.000,00				2.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	1.739.000,00			-	2.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	1.739.000,00	Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN PUJANANTING
						KECAMATAN TANETE RILAU			5.097.138.054,00				5.206.134.057,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			5.097.138.054,00				5.206.134.057,00	
	7	01				KECAMATAN			5.097.138.054,00				5.206.134.057,00	
211	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.292.591.194,00			-	4.336.677.080,00	
						-	-	-	4.292.591.194,00				4.336.677.080,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.127.300,00			-	2.304.500,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen Dokumen	843.900,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 dokumen Dokumen	843.900,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan Laporan	283.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan Laporan	1.460.600,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.688.566.339,00			-	3.688.566.339,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	3.688.566.339,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	45 Orang/bulan	3.688.566.339,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	500.000,00			-	1.400.000,00	
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	500.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Dokumen	1.400.000,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.598.000,00			-	9.196.000,00	
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	4.598.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Orang	9.196.000,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	245.740.395,00			-	255.007.381,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.942.200,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Paket	2.442.200,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	2.661.800,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Paket	3.832.992,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	46.977.900,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	11 Paket	46.977.900,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.590.795,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Paket	7.418.220,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.360.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	3.360.000,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.143.700,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	7.643.700,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	179.064.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	183.332.369,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	129.182.100,00			-	150.271.500,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	25.000.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	78.360.900,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Unit	78.360.900,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.821.200,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Unit	21.910.600,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	173.628.960,00			-	169.628.960,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	127.590.800,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	124.590.800,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	31.558.660,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	24 Laporan	30.558.660,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.479.500,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	14.479.500,00	KECAMATAN TANETE RILAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	49.248.100,00			-	60.302.400,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	28.097.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Unit	33.716.400,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 Unit	1.752.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Unit	1.752.000,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	11.195.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	28 Unit	12.550.000,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	6.704.100,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	9.784.000,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.500.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Unit	2.500.000,00	KECAMATAN TANETE RILAU
212	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	24.607.310,00			-	24.681.132,00	
						[Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau]	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90	24.607.310,00				24.681.132,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	24.161.810,00			-	24.161.810,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	13.864.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	13.864.000,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	10.297.810,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	10.297.810,00	KECAMATAN TANETE RILAU
						-	-	-	24.607.310,00				24.681.132,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	445.500,00			-	519.322,00	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	445.500,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	519.322,00	KECAMATAN TANETE RILAU
213	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	686.882.950,00			-	751.440.075,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	1.500.000,00			-	3.600.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	40 Lembaga Kemasyarakatan	3.600.000,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	304.445.850,00			-	332.929.850,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	23.757.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Lembaga Kemasyarakatan	26.861.000,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	251.769.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	272.269.850,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	27.919.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Pokmas / Ormas	32.799.000,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan								
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	380.937.100,00			-	414.910.225,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	380.937.100,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9 Lembaga Kemasyarakatan	414.910.225,00	KECAMATAN TANETE RILAU
214	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	40.702.000,00			-	40.824.106,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	40.702.000,00			-	40.824.106,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.018.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	24.140.106,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	16.684.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Laporan	16.684.000,00	KECAMATAN TANETE RILAU
215	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	50.354.600,00			-	50.505.664,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	50.354.600,00			-	50.505.664,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13 Orang	48.732.600,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 Orang	48.883.664,00	KECAMATAN TANETE RILAU
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	1.622.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Dokumen	1.622.000,00	KECAMATAN TANETE RILAU
216	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	2.000.000,00			-	2.006.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	2.000.000,00			-	2.006.000,00	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan	2.000.000,00	Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Laporan	2.006.000,00	KECAMATAN TANETE RILAU
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			4.389.460.362,00				4.597.730.715,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			4.389.460.362,00				4.597.730.715,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			4.389.460.362,00				4.597.730.715,00	
217	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 level	2.302.534.697,00			-	2.326.077.797,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
						[Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undanganan]	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3	2.302.534.697,00				2.326.077.797,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	500.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	2.175.076.997,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	2.175.076.997,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.175.076.997,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	20 Orang/bulan	2.175.076.997,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu	100 Persen	494.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	486.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	494.400,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Laporan	486.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah Mengikuti Diklat Kompetensi teknis Terhadap Keseluruhan ASN	100 Persen	2.299.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	2.299.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	2.299.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Orang	2.299.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	31.358.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	40.886.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1.637.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7 Paket	1.637.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	2.143.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Paket	2.143.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.540.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	1.540.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	26.037.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	59 Laporan	35.565.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.107.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	16.457.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2.270.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Unit	13.620.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.837.500,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	2.837.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	100 Persen	55.970.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	57.643.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	28.508.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4 Laporan	30.181.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.262.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	8.262.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.200.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	19.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100 Persen	31.728.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	32.728.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	27.320.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6 Unit	27.320.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8 Unit	4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.408.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	1.408.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
218	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase tingkat keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam kegiatan bela negara dan wawasan kebangsaan	100 Persen	1.060.177.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100%	1.242.140.856,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
						[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan]	Persentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara	100 Persen	1.060.177.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	1.242.140.856,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3 Dokumen	1.060.177.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	1.242.140.856,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 Orang	6.840.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10 Orang	6.840.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka								
							Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	613.080.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	785.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka								
							Jumlah Paskibraka	76 Orang	440.257.700,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	76 Orang	449.800.856,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
219	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	100 Persen	594.362.135,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	596.146.133,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						[Meningkatnya etika dan budaya politik]	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	100 Persen	594.362.135,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	596.146.133,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3 Dokumen	594.362.135,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	596.146.133,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 Orang	594.362.135,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	400 Orang	596.146.133,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
220	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Diawasi	100 Persen	149.999.530,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	149.999.530,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						[Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan]	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan dan diawasi	100 Persen	149.999.530,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	149.999.530,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3 Dokumen	149.999.530,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3 Dokumen	149.999.530,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	70.253.830,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Orang	70.253.830,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	14 Orang	70.291.900,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	14 Orang	70.291.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Laporan	9.453.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Laporan	9.453.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
221	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	15.952.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	16.152.099,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						[Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat]	Persentase pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100	15.952.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Persen	16.152.099,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 Dokumen	15.952.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	16.152.099,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	280 Orang	1.192.800,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	280 Orang	1.192.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	13 Orang	14.759.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	13 Orang	14.959.299,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
222	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penurunan konflik sosial di Lingkungan Masyarakat	50 Persen	266.434.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Persen	267.214.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	Persentase penurunan konflik sosial di lingkungan masyarakat	50 Persen	266.434.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	50 Persen	267.214.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 Dokumen	266.434.300,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	267.214.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70 Orang	11.476.100,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	70 Orang	11.326.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59 Orang	87.855.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	59 Orang	87.855.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	18.355.200,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	18.355.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	148.748.000,00	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	2 Dokumen	149.678.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barru, yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dicapai.

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembanguan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sector, urusan, dan bidang pemerintahan sebagaimana dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Capaian, Target, dan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2029 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barru Tahun 2024-2026

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	HASIL KESEPAKATAN RAKORTEK	TARGET TAHUN 2026	KET
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,92	5,81	5,81	
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,42	6,24	6,24	
3.	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,31	7,48-6,58	7,47	
4.	Rasio Gini	Angka	0,31	0,297	0,298	
5.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen		32,66	39,88	
6.	PDRB Per Kapita	(Rp. Juta)	52,27	58,14	66,75	
7.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,31	73,22	75,77	

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan target IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.2

Capaian, Target, dan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2029 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru Tahun 2024-2026

No	Indikator kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Asumsi Capain Tahun 2025	Target Tahun 2026	Capaian Hingga tahun 2030
I.T.1	**Indeks Gini**	**Poin**	**0,310**	**0,304**	**0,298**	**0,272**
I.S.1	Angka Kemiskinan	%	8,31	7,65	7,47	**6,14**
I.S.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,42	6,33	6,24	**4,88**
I.T.2	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**poin**	**74,51**	**75,22**	**75,77**	**77,97**
I.S.3	Indeks Pendidikan	Poin	67,19	67,51	68,15	**70,68**
	Nilai Rapor dan Pendidikan	Poin	62,62	80,21	82,17	**92,17**
I.S.4	Indeks Kesehatan	Poin	81,15	82,51	83,31	**86,49**
	Prevalensi Stunting	%	21,00	24,6	22,3	**13,0**
I.S.5	Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur	Poin	3,990	3,995	4,000	**4,02**
	Indeks Infrastruktur Daerah	Poin		55	56,85	**65,78**
I.S.7	Indeks Resiko Bencana	Poin	143,89	136,41	128,93	**99,00**
I.S.6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	-	36,56	39,88	**53,15**
	Indeks Ketahanan Daerah			0,53	0,54	**0,61**
I.T.4	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	68,28	70,82	73,37	83,54
I.S.8	Nilai Sakip	Poin	61,43	62,83	65,87	**78,04**
	Indeks Pemerintahan Digital	Poin		-	0,8	**1,80**
	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,480	4,010	4,066	**4,291**
	Maturitas SPIP	Level	2	3	3	**4**
I.T.5	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	52,28	56,26	66,75	108,75
I.S.9	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,92	5,74	5,81	**7,81**

I.S.10	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	4,97	5,29	5,62	**7,21**
I.S.11	**Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**%**	**13,46**	**12,97**	**13,36**	**18,63**
I.T.3	**Indeks Daya Saing Daerah**	**Poin**	**3,42**	**3,54**	**3,66**	**4,14**
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	75,70	76,5	77,3	**80,5**

6.3 Indikator Kinerja Daerah

Indkator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Capaian, target, dan kondisi akhir RPJMD Tahun 2026 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barru selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.3
Realisasi Tahun 2024, Asumsi Capaian Tahun 2025, Target Tahun 2026, dan Kondisi Akhir Tahun 2030

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Asumsi Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2030	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**						
a.	**Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan**						
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	86.67	86.85	87.03	87.76	
2	Skor Pola Pangan Harapan	%	75	78	80	90	
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5027	5500	6000	8000	
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	8.70	7.98	7.27	4.40	
5	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita	-	1680	1958	3070	
6	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	31.79	33.63	35.47	42.83	
b.	**Lingkungan Hidup Berkualitas**						
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	76.65	77.38	78.11	81.03	
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	%	1.19	4.25	7.31	19.56	
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	16.02	20.98	25.94	45.78	
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	2.13	17.704	33.278	95.574	
c.	**Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**						
	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%		0.9	1.68	4.8	

	Indeks Risiko Bencana	Poin	149.41	149.41	50-100	50-100	
	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0.49	0.5	0.51	0.55	
d.	**Demografi**						
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.38	1.394	1.408	1.464	
	Rasio Penduduk	%	96.61	96.61	96.61	96.61	
	Kepadatan Penduduk	Org/km²	165.65	165.65	165.65	194.35	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
a.	**Kesejahteraan Ekonomi**						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.92	5.37	5.81	7.36	
2	Tingkat Kemiskinan	%	8.31	7.45	6.58	4.07	
3	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	52.28	56.26	58,14	108.75	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6.42	6.33	6.24	4.43	
5	Indeks Gini	Poin	0.31	0.3	0.297	0.288	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74.51	75.22	73,22	77.97	
b.	**Kesehatan untuk Semua**						
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	69.7	72.37	72.875	74.895	
2	Indeks Keluarga Sehat	Poin	0.312	0.41	0.51	0.90	
3	Prevalensi Stunting	%	21	19.5	16.31	5	
4	Presentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%	100	100	100	100	
5	Jumlah Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran	210	200	180	150	
6	Angka Keberhasilan Pebgobatan Tuberkulosis	%	100	100	100	100	
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100	100	100	100	
c.	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**						
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.8	8.91	9.02	9.46	
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.63	13.69	13.74	13.97	
3	Angka Literasi/Numerasi	Poin	62.62	64.264	65.908	72.48	
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	38.6	44.88	51.16	76.28	
e.	**Perlindungan Sosial yang Adaptif**						
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	21,44	21,44	21,44	39,03	
f.	**Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**						
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	74,6	74,6	74,6	82,33	
g.	**Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**						
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	70,74	70,92	71,16	72,16	
2	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,36	0,35	0,34	0,31	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
a.	**Daya Saing Sumber Daya Manusia**						
1	Angka Ketergantungan	%	48,66	48,34	48,09	47,22	
b.	**Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**						
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,26	63,55	64,87	69,33	
2	Indeks Inovasi Daerah	Poin	35	36	38	50	
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	80	85	88	95	

c.	**Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru**						
1	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	59,95	63,77	67,86	74,75	
f.	**Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**						
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin	3,99	4,05	4,17	4,77	
2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	98,01	98,38	98,56	99,15	
3	Persentase Desa Mandiri	%	82,50	82,50	82,50	99,50	
g.	**Stabilitas Ekonomi Makro**						
1	Tingkat Inflasi	Poin	1,73	1-3	1-3	1-3	
2	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Poin	5,10	5,13	5,14	5,8	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
a.	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**						
1	Indeks Reformasi Hukum	Poin	96,12	96,20	96,40	97,00	
2	Indeks SPBE	Poin	2,79	2,82	2,84	2,95	
3	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,48	3,62	3,87	4,57	
4	Maturitas SPIP	Poin	3	3,2	3,5	4	
b.	**Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial**						
	Persentase Penegakan Perda	**%**	100	100	100	100	
	Persentase Capaian Aksi HAM	**%**	33,3	42,01	49,36	70,00	
	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani	**%**	100	100	100	100	
c.	**Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**						
	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,19	3,190	3,225	3,330	
	Persentase Jumlah Kerjasama Daerah	**%**	100	100	100	100	

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Capaian, Asumsi, target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.4
Capaian, Asumsi, dan Target Indikator SPM Kabupaten Barru Tahun 2023-2025

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target Nasional	Capaian 2024	Asumsi Capaian 2025	Target 2026
SPM PENDIDIKAN						
1	Pendidikan Dasar (SD) Pendidikan Dasar (SMP)	Jumlah warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	99,30%	100%	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerisasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%	96,51	100%	100%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	98,30%	100%	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerisasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional				
3	Pendidikan Anak usia dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	78,31%	100%	100%
SPM KESEHATAN						
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	70%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	73%	100%	100%

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target Nasional	Capaian 2024	Asumsi Capaian 2025	Target 2026
3	Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	76%	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Bagi Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	82%	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	99%	67,5%	100%
6	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	93%	59,8%	100%
7	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	70%	82,5%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	89%	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	112%	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	102%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkolosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	72%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus)* yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	71%	90%	100%
SPM PEKERJAAN UMUM						
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	97,52%	99,43%	100%

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target Nasional	Capaian 2024	Asumsi Capaian 2025	Target 2026
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	68,8%	100%	100%
SPM PERUMAHAN RAKYAT						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah ya g layak huni	100%	100%	100%	100%
SPM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN						
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsediaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%
	SPM SOSIAL					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitsi sosial di luar panti	100%	98,85%	100%	100%

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target Nasional	Capaian 2024	Asumsi Capaian 2025	Target 2026
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%

6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Capaian Tahun TPB Tahun 2024 dan Penetapan target indicator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Barru berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Srategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025 - 2029 disajikan pada

tabel berikut ini:

Tabel 6.5
Capaian dan Target Indikator TPB Kabupaten Barru
Tahun 2023-2025

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026	OPD PENGAMPU
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umue	Persen	8,31	7,47	BAPPERIDA
		1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jiwa	35,648	37,335	Dinas PPTK
		1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persen	96,75	100	Dinas Kesehatan
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	%	96,75	100	Dinas PUTR Perkim
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	%	68,8	100	Dinas PUTR Perkim
		1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sedera jat.	%	98,82	100	Dinas Pendidikan
		1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sedera jat	%	96,59	100	Dinas Pendidikan
		1.4.1.(j)	Persentase Penduduk umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	%	97,27	99	Dinas Kependudukan dan Capil

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026	OPD PENGAMPU
		1.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Per 100.000 Orang	0,02568	0,0001	BPBD
		1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Desa/ Kel	27	29	BPBD
		1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Jiwa	1474	550	Dinas Sosial dan BPBD
		1.5.1.(c)	Pendampinga n psikososial korban bencana sosial.	Jiwa	2	2	Dinas Sosial dan BPBD
		1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB=Sekolah Madrasah aman Bencana)		3	5	BPBD
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	1,989,500,000	100,000,000	BPBD
		1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	dok	Belum Ada	ADA	BPBD
	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan						
		2.1.1	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelalance of Undernourishment)	%	8,2	7	Dinas Pertanian

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026	OPD PENGAMPU
		2.1.2(a)	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori mjinimum di bawah 1400/kkal/kapita /hari	Persen	7,65	7,65	Dinas Pertanian
		2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun	%	26,9	22,3	Dinas Pertanian
		3.2.2*	Angka kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	%	11	8	Dinas Kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	%	15	8	Dinas Kesehatan
		3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80%imunisasi dasar lengkap pada bayi	%	80	100	Dinas Kesehatan
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	9,52	101	Dinas PMDPPKBPPPA
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	81,24	83	Dinas Pendidikan
		4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	74,36	77	Dinas Pendidikan
		4.1.1.(d)	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Sederajat	%	98,83	99,05	Dinas Pendidikan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2026	OPD PENGAMPU
		4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/sederajat	%	96,59	97,8	Dinas Pendidikan
		4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ Tahun	%	8,54	8,77	Dinas Pendidikan
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	%	6	6	Dinas PMDPPKBPPPA
		5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	%	20	20	Dinas PMDPPKBPPPA
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	97,52	100	Dinas PUPR & Perkim
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	%	10	10	Dinas PUPR & Perkim
		6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	68,8	100	Dinas PUPR & Perkim
		6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa/Kelurahan	55	55	Dinas Kesehatan
		6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Desa/Kelurahan	55	55	Dinas Kesehatan

8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta Rupiah	52,28	66,75	Badan Perencanaa, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
10	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara	10.1.1*	Koefisien Gini	Poin	0,31	0,30	BAPPEDA
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jiwa	0,061	0,01	BPBD
		11.3.2 (b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	Lembaga	Belum ada	Belum ada	BKAD
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	jiwa	0,061	0,01	BPBD
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dok	3	2	Dinas Lingkungan Hidup

16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%	0,01	0,01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diksriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Dok	Belum Ada	Belum Ada	BAG Hukum Setda
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1(a)	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Rp	1.081.662.957.430	970,531,014,774	Badan Pendapatan Daerah

6.6 Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja daerah memuat target penyelenggaraan pemerintahaan daerah melalui indikator kinerja kunci (IKK) yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian indikator kinerja daerah Tahun 2024 serta penetapan target indikator kinerja daerah Kabupaten Barru Tahun 20252030 sebagaimana tertuang pada tabel-tabel berikut

Tabel 6.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kab. Barru
Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**									
1	**Pendidikan**									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 56 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	91,97	100	100	100	100	100	100	

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 712 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,30	100	100	100	100	100	100	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalapendidikan menengpertama	%	96,51	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	%	76,28	100	100	100	100	100	100	
2	**Kesehatan**									
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayan	%	70	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	72	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	75	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan pelayanan kesehatan	%	82	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase anakusia pendidikan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase orang15-59 tahun mendapatkan skkesehatan sesuai standar	%	93	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase warga negara usia 60 utahun ke atas mendapatkan skkesehatan sesuai standar	%	70	100	100	100	100	100	100	

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
10	Persentase penderita hipertyang mendapatkpelayanan kesehatan sesuai standar	%	89	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	112	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	102	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	72	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase orang dengresiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	71	100	100	100	100	100	100	
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Nilai	10,71	16,74	23,37	30,03	42,37	50,00	50,00	
2	Rasio luas kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Nilai	17,96	28	35	50	65	80	80	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Nilai	50,07	50,07	60,86	71,21	82,29	90,00	90,00	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	%	97,53	100	100	100	100	100	100	

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Rasio kepatuhan kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	33,30	42,15	51,09	59,77	67,27	75,00	75,00	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertfikat kompetensi	%	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bmasyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	21,14	34,89	47,09	60,17	75,98	87,00	87,00	
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**									
1	Persentase Gangguan Trantibuyang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	125	125	125	125	125	125	125	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	145	145	145	145	145	145	145	
5	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korba rencana	%	365	100	100	100	100	100	100	

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
6	Persentase pelayan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Waktu tanggap (response time rate) Penanganan Kebakaran	Menit	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	
6	**Sosial**									
1	Persentase penyandang disabilitasnterlantar, anak terlantar, lanjuusia terlantar dan gelandangan pengemiyang terpenuhi kebutuhan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	**Urusan Wajin Non Pelayanan Dasar**									
1	**Tenaga Kerja**									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	70	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	31	35	40	45	50	55	55	
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	22	30	40	50	60	70	70	

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	42,3	50	60	70	80	90	90	
2	**Pemberdayaan dan Perlindungan Anak**									
1	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	Rasio	0,08	0	0	0	0	0	0	
3	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,330	0,298	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288	
3	**Pangan**									
1	Persentase cadangan pangan	%	316	100	100	100	100	100	100	
4	**Pertanahan**									
1	Persentase pemanfaattanah yang sesuai dengan peruntukkan Tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasiliumum	%	78	100	100	100	100	100	100	
3	Tersedianya pembangunan rangka penanamodal.	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0,00	100	100	100	100	100	100	
5	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	**Lingkungan Hidup**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Nilai	76,65	77	77,33	77,51	77,88	78,00	78,00	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	87,04	88,15	88,93	89,59	90,57	93,12	95	

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh PEMDA	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,37	99,40	99,45	99,50	99,55	99,60	100	
2	Persentase anak usia 07 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (Kepemilikan akta kelahiran)	%	53,58	60	65	70	75	80	80	
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	96,85	97	97,50	98	98,50	99	100	
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	PD	33	33	33	33	33	33	33	
7	**Pemberdayaan Masyarakat Dessa**									
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	82,5	85	90,95	100	100	100	100	
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,52	2,80	2,95	3,15	3,20	3,35	3,35	
2	Persentase Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	67,98	80	90	100	100	100	100	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,76	10	15	20	25	30	30	
9	**Perhubungan**									
1	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	Rasio	77,5	80	90	100	100	100	100	
10	**Komunikasi dan Informatika**									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yangterhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	86,04	87	88	89	91	92	93	

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	79	79	80	81	82	84	85	
11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**									
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	63,46	65	67	70	73	75	75	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	1,27	1,55	1,75	1,90	2,05	2,15	2,15	
12	**Penanaman Modal**									
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	76	80	85	90	95	100	100	
13	**Kepemudaan dan Olahraga**									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	3,95	4,5	5	5,5	6	6,5	6,5	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	9,25	12	15	17	20	22	22	
3	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
14	**Statistik**									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
15	**Persandian**									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	34,88	35	37	40	43	47	50	
16	**Kebudayaan**									
1	Terlestraikannya keamanan informasi pemerintah	Persen	0,33	0,5	1	1,5	2	2,5	2,5	
17	**Perpustakaan**									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	71,92	72,00	72,10	72,20	72,30	72,40	72,50	

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	84,17	84,50	84,70	84,90	85,10	85,30	85,50	
18	**Kearsipan**									
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Nilai	75	75	100	100	100	100	100	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai	66,66	66,66	83,33	83,33	100	100	100	
3	**Pelayanan Urusan Pilihan**									
1	**Kelautan dan Perikanan**									
1	Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	26939,65	27,388	27.832	28.283	28.743	29.209	29.210	
2	**Pariwistata**									
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	79	85	95	100	100	100	100	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	3,42	5	10	15	20	25	25	
3	Tingkat Hunian Akomodasi	%	12	20	40	60	80	100	100	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	%	0,12	0,50	1	1,5	2	2,5	2,5	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3,35	4,05	4,75	5,15	5,45	5,75	5,75	
3	**Pertanian**									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	5,33	6,14	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0,76	0,5	0,3	0	0	0	0	

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
4	**Perdagangan**									
1	Persentase Peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	20,83	27,89	34,13	40,11	48,97	56,98	56,98	
2	Persentase kinerja realisasi Pupuk	%	91,66	95	100	100	100	100	100	
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	**Perindustrian**									
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Kota	%	36,26	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	#N/A	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,00	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	%	0,00	100	100	100	100	100	100	

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Poin	100	100	100	100	100	100	100	
4	**Fungsi Urusan Pemerintahan**									
1	**Perencanaan, Keuangan, dan Pengawasan**									
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	23,18	23,15	22,85	22,5	22,15	21,15	20	
2	Rasio PAD	%	12	12,5	13	14	15	16	16	
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,09	3,09	3,10	3,10	3,5	3,5	3,7	
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Poin	3,00	3,09	3,10	3,10	3,2	3,3	3,5	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	71,18	77,47	72,62	71,91	71,21	70,79	68,10	
6	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	**Sekertariat Daerah**									
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	348	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	65	100	100	100	100	100	100	
	Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	2,97	10	20	30	40	50	50	
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**									
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	77,28	80	82	84	85	85	85	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	27,24	30	31	33	34	35	35	

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	14,83	20	25	30	35	40	40	
4	**Manajemen Keuangan**									
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,08	5	4	4	3	3	3	
2	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	-1,46	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	
3	Assets Management	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	3,79	3,78	3,76	3,74	3,72	3,70	3,68	
5	**Transparansi dan Partisipasi Publik**									
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	89,05	90	95	100	100	100	100	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB VII
P E N U T U P

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2026 merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Barru pada Tahun 2026. Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026, diarahkan untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan secara terarah, efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2026;
b. Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan berbasis pada SIPD;
c. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber- sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2026 dengan berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026;
d. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah;
f. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 bila diperlukan;
g. RKPD Kabupaten barru Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2026;
h. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

7.2. Kesimpulan

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 dengan tetap bersinergi dengan jajaran pemerintah Kabupaten, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat;
2. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026 dalam penyusunannya telah menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu Pendekatan Teknokratis, Pendekatan partisipatif dan Bottom-up, Pendekatan Top-Down, dan Pendekatan Politis sehingga diharapkan akan dihasilkan dokumen perencanaan yang memenuhi asas akuntabilitas dan kemanfaatan;
3. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok- pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya;

4. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2026, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN, Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan melalui APBD Prov.Sulsel maupun sumber dana lainnya;
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing- masing

BUPATI BARRU

INA KARTIKA SARI



Bappel Bangda

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH